



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2022**



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
7. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
8. Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah Kab/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
9. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
10. Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
11. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
 12. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
 13. Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
 14. 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang
 15. perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
 16. tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
 17. tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
 18. tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
 19. tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
 20. tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
 21. 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
22. tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7
23. Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
24. Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun
25. 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun
26. 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun
27. 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun
28. 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun
29. 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN
2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pinrang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pinrang.
7. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang untuk Tahun 2022 yang dimulai dari Bulan Januari 2022 dan berakhir pada bulan Desember 2022.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagai mana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari satu buku sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024
- (2) RKPD 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman :
 - a. Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang dalam menyusun Renja PD
 - b. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022
 - c. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang

Pasal 4

Dalam rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022, maka :

1. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
2. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 dalam rangka melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
3. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan

plafon Anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan Penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan dan Tahun atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang Keluaran Kegiatan dan indikator Kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan, Inspektur Kabupaten Pinrang, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Analisis dan Evaluasi Usulan Anggaran Tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :
 1. Lampiran I : Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Lampiran II : Renja Dinas Kesehatan;
 3. Lampiran II : Renja RSUD Lasinrang;
 4. Lampiran IV : Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 5. Lampiran V : Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
 6. Lampiran VI : Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 7. Lampiran VII : Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Lampiran VIII : Renja Dinas Sosial
 9. Lampiran IX : Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Lampiran X	:	Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Lampiran XI	:	Renja Dinas Ketahanan Pangan;
12. Lampiran XII	:	Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Lampiran XIII	:	Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Lampiran XIV	:	Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Lampiran XV	:	Renja Dinas Perhubungan dan Pertanahan
16. Lampiran XVI	:	Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Lampiran XVII	:	Renja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
18. Lampiran XVIII	:	Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Lampiran XIX	:	Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
20. Lampiran XX	:	Renja Perpustakaan dan Kearsipan;
21. Lampiran XXI	:	Renja Dinas Perikanan;
22. Lampiran XXII	:	Renja Dinas Pertanian dan Hortikultura;
23. Lampiran XXIII	:	Renja Dinas Peternakan dan Perkebunan;
24. Lampiran XXIV	:	Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
25. Lampiran XXV	:	Renja Sekretariat Daerah;
26. Lampiran XXVI	:	Renja Sekretariat DPRD;
27. Lampiran XXVII	:	Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Lampiran XXVIII	:	Renja Inspektorat;
29. Lampiran XXIX	:	Renja Badan Keuangan Daerah;
30. Lampiran XXX	:	Renja Badan Kepegawaian Daerah;
31. Lampiran XXXI	:	Renja Kecamatan Watang Sawitto;
32. Lampiran XXXII	:	Renja Kecamatan Paleteang;
33. Lampiran XXXIII	:	Renja Kecamatan Tiroang;

- 34. Lampiran XXXIV : Renja Kecamatan Mattiro Bulu;
- 35. Lampiran XXXV : Renja Kecamatan Suppa;
- 36. Lampiran XXXVI : Renja Kecamatan Mattiro Sompe;
- 37. Lampiran XXXVII : Renja Kecamatan Lanrisang;
- 38. Lampiran XXXVIII : Renja Kecamatan Patampanua;
- 39. Lampiran XXXIX : Renja Kecamatan Duampanua;
- 40. Lampiran XL : Renja Kecamatan Batulappa;
- 41. Lampiran XLI : Renja Kecamatan Cempa;
- 42. Lampiran XLII : Renja Kecamatan Lembang;
- 43. Lampiran XLIII : Renja Badan Kesatuan Bangsa Politik;

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2022 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2022 bertujuan untuk :
 - a. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2022;
 - b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - c. sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Pinrang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 28 JUNI 2021
BUPATI PINRANG



Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 28 JUNI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021 NOMOR

**PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu upaya untuk mengubah keadaan ekonomi suatu bangsa dari negara berkembang menjadi negara yang jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, mengurangi ketimpangan sosial dan ketimpangan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan lapangan pekerjaan.

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah sebagai pencapaian aspirasi setiap warga masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses pengarahan kepada terjadinya pemerataan pembangunan ekonomi (equity) dan pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainability). Proses pembangunan tersebut harus disusun secara terencana sehingga dapat mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya dalam jangka panjang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta dinamika dampak sosial ekonomi masyarakat dari pandemi *Global Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Pinrang tahun 2022 akan fokus pada pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat dengan didukung daya saing sumber daya manusia. Adanya pandemi covid-19 ini membuat segala perencanaan penganggaran yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan harus mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang dihadapi sekarang. Perubahan RKPD ini dilakukan selain untuk memenuhi ketentuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, juga sebagai bentuk perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, adaptif dan responsif.

Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Adapun capaian Ekonomi Makro Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 yaitu : Pertumbuhan Ekonomi 0,44%, PDRB Perkapita 52,93 juta, Perkembangan Inflasi 2,37%, Indeks Gini 0,375 Presentase Penduduk diatas garis Kemiskinan 91,14%, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,19%, dan Indeks Pembangunan Manusia 71,26. Selain memperhatikan capaian diatas,

Penyusunan dokumen RKPD 2022 juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Penyusunan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2022 juga diselaraskan dengan RPJMN 2020-2024, RPJP Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025, dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /*Sustainable Development Goals (SDGs)*, *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke IV (empat) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah tentang RPJMD dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024, sehingga dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat

daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perda perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.

Dokumen RKPD berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional. RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Dokumen perencanaan tahunan ini mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD. RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan SKPD. Dokumen ini juga menjadi acuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan mandatory peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pinrang menyusun dokumen RKPD ini sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahun 2022.

Penyusunan RKPD Kabupaten Pinrang ini dilakukan melalui beberapa tahapan perencanaan yang dilakukan secara teknokratis, Partisipatif, Politis serta Bottom – Up dan Top – down. Pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program-

program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah melalui visi dan misinya. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi. Pendekatan partisipatif mengakomodir masukan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musrenbang. Pendekatan bottom up merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional sedangkan pendekatan top down dapat diimplementasikan dalam bentuk dedicated program.

Pada tahun 2021 ini, selain pendekatan perencanaan tersebut di atas penyusunan RKPD Kabupaten Pinrang telah menggunakan pendekatan holistik, integratif, spasial dan tematik. Dari pendekatan perencanaan tersebut, kemudian dituangkan ke dalam model penganggaran yang berbasis money follow program. Hal ini dimaksudkan agar, program-program prioritas yang belum tercapai dapat segera dilakukan percepatan melalui kinerja masing-masing perangkat daerah guna Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah.

Tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2022 secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan awal RKPD

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada Minggu III Januari 2021 yang diikuti oleh Unsur Organisasi Kemasyarakatan, Forkopimda dan Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang. Selanjutnya secara teknis prioritas Perangkat Daerah 2022 yang termuat dalam rancangan awal RKPD 2022 disampaikan kepada Kecamatan untuk menjadi bahan dalam pelaksanaan Musrenbang di 12 Kecamatan se Kabupaten Pinrang. Terkait dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Perangkat Daerah melakukan Penginputan data awal Rancangan Renja pada e-Planning (SIPD).

2. Rancangan RKPD

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan mulai Minggu II Februari s/d Minggu IV Februari 2021 yang diikuti oleh seluruh Stakeholder yang ada pada Kecamatan yang untuk selanjutnya rumusan hasil Musrenbang Kecamatan tersebut divalidasi/diverifikasi oleh verifikator kecamatan dalam SIPD untuk selanjutnya ke tahapan Forum Perangkat daerah.

3. Rancangan Akhir RKPD

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pinrang Dilaksanakan pada minggu II yang diikuti oleh seluruh stakeholder. Sebelum Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten didahului dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang diikuti oleh

Perwakilan DPRD Kabupaten Pinrang dan Perangkat Daerah Se-Kabupaten Pinrang serta Utusan Masyarakat. Hasil yang diharapkan dari Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah penyempurnaan rancangan akhir RKPD.

4. Penetapan RKPD

Hasil Rumusan Musrenbang Kabupaten Pinrang dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil penyusunan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2022 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM sub urusan Kebakaran Kab/Kota;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86)
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);

49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
50. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24).
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018 tentang tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029.
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.

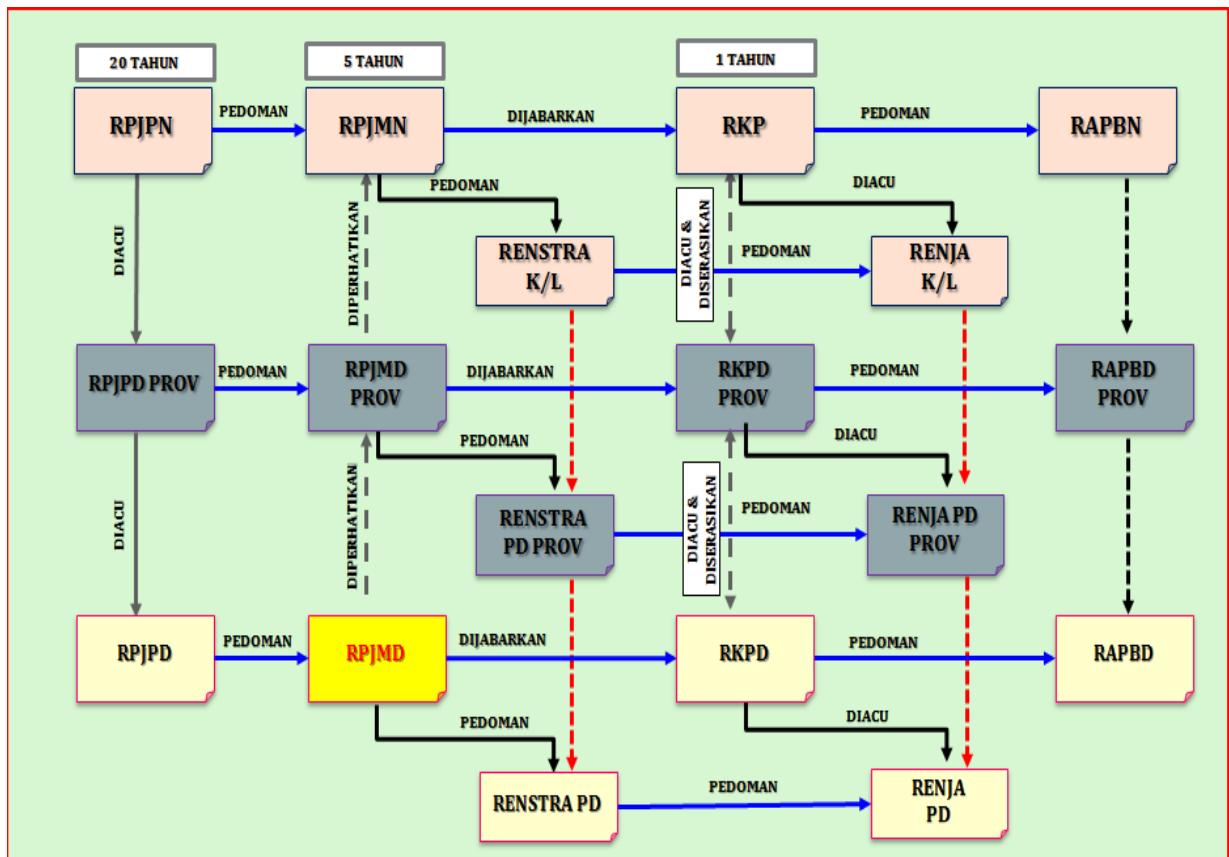
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2022 merupakan dasar penyusunan rancangan KUA Tahun 2022 dan rancangan PPAS tahun 2022 untuk dibahas dan disepakati antara Bupati dengan DPRD. Penyusunan

KUA – PPAS digunakan untuk menjamin konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran, seluruh kebijakan, Program dan Kegiatan serta Anggaran yang kemudian ditindak lanjuti dengan penyusunan APBD Tahun 2022.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar. 1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

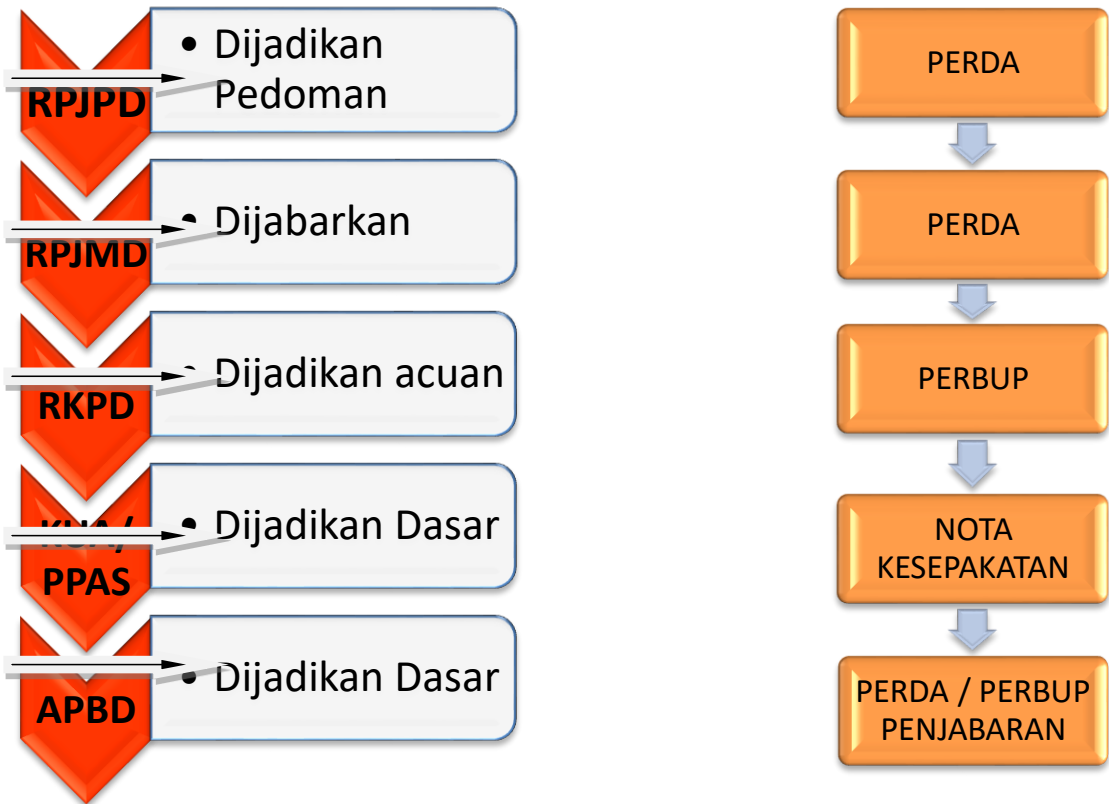


Sumber : Pemandagri 86 Tahun 2017 dan telah diolah Tim Penyusun

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan gambaran dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya. Kemudian RKPD kabupaten dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten, sebagai landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Bupati dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD.

Adapun hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

1.4 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya RKPD tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun maksud disusunnya RKPD 2022 Kabupaten Pinrang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
3. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi.
4. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serts Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2022 adalah untuk:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan.
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2022.
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.
4. Menjamim keterikatan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Pinrang.
7. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
8. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
9. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
10. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
11. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2022, disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran C.3 Penyajian Dokumen RKPD dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang dan gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan

RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2022

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 2022

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak ± 185 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Pinrang terletak pada koordinat 4°10'30" sampai 3°19'13" Lintang Selatan dan antara 119°26'30" sampai 119°47'20" Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Provinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare.

Wilayah administratif Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan dan 109 Desa/Kelurahan (40 Kelurahan dan 69 Desa) dengan luas 1.961,77 Km². Adapun Kecamatan Lembang merupakan kecamatan terluas dengan luas 733,09 Km².

Tabel 2.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang 2020

No	Kecamatan	Luas kecamatan (km2)	Persentase
1	Suppa	74,20	3,78
2	Mattiro Sompe	96,69	4,94
3	Lanrisang	73,01	3,72
4	Mattiro Bulu	132,49	6,75
5	Watang Sawitto	58,97	3,01
6	Paleteang	37,29	1,90
7	Tiroang	77,73	3,96
8	Patampanua	136,85	6,98
9	Cempa	90,30	4,60
10	Duampanua	291,86	14,88
11	Batulappa	158,99	8,10
12	Lembang	733,09	37,37
Pinrang		1.961,77	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2021

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa luas wilayah Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 733,09 Km² atau sekitar 37,37% dari total luas wilayah Kabupaten Pinrang, kemudian selanjutnya Kecamatan Duampanua dengan luas 291,86 Km²

(14,88%). Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yakni Kecamatan Paleteang dengan luas wilayah hanya 37,29 Km² atau sekitar 1,90% dari total luas wilayah Kabupaten Pinrang.

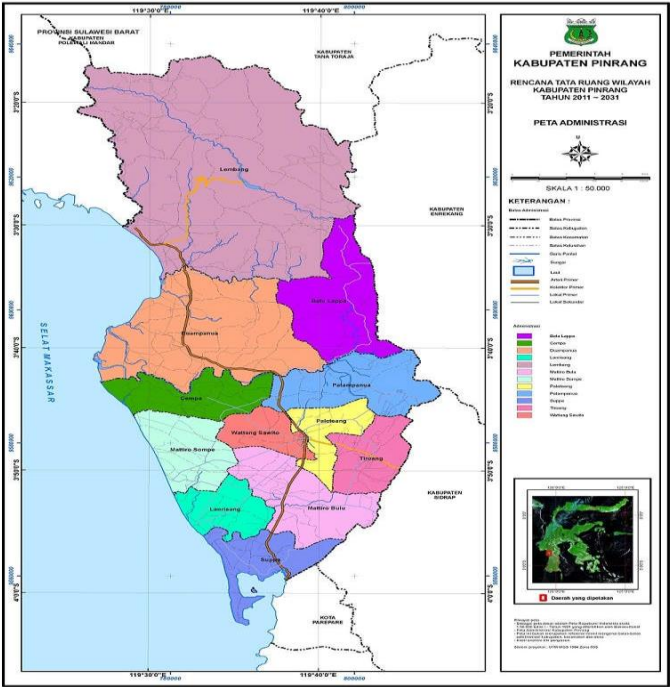
Tabel 2.2
Jumlah Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Pinrang Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	Lingkungan	RK/RW	RT
1	Suppa	8	2	22	5	151	144
2	Mattiro Sompe	7	2	19	4	43	86
3	Lanrisang	6	1	16	3	29	71
4	Mattiro Bulu	7	2	19	6	57	117
5	Watang Sawitto	-	8	-	17	48	112
6	Paleteang	-	6	-	14	22	81
7	Tiroang	-	6	-	13	14	63
8	Patampanua	7	4	17	13	59	102
9	Cempa	6	1	15	2	34	79
10	Duampanua	10	5	25	10	72	155
11	Batulappa	4	1	11	4	25	43
12	Lembang	14	2	37	5	84	193
Pinrang		69	40	181	96	638	1.246

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2021

Berdasarkan tabel 2.2 total wilayah administrasi Kabupaten Pinrang terdiri dari 69 desa, 40 kelurahan, 22 dusun, 96 lingkungan , 638 RK/RW dan 1.246 RT. Secara detail wilayah Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pinrang



Sumber : Perda RTRW Tahun 2012 Kabupaten Pinrang

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Pinrang pada umumnya memiliki permukaan bervariasi, wilayah bagian utara terdiri dataran tinggi dan perbukitan yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut, sehingga wilayah ini cocok dijadikan sebagai areal pengembangan tanaman hortikultural dan sayur-sayuran. Wilayah bagian tengah meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut, daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup potensial untuk pengembangan tanaman perkebunan dan pertanian. Wilayah bagian barat meliputi wilayah pesisir dengan ketinggian 0 sampai 150 meter di atas permukaan laut, daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bila dijadikan sebagai areal pengembangan potensi perikanan. Klasifikasi ketinggian/ topografi di Kabupaten Pinrang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- **Ketinggian 0 – 100 m dpl** Wilayah yang termasuk ke dalam daerah ketinggian ini sebagian besar terletak di wilayah pesisir yang meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawitto, Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa.
- **Ketinggian 100 – 400 m dpl** Wilayah yang termasuk ke dalam daerah dengan ketinggian ini meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Suppa, Mattiro Bulu, dan Kecamatan Paleteang.
- **Ketinggian 400 – 1000 m dpl** Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini sebagian kecil wilayah meliputi Kecamatan Duampanua.
- **Ketinggian di atas 1000 m dpl** Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini terdiri dari sebagian Kecamatan Lembang dan Batulappa.

Tabel 2.3
Ketinggian Wilayah Kabupaten Pinrang Dari Permukaan Laut (M Dpl)

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Ketinggian (Meter)
1	Suppa	Majenang	2-265
2	Mattiro Sompe	Langnga	2-212
3	Lasinrang	Jampue	2-14
4	Mattiro Bulu	Bua	12-228
5	Watang Sawitto	Sawitto	6-14
6	Paleteang	Lalleng bata	14-157
7	Tiroang	Tiroang	13-23
8	Patampanua	Teppo	13-86
9	Cempa	Cempa	2-18
10	Duampanua	Lampa	2-965
11	Batulappa	Bilajeng	20-1007
12	Lembang	Tuppu	2-1908

Sumber: Kabupaten Pinrang dalam Angka 2021

Kondisi topografi Kabupaten Pinrang juga dapat dikelompokkan berdasarkan kemiringan lereng yang terdiri dari:

- 1. Kemiringan 0-3 % Wilayah ini memiliki lahan yang relatif datar yang sebagian besar terletak di kawasan pesisir meliputi wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawito, Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa.
- 2. Kemiringan 3 – 8 % Wilayah ini memiliki permukaan datar yang relatif bergelombang. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi demikian terdiri dari Kecamatan, Suppa, Mattiro Bulu, Batulappa dan Kecamatan Paleteang.
- 3. Kemiringan 8 – 45 % Wilayah ini memiliki permukaan yang bergelombang sampai agak curam. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi seperti ini adalah Wilayah Kecamatan Duampanua.
- 4. Kemiringan > 45 % Wilayah ini memiliki permukaan curam yang bergunung-gunung. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi ini meliputi wilayahkaki pegunungan seperti Kecamatan Lembang.

Klasifikasi ketinggian/ Topografi kelerengan di Kabupaten Pinrang berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Luas dan Persentase Wilayah Kabupaten Pinrang Berdasarkan Kelerengan
Tahun 2020

No	Kelerengan	Kriteria	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 - 2	Datar	100.370,20	51,1
2	2-15	Landai	15.696,80	8,1
3	15 - 40	Berbukit	50.246	25,6
4	> 40	Berbukit	29.864	15,2
Jumlah			196.177	100

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang 2021

Kondisi Geologi wilayah Kabupaten Pinrang dari hasil pengamatan dan kompilasi Peta Geologi Kabupaten Pinrang, maka susunan lapisan batuan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Endapan alluvium dan sungai, endapan alluvium dan sungai mempunyai ketebalan antara 100-150 meter, terdiri dari atas lempung, lanau, pasir dan kerikil. Pada umumnya endapan lapisan ini mempunyai kelulusan air yang bervariasi dan kecil hingga tinggi. Potensi air tanah dangkal cukup besar tetapi sebagian wilayah kualitasnya kurang baik. Muka air tanah dangkal 1-1,50 meter.
- 2. Batuan gunung api tersusun atas breksi dengan komponen bersusun trakht dan andesit, tufa batu apung, batu pasir terfaan, konglomerat dan breki terfaan, ketebalannya berkisar 500 meter, penyebarannya dibagian utara Kota Pinrang, sekitar Bulu Lemo, Bulu Pakoro sedangkan dibagian selatan sekitar Bulu Manarang, Bulu Paleteang, Bulu Lasako (berbatasan dengan

Parepare). Kearah Bungin terdapat batu gamping terumbu yang umumnya relative sama dengan batuan gunung api.

3. Batuan aliran lava, batuan aliran lava bersusun trakhit abu-abu muda hingga putih, bekekar tiang, penyebarannya kearah daerah Kabupaten Pinrang, yaitu sekitar Kecamatan Lembang dan Kecamatan Duampanua.
4. Batuan konglomerat (Formasi Walanae), batuan ini terletak dibagian Timur Laut Pinrang, sekitar Malimpung sampai kewilayah Kabupaten Sidrap, satuan batuan ini terdiri atas konglomerat, sedikit batu pasir glakonit dan serpih dan membentuk morfologi bergelombang dan tebalnya kira-kira hingga 400meter.
5. Batuan lava bersusun basol hingga andesit, satuan batuan ini berbentuk lava bantal, breksi andesit piroksin dan andesit trakhit. Tebalnya 50 hingga 100 meter dengan penyebaran sekitar Bulu Tirasa dan Pakoro.
6. Batu pasir, satuan batuan ini bersusun andesit, batu lanau, konglomerat dan breksi. Struktur sesar diperkirakan terdapat pada batuan aliran lava dan batu pasir bersusun andesit, berupa sesar normal.

Jenis tanah wilayah Kabupaten Pinrang dari hasil pengamatan dan kompilasi Peta Jenis Kabupaten Pinrang, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Suppa Aluvial Kelabu; Grumosol Kelabu; Aluvial Hidromorf; Regosol Kelabu.
- Mattiro Sompe Aluvial Hidromorf; Aluvial Kelabu Kekuningan; Aluvial Kelabu Olif
- Lanrisang Grumosol Kelabu;
- Mattiro Bulu Regosol Kelabu; Grumosol Kelabu; Brown Forest Soil
- Watang Sawitto Aluvial Kelabu; Aluvial Hidromorf; Aluvial Kelabu Olif; Regosol Kelabu.
- Paleteang Regosol Coklat Kelabuan; Aluvial Kelabu Olif; Aluvial Kelabu Kekuningan; Regosol Kelabu Kekuningan.
- Tiroang Regosol Kelabu; Brown Forest Soil;
- Patampanua Aluvial Kelabu Kekuningan; Aluvial Hidromorf; Regosol Kelabu Kekuningan; Fodsolik Coklat; Aluvial Kelabu Olif; Brown Forest Soil; Fodsolik Coklat Kekuningan
- Cempa Aluvial Kelabu Kekuningan; Aluvial Hidromorf; Aluvial Kelabu Olif
- Duampanua Fodsolik Coklat Kekuningan; Aluvial Kelabu Kekuningan; Fodsolik Coklat; Aluvial Kelabu Olif; Aluvial Hidromorf.
- Batulappa Fodsolik Coklat; Fodsolik Coklat Kekuningan.
- Lembang Brown Forest Soil

Keadaan hidrologi Kabupaten Pinrang, berdasarkan hasil data yang diperoleh, ditemukan daerah-daerah yang masih mengalami genangan periodik. Sedangkan untuk sumber air permukaan antara lain berasal dari aliran sungai yang mengalir wilayah-wilayah Kabupaten Pinrang. Sungai-

sungai yang ada di Kabupaten Pinrang adalah sungai Kariango, Sungai Mamasa, Lasape dan Sungai Saddang. Sungai yang terbesar adalah Sungai Saddang yang berhulu di atas pegunungan, airnya mengalir dan bermuara ke Selat Makassar. Sungai Saddang yang mengalir sepanjang tahun dengan debit yang relatif besar sangat potensial dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, air bersih dan reservoir untuk pembangkit listrik. Selain Sungai Saddang, air tanah dangkal berupa sumur-sumur yang dibuat oleh masyarakat dan air tanah dalam berupa sumur artesis juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih. Selain itu, pada kondisi tertentu terutama pada saat musim hujan sungai tersebut mempengaruhi sebagian wilayah Kabupaten Pinrang, khususnya di daerah aliran sungai, karena memungkinkan adanya limpasan air sungai yang merupakan ancaman banjir di daerah yang bersangkutan.

Klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, tipe iklim Wilayah Kabupaten Pinrang termasuk tipe A dan B dengan curah hujan terjadi pada bulan Desember hingga Juni dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai September. Kriteria tipe iklim menurut Oldeman-Syarifuddin bulan basah di Kabupaten Pinrang tercatat 7 - 9 bulan, bulan lembab 1 - 2 bulan dan bulan kering 2 - 4 bulan. Tipe iklim menurut klasifikasi Oldeman - Syarifuddin adalah iklim B dan C. Curah hujan tahunan berkisar 1526 mm, Evaporasi rata-rata tahunan di Kabupaten Pinrang berkisar antara 5,5 mm/hari sampai 8,7 mm/hari. Suhu rata-rata normal antara 27°C dengan kelembaban udara 82% - 85%.

Di Kabupaten Pinrang terdapat 5 (lima) stasiun curah hujan antara lain stasiun curah hujan Pinrang dengan periode pengamatan 30 tahun, stasiun curah hujan lainnya dengan periode pengamatan rata-rata baru 12 tahun. Stasiun curah hujan tersebut antara lain: stasiun curah hujan Malimpung, Langnga, Benteng dan Lasape.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pinrang, rata-rata curah hujan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 55,92 mm³/bulan. Curah hujan terendah terjadi pada bulan September yakni sebesar 1 mm³, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari yakni sebesar 154 mm³.

Tabel 2.5
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Januari	97	6
Februari	154	8
Maret	78	6
April	105	11
Mei	11	4
Juni	54	8

Juli	7	3
Agustus	14	4
September	1	...
Oktober	34	3
November	23	5
Desember	93	...

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang2021

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya.

A. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung terdiri atas :

1). Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:

a. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung dengan luas 45.168 Ha (empat puluh lima ribu seratus enam puluh delapan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

b. Kawasan resapan air.

Kawasan resapan air ditetapkan di kawasan sekitar hutan lindung dan kawasan sekitar daerah aliran sungai di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

2) Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi sungai, danau atau waduk, dan RTH kawasan perkotaan dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas :

a. Kawasan sempadan sungai;

Kawasan sempadan sungai ditetapkan di Sungai Kariango dan Sungai Saddang dengan ketentuan :

- daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
- daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
- daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
- daratan sepanjang tepian sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 5 m dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
- daratan sepanjang tepian sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 3 m dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

b. Kawasan sempadan pantai;

Kawasan sempadan pantai ditetapkan di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Pinrang sepanjang 101 (seratus satu) kilometer di Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Lembang, dengan ketentuan :

- daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

c. Kawasan sekitar danau atau waduk

Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan di Bendungan Benteng Kecamatan Patampanua dengan ketentuan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi.

d. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

Kawasan ruang terbuka hijau kawasan berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, social budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL dan PPK di Kabupaten Pinrang.

3). Kawasan lindung geologi

Kawasan lindung geologi ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah.

Kawasan lindung geologi, terdiri atas:

- a. Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tsunami, dan kawasan rawan abrasi.

1. Kawasan rawan gempa bumi

Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pinrang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

2. Kawasan rawan tsunami

Kawasan rawan tsunami ditetapkan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pinrang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

3. Kawasan rawan abrasi

Kawasan rawan abrasi ditetapkan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pinrang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah dan kawasan sekitar mata air.

Kawasan imbuhan air tanah meliputi daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi air tanah berupa kawasan Cadangan Air Tanah Pinrang Sidenreng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Duampanua.

Kawasan sekitar mata air ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan BatuLappa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang dengan ketentuan paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

4). Kawasan lindung lainnya.

Kawasan lindung lainnya sebagaimana ditetapkan dalam rangka melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Kawasan lindung lainnya merupakan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau ditetapkan di kawasan:

- a. Konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.
- b. Konservasi perairan laut berupa kawasan konservasi terumbu karang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

5). Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya. Kawasan rawan bencana alam, terdiri atas:

- a. Kawasan rawan banjir;
- b. Kawasan rawan gelombang pasang; dan
- c. Kawasan rawan tanah longsor.

Kawasan rawan banjir ditetapkan di kawasan daerah aliran Sungai Saddang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Duampanua dengan luasan 5.465 (lima ribu empat ratus enam puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Suppa dengan luasan hektar, sebagian wilayah Kecamatan Cempa dengan luasan 658 (enam ratus lima puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe dengan luasan 1.741 (seribu tujuh ratus empat puluh satu) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang dengan luasan 97 (sembilan puluh tujuh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua dengan luasan 65,92 (enam puluh lima koma sembilan puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang dengan luasan 359,81 (tiga ratus lima puluh sembilan

koma delapan puluh satu) hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Batulappa dengan luasan 9,45 (sembilan koma empat puluh lima) hektar.

Kawasan rawan gelombang pasang, ditetapkan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pinrang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lembang, sebagian wilayah Kecamatan Batu Lappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Duampanua.

Tabel 2.6
Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenisnya Dirinci Tiap Kecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2020

No	Kecamatan	Banjir	Kebakaran	Kekeringan	Angin Topan	Tanah Longsor
1	Suppa	-	-	-	-	-
2	Mattiro Sompe	3	-	-	7	-
3	Lanrisang	-	-	1	1	-
4	Mattiro Bulu	6	-	1	-	-
5	Watang Sawitto	1	-	-	1	-
6	Paleteang	5	-	-	1	-
7	Tiroang	6	-	-	-	-
8	Patampanua	-	-	-	-	-
9	Cempa	-	-	-	-	-
10	Duampanua	1	-	-	5	-
11	Batulappa	-	-	2	-	-
12	Lembang	1	-	-	1	5
Jumlah		23	-	4	16	5

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2021

Untuk menangani masalah bencana, maka dibuat jalur dan ruang evakuasi bencana. Jalur dan ruang evakuasi bencana bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana. Jalur dan ruang evakuasi bencana ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala lingkungan berupa jalur evakuasi bencana (escape way) dan ruang evakuasi bencana (*melting point*). Jalur evakuasi bencana meliputi:

Tabel 2.7
Jalur Evakuasi Bencana Di Kabupaten Pinrang

JENIS BENCANA	LOKASI
Gelombang Pasang dan Tsunami	- ruas jalan Lero Minralo – Tana Mili, ruas jalan Sabangparu – Ladea – Tonrognge dan ruas jalan Ujung Lero – Tana Mili di Kecamatan Suppa
	- ruas jalan Jampue – Paladang – Polewali – Tonrongnge di Kecamatan Lanrisang;
	- ruas jalan Langnga – Patobong – Cappakala di Kecamatan Mattiro Sompe;
	- ruas jalan Wakka – Akkajang – Cempa Pasar di Kecamatan Cempa;
	- ruas jalan Kajuanging – Tuppu dan ruas jalan Pajalele – Teppo – Cenrana di Kecamatan Lembang; dan
	- ruas jalan Paria – Pekkabata, ruas jalan Serang - Kappe – Data, dan ruas jalan Maroneng - Bungi – Rajang di Kecamatan Duampanua.

Sumber data : Perda RTRW Kabupaten Pinrang Tahun 2012 -2032

Jalur evakuasi bencana yang tercantum diatas direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.

Ruang evakuasi bencana (Melting point) merupakan kawasan yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi korban bencana meliputi:

- a. Pos Angkatan Laut dan SD 230 Majjakka B di Kecamatan Suppa;
- b. Lapangan Sepak Bola Cappakala di Kecamatan Mattiro Sompe;
- c. Kantor Camat Cempa di Kecamatan Cempa;
- d. Lapangan Sepakbola Pekkabata dan lapangan sepak bola Rajang di Kecamatan Duampanua; dan
- e. SD 141 Tuppu dan Lapangan Terbuka Cenrana di Kecamatan Lembang.

Dalam dokumen KLHS Kabupaten Pinrang, salah satu kajian risiko yang dihadirkan adalah kajian risiko bencana. Kajian ini didasarkan pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020 yang telah dipublikasikan. Pengkajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan di suatu daerah sehingga dapat dianalisa terhadap kemungkinan timbulnya potensi bencana di daerah tersebut. Setelah diketahui kemungkinan potensi bencana, dapat ditentukan langkah-langkah sistematis terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pengurangan risiko masing-masing bencana yang berpotensi. Secara umum, pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas. Pada dasarnya, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana telah dilakukan di Kabupaten Pinrang tahun 2011. Upaya tersebut adalah dengan

penyusunan Dokumen RPB tahun 2011 sekaligus merangkumpengkajianrisikobencana. Batasan dalam pengkajian tersebut selama 5 (lima) tahun sehingga kajian risiko bencana yang disusun sekarang merupakan pengembangan dari kajian sebelumnya. Dasar pengkajian risiko bencana disamakan dengan aturan terkait kebencanaan hingga tingkat nasional. Pengkajian tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkatnasional.

Pengkajian tersebut didasarkan dengan indeks masing-masing bencana terhadap bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Metodologi yang digunakan untuk menerjemahkan indeks tersebut untuk menghasilkan tingkat risiko untuk setiap bencana di suatu daerah. Penyempurnaan terhadap metodologi yang digunakan akan berpengaruh terhadap proses pengkajian risiko dan hasil kajian. Pengaruh tersebut terkait dengan komponen-komponen yang digunakan dalam pengkajian, yaitu bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko. Adapun hasil pengkajian risiko bencana di Kabupaten Pinrang dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Jenis Bahaya dan Resiko Tinggi di Kabupaten Pinrang

Jenis Bahaya	Luas (ha)	Persentase Luas terhadap Wilayah Kabupaten (%)
Banjir	106,59	0,06
Cuaca Ekstrim	47.899,56	24,78
Gempa Bumi	79.790,31	41,28
Karhutla	19.978,69	10,34
Tanah Longsor	51.924,16	26,86

Sumber data : Laporan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019 -2024 Kabupaten Pinrang

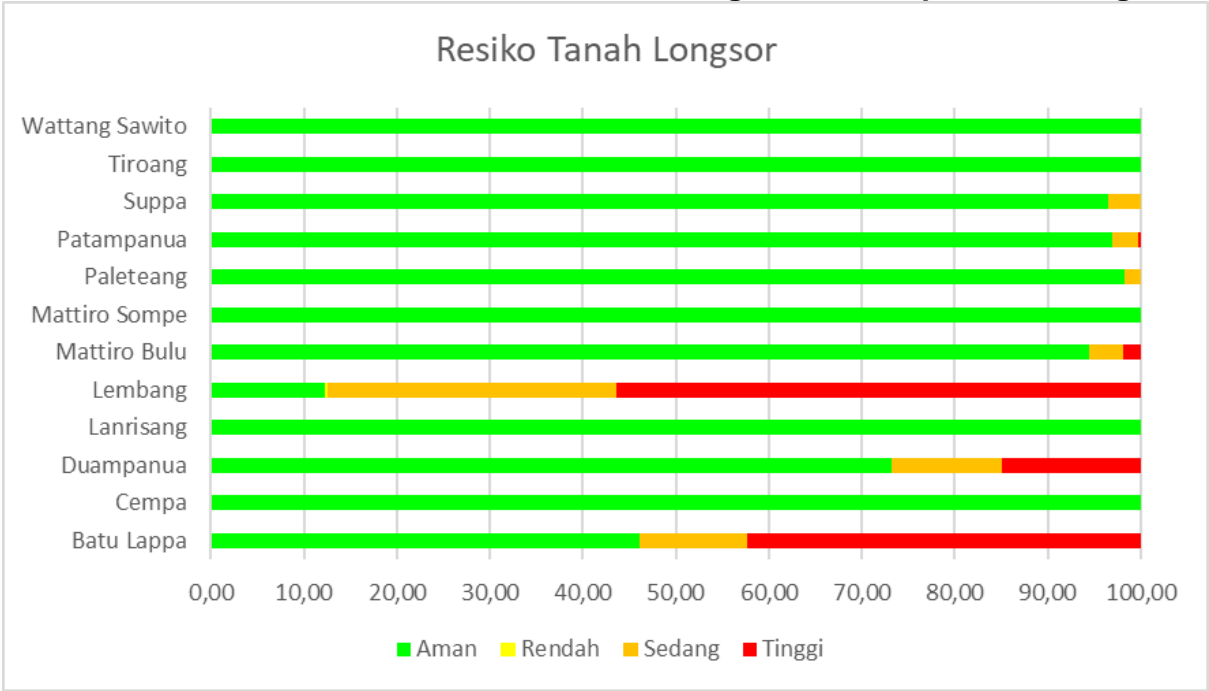
Berdasarkan hasil kajian resiko bencana di Kabupaten Pinrang, menunjukkan bahwa di Kabupaten Pinrang terdapat 5 jenis bahaya yang berisiko tinggi, yaitu banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, dan tanah longsor. Lokasi bencana tanah longsor yang tertinggi berada di Kecamatan Lembang karena penutupan lahan yang kurang baik (perubahan tutupan lahan) serta tergolong daerah pegunungan.

Tabel 2.9
Lokasi Resiko Tanah Longsor Tinggi di Kabupaten Pinrang

Kecamatan	Luas Kategori Bencana Tanah Longsor			
	Aman	Rendah	Sedang	Tinggi
Batulappa	7.418,87	18,02	1.849,21	6.826,99
Cempa	8.927,85			
Duampanua	21.050,00	12,25	3.396,27	4.314,80
Lanrisang	6.389,68			
Lembang	8.774,91	192,03	22.347,90	40.506,75
Mattiro Bulu	12.075,19		468,52	246,15
Mattiro Sompe	8.971,62			
Paleteang	4.867,04		85,65	
Patampanua	12.177,54		350,34	29,48
Suppa	7.562,64		270,97	
Tiroang	7.317,55			
Wattang Sawitto	6.837,72			
Total (ha)	112.370,61	222,29	28.768,86	51.924,16
Total (%)	58,14	0,12	14,88	26,86

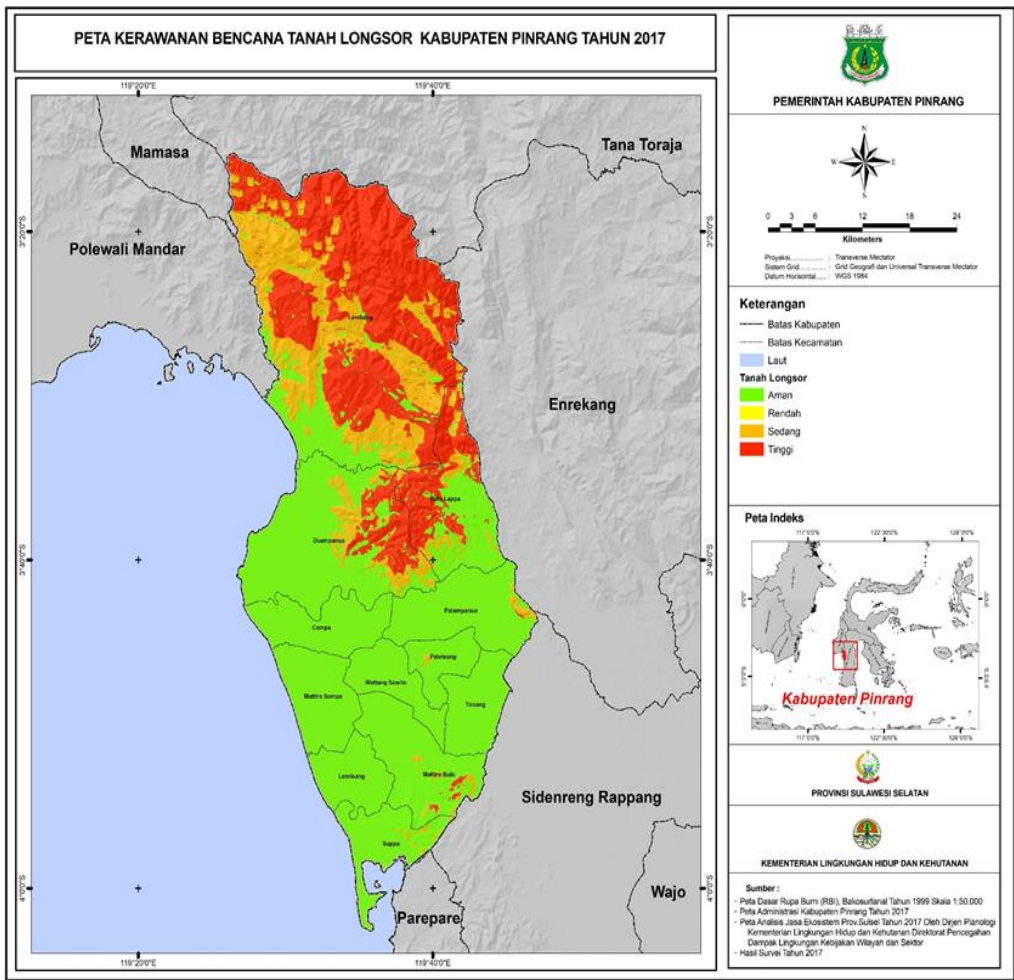
Sumber data : Laporan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019 -2024 Kabupaten Pinrang

Gambar 2.2
Grafik Persentase Luas Resiko Tanah Longsor di Kabupaten Pinrang



Sumber data : Laporan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019 -2024 Kabupaten Pinrang

Gambar 2.3
Peta Kerawanan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Pinrang Tahun 2017



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa berdasarkan administrasi potensi terjadinya resiko longsor terbesar terdapat pada Kecamatan Lembang dan Batulappa. Hal ini dikarenakan topografi kedua kecamatan tersebut sebagian wilayahnya berupa pengunungan. Sementara penggunaan lahannya umumnya berupa semak belukar dan pertanian, dimana pemanfaatan lahan secara umum tidak berkelanjutan.

B. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya, terdiri atas :

- 1. kawasan peruntukan hutan produksi;
- 2. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- 3. kawasan peruntukan pertanian;
- 4. kawasan peruntukan perikanan;
- 5. kawasan peruntukan pertambangan;
- 6. kawasan peruntukan industri;
- 7. kawasan peruntukan pariwisata;
- 8. kawasan peruntukan permukiman; dan

9. kawasan peruntukan lainnya.

Pengembangan wilayah Kabupaten Pinrang diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pinrang. Salah satu rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pinrang meliputi pusat kegiatan. Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Pinrang, terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi : pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama; dan sistem jaringan prasarana lainnya.

a. Pusat-Pusat Kegiatan

Salah satu Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pinrang meliputi pusat kegiatan. Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Pinrang, terdiri atas pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Tabel 2.10
Pusat – Pusat Kegiatan Kabupaten Pinrang

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)		Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
	Kawasan Perkotaan Pinrang yang meliputi :	- Kawasan Perkotaan Watang Suppa di Kecamatan Suppa;	meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri
-	sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto,	- Kawasan Perkotaan Teppo di Kecamatan Patampanua;	- Pusat permukiman perdesaan Lero di Kecamatan Suppa;
-	sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, dan	- Kawasan Perkotaan Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu;	- Pusat Permukiman perdesaan Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe;
-	sebagian wilayah Kecamatan Tiroang;	- Kawasan Perkotaan Lampa Pekkabata di Kecamatan Duampanua;	- Pusat Permukiman perdesaanWaetuo di Kecamatan Lanrisang;

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
-	<div>- Kawasan Perkotaan Kassa di Kecamatan Batulappapa; dan</div> <div>- Kawasan Perkotaan Taddokkong di Kecamatan Lembang</div> <div>-</div> <div>-</div>	<div>- Pusat Permukiman perdesaan Tadang Palie di Kecamatan Cempa;</div> <div>- Pusat Permukiman perdesaan Bungi di Kecamatan Duampanua;</div> <div>- Pusat Permukiman perdesaan Lembang Mesakada di Kecamatan Lembang;</div> <div>- Pusat permukiman perdesaan Sali-Sali di Kecamatan Lembang; dan</div> <div>- Pusat permukiman perdesaan Basseang di Kecamatan Lembang</div>

Sumber data : Perda RTRW Kabupaten Pinrang Tahun 2012 -2032

b. Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem jaringan prasarana utama yang ada Kabupaten Pinrang terdiri dari Sistem jaringan transportasi darat, Sistem jaringan transportasi laut, Sistem jaringan transportasi udara.

1. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas Sistem jaringan jalan dan Sistem jaringan perkeretaapian.

a. Sistem jaringan jalan

Sistem jaringan jalan terdiri atas jaringan jalan; dan lalu lintas dan angkutan jalan. Sistem jaringan jalan terdiri atas jaringan jalan arteri primer; jaringan jalan kolektor primer; jaringan jalan lokal.

Tabel 2.11
Sistem Jaringan di Kabupaten Pinrang

SISTEM JARINGAN JALAN	LOKASI
1. Jaringan jalan arteri Primer	<div>a. Ruas Batas Provinsi Sulawesi Barat – Batas Kota Pinrang sepanjang 43,554 (empat puluh tiga koma lima lima empat) kilometer;</div> <div>b. Ruas jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 0,891 (nol koma delapan sembilan satu) kilometer;</div> <div>c. Ruas jalan Ahmad Yani sepanjang 2,804 (dua koma delapan kosong empat) kilometer;</div>

2. Jaringan jalan kolektor primer	d.	Ruas Batas Kota Pinrang – Batas Kota Parepare sepanjang 20,154 (dua puluh koma satu lima empat) kilometer; dan
	e.	Ruas jalan Jenderal Sudirman sepanjang 2,912 (dua koma sembilan satu dua) kilometer.
	a.	Ruas Pinrang –Rappang sepanjang 19,68 (sembilan belas koma enam delapan) kilometer;
	b.	Ruas jalan Pincara – Malimpung – Malaga Batas Kabupaten Enrekang sepanjang 22,50 (dua puluh dua koma lima nol) kilometer; dan
	c.	Ruas jalan Tuppu – Bakarlu sepanjang 20,00 (dua puluh koma nol) kilometer.

Sumber data : Perda RTRW Kabupaten Pinrang Tahun 2012 – 2023

Lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Pinrang meliputi trayek angkutan dan terminal.

➤ Trayek angkutan , meliputi :

- Trayek angkutan barang , terdiri atas Trayek angkutan barang dalam provinsi yang melayani pergerakan moda angkutan barang antara Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan Trayek angkutan barang antar provinsi yang melayani pergerakan moda angkutan barang antara Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Pulau Sulawesi.
- Trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP) yang melayani pergerakan moda angkutan umum penumpang antara Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Pulau Sulawesi;
- Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) yang melayani pergerakan moda angkutan umum penumpang antara Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- Trayek angkutan penumpang perdesaan yang melayani pergerakan moda angkutan umum penumpang antara Kawasan Perkotaan Pinrang dengan PPK dalam wilayah Kabupaten Pinrang.

➤ Terminal , meliputi :

- Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Paleteang;
- Rencana pembangunan terminal penumpang tipe C, terdiri dari:
 - 1) Terminal Suppa di Kecamatan Suppa;
 - 2) Terminal Jampue di Kecamatan Lanrisang;
 - 3) Terminal Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe;
 - 4) Terminal Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu;

- 5) Terminal Tiroang di Kecamatan Tiroang;
- 6) Terminal Teppo di Kecamatan Patampanua;
- 7) Terminal Cempa di Kecamatan Cempa;
- 8) Terminal Kassa di Kecamatan Batulappa;
- 9) Terminal Pekkabata di Kecamatan Duampanua; dan
- 10) Terminal Taddokkong di Kecamatan Lembang.

Terminal penumpang tipe C dan rencana pembangunan terminal penumpang tipe C merupakan terminal terpadu.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:

- Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Wewenang penyelenggaraan jalan nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum.
- Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Wewenang penyelenggaraan jalan ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Nama ruas – ruas jalan provinsi yang melalui Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada Tabel 2. 18.



Tabel 2.12
Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Kabupaten Pinrang

NO	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG RUAS (Km)
	LAMA	BARU		
	NO. RUAS	NO. RUAS		
1	079	080	Pinrang – Rappang	19,68
2	080	081	Paleteang - Malimpung - Malaga – Kabere	24,23
3	081	082	Tuppu - Pao- Pamulungan - Batas Kab. Tana Toraja	40,2

Sumber : Keputusan Gubernur Sul- Sel Nomor 2755/XII/Tahun 2015

- Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Kewenangan penyelenggaraan jalan ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

- Jalan Kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. Kewewenangan penyelenggaraan jalan ini dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Kewenangan penyelenggaraan jalan ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

2. Sistem jaringan perkeretaapian

Sistem jaringan perkeretaapian di Kabupaten Pinrang terdiri atas jaringan jalur kereta api, stasiun kereta api; fasilitas operasi kereta api.

Sistem jaringan perkeretaapian di Kabupaten Pinrang ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Jaringan jalur kereta api merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah – Provinsi Sulawesi Barat – Parepare – Pinrang – Pangkajene – Pinrang – Makassar – Sungguminasa – Takalar – Bulukumba – Watampone – Parepare.

Stasiun kereta api ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain.

3. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut terdiri dari Tatanan kepelabuhanan; dan Alur pelayaran.

a. Tatanan Kepelabuhan

Tatanan kepelabuhanan berfungsi sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perikanan dan industri.

Tatanan kepelabuhanan, terdiri atas :

- Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Kajuanging di Kecamatan Lembang;
- Pelabuhan pengumpan terdiri atas :
 - 1) Pelabuhan Marabombang di Kecamatan Suppa;
 - 2) Pelabuhan Ujung Lero di Kecamatan Suppa; dan
 - 3) Pelabuhan Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe.
- Terminal khusus yaitu Terminal Khusus PLTD Suppa di Kecamatan Suppa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Alur Pelayaran

Alur pelayaran terdiri atas:

- Alur pelayaran nasional yang menghubungkan pelabuhan Kajuanging dan pelabuhan nasional lainnya; dan
- Alur pelayaran lokal yang menghubungkan pelabuhan pengumpan di Kabupaten Pinrang dan pelabuhan lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Jaringan prasarana lainnya di Kabupaten Pinrang terdiri atas: sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air; dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

1) Sistem Jaringan Energi

Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud merupakan rencana pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energy terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Pinrang terdiri atas:

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru di Kecamatan Lembang dengan kapasitas 126 (seratus dua puluh enam) megawatt;
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Suppa di Kecamatan Suppa dengan kapasitas 62 (enam puluh dua) megawatt;
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sawitto di Kecamatan Patampanua dengan kapasitas 1,5 (satu koma lima) megawatt;
- Pengembangan energy listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Pinrang terdiri atas: Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat di Kecamatan Lembang, Kecamatan Batulappa, dan Kecamatan Duampanua; dan Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) Mwe.

Jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas :

- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan GI Bakaru – GI Tuppu - GI Pinrang, GI Pinrang - GI Parepare, dan GI Parepare – GI Suppa; dan
- Gardu Induk (GI) Bakaru dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat di Kecamatan Lembang dan GI Pinrang dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA di Kecamatan Watang Sawitto.

2) **Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Sistem jaringan telekomunikasi ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi. Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas jaringan teresterial; dan jaringan satelit. Selain jaringan terestrial dan satelit, sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi.

Sistem jaringan telekomunikasi dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Pinrang di Kecamatan Watang Sawitto dengan kapasitas 3.576 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam) satuan sambungan telepon.

3) **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan sumber daya air, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air.

1. Sumber Air

Sumber air terdiri atas air permukaan pada sungai, bendung, bendungan, embung, sumber air permukaan lainnya, dan cekungan air tanah (CAT).

2. Prasarana Sumber Daya Air

Prasarana sumber daya air terdiri atas sistem jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir. Sistem jaringan irigasi meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Kabupaten Pinrang.

Tabel 2.13
Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Pinrang

No	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR	KEWENANGAN
1	Sumber Air, meliputi : a. Air permukaan yang bersumber dari WS Saddang sebagai wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi DAS Kariango, DAS Rappang, dan DAS Karajae; b. Bendung, yaitu Bendung Benteng dan Bendung Pasolengan di Kecamatan Duampanua, Bendung Padang Lolo dan Bendung Taccipi di Kecamatan Patampanua dan Bendung Kalosi di Kecamatan Lembang; c. Bendungan yaitu Bendungan Bakaru di Kecamatan Lembang;	WS Lintas Provinsi Kewenangan Pemerintah Daerah Kewenangan pemerintah

No	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR	KEWENANGAN
	<p>d. Embung, yaitu Embung Watangpulu di Kecamatan Suppa, dan Embung Watang Kasa I dan Embung Watang Kasa II di Kecamatan Batu Lappa, Embung Binanga Karaeng I dan Embung Binanga Karaeng II di Kecamatan Lembang, dan Embung Malimpung di Kecamatan Patampanua;</p> <p>e. sumber air permukaan lainnya berupa mata air yang meliputi mata air Pakeng, mata air Taddokkong, dan mata air Tuppu di Kecamatan Lembang, mata air Rajang, dan mata air Massewae di Kecamatan Duampanua, dan mata air Tapporang di Kecamatan Batulappa; dan</p> <p>f. Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi : Cekungan Air Tanah (CAT) lintas kabupaten, yaitu CAT Sidenreng Rappang yang melintasi Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Cempa, Kecamatan Patampanua, dan Kecamatan Duampanua.</p>	<p>Kewenangan Pemerintah Daerah</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah</p>
2	<p>Prasarana Sumber Daya Air</p> <p>- Sistem Jaringan Irigasi</p> <p>a DI Saddang dengan luas pelayanan 42.931 (empat puluh dua . ribu sembilan ratus tiga puluh satu) hektar;</p> <p>b DI Taccipi dengan luas pelayanan 1.568 (seribu lima ratus . enam puluh delapan) hektar di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua; dan</p> <p>c Daerah Irigasi (DI) terdiri dari 87 (delapan puluh tujuh) DI . meliputi total luas pelayanan 9.557 (sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Lembang, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Batulappa, dan Kecamatan Mattiro Bulu.</p> <p>- Sistem Pengendalian Banjir pengendalian terhadap luapan air Sungai Saddang dan Sungai Kariango</p>	<p>Kewenangan Pemerintah</p> <p>Kewenangan Pemerintah Provinsi</p> <p>Kewenangan Pemerintah Kabupaten</p>

Sumber Data : Perda RTRW Kabupaten Pinrang TAHUN 2012 – 2032

4) **Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas Sistem pengelolaan persampahan; Sistem penyediaan air minum (SPAM); Sistem jaringan drainase; Sistem jaringan air limbah; dan Jalur evakuasi bencana.

a. Sistem pengelolaan persampahan.

Sistem pengelolaan persampahan ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Pinrang terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.

Lokasi TPS di Kabupaten Pinrang meliputi TPS sampah organik dan TPS sampah non organik direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan di kawasan perkotaan PKL, PPK dan PPL yang dikembangkan dengan sistem transfer depo. Lokasi TPST dan TPA di Kabupaten Pinrang ditetapkan di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua dengan luasan 5,3 (lima koma tiga) hektar.

b. Sistem penyediaan air minum (SPAM).

Sistem penyediaan air minum dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.

SPAM terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Pinrang. SPAM bukan jaringan perpipaan yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPAM di Kabupaten Pinrang dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku. SPAM jaringan perpipaan terdiri atas :

➤ Unit air baku yang bersumber dari :

- 1) Sungai, yaitu Sungai Saddang dan Sungai Kariango;
- 2) Mata air, yaitu mata air Pakeng di Kecamatan Lembang, dan mata air Rajang di Kecamatan Duampanua.

➤ Unit produksi air minum meliputi :

- 1) SPAM Zona I, meliputi Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Cempa dan Kecamatan Batulappa mengambil air baku dari Bendung Benteng;
- 2) SPAM Zona II, meliputi Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Mattiro Sompe mengambil air baku dari Sungai Kariango; dan
- 3) SPAM Zona III, meliputi Kecamatan Lembang dan Kecamatan Duampanua mengambil air baku dari mata air Pakeng dan/atau mata air Rajang.

➤ Unit distribusi air minum ditetapkan di seluruh kecamatan.

c. Sistem jaringan drainase;

Sistem jaringan drainase meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata.

Sistem saluran drainase melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Saddang, dan Sungai Kariango yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Pinrang. Sistem saluran drainase sekunder dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman.

Sistem saluran drainase primer dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Saddang, dan Sungai Kariango yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Pinrang. Sistem saluran drainase sekunder dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman.

d. Sistem jaringan air limbah;

Sistem jaringan air limbah ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem jaringan air limbah meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat. Sistem pembuangan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat. Sistem pembuangan air limbah dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri, kawasan rumah sakit, dan kawasan permukiman padat.

e. Jalur evakuasi bencana.

Jalur dan ruang evakuasi bencana bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana. Jalur dan ruang evakuasi bencana ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala lingkungan berupa jalur evakuasi bencana (*escape way*) dan ruang evakuasi bencana (*melting point*).

Jalur evakuasi bencana meliputi :

- a. Ruas jalan Lero Minralo – Tana Mili, ruas jalan Sabangparu – Ladea – Tonrognge dan ruas jalan Ujung Lero – Tana Mili di Kecamatan Suppa;

- b. Ruas jalan Jampue – Paladang – Polewali – Tonrongnge di Kecamatan Lanrisang;
- c. Ruas jalan Langnga – Patobong – Cappakala di Kecamatan Mattiro Sompe;
- d. Ruas jalan Wakka – Akkajang – Cempa Pasar di Kecamatan Cempa;
- e. Ruas jalan Kajuanging – Tuppu dan ruas jalan Pajalele – Teppo – Cenrana di Kecamatan Lembang; dan
- f. Ruas jalan Paria – Pekkabata, ruas jalan Serang - Kappe – Data, dan ruas jalan Maroneng - Bungi – Rajang di Kecamatan Duampanua.

Jalur evakuasi bencana direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.

Ruang evakuasi bencana (*Melting point*) merupakan kawasan yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi korban bencana meliputi:

- a. Pos Angkatan Laut dan SD 230 Majjakka B di Kecamatan Suppa;
- b. Lapangan Sepak Bola Cappakala di Kecamatan Mattiro Sompe;
- c. Kantor Camat Cempa di Kecamatan Cempa;
- d. Lapangan Sepakbola Pekkabata, dan lapangan sepak bola Rajang di Kecamatan Duampanua; dan
- e. SD 141 Tuppu dan Lapangan Terbuka Cenrana di Kecamatan Lembang.

• Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis Kabupaten Pinrang merupakan bagian wilayah Kabupaten Pinrang yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sumberdaya alam, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Pinrang terdiri atas: Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

- Kawasan Strategis Nasional adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare yang merupakan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan ekonomi yang berada di Kabupaten Pinrang.
- Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Pinrang terdiri atas : KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi dan KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berikut penjelasannya :
 - a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
 - 1. Kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas beras dan jagung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu,

- sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;
2. Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kopi robusta, kakao, dan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang; dan
 3. Kawasan pengembangan budidaya udang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.
- b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, terdiri atas:
1. kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Enrekang di wilayah Kabupaten Pinrang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian Kecamatan Batulappa, sebagian Kecamatan Lembang dan sebagian Kecamatan Patampanua; dan
 2. kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru di Kecamatan Lembang.
- c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, merupakan kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang
- Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), terdiri atas: kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya, kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berikut penjelasannya :
- 1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
 1. Kawasan perkotaan Pinrang sebagai pusat pemerintahan , pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat perdagangan dan jasa

ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang dan sebagian wilayah Kecamatan Tiroang.

- Kawasan Agropolitan yang terdiri atas:
 - Kawasan Agropolitan Bakaru yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian tanaman pangan, komoditas pertanian hortikultura dan komoditas perkebunan ditetapkan di Kecamatan Lembang;
 - Kawasan Agropolitan Sipatuo, Malimpung, dan Padang Loang (SIPUNDANG) yang berbasis agrobisnis komoditas perkebunan yang ditunjang oleh komoditas perikanan dan peternakan ditetapkan di Kecamatan Patampanua;
 - Kawasan Agropolitan Watang Pulu, Alitta, dan Makkawaru (WALIMA) yang berbasis agrobisnis komoditas peternakan ditetapkan di Kecamatan Mattiro Bulu;
 - Kawasan Agropolitan Batulappa yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian tanaman pangan dan peternakan ditetapkan di Kecamatan Batulappa; dan
 - Kawasan Agropolitan Tiroang yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian ditetapkan di Kecamatan Tiroang;
 - Kawasan Agropolitan Paleteang yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian ditetapkan di Kecamatan Paleteang;
 - Kawasan Agropolitan Cempa yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian dan komoditas peternakan ditetapkan di Kecamatan Cempa;
 - Kawasan Agropolitan Sawitto yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian dan komoditas peternakan ditetapkan di Kecamatan Watang Sawitto.
- Kawasan Minapolitan yang terdiri atas:
 - Kawasan Minapolitan Paria, Data Bittoeng, dan Maroneng (PADABIMA) yang berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan ditetapkan di Kecamatan Duampanua yang ditunjang oleh Tempat Pendaratan Ikan Kajuangin;
 - Kawasan Minapolitan Wiringtasi yang berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan ditetapkan di Kecamatan Suppa yang ditunjang oleh Tempat Pendaratan Ikan Pelabuhan Ujung Lero;
 - Kawasan Minapolitan Mattiro Sompe, Lanrisang dan Cempa (MALACE) yang berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan ditetapkan di Kecamatan Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Lanrisang dan

Kecamatan Cempa yang ditunjang oleh Tempat Pendaratan Ikan Pelabuhan Langnga;

- Kawasan Pariwisata Alam Lembang ditetapkan di Kecamatan Lembang;
- Kawasan Pariwisata Alam Permandian Air Panas Sulili ditetapkan di Kecamatan Paleteang;
- Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa dan sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu; dan
- Kawasan rencana Kota Terpadu Mandiri (KTM) Buttusawe di Kecamatan Duampanua.

d. KSK dengan sudut kepentingan sosial dan budaya

1. Kawasan Istana Addatuang Sawitto diKec. Watang Sawitto
2. Kawasan monumen dan makam lasinrang di Kecamatan Paleteang
3. Kawasan Makam Tuan Fakki di Kec. Tiroang

e. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, terdiri atas:

1. kawasan bendungan Benteng di Kecamatan Patampanua

f. KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup :

1. Kawasan jalur hijau mangrove pesisir pantai Kabupaten Pinrang di sebagian wilayah Kec. Suppa, sebagian wilayah kec. Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;
2. Kawasan DAS Saddang di Kecamatan Lembang , Kecamatan Batulappa dan Kecamatan Patampanua.
3. Kawasan Hutan Kota Bulu Paleteang di Kecamatan Paleteang.
4. Kawasan rawan banjir di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah kecamatan Duampanua dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

• Kawasan Kelautan dan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas :

i. kawasan peruntukan perikanan tangkap;

Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi kawasan pesisir dan laut Kecamatan Suppa, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Lanrisang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mattiro Sompe, kawasan

pesisir dan laut Kecamatan Cempa, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Duampanua, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Lembang.

ii. kawasan peruntukan budidaya perikanan;

Kawasan peruntukan budidaya perikanan, terdiri dari :

- a. Kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;
- b. Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang dan bandeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang; dan
- c. Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Duampanua.

iii. Kawasan pengolahan ikan

Kawasan pengolahan ikan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

iv. Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan.

Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Suppa, Kecamatan Mattiro Sompe, dan Kecamatan Lembang.

• **Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perkebunan**

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan.

Kawasan peruntukan pertanian dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pinrang, terdiri atas Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, Kawasan peruntukan pertanian hortikultura, dan Kawasan peruntukan perkebunan. Berikut penjelasan terkait kawasan peruntukan pertanian :

- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luas 44.861 Ha (empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian

wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang; dan

- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luas 30.914 Ha (tiga puluh ribu sembilan ratus empat belas hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

Tabel2.14
Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan
Di Kecamatan di Kabupaten Pinrang

No	Kecamatan	Pertanian Lahan Basah		Pertanian Lahan Kering	
		Luas (Ha)	persentase (%)	Luas (Ha)	persentase (%)
1	Suppa	1.716	3,83	2.503	8,1
2	Lanrisang	3.714	8,28	1.015	3,28
3	Mattiro Bulu	4.822	10,75	3.689	11,96
4	Mattiro Sompe	3.679	8,2	878	2,84
5	Paleteang	3.137	6,99	2.251	7,28
6	Tiroang	4.835	10,78	2.413	7,81
7	Watang Sawitto	4.033	8,99	834	2,7
8	Patampanua	4.464	9,95	4.394	14,21
9	Cempa	4.237	9,45	2.240	7,25
10	Duampanua	7.671	17,1	7.359	23,81
11	Batulappa	458	1,02	1.798	5,82
12	Lembang	2.093	4,67	1.530	4,95
Total		44.861	100	30.914	100

Sumber : Perda RTRW Tahun 2011 Kabupaten Pinrang

- Kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;
- Kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lembang, dan sebagian wilayah Kecamatan Batulappa;

- Kawasan peruntukan perkebunan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Lembang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Batulappa; dan
- Kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

Tabel 2.15
Kawasan Peruntukan Perkebunan
di Kecamatan di Kabupaten Pinrang

No	Kecamatan	Luas (Ha)	persentase (%)
1	Suppa	1.351	5,53
2	Lanrisang	-	-
3	Mattiro Bulu	2.685	11
4	Mattiro Sompe	-	-
5	Paleteang	78	0,32
6	Tiroang	-	-
7	Watang Sawitto	-	-
8	Patampanua	2.233	9,15
9	Cempa	864	3,54
10	Duampanua	1.620	6,63
11	Batulappa	1.212	4,96
12	Lembang	14.374	58,87
Total		24.417	100

Sumber : Perda RTRW Tahun 2011 Kabupaten Pinrang

- Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang; dan
- Kawasan peruntukan pengembangan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, dan sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pinrang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas 44.861 Ha (empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu hektar).

• **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi :

- 1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya,
- 2. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
- 3. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.

Tabel 2.16
Kawasan Pariwisata di Setiap Kecamatan Kabupaten Pinrang

Kecamatan	Kawasan Peruntukan pariwisata budaya	Kawasan peruntukan pariwisata alam	Kawasan peruntukan pariwisata buatan
Kecamatan Tiroang	Makam Tuan Fikki		
Kecamatan Mattiro Sompe		Pantai Ammani Desa Mattirotasi, dan Pantai Ujung Tape Kelurahan Pallameang	
Kecamatan Mattiro Bulu			
Kecamatan Lembang	Masjid Tua Tondo Bunga Desa Letta, dan Benteng Paremba Desa Benteng Paremba	Sungai Lue dan Sumber Air Panas Rajang Balla Desa Benteng Paremba, Permandian Air Panas Lemo Susu, Air Terjun Karawa, Kali Jodoh, Permandian Batu Pandan Kelurahan Betteng, Permandian Balaloang Permai Desa Pakeng, Goa Paniki Desa Binanga Karaeng, dan Pantai Kajuanging dan Pantai Kanipang Desa Sabbangparu	Danau Buatan PLTA Bakaru di Desa Ulusaddang
Kecamatan Duampanua	Makam Raja – raja Kaballangan Desa Kaballangan, dan Makam Tosalamae di Desa Massewae	Bukit Tirasa Kelurahan Lampa, Air Terjun Lamoro Desa Massewae, Permandian Pasandorang Desa Kaballangang, dan Pantai Kappe dan Pantai Maroneng di Kelurahan Data	
Kecamatan Lanrisang	Masjid Tua At Taqwa Jampue dan Saoraja Datu Lanrisang	Pantai Wae Tuwoe Desa Wae Tuwoe	

Kecamatan	Kawasan Peruntukan pariwisata budaya	Kawasan peruntukan pariwisata alam	Kawasan peruntukan pariwisata buatan
Kecamatan Suppa	Pengrajin Sarung Sutra Mandar, Masjid Tua Ujung Lero Desa Lero, Istana Datu Suppa dan Makam Besse Kajuara Kelurahan Watang Suppa	Pantai Wiring Tasi Desa Wiring Tasi, Pantai Ujung Lero Desa Lero, Pantai Ujung Labuang Desa Ujung Labuang, Pantai Sinar Bahari Sabbang Paru Desa Tasiwalie Pantai Bonging Ponging Desa Lotang Salo, Pantai Pelabuhan Marabombang, dan Pulau Kamarrang	Tempat pengasapan ikan, tempat pembuatan perahu tradisional, perkebunan kelapa dalam dan pelabuhan nelayan di Desa Lero
Kecamatan Paleteang	Makam Lasinrang di Kelurahan Laleng Bata, Makam Petta Malae di Kelurahan Temmasarangnge, Arajang Sawitto dan Pusara Benteng Sawitto dan Makam Addatuang Sawitto Matinro Langkara'na	Bulu Paleteang di Kelurahan Temmassaarangnge, dan Permandian Air Panas Sulili Kelurahan Mamminasae	
Kecamatan Watang Sawitto	Saoraja Desa Liang Garessi, Monumen Lasinrang, Istana Addatuang Sawitto Kelurahan Sawitto dan Kompleks Makam Raja-raja Sawitto		
Kecamatan Batulappa		Goa Batu Lappa Desa Batu Lappa	
Kecamatan Patampanua		Batu Moppangnge Desa Malimpung	Bendungan Benteng di Kelurahan Benteng dan rumah makan terapung di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua
Kecamatan Cempa		Pantai Wakka Desa Tadangpalie	

Sumber : Perda RTRW Tahun 2011 Kabupaten Pinrang

• **Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Migas**

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan, terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara, terdiri atas:

- a. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa belerang ditetapkan di sebagian wilayah Desa Sulili Kecamatan Paleteang;
- b. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan terdiri atas:

- 1). Komoditas batu gamping, ditetapkan di sebagian wilayah Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa;
- 2). Komoditas pasir kuarsa, ditetapkan di sebagian wilayah Desa Malimpung Kecamatan Patampanua dan Kecamatan Tiroang;
- 3). Komoditas andesit, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa;
- 4). Komoditas urukan tanah setempat ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa dan sebagian wilayah Kecamatan Duampanua; dan
- 5). Komoditas kerikil berpasir alami, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Paleteang.

2. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi.

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi merupakan bagian dari kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Enrekang yang berada di wilayah Kabupaten Pinrang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Lembang dan sebagian wilayah Kecamatan Batulappa.

• **Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan peruntukan industri meliputi:

1. Kawasan peruntukan industri besar yang merupakan kawasan industri manufaktur;
2. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
3. Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas :
 - o Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas hasil hutan dan pertanian ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa dengan luasan 100 (seratus) hektar; dan
 - o Kawasan peruntukan industri logam, mesin, dan tekstil ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu dengan luasan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hektar.
4. Kawasan peruntukan industri rumah tangga.

Kawasan peruntukan industri rumah merupakan kawasan aglomerasi industry rumah tangga.

Tabel 2.17

Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Pinrang

No	Kawasan Peruntukan Industri	Lokasi
1	Industri Besar	Sebagian wilayah Kecamatan Suppa, dan sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe
2	Industri Sedang	di sebagian wilayah Kecamatan Suppa dengan luasan 100 (seratus) hektar
		di sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu dengan luasan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hektar.

3	Industri Rumah Tangga	di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.
---	-----------------------	---

Sumber : Perda RTRW Tahun 2011 Kabupaten Pinrang

Secara umum jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan jenis kelamin, setiap tahunnya dari tahun 2016 – 2020 jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada jumlah penduduk laki-laki.

Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang berdasarkan data terakhir Tahun 2020 berjumlah 403.994 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sebanyak 56.570 jiwa, dan selanjutnya Kecamatan Duampanua berjumlah 50.226 jiwa. Secara rinci penyebaran penduduk di tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Perkecamatan
Di Kabupaten Pinrang Tahun 2016– 2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Mattiro Sompe	30.558	30.117	30.491	31.085	30.155
2	Suppa	32.962	33.179	33.641	33.899	34.434
3	Mattiro Bulu	31.035	30.980	30.939	31.205	31.524
4	Watang Sawitto	56.202	56.695	56.630	57.383	56.570
5	Patampanua	38.346	38.244	37.796	38.178	37.577
6	Duampanua	51.735	50.647	49.448	49.719	50.226
7	Lembang	48.122	48.382	46.844	47.403	46.932
8	Cempa	20.188	20.237	19.550	19.689	19.543
9	Tiroang	26.195	25.530	23.439	23.660	23.409
10	Lanrisang	20.407	19.762	19.749	19.812	19.713
11	Paleteang	43.020	43.003	41.815	42.209	42.630
12	Batulappa	12.055	11.806	11.516	11.429	11.281
Jumlah		410.825	408.582	401.858	405.671	403.994

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, 2021

Tabel 2.19
Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perkecamatan
Di Kabupaten Pinrang Tahun 2016 - 2020

No	Kecamatan	Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020			
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Mattiro Sompe	15.022	15.536	30.558	7,44	14.717	15.400	30.117	7,37	14.879	15.612	30.491	7,58	15.163	15.922	31.085	7,66	14.729	15.426	30.155	7,46
2	Suppa	16.342	16.620	32.962	8,02	16.428	16.751	33.179	8,12	16.668	16.973	33.641	8,37	16.839	17.060	33.899	8,35	17.143	17.291	34.434	8,52
3	Mattiro Bulu	15.236	15.799	31.035	7,55	15.196	15.784	30.980	7,58	15.136	15.803	30.939	7,69	15.228	15.977	31.205	7,69	15.449	16.075	31.524	7,80
4	Watang Sawitto	27.734	28.468	56.202	13,68	27.918	28.777	56.695	13,88	27.793	28.837	56.630	14,09	28.179	29.204	57.383	14,14	27.810	28.760	56.570	14,00
5	Patampanua	18.934	19.412	38.346	9,33	18.868	19.376	38.244	9,36	18.509	19.287	37.796	9,4	18.733	19.445	38.178	9,41	18.490	19.087	37.577	9,30
6	Duampanua	25.602	26.133	51.735	12,59	24.844	25.803	50.647	12,4	24.218	25.230	49.448	12,3	24.376	25.343	49.719	12,25	24.692	25.534	50.226	12,43
7	Lembang	24.207	23.915	48.122	11,71	24.344	24.038	48.382	11,84	23.495	23.349	46.844	11,65	23.824	23.579	47.403	11,68	23.569	23.363	46.932	11,62
8	Cempa	9.977	10.211	20.188	4,91	9.994	10.243	20.237	4,95	9.657	9.893	19.550	4,86	9.733	9.956	19.689	4,85	9.702	9.841	19.543	4,84
9	Tiroang	13.160	13.035	26.195	6,38	12.761	12.769	25.530	6,25	11.595	11.844	23.439	5,83	11.678	11.982	23.660	5,83	11.533	11.876	23.409	5,79
10	Lanrisang	10.027	10.380	20.407	4,97	9.611	10.151	19.762	4,84	9.638	10.111	19.749	4,91	9.677	10.135	19.812	4,88	9.630	10.083	19.713	4,88
11	Paletang	21.394	21.626	43.020	10,47	21.405	21.598	43.003	10,52	20.745	21.070	41.815	10,4	20.933	21.276	42.209	10,40	21.098	21.532	42.630	10,55
12	Batulappa	6.072	5.983	12.055	2,93	5.933	5.873	11.806	2,89	5.746	5.770	11.516	2,86	5.651	5.778	11.429	2,81	5.624	5.657	11.281	2,79
	Jumlah	203.707	207.118	410.825	100	202.019	206.563	408.582	100	198.079	203.779	401.858	100	200.014	205.657	405.671	100	199.469	204.525	403.994	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Pinrang2021

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.20
Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan

No	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan Yang diperkenankan
1	I	Semua Jenis Penggunaan Lahan
2	II	Semua Jenis Penggunaan Lahan Kecuali Psi
3	III	Semua Jenis Penggunaan Lahan Kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4	IV	Pt, semua jenis pengembangan , semua jenis hutan
5	V	Semua jenis penggembalaan (Pgi,Pgsd, Pgt), semua jenis hutan
6	VI	Pgsd,Pgt, semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan
8	VIII	Cagar alam dan Hutan Lindung

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Penjelasan:

1. Kelas I, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki resiko kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, solum tanah dalam, drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik dan responsif terhadap pemupukan.

2. Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas yang dapat mengurangi pilihan penggunaannya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran – saluran air.
3. Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharannya. Faktor – faktor pembatas pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas menahan air rendah, kesuburan dan produk aktifitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki.
4. Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan / jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap erosi, drainase nya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah.
5. Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak cekung, selalu basah / tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ dihutankan.
6. Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah tererosi/ telah mengalami erosi yang sangat berat/ mempunyai solum yang sangat dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen.
7. Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen.
8. Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/ batuan singkapan/ tanah pasir pantai. Karena itu

tanah pada kelas ini dibiarkan pada keadaan alami dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi).

Tabel 2.21
Persentase Kemampuan Lahan Menurut Kelas di Kabupaten Pinrang

Kelas	Luas (Ha)	Persentase (%)
II	6.591,38	3,41
IV	6.790,50	3,51
V	86.256,57	44,63
VI	91.560,16	47,37
VIII	2.087,31	1,08

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Berdasarkan kriteria tersebut diatas dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Pinrang. Hasilnya 47,37% luas lahan kelas VI, 44,63% luas lahan kelas V, 3,51 % luas lahan kelas IV, 3,41 % luas lahan kelas II, dan 1,08% luas lahan kelas VIII. Hasil ini menunjukkan bahwa umumnya lahan di Kabupaten Pinrang umumnya hanya mampu untuk penggunaan semua jenis pengembalaan sedang, pengembalaan terbatas dan semua jenis hutan, selain itu juga didominasi untuk kegiatan pertanian terbatas, serta sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas, lahan di Kabupaten Pinrang umumnya mengandung krikil atau batuan dan jenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami.

Adapun kecamatan yang berpotensi untuk pengembangan budidaya pertanian diperlihatkan pada table dibawah ini:

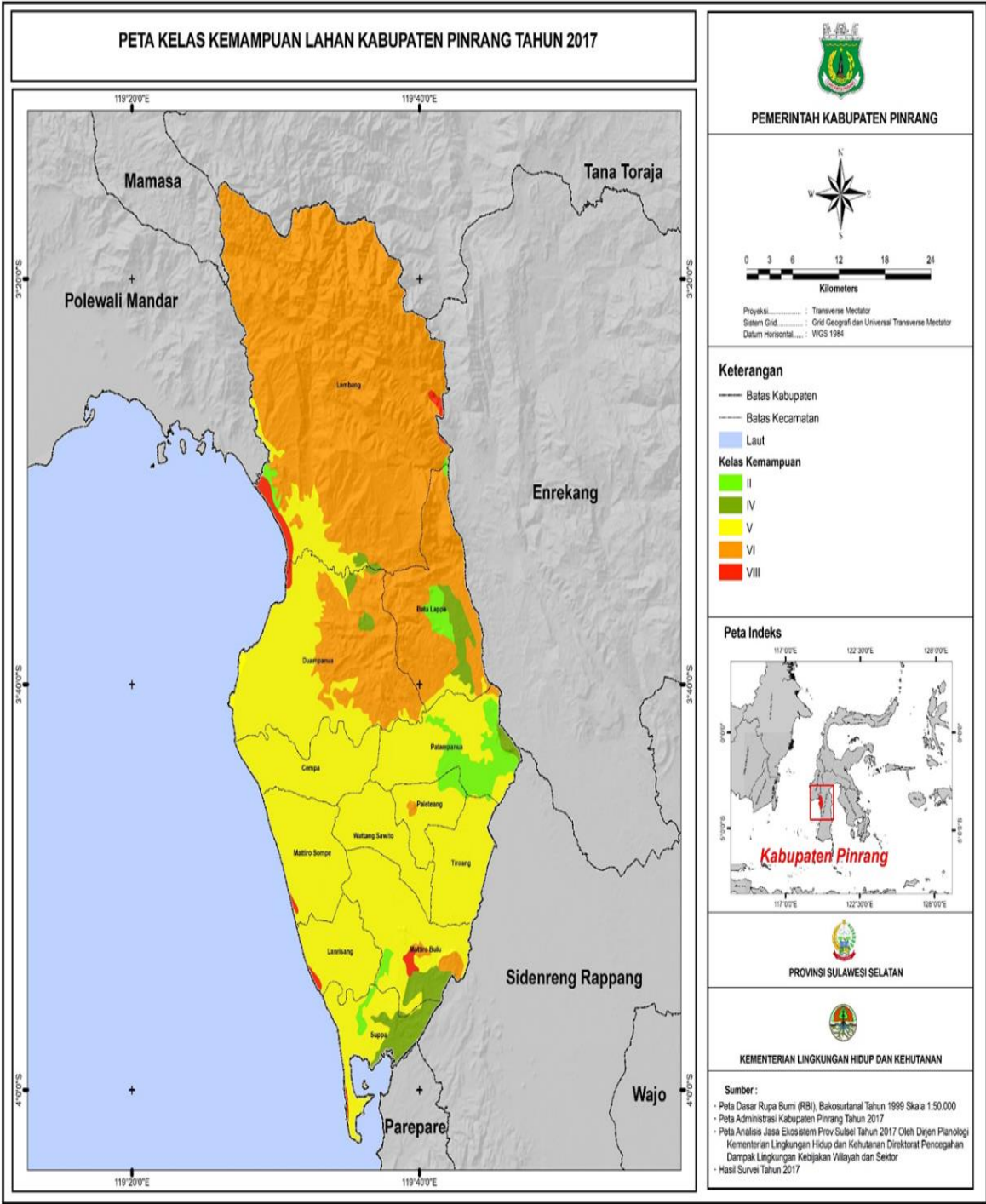
Tabel 2.22
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Pinrang

Kecamatan	Kelas (ha)				
	II	IV	V	VI	VIII
Batu Lappa	1.117,48	1.747,82	794,78	12.452,99	
Cempa			8.924,30	0,01	3,54
Duampanua		564,96	16.107,18	11.949,46	151,72
Lanrisang	2,62		6.226,21		160,85
Lembang	383,29	270,82	3.819,14	66.127,92	1.220,41
Mattiro Bulu	293,89	1.444,17	10.020,09	745,42	286,30
Mattiro Sompe			8.861,16		110,46
Paleteang	509,17		4.297,73	145,78	
Patampanua	3.868,84	440,22	8.109,72	138,59	
Suppa	365,78	2.322,51	4.991,29		154,03
Tiroang	50,31		7.267,24		
Wattang Sawito			6.837,72		
Total	6.591,38	6.790,50	86.256,57	91.560,16	2.087,31

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel diatas, daerah pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Batu Lappa (1.117,48 ha) dan Kecamatan Patampanua(3.868,84 ha). Sedangkan untuk sebagian daerah Kecamatan Lembang dan Mattiro Bulu tidak sesuai dijadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen beberapa bagian juga di kecamatan ini diarahkan untuk peruntukan cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi.

Gambar. 2.4
Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Pinrang Tahun 2017



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa eksosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunakan system grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah.

Penyediaan air bersih di Kabupaten Pinrang diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.23

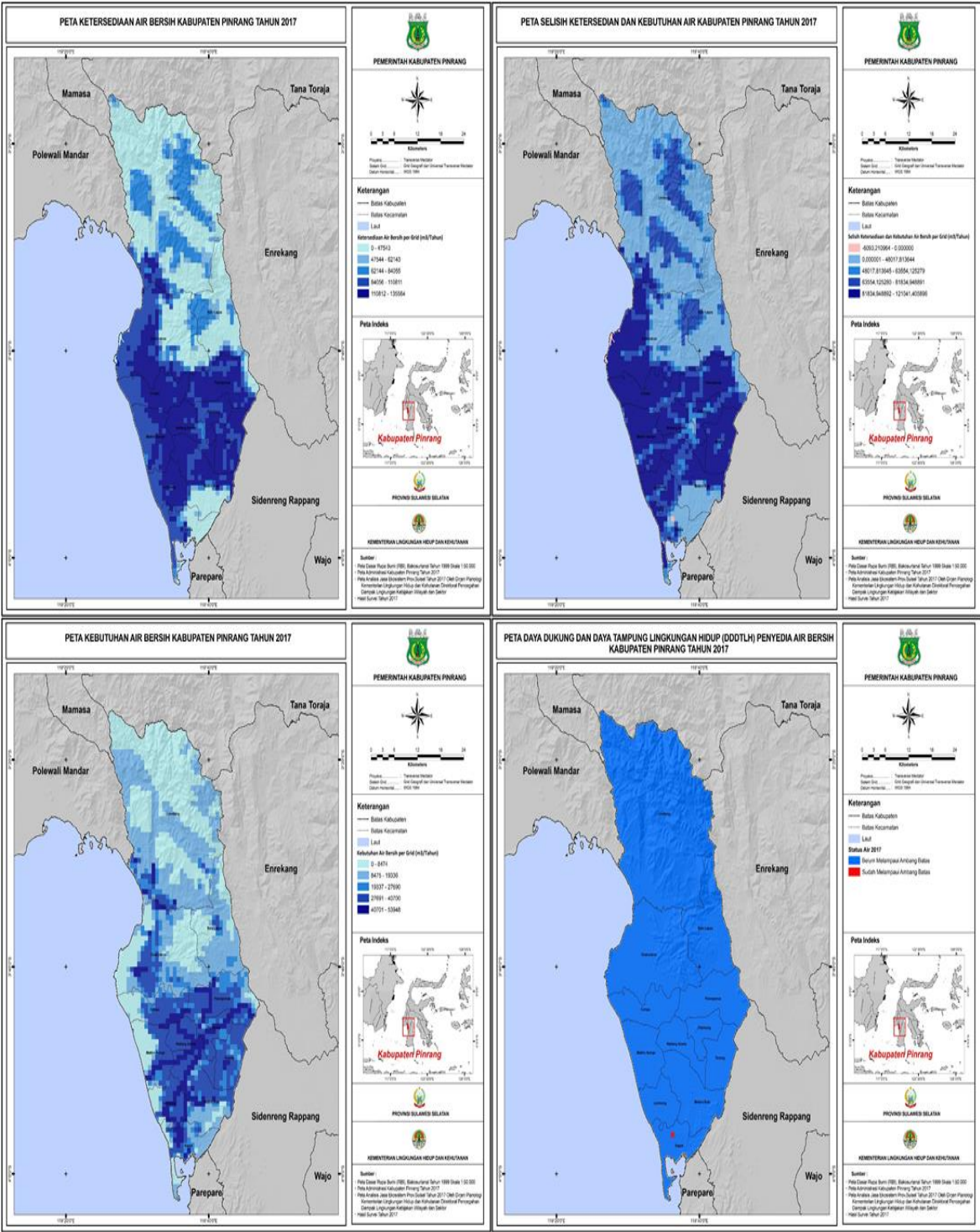
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Pinrang

Kecamatan	Status Air Tahun 2017 (m3/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Batu Lappa	12.389.379,22	2.771.781,17	9.617.598,05
Cempa	16.240.770,99	3.116.239,70	13.124.531,29
Duampanua	33.130.750,82	5.833.475,63	27.297.275,20
Lanrisang	11.359.329,44	2.871.203,88	8.488.125,56
Lembang	48.366.519,75	8.836.447,43	39.530.072,33
Mattiro Bulu	18.020.559,89	5.622.097,92	12.398.461,97
Mattiro Sompe	14.478.618,57	2.759.368,25	11.719.250,32
Paleteang	8.974.247,67	2.647.651,97	6.326.595,70
Patampanua	19.851.677,15	5.287.307,15	14.564.370,00
Suppa	9.594.305,67	2.811.884,45	6.782.421,22
Tiroang	13.541.800,22	3.414.149,78	10.127.650,44
Wattang Sawito	12.079.234,12	3.733.305,05	8.345.929,08
Total	218.027.193,50	49.704.912,33	168.322.281,17

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Pinrang sebesar 218.027.193,50 m³/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 49.704.912,33 m³/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 168.322.281,17 m³/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Lembang (48.366.519,75 m³/Tahun), dan Duampanua (33.130.750,82 m³/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan kecamatan tersebut di atas merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus dan masih terdapat banyak kawasan hutan. Sementara untuk selisih antara ketersedian dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Paleteang (6.326.595,70 m³/Tahun).

Gambar 2.5
Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Pinrang



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Kesejahteraan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2020, sector yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku adalah sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 45,22%. Kemudian disusul oleh sector Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,42%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24
Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga berlaku
Tahun 2016 - 2020

No	Sektor	2016	2017	2018*	2019**	2020
		Hb	Hb	Hb	Hb	Hb
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	48,55	48.51	47.02	45.03	45.22
2	Pertambangan dan penggalian	2.60	2.63	2.71	2.75	2.80
3	Industri pengolahan	6.28	6.37	6.10	6.28	6.14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Konstruksi	9.68	9.67	10.08	10.85	10.78
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.91	13.13	13.89	14.63	14.42
8	Transportasi dan Pergudangan	2.65	2.54	2.58	2.65	2.31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.88	0.89	0.93	0.97	0.87
10	Informasi dan Komunikasi	2.17	2.20	2.29	2.36	2.59
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.20	2.12	2.11	2.05	2.01
12	Real Estate	3.35	3.28	3.21	3.17	3.32
13	Jasa Perusahaan	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3.82	3.71	3.99	4.05	4.08
15	Jasa Pendidikan	2.75	2.79	2.85	2.94	3.09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.27	1.26	1.28	1.33	1.49
17	Jasa Lainnya	0.71	0.72	0.75	0.76	0.67
PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber data :PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha tahun 2016 -2020, BPS Kabupaten Pinrang

*Angka Sementara

**Angka sangat sementara

Tabel 2.25
Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2016 - 2020

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
		Hk	Hk	Hk	Hk	Hk
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	47.23	46,94	46,00	44,64	44,57
2	Pertambangan dan penggalian	2.10	2,21	2,27	2,32	2,37
3	Industri pengolahan	6.13	6,25	6,01	6,22	6,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	0,11	0,11	0,12	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0,01	0,01	0,00	0,005
6	Konstruksi	9.28	9,17	9,21	9,65	9,70
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.23	14,54	15,19	15,58	15,35
8	Transportasi dan Pergudangan	2.79	2,78	2,84	2,94	2,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.87	0,88	0,93	0,96	0,85
10	Informasi dan Komunikasi	2.84	2,89	3,02	3,14	3,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.17	2,06	2,04	1,95	1,95
12	Real Estate	3.24	3,2	3,16	3,14	3,27
13	Jasa Perusahaan	0.12	0,12	0,12	0,12	0,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3.81	3,71	3,81	3,84	3,88
15	Jasa Pendidikan	3.02	3,05	3,13	3,18	3,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.31	1,31	1,35	1,39	1,51
17	Jasa Lainnya	0.74	0,76	0,80	0,80	0,71
PDRB		100.00	100	100,00	100,00	100

Sumber data :PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha tahun 2016 -2020, BPS Kabupaten Pinrang
*Angka Sementara
**Angka sangat sementara

Tabel 2.26
Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha
Atas harga dasar konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2016 - 2020 (Juta Rp).

No	Sektor	2016		2017		2018*		2019**		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	2	3		4		5		6		7	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.138.381,33	4.892.687,39	7.935.912,09	5.267.114,96	8.507,077,50	5.514.127,22	8.839.082,07	5.700.352,00	9.081.427,01	5.716.122,55
2	Pertambangan dan penggalan	382.986,93	223.064,56	430.860,30	248.092,15	490.703,09	271.620,17	539.429,20	296.875,30	563. 220,59	303.562,22
3	Industri pengolahan	922.929,32	647.618,83	1.041.413,17	701.117,76	1.103.170,41	720.778,31	1.233.228,21	794.067,20	1. 233.483,28	785.743,32
	Pengadaan Listrik dan Gas	10.057,62	11.912,11	12.772,01	12.621,25	14.158,56	13.751,77	15.602,65	15.316,20	16.162,20	15.998,98
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	667,84	538,72	718,86	572,48	797,43	619,73	841,1	634,9	899,97	671,98
6	Konstruksi	1.423.616,67	967.721,80	1.581.449,55	1.031.813,81	1.823.210,55	1.104.632,21	2.130.422,44	1.232.741,50	2.165.469,94	1.243.766,10
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.898.149.92	1.477.637,60	2.148.673,58	1.622.759,01	2.512.472.39	1.820.609,58	2.871.418,43	1.989.820,40	2.895.761,18	1.968.919,95
8	Transportasi dan Pergudangan	390.059,36	289.784,89	415.352,10	311.622,65	467,003.85	340,947.64	520.620,01	375.406,90	463.596,12	331.949,52

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

No	Sektor	2016		2017		2018*		2019**		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128.762,08	90.957,01	145.045,05	98.772,98	167,890.53	111,366.84	190.276,74	122.204,90	175.703,11	109.435,44
10	Informasi dan Komunikasi	318.548,81	295.678,28	359.960,15	324.624,86	413,278.43	361,652.60	462.477,61	401.284,60	520.698,77	455.098,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	322.945,66	226.282,49	346.559,59	231.326,24	382,341.02	244,128.40	402.042,59	249.464,90	404.477,46	250.301,65
12	Real Estate	492.898,25	337.153,99	536.283,95	359.338,36	580,868.66	379,130.55	622.566,47	400.743,80	667.137,37	419.114,69
13	Jasa Perusahaan	15.692,89	12.421,50	17.206,89	13.293,47	19,613.08	14,599.72	21.341,59	15.628,70	20.007,94	14.383,87
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	562.337,41	396.724,44	607.005,04	416.090,67	721,621.92	456,738.56	794.166,16	490.077,90	819.870,58	497.655,84
15	Jasa Pendidikan	404.556,51	313.730,90	457.148,86	341.715,35	515,670.66	375,251.63	576.322,27	406.611,80	621.250,73	429.791,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	186.339,67	135.918,20	206.797,90	147.077,08	231,972.42	161,513.01	260.904,77	177.188,40	298.691,02	193.536,87
17	Jasa Lainnya	104.823,99	77.282,33	117.402,87	84.670,52	135,928.48	95,750.76	149.577,58	101.659,30	135.155,71	90.398,42
PDRB		14.703.754,25	10.397.105,90	16.360.561,94	11.212.623,60	18.087.778,99	11.987.218.7	19.630.319,95	12.770.078,60	20.083.012,97	12.826.451,93

Sumber data : PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha tahun 2016 -2020, BPS Kabupaten Pinrang

*Angka Sementara

**Angka sangat sementara

Uraian tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pinrang adalah berasal dari sektor pertanian yang tiap tahun mengalami peningkatan untuk tahun 2016 sebesar Rp.7.138.381,33 dan pada tahun 2020 naik menjadi Rp. 9.081.427,01. Jika disandingkan dengan data Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Berlaku maka sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetap menunjukkan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Kabupaten Pinrang.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar 0,44%. Dari 17 sektor lapangan usaha, 11 sektor mengalami pertumbuhan positif dan lainnya negatif. Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 13,41 persen, diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,23 persen serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,84 persen. Pandemi Covid-19 yang juga dialami oleh Kabupaten Pinrang memberi dampak beberapa aspek ekonomi Kabupaten Pinrang. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.27
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 - 2020

No	Sektor	2016	2017	2018*	2019**	2020**
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.38	7.65	4.69	3.37	0.28
2	Pertambangan dan penggalian	12.95	11.22	9.48	9.30	2.25
3	Industri pengolahan	8.25	8.26	2.80	10.17	-1.05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.19	5.95	8.96	11.38	4.46
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.12	6.27	8.25	2.45	5.84
6	Konstruksi	6.18	6.62	7.06	11.60	0.89
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.69	9.82	12.19	9.29	-1.05
8	Transportasi dan Pergudangan	6.29	7.54	9.41	10.11	-11.58
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.84	8.59	12.75	9.73	-10.45

10	Informasi dan Komunikasi	9.64	9.79	11.41	10.96	13.41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.97	2.23	5.53	2.19	0.34
12	Real Estate	7.92	6.58	5.51	5.70	4.58
13	Jasa Perusahaan	7.72	7.02	9.83	7.05	-7.97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	-5.91	4.88	9.77	7.30	1.55
15	Jasa Pendidikan	8.41	8.92	9.81	8.36	5.70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.81	8.21	9.82	9.71	9.23
17	Jasa Lainnya	9.75	9.56	13.09	6.17	-11.08
	PDRB	7.44	7.84	6.91	6.53	0.44

Sumber data : PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha tahun 2016 -2020, BPS Kabupaten Pinrang

*Angka Sementara

**Angka sangat sementara

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang tahun 2019 sebesar 6.53 lebih rendah jika dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan lebih tinggi dibanding dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang mengalami perlambatan sebesar 0,44. Sedangkan pertumbuhan Sulsel dan Nasional mengalami kontraksi sebesar -0,70 dan - 2,07. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

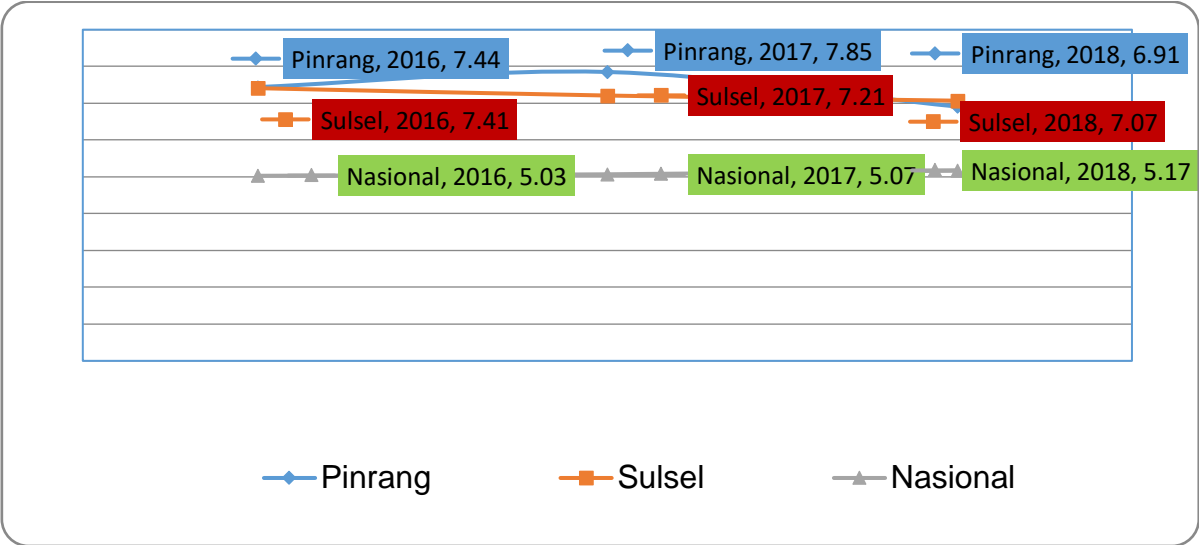
Tabel 2.28

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016- 2020

No	Pertumbuhan Ekonomi	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan ekonomi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab.Pinrang	%	7,44	7,84	6,91	6,53	0,44	5,83
2	Sul Sel	%	7,42	7,21	7,06	6,92	-0,70	5,58
3	Nasional	%	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,64

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

Gambar 2.7
Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2018



2. PDRB Perkapita

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah adalah dengan melihat tingkat pendapatan penduduk wilayah tersebut, dan PDRB Perkapita merupakan proyeksi indikator untuk menentukan tingkat pendapatan perkapita di suatu wilayah.

Pendapatan dan Pertumbuhan Perkapita Kabupaten Pinrang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan gambaran pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.29
Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional menurut harga berlaku Tahun 2016 - 2020

No	PDRB Perkapita(ADHB)	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Pinrang	(Juta Rp)	39,78	43,95	48,28	52,05	52,93
2	Sul Sel	(Juta Rp)	43,82	47,82	52,64	57,03	56,51
3	Nasional	(Juta Rp)	47,93	51,89	55,99	59,06	56,93

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

Berdasarkan pada tabel diatas data menunjukkan meskipun PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang tiap tahunnya meningkat namun masih dibawah dari PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dan Pendapatan Perkapita Nasional.

3. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Tabel 2.30
Perbandingan Inflasi Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016 - 2020

No	Inflasi	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab.Pinrang	%	2,11	3,43	1,96	2,45	2,37	2,46
2	SulSel	%	0,30	1,04	0,86	0,20	0,15	0,51
3	Nasional	%	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	2,83

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang, 2021

Perkembangan Inflasi Kabupaten Pinrang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami pasang surut. Di tahun 2016 angka inflasi di Kabupaten Pinrang mencapai 2,11% kemudian naik di tahun 2017 menjadi 3,43% dan turun 1,96% di tahun 2018 lalu naik lagi di tahun 2019 menjadi 2,45% dan turun lagi menjadi 2,37% di tahun 2020. Hal ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Pinrang.

4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bahwa tentang indeks gini dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila indeks gini lebih kecil dari 0,3, dikategorikan ketimpangan sedang apabila indeks gininya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya dikategorikan ketimpangan tinggi apabila indeks gininya lebih besar dari 0,5. Berikut dapat disajikan perkembangan indeks gini Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2016 - 2020 pada table berikut :

Tabel 2.31
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016 – 2020

No	Indeks Gini	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang	0,38	0,309	0,359	0,336	0,375
2	Sul Sel	0,426	0,407	0,397	0,390	0,389
3	Nasional	0,394	0,391	0,384	0,380	0,385

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

Bila diperhatikan table tersebut diatas dalam kurun waktu 2016 – 2020 Kabupaten Pinrang Index Gininya terkategori ketimpangan **sedang**. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Pinrang cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung seimbang. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di masing-masing kategori (17 Kategori).

5. Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan diatas garis kemiskinan. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Pinrang berfluktuatif walaupun cenderung menurun, hal ini musti menjadi perhatian Pemerintah Daerah mengingat dengan menurunnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan berarti jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan bertambah sehingga Pemerintah Daerah perlu untuk memfokuskan Program yang terkait penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.32
Perbandingan Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang	91,52%	91,54%	91,19%	91,54%	91,14%
2	Sul Sel	90,76%	90,52%	91,13%	91,44%	91,04%
3	Nasional	89,30%	89,88%	90,34%	90,78%	89,81%

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan dari tahun 2016 sebesar 91,52% mengalami penurunan menjadi 91,14% di tahun 2020.

6. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Di Kabupaten Pinrang jumlah penduduk miskin dari tahun 2016-2020 cenderung meningkat dengan jumlah 33,56 ribu jiwa atau 8,86% pada tahun 2020.

Tabel 2.33
Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang

No	Indikator	Tahun (Jiwa)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	30,51	31,28	31,43	32,94	31,85	33,56
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,34	8,48	8,46	8,81	8,46	8,86
3	Garis Kemiskinan (ribu jiwa)	258.897	250.163	256.054	280.746	294.349	338.731

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang2021

Di Kabupaten Pinrang jumlah penduduk miskin dari tahun 2016-2020 cenderung meningkat dari 258.897 ribu jiwa pada tahun 2016 menjadi 33,56 ribu jiwa atau 8,86% pada tahun 2020.

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan pembangunan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, akan tetapi seluruh aspek kehidupan salah satunya adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia sangat penting dilakukan untuk mencapai kesejahteraan penduduk. Indikator dalam proses pembangunan manusia dapat dilihat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara, dan untuk mengklasifikasi apakah sebuah wilayah atau negara tergolong dalam wilayah atau negara maju, berkembang atau terbelakang.

Di Kabupaten Pinrang untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari 3 hal yang paling

mendasar dalam pembangunan manusia, yaitu Angka Harapan Hidup, Pengetahuan dan standar hidup layak. Hasil perhitungan IPM ini menggambarkan secara umum pembangunan manusia Kabupaten Pinrang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Komponen IPM Kabupaten Pinrang
Tahun 2016-2020

Uraian Angka	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Hidup (Tahun)	68,55	68,68	68,98	69,39	69,61
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,18	13,19	13,20	13,22	13,23
Rata – rata Lama Sekolah (Tahun)	7,48	7,54	7,84	7,85	7,86
Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan (Ribuan Rupiah)	10.899	11.279	11.508	11.828	11.844
IPM	69,42	69,90	70,62	71,12	71,26

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pinrang selama periode tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ketahun, pada tahun 2016 dicapai 69,42 dan tahun 2017 dicapai 69,90, serta tahun 2018 dicapai 70,62 dan meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 71,26. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa indikator pendukung dalam penentuan nilai Indeks Pembangunan Manusia diantaranya : Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Perkapita Penduduk yang setiap tahun juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.35
Perbandingan IPM Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2016 – 2020

No	IPM	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang	69,42	69,90	70,62	71,12	71,26
2	Daerah Setara (Kab. Sidrap)	69,39	69,84	70,60	71,05	71,93
3	Sul Sel	69,76	70,34	70,90	71,66	71,94
4	Nasional	70,18	70,81	71,39	71.92	71,21

Sumber data : BPS 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai IPM di Kabupaten Pinrang dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 69,42 di tahun 2016 menjadi 71,26 di tahun 2020, akan tetapi nilai IPM Kabupaten Pinrang masih jauh dibawah dari nilai IPM daerah

setara seperti Kabupaten Sidrap yang memiliki nilai IPM 71,93 di tahun 2020 dan di bawah dari nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan yakni 71,94 di tahun 2020. Walaupun nilai IPM Kabupaten Pinrang berada diatas nilai IPM Nasional akan tetapi masih dirasa perlu untuk melakukan peningkatan target dan kinerja untuk indikator pendukung dari nilai Indeks Pembangunan Manusia.

8. Indeks Perkembangan Wilayah

Perkembangan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dalam dimensi geografis. Dari perkembangan wilayah inilah yang akan menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan suatu indikator-indikator dan variabel pembangunan. Secara umum, tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang ada diwilayah tersebut. Semakin banyak fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di wilayah tersebut, maka semakin tinggi aktivitas ekonomi masyarakatnya sehingga perkembangan wilayah diderah tersebut akan semakin maju. Kondisi tersebut dapat dilihat dari padatnya jaringan jalan, semakin luasnya wilayah perkantoran dan perdagangan, semakin menyebarnya wilayah pemukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan tingginya peluang kerja. Untuk mengukur tingkat perkembangan wilayah dapat dilakukan dengan menghitung Indeks Perkembangan Wilayah menggunakan analisis scalogram dengan menggunakan tiga komponen yakni kependudukan, fasilitas umum dan aksesibilitas wilayah berupa panjang ruas jaringan jalan. Jumlah dari tiga komponen diatas kemudian discoring dengan angka 1 untuk setiap fasilitas yang terpenuhi di wilayah tersebut sehingga menghasilkan angka untuk Indeks Perkembangan Wilayah pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.36
Indeks Perkembangan WilayahTahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Perkembangan Wilayah (nilai)	52	56	58	59	78

Sumber Data: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2021

Dari tabel diatas di Kabupaten Pinrang indeks perkembangan wilayah dihitung berdasarkan beberapa indikator yaitu persentase kemantapan jalan, cakupan irigasi kewenangan kabupaten, persentase ketersediaan sport center, persentase rumah tangga akses air minum, dan persentase pemukiman layak huni. Pada tahun 2019 indeks perkembangan wilayah Kabupaten Pinrang sebesar 59 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 78.

9. Indeks Layanan Infrastruktur Wilayah Pinrang Utara (Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang)

Indeks Layanan Infrastruktur Wilayah Pinrang Utara yakni Kecamatan Batulappa, Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang merupakan salah satu misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Pinrang yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup baik akan tetapi masih terkendala dalam pengembangan infrastruktur karena kondisi topografi yang berada di pegunungan sehingga perkembangan pembangunan di wilayah ini perlu mendapat perhatian lebih untuk ditingkatkan dengan terlebih dahulu mengetahui nilai atau tingkat perkembangan wilayahnya. Dengan memakai analisis scalogram yang menggunakan tiga komponen yakni kependudukan, fasilitas umum dan aksesibilitas wilayah dengan menjumlahkan seluruh komponen ini dan diberi pembobotan nilai 1 untuk fasilitas yang terpenuhi sehingga nilai indeks layanan infrastruktur Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang (Pinrang Utara) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.37
Indeks layanan infrastuktur Kecamatan Batulappa, Duampanua Dan Lembang Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks layanan infrastuktur Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang	18,89%	21,82%	23,85%	25,52%	37,38%

Sumber data: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2021

Indeks Layanan Infrastruktur Kecamatan Batulappa, Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang pada tahun 2019 sebesar 25,52% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 37,38%. Dengan adanya angka ini maka dapat dilihat bahwa perkembangan pembangunan di wilayah Pinrang Utara masih harus ditingkatkan lagi dengan memperhatikan fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, perdagangan dan peribadatan. Disamping itu faktor aksesibilitas wilayah yakni panjang lebar ruas jalan serta kondisi jalanan juga sangat mempengaruhi perkembangan pembangunan di suatu wilayah.

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pendidikan

Tercapainya pembangunan sumber daya manusia ditandai dengan tingginya kualitas hidup yang dicapai masyarakat. Salah satu standar yang ditetapkan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar,

yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Indeks pendidikan adalah salah satu komponen dalam menyusun Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pendidikan ini nantinya dapat digunakan untuk mengukur atau membandingkan perubahan dari beberapa variabel yang mencerminkan kinerja sektor pendidikan dan disajikan dalam bentuk angka/indeks. Angka Indeks yang praktis dan mudah dibaca yang dapat memberikan gambaran kondisi output kinerja sektor pendidikan di daerah yang dibentuk dari indikator angka partisipasi murni, rasio ruang kelas kategori baik terhadap total ruang kelas, serta rata-rata lama sekolah. Hasil dari perhitungan Indeks Pendidikan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.38
Indeks Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pendidikan (nilai)	61,54	61,77	62,80	62,89	62,95

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Indeks pendidikan dibentuk dari indikator angka partisipasi murni, rasio ruang kelas kategori baik terhadap total ruang kelas, serta rata-rata lama sekolah. Indeks Pendidikan Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan dari tahun 2019 dengan nilai 62,89 menjadi 62,95 pada tahun 2020.

2. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana. Indikator Angka Melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama pada daerah-daerah pedesaan dan terpencil dimana jumlah penduduk yang tidak dapat mendapatkan akses pendidikan (bersekolah) atau indikator yang menunjukkan kemampuan penduduk suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Penduduk yang 15 tahun keatas yang melek huruf (penduduk yang bisa baca) pada tahun 2016 - 2020 menunjukkan pada tahun 2016 dicapai 94,83%, dan pada tahun tahun 2020 meningkat ke 99,99%.

Tabel 2.39
Angka Melek Huruf Kabupaten Pinrang

No	Bidang/urusan	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penduduk Usia diatas 15 tahun yang bisa Membaca dan Menulis	210.710	212.990	215.950	225.899	259.790
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	222.194	224.071	225.609	226.000	259.823
3.	AMH Kabupaten Pinrang 15 tahun Keatas	94,83%	95,05%	95,72%	99,96%	99,99%

Sumber data : Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Pinrang 2021

3. Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pinrang dalam 5 tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 dicapai 7,48 dan tahun 2020 mencapai 7,86.

Tabel 2.40
Perbandingan Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Pinrang, Daerah Setara (Kab. Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Rata-rata lama sekolah Kab.Pinrang	7,48	7,54	7,84	7,85	7,86
2	Angka Rata-rata lama sekolah Daerah Setara (Kab. Sidrap)	7,33	7,52	7,79	7,83	Kab. Sidrap
3.	Angka Rata-rata lama sekolah Sul Sel	7,75	7,95	8,02	8,26	Prov
4.	Angka Rata-rata lama sekolah Nasional	7,95	8,10	8,17	8,34	Pusat

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang 2021

Dari tabel diatas Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pinrang dalam 5 tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 dicapai 7,48 dan tahun 2020 mencapai 7,86. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pinrang juga masih tinggi dibanding dengan angka rata-rata lama sekolah kabupaten lain atau yang setara seperti Kabupaten Sidrap. Akan tetapi angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada nilai 8,26 di tahun 2019 dan angka rata-rata lama sekolah Nasional berada pada angka 8,34 di tahun 2019.

4. Indeks Kesehatan

Ukuran kualitas hidup manusia yang terdapat dalam indeks pembangunan manusia (IPM) yang dibentuk melalui tiga dimensi dasar, dan kesehatan termasuk dalam salah satu dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indeks kesehatan dibentuk dari indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan, balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, balita dengan gizi normal (tidak stunting), dan angka harapan hidup. Dari indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini nilai Indeks Kesehatan Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

Tabel 2.41
Indeks Kesehatan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kesehatan (nilai)	74,69	74,89	75,35	75,98	76,32

Sumber data: Dinas Kesehatan, 2021

Di Kabupaten Pinrang Indeks Kesehatan pada tahun 2019 sebesar 75,98 dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 76,32. Walaupun angka indeks kesehatan di Kabupaten Pinrang masih tergolong baik akan tetapi masih perlu lebih ditingkatkan lagi terutama dari segi fasilitas dan pelayanan kesehatan terutama disaat pandemi seperti ini.

5. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Berdasarkan serangkaian Age Specific Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Harapan hidup berbeda dengan lama hidup, lama hidup atau panjang hidup yakni jumlah tahun maksimum penduduk untuk dapat hidup. Berbeda dengan harapan hidup, lama hidup antara penduduk suatu negara atau daerah dengan daerah lainnya tidak berbeda karena umur manusia ada batas maksimumnya. Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Pinrang mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan teknologi dan kesadaran masyarakat dalam melakukan perawatan bayi yang dilahirkan semakin membaik sehingga dapat mencapai harapan hidup yang lebih baik pula.

Tabel 2.42

Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Pinrang, Daerah Setara (Kab. Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Usia Harapan Hidup (Thn) Kabupaten Pinrang	68,55	68,68	68,98	69,39	69,61
2	Angka Usia Harapan Hidup (Thn)Daerah Setara (Kab. Sidrap)	68,69	68,82	69,15	69,59	69,83
3	Angka Usia Harapan Hidup (Thn) Sulawesi Selatan	69,82	69,84	70,08	70,43	70,57
4	Angka Usia Harapan Hidup (Thn) Nasional	70,90	71,06	71,20	71,34	73,4

Sumber data : Dinas KesehatanKabupaten Pinrang 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Angka Usia Harapan Hidup selama lima tahun terakhir di Kabupaten Pinrang dari 68,55 pada tahun 2016 menjadi 69,51 pada tahun 2020. Akan tetapi angka ini masih lebih rendah dibanding dengan kabupaten yang setara seperti Kabupaten Sidrap yang memiliki Angka Usia Harapan Hidup sebesar 69,83 di tahun 2020, Provinsi Sulawesi Selatan 70,57 di tahun 2020 dan Nasional 73,4 di tahun 2020. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan Angka Usia Harapan Hidup agar bisa melampaui target nasional.

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Salah satu indikator dalam IPM adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Dalam hal pembangunan manusia sering dibahas mengenai perbedaan gender, dimana berfokus pada bagaimana mencapai kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Hal ini terkait dengan tujuan dari MDGs yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan semua variabel signifikan yaitu Angka

Partisipasi Sekolah (APS) SD/Sederajat penduduk perempuan, APS SMP/Sederajat penduduk perempuan, APS SMA/Sederajat penduduk perempuan, Angka Buta Huruf penduduk perempuan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja penduduk perempuan, rasio jenis kelamin, rasio jenis kelamin saat lahir, dan persentase penduduk perempuan mempunyai keluhan kesehatan. Adapun hasil dari Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.43
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Tidak ada survey	95,44	95,45	95,35	96,24

Sumber data: DinasPengendalianPenduduk, KB, P3A, 2021

Di Kabupaten Pinrang Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan dari 95,35 pada tahun 2019 menjadi 96,24 pada tahun 2020. Nilai Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pinrang masih relatif baik akan tetapi angka ini masih harus terus dipertahankan dalam hal pencapaian misi dan tujuan dari TPB di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Pinrang pada khususnya.

7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Tabel 2.44
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	IndeksPemberdayaan Gender (IDG)	Tidak ada survey	59,61	61,73	67,92	68,11

Sumber data: DinasPengendalianPenduduk, KB, P3A, 2021

Nilai IDG Kabupaten Pinrang untuk tahun 2019 mencapai 67,92 dan tahun 2020 sebesar 68,11.

8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tabel 2.45
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas	orang	154.903	153.357	166.922	165.960	167.701
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas	orang	276.613	255.011	278.166	280.966	283.694
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	56,0	60,1	60,01	59,07	59,11

Sumber Data : BPS 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Pinrang selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif dimulai dari tahun 2016 sebesar 56,0% kemudian naik pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 60,1% kemudian turun di tahun 2019 menjadi 59,01% dan naik lagi pada angka 59,11%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kondisi perekonomian yang juga mengalami pasang surut.

9. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, indikator ini diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Perkembangan dari indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan disamping menjadi bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Besarnya tingkat pengangguran terbuka mempunyai dampak sosial yang luas dikarenakan mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan.

Tabel 2.46
Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	orang	6.343	6.769	4.669	4.834	7.020
Penduduk Angkatan Kerja	orang	154.903	153.422	166.922	165.960	167.701
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,09	4,41	2,80	2,91	4,19

Sumber Data : BPS 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Pinrang mengalami pasang surut lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Pinrang berada pada 4,41% dan menurun di tahun 2018 menjadi 2,80% dan di tahun 2019 berada pada angka 2,91%. Akan tetapi di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,19. Hal ini terjadi karena dampak pandemi covid-19 yang menyerang seluruh aspek kehidupan di dunia ini.

10. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Tabel 2.47
Rasio Penduduk Yang Bekerja

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Yang Bekerja	orang	148.560	147.207	162.253	161.126	160.681
Angkatan Kerja	orang	154.903	153.357	166.922	165.960	167.701
Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	95,9	96,0	97,20	97,09	95,81

Sumber Data : BPS 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio Penduduk yang bekerja di Kabupaten Pinrang mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir dari 95,9% di tahun 2016 kemudian naik 96,0% di tahun 2017 dan 97,20% di tahun 2018 kemudian turun menjadi 97,09% di tahun 2019 dan 95,81% di tahun 2020.

11. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Tabel 2.48
Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	76,87	79,01	83,62	84,75	85,99

Sumber Data : Bagian Ortala SETDA Kabupaten Pinrang, 2020

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama lima tahun terakhir di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan dari 76,87 di tahun 2016 kemudian menjadi 79,01 di tahun 2017, lalu 83,62 di tahun 2018 dan 84,75 di tahun 2019, terakhir 85,99 di tahun 2020. Diharapkan agar nilai IKM Kabupaten Pinrang terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi di tahun yang akan datang.

12. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan.

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi didapatkan dari jumlah keragaman konsumsi pada setiap individu yang dikonsumsi setiap harinya, yaitu kelompok padi - padian + kelompok umbi-umbian + kelompok pangan hewani + kelompok minyak lemak + kelompok buah/biji berminyak + kelompok kacang-kacangan + kelompok gula + kelompok buah + kelompok lain-lainnya yang nilainya didapatkan dari aplikasi Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, yang mana dengan besarnya keragaman pangan dikonsumsi oleh masyarakat makin besar pula skor PPH Konsumsi.

Tabel 2.49
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	88,70	89,20	89,30	89,30	89,50

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi Kabupaten Pinrang untuk tahun 2020 sebesar 89,5%. Angka ini masih wajar dan merupakan angka rata-rata yang dimiliki oleh beberapa kabupaten di Indonesia. Akan tetapi dengan angka ini Kabupaten Pinrang harus meningkatkan nilai skor PPH atau paling tidak mempertahankannya.

13. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Pola Pangan Harapan merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan didapatkan dari jumlah produksi dari kelompok padi-padian + kelompok umbi-umbian + kelompok pangan hewani + kelompok minyak lemak + kelompok buah/biji berminyak + kelompok kacang - kacangan + kelompok gula + kelompok sayur dan buah dan kelompok lain-lain melalui aplikasi Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dengan meningkatnya jumlah produksi pada setiap komoditi maka makin besar skor PPH Ketersediaan yang didapatkan.

Adapun skor pola pangan harapan ketersediaan Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.50
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	80,00	80,20	81,10	82,00	82,10

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian skor pola pangan harapan ketersediaan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 berada pada nilai 82,10.

14. Penguatan Cadangan Pangan

Penguatan cadangan pangan dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan bahwa cadangan pangan Nasional terdiri dari cadangan pangan Pemerintah, cadangan pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah maka perhitungan cadangan pangan Pemerintah Daerah menggunakan kreteria jumlah penduduk, konsumsi beras perkapita per tahun dan proporsi terhadap cadangan beras nasional. Dari hasil perhitungan cadangan pangan inilah maka ditetapkanlah nilai penguatan cadangan pangan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.51
Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penguatan Cadangan Pangan	157,05%	113,12%	141,20%	156,06%	173,06%

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Di Kabupaten Pinrang terjadi penguatan cadangan pangan pada tahun 2019 sebesar 156,06% dan tahun 2020 sebesar 173,06%.

15. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Pembangunan sektor pertanian memegang peran yang strategis dalam pembangunan di Sulawesi Selatan. Peran strategis pertanian tersebut antara lain melalui kontribusi yang nyata dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan daerah, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan.

Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) terhadap perekonomian Kabupaten Pinrang semakin nyata. Selama periode 2014 – 2019, rata-rata kontribusi sektor pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) terhadap PDRB mencapai 27,97% merupakan sektor yang memberikan konstribusi terbesar, namun cenderung menurun setiap tahun sekitar -2,04%, ini disebabkan konstribusi dari sektor lain mulai mengalami peningkatan. Nilai Tukar Petani (NTP) dalam 5 (lima) tahun terakhir di atas angka 110 dimana pada tahun 2019 sebesar 106,91 dan tahun 2020 sebesar 105,13. Ini menunjukkan tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Pinrang masih cukup tinggi, namun berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pendapatan petani di Indonesia rata-rata 4 (empat) kali lebih rendah jika dibandingkan dengan tenaga kerja industri pengolahan, tetapi mereka tidak pernah turun ke jalan demonstrasi setiap peringatan hari buru yang dilaksanakan tanggal 1 Mei setiap tahunnya.

Tabel 2.52
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi sektor pertanian	Rp.	4.078.558.150.000	4.146.630.070.000	4.262.829.800.000	4.008.675.325.000	4.138.181.200.000
2	Jumlah PDRB	Rp	14.703.754.250.000	16.360.561.940.000	18.087.778.990.000	19.630.319.950.000	20.083.021.970.000
3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	27,73	25,34	23,56	20,42	20,61

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Pinrang, 2021

16. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 536.910.350.000 atau 3,64% setelah itu cenderung menurun sampai dengan tahun 2020, ini disebabkan sektor pertanian padi masih mendominasi konstribusinya terhadap PDRB sektor Pertanian/Perkebunan.

Tabel 2.53
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija)	Rp.	536.910.350.000	520.911.900.000	515.964.600.000	417.655.600.000	484.163.500.000
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	Rp	4.078.558.150.000	4.146.630.070.000	4.262.829.800.000	4.008.675.325.000	4.138.181.200.000
3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	13,16	12,56	12,10	10,42	11,70

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Pinrang, 2021

17. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Pinrang mengalami penurunan dari 6 ton/ha pada tahun 2019 menjadi 5,9 ton/ha pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan karena beberapa faktor salah satunya karena faktor cuaca dan hama pada tanaman.

Tabel 2.54
Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar
Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar	6,06 ton/ha	6,1 ton/ha	6,19 ton/ha	6 ton/ha	5,9 ton/ha

Sumber data: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021

Tabel 2.55
Luas Panen dan Produksi padi sawah menurut kecamatan
di Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2020

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Kw/Ha)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Suppa	1.942	1.942	11.652	12.632	60,00	59,00
2	Mattiro somepe	10.354	10.354	62.124	60.771	60,00	59,00
3	Lanrisang	8.378	8.378	50.270	51.135	60,00	59,00
4	Mattiro bulu	11.551	11.551	69.306	68.664	60,00	59,00
5	Watang sawitto	9.312	9.312	55.872	54.941	60,00	59,00
6	Paleteang	5.308	5.308	31.848	31.010	60,00	59,00
7	Tiroang	11.367	11.367	68.202	67.065	60,00	59,00
8	Patampanua	12.035	12.035	72.210	79.467	60,00	59,00
9	Cempa	11.246	11.246	67.476	66.995	60,00	59,00
10	Duampanua	15.186	15.186	91.116	90.435	60,00	59,00
11	Batu lappa	2.723	2.723	16.338	20.013	60,00	59,00
12	Lembang	5.685	5.685	34.110	35.854	60,00	59,00
	Jumlah	105.087	105.087	630.524	638.982	60,00	59,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

Luas panen padi sawah di Kabupaten Pinrang selama lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan dari 104.107 Ha pada tahun 2016 menjadi 108.302 Ha di tahun 2020. Begitupun halnya dengan produksi padi di Kabupaten Pinrang yang mengalami peningkatan dari 625.312 ton di tahun 2016 menjadi 638.983 ton di tahun 2020. Walaupun lusa panen dan produksi terus meningkat dalam lima tahun terakhir ini akan tetapi produktivitasnya mengalami fluktuatif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas salah satunya faktor iklim dan hama pada tanaman.

Tabel 2.56
Luas Panen dan Produksi padi sawah di Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	2020	108.302	638.983	59,00
2	2019	105.087	630.524	60,00
3	2018	105.726	654.329	61,89
4	2017	105.839	645.618	61,00
5	2016	104.107	625.311	60,64

Sumber : Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, diantaranya :

1. Kondisi Sarana infrastruktur pertanian khususnya jaringan irigasi masih banyak mengalami kerusakan,
2. Ketersedian saprodi khususnya benih dan pupuk bersubsidi seringkali mengalami kelangkaan di tingkat petani pada saat dibutuhkan,
3. Faktor iklim yang terkadang susah diprediksi seperti banjir di musim hujan dan kekeringan,
4. Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) yang masih sering terjadi,
5. Jumlah penyuluh PNS yang lebih sedikit dibanding jumlah desa/kelurahan yaitu sisa jumlah PPL PNS 73 orang sedangkan jumlah Desa/Kelurahan 109
6. Harga komoditi yang seringkali mengalami Fluktuasi

Faktor–faktor penyebab keberhasilan ini dalam peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, diantaranya:

1. Kerjasama yang baik antara SKPD lingkup pertanian.
2. Dukungan masyarakat khususnya para stakeholder bidang pertanian (Kelompoktani, GP3A/P3A, Penyuluh) sebagai ujung tombak pertanian telah melaksanakan fungsi secara maksimal.
3. Komitmen yang tinggi segenap aparat Dinas Pertanian dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan.
4. Sinergitas program dan kegiatan lintas SKPD di bawah arahan dan petunjuk bapak Bupati telah nyata memberikan hasil yang positif.
5. Dukungan Anggaran dan Kegiatan APBD Tingkat Provinsi dan APBN.

18. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Pinrang setiap tahun mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016-2020, walaupun sektor pertambangan bukan merupakan sektor unggulan, namun sampai saat ini izin pertambangan di Kabupaten Pinrang semakin diperketat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penambangan – penambangan liar, dan sampai saat Pemerintah Kabupaten Pinrang senantiasa melakukan pembinaan, penertiban dan pencegahan terjadinya penambangan liar .

Tabel 2.57
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	2,60	2,63	2,71	2,75	2.80

Sumber Data : BPS Kabupaten Pinrang, 2021

19. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 1,68% dan pada tahun 2020 sebesar 1,55%.

Tabel 2.58
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	-	1,63	1,66	1,68	1,55

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

20. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang terhadap PDRB Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2016 – 2020 mengalami peningkatan, dari tahun ketahun yang meliputi perikanan tangkap, perikanan darat, dan perikanan laut.

Tabel 2.59
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kelautan dan Perikanan	Rp.	2.877.189,74	3.232.876,61	4.408.650,00	3.908.397,00	4.179.275,00
PDRB	Rp.	14.703.754,25	16.360.561,94	18.087.778,99	19.630.319,95	20.083.012,97
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	19,52	19,70	24,37	19,91	20,81

Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang, 2021

21. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang terhadap PDRB Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2016–2020 mengalami peningkatan dari tahun ketahun, namun sampai saat ini Kabupaten Pinrang belum memiliki komoditi berdasarkan ekspor bersih perdagangan.

Tabel 2.60
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Perdagangan	Rp.	1.898.149,92	2.148.673,58	2.512.472,39	2.871.418,43	2.895.761,18
PDRB	Rp.	14.703.754,25	16.360.561,94	18.087.778,99	19.630.319,95	20.083.012,97
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,08	13,41	13,89	14,63	14,42

Sumber Data : Dinas Perindagem Kabupaten Pinrang, 2021

22. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Industri Kabupaten Pinrang terhadap PDRB Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2016–2020 mengalami fluktuatif, namun nilai yang paling tinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 6,35% atau senilai Rp.1.041.413.170.000.

Tabel 2.61
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Industri	Rp.	922.929,32	1.041.413,17	1.103.170,41	1.233.288,21	1.233.483,28
PDRB	Rp.	14.703.754,25	16.360.561,94	18.087.778,99	19.630.319,95	20.083.012,97
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	6,26	6,35	6,09	6,28	6,14

Sumber Data : Dinas Perindagem Kabupaten Pinrang, 2021

23. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintahan menuju pemerintahan berkelas dunia. Dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi dilaksanakan pada aparatur pemerintah melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi. Program-program reformasi birokrasi tersebut ada yang berhubungan secara langsung dan ada yang tidak secara langsung dengan pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi. Peningkatan jumlah opini audit BPK Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara langsung dapat meningkatkan pencapaian target jumlah opini audit BPK berpredikat WTP. Selain itu, peningkatan kualitas SAKIP dan LAKIP akan berpengaruh langsung pada pencapaian target jumlah instansi pemerintah yang akuntabel.

Tabel 2.62
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun	
		2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	52,44	52,67

Sumber data: Bagian Organisasi Sekretariat daerah, 2021

Di Kabupaten Pinrang untuk nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 yaitu 52,44 dan tahun 2020 yaitu 52,67.

24. Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Untuk Kabupaten Pinrang nilai SAKIP pada tahun 2019 yaitu 61,54 sedangkan untuk tahun 2020 yaitu 62,86.

Tabel 2.63
Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	50,87	56,98	60,06	61,54	62,86

Sumber data: Bagian Organisasi Sekretariat daerah, 2021

25. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 yaitu 83,75 dan pada tahun 2020 dengan nilai 85,99.

Tabel 2.64
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik
Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (nilai)	76,87	79,01	83,62	84,75	85,99

Sumber data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2021

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

1. Bidang Urusan Pendidikan

1.1 Tingkat Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak-anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Pada tahun 2019 tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD sebesar 73,50% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 92,83%.

Tabel 2.65
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam PAUD Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	Anak	12.557	14.268	14.870	8.019	13.548
2	Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	Anak	20.757	22.023	22.06	10.910	14.594
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	60,50	64,79	67,45	73,50	92,83

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

1.2 Tingkat Partisipasi Usia Pendidikan Dasar

Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pada tahun 2019 sebesar 98,25% dan pada tahun 2020 sebesar 95,28%.

Tabel 2.66
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan dasar Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Anak	46.821	46439	46781	46,527	44.232
2	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	Anak	47.023	46599	46936	47,354	46.423
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,57	99,66	99,67	98,25	95,28

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

1.3 Tingkat Partisipasi Usia Pendidikan Menengah Pertama

Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama pada tahun 2019 sebesar 82,45% dan 92,06% pada tahun 2020.

Tabel 2.67
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	Anak	24023	23445	23168	19.227	21.309
2	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	Anak	25494	24797	24455	23.319	23.147
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	94,23	94,55	94,74	82,45	92,06

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

1.4 Pendidikan Kesetaraan

Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada tahun 2019 sebesar 92,37% dan pada tahun 2020 sebesar 97,27%.

Tabel 2.68
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Anak	2.469	2.652	3.096	2.965	3.383
2	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	Anak	2.754	2.935	3.363	3.210	3.478
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	89,64	90,37	92,05	92,37	97,27

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

2. Bidang Urusan Kesehatan

2.1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

Rasio daya tampung rumah sakit rujukan pada tahun 2019 sebesar 0,05% dan pada tahun 2020 sebesar 0,07%.

Tabel 2.69
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Orang	237	197	200	200	303
2	Jumlah Penduduk di Kabupaten / Kota	Orang	366.789	369.595	374.583	377.199	407.236
3	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0,06	0,05	0,05	0,05	0,07

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

2.2 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi

Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.70
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	RS	1	1	1	3	3
2	Jumlah RS di Kabupaten / Kota	RS	2	2	2	3	3
3	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	50	50	50	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

2.3 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2019 sebesar 93,94% dan 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.71
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ibu Hamil yang	Ibu hamil	6.879	7.100	6.899	7.547	7.830

	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						
2	Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten / Kota	Ibu hamil	7.529	7.100	7.318	8.034	7.951
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	91,37	92,21	94,27	93,94	98,47

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

2.4 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan

Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan pada tahun 2019 sebesar 93,20% dan 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.72
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Ibu Bersalin	6.856	6.889	6.739	7.210	7.383
2	Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten / Kota	Ibu Bersalin	7.187	7.024	6.985	7.736	7.383
3	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	95,39	98,08	96,48	93,20	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

2.5 Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2019 mencapai 107% dan 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.73
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Bayi	7.271	6.891	6.741	7.717	7.394

2	Jumlah Bayi Baru Lahir di Kabupaten / Kota	Bayi	6.825	6.991	6.741	7.187	7.384
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	107	99	100	107	100,13

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

2.6 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

Cakupan pelayanan kesehatan balita yang sesuai standar telah mencapai 100% pada tahun 2019 dan tahun 2020 menurun menjadi 69,88%.

Tabel 2.74
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Balita	28.468	33.351	33.921	25.095	24.843
2	Jumlah Balita di Kabupaten / Kota	Balita	25.806	29.571	35.640	25.095	35.546
3	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	110,32	112,78	95,18	100,00	69,88

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

2.7 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar pada tahun 2019 dan 2020 telah mencapai 100%.

Tabel 2.75
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Anak	5.108	22.491	12.432	11.639	23.244
2	Jumlah Anak Usia Pendidikan	Anak	6.477	41.970	12.432	11.639	23.244

	Dasar di Kabupaten / Kota						
3	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	78,86	53,59	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

2.8 Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan

Persentase orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan yang sesuai standar pada tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.76
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2019	2020
1	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	0	159.221
2	Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten / Kota	Orang	0	159.221
3	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	0	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

2.9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2019 dan tahun 2020 telah mencapai 100%.

Tabel 2.77
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan	Orang	4.668	12.698	13.199	15.231	43.332

	sesuai standar						
2	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten / Kota	Orang	12.520	23.170	15.106	15.231	43.332
3	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	37,28	54,80	87,38	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

2.10 Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2019 sebesar 3,28% dan tahun 2020 telah mencapai 100%.

Tabel 2.78
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	13.237	3.952	29.147	8.776	121.474
2	Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten / Kota	Orang	256.351	95.765	301.347	266.802	121.474
3	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	5,16	4,01	9,67	3,28	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

2.11 Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Persentase penderita diabetes mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2019 dan tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.79
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	0	0	0	2.615	3.263
2	Jumlah penderita DM di Kabupaten / Kota	Orang	0	0	0	2.615	3.263
3	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0	0	0	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

2.12 Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa

Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai standar pada tahun 2019 dan tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.80
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2.732	1.360	1.389	918	867
2	Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten / Kota	Orang	2.732	1.360	1.389	918	867
3	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

2.13 Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar

Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar pada tahun 2019 dan tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.81
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	472	464	271	596	398
2	Jumlah penderita TBC di Kabupaten / Kota	Orang	472	464	271	596	398
3	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

2.14 Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar pada tahun 2019 dan tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.82
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang	0	0	0	9.404	7.799
2	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang	0	0	0	9.404	7.799
3	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	0	0	0	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1 Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Infrastruktur Pengendalian Banjir

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebesar 52,08% pada tahun 2019 dan 64,55% pada tahun 2020.

Tabel 2.83
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Tahun 2016 - 2020

N o	Indikator	Satu an	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	Ha	810,086.71	9,673,622.92	10,314,650.95	13,784,446.96	17.083.283,73
2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	Ha	26.466.315,65	26.466.315,65	26.466.315,65	26.466.315,65	26.466.315,65
3	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	30,6	36,55	38,97	52,08	64,55

Sumber Data : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, 2021

3.2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota pada tahun 2019 sebesar 58,26 % dan pada tahun 2020 sebesar 58,29%.

Tabel 2.84
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Meter	1,360,824.52	1,360,824.52	1,581,992.61	1,723,085.65	1.724.060,26
2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)	Meter	2.957.621,08	2.957.621,08	2.957.621,08	2.957.621,08	2.957.621,08
3	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	46,01	46,01	53,49	58,26	58,29

Sumber Data : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, 2021

3.3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi mencapai 92,80% pada tahun 2019 dan 93,08% pada tahun 2020.

Tabel 2.85
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha),direhabilitasi (ha),dioperasi dan pelihara (ha)	Ha	4.650	4.700	4.750	5.015	5.030
2	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota	Ha	5.142	5.142	5.142	5.404	5.404
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	90,43	91,40	92,38	92,80	93,08

Sumber Data : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, 2021

3.4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Pinrang

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 93,50%.

Tabel 2.86
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Pinrang Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Rumah tangga	-	-	78.038	92.665	93.014
2	Jumlah total proyeksi rumah tangga	Rumah tangga	-	-	86.610	99.490	99.490

3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	%	-	-	90,10	93,14	93,50
---	---	---	---	---	-------	-------	-------

Sumber Data : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2021

3.5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic pada tahun 2020 mencapai 97,56%.

Tabel 2.87
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD)	Rumah	-	-	112.597	116.061	116.948
2	Jumlah rumah di Kabupaten Pinrang	Rumah	117.829	118.471	119.051	119.667	119.868
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	-	-	94,57	96,99	97,56

Sumber Data : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2021

3.6 Rasio kepatuhan IMB

Rasio kepatuhan terhadap izin mendirikan bangunan (IMB) pada tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.88
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	IMB	77.851	82.061	85.867	88.127	88.352
2	Jumlah IMB yang berlaku	IMB	77.851	82.061	85.867	88.127	88.352
3	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Rasio	1	1	1	1	1

Sumber Data : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2021

3.7 Tingkat Kemantapan Jalan di Kabupaten Pinrang

Tingkat kemantapan jalan kabupaten sebesar 95,58% pada tahun 2019 dan sebesar 65,73% pada tahun 2020.

Tabel 2.89
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	km	707,538	715,50	801,54	823,64	566,38
2	Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	km	842,30	861,70	861,70	861,7	861,7
3	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	84	83,03	93,01	95,58	65,73

Sumber Data : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2021

3.8 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2020 mencapai 89,90%.

Tabel 2.90
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	orang	-	-	-	313	383
2	Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	orang	-	-	-	352	426
3	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	-	-	-	88,92	89,90

Sumber Data : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2021

3.9 Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi mencapai 100% pada tahun 2020.

Tabel 2.91
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Proyek	422	441	265	255	121
2	Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Proyek	422	441	265	255	121
3	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	1	1	1	1	1

Sumber Data : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2021

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4.1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.92
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten Pinrang Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	Rumah	-	-	-	341	1.010,00
2	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	Rumah	-	-	-	1.941	1.010,00
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	-	-	-	17,57	100,00

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

4.2 Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah

Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah di Kabupaten Pinrang belum tersedia.

Tabel 2.93
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah tangga	-	-	-	-	-
2	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	Rumah tangga	-	-	-	-	-
3	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

4.3 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten Pinrang yang ditangani

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha Kabupaten Pinrang yang ditangani sebesar 49,67% pada tahun 2020.

Tabel 2.94
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	Ha	-	0,21	0,4	7,99	3,04
2	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	Ha	13,46	13,46	13,25	14,11	6,12
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	0	1,56	3,01	56,63	49,67

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

4.4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 5,76% dan pada tahun 2020 berkurang sebanyak 4,62%.

Tabel 2. 95
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah unit rumah tidak layak huni	Rumah	6.092	5.964	5.687	6.887	5.537
2	Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	Rumah	117.829	118.471	119.051	119.667	119.868
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	5,17	5,03	4,77	5,76	4,62

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

4.5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.96
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	Rumah	-	-	-	6.722	6.846
2	Jumlah unit rumah kab/kota	Rumah	-	-	-	6.722	6.846
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	-	-	-	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

5. Bidang Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5.1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Persentase gangguan trantibum di Kabupaten Pinrang yang dapat diselesaikan pada tahun 2019 sebesar 60%, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 100%.

Tabel 2.97
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengaduan yang ditangani	Pengaduan	11	9	10	6	9
2	Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	Pengaduan	11	9	10	10	9
3	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	60,00	100,00

Sumber Data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2021

5.2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Persentase perda dan perkada yang ditegakkan pada tahun 2019 sebesar 60,61% dan pada tahun 2020 yaitu sebesar 75,76%.

Tabel 2.98
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	Pelanggaran	4	7	18	35	25
2	Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Perda/Perkada	41	41	41	33	33
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	9,76	17,07	43,90	60,61	75,76

Sumber Data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2021

5.3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2019 sebanyak 405.671 jiwa yang berada di 12 kecamatan, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 363.417 jiwa.

Tabel 2.99
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa/kecamatan	402.832 Jiwa, 12 kecamatan	408.582 Jiwa, 12 kecamatan	401.858 Jiwa, 12 kecamatan	405.671 Jiwa, 12 kecamatan	363.417 jiwa, 12 kecamatan

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

5.4 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2019 sebanyak 405.671 jiwa dan pada tahun 2020 sebanyak 407.236 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan.

Tabel 2.100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa/kecamatan	402.832 Jiwa, 12 kecamatan	408.582 Jiwa, 12 kecamatan	401.858 Jiwa, 12 kecamatan	405.671 Jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

5.5 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2019 sebanyak 405.671 jiwa dan pada tahun 2020 sebanyak 407.236 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan.

Tabel 2.101
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan
dan evakuasi korban bencana Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa/kecamatan	402.832 Jiwa, 12 kecamatan	408.582 Jiwa, 12 kecamatan	401.858 Jiwa, 12 kecamatan	405,671 Jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan

Sumber Data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2021

5.6 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Persentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 61,39% dan pada tahun 2020 sebesar 83,51%

Tabel 2.102
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	Layanan	61	57	79	124	81
2	Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	Kejadian	85	96	119	202	97
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	71,76	59,38	66,39	61,39	83,51

Sumber Data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2021

5.7 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

Waktu tanggap (response time) terhadap penanganan kebakaran di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 selama 15 menit.

Tabel 2.103
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15

Sumber Data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2021

6. Bidang Urusan Sosial

6.1 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 telah mencapai 100%.

Tabel 2.104
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang tepenuhi kebutuhan dasanya di luar panti	Orang	-	-	-	53	84
2	Populasi penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Orang	-	-	-	53	84
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%				100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Sosial, 2021

Data pada tahun 2016-2018 belum tersedia karena Dinas Sosial Kabupaten Pinrang belum memasukkan program dan kegiatan yang mengacu pada indikator Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti. Selain itu

Dinas Sosial Kabupaten Pinrang belum memiliki data atau masih dalam proses pendataan terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di luar panti.

6.2 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 telah mencapai 100%.

Tabel 2.105
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	Korban	379	192	292	118	79
2	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	Korban	379	192	292	118	79
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Sosial, 2021

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

1.1 Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 0,71% dan meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,92%.

Tabel 2.106
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	Kegiatan	13	20	17	13	18
2	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	Kegiatan	1.844	1.812	1.864	1.820	1.952
3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0,70	1,10	0,91	0,71	0,92

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2021

1.2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Kabupaten Pinrang sebesar 3,44% dan pada tahun 2020 sebesar 0,68%.

Tabel 2.107
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Tenaga kerja	344	216	668	204	40
2	Jumlah tenaga kerja keseluruhan	Tenaga kerja	4.365	5.093	5.798	5921	5.921
3	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	7,88	4,24	11,44	3,44	0,68

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2021

1.3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Pinrang selama tahun 2019-2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 7.925,52 pada tahun 2019 dan sebesar 7.982,56 pada tahun 2020.

Tabel 2.108
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	Rupiah	10.397.105,92	11.212.623,63	11.987.443,92	12.770.078,59	12.826.451,93
2	Jumlah tenaga kerja	Tenaga kerja	148.560	146.653	162.253	161.126	160.681
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(Juta Rupiah)	6.998,59	7.645,68	7.388,85	7.925,52	7.982,56

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2021

1.4 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 36,69%.

Tabel 2.109
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Perusahaan	75	97	113	164	164
2	Jumlah Perusahaan	Perusahaan	369	390	432	447	447
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	20,33	24,87	26,16	36,69	36,69

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2021

1.5 Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten sebesar 58,1 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 51,55%.

Tabel 2.110
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)
melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten
Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	Pencaker	665	1.600	635	875	383
2	Jumlah pencaker yang terdaftar	Pencaker	753	2.908	1.130	1.506	743
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	88,31	55,02	56,19	58,1	51,55

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2021

2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 0,67% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 9,19%.

Tabel 2.111
Persentase ARG pada belanja langsung APBD Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	Rupiah				46.650.000	58.769.455.600
2	Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di APBD	Rupiah				6.942.315.000	639.301.728.716
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%				0,67	9,19

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A, 2021

2.2 Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 0,03% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 0,12%.

Tabel 2.112
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten Pinrang Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	Anak				26	159
2	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	Anak				82.606	135.783
3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%				0,03	0,12

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A, 2021

2.3 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) pada tahun 2019 sebesar 0,03% dan pada tahun 2020 sebesar 0,05%.

Tabel 2.113
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Perempuan				42	111
2	Jumlah penduduk perempuan	Perempuan				163.106	205.657
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%				0,03	0,05

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A, 2021

3. Bidang Urusan Pangan

3.1 Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)

Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 32,11% dan meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 35,43%.

Tabel 2.114
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cadangan pangan	Ton	15.705,47	11.312,77	14.120,50	15.606,44	17.306,2
2	Jumlah kebutuhan pangan	Ton	49.043,16	49.029,84	48.222,96	48.500,64	48.840,24
3	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	32,02	23,07	29,30	32,18	35,43

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

4. Pertanian

4.1 Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkanpada tahun 2020 telah mencapai 21,25%.

Tabel 2.115
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi	Ha	-	-	-	-	85.000
2	Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	ha	-	-	-	-	400.000
3	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	-	-	-	-	21,25

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2021

4.2 Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum

Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 masih 22,5%.

Tabel 2.115
Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	ha	-	-	-	-	4.500
2	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	ha	-	-	-	-	20.000
3	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	-	-	-	-	22,5

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2021

4.3 Persentase Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal

Persentase ketersediaan lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 21,18%.

Tabel 2.117
Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	ha	-	-	-	-	4.500
2	Luas izin lokasi yang diterbitkan	Ha	-	-	-	-	21.250
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	-	-	-	-	21,18

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2021

4.4 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 16,6%.

Tabel 2.118
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan
yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penerima tanah obyek land reform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	orang	-	-	-	-	2.500
2	Jumlah penerima tanah obyek landreform	orang	-	-	-	-	15.000
3	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	-	-	-	-	16,6

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2021

4.5 Tersedianya tanah untuk masyarakat

Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat berdasarkan izin membuka tanah yang telah diterbitkan pada tahun 2020 telah mencapai 21%.

Tabel 2.119
Tersedianya tanah untuk masyarakat Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	ha	-	-	-	-	630
2	Luas izin membuka tanah yang diterbitkan	ha	-	-	-	-	3.000
3	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	-	-	-	-	21

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2021

4.6 Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi

Tabel 2.120
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	kasus	-	-	-	-	4
2	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	kasus	-	-	-	-	20
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	-	-	-	20

Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi di Kabupaten Pinrang selama tahun 2020 telah mencapai 20%.

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2021

5. Lingkungan Hidup
5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pinrang

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Pinrang dihitung berdasarkan indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan hutan. IKLH di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 yaitu 68,29% dan pada tahun 2020 dengan nilai 68,74%.

Tabel 2.121
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pinrang
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	IKA = Indeks Kualitas Air	Nilai	65,00	68,33	70	70	70
2	IKU = Indeks Kualitas Udara	Nilai	88,75	97,24	95,88	95,4	94,31
3	ITH = Indeks Tutupan Hutan	Nilai	57,58	57,58	57,58	46,71	48,62
4	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%).	%	69,15	72,69	72,79	68,29	68,74

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

5.2 Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Pinrang

Pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 71,80% dan pada tahun 2020 sebesar 57,19%.

Tabel 2.122
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota
Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani	Ton	69.699	75.524	128.892,52	45.338,81	36.205,97
2	Total Volume Timbunan Sampah Kab/Kota	Ton	81.026	81.026	60.846,03	62.062,95	63.304,14
3	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kab/Kota	%	86,02	93,21	95	71,80	57,19

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

5.3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang mencapai 100% selama tahun 2019-2020.

Tabel 2.123
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan,dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota	Usaha / kegiatan	-	21	23	56	3
2	Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	Usaha / kegiatan	-	21	23	56	3
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	-	77,00	85,00	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6.1 Perekaman KTP Elektronik

Persentase penduduk usia 17 tahun ke atas di Kabupaten Pinrang yang telah melakukan perekaman KTP elektronik pada tahun 2019 sebanyak 90,62% dan pada tahun 2020 sebanyak 96,91%.

Tabel 2.124
Perekaman KTP Elektronik Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	penduduk	243.025	256.718	271.056	277.115	278.715
2	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	penduduk	287.340	287.478	279.262	284.002	287.592
3	Perekaman KTP Elektronik	%	84,57	89,30	97,06	90,62	96,91

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

6.2 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 8,28% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 26,91%.

Tabel 2.125
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	Anak	-	-	-	10.749	34.194
2	Jumlah anak usia 0-17 tahun	Anak	-	-	-	129.789	127.072
3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	-	-	-	8,28	26,91

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

6.3 Kepemilikan akta kelahiran

Jumlah anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Pinrang yang telah memiliki akta kelahiran selama tahun 2019 sebesar 92,20% dan tahun 2020 sebesar 26,91%.

Tabel 2.126
Kepemilikan akta kelahiran Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	Anak	121.333	121.238	119.897	130.135	130.197
2	Jumlah anak usia 0-18 tahun	Anak	143.442	138.418	129.575	135.783	134.580
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	84,58	87,58	92,53	95,84	96,74

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

6.4 Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja samapada tahun 2019 sebesar 16,28% sementara pada tahun 2020 meningkat menjadi 72,09%.

Tabel 2.127
Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	-	-	-	7	31
2	Jumlah OPD	OPD	-	-	-	43	43
3	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	-	-	-	16,28	72,09

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7.1 Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

Desa Tertinggal adalah desa yang masyarakatnya serta wilayahnya kurang berkembang dibandingkan desa lainnya.

Persentase pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 56%.

Tabel 2.128
Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun	Desa	9	5	14	9	7
2	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	Desa	50	41	36	16	12
3	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	18	12	39	56	56

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

7.2 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang bias memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pada tahun 2019 sebanyak 1 desa dan untuk tahun 2020 sebanyak 2 desa.

Persentase peningkatan status Desa Mandiri di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 masih 5%.

Tabel 2.129
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa berkembang yang memenuhi ktiteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	Desa	0	0	1	1	2
2	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	Desa	7	19	28	46	39

3	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0	0	4	2	5
---	--	---	---	---	---	---	---

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8.1 TFR (Angka Kelahiran Total)

Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 2,28 dan tahun 2020 sebesar 2,64.

Tabel 2.130
TFR (Angka Kelahiran Total) Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,50	2,70	2,68	2,65	2,64

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A, 2021

8.2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) pada tahun 2019 sebesar 64,72% dan tahun 2020 sebesar 65,02%.

Tabel 2.131
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta KB aktif modern	peserta	35.226	36.616	36.395	37.346	36.605
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasangan	56.977	56.928	56.372	57.705	56.297
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	61,82	84,32	64,56	64,72	65,02

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A, 2021

8.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) pada tahun 2019 sebesar 11,51% dan tahun 2020 sebesar 11,48%.

Tabel 2.132
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	PUS	9.259	20.321	8.718	6.643	6.464
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	PUS	56.977	56.928	56.372	57.705	56.297
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	16,25	23,34	15,47	11,51	11,48

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A, 2021

9. Perhubungan

9.1 Rasio konektivitas Kabupaten Pinrang

Rasio konektivitas di Kabupaten Pinrang dihitung berdasarkan jumlah trayek dikali bobot trayek kemudian dibagi dengan jumlah kebutuhan trayek. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 diperoleh capaian 1,3.

Tabel 2.133
Rasio konektivitas Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	IK 1 (Angkutan Jalan) = Jumlah trayek x bobot trayek) bagi jumlah kebutuhan trayek	1	1	1	1	1
2	IK 2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) +(IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2021

9.2 Kinerja lalu lintas Kabupaten

Kinerja lalu lintas di Kabupaten Pinrang diperoleh persentase sebesar 0,44 pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 2.134
Kinerja lalu lintas Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2021

10. Komunikasi dan Informatika

10.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pinrang telah mencapai 100% pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Tabel 2.135
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	OPD	0	43	83	83	83
2	Jumlah OPD	OPD	83	83	83	83	83
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	0	50,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2021

10.2 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada tahun 2017 masih mencapai 0% dikarenakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian baru terbentuk pada tahun tersebut. Pada tahun 2018 Pemerintah Kab. Pinrang Mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai target kinerja yang direncanakan sehingga mencapai perolehan 100%. Pada tahun 2019

dan tahun 2020 ditargetkan 26 sistem utk diintegrasikan dan yang terrealisasi hanya 4 sistem saja sehingga realisasi capaian hanya 15,38%.

Tabel 2.136
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	layanan publik	0	0	3	4	4
2	Jumlah layanan publik	layanan publik	0	3	3	26	26
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0	0	100	15,38	15,38

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2021

10.3 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah di Kabupaten Pinrang tahun Pada tahun 2016 mencapai 86,88 persen dimana penduduk yang menjadi sasaran sebanyak 106.488 jiwa dari 122.563 jiwa, tahun 2017 mencapai 86,65 persen dimana penduduk yang menjadi sasaran sebanyak 107.493 jiwa dari 124.055 jiwa, tahun 2018 mencapai 80,74 persen dimana penduduk yang menjadi sasaran sebanyak 165.490 jiwa dari 204.950 jiwa di tahun 2019 mencapai 81,15 persen dimana penduduk yang menjadi sasaran sebanyak 230.095 jiwa dari 283.553 jiwa dan di tahun 2020 mencapai 90,97 persen dimana penduduk yang menjadi sasaran sebanyak 257.960 jiwa dari 283.553 jiwa yang ada di Kabupaten Pinrang.

Tabel 2.137
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
----	-----------	--------	------	------	------	------	------

1	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Penduduk	106.488	107493	165.490	230.095	257.960
2	Jumlah penduduk usia 17 Tahun keatas	Penduduk	122.563	124.055	204.950	283.553	283.553
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi SasaranPenyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang	%	86,88	86,65	80,74	81,15	90,97

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2021

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

11.1 Persentase Koperasi yang berkualitas

Jumlah koperasi yang berkualitas di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 13,48% dan pada tahun 2020 sebesar 13,10%.

Tabel 2.138
Persentase Koperasi yang berkualitas Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	Koperasi	51	66	52	50	49
2	Jumlah seluruh koperasi	Koperasi	353	364	370	371	374
3	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	14,45	18,13	14,05	13,48	13,10

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2021

11.2 Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 17,11% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 8,94%.

Tabel 2.139
Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Usaha mikro	100	200	400	480	1.856
2	Jumlah usaha mikro keseluruhan	Usaha mikro	19.901	20.202	20.567	20.767	20.767
3	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	0,5	0,9	1,9	2,3	8,94

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2021

12. Penanaman Modal

12.1 Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar -11,03% dan pada tahun 2020 sebesar 1,95%.

Tabel 2.140
Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang
Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investasi tahun n - Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	Rp	1.121.438.828.103	50.573.408.000	235.184.600.000	-190.803.343.932	34.314.717.812
2	Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	Rp	1.634.742.292.000	168.531.570.000	1.920.500.300.000	1.729.696.956.068	1.764.011.673.880
3	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang	%	68,61	30,01	12,25	-11,03	1,95

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

13. Kepemudaan dan Olahraga

13.1 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Sebagaimana dalam UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ditegaskan bahwa pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan salah satu strategi pelayanan kepemudaan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda, pemberian kesempatan yang sama untuk berkekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi menuju kemandirian pemuda.

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 0,21% dan pada tahun 2020 sebesar 0,52%.

Tabel 2. 141
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	Pemuda	-	100	155	201	522
2	Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota	Pemuda	-	95.564	97.247	98.281	101.056
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	-	0,10	0,16	0,21	0,52

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

13.2 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan pada tahun 2019 sebesar 0,83% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,39%.

Tabel 2.142
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Pemuda	-	433	673	816	2.418
2	Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota	Pemuda	-	95.564	97.247	98.281	101.056
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	-	0,45	0,69	0,83	2,39

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

13.3 Peningkatan Prestasi Olahraga

Peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Pinrang dilihat dari jumlah perolehan medali pada event olahraga tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2019 diraih 4 medali pada event olahraga namun pada tahun 2020 tidak ada

Tabel 2.143
Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	-	38	146	4	Tidak ada

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

14. Statistik

14.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pinrang telah mencapai 100% pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Hal ini berkat strategi pengumpulan data dan distribusi data statistic melalui suatu system (Decision Support System DSS) Lontara Pinrang yang sudah terintegrasi di pusat data Kabupaten Pinrang.

Tabel 2.144
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	OPD	0	44	44	44	44
2	Jumlah OPD	OPD	44	44	44	44	44
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	0	100	100	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2021

14.2 Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah di Kabupaten Pinrang telah mencapai 100% pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Tabel 2.145
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	OPD	0	44	44	44	44
2	Jumlah OPD	OPD	44	44	44	44	44
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	0	100	100	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2021

15. Persandian

15.1 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 sampai tahun 2020 masih menunjukkan pencapaian kinerja 0 % dimana belum melakukan system elektronik (S.E) yang menerapkan System Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian, salah satu upaya dalam melaksanakan system keamanan data dan informasi Pemerintah Kabupaten pinrang pada tahun 2017 - 2019 melalui pemasangan Firewall pada tahun 2020 penambahan system keamanan dengan pemasangan Honypot sebagai system keamanan data dan informasi kabupaten Pinrang.

Tabel 2.146
Tingkat keamanan informasi pemerintah Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah nilai per area keamanan informasi	OPD	0	0	0	0	0
2	Jumlah area penilaian	OPD	5	5	5	0	0
3	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2021

16. Kebudayaan

16.1 Terlestarikannya Cagar Budaya

Jumlah cagar wisata yang terdata dan telah dilestarikan di Kabupaten Pinrang telah mencapai 100% pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Tabel 2.147
Terlestarikannya Cagar Budaya Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar budaya	44	44	44	44	44
2	Jumlah cagar budaya yang terdata	Cagar budaya	44	44	44	44	44
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

17. Perpustakaan

17.1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Pinrang belum ada.

Tabel 2.148
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, 2021

17.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 38,44% dan pada tahun 2020 sebesar 25,92%.

Tabel 2.149
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan	%	0,90	0,98	0,100	0,146	0,123
2	UPLM 2 = Ketercukupan koleksi	%	85,00	87,25	90,05	92,41	78
3	UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan	%	0,98	0,100	0,107	0,127	0,107
4	UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	%	95,42	103,43	92,56	109,92	85,05

5	UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP	%	-	-	-	-	-
6	UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	%	0,005	0,005	0,006	0,009	0,005
7	UPLM 7 = Anggota perpustakaan	%	20,21	23,00	25,00	28,03	18,26
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum \text{UPLM} / \text{AM}$	%	33,75	35,79	34,63	38,44	30,26

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, 2021

18. Kearsipan

18.1 Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja

Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Pinrang sebesar 75% pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Tabel 2.150
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	T = Tingkat ketersediaan arsip	%					
2	a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	70	75	85	100	100
3	i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	80	79	90	100	100
4	s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	70	80	90	100	100
5	j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	-	-	-	-	-
6	$T = (a + i + s + j)/4$	%	220	234	265	300	300
			55	58,5	66,25	75	75

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, 2021

18.2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pinrang sebesar 33,33% pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Tabel. 2.151
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban
setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara,
pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%					
2	m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	%	-	-	-	-	-
3	b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	%	-	-	-	-	-
4	g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab.yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	%	-	-	-	-	-
5	a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	%	-	-	-	100	100
6	c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	%	70	80	90	100	100
7	i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	%	-	-	-	-	-
8	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$	%	70	80	90	200	200
			11,66	13,33	15	33,33	33,33

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, 2021

2.1.3.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

1.1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)

Selama kurun waktu 2016 – 2020, produksi perikanan Kabupaten Pinrang meningkat sebesar 10,98% per tahun, yakni dari 53.340,67 ton pada tahun 2016 menjadi 77.259,41 ton pada tahun 2020.

Tabel 2.152
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) di wilayah Kabupaten Pinrang (sumber data: one data KKP) Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) (sumber data: one data KKP)	Ton	53.340,67	58.511,39	65.552,62	69.475,78	77.259,41

Sumber Data : Dinas Perikanan, 2021

2. Pariwisata

2.1 Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan

Keberhasilan pembangunan pariwisata suatu daerah dapat dilihat dan diukur dari tingkat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Untuk menarik minat para wisatawan untuk berkunjung diperlukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas dan citra pariwisata daerah. Seperti dengan menyediakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata dan promosi pariwisata dalam memperkenalkan produk wisata untuk menarik jumlah kunjungan wisatawan.

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 16,67% namun pada tahun 2020 persentase pertumbuhannya -100.

Tabel 2.153
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1	Wisatawan	-	5	3	5	-35
2	Jumlah wisatawan tahun n-1	Wisatawan	-	22	27	30	35
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-	22,73	11,11	16,67	-100,00

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Pada tabel di atas, dapat kita lihat realisasi Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 persentase pertumbuhan 22,73% pada tahun 2018 persentase pertumbuhan 11,11%. Pada tahun 2019 persentase pertumbuhan 16,67% namun pada tahun 2020 tidak ada wisatawan mancanegara (-100%). Hal tersebut diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

2.2 Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten Pinrang

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 mencapai 13,94% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -88,01%.

Tabel 2.154
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Pinrang Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1	Wisatawan	-	10.765	10.577	7.528	- 54.149
2	Jumlah wisatawan tahun n-1	Wisatawan	-	32.658	43.423	54.000	61.528
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Pinrang	%	-	32,96	24,36	13,94	-88,01

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Pada tabel di atas, dapat kita lihat realisasi Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 persentase pertumbuhan 32,96% persentase pertumbuhan pada tahun 2018 persentase pertumbuhan 24,36%. Pada tahun 2019 persentase pertumbuhan 13,94% namun pada tahun 2020 persentase pertumbuhan -88,01%. Hal tersebut diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

2.3 Tingkat Hunian Akomodasi

Pesatnya pertumbuhan di sektor Pariwisata mempengaruhi pesatnya pembangunan di bidang pendukungnya, salah satu komponen industri pariwisata yang besar peranannya di Indonesia adalah usaha perhotelan. Dilihat dari fungsi utama hotel adalah sewa kamar atau jasa penginapan. Konsumen mengharapkan sesuatu yang bukan hanya sekedar kamar menginap, namun mereka lebih mengharapkan hal lain seperti pelayanan, fasilitas dan kondisi lingkungan yang menyenangkan, sopan santun dan rasa hormat dari

seluruh karyawan dalam melayani. Hal tersebut membutuhkan sebuah kegiatan komunikasi untuk dapat saling mendapat pengertian dari berbagai pihak terutama pihak yang paling berpengaruh untuk perusahaan. Sehingga semua pihak mendapatkan kepuasan dan terpenuhi kebutuhannya.

Tingkat hunian akomodasi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 13,15% dan pada tahun 2020 sebesar 12,24%.

Tabel 2.155
Tingkat Hunian Akomodasi Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kamar yang terjual	Kamar	-	209	238	302	279
2	Jumlah kamar yang tersedia	Kamar	-	2.148	2.152	2.297	2.280
3	Tingkat Hunian Akomodasi	%	-	9,72	11,05	13,15	12,24

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Pada tabel di atas, dapat kita lihat realisasi Persentase tingkat hunian akomodasi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 persentase pertumbuhan 9,72, pada tahun 2018 persentase pertumbuhan 11,05%. Pada tahun 2019 persentase pertumbuhan 13,15% namun pada tahun 2020 persentase pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 12,24%. Hal tersebut diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

2.4 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 1,68% dan pada tahun 2020 sebesar 1,55%.

Tabel 2.156
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	-	1,63	1,66	1,68	1,55

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Pada tabel di atas, dapat kita lihat realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sebesar 1,63%, pada tahun 2018 sebesar 1,66%. Pada tahun 2019 sebesar 1,68% namun pada tahun 2020 persentase pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 1,55%. Hal tersebut diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

2.5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2019 sebesar 2,28% dan pada tahun 2020 1,72%.

Tabel 2.157
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	-	2,07	2,12	2,28	1,72

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Pada tabel di atas, dapat kita lihat realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sebesar 2,07%, pada tahun 2018 sebesar 2,12%. Pada tahun 2019 sebesar 2,28% namun pada tahun 2020 persentase pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 1,72%. Hal tersebut diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

3. Pertanian

3.1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun

Produktivitas pertanian per hektar per tahun di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebanyak 6,00 ton/ha dan pada tahun 2020 sebanyak 5,90 ton/ha.

Tabel 2.158
Produktivitas pertanian per hektar per tahun Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	Ton/ha	625.311	645.618	654.329	630.524	638.983
2	Luas panen	Ha	104.107	105.839	105.726	105.087	108.302
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6,06	6,10	6,18	6,00	5,90

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021

3.2 Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularrayang terjadi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 14,43% dan tahun 2020 sebesar 9,66%.

Tabel 2.159
Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan
Menular Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun berjalan - jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun sebelumnya	Kejadian / Kasus				512	392
2	Jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun sebelumnya	Kejadian / Kasus				3.548	4.060
3	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%				14,43	9,66

Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perkebunan, 2021

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

4.1 Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di Kabupaten Pinrang

Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi. Izin Pemanfaatan Langsung adalah izin untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi tertentu. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik.

Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada: (1)wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan (2) wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

Pengusahaan Panas Bumi terdiri atas: pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung, dan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung digunakan untuk: (1) wisata; (2) agrobisnis; (3) industri; dan (4) kegiatan lain yang menggunakan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung. Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung berada di dalam Kawasan Hutan konservasi, pengusahaan

Panas Bumi hanya dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam. Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung wajib terlebih dahulu memiliki Izin Pemanfaatan Langsung.

Izin Pemanfaatan Langsung diberikan oleh bupati/wali kota untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada: (1) wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan (2) wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. Izin Pemanfaatan Langsung diberikan berdasarkan permohonan dari Setiap Orang. Izin Pemanfaatan Langsung diberikan setelah Setiap Orang mendapat izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dilakukan pada wilayah yang ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, Bupati sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung wajib mendapatkan persetujuan Menteri. Dalam hal akan dilaksanakan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, Bupati sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung harus berkoordinasi dengan Menteri.

Berdasarkan konsep pemanfaatan panas bumi diatas dan pencapaian IKK yaitu Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.160 dibawah ini:

Tabel 2.160
Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin
di Kabupaten Pinrang Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin	Perusahaan	-	-	-	-	-
2	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	Perusahaan	-	-	-	-	-
3	persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di Kabupaten Pinrang	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

5. Perdagangan

5.1 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau

disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Toko adalah bangunan Gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan. Izin usaha toko modern (IUTM) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

Persyaratan Pemenuhan Komitmen untuk Toko Swalayan yang berdiri sendiri : (1) memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market); (2) rekomendasi dari instansi yang berwenang; (3) memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan (4) memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain: (1) memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market); (2) rekomendasi dari instansi yang berwenang; (3) Melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan; dan (4) Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern. Pemenuhan Komitmen sampai batas waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari kerja.

Persyaratan Pemenuhan Komitmen untuk Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan : (1) Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; (2) rekomendasi dari instansi yang berwenang; (3) memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah

yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan (4) Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas dan pencapaian IKK yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.161 dibawah ini:

Tabel 2.161
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	Pelaku usaha	21	25	30	33	36
2	Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota	Pelaku usaha	21	25	30	33	39
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	92,31

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

Berdasarkan Tabel 2.161 diatas menunjukkan bahwa pencapaian IKK Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan pada tahun 2016-2019 sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 92,31 % atau terdapat 3 (tiga) pelaku usaha yang belum memperoleh izin.

5.2 Persentase Kinerja Realisasi Pupuk Tahun 2019-2020

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan

dan/atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg di Lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati. Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer tidak berjalan lancar, Produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati setempat dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten. Dalam rangka program khusus pertanian, Produsen dapat menunjuk Distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani yang mengikuti program tersebut. Pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian.

Persentase kinerja realisasi pupuk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 40,54% dan pada tahun 2020 sebesar 40,34%.

Tabel 2.162
Persentase kinerja realisasi pupuk Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	Ton	0	0	0	27.932	31.602,45
2	RDKK	Ton	0	0	0	68.901	78.335,81
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	0,00	0,00	0,00	40,54	40,34

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

5.3 Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku

Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas. Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap setiap UTTP. Dalam hal Tera ulang dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang telah habis masa berlaku tanda tera sahnya, pengujian dapat dilakukan dengan Uji Sampel. Uji Sampel dilakukan terhadap Populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan Uji Sampel. Uji sampel hanya dapat dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang usia pakainya paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 25,56% dan pada tahun 2020 sebesar 63,17%.

Tabel 2.163
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)
bertanda tera sah yang berlaku Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	UTTP	447	517	733	723	1.308
2	Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	UTTP	2.510	2.667	2.726	2.830	2.071
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	17,81	19,38	26,89	25,56	63,17

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

6. Perindustrian

6.1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang

Kegiatan usaha industri meliputi industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Kegiatan usaha industri ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri, bahwa Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah). Industri **besar** merupakan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua) puluh orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah). Matriks penggambaran kriteria industri dapat dilihat pada Gambar 2.6 dibawah ini:

Gambar 2.6

Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi
Untuk Klasifikasi Usaha Industri

Nilai Investasi Tenaga Kerja	< Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000 – Rp15.000.000.000	> Rp15.000.000.000
1-19 orang	Industri Kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri Menengah	Industri Menengah
≥ 20 orang	Industri Menengah	Industri Menengah	Industri Besar

Izin usaha industri (IUI) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri. IUI meliputi IUI kecil untuk industri kecil, IUI menengah untuk industri menengah, dan IUI besar untuk industri besar. Berdasarkan PP Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, bahwa IUI diberikan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri. Perusahaan wajib berlokasi di Kawasan industri kecuali perusahaan dengan ketentuan: (1) berlokasi di daerah Kabupaten/Kota yang belum memiliki Kawasan industri atau telah memiliki Kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam Kawasan industrinya telah habis, (2) termasuk klasifikasi industri

kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, atau (3) industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/ atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri dan berlokasi di luar Kawasan industri dapat diberikan IUI dengan ketentuan : (10 berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota, dan (2) termasuk klasifikasi industri menengah, wajib berlokasi di Kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTRW.

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar -25,49% dan pada tahun 2020 sebesar 4,11%.

Tabel 2.164
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	Industri kecil dan menengah	-66	79	3	-29	3
2	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	Industri kecil dan menengah	86	20	99	102	73
3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang	%	-76,74	395	3,03	-28	4,11

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

6.2 Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan RPIP dan RPIK. RPIP atau RPIK mengatur industri pengolahan nonmigas yaitu industri yang masuk kategori C dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), tidak termasuk industri batubara dan pengilangan migas.

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK pada tahun 2020 mencapai 39,20%.

Tabel 2.165
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$ Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$ Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	%	-	-	-	-	39,20

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

6.3 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 15,28% dan pada tahun 2020 sebesar 13,67%.

Tabel 2.166
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Izin	20	99	102	73	76
2	Jumlah izin yang dikeluarkan	Izin	206	305	407	480	556
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	9,71	32,46	25,06	15,28	13,67

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

6.4 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 masih 0%.

Tabel 2.167
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Izin	0	0	0	0	0
2	Jumlah izin yang dikeluarkan	Izin	0	0	0	0	0
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

6.5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten Pinrang

Kawasan industri diatur dalam PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Badan usaha dapat berbentuk: (1) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; (2) Koperasi; atau (3) Perseroan Terbatas. Kawasan Industri

dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki IUKI. IUKI diberikan hanya bagi kegiatan usaha Kawasan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 masih mencapai 0%.

Tabel 2.168
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Izin	0	0	0	0	0
2	Jumlah izin yang dikeluarkan	Izin	0	0	0	0	0
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

6.6 Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini

Informasi industri diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta

penyebarluasan data dan/atau informasi industri. Untuk melaksanakan penyampaian Informasi Industri dan Informasi Lain, Pengelola SIINas memberikan Akun SIINas tipe D kepada Kepala Daerah.

Ketersediaan informasi industry secara lengkap dan terkini di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 masih 0%.

Tabel 2.169
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini
Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Keterkinian informasi industri :		0	0	0	0	0
	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan		0	0	0	0	0
	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan		0	0	0	0	0
	Tidak menyampaikan informasi industri						
2	Kelengkapan informasi industri meliputi:						
	Informasi produksi dan kapasitas produksi		0	0	0	0	0
	Informasi bahan baku dan bahan penolong		0	0	0	0	0
3	Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

Berdasarkan Tabel 2.169 diatas menunjukkan bahwa pencapaian IKK Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini pada tahun 2016-2020 sebesar **0%**. Hal tersebut terjadi karena Pengelola SIINas belum memberikan Akun SIINas tipe D kepada Kepala Daerah.

2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan dan Keuangan

1.1 Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 19,19% dan pada tahun 2020 sebesar 18,63%.

Tabel 2.170
Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Rupiah	213.777.636.363,00	211.205.357.642,85	228.512.393.667,00	235.566.080.914,00	262.200.172.664,00
2	Jumlah APBD	Rupiah	1.368.107.503.046,75	1.285.718.310.365,85	1.303.598.764.098,84	1.227.724.924.055,22	1.268.124.083.700,05
3	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	15,63	16,43	17,53	19,19	18,63

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

1.2 Rasio PAD Terhadap APBD Non migas Tahun 2019-2020

Rasio PAD terhadap APBD non migas pada tahun 2019 sebesar 10,26% dan pada tahun 2020 sebesar 9,99%.

Tabel 2.171
Rasio PAD Terhadap APBD Non Migas Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PAD	Rupiah	113.038.054.428,49	118.859.698.609,48	130.651.477.245,38	133.311.262.030,14	151.056.079.570
2	Jumlah APBD Non Migas	Rupiah	1.279.458.889.519,36	1.220.049.099.292,48	1.281.808.141.976,38	1.299.421.857.734,83	1.312.648.049.358,18
3	Rasio PAD	%	8,83	9,74	10,19	10,26	9,99

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

1.3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP di Kabupaten Pinrang selama tahun 2019 dan tahun 2020 berada di level 3.

Tabel 2.172
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber Data : Inspektorat, 2021

1.4 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP di Kabupaten Pinrang selama tahun 2019 dan tahun 2020 berada di level 3.

Tabel 2.173
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber Data : Inspektorat, 2021

1.5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) pada tahun 2019 sebesar 79,61% dan pada tahun 2020 sebesar 81,94%.

Tabel 2.174
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures	Rupiah	832.206.408.905,75	826.228.243.231	835.799.724.152	913.995.426.295	1.090.809.746.496
2	Jumlah belanja APBD	Rupiah	1.191.023.036.343,75	1.143.410.107.563	1.282.671.059.726,38	1.148.030.804.512	1.188.373.367.238
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	69,87	72,26	65,16	79,61	81,94

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

1.6 Opini Laporan Keuangan

Opini laporan keuangan Kabupaten Pinrang setiap tahunnya mencapai WTP dan untuk tahun 2020 mencapai WTP kembali.

Tabel 2.175
Opini Laporan Keuangan Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : Inspektorat, 2021

2. Pengadaan

2.1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 0%.

Tabel 2.176
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun	Kontrak	0	0	0	0	0
2	Jumlah kontrak keseluruhan tahun	Kontrak	81	65	669	672	824
3	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00

Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Pinrang

2.2 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif Tahun 2019-2020

Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif pada tahun 2019 sebesar 7,52% dan pada tahun 2020 sebesar 10,60%.

Tabel 2.177
Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Pengadaan	117	91	53	63	79

2	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan tanpa kompetitif	Pengadaan	0	0	831	942	745
3	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	0	0	6,38	6,69	10,60

Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Pinrang

2.3 Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan

Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan pada tahun 2019 sebesar 46,93% dan pada tahun 2020 sebesar 38,13%.

Tabel 2.178
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	Belanja langsung	225.299.315.000	121.024.815.481	236.913.042.517,90	63.768.674.950	138.590.218.646
2	Total belanja langsung	Belanja langsung	612.505.147.368,75	630.913.035.867	552.024.944.463	574.933.622.837	598.119.361.631
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	36,78	19,18	42,92	27,07	34,82

Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Pinrang

3. Kepegawaian

3.1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 247,48% dan pada tahun 2020 sebesar 266,67%.

Tabel 2.179
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas	Pegawai	1.715	1.715	1.733	1.819	1.728
2	Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA/ke bawah	Pegawai	1.056	848	763	735	648
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	162,40	202,24	227,13	247,48	266,67

Sumber Data : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

3.2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2019 sebesar 60,14% dan pada tahun 2020 sebesar 61,32%.

Tabel 2.180
Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pegawai PNS/Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	Pegawai	1.779	1.586	1.536	1.536	1.457
2	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Pegawai	2.771	2.563	2.496	2.554	2.376
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	64,20	61,88	61,54	60,14	61,32

Sumber Data : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

3.3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2019-2020

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2019 sebesar 11,13% dan pada tahun 2020 sebesar 11,74%.

Tabel 2.181
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	Pegawai	207	180	189	171	171
2	Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Pegawai	1.779	1.586	1.536	1.536	1.457
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	11,64	11,35	12,30	11,13	11,74

Sumber Data : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

4. Manajemen Keuangan

4.1 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Tahun 2019-2020

Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 yaitu -6,49% dan pada tahun 2020 -5,43%.

Tabel 2.182
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	Rupiah	1.191.023.036.343,75	1.143.410.107.563	1.282.671.059.726,38	1.148.030.804.512	1.188.373.367.238
2	Total belanja APBD dikurangi satu	Rupiah	1.368.107.503.046,75	1.285.718.310.365,85	1.296.910.334.172	1.227.724.924.055,22	1.268.124.083.700,05
3	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-12,94	-11,07	-1,10	-6,49	-6,29

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

4.2 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 1,54 dan pada tahun 2020 sebesar 20,03.

Tabel 2.183
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	Rupiah	113.038.054.428,49	118.859.698.609,48	130.651.477.245,38	133.311.262.030,14	131.174.527.320,35
2	Total PAD dalam APBD dikurangi satu	Rupiah	101.829.567.935	109.986.809.930	125.995.847.430	131.283.048.492,00	125.849.979.824,00
3	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		11,01	8,07	3,70	1,54	4,23

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

4.3 Assets Management Tahun 2019-2020

Untuk manajemen asset Kabupaten Pinrang keempat indikatornya memenuhi syarat.

Tabel 2.184
Assets Management Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
----	-----------	--------	------	------	------	------	------

1	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

4.4 Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 6,26% dan pada tahun 2020 sebesar 4,98%.

Tabel 2.185
Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai realisasi SILPA	Rupiah	148.517.440.392,97	145.789.520.026,84	77.330.984.013,22	81.555.878.066,05	72.760.417.381,23
2	Total belanja anggaran tahun sebelumnya	Rupiah	1.246.120.592.912,13	1.368.107.503.046,75	1.285.718.310.365,85	1.303.598.764.098,84	1.227.724.924.055,22
3	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	11,92	10,66	6,01	6,26	5,93

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

5. Transparansi dan Partisipasi Publik

5.1 Informasi Tentang Sumber Daya yang Tersedia untuk Pelayanan

Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 yaitu 103,75% dan pada tahun 2020 102,42%.

Tabel 2.186
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
----	-----------	--------	------	------	------	------	------

1	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	Rupiah				8.009.798.000	3.083.992.250
2	Realisasi belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	Rupiah				7.720.355.925	3.011.206.826
3	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%				103,75	102,42

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2021

2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah Tahun 2019-2020

Akses publik terhadap informasi keuangan daerah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 25%.

Tabel 2.187
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda	Dokumen	3	3	3	3	3
2	Total jumlah dokumen yang telah dirinci	Dokumen	12	12	12	12	12
3	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2021

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Sebagian besar pendapatan masyarakat di Kabupaten Pinrang dipergunakan untuk keperluan konsumsi makanan, dimana rata-rata pengeluaran perkapita untuk sebulan paling tinggi untuk konsumsi makanan, sedangkan yang mengarah ke konsumsi non makanan masih dibawah konsumsi makanan namun konsumsi non makanan telah mengalami peningkatan sedikit demi sedikit yang menandakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.189
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator	2016	2017	2018**	2019**	2020
1. Pengeluaran Konsumsi RumahTangga	8,247,680.95	9,134,497.03	10,112,173.95	11,043,700.05	Blm ada data dari BPS
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	97,831.49	108,659.43	132,001.19	201,531.92	Blm ada data dari BPS
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,090,939.48	1,172,461.38	1,371,101.34	1,559,350.62	Blm ada data dari BPS
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,293,168.31	5,853,925.35	6,354,064.13	6,971,094.61	Blm ada data dari BPS
5. Perubahan Inventori	157,878.46	102,487.38	346,714.13	356,662.97	Blm ada data dari BPS
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(183,744.45)	(11,468.63)	(228,275.74)	(502,020.22)	Blm ada data dari BPS
PDRB	14,703,754.25	16,360,561.94	18,087,778.99	19,630,319.95	20,083,012.97

Sumber Data : BPS Kabupaten Pinrang, 2020

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) dapat diukur dari besarnya indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Pada indikator NTP di Kabupaten Pinrang mengalami fluktuatif yang disebabkan oleh produktivitas komoditas pertanian khususnya padi sawah yang cenderung turun dikarenakan iklim yang sulit diprediksi serta hasil cetak sawah baru belum optimal produksinya juga harga gabah yang cenderung menurun, sementara harga barang jasa juga cenderung meningkat disebabkan tingkat

inflasi walaupun sarana pertanian terutama pupuk yang relatif stabil. Ini menjadikan NTP Kabupaten Pinrang mengalami fluktuatif, namun menunjukkan NTP tetap lebih besar dari 100, ini menggambarkan bahwa pendapatan petani masih tinggi dibandingkan pengeluarannya sebesar 105,13% pada tahun 2020.

Tabel 2.190
Nilai Tukar Petani

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Tukar Petani	114,29	111,84	110,12	106,91	105,13

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Holtikultura 2021

3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pola pengeluaran konsumsi menggambarkan proporsi pengeluaran penduduk yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dan non pangan. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita cenderung menunjukkan persentase peningkatan, namun hanya pada tahun 2018 sedikit menurun yaitu pada angka 42,28%. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.191
Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Per kapita

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1. Konsumsi Rumah Tangga	8.247,68	9.134,50	10.112,17	11.043,70	Blm ada data
2. Konsumsi Non Pangan	6,470.80	7,258.58	4,806.13		Blm ada data
PDRB	14.703,75	16.360,56	18.087,78	19.630,32	
Proporsi konsumsi non pangan terhadap total PDRB	43.91	44.23	42.28		

Sumber Data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

4. Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten

Indeks infrastruktur dibentuk dari indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah. Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Pinrang sebesar 73,34% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 76,20%.

Tabel 2.192
Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks layanan infrastruktur Kabupaten (%)	68,05	70,49	71,99	73,34	76,20

Sumber data: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2021

5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan beberapa indikator yaitu indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas air (IKA) dan indeks tutupan hutan (ITH). Pada tahun 2019 IKLH Kabupaten Pinrang diperoleh nilai 68,29 dan pada tahun 2020 diperoleh nilai 68,74.

Tabel 2.193
IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	69,15	72,69	72,79	68,29	68,74

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

6. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di Kabupaten Pinrang. Perhitungan tingkat risiko ini dilakukan dengan memerhatikan faktor bahaya (Hazard), kerentanan (Vulnerability), dan kapasitas (Capacity). Indeks Resiko Bencana Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 162,5 dan pada tahun 2020 sebesar 205.

Tabel 2.194
Indeks Resiko Bencana Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Resiko Bencana (nilai)				179,20	205

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

7. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 terdapat 536 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 538 kasus.

Tabel 2.195
Angka Kriminalitas Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	97,34	34,98	31,92	71,45	85,90

Sumber data: Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2021

2.1.4.2 Inovasi Daerah

Inovasi Daerah merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah.

1. Livestock Zero Waste

Inovasi Livestock Zero Waste merupakan inovasi yang digagas oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi yang terjadi di masyarakat. Misalnya usaha peternakan sapi dengan skala lebih besar relatif terlokalisasi akan menimbulkan masalah terhadap lingkungan dan limbah yang dihasilkan pun akan semakin banyak. Sebagian besar peternak membuang limbah tanpa pengelolaan, sehingga terjadi pencemaran lingkungan, terutama berasal dari limbah yang dikeluarkan oleh ternak yaitu feses, urine, sisa pakan, dan air sisa pembersihan ternak dan kandang. Adanya pencemaran oleh limbah peternakan, sering menimbulkan berbagai protes dari kalangan masyarakat sekitarnya.

Pengelolaan limbah yang kurang baik akan menjadi masalah serius pada usaha peternakan. Sebaliknya bila limbah ini dikelola dengan baik dapat memberikan nilai tambah. Inovasi “**LIVESTOCK ZERO WASTE**” merupakan salah satu upaya untuk pemanfaatan limbah dengan mengintegrasikan usaha tersebut dengan usaha lainnya, sehingga menjadi suatu sistem yang saling sinergis. Inovasi "**LIVESTOCK ZERO WASTE** " adalah adaptasi beberapa teknologi peternakan dalam satu pelayanan terpadu. Teknologi peternakan tersebut adalah (a) Teknologi Pengolahan pakan dari limbah tanaman pangan (b) Teknologi pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan tenaga alternatif biogas (c) Teknologi optimalisasi reproduksi untuk peningkatan populasi, produktivitas dan kualitas ternak. Model kegiatan inovasi berupa desiminasi konsep zero waste, secara umum memiliki karakteristik yang sederhana dan mudah diterapkan oleh peternak. Melalui konsep zero waste ini, telah terkaji perubahan pola pikir peternak, yang

semula memandang limbah ternak sebagai masalah polusi, kini mereka telah memandang sebagai potensi yang memiliki nilai ekonomis.

Secara parsial kontribusi pengaruh yang paling kuat ditunjukkan dari pelaksanaan inovasi "**LIVESTOCK ZERO WASTE**" ini adalah perubahan cara dan perilaku peternak dalam pengelolaan usaha serta penerapan teknologi peternakan tepat guna secara menyeluruh yang bermuara kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak dan keluarganya. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan inovasi adalah melalui pelatihan dan bimbingan peternak, serta pemahaman tentang limbah ternak sebagai potensi yang memiliki nilai tambah secara ekonomis untuk dikembangkan. Harapannya melalui inovasi "**LIVE STOCK ZERO WASTE**" ini nantinya akan tercipta usaha produktif, berupa pemanfaatan produksi pupuk dari limbah ternak yang dikelola oleh peternak secara mandiri.

2. Jabat Erat (Kerjasama Pembinaan dan Bantuan Ekonomi Berkelanjutan)

Kondisi perekonomian di Indonesia pada umumnya mengalami penurunan di tengah pandemi Covid-19, hampir semua sektor usaha terkena dampak tidak terkecuali Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Keberadaan UMKM sedikit banyaknya memberikan stimulus terhadap pergerakan perekonomian di daerah termasuk di Kabupaten Pinrang. Pesatnya perkembangan UMKM khususnya yang bergerak dalam bidang produk pangan olahan berperan dalam membuka lapangan kerja dan memelihara iklim investasi tetap berjalan di daerah. Namun kondisi ini belum berjalan secara maksimal dikarenakan produk UMKM di Kabupaten Pinrang masih sulit bersaing dengan produk lainnya disebabkan karena belum adanya legalitas usaha, kualitas produk yang masih rendah, kurangnya modal usaha, dan sulitnya akses pemasaran. Kondisi ini jika dibiarkan akan membuat pelaku UMKM berhenti beroperasi, pengangguran akan bertambah dan membuat kondisi perekonomian di daerah semakin lesu, yang akhirnya menimbulkan permasalahan baru.

Sebagai langkah konkrit dalam menyikapi kondisi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang, menggagas sebuah inovasi dengan nama **JABAT ERATatau Kerjasama Pembinaan dan Bantuan Ekonomi Berkelanjutan**, yaitu kolaborasi para *stakeholder* terkait untuk memfasilitasi pembinaan dan pendampingan pelaku UMKM dalam tertib administrasi perizinan usaha dan peningkatan kualitas produk, membantu pelaku UMKM dalam memperoleh akses permodalan di lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta membantu akses untuk pemasaran produk UMKM.

Tujuan Inovasi JABAT ERATatau Kerjasama Pembinaan dan Bantuan Ekonomi Berkelanjutan, adalah:

1. mewujudkan iklim investasi yang sehat di Daerah melalui fasilitasi penyelesaian permasalahan atau kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya di Daerah;
2. mewujudkan peran serta lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam memberikan bantuan permodalan kepada pelaku usaha khususnya UMKM;
3. meningkatkan akses bagi pelaku usaha khususnya UMKMt untuk mendapatkan informasi seputar perizinan berusaha, peningkatan kualitas produk, akses pemasaran produk dan bantuan permodalan; dan
4. untuk meningkatkan fungsi koordinasi pada masing-masing Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha khususnya UMKMs sesuai kewenangannya.

Inovasi JABAT ERAT digagas untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, yang meliputi:

1. tidak memiliki perizinan usaha sebagai bentuk legalitas usaha;
2. kualitas produk masih rendah sehingga sulit bersaing dengan produk lain;
3. kurangnya modal usaha sehingga sulit mengembangkan usaha;
4. sulitnya akses pemasaran produk sehingga hasil usaha atau pendapatan tidak maksimal.

Melalui Inovasi JABAT ERAT dilakukan langkah-langkah yang bersifat koordinatif dengan para stakeholder terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM.

Inovasi JABAT ERAT memiliki beberapa keunggulan:

1. Kemudahan perizinan usaha UMKM melalui Gerai Perizinan di Desa/Kelurahan;
2. Untuk meningkatkan kualitas produk UMKM dilaksanakan melalui satu pintu dan terintegrasi, tidak perlu datang ke berbagai instansi seperti :
 - a. pengurusan sertifikasi halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau MUI;
 - b. pengurusan Nomor BPOM di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. pengurusan Informasi Nilai Gizi dan Batas Kadaluaursa Produk di Dinas Kesehatan;
3. Untuk memperoleh informasi dan fasilitasi bantuan permodalan tidak perlu datang ke berbagai lembaga perbankan/keuangan;
4. Untuk memperoleh akses pemasaran produk UMKM tidak perlu menawarkan produk ke berbagai tempat.

Inovasi JABAT ERAT telah dievaluasi secara eksternal dalam bentuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan setiap tahun dengan kelompok sasaran masyarakat atau pelaku usaha di 12 kecamatan, dengan nilai SKM Tahun 2018 = 84,25; Tahun 2019 = 88,33; Tahun 2020 = 89,87

Dampak perubahan pelaksanaan Inovasi JABAT ERAT sebagai berikut:

1. Sebelum :
 - a. Pelaku UMKM belum memiliki perizinan usaha berbasis OSS;
 - b. Kualitas Produk UMKM masih rendah baik dari sisi kemasan maupun administrasi kelengkapan dan informasi pada produk;
 - c. Pelaku UMKM sulit memperoleh akses bantuan permodalan;
 - d. Produk UMKM sulit memperoleh akses pemasaran produk ke ritel modern.
2. Setelah :
 - a. Pelaku UMKM yang memiliki perizinan usaha Tahun 2019 sebanyak 20 UMKM dengan nilai investasi Rp62.000.000,- dan Tahun 2020 sebanyak 1.010 UMKM dengan nilai investasi Rp72.308.500.000,-;
 - b. Produk UMKM yang terdaftar untuk pendampingan peningkatan kualitas produk sebanyak 28 produk
 - c. Pelaku UMKM yang difasilitasi pemberian bantuan modal usaha sebanyak 15 UMKM
 - d. Produk UMKM yang dipasarkan di ritel modern sebanyak 6 produk

Melalui Inovasi JABAT ERAT dapat dipetik pembelajaran bahwa di tengah kondisi perekonomian nasional yang sedang lesu akibat pandemi covid-19, perlu dilakukan kerjasama antar stakeholder di Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya untuk membantu pelaku UMKM sebagai penggerak investasi di Daerah dan sekaligus penopang perekonomian nasional, dengan melakukan suatu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM seperti legalitas usaha, peningkatan kualitas produk, bantuan permodalan usaha dan akses pemasaran produk. Dengan adanya Inovasi JABAT ERAT ini, pelaku UMKM dapat memperoleh kemudahan berusaha melalui pembinaan dan pendampingan dari seluruh stakeholder terkait secara terpadu dan terintegrasi yang dilakukan melalui satu pintu. Dengan Inovasi JABAT ERAT, kita menggerakkan usaha UMKM untuk menopang perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19.

3. RaJin (Gerai Perizinan)

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik, belum memenuhi harapan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada fenomena malpraktek pelayanan public khususnya pelayanan bidang perizinan dan non

perizinan dengan prosedur bertele-tele, sangat birokratis, tidak transparan dalam hal waktu dan biaya, banyak pungli, serta pelayanan yang diskriminatif. Kondisi ini akan menurunkan kepercayaan serta minat masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurus keperluan izin utamanya dalam memulai usaha, bahkan akan mengganggu iklim investasi di Daerah. Kondisi tersebut makin diperparah akibat pandemic Covid-19, yang menyebabkan pergerakan masyarakat semakin terbatas agar terhindar dari penularan Covid-19.

Berangkat dari kondisi tersebut, DPMPTSP Kabupaten Pinrang, menginisiasi suatu inovasi yang berbasis informasi teknologi (IT) yang diberi nama RAJIN atau GeraiPerijinan. Inovasi ini merupakan gagasan baru dengan konsep ***pelayanan integrativedan produktif***. RAJIN bertujuan; (i) memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk kependudukan, (ii) meningkatkan minat pelaku UMKM mendapatkan izin untuk memulai dan mengembangkan usaha, dan (iii) menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melaksanakan *good government*. Inovasi RAJIN lahir tahun 2019 dan terus mengalami perkembangan yang kemudian diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 503/422/2019 tentang Penunjukan Desa dan Kelurahan sebagai Role Model RAJIN Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Pinrang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Gerai Perizinan di Tingkat Desa dan Kelurahan. RAJIN yang ada di Desa dan Kelurahan, sangat membantu masyarakat dan pelaku UMKM utamanya kelompok orangtua dan ibu-ibu yang tinggal di pelosok pedesaan untuk mendapatkan keperluan izinnya. Dengan adanya RAJIN akan melahirkan pelayanan public yang efektif, efisien dan terpercaya. RAJIN membuat pelayanan ada di depan mata, hanya dengan perangkat Smartphone keperluan izin dapat diurus, yang tidak memiliki Smartphone atau internet bisa datang ke Kantor Desa dan Kelurahan disana masyarakat akan dilayani dan dibantu untuk dapatkan izin, sehingga pelayanan pemerintah selalu hadir dan dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Dengan system berbasis aplikasi dan perangkat yang mudah diperoleh, inovasi RAJIN dapat direplikasi dan diadaptasi sesuai kebutuhan pelayanan dan kondisi daerah, sehingga RAJIN dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Inovasi RAJIN ini memiliki tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang, yaitu :

- Tujuan Jangka Pendek :

Untuk meningkatkan kemudahan menjangkau pelayanan perizinan dan non-perizinan bagi masyarakat pedesaan dan ditempat yang jauh serta sulit terjangkau (remote area).

- Tujuan Jangka Panjang :

- 1) Terbukanya peluang pengembangan UMKM masyarakat melalui kemitraan dengan investor.
- 2) Terbukanya akses pemasaran bagi jasa dan produk UMKM masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional.
- 3) Tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam melaksanakan *good government*.

Adapun manfaat dari inovasi **RAJIN** antara lain :

- 1) Pelayanan perizinan/non-perizinan lebih mudah, efektif, serta efisien biaya dan waktu.
- 2) Membantu kelompok disabilitas, orangtua dan ibu-ibu yang tinggal di pedesaan dan tempat yang sulit terjangkau dalam mengurus keperluan izin termasuk izin usaha.
- 3) Masyarakat akan terhindar dari resiko tertular Covid-19, karena Rajin membatasi pergerakan sosial dalam pengurusan izin di lokasi pelayanan.
- 4) UMKM masyarakat mendapatkan informasi pasar serta dipromosikan melalui aplikasi RAJIN, sehingga UMKM dapat dikembangkan dan produk UMKM dapat diserap oleh pasar.
- 5) Membantu OPD lainnya melakukan sosialisasi pembangunan dan diseminasi informasi kepada masyarakat pedesaan utamanya tentang potensi dan peluang pengembangan usaha ekonomi di pedesaan.

Implementasi Inovasi RAJIN dimulai tahun 2019 di Kabupaten Pinrang dan telah diterapkan pada 34 Desa/Kelurahan, yaitu; 7 Desa Pilot Proyek dan tambahan 27 Desa/Kelurahan. Pada Tahun 2021 sudah bisa tersebar di semua Desa/Kelurahan.

Lokasi Pilot proyek RAJIN adalah :

1. Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu
2. Desa Meritengnggae Kecamatan Suppa
3. Desa Sabang Paru Kecamatan Lembang
4. Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang
5. Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang
6. Kelurahan Sawitto Kecamatan Watang Sawitto
7. Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto

Setelah dilakukan evaluasi, baik secara internal maupun eksternal dihasilkan kondisi pelayanan dengan deskripsi sebagai berikut.

- Sebelum adanya Inovasi RAJIN kondisi tata kelola pemerintahan bidang berizinan:

1. Tidak transparan, karena ketidakjelasan informasi, prosedur (mulai pendaftaran sampai terbit izin), dan persyaratan pendaftaran perizinan.
 2. Tidak akuntabel, karena ketidakjelasan waktu dan biaya pengurusan perizinan.
 3. Berpotensi terjadinya korupsi karena adanya biaya tambahan atau pungutan liar.
 4. Berpotensi terjadinya tindak pidana karena adanya pemalsuan dokumen perizinan.
 5. Tidak demokratis karena adanya diskriminasi (pembedaan) dalam pemberian pelayanan perizinan.
- Kondisi setelah adanya Inovasi RAJIN, antara lain:
1. Pelayanan sangat terbuka dan transparan, karena informasi, prosedur dan persyaratan perizinan dapat diakses melalui website, dimana proses dan tahapan pendaftaran sampai terbitnya perizinan dapat diakses melalui *Tracking System*;
 2. Pelayanan akuntabel, karena waktu dan biaya pengurusan perizinan dapat diakses melalui *Smartphone/Aplikasi*;
 3. Pelayanan menghilangkan potensi korupsi, karena tidak ada lagi biaya tambahan atau pungutan liar karena mulai pendaftaran sampai terbitnya izin tanpa perantara dengan transparansi biaya melalui *Smartphone/Aplikasi*;
 4. Pelayanan menghilangkan potensi tindak pidana, karena verifikasi dokumen dapat dilakukan melalui *Tanda Tangan Elektronik (TTE)* dan *QR Code*;
 5. Pelayanan demokratis, karena tidak ada lagi diskriminasi dalam pelayanan perizinan karena masyarakat dapat melakukan pendaftaran tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan atau kelompok berkebutuhan khusus (difabel);
 6. Salah satu metode eksternal yang dilakukan dalam bentuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dengan kelompok sasaran masyarakat atau pelaku usaha yang mendapat layanan RAJIN di 12 kecamatan yang dilakukan secara acak. Dengan hasil SKM sebagai berikut:
 - Tahun 2019 = Nilai 88 (kategori Sangat Baik)
 - Tahun 2020 = Nilai 89 (kategori Sangat Baik)
 7. Dampak lain adalah dengan adanya RAJIN telah memberikan potensi yang besar dengan nilai investasi yang dicapai pada tahun 2019 sebesar ±Rp.1,9 Trilyun.

Beberapa hal positif yang menjadi pembelajaran dari implementasi inovasi RAJIN adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat akan tumbuh apabila tata kelola pemerintahan khususnya pelayanan perizinan diterapkan dengan menegakkan prinsip transparan, demokratis dan akuntabel.
- b) Bahwa dalam situasi serba terbatas karena pandemi Covid-19, pelayanan perizinan tetap dapat dilakukan dengan efektif, termasuk bagi kelompok rentan, seperti; orang tua, ibu-ibu dan difabel.
- c) Di tengah pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan tetap jalan bahkan bertumbuh dengan tingginya minat masyarakat melakukan usaha serta mengembangkan usaha.
- d) Ekonomi daerah bertumbuh dan akan semakin kuat seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan berkembangnya UMKM-UMKM di desa dan kelurahan.

Tabel 2.196

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja Setiap Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI							
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,44	7,84	6,91	6,53	0,44	7,87	Belum Tercapai
2	PDRB per kapita (Juta Rp.)	39,78	43,95	48,28	52,05	52,93	56,23	Belum Tercapai
3	Inflasi	2,11	3,43	1,96	2,45	2,37	2,5	Melampaui
4	Indeks Gini	0,38	0,309	0,359	0,336	0,375	0,34	Belum Tercapai
5	Persentase Penduduk di atas garis Kemiskinan	91,52	91,54	91,19	91,54	91,14	91,99	Belum Tercapai
6	Tingkat Kemiskinan (%)	8,34	8,48	8,46	8,81	8,86	8,01	Belum Tercapai
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,42	69,9	70,62	71,12	71,26	70,85	Melampaui
8	Indeks Perkembangan Wilayah	52	56	58	59	78	NA	NA
9	Indek layanan infrastruktur Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang (%)	18,89	21,82	23,85	25,52	37,38	NA	NA
1.2	KESEJAHTERAAN SOSIAL							

1	Indeks Pendidikan	61,54	61,77	62,80	62,89	62,95	64,75	Belum Tercapai
2	Angka melek huruf	94,83%	95,05%	95,72%	99,96%	99,99%	100	Belum Tercapai
3	Angka rata-rata lama sekolah	7,48	7,54	7,84	7,85	7,86	9,07	Belum Tercapai
4	Indeks Kesehatan	74,69	74,89	75,35	75,98	76,32	78	Belum Tercapai
5	Angka usia harapan hidup	68,55	68,68	68,98	69,39	69,61	69,45	Melampaui
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	95,44	95,45	95,35	95,16	96,24	Belum Tercapai
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	59,61	61,73	67,92	68,11	60,41	Melampaui
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	56	60,1	60,01	59,07	59,11%	60	Belum Tercapai
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,09	4,41	2,8	2,91	4,19	3,55	Belum Tercapai
10	Rasio Penduduk Yang Bekerja	95,9	96	97,2	97,09	95,81	96	Belum Tercapai
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,87	79,01	83,62	84,75	85,99	84	Melampaui
12	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PHH) Konsumsi	88,70	89,20	89,30	89,30	89,50	90	Belum Tercapai
13	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	80,00	80,20	81,10	82	82,10	82,50	Belum Tercapai
14	Penguatan Cadangan Pangan	157,05%	113,12%	141,20%	156,06%	173,06%	172	Melampaui
15	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	27,73	25,34	23,56	20,42	20,61	20,59	Melampaui
16	Kontribusi sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB	13,16	12,56	12,10	10,42	11,70	11,65	Melampaui
17	Produksi Sektor Pertanian	625.311 (ton/tahun)	645.618 (ton/tahun)	654.329 (ton/tahun)	630.524 (ton/tahun)	638.983 (ton/tahun)	638.997 (ton/tahun)	Melampaui

18	Produktivitas Tanaman Pangan Utama (padi) per hektar	6,06 Ton/ha	6,10 Ton/ha	6,19 Ton/ha	6 Ton/ha	5,9 Ton/Ha	6	Belum Tercapai
19	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	100	100	100	100	100	100	Tercapai
20	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	2,6	2,63	2,71	2,75	2,8	2,75	Melampaui
21	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	-	1,63	1,66	1,68	1,55	1,75	Belum Tercapai
22	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	19,52	19,7	24,37	19,91	20,81	20,50	Melampaui
23	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,08	13,41	13,89	14,63	14,42	14,50	Belum Tercapai
24	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	6,26	6,35	6,09	6,28	6,14	6,30	Belum Tercapai
25	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	52,44	52,67	52,50	Melampaui
26	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	50,87	56,98	60,06	61,54	62,86	61	Melampaui
2	PELAYANAN UMUM							
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR							
1	PENDIDIKAN							
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	60,50%	64,79%	67,45%	73,50%	92,83%	100%	Belum Tercapai
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,57%	99,66%	99,67%	98,25%	95,28%	100%	Belum Tercapai
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,23%	94,55%	94,74%	82,45%	92,06%	100%	Belum Tercapai
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	89,64%	90,37%	92,05%	92,37%	97,27%	100%	Belum Tercapai
2	KESEHATAN							

2.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,07%	0,5	Melampaui
2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	50%	50%	50%	100%	100%	100%	Tercapai
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	91,37%	92,21%	94,27%	93,94%	98,47%	100%	Belum Tercapai
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95,39%	98,08%	96,48%	93,20%	100%	100%	Tercapai
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	107%	99%	100%	107%	100,13%	100%	Melampaui
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	110,32%	112,78%	95,18%	100%	69,88%	100%	Belum Tercapai
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	78,86%	53,59%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	-	-	-	100%	100%	Tercapai
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	37,28%	54,80%	87,38%	100%	100%	100%	Tercapai
2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5,16%	4,01%	9,67%	3,28%	100%	100%	Tercapai
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	100%	100%	100%	Tercapai
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	-	-	-	100%	100%	100%	Tercapai
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	30,6%	36,55%	38,97%	52,08%	64,55%	55%	Melampaui

3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	46,01%	46,01%	53,49%	58,26%	58,29%	58,28%	Melampaui
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	90,43%	91,40%	92,38%	92,80%	93,08%	93%	Melampaui
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	73,3%	75,35%	76,48%	77	93,49%	85%	Melampaui
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87,19%	89,75%	95,14%	96,9%	97,56%	97%	Melampaui
3.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	40,77%	43,7%	46,59%	56,51%	65,73%	65%	Melampaui
3.8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	-	-	88,92%	89,90%	89%	Melampaui
3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	-	-	-	17,57%	100%	100%	Tercapai
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Tercapai
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	-	1,56%	3,01%	56,63%	49,67%	57%	Belum Tercapai
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,17%	5,03%	4,77%	5,76%	4,62%	5,75%	Belum Tercapai
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	-	-	-	100%	100%	100%	Tercapai

5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	60%	100%	100%	Tercapai
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	9,76%	17,07%	43,90%	60,61%	75,76%	75%	Melampaui
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	402.832 jiwa, 12 Kecamatan	408.582 jiwa, 12 Kecamatan	401.858 jiwa, 12 Kecamatan	405.671 jiwa, 12 kecamatan	363.417 jiwa, 12 kecamatan	363.717 jiwa, 12 kecamatan	Belum Tercapai
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	402.832 jiwa, 12 Kecamatan	408.582 jiwa, 12 Kecamatan	401.858 jiwa, 12 Kecamatan	405.671 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.436 jiwa, 12 kecamatan	Belum Tercapai
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	402.832 jiwa, 12 Kecamatan	408.582 jiwa, 12 Kecamatan	401.858 jiwa, 12 Kecamatan	405.671 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.436 jiwa, 12 kecamatan	Belum Tercapai
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	71,76%	59,38%	66,39%	61,39%	83,51%	75%	Melampaui
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	Tercapai
6	SOSIAL							
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				100%	100%	100%	Tercapai
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
7	TENAGA KERJA							
7.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0,70	1,10	0,91	0,71%	0,92%	0,92%	Tercapai

7.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	7,88%	4,24%	11,44%	3,44%	0,68%	3,5%	Belum Tercapai
7.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah)	6.998,59	7.645,68	7.388,85	7.925,52	7.982,56	7.982,50	Melampaui
7.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	20,33%	24,87%	26,16%	36,69%	36,69%	35%	Melampaui
7.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	88,31%	55,02%	56,19%	58,1%	51,55%	50%	Melampaui
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-	-	-	0,67%	9,19%	5%	Melampaui
8.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	-	-	-	0,03%	0,12%	0,05	Melampaui
8.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-	-	-	0,03%	0,05%	0,05	Tercapai
9	PANGAN							
9.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	32,02%	23,07%	29,30%	32,18%	35,43%	35%	Melampaui
10	PERTANAHAN							
10.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	-	-	-	21,25%	21%	Melampaui
10.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	-	-	-	-	22,5%	21%	Melampaui
10.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	-	-	-	-	21,18%	21%	Melampaui
10.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-	-	-	-	16,6%	15%	Melampaui
10.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-	-	-	-	21%	21%	Melampaui

10.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	-	-	-	-	20%	20%	Tercapai
11	LINGKUNGAN HIDUP							
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	69,15%	72,69%	72,79%	68,29%	68,74%	68,20%	Melampaui
11.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	86,02%	93,21%	95%	71,8	57,19%	70%	Belum Tercapai
11.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-	77%	85%	100%	100%	100%	Tercapai
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
12.1	Perekaman KTP Elektronik	84,57%	89,30%	97,06%	90,62%	96,91%	95%	Melampaui
12.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	-	-	-	8,28%	26,91%	25%	Melampaui
12.3	Kepemilikan akta kelahiran	84,58%	87,58%	92,53%	95,84%	96,74%	96%	Melampaui
12.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	-	-	-	16,28%	72,09%	50%	Melampaui
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
13.1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	18%	12%	39%	56%	56%	50%	Melampaui
13.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0	0	4%	2%	5%	5%	Tercapai
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
14.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,50	2,70	2,68	2,65	2,64	2,65	Belum Tercapai
14.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	61,82%	64,32%	64,56%	64,72%	65,02%	65%	Melampaui

14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16,25%	23,34%	15,47%	11,51%	11,48%	11,50%	Belum Tercapai
15	PERHUBUNGAN							
15.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	Tercapai
15.2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	Tercapai
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
16.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	50%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
16.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	-	100%	15,38%	15,38%	15,38%	Tercapai
16.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi SasaranPenyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	86,88%	86,65%	80,74%	81,15%	90,97%	90%	Melampaui
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
17.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	14,45%	18,13%	14,05%	13,48%	13,10%	13,30%	Belum Tercapai
17.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	0,5%	0,9%	1,9%	2,3%	8,94%	8%	Melampaui
18	PENANAMAN MODAL							
18.1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	68,61	30,01	12,25	-11,03	1,95%	2%	Belum Tercapai
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	-	0,10%	0,16%	0,21%	0,52%	0,5	Tercapai

19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	-	0,45%	0,69%	0,83%	2,39%	2,5%	Melampaui
19.3	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	-	38	146	4	Tidak Ada	Tidak Ada	Tercapai
20	STATISTIK							
20.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
20.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
21	PERSANDIAN							
21.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	-	-	-	-	-	Tercapai
22	KEBUDAYAAN							
22.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
23	PERPUSTAKAAN							
23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tercapai
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	33,75%	35,79%	34,63%	38,44	30,26%	35%	Belum Tercapai
24	KEARSIPAN							
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	55%	58,5%	66,25%	75%	75%	75%	Tercapai

24.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	11,66%	13,33%	15%	33,33%	33,33%	33,33%	Tercapai
URUSAN PILIHAN								
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
25.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	53.340,67 Ton	58.511,39 Ton	65.552,62 Ton	69.475,78 Ton	77.259,41 Ton	76.657,30 Ton	Melampaui
26	PARIWISATA							
26.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-	22,73%	11,11%	16,67%	-100%	15%	Belum Tercapai
26.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-	32,96%	24,36%	13,94%	-88,01%	14%	Belum Tercapai
26.3	Tingkat Hunian Akomodasi	-	9,72%	11,05%	13,15%	12,24%	13%	Belum Tercapai
26.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-	1,63%	1,66%	1,68%	1,55%	1,5%	Belum Tercapai
26.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-	2,07%	2,12%	2,28%	1,72%	2%	Belum Tercapai
27	PERTANIAN							
27.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,06 Ton/ha	6,10 Ton/ha	6,19 Ton/ha	6 Ton/ha	5,9 Ton/Ha	6 Ton/ha	Belum Tercapai
27.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-	-	-	14,43	9,66%	10%	Belum Tercapai
28	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							

28.1	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di di Kabupaten / Kota	0	0	0	0	0	0	Tercapai
29	PERDAGANGAN							
29.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	100%	100%	100%	92,31%	100%	Belum Tercapai
29.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	0	0	0	40,54%	40,34%	40%	Melampaui
29.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	17,81%	19,38%	26,89%	25,55%	63,17%	50%	Melampaui
30	PERINDUSTRIAN							
30.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	-76.74%	395%	3,03%	-28%	4,11%	4%	Melampaui
30.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	-	-	-	-	39,20%	37%	Melampaui
30.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	9,71%	32,46%	25,06%	15,28%	13,67%	15%	Belum Tercapai
30.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0	0	Tercapai
30.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0	0	Tercapai
30.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	0	0	0	0	0	Tercapai
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
31	PERENCANAAN DAN KEUANGAN							

31.1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	15,63%	16,43%	17,53%	19,19%	18,63%	18,5%	Melampaui
31.2	Rasio PAD	8,83%	9,74%	10,19%	10,26%	9,99%	10%	Belum Tercapai
31.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Tercapai
31.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Tercapai
31.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	69,87%	72,26%	65,16%	79,61%	81,94%	80%	Melampaui
31.6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
32	PENGADAAN							
32.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	0	0	0	Tercapai
32.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	0	0	6,38	6,69	10,60%	10%	Melampaui
32.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	36,78%	19,18%	42,92%	27,07%	34,82%	34%	Melampaui
33	KEPEGAWAIAN							
33.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	162,40%	202,24%	227,13%	247,48%	266,67%	250%	Melampaui
33.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	64,20%	61,88%	61,54%	60,14%	61,32%	60%	Melampaui
33.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,64%	11,35%	12,30%	11,13%	11,74%	11,55%	Melampaui
34	MANAJEMEN KEUANGAN							
34.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-12,94%	-11,07%	-1,10%	-6,49%	-6,29%	-5%	Belum Tercapai
34.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	11,01%	8,07%	3,70%	1,54%	4,23%	3,5%	Melampaui
34.3	Manajemen Aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

	1. Apakah ada daftar aset tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai
34.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	11,92%	10,66%	6,01%	6,26%	5,93%	6,5%	Belum Tercapai
35	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK							
35.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	-	-	-	103,75%	102,42%	100%	Melampaui
35.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Tercapai
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Persentase Pengeluaran konsumsi Pangan per kapita	56,09	55,77	57,72		51,41	50,50	Melampaui
2	Nilai tukar petani	114,29	111,84	110,12	106,91	105,13	105	Melampaui
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	43,91	44,23	42,28		48,59	48	Melampaui
4	Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten (%)	68,05	70,49	71,99	73,34	76,20	74	Melampaui
5	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	69,15%	72,69%	72,79%	68,29%	68,74%	68,70%	Melampaui
6	Indeks Resiko Bencana	-	-	-	179,20	205	200	Melampaui
7	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani	97,34	34,98	31,92	71,45	85,90	85	Melampaui

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN
2022**

2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun 2021

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan PemerintahanDaerahdanProgram/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	TargetRenstrasKPDpadaTahun2024(TahunAkhirRenstra)		TargetKinerjadanAnggaranSKPDTahun2020		RealisasKinerjaPadaTriwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SKPDTahun2020		Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran Renja SKPDTahun2020 (%)		Realisasi Kinerja dan AnggaranRenstrasKPDs/dAkhir Tahun2020		Unit SKPDPenanggungjawab		
								I		II		III		IV										
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	R p	K	Rp.	K	Rp.			
1	2		3	4	6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		16	
1				DINASPENDIDIKANDANKEBUDAYAAN													12=8+9+10+11							
	1	01	01	ProgramPelayanan AdministrasiPekantoran			100	2,165,231,670									1,847,037,274						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	02	Penyediaanjasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	Jumlahrekeningyangdibayarkan tepat waktu		rekening/bulan	24	215,425,000	-	50,322,820	12	50,322,820	6	33,660,408	6	33,660,408	24	167,966,457	100.00	77.97	24.00	167,966,457
				06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas /Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas yangdibayarkan		unit	13	19,760,420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	
				07	PenyediaanjasaAdm. Keuangan	Jumlahjasaadministrasi keuangan yangterbayarkan		orang/bulan	264	666,832,000	66	117,295,000	66	117,295,000	66	166,528,000	66	166,528,000	264	567,646,000	100.00	85.13	264.00	567,646,000
				08	Penyediaanjasa kebersihankantor	Jumlahjasa kebersihankantoryang terbayarkan		orang/bulan	24	67,680,000	6	14,437,500	6	14,437,500	6	9,675,000	6	9,675,000	24	48,225,000	100.00	71.25	24.00	48,225,000
				12	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunanKantor	Jumlahpakealat listrikdan elektornikyangdisediakan		jenis	17	195,175,000	3	48,786,250	4	48,786,250	5	48,786,250	5	48,786,250	17	195,145,000	100.00	99.98	17.00	195,145,000
				13	Penyediaan Perlengkapan dan PeralatanKantor	Jumlah penyediaan perlengkapan danperalatankantors esualanalisa kebutuhan		paket	2	19,600,000	1	7,250,000	-	-	1	7,250,000	-	-	2	14,500,000	100.00	73.98	2.00	14,500,000
				15	PenyediaanBahanBacaandanPeraturan Perundang-undangan	Jumlahbahanbacaanyang disediakan		bahan bacaan/bulan	672	122,100,000	168	30,030,000	168	30,030,000	168	30,030,000	168.00	30,030,000	672	120,120,000	100.00	98.38	672.00	120,120,000
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlahrapatkoodinasi keluar daerahyangdilikuti		kali	50	102,828,250	10	20,255,000	10	20,255,000	15	30,471,634	15	30,471,634	50	101,453,267	100.00	98.66	50.00	101,453,267
				19	Peningkatan Pelayanan dan AdministrasiPerkantoran	Jumlah kebutuhan pelayananadministrasi perkantoran yang tersedia		jenis	52	494,403,000	13	98,049,738	13	98,049,738	13	98,049,738	13	98,049,738	52	392,198,950	100.00	79.33	52.00	392,198,950
				20	PeningkatanPengelolaanBarangdanAsset	Jumlahlaporanpengelolaanbarang danasetyangdibuat		sekolah	405	261,428,000	100	66,834,000	100	35,397,500	100	67,775,550	105.00	69,775,550	405	239,782,600	100.00	91.72	405.00	239,782,600
Rata-rataCapaianKinerja(%)																		90.00	77.64					
PredikatKinerja																		ST	T					
2	1	02	02	Program Peningkatan Sarana danPrasaranaAparatur		100	-	100	575,700,000									516,953,359					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				09	PengadaanPeralatanGedungKantor	Jumlahperalatangedungkantor yang diadakan		unit	6	370,700,000	1	89,789,750	1	89,789,750	2	91,789,750	2	91,789,750		363,159,000			-	363,159,000
				22	PemeliharaanRutin/ BerkalaGedungKantor	Jumlahgedungkantoryang dipelihara		gedung	2	60,000,000	-	-	1	29,632,000	-	-	1	29,632,000	2	59,264,000	100.00	98.77	2.00	59,264,000
				24	Pemeliharaan Rutin / Berkala KendaraanDinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasionayangdipelihara		unit	13	115,000,000	-	-	3.00	20,893,000	5	22,930,380	5	22,930,380	13	66,753,759	100.00	58.05	13.00	66,753,759
				26	PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor	Jumlahperlengkapangedungkantor yangtersedia		kantor	2	20,000,000	-	-	1	10,704,550	-	-	1	10,704,550	2	21,409,100	100.00	107.05	2.00	21,409,100
				28	PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor	Jumlahperalatangedungkantor yangtersedia		peralatan	45	10,000,000		16.88	3,750,000	-	-	11.78	2,617,500		29	6,367,500	63.68	63.68	28.65	6,367,500
Rata-rataCapaianKinerja(%)																		98.00	86.65					
PredikatKinerja																		ST	T					
4	1	04	06	Program Peningkatan PengembanganSistim Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan		100		100	159,242,000									135,616,750					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

	1	04	06	01	Penyusunanlaporancapaiankinerjadan ikhtisarrealisasikinerjaSKPD	JumlahLaporanKinerjayangdibuat	laporan	4	52,300,000	1	12,708,050	1.00	12,708,050	1	12,708,050	1	12,708,050	4	50,832,200	100.00	97.19	4.00	50,832,200	
				02	PenyusunanlaporanKeuanganSemesteran	Jumlahlaporansemesteranyang dibuat	laporan	1	20,579,000	-	-	-	-	-	-	1	15,680,000	1	15,680,000	100.00	76.19	1.00	15,680,000	
				04	PenyusunanLap.XeuanganAkhirThn	Jumlahlaporankeuanganakhir tahunyangdibuat	laporan	2	20,455,000	-	-	-	-	-	-	1	15,680,000	1	15,680,000	50.00	76.66	1.00	15,680,000	
				06	PenyusunanPerencanaanKerjaPerangkat Daerah	Jumlahdokumenperencanaankerja yangdibuat	dokumen	4	65,908,000	1	13,356,138	1	13,356,138	1	13,356,138	1	13,356,138	4	53,424,550	100.00	81.06	4.00	53,424,550	
Rata-rataCapaianKinerja(%)																			87.50	82.78				
PredikatKinerja																			T	T				
5	1	05	07		ProgramPeningkatan Informasi		100	-	100	93,079,500									56,000,000				DinasPendidika n dan Kebudayaan	
	1	05	07	01	Perencanaan dan pengembangan sisteminformasi berbasis WEB	Jumlah informasitentanggapendidikan melalui website, vidiodanbukuprovil	sistem	5	71,079,500	1	10,250,000	1	10,250,000	1	10,250,000	2	13,250,000	5	44,000,000	100.00	61.90	5.00	44,000,000	
	1	05	07	02	Penyebarluasaninfomasi melalui pameran pembangunan	Jumlahpameranyangdikuti	kali	1	22,000,000	-	-	-	-	1	12,000,000	-	-	1	12,000,000	100.00	54.55	1.00	12,000,000	
Rata-rataCapaianKinerja(%)																			100.00	58.22				
PredikatKinerja																			ST	R				
3	1	03	08		ProgramPeningkatanDisiplindankapasitas Sumber DayaAparatur		100	-	100	45,000,000									-				DinasPendidika n dan Kebudayaan	
	1	03	08	05	Pengadaanpakaiankhusus hari-hari tertentu	Jumlahpakaiandlahragayang diadakan	pasang	200	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	
	1	03	08	08	BimbinganTekhnisImplementasiPeraturan Perundang-undangan	Jumlahaparaturyangmengikuti bimtek	orang	20	227,689,000	5	56,854,300	5	56,854,300	5	56,854,300	5	56,854,300	20	227,417,200	100.00	99.88	20.00	227,417,200	
Rata-rataCapaianKinerja(%)																			50.00	49.94				
PredikatKinerja																			R	SR				
01	13	01	16		ProgramPengelolaan Kekayaan Budaya		-		354,982,000										287,163,950				DinasPendidika n dan Kebudayaan	
				01	PeningkatanPartisipasiMasyarakatdalam engelolaankeayaanbudaya	Jumlah peserta pelatihan kesenianandkegiatanpermainanra kyat	orang	220	5,024,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	
				04	SosialisasiPengelolaanKekayaanBudaya LokalDaerah	Jumlahpeserta sosialisasisesuai analisakebutuhan	peserta	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	
				05	Pengelolaan dan Pengembangan PelestarianPeninggalan Sejarah Purbakala, Museum danPeninggalanBawahAir	Jumlah Cagar Budaya yang terkelolasesuaianalisakebutuhan	situs	2	279,829,500	-	-	1	128,969,475	-	-	1	128,969,475	2	257,938,950	100.00	92.18	2	257,938,950	
				06	PengembanganKebudayaanandanPariwisata	Jumlah peserta pelatihan kesenianandkegiatanpermainanra kyat	orag	80	60,428,500	20	6,000,000	20	6,000,000	20	6,000,000	20	6,000,000	80	24,000,000			80	24,000,000	
				10	Pengawasan monitoring evaluasi danpelaporanpelaksanaanprogrampengelol aan kekayaanbudaya	Jumlah situs yang dilakukanpengawasan,monit oringdan dievaluasi	situs	27	9,700,000	6.00	1,000,000	6.00	1,000,000	7	1,225,000	8	2,000,000	27.00	5,225,000	100.00	53.87	27	5,225,000	
Rata-rataCapaianKinerja(%)																			50.00	36.51				
PredikatKinerja																			R	SR				
				17	Programpengelolaan keragamanbudaya		-		345,658,000										204,460,500				DinasPendidika n dan Kebudayaan	
				01	Pengembangan kesenian dan kebudayaandaerah	Jumlahpertunjukankesenianand kebudayaan sesuai analisakebutuhan	sanggar	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	
				04	Perkembangankeragamanbudayaadaerah	Jumlahjasapenjagasitus	situs	25	148,403,500	6	20,000,000	6	20,000,000	6	35,000,000	7	45,000,000	25	120,000,000	100.00	80.86	25	120,000,000	
				05	Penyelenggaraanfestivalbudayaadaerah	Jumlahfestival budayaadaerah sesuai analisa	kegiatan	3	197,254,500	-	-	1	28,153,500	1	28,153,500	1	28,153,500	3	84,460,500	100.00	42.82	3	84,460,500	
Rata-rataCapaianKinerja(%)																			66.67	41.25				
PredikatKinerja																			R	SR				
5	1	05	15		ProgramPendidikanAnak Usia Dini		-	100	1,667,631,480										1,543,201,721				DinasPendidika n dan Kebudayaan	
	1	05	15	01	Pembangunangedungekolah	Jumlahgedugsekolahyang dibangun	sekolah	2	419,670,000			1	199,400,000			1	199,400,000	2	398,800,000	100.00	95.03	2.00	398,800,000	
	1	05	15	58	PengembanganPendidikanAnakUsiaDini	Jumlahpesertagebyar PAUD	orang	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	
	1	05	15	59	PenyelenggaraanPendidikanAnakUsiaDini	JumlahTK/KelompokPAUDyang mendapatkan DAK	sekolah	4	1,113,355,980	1	269,385,580	1	269,385,580	1	269,385,580	1	269,385,580	4	1,077,542,321	100.00	96.78	4.00	1,077,542,321	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

1	1	05	15	60	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	Jumlah peserta yang mengikuti ambore PTKPUDNI		Pendidik		25	41,086,500	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-			
1	1	05	15	62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan pembelajaran pendidikan anak usia dini	Jumlah peserta pengurus utama angenda npras jagabagi PAUD		orang		120	93,519,000	30	16,714,850	30	16,714,850	30	16,714,850	120	66,859,400	100.00	71.49	120.00	66,859,400		
Rata-rataCapaianKinerja(%)																			60.00	52.66					
PredikatKinerja																			R	R					
6	1	06	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					100	85,018,475,750							75,022,855,603				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1	1	06	16	01	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang dibangun		sekolah		3	280,614,750	-	-	1	79,625,167	1	79,625,167	1	79,625,167	3	238,875,500	100.00	85.13	3.00	238,875,500
1	1	06	16	19	Pengadaan meubeler sekolah	Jumlah meubeler sekolah yang diadakan		sekolah		60	900,000,000	15	224,704,000	15	224,704,000	15	224,704,000	15	224,704,000	60	898,816,000	100.00	99.87	60.00	898,816,000
1	1	06	16	41	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang direhab		sekolah		22	4,525,100,400	5	888,330,000	5	888,330,000	5	888,330,000	7	1,728,955,802	22	4,393,945,802	100.00	97.10	22.00	4,393,945,802
1	1	06	16	58	Pelatih an Kompetensi Siswa berprestasi	Jumlah peserta yang mengikuti lomba OSN Tingkat SD dan SMP		Orang		320	164,382,900	80	6,621,750	80.00	6,621,750	80	6,621,750	80	6,621,750	320	26,487,000	100.00	16.11	320.00	26,487,000
1	1	06	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional siswa (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP	Jumlah sekolah yang mendapatkan Bantuan Dana BOS		sekolah		380	59,790,866,700	95	12,539,502,000	95	12,539,502,000	95	12,539,502,000	95	12,539,502,000	380	50,158,008,000	100.00	83.89	380.00	50,158,008,000
1	1	06	16	66	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI, SMP/MTs	Jumlah dana pendidikan gratis untuk SD/MI, SMP/MTs		sekolah		435	9,365,500	108	1,403,000	109.00	1,000,000	109.00	1,000,000	109.00	1,000,000	435	4,403,000	100.00	47.01	435.00	4,403,000
1	1	06	16	69	Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang terbinapenerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)		sekolah		1	1,474,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	
1	1	06	16	70	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	Jumlah peserta festival Lomba Seni Nasional Siswa (FLS2N) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OS2N) SD, SMP		Peserta		150	18,000,000	35	4,000,000	35.00	4,000,000	35.00	4,000,000	45	6,000,000	150	18,000,000	100.00	100.00	150.00	18,000,000
1	1	06	16	75	Penyediaan Beasiswa Transisi	Jumlah serapan program PIP untuk siswa kurang mampu		Sekolah		380	7,950,000	95	1,730,650	95	1,730,650	95.00	1,730,650	95	1,730,650	380	6,922,600	100.00	87.08	380.00	6,922,600
1	1	06	16	78	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Peserta UASSD/MI dan SMP/MTs		Siswa		15,800	10,100,000	3,950	2,300,000	3,950	2,300,000	3,950	2,300,000	3,950	2,300,000	15,800	9,200,000	100.00	91.09	15,800.00	9,200,000
1	1	06	16	79	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun (DAK)	Jumlah sekolah yang direhab, dibangun RKB, Jamban serta mendapatkan meubeler dan buku perpustakaan		sekolah		37	19,310,621,500	9	4,817,049,425	9	4,817,049,425	9	4,817,049,425	10	4,817,049,425	37	19,268,197,701	100.00	99.78	37.00	19,268,197,701
Rata-rataCapaianKinerja(%)																			90.91	73.37					
PredikatKinerja																			T	S					
9	1	09	20		Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan					100	360,798,950							262,219,200				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1	1	09	20	01	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidikan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang mengikuti lomba berprestasi dan OGN		orang		80	10,576,150	-	-	50	1,680,000	-	-	-	-	50	1,680,000	62.50	15.88	50.00	1,680,000
1	1	09	20	03	Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah guru SD/SMP yang mengikuti pelaksanaan Calon Kepala Sekolah		Pendidik		30	44,375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	
1	1	09	20	07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan		PTK		400	67,028,300	100	11,704,013	100	11,704,013	100	11,704,013	100	11,704,013	400	46,816,050	100.00	69.85	400.00	46,816,050
1	1	09	20	10	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Jumlah pelayanan PAK, DUPAK, KGB,		PTK		3,090	137,124,500	773	29,538,288	773	29,538,288	773	29,538,288	773	29,538,288	3,090	118,153,150	100.00	86.16	3,090.00	118,153,150
1	1	09	20	11	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang melakukan sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik)		sekolah		657	101,695,000	164.25	23,892,500	164.25	23,892,500	164.25	23,892,500	164.25	23,892,500	657	95,570,000	100.00	93.98	657.00	95,570,000
Rata-rataCapaianKinerja(%)																			72.50	53.17					
PredikatKinerja																			S	R					
11	1	09	22		Program Pendidikan Kesetaraan					100	2,113,103,000							1,966,333,900				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1	1	09	21	02	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Peserta Paket yang mengikuti ujian		Kelompok		4	7,077,000	1	1,169,300	1	1,169,300	1	1,169,300	1	1,169,300	4	4,677,200	100.00	66.09	4.00	4,677,200
1	1	09	21	03	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Jumlah peserta seleksi Tingkat Kabupaten		orang		75	15,000,000	18.75	3,750,000	18.75	3,750,000	18.75	3,750,000	18.75	3,750,000	75	15,000,000	100.00	100.00	75.00	15,000,000

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

1	09	21	05	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Jumlah peserta pendidikan kursus		orang		80	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	
1	09	21	06	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah kelompok program keaksaraan fungsional meningkat		Kelompok		25	746,272,000	6.25	177,462,500	6.25	177,462,500	6.25	177,462,500	6.25	177,462,500	25	709,850,000	100.00	95.12	25.00	709,850,000
1	09	21	07	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Jumlah kelompok program kecakapan hidup		Kelompok		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	-	-	
1	09	21	17	Penyediaan Sarana & Prasarana Pendidikan Non Formal oleh Dinas	Jumlah gedung SKB, PKBM mendapatkan fasilitas pendidikan		gedung		5	1,344,754,000	-	-	-	-	5	1,236,806,700	-	-	5	1,236,806,700	100.00	91.97	5.00	1,236,806,700
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					66.67	58.86		
Predikat Kinerja																								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJADAN ANGGARAN DISERULUH (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 13)																					77.74	63.90		
PREDIKAT KINERJADAN SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 13)																					S	R		
1	02	01	01	DINAS KESEHATAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			-		1,406,388,000									1,125,210,638				Dinas Kesehatan	
1	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan tepat waktu	Rekening		24	411,000,000	6	53,309,197	6	53,309,197	6	53,309,197	6	53,309,197	24	213,236,786	100.00	51.88	24.00	213,236,786
1	02	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas yang dibayarkan	STNK		13	68,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000	4	1,866,680	13	4,866,680	100.00	7.16	13.00	4,866,680
1	02	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan	orang		516	577,700,000	129	139,539,000	129	139,539,000	129	139,539,000	129	139,539,000	516	558,156,000	100.00	96.62	516.00	558,156,000
1	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan	orang		60	31,200,000	15	7,800,000	15	7,800,000	15	7,800,000	15	7,800,000	60	31,200,000	100.00	100.00	60.00	31,200,000
1	02	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan setiapi hari	bahan bacaan		564	32,988,000	141	7,840,750	141	7,840,750	141	7,840,750	141	7,840,750	564	31,363,000	100.00	95.07	564.00	31,363,000
1	02	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi keluar daerah yang dilakukan	kali		100	194,400,000	25	49,097,043	25	49,097,043	25	49,097,043	25	49,097,043	100	196,388,172	100.00	101.02	100.00	196,388,172
1	02	01	01	19	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang disediakan	jsniz		4	58,500,000	1	14,462,500	1	14,462,500	1	14,462,500	1	14,462,500	4	57,850,000	100.00	98.89	4.00	57,850,000
1	02	01	01	20	Peningkatan pengelolaan barang dan aset	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan	orang		36	32,600,000	9	8,037,500	9	8,037,500	9	8,037,500	9	8,037,500	36	32,150,000	100.00	98.62	36.00	32,150,000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100.00	81.16		
Predikat Kinerja																					ST	S		
1	02	01	02	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur				0		245,000,000									243,340,119				Dinas Kesehatan	
1	02	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit		6	8,000,000	1	1,500,000	1	1,500,000	2	2,500,000	2	2,500,000	6	8,000,000	100.00	100.00	6.00	8,000,000
1	02	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	unit		11	64,000,000	2	14,000,000	3	16,548,083	3	16,548,083	3	16,548,083	11	63,644,250	100.00	99.44	11.00	63,644,250
1	02	01	02	10	Pengadaan Meubelur	Jumlah meubelur kantor yang diadakan	unit		30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	gedung		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit		13	168,000,000	3	40,000,000	3	40,000,000	3	40,000,000	4	46,725,869	13	166,725,869	100.00	99.24	13.00	166,725,869
1	02	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	paket		1	5,000,000	-	-	-	-	1	4,970,000	-	-	1	4,970,000	100.00	99.40	1.00	4,970,000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					66.67	66.35		
Predikat Kinerja																					S	S		
1	02	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				0		170,800,000									170,578,300				Dinas Kesehatan	
1	02	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan LKIP dan LPPD dan SAKIPu	laporan		3	30,500,000	-	-	1	10,166,467	1	10,166,467	1	10,166,467	3	30,499,400	100.00	100.00	3.00	30,499,400
1	02	01	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang dibuat	laporan		1	27,300,000	-	-	1	27,287,000	-	-	-	-	1	27,287,000	100.00	99.95	1.00	27,287,000
1	02	01	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	laporan		1	27,300,000	-	-	-	1	27,148,800	-	-	-	1	27,148,800	100.00	99.45	1.00	27,148,800
1	02	01	06	06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan rencana penetapan kinerja yang dibuat	dokumen		2	85,700,000	-	-	1	28,547,700	1	28,547,700	1	28,547,700	3	85,643,100	150.00	99.93	3.00	85,643,100
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					112.50	99.83		
Predikat Kinerja																					ST	ST		
1	02	01	07	Program Peningkatan Informasi				0		25,000,000									0				Dinas Kesehatan	
1	02	01	07	02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan	Jumlah pameran yang diikuti	kali		1	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0.00	0.00		
Predikat Kinerja																					ST	ST		
1	1	02	03	Program peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur			100.00		-	220,000,000		-		100,000,000		-		-	100,000,000				Dinas Kesehatan	
			05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan		pasan		200	100,000,000	-	-	200	100,000,000	-	-	-	-	200	100,000,000	100.00	100.00	200.00	100,000,000

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

					08	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek			orang		15	120,000,000		3	15,000,000		4	35,000,000		4	35,000,000		4	35,000,000		15	120,000,000	100.00	100.00		15.00	120,000,000									
																																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100.00	100.00							Dinas Kesehatan	
																																Predikat Kinerja	ST	ST								
1	02	01	15			Program obat dan peralatan kesehatan							3,453,824,000															3,328,195,682						Dinas Kesehatan								
1	02	01	15	01		Pengadaan obat dan peralatan kesehatan	Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang terpenuhi kebutuhan obatnya			Puskesmas/RS		18	3,453,824,000		0	0	9.00	1,664,097,841		9	1,664,097,841						18	3,328,195,682	100.00	96.36		18.00	3,328,195,682									
																																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100.00	96.36								
																																Predikat Kinerja	ST	ST								
1	02	01	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				0			6,077,475,539															4,782,545,850						Dinas Kesehatan								
1	02	01	16	02		Pemeliharaan dan pemeliharaan kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan			orang		8	38,050,000		5.0	24,375,000	2.00	7,650,000		1	6,025,000		0	0		8	38,050,000	100.00	100.00		8.00	38,050,000										
1	02	01	16	03		Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya	Jumlah Puskesmas, Puskesmasdes yang direhabilitasi			unit		15	2,330,579,539		0	0	5.00	1,092,692,925			1,092,692,925		0	0		5	2,185,385,850	33.33	93.77		5.00	2,185,385,850										
1	02	01	16	06		Revitalisasi sistem kesehatan masyarakat	Terlaksananya revitalisasi sistem kesehatan masyarakat			puskesmas		17	2,394,650,000		2.0	111,650,000	3.00	117,670,000		6	915,700,000		6	915,700,000		17	2,060,720,000	100.00	86.06		17.00	2,060,720,000										
1	02	01	16	09		Peningkatan kesehatan Masyarakat	Terlaksananya penilaian kinerja Puskesmas			puskesmas		10	1,256,846,000		0.0	0	5.00	220,747,500		5.00	220,747,500		0	0		10	441,495,000	100.00	35.13		10.00	441,495,000										
1	02	01	16	12		Peningkatan pelayanan dan penanganan masalah kesehatan	Penanganan pasien dengan cepat			kecamatan		12	57,350,000		2.0	14,223,750		14,223,750			14,223,750			14,223,750		2	56,895,000	16.67	99.21		2.00	56,895,000										
																																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	70.00	82.83								
																																Predikat Kinerja	S	S								
1	02	01	19			Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat				0			84,100,000															57,540,000						Dinas Kesehatan								
1	02	01	19	01		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Pengetaahuan kader posyandu meringkat dan terampil			kecamatan		12	46,600,000		3.00	8,135,000	3.00	8,135,000		3	8,135,000		3	8,135,000		12.0	32,540,000	100.00	69.83		12.00	32,540,000										
1	02	01	19	02		Penerapan PHBS dan Pengetahuan di ROKK di sekolah dasar	Penerapan PHBS dan Pengetahuan di ROKK di sekolah dasar			Kecamatan		12	37,500,000		3	6,250,000	3	6,250,000		3	6,250,000		3	6,250,000		12	25,000,000	100.00	66.67		12.00	25,000,000										
																																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100.00	68.25								
																																Predikat Kinerja	P	ST	R							
1	02	01	21			Program pengembangan lingkungan sehat				0			63,800,000															63,315,000						Dinas Kesehatan								
1	02	01	21	02		Penyuluhan Mencegah Lingkungan Sehat	Pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)			kecamatan		12	63,800,000				6	28,955,000		6	34,360,000					12	63,315,000	100.00	99.24		12.00	63,315,000										
1	02	01	21	03		Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	P																																			

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

1	02	01	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	0	2,147,419,250											2,083,119,151						Dinas Kesehatan	
1	02	01	27	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor/Rumah Sakit	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi	unit	1	2,147,419,250		1	2,083,119,151					1	2,083,119,151	100.00	97.01	1.00	2,083,119,151		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100.00	97.01					
Predikat Kinerja																		ST	ST					
1	02	01	33	Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	0	51,636,658,000											21,894,200,168						Dinas Kesehatan	
1	02	01	33	01	Peningkatan pelayanan Masyarakat	Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat	kecamatan	12	23,899,142,000	3	5,459,652,542	3	5,459,652,542	3	5,459,652,542	3	5,459,652,542	12	21,838,610,168	100.00	91.38	12.00	21,838,610,168	
1	02	01	33	04	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan monev	laporan	1	65,900,000	0.1	10,000,000	0.2	13,897,500	0.2	13,897,500	0.5	17,795,000	1	55,590,000	100.00	84.36	1.00	55,590,000	
1	02	01	33	05	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya jaminan kesehatan nasional	kecamatan	12	27,671,616,000	3	5,307,404,375	3	5,307,404,375	3	5,307,404,375	3	5,307,404,375	12	21,229,617,500	100.00	76.72	12.00	21,229,617,500	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100.00	87.87					
Predikat Kinerja																		ST	T					
1	02	01	34	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD		25,000,000,000											20,872,540,536						Dinas Kesehatan	
			01	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	bulan	12	400,000,000	3	99,254,999	3.00	99,254,999	3	99,254,999	3	99,254,999	12	397,019,994	100.00	99.25	12	397,019,994		
			02	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Puskesmas Salo	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	bulan	12	2,250,000,000	3	480,170,204	3.00	480,170,204	3	480,170,204	3	480,170,204	12	1,920,680,816	100.00	85.36	12	1,920,680,816		
			03	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Puskesmas Sulili	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	bulan	12	1,300,000,000	3	246,154,733	3.00	246,154,733	3	246,154,733	3	246,154,733	12	984,618,932	100.00	75.74	12	984,618,932		
			04	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Puskesmas Mattiro Deceng	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	bulan	12	1,300,000,000	3	267,315,128	3.00	267,315,128	3	267,315,128	3	267,315,128	12	1,069,260,510	100.00	82.25	12	1,069,260,510		
			05	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Puskesmas Matiro Bulu	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	bulan	12	2,000,000,000	3	485,147,250	3.00	485,147,250	3	485,147,250	3	485,147,250	12	1,940,589,000	100.00	97.03	12	1,940,589,000		
			06	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Puskesmas Suppa	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	bulan	12	1,150,000,000	3	323,674,304	3.00	323,674,304	3	323,674,304	3	323,674,304	12	1,294,697,216	100.00	112.58	12	1,294,697,216		
			03	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Puskesmas Ujung Lero	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	bulan	12	950,000,000	3	235,311,065	3.00	235,311,065	3	235,311,065	3	235,311,065	12	941,244,258	100.00	99.08	12	941,244,258		
			03	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Puskesmas Lanrisang	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	bulan	12	1,100,000,000	3	252,875,395	3.00	252,875,395	3	252,875,395	3	252,875,395	12	1,011,501,580	100.00	91.95	12	1,011,501,580		
			03	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Puskesmas Matombong	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	bulan	12	1,600,000,000	3	361,656,963	3.00	361,656,963	3	361,656,963	3	361,656,963	12	1,446,627,852	100.00	90.41	12	1,446,627,852		
			03	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Puskesmas Cempa	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	bulan	12	1,000,000,000	3	214,104,339	3.00	214,104,339	3	214,104,339	3	214,104,339	12	856,417,357	100.00	85.64	12	856,417,357		
			11	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Puskesmas Tadang Palie	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	bulan	12	650,000,000	3	137,152,530	3.00	137,152,530	3	137,152,530	3	137,152,530	12	548,610,120	100.00	84.40	12	548,610,120		
			12	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Puskesmas Teppo	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	bulan	12	2,200,000,000	3	485,149,183	3.00	485,149,183	3	485,149,183	3	485,149,183	12	1,940,596,731	100.00	88.21	12	1,940,596,731		
			13	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Puskesmas Tuppu	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	bulan	12	2,750,000,000	3	449,878,705	3.00	449,878,705	3	449,878,705	3	449,878,705	12	1,799,514,821	100.00	65.44	12	1,799,514,821		
			14	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Puskesmas Tadang Bung	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	bulan	12	1,650,000,000	3	381,442,851	3.00	381,442,851	3	381,442,851	3	381,442,851	12	1,525,771,405	100.00	92.47	12	1,525,771,405		
			15	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Puskesmas Lampa	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	bulan	12	1,750,000,000	3	357,048,006	3.00	357,048,006	3	357,048,006	3	357,048,006	12	1,428,192,024	100.00	81.61	12	1,428,192,024		
			16	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Puskesmas Sali	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)	bulan	12	1,650,000,000	3	195,644,747	3.00	195,644,747	3	195,644,747	3	195,644,747	12	782,578,988	100.00	47.43	12	782,578,988		

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

[illegible]

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya jasa komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			1	2,500,000			1	2,500,000			1	2,500,000	100.00	100.00	1.00	2,500,000			
				13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan			11	1,788,000			3.6	200,000	3.6	345,000	3.6	300,000	11	845,000	98.18	47.26	10.80	845,000	
				15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan			252	13,420,000	63	1,410,000	63.00	1,410,000	63	4,790,000	63	4,790,000	252	12,400,000	100.00	92.40	252.00	12,400,000	
				18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi seluar daerah yang dilakukan			90	245,000,000	23	61,162,685	23	61,162,685	23	61,162,685	23	61,162,685	90	244,650,739	100.00	99.86	90.00	244,650,739	
				19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia			8	126,453,000	2	15,115,000	2	30,656,000	2	22,643,500	2	22,643,500	8	91,058,000	100.00	72.01	8.00	91,058,000	
				20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan			3	31,310,000	1	4,200,000	1	4,780,000	1	21,136,000			3	30,116,000	100.00	96.19	3.00	30,116,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			99.83	82.94					
Predikat kinerja																			ST	T					
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	500,000,000									439,367,466				Dinas PU& PR		
				01	Pembangunan Gedung Kantor					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan			9	269,300,000	1.00	65,350,000	2	65,350,000	3.00	65,350,000	3.00	65,350,000	9	261,400,000	100.00	97.07	9.00	261,400,000	
				10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya meubeler kantor				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			4	42,700,000	1.00	10,600,000	1	10,600,000	1	10,600,000	1	10,600,000	4	42,400,000	100.00	99.30	4.00	42,400,000	
				24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			35	175,000,000	4.07	20,368,000	4.24	21,200,000	9	42,609,733	9	42,609,733	25	126,787,466	72.45	72.45	25.36	126,787,466	
				26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			2	8,000,000			1	2,387,500	1	2,387,500			2	4,775,000	100.00	59.69	2.00	4,775,000	
				28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			1	5,000,000			1	4,005,000					1	4,005,000	100.00	80.10	1.00	4,005,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			52.49	45.40					
Predikat kinerja																			S	SR					
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				0	106,955,500									96,322,500				Dinas PU& PR		
				01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang dibuat			3	14,545,500			1	8,158,000	1	3,106,250	1	3,106,250	3	14,370,500	100.00	98.80	3.00	14,370,500	
				02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semester yang dibuat			2	9,765,000			1	4,354,000	1	4,354,000			2	8,708,000	100.00	89.18	2.00	8,708,000	
				04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun			1	31,885,000	1.00	28,077,000							1	28,077,000	100.00	88.06	1.00	28,077,000	
				06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat			5	50,760,000	1.00	11,291,750	1	11,291,750	2.00	11,291,750	1	11,291,750	5	45,167,000	100.00	88.98	5.00	45,167,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00	91.25					
Predikat kinerja																			ST	T					
			07		Program Peningkatan Informasi					15,000,000									11,450,000				Dinas PU& PR		
				02	Penyediaan Informasi Melalui Pameran Pembangunan	Jumlah pameran yang diikuti			1	15,000,000			1	11,450,000					1	11,450,000	100.00	76.33	1.00	11,450,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00	76.33					
Predikat kinerja																			ST	S					
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur				0	118,000,000									116,552,800				Dinas PU& PR		
				05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian olahragayang diadakan			100	30,000,000			50	15,000,000	50	15,000,000			100	30,000,000	100.00	100.00	100.00	30,000,000	
				08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya SDM aparatur			80	88,000,000	12.00	12,777,100	12.00	13,966,000	28	29,904,850	28	29,904,850	80.00	86,552,800	100.00	98.36	80.00	86,552,800	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00	98.36					
Predikat kinerja																			ST	ST					
			15		Program Perencanaan Tata Ruang				-	15,000,000									11,450,000				Dinas PU& PR		
				01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang tersusun			1	15,000,000					1	11,450,000			1	11,450,000	100.00	76.33	1.00	11,450,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00	76.33					
Predikat kinerja																			ST	S					
			16		Program Pemanfaatan Ruang				-	118,000,000									86,552,800				Dinas PU& PR		
				03	Penyusunan kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah lokasi identifikasi kesesuaian lahan			3	30,000,000			1.0	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	3	30,000,000	100.00	100.00	3.00	30,000,000	
				05	Survey dan pemetaan	Jumlah laporan identifikasi terkait pemenuhan data indikator			1	88,000,000	0.10	21,638,200	0.2	21,638,200	0.2	21,638,200	1	21,638,200	1	86,552,800	100.00	98.36	1.00	86,552,800	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00	99.18					

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

			17	ProgramPengendalianPemanfaatanRuang			-		77,910								Predikatkinerja	ST	ST			DinasPU& PR		
			01	PenyusunanKebijakanPengendalian PemanfaatanRuang	JumlahJasaaadvisaplanningyang terbayarkantepatwaktu	orang		2	28,910								-	-	0.00	0.00	-	-		
			05	PengawasanPemanfaatanRuang	JumlahHokaspenataanruangyang sesuaiiperuntukannya	Kecamatan		12	49,000									-	0.00	0.00	-	-		
																		Rata-ratacapaiankinerja(%)	0.00	0.00				
			24	ProgramPengelolaanRuangTerbuka Hijau (RTH)			-		1,088,750								Predikatkinerja	SR	SR			DinasPU& PR		
			03	PenyusunandanAnalisisData/Informasi PengelolaanRTH	SistemInformasiPeneranganJalan Umum(PJU)	Laporan		1	50,000								-	-	0.00	0.00	-	-		
			05	PenataanRTH	JumlahLampu/Tiangyangdiadakan	paket		2	364,750												-	-		
			06	PemeliharaanRTH	JumlahTamanyangterpelihara	Taman		12	674,000												-	-		
																		Rata-ratacapaiankinerja(%)	0.00	0.00				
				ProgrampembangunanJalandanjembatan			-		73,953,001,801								Predikatkinerja	SR	SR			DinasPU& PR		
			01	PerencanaanPembangunanJalan	JumlahHEDJalanyangtersusun	Laporan		1	200,000,000			1	197,710,000								-	197,710,000		
			03	PembangunanJalan	Panjangjalanyangterbangun	Km		15	70,286,676,400			5.00	14,773,491,000	5	30,000,339,000	5	22,974,568,300	15	67,748,398,300	100.00	96.39	15.00	67,748,398,300	
			05	PembangunanJembatan	Jumlahjembatandandukker yang terbangun	Jembatan/dukker		1	3,466,325,401			1.00	3,121,761,900				1	3,121,761,900	100.00	90.06	1.00	3,121,761,900		
																		Rata-ratacapaiankinerja(%)	100.00	93.22				
			16	ProgramPembangunanSaluranDrainase /Gorong-gorong			-		2,582,780,600								Predikatkinerja	ST	ST			DinasPU& PR		
			01	PerencanaanPembangunanSaluran Drainase/gorong-gorong	JumlahDEDpembangunansaluran drainaseyangtersusun	laporan		1	243,780,000			1.00	243,280,000				1	243,280,000	100.00	99.79	1.00	243,280,000		
			03	PembangunanSaluranDrainase/gorong-gorong	Panjangdrainaseyangterbangun	meter		180	2,339,000,600	45.00	466,109,938	45.00	466,109,938	45.00	466,109,938	45.00	466,109,938	180	1,864,439,750	100.00	79.71	180.00	1,864,439,750	
																		Rata-ratacapaiankinerja(%)	100.00	89.75				
			18	ProgramRehabilitasi/PemeliharaaanJalandanjembatan					37,459,365,850								Predikatkinerja	ST	T			DinasPU& PR		
			03	Rehabilitasi/ pemeliharaanJalan	Lokasi jalanyangdipelihara	Kecamatan		12	37,459,365,850	3.00	9,298,533,335	3.00	9,298,533,335	3.00	9,298,533,335	3.00	9,298,533,335	12.00	37,194,133,340	100.00	99.29	12.00	37,194,133,340	
																		Rata-ratacapaiankinerja(%)	100.00	99.29				
			20	Program InspeksiKondisiJalandanjembatan			-		40,000,000	-	-						Predikatkinerja	ST	ST			DinasPU& PR		
			01	InspeksiKondisiJalan	Laporankondisijalan	Laporan		1	40,000,000			1	39,986,000				1	39,986,000	100.00	99.97	1.00	39,986,000		
																		Rata-ratacapaiankinerja(%)	100.00	99.97				
			23	Program PeningkatanSaranadanPrasarana Kebinamargaan			-		2,471,807,000								Predikatkinerja	ST	ST			DinasPU& PR		
			04	PengadaanAlat-AlatBerat	JumlahAlat-alat Berat	Paket		1	1,726,000,000				1	396,000,000			1	396,000,000	100.00	22.94	1.00	396,000,000		
			06	PengadaanAlat-AlatUkurdanBahan LaboratoriumKebinamargaan	Jumlahalat-alat ukur dan bahanlaboratoriumkebinamarganyang diadakan	Paket		1	550,000,000		0.2	182,799,667	0.3	182,799,667	0.5	182,799,667	#VALUE!	548,399,000	#VALUE!	99.71	#VALUE!	548,399,000		
			10	Rehabilitasi/pemeliharaanalat-alat berat	Jumalahalat berat yangdipelihara	unit		1	138,400,000			1.00	136,242,000				1	136,242,000	100.00	98.44		136,242,000		
			12	Rehabilitasi/pemeliharaanalat-alatukurdan bahanlaboratorium kebinamargaan	Jumlahtenagaujiabyang terbayarkan	orang		4	49,200,000	1.00	12,275,000	1.00	12,275,000	1.00	12,275,000	1.00	12,275,000	4	49,100,000	100.00	99.80	4.00	49,100,000	
			13	Monitoring, Evaluasidan Pelaporan	Jumlahlaporan kelayakan uji material	Laporan		1	8,207,000			1	3,790,000				1	3,790,000	100.00	46.18	1.00	3,790,000		
																		0	#VALUE!	73.41				
			27	ProgramPengembanganKinerjaPengelolaan Air/MinumdanAirLimbah			-		4,743,137,200	251	915,455,750						Predikatkinerja	ST	S			DinasPU& PR		
			01	Penyediaan sarana dan prasarana air minumbagi masyarakat berpenghasilanrendah	Panjangpipayangterbangun	meter		1,000	2,884,507,200	250.00	697,455,750	250	697,455,750	250	697,455,750	250	697,455,750	1,000	2,789,823,000	100.00	96.72	1,000.00	2,789,823,000	
			02	Penyediaanprasaradanasaranaairlimbah	Jumlahsaradanprasaranaair limbahyangtersedia	unit		5	1,787,550,000	1.00	218,000,000	1	516,834,997	1	516,834,997	2	516,834,997	5	1,768,504,990	100.00	98.93	5.00	1,768,504,990	
			08	Rehabilitasi/pemeliharaansaradan prasaranaair limbah	JumlahPLTYangterpelihara	unit		1	10,000,000			1	10,000,000				1	10,000,000	100.00	100.00		10,000,000		
			10	Monitoring,EvaluasidanPelaporan	Jumlahdatayangtersedia	unit		1	61,080,000			0.2	19,426,667	0.2	19,426,667	0.5	19,426,667	#VALUE!	58,280,000	#VALUE!	95.42	#VALUE!	58,280,000	
																		Rata-ratacapaiankinerja(%)	#VALUE!	97.77				
			29	ProgramPengembanganWilayahStrategisdan CepatTumbuh					195,445,000	-	-						Predikatkinerja	ST	ST			DinasPU& PR		
			01	Perencanaanpengembanganinfrastruktur	Jumlahdokumenperancanganyang tersusun	dokumen		3	156,000,000			1	51,261,667	1.00	51,261,667	1.00	51,261,667	3	153,785,000	100.00	98.58	3.00	153,785,000	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				02	PembangunanPeringkatanInfrastruktur	Jumlahdokumenpenataankawasan yangtersusun		dokumen		2	39,445,000				3,100,000	1.00	11,942,500	1.00	11,942,500	2	26,985,000	100.00	68.41	2.00	26,985,000	
																					Rata-ratacapaiankinerja(%)		100.00	83.50		
																					Predikatkinerja		ST	T		
				30	Programpembangunaninfrastrukturpedesaan						6,268,941,250											976,581,896				DinasPU& PR
				01	Penataanlingkunganpemukimanpenduduk pedesaan	Jumlahalat berat yangdimobilisasi		unit		3	980,000,000			1	325,527,299	1	325,527,299	1	325,527,299	3	976,581,896	100.00	99.65	3.00	976,581,896	
				02	Pembangunanjalananjembatanperdesaan	Lokasijalanlingkunganyang terbangun		kecamatan		12	5,288,941,250	3.00	635,285,625	3	635,285,625	3	635,285,625	3	635,285,625	12	2,541,142,500	100.00	48.05	12.00	2,541,142,500	
																					Rata-ratacapaiankinerja(%)		100.00	73.85		
																					Predikatkinerja		ST	S		
				31	ProgramPengaturanJasa Konstruksi						99,000,000											99,250,000				DinasPU& PR
				01	Sosialisasi dan Deseminasi PeraturanPerundang- UndanganJasaKonstruksi Dan PeraturanlainnyaYangTerkait	JumlahSDM		orang		10	31,000,000	2.50	7,500,000	2.50	7,500,000	2.50	7,500,000	2.50	7,500,000	10	30,000,000	100.00	96.77	10.00	30,000,000	
				02	PengaturanPenyelenggaraanijinusaha jaskonstruksi	ReviwRPJIM				1	99,000,000		0,2		20,000,000	0,3	39,625,000	0,5	39,625,000	#VALUE!	99,250,000	#VALUE!	100.25	#VALUE!	99,250,000	
																					Rata-ratacapaiankinerja(%)		#VALUE!	100.25		
																					Predikatkinerja		ST	ST		
				33	ProgramPengawasanJasa Konstruksi						127,000,000	-	-									-				DinasPU& PR
				01	Sosialisasi dan Diseminasi PeraturanPerundang- UndanganJasaKonstruksidan PeraturanlainnyayangTerkait	Jumlah SDM jasa konstruksi yangterlatih		orang		10	31,000,000														-	-
				02	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin UsahajasaKonstruksi	Jumlah jasa operator SPIAKI, TimAHLi Bangunan Gedung dan TimTeknis PTSP yangterbayarkan tepatwaktu		orang		9	96,000,000														-	-
																					Rata-ratacapaiankinerja(%)					
																					Predikatkinerja					
				34	ProgramRehabilitasi/PemeliharaanSaluran Drainase /Gorong-Gorong						50,000,000	-	-									-				DinasPU& PR
				02	Rehabilitasi/PemeliharaanSaluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlahlokasidrainaseyang terpelihara		lokasi		1	50,000,000									-	-	0.00	0.00	-	-	
																					Rata-ratacapaiankinerja(%)		0.00	0.00		
																					Predikatkinerja		SR	SR		
				15	ProgramPengembanganPerumahan				-		423,304,500	-	-									330,109,570				DinasPU& PR
				01	Pembangunan sarana dan prasarana rumahsederhanasehat	Jumlahfasilitaspembangunanp erumahanmayarakatkurang mampu		Pekerjaan		1	60,145,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				09	Pembangunan saranal prasarana dan utilitasperumahanperumahan	Jumlah lokasi pembangunan saranaprasaranadanutilitas perkim		lokasi		3	363,159,000			1	110,036,523	1	110,036,523	1	110,036,523	3	330,109,570	100.00	90.90	3.00	330,109,570	
																					Rata-ratacapaiankinerja(%)		50.00	45.45		
																					Predikatkinerja		R	SR		
				16	Program Lingkungan SehatPerumahan						2,748,369,000											2,738,881,600				DinasPU& PR
				07	Penyediaan sarana dan prasarana lingkungansehatperumahan	Jumlah sarana dan prasaranalingkungansehatpermuki manyang tersedia		lokasi		1	2,748,369,000				1	2,738,881,600				1	2,738,881,600	100.00	99.65	1.00	2,738,881,600	
																					Rata-ratacapaiankinerja(%)		100.00	99.65		
																					Predikatkinerja		ST	ST		
				17	Program pemberdayaankomunitasperumahan				-		31,787,000											-				DinasPU& PR
				05	FasilitasPemberianKreditMikrountukPem bangunanandanPerbaikanPerumahan	Jumlah komunitas perumahan yangterfasilitaspemberiankredit mikronya		laporan		1	31,787,000									-	-	0.00	0.00	-	-	
																					Rata-ratacapaiankinerja(%)		0.00	0.00		
																					Predikatkinerja		SR	SR		
				18	ProgramPerbaikan PerumahanAkibat Bencana Alam/Sosial				-		120,000,000											-				DinasPU& PR
				01	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi RumahAkibatBencanaAlam	Jumlahrumahyangdifasilitasi untukdirehabilitasiakibatbencanaa lam		unit		10	120,000,000									-	-	0.00	0.00	-	-	
																					Rata-ratacapaiankinerja(%)		0.00	0.00		
																					Predikatkinerja		SR	SR		
				20	ProgramPengelolaanArealPemakaman				-		44,860,000											21,110,000				DinasPU& PR
				01	Pembangunan saranadanprasarana pemakaman	Jumlahpemakamanyangdibangun		Pemakaman		1	4,860,000				1.00	4,860,000				1.00	4,860,000	100.00	100.00	1.00	4,860,000	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				10	Rehabilitasi/pemeliharaan/jaringan irigasi	jumlah paket peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi			10	7,109,116,587			5.00	2,502,547,338	5.00	2,502,547,338			10.00	5,005,094,675	100.00	70.40			
				15	Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Jumlah kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi			31	7,100,075,300			9.00	2,416,959,000	22	4,426,128,750			31.00	6,843,087,750	100.00	96.38			
				16	Pemberdayaan petani pemakai air	Tersedianya aparat komisi irigasi			2	12,310,000			1.00	6,595,000	1	5,590,000			2.00	12,185,000	100.00	98.98			
				17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan			3	79,193,000									3.00	77,782,000	100.00	98.22			
				18	Pembinaan dan pemberdayaan lembaga pengelolaan irigasi	persentase pembinaan dan pemberdayaan			70	12,975,000			35.00	5,057,500	35	5,057,500			70.00	10,115,000	100.00	77.96			
				19	Investigasi dan hidrologi	Tersedianya jasa pencatatan curah hujan			12	33,457,500			4.00	10,479,167	4.00	10,479,167	4	10,479,167	12.00	31,437,500	100.00	93.96			
				20	Inventarisasi jaringan irigasi	Tersedianya papan himbuan			10	64,716,000			5.00	32,068,000	5	32,068,000			10.00	64,136,000	100.00	99.10			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100.00	91.46				
Predikat kinerja																				ST	ST				
			25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	adanya pemangsaan saluran irigasi pedesaan					13,719,699,600														Dinas PSDA	
			01	Pembangunan prasarana pengambildan saluran pembawa	adanya pemangsaan saluran irigasi pedesaan				2	11,994,600			1.00	5,639,750	1.00	5,639,750			2.00	11,279,500	100.00	94.04			
			03	Pemeliharaan prasarana pengambildan saluran pembawa	Persentase fungsi jaringan irigasi				95	466,535,000			25.00	110,968,000	35.00	146,994,975	35	146,994,975	95.00	404,957,950	100.00	86.80			
			05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air/Rehabilitasi jaringan irigasi (IPDMIP)	Jumlah daerah pengelolaan irigasi partisipatif secara terpadu				9	13,191,168,000			2.00	3,251,424,000	3.00	4,466,092,380	4.00	4,466,092,381	9.00	12,183,608,761	100.00	92.36			
			06	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku	tersedianya blanko jadwal nam dari kebutuhan air				8	50,002,000			2.00	12,201,000	3	15,201,000	3	15,201,000	8.00	42,603,000	100.00	85.20			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100.00	89.60				
Predikat kinerja																				ST	T				
			26	Program Pengembangan, Pemertan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air	Jumlah bangunan penampung yang tersedia				1	132,573,350			1.00	113,102,150					1.00	113,102,150	100.00	85.31			Dinas PSDA
			01	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya	Jumlah bangunan penampung yang tersedia				1	132,573,350			1.00	113,102,150					1.00	113,102,150	100.00	85.31			
			02	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya	Jumlah pemeliharaan bangunan penampung air				1	8,751,700			1.00	5,845,000					1.00	5,845,000	100.00	66.79			
			05	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan, Dana dan Sumber Daya Air lainnya	Jumlah papan himbuan yang akan dipasang				4	46,065,000			1.00	19,139,500	1	19,139,500			2.00	38,279,000	50.00	83.10			
			06	Peningkatan konservasi air tanah	Persentase peningkatan konservasi air tanah				1	-				0					-	0	0.00	0.00			
			08	Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Jumlah paket rehabilitasi/normalisasi sungai				3	448,943,350			1	138,135,767	1.00	138,135,767	1	138,135,767	3.00	414,407,300	100.00	92.31			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				70.00	65.50				
Predikat kinerja																				S	S				
			28	Program Pengendalian Banjir	Tercapainya hasil maksimal pasca bencana				15	227,989,500									-	213,574,000				Dinas PSDA	
			05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir	Pembuatan bangunan pengaman pantai				15	9,004,500			5.00	2,901,667	5	2,901,667	5.00	2,901,667	15.00	8,705,000	100.00	96.67			
			09	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Pembuatan bangunan pengaman pantai				90	218,985,000			30.00	68,289,667	30	68,289,667	30.00	68,289,667	90.00	204,869,000	100.00	93.55			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100.00	95.11				
Predikat kinerja																				ST	T				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJADAN ANGGARAN DI SELURUH (PROGRAM 1.S.D PROGRAM 10)																				92.95	86.81				
PREDIKAT KINERJADAN DI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1.S.D PROGRAM 10)																				T	T				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		SR		
1	1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran				867,900,200									100.00	773,707,387				Bappeda	
	1	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim			300	6,000,000	75	1,051,250	75	1,051,250	75	1,051,250	75	1,051,250	300	4,205,000	100.00	70.08			
			02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan internet			12	109,800,000	3	20,258,577	3	20,258,577	3	20,258,577	3	20,258,577	12	81,034,309	100.00	73.80			
			06	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas	Perpanjangan STNK kendaraan Roda 2, Roda 4 dan Perizinan plat			11	5,650,000			3	275,000	4	764,050	4	764,050	11		100.00	31.91			
			07	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyusunan perencanaan bappeda dan pengelolaan keuangan			6	286,962,500			2	94,306,333	2	94,306,333	2	94,306,333	6	1,803,100	100.00	98.59			
			08	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor			5	31,102,000			2	11,993,000	3	19,109,000			5	31,102,000	100.00	100.00			
			12	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor			1	2,000,000			1	2,000,000					1	2,000,000	100.00	100.00			
			13	13	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor			5	2,100,000			2	1,000,000	3	1,100,000			5	2,100,000	100.00	100.00			
			15	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku			26	25,830,000			13	12,772,500	7	6,386,250	7	6,386,250	26	25,545,000	100.00	98.90			

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

[illegible]

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

			08	Penyusunan rancangan RKPD	Terlaksananya penyusunan rancangan RKPD Pokok, Rancangan RKPD Akhir dan Rancangan Perubahan RKPD	dok		5	252,276,000			2	45,676,000	3	206,260,000		5	251,936,000	100.00	99.87					
			09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Penyusunan dokumen hasil musrenbang tahun 2015	dok		1	184,705,000			1.00	174,455,000				1	174,455,000	100.00	94.45					
			11	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Penyusunan LAKIP Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2018												-	-							
			13	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah	Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan	lap		4	48,062,000			1	23,831,500	1	23,831,500		2	47,663,000	50.00	99.17					
			14	Penyusunan rancangan KUA-PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS yang disusun	dok		4	208,495,000	1	51,282,500	1	51,282,500	1	51,282,500	1	51,282,500	4	205,130,000	100.00	98.39				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		83.33	97.83						
Predikat kinerja																		T	ST						
			22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi					481,165,000									465,512,499						Bappeda	
			01	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	Terlaksananya dokumen penyusunan master plan pembangunan ekonomi daerah			1	417,278,000			1	406,150,500				1	406,150,500	100.00	97.33					
			02	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen rindang politan, sistem informasi lahan 4 kecamatan, dokumen ternak rumah ancia																				
			03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tersedia dokumen WB			1	702,000			1	702,000				1	702,000	100.00	100.00					
			04	Perencanaan dan Pengelolaan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi	Tersedia dokumen database ekonomi dan monitoring bidang ekonomi			1	62,200,500			1	57,675,499				1	57,675,499	100.00	92.73					
			08	Monitoring, evaluasi dan laporan				1	984,500			1	984,500				1	984,500	100.00	100.00					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	97.51						
Predikat kinerja																		ST	ST						
			23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya					601,631,000									556,442,500						Bappeda	
			02	Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan	Jumlah laporan penanganan penyakit menular dan tidak menular	dok		1	36,225,000			1.00	36,034,700				1.00	36,034,700	100.00	99.47					
			03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Tersedia dokumen perencanaan bidang sosial budaya dan sebagai rujukan dan bahan monitoring bidang sosial budaya	dok		3	531,541,000			1.00	164,267,600	1	164,267,600	1	164,267,600	3	492,802,800	100.00	92.71				
			04	Monitoring, evaluasi dan laporan		lsp		1									- 0		0.00	0.00					
			05	Penyusunan Data Kemiskinan	Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	lsp		1	33,865,000			1.00	27,605,000				1	27,605,000	100.00	81.51					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		75.00	68.43						
Predikat kinerja																		S	R						
			26	dan pengembangan					289,086,500									288,198,500	375.00					Bappeda	
			01	Kajian pengembangan potensi sumberdaya daerah	Tersedia dokumen untuk rencana tindak yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan dan peningkatan potensi daerah			1	2,028,000			1	2,028				1	2,028,000	100.00	100.00					
			02	Pengembangan potensi inovasi unggulan daerah	Kajian inovasi pengembangan kebijakan ekonomi kreatif			1	24,341,000			1	261,944,500				1	24,226,000	100.00	99.53					
			03	Penyusunan Profil Daerah	Tersedia dokumen SIPD			1	262,717,500			1	261,944,500				1	261,944,500	100.00	99.71					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	99.76						
Predikat kinerja																		ST	ST						
			27	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					972,964,500									907,165,617						Bappeda	
			01	Penyusunan pengembangan kebijakan teknologi informasi komunikasi	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan teknologi informasi yang dihasilkan	dok		1	4,090,000			1	1,363,000				1	1,363,000	100.00	33.33					
			02	Pendataan dan Penataan dokumen statistik sektoral	Tersedia data statistik sektoral	data		4	17,997,500			2	7,017,000	2	7,017,000		4	14,034,000	100.00	77.98					
			03	Perencanaan pengembangan pengelolaan sistem irigasi	Tersedia dokumen perencanaan daerah irigasi	dok		1	279,605,000			0,2	45,435,000	0,2	94,532,250	0,3	94,532,250	#VALUE!	234,499,500	#VALUE!	83.87				
			04	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cipta tumbuh	Tersedia dokumen perencanaan infrastruktur	dok		4	500,800,000			2	248,677,809	2	248,677,809		4	497,355,617	100.00	99.31					

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				05	Perencanaan dan Pengelolaan Informasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	Tersedianya laporan DAK			Laporan/Dok		4	39,364,500			2	18,588,750	2	18,588,750			4	37,177,500	100.00	94.44				
				06	Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Tersedianya data minimum dan sanitasi			data		1	43,308,500			1	39,440,000					1	39,440,000	100.00	91.07				
				07	Perencanaan Penanganan perumahan dan permukiman	Tersedianya data perumahan dan permukiman			data		1	39,990,000			1	37,400,000					1	37,400,000	100.00	93.52				
				08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan monitoring, evaluasi struktur dan pengembangan wilayah			Laporan/Dok		3	47,809,000			1	16,448,000	1	16,448,000			3	45,896,000	100.00	96.00				
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	83.69			
																						Predikat kinerja		ST	T			
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJADAN ANGGARAN DAERAH SELURUH (PROGRAM 11.5. DPROGRAM 11.4)		#VALUE!	88.77			
																						PREDIKAT KINERJADARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 11.5. DPROGRAM 11.4)		ST	T			
				DINAS PERHUBUNGAN																								
			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terdistribusinya surat dengan tepat waktu							767,333,490										749,667,756					Dinas Perhubungan	
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik			1000		surat		3,900,000			500.00	1,880,400	250.00	940,200	250.00	940,200	1,000	3,760,800	100.00	96.43				
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik			12		bulan		70,800,000	3.00	15,380,540	3.00	15,380,540	3	15,380,540	3	15,380,540	12	61,522,161	100.00	86.90				
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Terdistribusinya dokumen STNK kendaraan			13		STNK		5,000,000				0	13	3,965,490			13	3,965,490	100.00	79.31				
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayar tepat waktu			16		orang/bulan		193,602,000	4.00	48,059,500	4.00	48,059,500	4	48,059,500	4	48,059,500	16	192,238,000	100.00	99.30				
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan pembersihan jasa kebersihan kantor			12		bulan		39,380,000	3.00	9,740,000	3.00	9,740,000	3	9,740,000	3	9,740,000	12	38,960,000	100.00	98.93				
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik (penerangan) bangunan kantor	Tersedianya jaringan dan penerangan listrik kantor			1		paket		7,000,000			1.00	6,903,000				1	6,903,000	100.00	98.61					
			13	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor			50		unit		7,308,000	10.00	1,575,000	10.00	1,575,000	30	3,846,000			50	6,996,000	100.00	95.73				
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ majalah			37		bahan bacaan/bulan		24,160,000	9.25	5,840,000	9.25	5,840,000	9.25	5,840,000	9.25	5,840,000	37	23,360,000	100.00	96.69				
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12		bulan		168,499,490	3.00	41,991,991	3.00	41,991,991	3	41,991,991	3	41,991,991	12	167,967,965	100.00	99.68				
			19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi pelayanan kantor			12		bulan		205,434,000	3.00	50,628,585	3.00	50,628,585	3	50,628,585	3	50,628,585	12	202,514,340	100.00	98.58				
			20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Aset	Terselenggaranya sistem pengelolaan barang dan aset			12		bulan		42,250,000	3.00	10,370,000	3.00	10,370,000	3	10,370,000	3	10,370,000	12	41,480,000	100.00	98.18				
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	95.30			
																						Predikat kinerja		ST	T			
			02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur								220,350,000										206,113,888					Dinas Perhubungan	
			07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli			7		paket		40,500,000			2	11,550,000	2	11,550,000	3	11,550,000	7	34,650,000	100.00	85.56				
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor			4		paket		0								3	-	0	0.00	0.00				
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor			3		gedung		13,000,000			2	5,045,000	1	3,159,000			3	8,204,000	100.00	63.11				
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			14		kendaraan		151,000,000			8.00	75,479,000	6.00	73,945,888			14	149,424,888	100.00	98.96				
			26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor			1				6,000,000			1	5,875,000					1	5,875,000	100.00	97.92				
			28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			1				8,000,000			1	7,960,000					1	7,960,000	100.00	99.50				
			29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelur	Jumlah meubelur kantor yang dipelihara			1		paket		0									-	0	0.00	0.00				
			42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi			3		gedung		1,850,000				0					-	0	0.00	0.00				
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		62.50	55.63			
																						Predikat kinerja		R	R			
			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								25,421,000										24,285,000					Dinas Perhubungan	
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja			2		laporan		5,912,000			1	2,417,000	1	2,417,000			2	4,834,000	100.00	81.77				
			02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran			1		dokumen		2,009,000			1	1,951,000					1	1,951,000	100.00	97.11				
			04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Termonitornya laporan keuangan akhir tahun			1		dokumen		1,500,000			1	1,500,000					1	1,500,000	100.00	100.00				
			06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen kerja perangkat daerah			2		dokumen		16,000,000			1	8,000,000	1	8,000,000			2	16,000,000	100.00	100.00				
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	94.72			
																						Predikat kinerja		ST	T			
			07	Program peningkatan informasi								31,300,000										31,085,000					Dinas Perhubungan	
			01	Perencanaan pengembangan sistem informasi berbasis web	Jasa pengelolaan web dan data			4		orang		16,800,000	1.00	4,200,000	1.00	4,200,000	1	4,200,000	1	4,200,000	4.00	16,800,000	100.00	100.00				

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				02	Penyebarluasaninformasi melalui pameran pembangunan	Terlaksananyapameran pembangunan			kali			1	14,500,000				1	14,285,000					1.00	14,285,000	100.00	98.52					
																							Rata-ratacapaiankinerja(%)		100.00	99.26					
																							Predikatkinerja		ST	ST					
				08	ProgrampeningkatanDisiplinDanKapasitas SumberDayaAparatur								163,300,000											159,128,700						Dinas Perhubungan	
				01	PengadaanMesin/KartuAbsensi	Jumlahmesinabsensiyangdiadakan				unit		1	0											-	0	0.00	0.00				
				02	Pengadaanpakalindinasberserta perlengkapannya	Jumlahpakalindinaslapangan aparaturyangdiadakan				pasang		64	38,500,000										64.00	0	100.00	99.74					
				03	Pengadaanpakalankerjaalangan	Terlaksananyabimtek				pasang		10	2,500,000										-	0	0.00	0.00					
				05	Pengadaanpakalankhusus hari-hari tertentu	Jumlahpakalandalahragiyang diadakan				pasang		201	60,300,000										201	58,800,000	100.00	0.00					
				08	Bimbinganteksimplementasiperaturan perundang-undangan	Terlaksananyabimtek				pegawai		10	62,000,000										5	61,928,700	50.00	99.89					
																							Rata-ratacapaiankinerja(%)		50.00	50.00					
																							Predikatkinerja		R	R					
				15	ProgramPembangunanPrasarana&Fasilitas Perhubungan								114,700,000											107,554,500						Dinas Perhubungan	
						Jumlahdokumenrencanarekayasa alu lintas dan angkutan, DEDpelabuhan dan pembangunan dermagapelabuhan				dokumen			16,400,000										3		100.00	100.00					
				02	Penyusunan norma, kebijakan, standar danprosedurbidangperhubungan							3	-										-	16,400,000	0.00	0.00					
				04	Sosialisasi Kebijakankandi BidangPerhubungan	terlaksananyasosialisasi peraturan/kebijakan di bidangperhubungan				sosialisasi		2												0							
				06	Peningkatanpengelolaanterminalangkutansungai, danau dan penyebrangan yangKelola	Jumlahterminalangkutansungai, danau dan penyebrangan yangKelola				terminal		1	98,300,000										1	91,154,500	100.00	92.73					
																							Rata-ratacapaiankinerja(%)		66.67	64.24					
																							Predikatkinerja		R	R					
				16	ProgramRehabilitasidanPemeliharaan Prasarana&FasilitasLalu LintasAngkutan								137,900,000											137,203,000						Dinas Perhubungan	
				01	Rehabilitasi/PemeliharaanSaranaAlat PengujianKendaraanBermotor	Jumlahsaranaalatpengujianyang direhabilitasi				paket		1	5,000,000										1	4,500,000	100.00	90.00					
				02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana BalaiPengujianKendaraanBermotor	Jumlah balai pengujian kendaraanbermotor yangdirehabilitasi				balai		1	5,500,000										1	5,456,000	100.00	99.20					
				04	Rehabilitasi/PemeliharaanTerminal Pelabuhan	Jumlah terminal/pelabuhan yang direhabilitasi				terminal		1	30,000,000										1	29,847,000	100.00	99.49					
				05	Rehabilitasi/pemeliharaanFasilitasLALAJ	JumlahfasilitasLALAJyang direhabilitasi						1	97,400,000										1	97,400,000	100.00	100.00					
																							Rata-ratacapaiankinerja(%)		100.00	96.23					
																							Predikatkinerja		ST	ST					
				17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan								987,030,000												956,894,000						Dinas Perhubungan
				01	Penyuluhan bagi Para Sopir/Juru Mudi UntukPeningkatanKeselamatanPenumpang	Jumlahsosialisasi/penyuluhanbagipar asopir				kali		1	-										-	0	0.00	0.00					
				04	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana TransportasiGunakKeselamatanPenumpang	Jumlahkegiatanpengendalian disiplin pengoperasian angkutannumum				keg		12											12	0	100.00	100.00					
				05	Pengendalian disiplin pengoperasianangkutannumumdi jalanraya	Pengendalian disiplinpengoperasianangkuta numum				keg		12	22,900,000	3.00	5,725,000	3	5,725,000	3	5,725,000	3	5,725,000	3	12	22,900,000	100.00	97.91					
				12	Pengembangansaradanprasaana pelayananjasaangkutan	Jumlahsaradanprasaranaajasa angkutanyangtersedia				paket		1	243,750,000										1	224,440,000	100.00	92.08					
				13	PeningkatanPelayananbidangPerhubungan	Jumlah sarana dan prasarana jasaangkutan,suraperjinnandan petugas yangtersedia				paket		1	626,100,000										#VALUE!	616,734,000	#VALUE!	98.50					
				14	Sosialisasi/Penyuluhanketertibanlalulintas dan angkutan	Terlaksananyasosialisasi keselamatanberlalulintas				paket		1	14,680,000										1	14,680,000	100.00	100.00					
				16	Koordinasi dalampeningkatanpelayanan angkutan	Rapat forumLALAJyangterlaksana				kali		4	9,600,000										4	9,600,000	100.00	100.00					
																							Rata-ratacapaiankinerja(%)		#VALUE!	84.07					
																							Predikatkinerja		T	T					
				19	ProgramPengendalian danPengamananLalu Lintas								260,250,000											258,778,500						Dinas Perhubungan	
				01	PengadaanRambu-RambuLaluLintas	Tersedianyarambu-rambulalu lintas				buah		200	70,000,000										200.00	69,900,000	100.00	99.86					
				02	PengadaanMarkakalalan	Tersedianyamarkakalalan				paket		1	72,250,000										1.00	71,400,000	100.00	98.82					
				04	PengadaanTrafficLight	Jumlahtraffic LightdanWaming Lightyangdibangun				unit		10	118,000,000										10	117,478,500	100.00	99.56					
																							Rata-ratacapaiankinerja(%)		100.00	99.41					
																							Predikatkinerja		ST	ST					
				21	ProgramPembangunanPrasarana&Fasilitas PerhubunganDarat								60,000,000											59,548,000						Dinas Perhubungan	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

				01	Peningkatan Sarana Transportasi	Panjang trotoar yang dipelihara	m			1000		60,000,000		1000		59,548,000				1,000	59,548,000	100.00	99.25						
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	99.25					
																					Predikat kinerja		ST	ST					
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJADAN ANGARAN DI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 11)		#VALUE!	51.34					
																					PREDIKAT KINERJADAN SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 11)		T	R					
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP																								
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							662,295,500									618,823,834								Dinas Lingkungan Hidup
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik	Jumlah rekening listrik yang dibayarkan	rekening/bulan		24			83,700,000	6.00	10,528,000	6	42,899,000	6	8,023,031	6	8,023,031	24.00	69,473,062	100.00	83.00		24.00	69,473,062		
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terbayarkan pajaknya tepat waktu	unit		110			28,000,000			110	24,983,112				110.00		100.00	89.23		110.00	24,983,112			
				07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan tepat waktu	orang/bulan		168			226,980,000	42.00	23,555,000	42	85,320,000	42	54,417,500	42	54,417,500	168.00	217,710,000	100.00	95.92		168.00	217,710,000		
				08	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan, pengamkantan dan pemungut retribusi kebersihan yang tersedia dan dibayarkan tepat waktu	orang/bulan		192			73,945,000	48.00	15,200,000	48	18,300,000		20,222,500	48	20,222,500	192.00	73,945,000	100.00	100.00		192.00	73,945,000		
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Kantor	Jumlah paket alat listrik dan elektronik yang disediakan	paket		1			3,780,100			1	3,652,500				1.00	3,652,500	100.00	96.62		1.00	3,652,500			
				13	Penyediaan perlengkapan dan peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan Kantor yang disediakan	paket		2			6,000,000			2	5,955,000				2.00	5,955,000	100.00			2.00	5,955,000			
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar / majalah yang tersedia	bahan bacaan/bulan		216			12,000,000	54.00	2,966,250	54	2,966,250	54	2,966,250	54	2,966,250	216.00	11,865,000	100.00	98.88		216.00	11,865,000		
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang dilakukan	kali		80			97,624,000	20.00	23,430,700	20	23,430,700	20	23,430,700	20	23,430,700	80.00	93,722,800	100.00	96.00		80.00	93,722,800		
				19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	bulan		12			103,266,400	3.00	21,556,000	3	26,461,000	3	22,370,180	3	22,370,180	12.00	92,757,360	100.00	89.82		12.00	92,757,360		
				20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Aset	Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang dibayarkan	orang/bulan		48			27,000,000			24	11,000,000	12	6,880,000	12	6,880,000	48.00	24,760,000	100.00	91.70		48.00	24,760,000		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	93.46					
																					Predikat kinerja		ST	T					
					Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur							115,329,000							(15,195,000)		111,957,000							Dinas Lingkungan Hidup	
				03	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung / ruangan kantor	paket		2			-									-			-	-				
				07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	buah/unit		20			-				-				-	0.00	0.00	100.00	0.00		-	-		
				09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	unit		2			-									0				-	-			
				10	Pengadaan Meubelur	Jumlah meubelur kantor yang diadakan	buah		21			21,750,000			21	21,750,000				21	21,750,000	100.00	100.00		21.00	21,750,000			
				24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit		11			72,000,000	1.00	10,827,000	2	4,368,000	2	28,762,000	6	28,762,000	11.00	72,719,000	100.00	101.00		11.00	72,719,000		
				26	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	unit		15			2,500,000	2.00	400,000	13	2,100,000				15.00	2,500,000	100.00	100.00		15.00	2,500,000			
				28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit		10			5,000,000	3.00	2,890,000	2	450,000	3	830,000	2	830,000	10.00	5,000,000	100.00	100.00		10.00	5,000,000		
				42	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	ruang		2			14,079,000			2	9,988,000				2.00	9,988,000	100.00	70.94		2.00	9,988,000			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		83.33	78.66					
																					Predikat kinerja		T	S					
				06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							40,504,000									35,969,850							Dinas Lingkungan Hidup	
				01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktis arrealisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Laporan		6			22,328,000	1	5,253,000	5	11,334,000				6.00	17,793,850	100.00	79.69		6.00	17,793,850			
				02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Laporan		2											-	0	0.00	0.00		-	-			
				04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	Laporan		1			9,198,000	1.00	9,198,000					1	9,198,000	100.00	100.00		1.00	9,198,000				
				06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja dan perencanaan yang dibuat	dokumen		4			8,978,000	2.00	5,715,000	2	3,263,000				4.00	8,978,000	100.00	100.00		4.00	8,978,000			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		75.00	69.92					
																					Predikat kinerja		S	R					
				07	Program Peningkatan Informasi							20,000,000									18,301,000							Dinas Lingkungan Hidup	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

			02	Penyebarluasan informasi melalui pameran pembangunan	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti			1		20,000,000			1		18,301,000				1.00	18,301,000	100.00	91.51	1.00	18,301,000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				87.50	80.71					
Predikat kinerja																				T	T					
				Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur				-		293,626,800	-		-							188,460,000					Dinas Lingkungan Hidup	
			03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	set	285			189,000,000			95		40,050,000	95	74,205,000	95	74,205,000	285.00	188,460,000	100.00	99.71	285.00	188,460,000	
			05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga yang diadakan	eks	100		25.00	9,545,200	25.00			2,150,000	25	9,152,400	25	9,152,400	100.00	30,000,000	100.00	100.00	100.00	30,000,000		
			08	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti sosialisasi	orang	20		19.00	72,476,800	1.00			2,150,000					20.00	74,626,800	100.00	100.00	20.00	74,626,800		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100.00	100.00					
Predikat kinerja																				ST	ST					
			16	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup				-		231,800,000										228,940,000					Dinas Lingkungan Hidup	
			01	koordinasi penilaian kota sehat/adipura																						
			03	pemantauan kualitas lingkungan	Pemantauan terhadap usaha kegiatan yang berdampak pada lingkungan	bulan	12		3.00	722,500	3.00		722,500	3	722,500	3	722,500	12.00	2,890,000	100.00	96.33	12.00	2,890,000			
			11	Pengembangan produk ramah lingkungan	Jumlah pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Paket	5			200,000,000			2		98,625,000	3	98,625,000		5.00	197,250,000	100.00	98.63	5.00	197,250,000		
			22	Peningkatan peran serta masyarakat dalam restorasi ekosistem lingkungan	Jumlah sosialisasi restorasi ekosistem lingkungan yang diadakan	orang	135			-								-	0	0.00	0.00	-	-			
			28	Peningkatan kapasitas laboratorium	Jumlah petugas laboratorium yang ditingkatkan kapasitas pengetahuannya	orang	11			28,800,000			11		28,800,000				11.00	28,800,000	100.00	100.00	11.00	28,800,000		
			30	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Jumlah sampel data kualitas air dan udara	sampel data	20			-									0			-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				75.00	73.74					
Predikat kinerja																				S	S					
			26	Program penataan dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup						79,405,000															Dinas Lingkungan Hidup	
			01	Penegakan hukum dan penanganan kasus lingkungan hidup	Jumlah penegakan dan penanganan kasus lingkungan hidup	kasus	25			6,550,000													-	-		
			04	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan	Jumlah peserta sosialisasi yang meningkatkan kapasitas pengetahuannya dalam penegakan hukum lingkungan	orang	100			18,830,000													-	-		
			07	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah sekolah yang dibangun untuk berbasis peduli lingkungan	sekolah	30			25,975,000																
			08	Inventarisasi, fasilitasi, peningkatan kapasitas dan pembinaan penerapan kearifan lokal (masyarakat hukum adat)																						
			09	Pembinaan dan kerjasama dengan organisasi peduli lingkungan	Jumlah organisasi peduli lingkungan yang didata	organisasi	2			24,000,000													-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																										
Predikat kinerja																										
			27	Program kebersihan pengelolaan persampahan dan limbah bahan beracun (LB3)				-		5,882,468,700										5,824,340,670					Dinas Lingkungan Hidup	
			01	Pengambilan, pengangkutan dan pemilihan sampah	Jumlah petugas lapangan	orang	278		69.50	972,000,000	69.50		972,000,000	69.50	972,000,000	69.50	972,000,000	278.00	3,888,000,000	100.00	100.00	278.00	3,888,000,000			
			02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	jenis	6			5,000,000		-		-				-	0	0.00	0.00	-	-			
			03	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana serta bahan bakar yang diadakan	bulan	12		3.00	469,910,168	3		469,910,168	3	469,910,168	3	469,910,168	12.00	1,879,640,670	100.00	97.25	12.00	1,879,640,670			
			07	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan persampahan yang diadakan	orang	360			-									0			-	-			
			10	koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Jumlah kecamatan yang dibangun untuk terciptanya kota bersih, indah, sehat dan rapi	Kecamatan	2			6,000,000			1		3,000,000	1	3,000,000		2.00	6,000,000	100.00	100.00	2.00	6,000,000		

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

			11	Peningkatan operasional dan pemeliharaanTPAdanTPST	Jumlah sarana prasarana yangdiadakansejalanafisikebutuhan	Paket	2	50,700,000	1.00	25,350,000	1	25,350,000					2.00	50,700,000	100.00	100.00	2.00	50,700,000		
			14	PengelolaanB3danLB3	Jumlahpelakuusahakegiatanayang diawasiB3 danLB3	usaha/keg	20	-	-	-		-					-	0	0.00	0.00	-	-		
			15	Monitoring,Evaluasi danpelaporan	Jumlah laporan evaluasi terhadapkegiatanpersampahanyangndibuat	Laporan	1	-				-					-	0	0.00	0.00	-	-		
Rata-ratacapaiankinerja(%)																		57.14	56.75					
Predikatkinerja																		SR	SR					
			28	ProgramPenataanLingkungan			-	63,055,000										57,265,000	457.14				DinasLingku rigan Hidup	
			04	PelayananPenilaianDokumenLingkungan	Jumlahdokumenlingkunganyang diperiksa/dinilai	dokumen	45	63,055,000			45	57,265,000					45.00	57,265,000	100.00	90.82	45.00	57,265,000		
			09	PenyusunanstatusLingkunganHidupDaerah	JumlahSIUHDyangdisusun	dokumen	1	-										0			-	-		
			11	PelaksanaaninventarisasiGas RumahKaca dan Penyusunan Profil Emisi Gas RumahKaca	Jumlah Laporan penyusunan gasrumahkacara	profil	1	-									-	0	0.00	0.00	-	-		
Rata-ratacapaiankinerja(%)																		50.00	45.41					
Predikatkinerja																		SR	SR					
TOTALRATA-RATACAPAIANKINERJADANANGGARANDARISELURUH(PROGRAM1S.DPROGRAM11)																		88.81	76.49					
PREDIKATKINERJADARISELURUH PROGRAM(PROGRAM1S.DPROGRAM11)																		S	S					
				DINASEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL																				
			01	PROGRAMPELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN				538,380,200										504,303,156					DinasKependu dukan dan PencatatanSipil	
			01	PenyediaanJasaSurat Menyurat	Jumlahsurat yangdikirim	bulan	12	5,840,000	3.00	600,000	3	2,510,000	3	1,317,500	3	1,317,500	12.00	5,745,000	100.00	98.37				
			02	PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Pembayaran telepon dan hosting	bulan	12	172,400,000	3.00	40,116,000	3	34,479,000	3	40,945,732	3	40,945,732	12.00	156,486,464	100.00	90.77				
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perincinan Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	bulan	12	4,385,000	3.00	452,328	3	452,328	3	452,328	3	452,328	12.00	1,809,312	100.00	41.26				
			07	PenyediaanJasa Administrasi Keuangan	Tertibnya pengelolaan administrasi keuanganyangefektifdan akuntabel	bulan	12	108,600,000	3.00	24,937,500	3	24,937,500	3	24,937,500	3	24,937,500	12.00	99,750,000	100.00	91.85				
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	bulan	12	20,833,000	3.00	5,208,000	3	5,208,000	3	5,208,000	3	5,208,000	12.00	20,832,000	100.00	100.00				
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	buah	39	3,000,000	9.75	746,400	9.75	746,400	9.75	746,400	9.75	746,400	39.00	2,985,600	100.00	99.52				
			13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Tersedianyaperlengkapan dan peralatan kantor		158	3,670,000	39.00	917,500	39	917,500	40	917,500	40	917,500	158.00	3,670,000	100.00	100.00				
			15	Penyediaanbahanbacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaranbahanbacaan	bulan	25	17,340,000			15.00	8,670,000	10	8,670,000			25.00	17,340,000	100.00	100.00				
			18	Rapat-rapat kordinasidan konsultaskeluar daerah	Lancarnyaapelsanaan koordinasi dan konsultasi	bulan	12	98,600,000	3.00	24,616,178	3	24,616,178	3	24,616,178	3	24,616,178	12.00	98,464,710	100.00	99.86				
			19	PeningkatanPelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya pelayanan yang efektif	bulan	12	80,862,200	3.00	18,592,518	3	18,592,518	3	18,592,518	3	18,592,518	12.00	74,370,070	100.00	91.97				
			20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Peningkatan barang dan aset yang tertib	bulan	12	22,850,000	3.00	5,712,500	3	5,712,500	3	5,712,500	3	5,712,500	12.00	22,850,000	100.00	100.00				
Rata-ratacapaiankinerja(%)																		100.00	92.15					
Predikatkinerja																		ST	ST					
			02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANAAPARATUR				55,825,000										55,516,581					DinasKependu dukan dan PencatatanSipil	
			05	Pengadaankendaraanoperasional	terpenuhihyasana penunjangpelaksanaantugasda nfungsi pegawai																			
			07	Pengadaanperlengkapangedungkantor	Tersedianyaperlengkapangedung kantor	unit	2	5,000,000			2	5,000,000					2.00	5,000,000	100.00	100.00				
			09	Pengadaanperalatangedungkantor	Tersedianyaperalatangedung kantor		6	0									-	0	0.00	0.00				
			10	Pengadaanmeubele	tersedianyameubeleu kantoryang memadai		1	2,650,000			1	2,650,000					1.00	2,650,000	100.00	100.00				
			22	Pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor	Terlaksananya pemeliharaan gedungkantor			0									0	0.00	0.00					
			24	Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas		9	38,550,000	2.00	6,031,000	3.00	9,387,100	4.00	23,043,481			9.00	38,461,581	100.00	99.77				
			26	Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor	Servisperlengkapankantor		14	5,500,000	3.50	1,363,750	3.50	1,363,750	3.50	1,363,750	3.50	1,363,750	14.00	5,455,000	100.00	99.18				

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Servis peralatan kantor					2		4,000,000			2		1,975,000	2.00	1,975,000					4.00	3,950,000	200.00	98.75				
				42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor					20		125,000												-	-	0.00	0.00				
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		75.00	62.21					
																								Predikat kinerja		S	S					
			06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								45,172,000													43,561,000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SK PD	Tersedianya LAKIP, PMPRB dan Renstra					3		11,415,000			3		11,175,000							3.00	11,175,000	100.00	97.90				
				02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Penyusunan laporan keuangan semester					1		8,845,000			1		8,720,000							1.00	8,720,000	100.00	98.59				
				04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun					1		24,912,000	1.00	23,666,000										1.00	23,666,000	100.00	95.00				
				06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan kerja daerah					4		39,900,000	1.00	9,861,250	1		9,861,250	1	9,861,250	1	9,861,250	1	9,861,250	4.00	39,445,000	100.00	98.86				
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	97.59					
																								Predikat kinerja		ST	T					
			07		PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI								110,000,000													109,600,000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				01	perencanaan dan pengembangan sistem informasi berbasis WEB	Terlaksananya sistem informasi berbasis web					1		89,000,000			1		89,000,000							1.00	89,000,000	100.00	100.00				
				02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan	Terlaksananya pameran pembangunan Dinas Kependudukan dan Capil					1		21,000,000	1.00	20,600,000										1.00	20,600,000	100.00	98.10				
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	99.05					
																								Predikat kinerja		ST	ST					
			08	PRO	PROGRAM PENINGKATAN DISIPULIN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								75,800,800													75,800,800						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Aparat yang dapat bekerja dengan baik					15		12,600,000			15		12,600,000							15.00	12,600,000	100.00	100.00				
				08	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparat yang dapat bekerja dengan baik					20		63,200,800	5.00	15,800,200	5		15,800,200	5	15,800,200	5	15,800,200	5	15,800,200	20.00	63,200,800	100.00	100.00				
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	100.00					
																								Predikat kinerja		ST	T					
			15		PROGRAM PENETAPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								1,033,066,000													1,031,619,000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Tertibnya administrasi kependudukan dan kepemilikan KTP dan KK					150,000		329,046,000	37,500	82,186,500	37,500		82,186,500	37,500	82,186,500	37,500	82,186,500	37,500	82,186,500	150,000	328,746,000	100.00	99.91				
				06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat					5		163,898,000	2.00	50,539,000	3.00		113,319,000							5.00	163,858,000	100.00	99.98				
				07	peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Perekaman penduduk wajib KTP					360		270,000,000	90	67,500,000	90.00		67,500,000	90	67,500,000	90	67,500,000	90	67,500,000	360.00	270,000,000	100.00	100.00				
				08	Pengembangan Database Kependudukan	Database kependudukan yang akurat					1		85,200,000			1.00		85,175,000							1.00	85,175,000	100.00	99.97				
				10	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatansipil	Tersedianya akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian					22,400		172,722,000	5,600	42,925,000	5,600		42,925,000	5,600	42,925,000	5,600	42,925,000	5,600	42,925,000	22,400.00	171,700,000	100.00	99.41				
				13	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Terkendalinya pekerjaan dan pelaksanaan tugas lapangan					5		12,200,000	1	3,035,000	1.00		3,035,000	1	3,035,000	2	3,035,000	5.00	12,140,000	100.00	99.51						
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	99.80					
																								Predikat kinerja		ST	ST					
			16		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								1,417,136,000													1,383,869,082						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				01	Sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatansipil	Terlaksananya sosialisasi					1		68,565,000			1.00		51,165,000							1.00	51,165,000	100.00	74.62				
				02	Peningkatan pelayanan dokumen kependudukan dan catatansipil	Tersedianya data kependudukan berbasis NIK					100		1,346,071,000	25.00	332,551,021	25.00		332,551,021	25	332,551,021	25	332,551,021	25	332,551,021	100.00	1,330,204,082	100.00	98.82				
				03	Peningkatan pengelolaan SIAK	Tersedianya data agregat kependudukan semesteran					12		2,500,000	3.00	625,000	3		625,000	3	625,000	3	625,000	3	625,000	12.00	2,500,000	100.00	100.00				

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00		91.15																																			
Predikat kinerja																			ST		ST																																			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJADANANGGARANDARISELURUH (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 8)																			94.77		88.70																																			
PREDIKAT KINERJADARISELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 8)																			ST		T																																			
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP & PA																																																								
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA																															
01																																																								
02																			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening yang dibayarkan		rekening/bulan		36		80,640,000		9.00		16,126,633		9		16,126,633		9		16,126,633		36.00		64,506,530		100.00		79.99		36.00		64,506,530					
06																			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan STNK nya		unit		5		10,000,000				2		2,476,030		3		3,476,030				5.00		5,952,060		100.00		59.52		5.00		5,952,060					
07																			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan		orang/bulan		132		103,781,000		33.00		6,902,000		33		54,326,000		33		21,241,000		33		21,241,000		132.00		103,710,000		100.00		99.93		132.00		103,710,000	
12																			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Tersedianya komponen listrik kantor		jenis		8		1,500,000				8		1,500,000						8.00				100.00		100.00		8.00		1,500,000							
15																			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan		bahan/bulan		17		11,520,000		4.25		2,572,500		4.25		2,572,500		4.25		2,572,500		4.25		2,572,500		17.00		10,290,000		100.00		89.32		17.00		10,290,000	
18																			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah rapat koordinasi yang diikuti		kali		50		50,892,400		8.00		20,000,000		14		10,241,475		14		10,241,475		50.00		50,724,425		100.00		99.67		50.00		50,724,425					
19																			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Lancarnya kegiatan administrasi kantor		bulan		12		505,529,500		3.00		125,296,125		3		125,296,125		3		125,296,125		12.00		501,184,500		100.00		99.14		12.00		501,184,500					
20																			Peningkatan Pengelolaan Barang dan Aset		Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang dibayarkan		orang/bulan		48		26,000,000		12.00		6,500,000		12		6,500,000		12		6,500,000		12		6,500,000		48.00		26,000,000		100.00		100.00		48.00		26,000,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																								
Predikat kinerja																			ST		T																																			
02																			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																																Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA					
09																			Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit		4		12,000,000				2		6,000,000		2		6,000,000				4.00		12,000,000		100.00		100.00		4.00		12,000,000					
10																			Pengadaan meubelur		Jumlah meubelur yang diadakan		buah		17		24,697,600		4.25		6,174,400		4.25		6,174,400		4.25		6,174,400		4.25		6,174,400		17.00		24,697,600		100.00		99.92		1.00		42,612,000	
22																			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara		gedung		1		42,648,000				1		42,612,000						1.00		42,612,000		100.00		100.00		1.00		42,612,000							
24																			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan roda dua dan empat		jenis		4		88,350,000		1.00		22,087,214		1		22,087,214		1		22,087,214		1		22,087,214		4.00		88,348,855		100.00		100.00		4.00		88,348,855	
26																			Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		jenis		1		10,000,000				1		9,965,000						1.00		9,965,000		100.00		99.65		1.00		9,965,000							
28																			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		jenis		1		5,000,000				1		5,000,000						1.00		5,000,000		100.00		100.00		1.00		5,000,000							
42																			Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara		gedung		1		-												0		0.00		0.00		0.00		-		-							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																								
Predikat kinerja																			T		T																																			
36																			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																														Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA							
01																			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Indikator Realisasi Kinerja SIPD		Jumlah laporan capaian kinerja yang dibuat		laporan		3		27,668,000		1.00		7,494,667		1		7,494,667		1		7,494,667		3.00		92,836,000		300.00		99.39		3.00		22,484,000					
02																			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		Jumlah laporan keuangan semesteran yang dibuat		laporan		3		13,327,000				1		13,082,000						1.00		13,082,000		300.00		98.36		1.00		13,082,000							
04																			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dibuat		laporan		3		15,454,000										1.00		15,349,000		300.00		99.32		1.00		15,349,000									
06																			Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana kerja yang dibuat		dokumen		4		41,586,000		1.00		10,480,250		1		10,480,250		1		10,480,250		4.00		41,921,000		300.00		98.64		4.00		41,921,000					
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																								
Predikat kinerja																			ST		ST																																			
07																			Program Peningkatan Informasi																																Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA					
02																			Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan		Jumlah pameran yang diikuti		kali		1		25,000,000		1.00		11,500,000						1.00		11,500,000		100.00		46.00		1.00		11,500,000									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																								
Predikat kinerja																			ST		SR																																			

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

[illegible]

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

			16	Program penguatan kelembagaan pengurus utama gender dan anak	-					63,800,000																			Dinas Pengenda lian Penduduk, KB, PP dan PA
			07	Evaluasi Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Evaluasi PUG bagi SKPD dan Lembaga																								
			02	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2T P2)	terlaksananya kegiatan P2TP 2A						63,800,000	3.00	14,427,500	3	14,427,500	3	14,427,500	3	14,427,500	12.00	57,710,000	100.00	90.45	12.00	57,710,000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100.00	90.45							
SR																					SR								
			18	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-																							Dinas Pengenda lian Penduduk, KB, PP dan PA	
			01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan		orang		60												-	-	0.00	0.00	-	-			
			02	kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Terlaksananya pelatihan penjahitan bagi kelompok perempuan																				-	-			
			03	Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga		Kecamatan		12												-	-	0.00	0.00	-	-			
			04	kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Terlaksananya pembinaan dan manajemen bagi kelompok perempuan																				-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0.00	0.00							
Predikat kinerja																					SR	SR							
			20	Program Pemenuhan Hak Anak	-						101,665,000																	Dinas Pengenda lian Penduduk, KB, PP dan PA	
			02	Penyelenggaraan Forum Anak Daerah	Terlaksananya forum anak daerah		Sekolah		12		25,950,000	3.00	4,862,500	3.00	4,862,500	3	4,862,500	12	19,450,000	100.00	74.95	12.00	19,450,000						
			03	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Jumlah sosialisasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dilaksanakan		Sosialisasi		5		75,715,000			2.00	36,752,500	3.00	36,752,500		73,505,000	0.00	97.08	-	73,505,000						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					50.00	86.02							
Predikat kinerja																													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJADAN ANGGARAN DI SELURUH PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 13																					77.21	74.65							
PREDIKAT KINERJADAN SELURUH PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 13																					S	S							
			01	DINAS SOSIAL																									
				Program rampel pelayanan administrasi perkantoran	-						454,731,000																	Dinas Sosial	
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa rekening yang dibayar tiap bulan		rekening/bulan		36		48,600,000	9.00	9,909,500	9	9,909,500	9	9,909,500	36.00	39,638,000	100.00	81.56	36	39,638,000						
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan yang dibayarkan		STNK		13		9,800,000	10.00		10.00	1,093,000			10.00	1,093,000	76.92	11.15	10	1,093,000						
			07	penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan		orang		10		81,605,000	3.00	8,950,000	3	12,750,000	4	57,905,000	10.00	79,605,000	100.00	97.55	10	79,605,000						
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan		orang		7		24,573,000	3.00	5,399,000	3	7,250,000	1	8,323,000	7.00	20,972,000	100.00	85.35	7	20,972,000						
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket/jenis alat listrik yang disediakan		paket		3		2,250,000			3	2,250,000			3.00	2,250,000	100.00	100.00	3	2,250,000						
			13	Penyediaan perlengkapan dan peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan		buah		20		1,850,000			20	1,850,000			20.00	1,850,000	100.00	100.00	20	1,850,000						
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		bahan bacaan		108		8,820,000	27.00	2,205,000	27	2,205,000	27	2,205,000	108.00	8,820,000	100.00	100.00	108	8,820,000						
			18	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang dilaksanakan		kali		40		150,000,000	10.00	37,445,500	10	37,445,500	10	37,445,500	40.00	149,782,000	100.00	99.85	40	149,782,000						
			19	peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan kantor yang disediakan		layanan		4		87,896,000			2	35,060,000	2	35,060,000	4.00	70,120,000	100.00	79.78	4	70,120,000						
			20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang dibayarkan		jasa/bulan		36		39,337,000	9.00	9,346,750	9	9,346,750	9	9,346,750	36.00	37,387,000	100.00	95.04	36	37,387,000						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					97.69	85.03							
111																					ST	T							
			02	Program peningkatan sarana dan prasarana peralatan	-						117,652,250																	Dinas Sosial	
			07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan		buah		40				0		-			-	0	0.00	0.00	-	-						
			09	pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan		unit		4		45,000,000		4.00		43,500,000			4.00	43,500,000	100.00	96.67	4	43,500,000						

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

			22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		gedung	1	11,645,000			1	9,601,000					1.00	9,601,000	100.00	82.45	1	9,601,000	
			24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		unit	1	55,107,250	0.2	12,668,250	0.2	12,668,250	0.3	12,668,250	0.3	12,668,250	#VALUE!	50,673,000	#VALUE!	91.95	#VALUE!	50,673,000	
			26	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		unit	9	2,500,000			9	950,000					9.00	950,000	100.00	38.00	9	950,000	
			28	pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		unit	18	3,400,000			6	2,900,000					6.00	2,900,000	93.33	85.29	6	2,900,000	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		#VALUE!	65.79			
																		Predikat kinerja		T	S			
			06	Program peningkatan penembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-				16,450,000										16,450,000					Dinas Sosial
			01	penyusunan laporan pencapaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja yang disusun		laporan	1	3,850,000			1	3,850,000					1.00	3,850,000	100.00	100.00	1	3,850,000	
			02	penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun		laporan	1	1,400,000			1	1,400,000					1.00	1,400,000	100.00	100.00	1	1,400,000	
			04	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		laporan	1	5,445,000	1.00	5,445,000							1.00	5,445,000	100.00	100.00	1	5,445,000	
			06	penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		dokumen	4	5,755,000	1.00	1,438,750	1	1,438,750	1	1,438,750	1	1,438,750	4.00	5,755,000	100.00	100.00	4	5,755,000	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	100.00			
																		Predikat kinerja		ST	ST			
			07	Program peningkatan informasi	-				15,000,000										11,770,000					Dinas Sosial
			02	Penyebarluasan informasi melalui pameran pembangunan	Jumlah pameran yang diikuti		kali	1	15,000,000	1.00	11,770,000							1.00	11,770,000	100.00	78.47	1	11,770,000	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	78.47			
																		Predikat kinerja		ST	S			
			03	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-				72,000,000	-	-								71,884,000					Dinas Sosial
			05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian olahragayang diadakan		pasang	33										-	0	0.00	0.00	-	-	
			03	bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan yang mengikuti bintek		orang	15	72,000,000			5.00	18,390,000	5.00	26,747,000	5	26,747,000	15.00	71,884,000	100.00	99.84	15	71,884,000	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	99.84			
																		Predikat kinerja		ST	ST			
			15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	-				267,050,000	-	-								260,732,000					Dinas Sosial
			01	Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin melalui program PKH	Jumlah tenaga pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin melalui program PKH		orang	38	267,050,000			19.00	130,366,000	19	130,366,000	38.00	260,732,000	100.00	97.63	38	260,732,000			
			03	Peningkatan manajemen usaha bagi keluarga miskin	Jumlah rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan melalui kegiatan fasilitasi usaha manajemen usaha bagi keluarga miskin		KK	80										0				-	-	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	97.63			
																		Predikat kinerja		ST	ST			
			16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-				17,000,000	1									10,545,000					Dinas Sosial
			08	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Jumlah kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS		orang	24										0				-	-	
			11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan kegiatan PMKS yang dilakukan		laporan	3	17,000,000	1.00	3,515,000	1	3,515,000	1	3,515,000			10,545,000	0.00	62.03	-	10,545,000		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		0.00	62.03			
																		Predikat kinerja		SR	R			
			21	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat	-				590,750,000										550,482,000					Dinas Sosial
			03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah petugas PSKS, TKSK dan PKes yang meningkatkan SDMnya		orang	40	590,750,000	10.00	137,620,500	10	137,620,500	10	137,620,500	10	137,620,500	550,482,000	0.00	93.18	-	550,482,000		
			04	pengembangan modal kelembagaan perlindungan sosial	Terbentuknya KUBE kelembagaan Kesos																	-	-	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		0.00	93.18			
																		Predikat kinerja		SR	T			
			22	Program Pengembangan Saran dan Prasarana TNP/TPB	-				64,950,000										64,950,000					Dinas Sosial

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

			01	Peningkatan Saran dan Prasarana TM/PMN	Jumlah TM/PMN yang dipelihara		TM/PMN		10	64,950,000			5	32,475,000	5	32,475,000			10.00	64,950,000	100.00	100.00	10	64,950,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100.00	100.00			
Predikat kinerja																					ST	ST			
		23	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dasar	Jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dibawah umur	orang	100			170,509,000											144,564,000	100.00			Dinas Sosial	
		01	Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Terantar	Jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dibawah umur	orang	100			39,839,000	25.00	8,332,250	25		8,332,250	25		8,332,250	25		8,332,250	100.00		83.66	100	33,329,000
		02	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	orang	20			28,300,000	5.00	4,798,750	5		4,798,750	5		4,798,750	5		4,798,750	20.00		67.83	20	19,195,000
		03	Pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terantar	Jumlah lanjut usia terantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	orang	60			72,150,000	15.00	16,756,250	15		16,756,250	15		16,756,250	15		16,756,250	60.00		92.90	60	67,025,000
		04	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan sosial	orang	15			30,220,000	3.75	6,253,750	3.75		6,253,750	3.75		6,253,750	3.75		6,253,750	15.00		82.78	15	25,015,000
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100.00	75.74			
Predikat kinerja																					ST	S			
		24	Program Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana				-				152,750,000										124,009,000	100.00			Dinas Sosial
		01	Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi Korban Bencana	Jumlah penerima kebutuhan dasar korban bencana	KK	75			40,750,000	18.75	10,021,000	18.75		10,021,000	18.75		10,021,000	18.75		10,021,000	75.00		98.37	75	40,084,000
		02	Penanganan Masalah Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Danuratan dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah keluarga penerima bantuan kebutuhan dasar korban bencana	KK	130			112,000,000	32.50	20,981,250	32.50		20,981,250	32.50		20,981,250	32.50		20,981,250	130.00		74.93	130	83,925,000
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100.00	86.65			
Predikat kinerja																					ST	T			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJADAN ANGGARAN DAN RISELURUH (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)																					#VALUE!	82.16			
PREDIKAT KINERJADAN RISELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)																					T	T			
				DINASTENAGA KERUADAN TRANS MIGRASI																					
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						539,217,000												532,884,137	100.00			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terdistribusi	surat	1500			3,600,000	375	900,000	375		900,000	375		900,000	375		900,000	1,500		100.00	100.00	
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan internet/wifi dan rekening listrik yang terbayarkan tepat waktu		36			54,000,000	9	12,325,004	9		12,325,004	9		12,325,004	9		12,325,004	36		100.00	91.30	
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas / operasional yang dibayarkan	unit	6			1,100,000	6	846,500										6		100.00	76.95	
		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu (tiap bulan)	Jasa	180			122,760,000	45	30,690,000	45		30,690,000	45		30,690,000	45		30,690,000	180		100.00	100.00	
		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan tepat waktu (tiap bulan)	Jasa	24			15,678,000	6	3,919,500	6		3,919,500	6		3,919,500	6		3,919,500	24		100.00	100.00	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan terpelihara	4 Jenis	1			2,000,000			1		2,000,000							1		100.00	100.00	
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		180			11,400,000	45	2,850,000	45		2,850,000	45		2,850,000	45		2,850,000	180		100.00	100.00	
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang dilakukan	Kali	52			164,799,000	13	41,168,375	13		41,168,375	13		41,168,375	13		41,168,375	52		100.00	99.92	
		19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	%	100			143,200,000	25	35,486,530	25		35,486,530	25		35,486,530	25		35,486,530	100		100.00	99.12	
		20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Jumlah laporan barang dan asset daerah yang terinventarisasi sesuai aturan yang berlaku	laporan	2			20,680,000	1	10,340,000	1		10,340,000							2		100.00	100.00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100.00	96.79			
Predikat kinerja																					ST	T			
		02	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	Jumlah perlengkapan gedung kantoryang diadkan sesuai analisa kebutuhan					120,054,800	0											120,046,195	0.00	0.00		
		07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		buah	5															-	0			

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

				09	Pengadaanperalatangedungkantor	JumlahPeralatangedungkantor yang diadkan sesuai analisisakebutuhan		unit		2		0						-	0	0.00	0.00					
				10	Pengadaanmeubeleu	Jumlah meubeleu kantor yangdiadkansesuaianlisa kebutu han		buah		35		38,500,000			35		38,500,000		35	38,500,000	100.00	100.00				
				22	PemeliharaanRutin/BerkalaGedungKantor	Jumlahgedungkantoryang dipeliharasecarutin		gedung		1		0						-	0	0.00	0.00					
				24	Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional	Jumlah kendraandinas/operasionalyang dipelihara		unit		2		71,999,800	1.00	17,997,799	1.00	17,997,799		2.00	71,991,195	100.00	99.99					
				26	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedungkantor	Jumlahperlengkapangedungkantor yangdipeliharasesuaianalisak ebutuhan		unit		16		4,000,000	16.00	4,000,000				16.00	4,000,000	100.00	100.00					
				28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatanGedungKantor	Jumlah peralatan gedung kantoryangdipeliharasesuaiana lisa kebutuhan		unit		8		5,555,000		8.00	5,555,000			8.00	5,555,000	100.00	100.00					
				42	Rehabilitasi sedang/beratgedungkantor	Penataaninteriorkantor																				
Rata-ratacapaiankinerja(%)																				57.14	57.14					
Predikatkinerja																				SR	SR					Dinas TenagaKerjad an Transmigrasi
			06	ProgramPeningkatanPengembanganSiste mPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan	NilaikinerjalnstansiPemerintah(L KIIP)						37,527,000								37,527,000						Dinas TenagaKerjad an Transmigrasi	
				01	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisarrealisasi kinerjaSKPD	Jumlah dokumen/laporan capaian kinerjayangdisusun		laporan		4		21,572,000	1	5,393,000	1	5,393,000	1	5,393,000	1	5,393,000	4	21,572,000	100.00	100.00		
				02	Penyusunanpelaporankeuangansementeran	Jumlahlaporankeuangan semesteran yang disusun tepatwaktu		laporan		1		1,635,000		1	1,635,000			1	1,635,000	100.00	100.00					
				04	Penyusunanpelaporankeuanganakhirtahun	Jumlah laporan keuangan akhirtahunyangdisuntapatw aktu		laporan		1		14,320,000	1	14,320,000				1	14,320,000	100.00	100.00					
				06	penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporanperencanaan kerjayangdisusun		dokumen/laporan		5		40,014,000	2	9,374,000	3	30620000			5	39,994,000	100.00	99.95				
Predikatkinerja																				1	100.00	99.99				
Predikatkinerja																				ST	ST					Dinas TenagaKerjad an Transmigrasi
			07	ProgramPeningkatanInformasi	Cakupaninformaspembangunanya ngdisebarluaskankepadapublik	%		100			13,500,000								13,485,000						Dinas TenagaKerjad an Transmigrasi	
				01	perencanaandanpengembangansistem informasiiberbasisWEB	Jasapengelolawebsitedan perbaikanweb																				
				02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan	Jumlah pelaksanaan pameran yang diikuti	kali		1		13,500,000	1	13,485,000					1	13,485,000	100.00	99.89					
Rata-ratacapaiankinerja(%)																				100.00	99.89					
Predikatkinerja																				ST	ST					Dinas TenagaKerjad an Transmigrasi
			08	ProgramPeningkatanDisiplindanKapasita s Sumber DayaAparatur	Persentase sumberdaya aparaturyangmencapainlaixKB aik	%		100			101,585,200								101,585,200						Dinas TenagaKerjad an Transmigrasi	
				05	PengadaanPakaianKhusus Hari-hari Tertentu	Jumlah PakaianOlahraga/batik/Seragam PNSyang diadkan		Pasang		130		19,500,000	65	9,750,000	65	9,750,000			130	19,500,000	100.00	100.00				
				03	BimbinganTeknisImplementasiPeraturanPerundang- Undangan	Jumlah Sumber Daya Aparatur yangmengikuti Bimtek		Aparatur		17		82,085,200	17.00	82,085,200				17.00	82,085,200	100.00	100.00					
Rata-ratacapaiankinerja(%)																				100.00	100.00					
Predikatkinerja																				ST	ST					Dinas TenagaKerjad an Transmigrasi
			15	Programpeningkatan KualitadsanProduktifitas TenagaKerja.							134,313,000								131,574,500						Dinas TenagaKerjad an Transmigrasi	
				02	PembangunanBalaiLatihanKerja	Terbangunnyaabalaitankerja		unit		1		2,197,500							0							
				03	PengadaanPeralatanpendidikan dan keterampilanbagi pencari kerja	Jumlahperalatanpendidikan dan pelatihanyangdiadkan		buah		5		0							0							
				06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagipencari kerja	Jumlah pencari kerja yangmengikutipendidikandanpelati han keterampilan		orang		80		118,332,000	20.00	29,481,500	20.00	29,481,500	20.00	29,481,500	20.00	29,481,500	80	117,926,000	100.00	99.66		
				07	Pemeliharaanrutin/berkalasaranadan prasaranaBLK	JumlahsaradanprasaranaBLK yangterpelihara		jenis		1		0						-	0	0.00	0.00					
				08	Rehabilitasi sedang/bert saranaadanprasarana BLK	JumlahsaradanprasaranaBLK yangdirehabilitasi		unit		1		9,733,500		1	9,733,500			1	9,733,500	100.00	100.00					

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi sebagai umpan balik yang dibuat		laporan	1	3,750,000			1	3,615,000				1	3,615,000	100.00	96.40				
				10	Penyusunan analisis peningkatan mutu produktivitas tenaga kerja	Jumlah perusahaan dan UMK yang dianalisis mutu produktivitas tenaga kerja		perusahaan	50	0								-	0	0.00	0.00				
				11	Penyuluhan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah LPKS swasta yang mengikuti sosialisasi		LPKS	30	300,000			15	150,000	15		150,000	30	300,000	100.00	100.00				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			60.00	59.21					
Predikat kinerja																			\$	\$					
			16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang tereserap	70	%			14,905,000									11,160,000					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang terdapat dalam penyusunan informasi Bursa Tenaga Kerja		perusahaan	100	-								-	-	0.00	0.00				
				02	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah lowongan kerja yang disebarluaskan melalui siaran radio, brosur, papan pengumuman dan SMS Gateway		lowongan kerja	300	9,940,000	150.00	3,220,000	150.00	3,220,000				300	6,440,000	100.00	64.79				
				03	Kerjasama pendididkan dan pelatihan	Pelayanan ketenagakerjaan yang mudah diakses umum SMK																			
				04	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Pemberian edukasi serta pelayanan ketenagakerjaan bagi siswa dan alumni SMK yang belum terserap di dunia kerja																			
				05	Pengembangan kelembagaan profuktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah kelompok kewirausahaan yang dilatih		kelompok	5	1,215,000			5	1,215,000				5	1,215,000	100.00	100.00				
				06	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan latihan berbasis masyarakat	terlaksananya pelatihan keterampilan bagi anggota kader Poddaya																			
				07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan konfirmasi data ketenagakerjaan yang dibuat		laporan	1	3,750,000			1	3,505,000				1	3,505,000	100.00	93.47				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			75.00	64.56					
Predikat kinerja																			T	R					
			17	Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase senjajar antara perusahaan dan pekerja yang diselesaikan	70	%			11,531,625									11,410,000					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				01	Pengendalian pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah peserta sosialisasi pra TKI dan Purna TKI		orang	120	450,000	30	112,500	30	112,500	30.00	112,500	30	112,500	120	450,000	100.00	100.00			
				02	Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industri	Jumlah penyelesaian perselisihan antara industri dan pekerja yang diselesaikan		kasus	2	3,300,000	1.00	1,650,000	1.00	1,650,000				2	3,300,000	100.00	100.00				
				03	Prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pendataan perusahaan peserta Jamsostek ketenagakerjaan bersama BPJS		perusahaan	120	-								-	0	0.00	0.00				
				04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi syarat kerja perusahaan		orang	100	-								-	0	0.00	0.00				
				05	Peningkatan Pengawasan, perlindungan & Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pembinaan, pemeriksaan dan pengujian peralatan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan		perusahaan	200	7,750,000	50	1,915,000	50.00	1,915,000	50.00	1,915,000	50.0	1,915,000		7,660,000	0.00	98.84			
				08	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring terhadap penerapan UMP bagi perusahaan sesuai aturany ang berlaku		laporan	1	-								-	0	0.00	0.00				
				10	Updating Data Perusahaan	Jumlah perusahaan yang terdapat menurut sektor lapangan usaha		perusahaan	100	31,625								-	-	0.00	0.00				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			28.57	42.69					
Predikat kinerja																			SR	SR					
				TRANSMIGRASI																					
			15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi						23,127,000									23,007,000					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah paket kebutuhan sarana prasarana kawasan transmigrasi		paket		2	23,127,000			1.00	11,503,500		1	11,503,500					2.00	23,007,000	100.00	99.48					
				06	Penyusunan rencana sarana dan prasarana serta fasilitas umum untuk pembangunan kawasan transmigrasi	Tersedianya dokumen dan bahan fasilitas kawasan transmigrasi																									
					Penataan kawasan pemukiman transmigrasi	Tersedianya fasilitas kawasan pemukiman transmigrasi																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100.00	99.48							
Predikat kinerja																							ST	ST							
				16	Program Transmigrasi Lokal																									Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				01	Penyuluhan transmigrasi lokal	Jumlah warga transmigrasi yang mengikuti penyuluhan dan pelatihan untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik		orang			50	-											-	-	0.00	0.00					
Rata-rata capaian kinerja (%)																							0.00	0.00							
Predikat kinerja																							SR	SR							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJADAN ANGGARAN DI SELURUH (PROGRAM 1 & DPROGRAM 10)																							72.09	72.44							
PREDIKAT KINERJADAN DI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 & DPROGRAM 10)																							T	T							
					DINAS KOPERASIDAN USAHA KECILO MENENGAH																										
				01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi hnta pelayanan administrasi perkantoran					544,191,000												538,635,000							Dinas Koperasi dan UKM	
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran listrik telepon		bulan		12	57,736,620	3	13,729,750	3	13,729,750	3	13,729,750	3	13,729,750	12	54,919,000	100.00	95.12								
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional yang lengkap dan dokumen		unit		12	2,256,880	3	564,000	3	564,000	3	564,000	3	564,000	12	2,256,000	100.00	99.96								
				07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa honorarium pengelola administrasi keuangan		bulan		12	98,040,000	3	24,690	3		3				9	98,040,000	75.00	100.00								
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor		bulan		12	12,200,000	3	3,640	3		3			3	12	12,200,000	100.00	100.00								
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kota	Tersedianya komponen instalasi listrik yang sesuai kebutuhan		bulan		12	1,250,000	3	311,750	3	311,750	3	311,750	3	311,750	12	1,247,000	100.00	99.76								
				13	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor tersedia		jenis		3	1,450,000	3	1,450							3	1,450,000	100.00	100.00								
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan/ buku bacaan		bacaan/bulan		276	15,540,000	69	3,885,000	69	3,885,000	69	3,885,000	69	3,885,000	276	15,540,000	100.00	100.00								
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya kunjungan keluar kabupaten dan provinsi		bulan		12	223,124,000	3	55,754,250	3	55,754,250	3	55,754,250	3	55,754,250	12	223,017,000	100.00	99.95								
				19	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		bulan		12	111,593,500	3	27,766,500	3	27,766,500	3	27,766,500	3	27,766,500	12	111,066,000	100.00	99.53								
				20	Peningkatan pengelolaan barang dan aset	Terlaksananya pengelolaan barang dan aset		orang		48	21,000,000	12	4,725,000	12	4,725,000	12	4,725,000	12	4,725,000	48	18,900,000	100.00	90.00								
Rata-rata capaian kinerja (%)																							97.50	98.43							
Predikat kinerja																							ST	ST							
				02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi hnta sarana dan prasarana aparat urDaerah					62,875,000												62,772,000							Dinas Koperasi dan UKM	
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		gedung		2	16,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000					2.00	16,000,000	100.00	100.00								
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		unit		2	40,375,000	1	20,136,000	1	20,136,000					2.00	40,272,000	100.00	99.74								
				26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya servis perlengkapan kantor		unit		10	4,000,000			5	2,000,000	5	2,000,000			10.00	4,000,000	100.00	100.00								
				28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantro yang dipelihara		unit		5	2,500,000			5.00	2,500,000					5.00	2,500,000	100.00	100.00								
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100.00	99.94							
Predikat kinerja																							ST	ST							
				06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan					53,273,000									-			45,203,000							Dinas Koperasi dan UKM	
				01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya jumlah laporan keuangan akhir tahun		laporan		3	7,835,000			3	1,219,000					3	1,219,000	100.00	15.56								
				04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akurat		laporan		1	14,470,000	1	14,467,000							1	14,467,000	100.00	99.98								

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				06	Penyusunan perencanaan kerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen RKPD dan Renja		dokumen		5	30,968,000	2	13,702,000	3	15,815,000					5	29,517,000	100.00	95.31				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	70.28			
																					Predikat kinerja		ST	T			
				08	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur					86,257,300										86,257,000						Dinas Koperasi dan UKM
				05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian olahraga		pasang		135	12,900,000	45	12,900,000								45	12,900,000	33.33	100.00			
				08	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang dibimtek		ASN		25	73,357,300	12	73,357,000								12	73,357,000	48.00	100.00			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		81.33	100.00			
																					Predikat kinerja		T	ST			
				15	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Meningkatnya iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif					3,895,000										3,895,000						Dinas Koperasi dan UKM
				06	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pengembangan UKM		UMKM		50	3,895,000	8	3,895,000								8.00	3,895,000	16.00	100.00			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		16.00	100.00			
																					Predikat kinerja		SR	ST			
				16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					3,585,000										3,585,000						Dinas Koperasi dan UKM
				06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		KUMKM		1,200	3,585,000	67.00	3,585								67.00	3,585,000	5.58	100.00			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		5.58	100.00			
																					Predikat kinerja		SR	ST			
				17	Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya pengembangan pendukung Usaha bagi usaha Mikro Kecil Menengah					68,835,500										68,835,000						Dinas Koperasi dan UKM
				01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah KUMKM yang mengikuti sosialisasi dukungan informasi		KUMKM		120	17,371,500	35	17,371,000								35.00	17,371,000	29.17	100.00			
				04	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	Jumlah UMKM yang dipantau dalam penggunaan dana pemerintah		UMKM		50	14,815,000	7	4,815,000	43.00	10,000,000						50.00	14,815,000	100.00	100.00			
				07	Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah yang difasilitasi dalam pengembangan jaringan kerja		KUMKM		120	2,385,000	5	2,385,000								5.00	2,385,000	4.17	100.00			
				08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah yang mengikuti pelatihan	Jumlah pengusaha industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah yang mengikuti pelatihan		KUMKM		120	-										-	0	0.00	0.00			
				09	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Jumlah produk UMKM yang ikutserta dalam penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah		kali		3	34,264,000	3	34,264,000								3.00	34,264,000	100.00	100.00			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		46.67	80.00			
																					Predikat kinerja		R	SR			
				18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi					30,170,800										29,491,000						Dinas Koperasi dan UKM
				04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah anggota koperasi yang diberikan sosialisasi tentang perkoperasian		orang		75	10,000,000			75.00	9,920,000						75.00	9,920,000	100.00	99.20			
				05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi berprestasi yang mendapatkan penghargaan		koperasi		9	5,200,000			9.00	5,125,000						9.00	5,125,000	100.00	98.56			
				10	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan manajemen koperasi/KUD		orang		125	8,555,800	23	8,556,000								23.00	8,556,000	18.40	100.00			
				11	Revitalisasi Koperasi	Jumlah koperasi yang akan direvitalisasi		Koperasi		5	6,415,000	1	5,890,000								1.00	5,890,000	20.00	91.82			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		59.60	97.39			
																					Predikat kinerja		SR	T			

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

			19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi kantoryang disediakan	jenis	5	44,897,000	3.00	22,710,000	2	21,419,050			5	44,129,050	100.00	98.29	5	44,129,050
			20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang dibayarkan	orang/bulan	24	9,630,000	6.00	2,407,500	6	2,407,500	6	2,407,500	24	9,630,000	100.00	100.00	24	9,630,000
Rata-rata capaian kinerja (%)																86.25	98.64			
Predikat kinerja																T	ST			
		02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur				-	81,000,000								80,404,746				Badan Kesbangdan Poltik
		07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	buah	2	15,000,000			1	7,500,000	1	7,500,000	2	15,000,000	100.00	100.00	2	15,000,000	
		10	Pengadaan Meubelur	Jumlah meubelur kantoryang diadakan	buah	7	0							-	0	0.00	0.00	-	-	
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	2	61,500,000	0.25	7,535,000	0	6,113,000	2.00	47,381,746	2	61,029,746	122.19	99.24	2	61,029,746	
		26	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	unit	8	3,000,000			8	2,875,000			8	2,875,000	100.00	95.83	8	2,875,000	
		28	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit	12	1,500,000			12	1,500,000			12	1,500,000	100.00	100.00	12	1,500,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																84.44	79.01			
Predikat kinerja																T	T			
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				-	14,522,000								14,522,000				Badan Kesbangdan Poltik
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian yang dibuat	laporan	1	2,608,000	1.00	2,608,000					1	2,608,000	100.00	100.00	1	2,608,000	
		02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang dibuat	laporan	1	1,640,000	1.00	1,640,000					1	1,640,000	100.00	100.00	1	1,640,000	
		04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	laporan	1	10,274,000					1	10,274,000	1	10,274,000	100.00	100.00	1	10,274,000	
		06	Penyusunan perencanaan kerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan kerja yang dibuat	dokumen	2	27,994,000			1	13,997,000	1	13,997,000	2	27,994,000	100.00	100.00	2	27,994,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.00	100.00			
Predikat kinerja																ST	ST			
		07	Program Peningkatan Informasi				-	13,080,000								13,080,000				Badan Kesbangdan Poltik
		02	Penyebarluasan informasi melalui pameran pembangunan	Jumlah pameran yang diikuti	kali	1	13,080,000	1.00	13,080,000					1	13,080,000	100.00	100.00	1	13,080,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.00	100.00			
Predikat kinerja																ST	ST			
		03	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-	82,370,200								82,370,200				Badan Kesbangdan Poltik
		05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian dan alat yang diadakan	pasang	30	9,000,000			30	9,000,000			30	9,000,000	100.00	100.00	30	9,000,000	
		03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM Aparatur yang dibimtek	orang	17	73,370,200			17	73,370,200			17	73,370,200	100.00	100.00	17	73,370,200	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.00	100.00			
Predikat kinerja																ST	ST			
		17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				-	-	-							-				Badan Kesbangdan Poltik
		01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah frekuensi dialog antar umat beragama	kali	1	-							-	-	0.00	0.00	-	-	
		02	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ketahanan Sosial Masyarakat	Jumlah fasilitasi forum kebangsaan	kali	1	0							-	-	0.00	0.00	-	-	
		03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya bangsa	Jumlah fasilitasi pendidikan wawasan kebangsaan	kali	1	0							-	-	0.00	0.00	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.00	0.00			
Predikat kinerja																SR	SR			
		21	program pendidikan politik masyarakat				-	134,130,000	1							133,960,000				Badan Kesbangdan Poltik
		01	penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah sosialisasi pendidikan politik yang dilakukan	kali	1	75,340,000	1.00	75,170,000					1	75,170,000	100.00	99.77	1	75,170,000	
		03	koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol yang akurta belidan tersusun sesuai aturan	Laporan	11	46,520,000	2.00	4,200,000	6.00	31,172,000	3.00	11,147,000	11	46,520,000	100.00	100.00	11	46,520,000	
		05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pemantauan perkembangan politik di daerah yang dilakukan	kali	12	12,270,000	3.00	3,067,500	3.00	3,067,500	3.00	3,067,500	12	12,270,000	100.00	100.00	12	12,270,000	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.00	99.92				
Predikat kinerja																	ST	ST				
		30	Program Kewaspadaan Daerah					364,930,000	3							361,076,000						Badan Kesbangdan Politik
			01	Peningkatan kewaspadaan daerah dan penanganan konflik	Jumlah laporan kejadian konflik di daerah	laporan	12	297,350,000	3.00	73,400,000	3.00	73,400,000	3.00	73,400,000	3.00	73,400,000	12	293,600,000	100.00	98.74	12	293,600,000
			02	Peningkatan kewaspadaan masyarakat	Jumlah fasilitas koordinasi untuk kewaspadaan masyarakat	kegiatan	1	67,580,000			1.00	67,476,000				1	67,476,000	100.00	99.85	1	67,476,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.00	99.29				
Predikat kinerja																	ST	ST				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGA RAN DI SELURUH (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 8)																	81.58	84.54				
PREDIKAT KINERJA DI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 8)																	T	T				
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					482,661,700									451,216,680					Satuan Polisi Pamong Praja
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	surat	100	-								-	0	0.00	0.00	-	-	
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan tepat waktu	rekening/bulan	24	46,350,000	6	9,131,233	6.00	9,131,233	6	9,131,233	6	9,131,233	24.00	36,524,930	100.00	78.80	24	36,524,930
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas yang dibayarkan tepat waktu	STNK	16	11,000,000			11.00					11	8,028,950	68.75	72.99	11	8,028,950	
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan tepat waktu	orang/bulan	204	113,850,000	51	28,150,000	51.00	28,150,000	51	28,150,000	51	28,150,000	204.00	112,600,000	100.00	98.90	204	112,600,000
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan	orang/bulan	24	12,050,000	6	3,012,500	6.00	3,012,500	6	3,012,500	6	3,012,500	24	12,050,000	100.00	100.00	24	12,050,000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	bahan bacaan/bulan	72	4,500,000	18	1,125,000	18.00	1,125,000	18	1,125,000	18	1,125,000	72	4,500,000	100.00	100.00	72	4,500,000
			18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang dilakukan	kali	100	170,000,000	10	40,505,000	30.00	43,030,067	30	43,030,067	30	43,030,067	100.00	169,595,200	100.00	99.76	100	169,595,200
			19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi kantor yang disediakan	jenis	5	111,611,700	3	47,808,800	2.00	47,808,800				5	95,617,600	100.00	85.67	5	95,617,600	
			20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Aset	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang dibayarkan	orang/bulan	24	13,300,000	6	3,075,000	6.00	3,075,000	6	3,075,000	6	3,075,000	24.00	12,300,000	100.00	92.48	24	12,300,000
Rata-rata capaian kinerja (%)																	85.42	80.96				
Predikat kinerja																	T	T				
		02	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur					448,300,000									428,922,129					Satuan Polisi Pamong Praja
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	unit	4	25,000,000			2.00	12,500,000	2.00	12,500,000		4	25,000,000	100.00	100.00	4	25,000,000	
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	16	419,600,000	4.00	100,128,032	4.00	100,128,032	4	100,128,032	4	100,128,032	16.00	400,512,129	100.00	95.45	16	400,512,129
			26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	paket	1	1,200,000			1.00	1,110,000				1.00	1,110,000	100.00	92.50	1	1,110,000	
			28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Paket	1	2,500,000			1.00	2,300,000				1	2,300,000	100.00	92.00	1	2,300,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.00	94.99				
Predikat kinerja																	ST	ST				
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					40,224,000									39,790,000					Satuan Polisi Pamong Praja
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahap Realisasi Kinerja SPO	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Laporan	2	795,000			2	795,000				2	795,000	100.00	100.00	2	795,000	
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semester yang dibuat	Laporan	1	670,000			1.00	670,000				1	670,000	100.00	100.00	1	670,000	
			04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	Laporan	1	6,739,000	1	6,557,000						1	6,557,000	100.00	97.30	1	6,557,000	
			05	Penyusunan Laporan Bulanan Aktual	Jumlah laporan bulanan aktual yang dibuat	Laporan	12	14,490,000	3	3,559,500	3.00	3,559,500	3.00	3,559,500	3	3,559,500	12	14,238,000	100.00	98.26	12	14,238,000
			06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan rencana kerja yang dibuat	dokumen	2	17,530,000	1	8,765,000	1.00	8,765,000				2	17,530,000	100.00	100.00	2	17,530,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.00	99.10				
Predikat kinerja																	ST	ST				
		08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					220,424,300									36,600,000					Satuan Polisi Pamong Praja
			02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	pasang	122	36,600,000			122.00	36,600,000					36,600,000	0.00	0.00	-	36,600,000	
			03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	pasang	122	122,000,000			122.00	122,000,000				122.00	122,000,000	100.00	100.00	122	122,000,000	
			08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan	orang	10	61,824,300			5.00	30,912,150	5.00	30,912,150		10.00	61,824,300	100.00	100.00	10	61,824,300	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	66.67	66.67				

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

			05	WorkshoptentangMitigasiTerhadapKorbanBencana	AdanyaProtapdalam menanganikebencanaan		kegiatan		1	-									-	-	0.00	0.00	-	-		
Rata-ratacapaiankinerja(%)																					0.00	0.00				
Predikatkinerja																					SR	SR				
		27		ProgramKedaruratanLogistikPenanggulanganBencana					-	30,700,000										30,645,000				BadanPenangulanganBencanaDaerah		
			01	PenyiapanPenyaluranKebutuhanSapPakai	Terlaksananyaapenyalaranlogistik bencana		kegiatan		1	30,700,000			1.00		30,645,000				1.00	30,645,000	100.00	99.82	1	30,645,000		
			08	WorkshopyPenyusunanSOPKedaruratanLogistik	Terlaksananya penyusunanSOP KedaruratanLogistik		kegiatan		1	-										0			-	-		
Rata-ratacapaiankinerja(%)																					100.00	99.82				
Predikatkinerja																					T	T				
		28		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap Pasca Bencana					-	11,850,000									7,516	11,405,000				BadanPenangulanganBencanaDaerah		
			01	Investigasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana prasarana umum, harta dan rumah	Tersedianya data tentang kerusakan-kerugian sarana prasarana umum, harta dan rumah		kecamatan		12	11,850,000	3.00	2,851,250	3.00		2,851,250	3.00		2,851,250	12.00	11,405,000	100.00	96.24	12	11,405,000		
			07	Penyusunan SOP dan PROTAP	Terlaksananya penyusunan SOP Rehabilitasi dan Rekonstruksi		kegiatan		1	-									-	0	0.00	0.00	-	-		
Rata-ratacapaiankinerja(%)																					50.00	48.12				
Predikatkinerja																					R	R				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DI SELURUH (PROGRAM 11.5. D. PROGRAM 11)																					82.09	81.38				
PREDIKAT KINERJA DI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 11.5. D. PROGRAM 11)																					T	T				
				SEKRETARIAT DAERAH					-	17,360,116,309										16,953,743,531				Sekretariat Daerah		
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					-																	
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa tenaga administrasi persurat menyurat		jasa/bulan		204	81,200,000	51.00	15,991,250	51.00		15,991,250	51.00		15,991,250	51.00	15,991,250	204.00	63,965,000	100.00	78.77	204	63,965,000
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis rekening yang dibayarkan tepat waktu tiap bulan		jenis rekening		15	11,441,281,809			5.00	3,738,516,401	5		3,738,516,401	5	3,738,516,401	15.00	11,215,549,203	100.00	98.03	15	11,215,549,203	
			03	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan		jenis rekening		5	435,000,000			5.00	402,210,000					402,210,000	5.00	402,210,000	100.00	92.46	5	402,210,000	
			04	Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah jasa jaminan kesehatan pimpinan beserta keluarga yang dibayarkan		Jaminan		2	50,000,000			2.00	17,218,000							17,218,000			-	17,218,000	
			05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah jasa jaminan barang milik daerah yang disediakan		jasajaminan		2	100,000,000			1.00	50,000,000	1.00		50,000,000			2	100,000,000	100.00	100.00	2	100,000,000	
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas yang diperpanjang		STNK		83	40,000,000			50.00	14,568,290	33.00		14,568,290			83	29,136,580	100.00	72.84	83	29,136,580	
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan		orang/bulan		552	634,729,000	138.00	148,258,500	138.00		148,258,500	138.00		148,258,500	138.00	148,258,500	552.00	593,034,000	100.00	93.43	552	593,034,000
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan		paket		4	508,400,000			2.00	253,047,501	2.00		253,047,501			4.00	506,095,001	100.00	99.55	4	506,095,001	
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket alat listrik dan elektronik untuk bangunan kantor yang tersedia		paket		1	35,000,000			1.00	34,954,300						1	34,954,300	100.00	99.87	1	34,954,300	
			13	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan		paket		2	35,000,000			1.00	17,350,000	1.00		17,350,000			2.00	34,700,000	100.00	99.14	2	34,700,000	
			14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga untuk Rujab yang disediakan		Paket		5	172,000,000			3.00	85,645,500	2.00		85,645,500			5.00	171,291,000	100.00	99.59	5	171,291,000	
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		bahan bacaan/bulan		636	767,160,000	159.00	191,640,000	159.00		191,640,000	159.00		191,640,000	159.00	191,640,000	636.00	766,560,000	100.00	99.92	636	766,560,000
			18	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan		Perjalanan		4500	700,000,000	1,125.00	174,084,967	1,125.00		174,084,967	1,125.00		174,084,967	1,125.00	174,084,967	4,500.00	696,339,867	100.00	99.48	4,500	696,339,867
			19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi kantor yang disediakan		jenis		8	2,282,148,500	4.00	1,123,475,340	4.00		1,123,475,340					8.00	2,246,950,680	100.00	98.46	8	2,246,950,680	
			20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Aset	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang dibayarkan		orang/bulan		48	78,197,000	12.00	18,934,975	12.00		18,934,975	12.00		18,934,975	12.00	18,934,975	48.00	75,739,900	100.00	96.86	48	75,739,900
Rata-ratacapaiankinerja(%)																					100.00	94.89				
Predikatkinerja																					ST	ST				
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					-	7,312,293,950										6,529,259,866				Sekretariat Daerah		

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

			03	PembangunanGedungKantor	Jumlahgedingkantoryangdibangun		gedung	1	34,948,500							0			-	-			
			05	Pengadaankendaraandinas/operasional	Jumlahkendaraandinas/operasional yangdiadakan		unit	4	715,000,000	1.00	176,750,000	1.00	176,750,000	1.00	176,750,000	1.00	176,750,000	4.00	707,000,000	100.00	98.88	4	707,000,000
			06	Pengadaanperlengkapanrujab/dinas	Jumlahperlengkapanrujab/dinas yang diadakan		unit	120	208,750,000	30.00	45,100,000	30.00	45,100,000	30.00	45,100,000	30.00	45,100,000	120.00	180,400,000	100.00	86.42	120	180,400,000
			07	Pengadaanperlengkapangedungkantor	Jumlahperlengkapangedungkantor yang diadakan		unit	47	363,500,000	10.00	87,700,000	10.00	87,700,000	10.00	87,700,000	17.00	87,700,000	47.00	350,800,000	100.00	96.51	47	350,800,000
			09	PengadaanPeralatanGedungKantor	Jumlahperalatangedungkantor yang diadakan		unit/set	29	361,000,000			10.00	174,700,000	19.00	174,700,000		174,700,000	29.00	349,400,000	100.00	96.79	29	349,400,000
			10	PengadaanMeubeleu	Tersedianameubeleukantor	93			556,000,000			31.00	185,183,333	31.00	185,183,333	31.00	185,183,333		555,550,000	0.00	99.92	-	555,550,000
			20	PemeliharaanRutin/berkalarumahlabatan	Jumlahrumahjabatanyang dipelihara		rujab	3	561,000,000			1.00	110,068,583	1.00	110,068,583	1.00	110,068,583	3.00	330,205,750	100.00	58.86	3	330,205,750
			21	PemeliharaanRutin/berkalarumahdinas	Jumlahrumahdidnasyang dipelihara		rumahdinas	5	182,000,000	1.00	43,439,276	1.00	43,439,276	1	43,439,276	2.00	43,439,276	5.00	173,757,104	100.00	95.47	5	173,757,104
			22	PemeliharaanRutin/berkalagedungkantor	Jumlahgedungkantoryang dipelihara		gedung	3	222,873,500			1.00	71,488,000	1	71,488,000	1.00	71,488,000	3.00	214,464,000	100.00	96.23	3	214,464,000
			23	PemeliharaanRutin/berkalamobil jabatan	Jumlahmobil jabatanyang dipelihara		mobil	3	95,000,000	1.00	5,417,000	1.00	6,831,000	1	30,448,163			3.00	42,696,163	100.00	44.94	3	42,696,163
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlahkendaraandinas/operasionalyang dipelihara		kendaraan	24	1,104,000,000	6.00	131,531,000	6.00	275,492,000	6	281,438,050	6.00	281,438,050	24.00	969,839,099	100.00	87.85	24	969,839,099
			25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapanrumahjabatandinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinasyangdipelihara		jenis	2	20,000,000			1.00	3,381,000	1.00	11,234,000			2.00	14,615,000	100.00	73.08	2	14,615,000
			26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapangedungkantor	Jumlahperlengkapangedungkantor yang dipelihara		jenis	3	37,000,000			1.00	10,400,000	2.00	11,600,000			3.00	22,000,000	100.00	59.46	3	22,000,000
			28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor	Jumlahperalatangedungkantor yang dipelihara		jenis	4	10,000,000			2	4,450,000	2.00	4,450,000			4.0	8,900,000	100.00	89.00	4	8,900,000
			40	Rehabilitasi sedang/berat rumahjabatan	Jumlahrumahjabatanyangdirehab		Rujab	1	102,500,000			1	92,897,250					1.00	92,897,150	100.00	90.63	1	92,897,150
			41	Rehabilitasi sedang/beratrumahdinas	Jumlahrumahdinas yangdirehab		rumahdinas	2	332,448,750			2	271,281,900					2.00	271,281,900	100.00	81.60	2	271,281,900
			42	Rehabilitasi sedang/beratgedungkantor	Jumlahgedungkantor yangdirehab		gedung	1	2,406,273,200			1.00	2,245,453,700					1.00	2,245,453,700	100.00	93.32	1	2,245,453,700
Rata-ratacapaiankinerja(%)																	93.75	84.31					
Predikatkinerja																	ST	T					
			06	ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaianKinerja&Keuangan				-	259,641,000								247,186,000						Sekretariat Daerah
			01	PenyusunanLaporanCapaianKinerja& IkhtisarRealisasiKinerjaSKPD	Jumlahlaporancapaiankinerja yangdisusun		Laporan	4	189,575,000	2.00	6,611,000	2	181,679,000				4	188,290,000	100.00	99.32	4	188,290,000	
			02	PenyusunanLaporanKeuanganSemesteran	Jumlahlaporankeuangan semesteranyangdisusun		Laporan	2	9,380,000								-	0	0.00	0.00	-	-	
			04	PenyusunanLaporanKeuanganAkhir Tahun	Jumlahlaporankeuanganakhir tahunyangdisusun		Laporan	1	26,270,000			1	25,570,000				1	25,570,000	100.00	97.34	1	25,570,000	
			06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlahdokumenperencanaankerja yangdiuat		dokumen	5	34,416,000			2	8,890,000	2	12,218,000	1	12,218,000	5	33,326,000	100.00	96.83	5	33,326,000
Rata-ratacapaiankinerja(%)																	75.00	73.37					
Predikatkinerja																	T	T					
			08	ProgramPeningkatanDisiplindanKapasitas SumberDayaAparatur				-	303,090,000	-							295,001,482						Sekretariat Daerah
			02	Pengadaan Pakaian dinas besertaperengkapannya	Jumlahpakaiaindinasyangdiadakan		pasang	37	55,290,000			37.00	55,290,000				37.00	55,290,000	100.00	100.00	37	55,290,000	
			05	Pengadaanpakailnkhusus hari-hari tertentu	Jumlahpakaiannolahragayang diadakan		pasang	230	53,800,000	183.00	53,800,000						183.00	53,800,000	79.57	100.00	183	53,800,000	
			03	BimbinganTeknisImplementasiPeraturan Perundang-Undangan	Jumlahaparaturyangmengikuti bimtek		orang	35	194,000,000	10.00	91,279,000	25.00	94,632,482				35.00	185,911,482	100.00	95.83	35	185,911,482	
Rata-ratacapaiankinerja(%)																	100.00	95.83					
Predikatkinerja																	ST	ST					
			16	ProgramPeningkatanPelayananKedinasan KepalaDaerah/WakilKepalaDaerah				-	2,837,982,500								2,409,136,872						Sekretariat Daerah
			01	Dialog/Audiensi dengan Tokoh TokohMasyarakat/Pimpinan/AnggotaOrga nisasi Sosialdan Kemasyarakatan	Jumlah pertemuan dengan tokoh-tokohmasyarakat		kali	12	-			-	-				-	0	0.00	0.00	-	-	
			02	Penerimaan kunjungan kerja pejabatnegara/departemen/lembaga pemerintah nondepartemen/luar negeri	Jumlah penerimaan kunjungan kerjapejabat negara yang terfasilitassecaraefektifdanefisien		kunjungan	55	1,380,000,000	15.00	222,680,000	15	356,425,000	15.00	356,425,000	10.00	356,425,000	55.00	1,291,955,000	100.00	93.62	55	1,291,955,000
			03	Rapat KoordinasiUrusanMispda	Jumlah rapat dengan unsur DPRDdanmispdayangterlaksana		rapat	2	13,146,500			1	2,625,000	1	2,625,000			2.00	5,250,000	100.00	39.93	2	5,250,000
			04	Rapat KoordinasiPejabatPemerintahDaerah	Jumlahrapat kerjapemerintah daerah yang terlaksana secaraefektif		rapat	1	6,058,000			1	5,175,000					1.00	5,175,000	100.00	85.42	1	5,175,000
			05	Kunjungan Kerja/InspeksiKepalaDaerah/WakilKepala Daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinandaerahyangterlaksana		kunjungan	12	238,778,000	3.00	57,244,700	3	57,244,700	3.00	57,244,700	3.00	57,244,700	12.00	228,978,800	100.00	95.90	12	228,978,800
			06	Koordinasidngpemerintahpusat & pemerintahdaerahlainnya	Jumlahperjalanaandinaseluar daerayangdilakukan		kali	380	1,200,000,000	95.00	219,444,518	95	219,444,518	95.00	219,444,518	95.00	219,444,518	380.00	877,778,072	100.00	73.15	380	877,778,072

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

Rata-rata capaian kinerja (%)																	83.33	64.67	-	-
Predikat kinerja																	T	S	-	-
610,421,722																				Sekretariat Daerah
26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan							635,571,000												
	01	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koordinasi, konsultasi, dan evaluasi produk hukum yang terlaksana	koordinasi	20	367,135,000	5.00	87,044,431	5.00	87,044,431	5.00	87,044,431	5	87,044,431	20.00	348,177,722	100.00	94.84	20	348,177,722
	02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rancangan perda, rancangan keputusan bupati, naskah akademik dan rancangan perbuk yang disusun	Ranperda, Keputusan Bupati, Naskah Akademik dan Ranperbup	566	44,084,000	130.00	10,000,000	140.00	10,064,000	140.00	10,064,000	156	11,159,000	566.00	41,287,000	100.00	93.66	566	41,287,000
	03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah cetak buku satu perancang peraturan perundang-undangan yang dicetak	buku satu	10	77,269,000			5.00	38,284,500	5.00	38,284,500		10	76,569,000	100.00	99.09	10	76,569,000	
	04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	sosialisasi	2	100,000,000			1.00	49,395,000	1.00	49,395,000		2.00	98,790,000	100.00	98.79	2	98,790,000	
	05	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah publikasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	publikasi	3	10,000,000			3.00	10,000,000				3.00	10,000,000	100.00	100.00	3	10,000,000	
	06	Kajian peraturan perundang-undangan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah peraturan perundang-undangan yang dikaji	peraturan	2	30,860,500			1.00	15,430,250	1.00	15,430,250		2.00	30,860,500	100.00	100.00	2	30,860,500	
	07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan yang dibuat	Laporan	1	6,222,500			1	4,737,500				1	4,737,500	100.00	76.13	1	4,737,500	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.00	94.64		
Predikat kinerja																	ST	ST		Sekretariat Daerah
31	Program Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum							683,181,000												
	01	Pengumpulan bahan dan pengolahan data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Pengawasan dan Tugas Pembantuan	Jumlah bahan pertimbangan/perumusan peraturan atau kebijakan terkait bidang tugas pembantuan yang disusun	bahan	2	1,515,000									-	-	0.00	0.00	-	-
	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah data terkait manajemen administrasi pemerintahan umum yang dibuat	data/laporan	1	16,516,000	0.06	1,028,000	1	10,978,000					1	12,006,000	72.69	72.69	1	12,006,000
	05	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Otonomi Daerah dan Kerjasama	Jumlah kegiatan pembinaan bidang tugas otonomi daerah dan kerjasama yang disusun sesuai aturan yang berlaku	bahan	17	518,340,000			-	3,038,500	17	15,000,000		17	18,038,500	100.00	3.48	17	18,038,500	
	06	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan	Jumlah basis/data terkait bidang tugas kewilayahan yang termutakhirkan	data	1	106,337,000			1	106,337,000					1	106,337,000	100.00	100.00	1	106,337,000
	07	Pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Tatalaksana Wilayah Administrasi Antar Daerah	Jumlah kegiatan pengolahan data percepatan penyelesaian tatalaksana wilayah administrasi antar daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien	kegiatan	1	40,473,000			1	35,409,000					1	35,409,000	100.00	87.49	1	35,409,000
Rata-rata capaian kinerja (%)																	57.56	25.39		
Predikat kinerja																	R	SR		Sekretariat Daerah
32	Program Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat							140,006,000												
	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan terkait monitoring administrasi kesejahteraan rakyat yang termutakhirkan	laporan	3	7,919,500			3	6,464,500					3.00	6,464,500	100.00	81.63	3	6,464,500
	05	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan	Jumlah bahan pertimbangan bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan yang termutakhirkan	dokumen	1	46,979,000			1	18,509,000					1.00	18,509,000	100.00	39.40	1	18,509,000
	06	Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan untuk Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Sosial, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah bahan pertimbangan bidang sosial, pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang termutakhirkan	dokumen	1	44,419,500			1	18,874,500					1.00	18,874,500	100.00	0.00	1	18,874,500

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

[illegible]

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

[illegible]

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

[illegible]

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

			49	Program Layanan barang dan jasa				-		744,303,500									603,930,775	ST	ST			Sekretariat Daerah	
			01	Layanan Pengadaan Barang dan jasa	Jumlah jasa pendukung pengadaan barang dan jasa yang terbayarkan				17	652,611,000	2.01	77,301,000	1	37,271,000	10.89	418,166,275			13.88	532,738,275	81.63	81.63	14	532,738,275	
			02	Penyebaran Informasi Pengadaan	Jumlah layanan informasi terkait pengadaan barang/jasa yang terlaksana secara efektif dan efisien				125	91,692,500			38	28,146,000	58.68	43,046,500			97.05	71,192,500	77.64	77.64	97	71,192,500	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				79.64	79.64				
Predikat kinerja																				S	S				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH (PROGRAM 1 & PROGRAM 22)																				90.09	82.10				
PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 & PROGRAM 22)																				T	T				
			1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN				0		3,408,074,500										3,051,813,125					Sekretariat DPRD
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan				1,500	59,580,000			491	19,500,000	825	32,760,000			1,316	52,260,000	87.71	87.71	1,316	52,260,000	
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan tepat waktu				24	320,000,000	5	64,573,000	5	68,202,000	3	40,938,137	3	40,938,137	16	214,651,273	67.08	67.08	16	214,651,273	
			03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				2	9,100,000	0	1,950,000	1	3,525,000					1	5,475,000	60.16	60.16	1	5,475,000	
			05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan				2	200,000,000			2	199,724,300					2	199,724,300	99.86	99.86	2	199,724,300	
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan & perisinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipergunakan STNK nya				41	28,000,000			1	472,000	40	27,404,480			41	27,876,480	99.56	99.56	41	27,876,480	
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan				216	289,498,000	111	148,600,000	48	63,706,000	18	23,712,000			176	236,018,000	81.53	81.53	176	236,018,000	
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan				28	118,960,500			9	39,900,000	17	73,810,500			27	113,710,500	95.59	95.59	27	113,710,500	
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				3	21,884,000			1	10,132,500	1	10,132,500			3	20,265,000	92.60	92.60	3	20,265,000	
			13	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan				1	20,000,000			0	9,981,250	0	9,981,250			1	19,962,500	99.81	99.81	1	19,962,500	
			14	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				1	354,000,000	0	53,490,000	0	81,315,000	1	217,231,350			1	352,036,350	99.45	99.45	1	352,036,350	
			15	Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				488	395,100,000	67	54,490,000	98.98	80,135,000	286	231,375,000			452	366,000,000	92.63	92.63	452	366,000,000	
			18	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang dilakukan				350	767,305,000	143	312,431,000	112	244,617,000	95	207,180,222			349	764,228,222	99.60	99.60	349	764,228,222	
			19	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi kantor yang disediakan				5	801,347,000			0.72	116,037,000	3	540,268,500			4	656,305,500	81.90	81.90	4	656,305,500	
			20	Peningkatan pengelolaan barang dan aset yang dibayarkan tiap bulannya	Jumlah pengelolaan barang dan aset yang dibayarkan tiap bulannya				48	23,300,000	8	3,800,000	8	3,800,000	32	15,700,000			48.00	23,300,000	100.00	100.00	48	23,300,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				89.82	89.82				
Predikat kinerja																				T	T				
			06	Pengadaan Perengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan				28	231,100,000			9	74,150,000	9	74,150,000			27	222,450,000			27	222,450,000	
			07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan				214	516,000,000	53	127,434,075	52.85	127,434,075	52.85	127,434,075	53	127,434,075	211	509,736,300	98.79	98.79	211	509,736,300	
			09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan				17	161,500,000			1	10,500,000	14	135,000,000			15	145,500,000	90.09	90.09	15	145,500,000	
			20	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara				1	30,700,000			0	15,345,028	0	15,345,028			1	30,690,056					
			22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jasa tenagapemeliharaan yang dibayarkan				36	38,000,000	7	7,347,500	7	7,347,500	7	7,347,500	7	7,347,500	28	29,390,000	77.34	77.34	28	29,390,000	
			24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				10	486,000,000			3.25	158,085,000	3	162,568,973	3	162,568,973	10	483,222,945	99.43	99.43	10	483,222,945	
			26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara				1	35,475,000			0	1,870,000	0	16,582,500	0	16,582,500	1	35,035,000	98.76	98.76	1	35,035,000	
			28	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				3	18,000,000			1	4,400,000	1	4,400,000			1	8,800,000	48.89	48.89	1	8,800,000	
			29	Pemeliharaan Rutin/berkala meubelir	Jumlah meubelir kantor yang dipelihara				2	10,000,000									1	4,920,000	49.20	49.20	1	4,920,000	
			40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab				1	65,000,000			0	31,107,500	0	31,107,500			1	62,215,000	95.72		1		

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Rata-rata capaian kinerja (%)															88.18	90.16			
Predikat kinerja															T	ST			
587,978,260																		BKuD	
02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	unit	3	29,500,000	2.03	20,000,000	0.48	4,750,000	0	4,750,000		3.00	29,500,000	100.00	100.00			
09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	unit	10	354,500,000	3.67	130,000,000	3.17	112,250,000	3	112,250,000		10.00	354,500,000	100.00	100.00			
10	Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubeleur kantor yang dibeli	unit	6	3,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000		6.00	3,000,000	100.00	100.00			
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	gedung	1	15,000,000	0.50	7,500,000	0.50	7,500,000				1.00	15,000,000	100.00	100.00			
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	34	112,000,000	5.00	10,354,000	13.57	44,687,130	14	44,687,130		32.13	99,728,260	94.50	89.04			
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	ls	1	18,750,000	0.23	4,300,000	0.39	7,225,000	0	7,225,000		1.00	18,750,000	100.00	100.00			
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	jenis	3	14,500,000	1.10	5,325,000	0.95	4,587,500	1	4,587,500		3.00	14,500,000	100.00	100.00			
42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	gedung	1	55,000,000	0.10	5,325,000	0.43	23,837,500	0	23,837,500		0.96	53,000,000	96.36	96.36			
															98.86	98.18			
															Predikat kinerja	ST	ST		
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan				65,760,000								63,261,100					BKuD	
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya alup, Renjadan Renstra Dinas PPKAD	Laporan	1	29,127,000	0.2	6,986,000	0	10,894,550	0	10,894,550		0.99	28,775,100	98.79	98.79			
02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	Laporan	1	14,824,000	0.4	6,338,500	0.4	6,338,500				0.86	12,677,000	85.52	85.52			
04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya penyusunan laporan akhir tahun	Laporan	1	21,809,000	0.8	16,584,000	0	5,225,000				1.00	21,809,000	100.00	100.00			
05	Penyusunan Laporan Bulanan	Tersedianya penyusunan laporan akhir tahun	Laporan	1			0						0.00	-	0.00	0.00			
06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan kerja perangkat daerah	Dokumen	4	94,034,000	1	21,895,650	1	21,895,650	1	21,895,650	1	3.73	87,582,600	93.14	93.14			
															Rata-rata capaian kinerja (%)	75.49	75.49		
															Predikat kinerja	T	T		
07	Program Peningkatan Informasi			100	12,000,000								11,910,000					BKuD	
02	Penyebarluasan informasi melalui pameran pembangunan	Jumlah pameran yang diikuti	kali	1	12,000,000			1	11,910,000				0.99	11,910,000	99.25	99.25			
															Rata-rata capaian kinerja (%)	99.25	99.25		
															Predikat kinerja	ST	ST		
08	Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur				163,000,000								154,897,900					BKuD	
05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang dibeli	orang	70	21,000,000	70	21,000,000						70.00	21,000,000	100.00	100.00			
01	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan yang mengikuti bintek	orang	15	142,000,000	14.1	133,897,900						14.14	133,897,900	94.29	94.29			
															Rata-rata capaian kinerja (%)	94.29	94.29		
															Predikat kinerja	ST	ST		
17	Pengelolaan Keuangan Daerah				1,678,937,000								1,624,329,000					BKuD	
06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersedianya buku mengenai notakeuangan TA 2020 dan rancangan Perda 2021	exp	400	236,005,000	176	103,665,000	96.1	56,689,000	96	56,689,000		367.86	217,043,000	91.97	91.97			
02	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya buku perbup penjabaran APBD 2020 dan Ranperbup tentang APBD 2021	exp	300	157,840,000	114													

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

[illegible]

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas		Unit		11	8,150,000	0	790,000	3	2,213,000	3	2,213,000			6.07	5,216,000	55.19	64.00					
				07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Pelaksanaan Anggaran		Orang/bulan		3	84,220,000	0	2,000,000	1	27,218,000	2	51,633,200			2.88	80,851,200	96.00	96.00					
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor		bulan		12	21,000,000	3	4,500,000	2	4,250,000	4	6,125,000		4	6,125,000	12.00	21,000,000	100.00	100.00				
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen penerangan kantor				12	2,000,000			11	1,810,000					10.86	1,810,000	90.50	90.50					
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan		bulan		12	11,700,000	1	900,000	5	5,140,000	5	5,140,000			11.47	11,180,000	95.56	95.56					
				18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		kali		61	176,060,000	29	84,645,000	32	91,300,982					60.96	175,945,982	99.94	99.94					
				19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran yang dikelola		layanan		6	46,953,000	3	24,000,000	3	21,769,000					5.85	45,769,000	97.48	97.48					
				20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Aset	Jumlah Tenaga Pengelola Barang dan Aset		orang/bulan		1	5,400,000			1	5,400,000					1.00	5,400,000	100.00	100.00					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					92.32	93.20						
Predikat kinerja																					ST	ST						
1	20	07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur daerah					60,445,000										55,009,126						Inspektorat	
				03	Pembangunan Gedung Kantor	Peningkatan sarana prasarana perkantoran																						
				05	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional																						
				07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor		unit		2	22,200,000	1	11,050,000	1	11,050,000					1.99	22,100,000	99.55	99.55					
				09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan Gedung Kantor																						
				10	Pengadaan Meubelur	Tersedianya meubelur																						
				22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		gedung		1	17,235,000	0	2,000,000	0	6,707,500	0	6,707,500			0.89	15,415,000	89.44	89.44					
				24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		mobil		2	15,010,000	0	1,990,000	1	5,142,063	1	5,142,063			1.64	12,274,126	81.77	81.77					
				26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan yang digunakan dengan baik		unit		40	2,500,000	8	475,000	8	475,000	8	475,000		8	475,000	30.40	1,900,000	76.00	76.00				
				28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dapat berfungsi dengan baik		unit		25	3,500,000	6	830,000	6	830,000	6	830,000		6	830,000	23.71	3,320,000	94.86	94.86				
				42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	terlaksananya rehabilitasi gedung																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					88.32	88.32						
Predikat kinerja																					T	T						
1	20	07	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					-									-	-						Inspektorat	
1	20	07	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Penyusunan PKPT, RENCANA, LAPORAN dan RENCANA		laporan		-	-									0.00	-	0.00	0.00					
				02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran		laporan		-	-									0.00	-	0.00	0.00					
				04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		laporan		-	-									0.00	-	0.00	0.00					
				06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan kerja perangkat daerah		laporan		-	-									0.00	-	0.00	0.00					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0.00	0.00						
Predikat kinerja																					SR	SR						
1	20	07	07		Program Peningkatan Informasi						6,200,000									-	6,000,000						Inspektorat	
1	20	07	07	01	Perencanaan dan pengembangan sistem informasi berbasis WEB	Kelancaran Sistem Informasi																						
1	20	07	07	02	Penyebarluasan informasi melalui pameran pembangunan	Partisipasi dalam pelaksanaan pameran pembangunan		keg		1	6,200,000	0	3,000,000	0	3,000,000					0.97	6,000,000	96.77	96.77					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					96.77	96.77						
Predikat kinerja																					ST	ST						
				03	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						305,320,000										287,125,900						Inspektorat	
				05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga					-										0							
1	20	07	05	01	Pendidikan dan pelatihan informal fungsional	Aparatur APIP bersertifikat jabatan fungsional		Aparatur		19	195,320,000			19	195,320,000					19	195,320,000	100.00	100.00					
1	20	07	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya SDM aparatur		Aparatur		25	110,000,000	20	89,167,000	1	2,638,900					21	91,805,900	83.46	83.46					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					91.73	91.73						
Predikat kinerja																					ST	ST						

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

1	20	07	20	Program Peningkatan SistemPengawasan Internaldan Pengendalian PelaksanaanKebijakanKDH	TercapainyaPeningkatanSistemPengawasanInternaldanPengendalian PelaksanaanKebijakanKDH				4,619,161,000								165	4,602,555,000						Inspektorat		
1	20	07	20	01	PelaksanaanPengawasanInternalSecara Berkala	JumlahPengawasanInternal LingkupPemisdaSecaraBerkala	Orbik		140	4,055,536,000	38	1,110,385,000	30	874,050,000	36	1,035,290,000	36	1,035,290,000	139.98	4,055,015,000	99.99		99.99			
				02	PenangananKasusPengaduanDilingkungan PmereintahDaerah	JumlahPenangananKasus Pengaduan	Dumas		12	279,725,000	2	55,590,000	1	32,035,000	4	96,010,000	4	96,010,000	12.00	279,645,000	99.97		99.97			
				05	InventarisasiTemuanHasilPengawasan	TerlaksananyaInventarisasi TemuanHasilPengawasan																				
				06	TindakLanjutHasilTemuanPengawasan	Jumlah Pemantauan Tindak LanjutRekomendasi UHP AparatPengawasanInternal danEksternal	kali		12	108,940,000	3	25,770,000	2	19,400,000	4	31,862,500	4	31,862,500	12.00	108,895,000	99.96		99.96			
				07	Koordinasi pengawasanyanglebih komprehensif	Terlaksananyakoordinasidan assurancepadaOPD	kegiatan		1	174,960,000			0	39,750,000	0	59,625,000	0	59,625,000	0.91	159,000,000	90.88		90.88			
				09	SupervisiPencegahanKorupsi	Surveypenilaianintegritas	SPI		1	-									0.00	0	0.00		0.00			
Rata-ratacapaiankinerja(%)																			97.70	97.70						
Predikatkinerja																			ST	ST						
1	20	07	21	ProgramPeningkatanProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan	Tercapainya PeningkatanProfesionalismeTenagaPemeriksa dan AparaturPengawasan				7,750,000									-	6,000,000						Inspektorat	
1	20	07	21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga PemeriksadanAparaturPengawasan	Jumlah Pelatihan PengembanganTenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan	Aparatur		80	7,750,000			62	6,000,000				61.94	6,000,000	77.42		77.42				
1	20	07	21	02	PelatihanTeknisPengawasandanPenilaian akuntabilitaskinerja	Penilaianakuntabilitas kinerja	Aparatur		12	-								0.00	0	0.00		0.00				
Rata-ratacapaiankinerja(%)																			38.71	38.71						
Predikatkinerja																			SR	SR						
1	20	07	22	Program Penataan dan PenyempurnaanKebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan	Terpenuhinya Penataan danPenyempurnaan KebijakanSistem dan ProsedurPengawasan				4,000,000									-	3,964,000						Inspektorat	
1	20	07	06	01	Penyusunan Naskah Akademik KebijakanSistemdanProsedur Pengawasan	Peningkatan kapabilitas dantenwujudnyapenetapanangkredit	Pedoman		5	4,000,000	5	3,964,000						4.96	3,964,000	99.10		99.10				
Rata-ratacapaiankinerja(%)																			99.10	99.10						
Predikatkinerja																			ST	ST						
TOTALRATA-RATACAPAIANKINERJADANANGGARANDARISELURUH(PROGRAM1.S.DPROGRAM9)																			74.13	74.39						
PREDIKATKINERJADARISELURUHPROGRAM(PROGRAM1.S.DPROGRAM9)																			T	T						
				KECAMATAN WATANGSAWITTO																					Kec.Watang Sawitto	
				Program PelayananAdministrasiPerkantoran					0	100	189,620,000							0.00	186,437,454							
				02	Penyediaanjasakomunikasi,sumber dayaair danlistrik	Jumlahrekeningyangdibayarkan tepatwaktu	rekening/bulan		12	12,000,000	3.82	3,815,318	3.82	3,815,318	3.82	3,815,318		11.45	11,445,954	95.38		95.38		11	11,445,954	
				06	Penyediaanjasapemeliharaanandanperizinan kendaraanaandinas/ operasional	Jumlah kendaraan diros yangdiperpanjangSTNK	unit		2	2,000,000			1	846,500				0.85	846,500	42.33		42.33		1	846,500	
				07	Penyediaanjasaaadministrasi keuangan yangdibayarkan	Jumlahjasaaadministrasi keuangan yangdibayarkan	orang/bulan		84	80,434,000	9.92	9,500,000	9	8,900,000	32	31,015,750	32	31,015,750	84.00	80,431,500	100.00		100.00		84	80,431,500
				08	Penyediaanjasakebersihankantor	Jumlahjasakebersihankantoryang dibayarkan	orang/bulan		12	4,575,000	1.57	600,000	2	910,000	4	1,531,000	4	1,531,000	11.99	4,572,000	99.93		99.93		12	4,572,000
				18	Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah	Jumlahperjalanandinaske luar daerahyangdiakukan	kali		17	19,000,000	4.24	4,740,333	4	4,575,000	4.24	4,740,333	4.24	4,740,333	16.82	18,796,000	98.93		98.93		17	18,796,000
				19	Peningkatan pelayanan administrasiperkantoran	Jumlah jenis layanan administrasiperkantoranyangdilak ukan	layanan		3	65,111,000	0.33	7,120,000	0	1,932,000	1	27,396,750	1	27,396,750	2.94	63,845,500	98.06		98.06		3	63,845,500
				20	PeningkatanPengelolaanBarangdanAsset	Jumlahtenagapengelolaabangd anassetyangdibayarkan	orang/bulan		12	6,500,000	1.48	800,000	2	1,300,000	4	2,200,000	4	2,200,000	12.00	6,500,000	100.00		100.00		12	6,500,000
Rata-ratacapaiankinerja(%)																			90.66	90.66						
Predikatkinerja																			T	T						
				Program PeningkatanSaranadanPrasarana Aparatur					83,500,000									0.00	81,716,000						Kec.Watang Sawitto	
				05	Pengadaankendaraan dinas/ operasional yangdiadakan	Jumlah kendaaraandinas/operasional yangdiadakan	unit		1	37,000,000			1	34,970,000				0.95	34,970,000	94.51		94.51		1	34,970,000	
				09	Pengadaanperalatengedungkantoor	Jumlahperalatengedungkantoor yang diadakan	unit		1	27,600,000			1	28,566,000				1.04	28,566,000	103.50		103.50		1	28,566,000	
				24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaaraandinas/ operasional	Jumlah kendaaraandinas/operasionalyang dipelihara	unit		1	18,900,000	0.11	1,985,000	0	500,000	0.83	15,695,000		0.96	18,180,000	96.19		96.19		1	18,180,000	
Rata-ratacapaiankinerja(%)																			99.85	99.85						

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						16,880,000							0.00	Predikat kinerja 16,880,000	ST	ST			Kec. Watang Sawitto
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun		laporan	3	2,375,000	1.00	791,667	0.999999992	791,667	1.0	791,667		3.00	2,375,000	100.00	100.00	3	2,375,000	
			04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		laporan	1	4,835,000			1	4,835,000				1.00	4,835,000	100.00	100.00	1	4,835,000	
			06	Penyusunan perencanaan kerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kerja yang dibuat		dokumen	2	9,670,000			1	4,835,000	1	4,835,000		2.00	9,670,000	100.00	100.00	2	9,670,000	
			05	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													0.00	Predikat kinerja 0	ST	ST			Kec. Watang Sawitto
			05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga, dinas harian yang didikan		pasang	60	0	0.00	0	-	-				0.00	0	0.00	0.00	-	-	
			08	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bintek		orang	15	140,000,000	7.19	67,133,000	7	63,737,000				14.02	140,000,000	93.48	100.00	14	140,000,000	
			54	Program Pengelolaan Pemerintah Kelurahan				0		940,000,000							0.00	Predikat kinerja 940,000,000	R	S			Kec. Watang Sawitto
			14	Penunjang Operasional Kelurahan Siparappe	Jumlah jenis layanan operasional penunjang kelurahan yang disediakan	jenis		10	128,000,000	2.50	32,000,000	2.50	32,000,000	2.50	32,000,000	2.50	32,000,000	10.00	128,000,000	100.00	100.00	10	128,000,000
			15	Penunjang Operasional Kelurahan Sawitto	Jumlah jenis layanan operasional penunjang kelurahan yang disediakan	jenis		12	104,000,000	3.00	26,000,000	3.00	26,000,000	3.00	26,000,000	3.00	26,000,000	12.00	104,000,000	100.00	100.00	12	104,000,000
			16	Penunjang Operasional Kelurahan Salo	Jumlah jenis layanan operasional penunjang kelurahan yang disediakan	jenis		9	116,000,000	2.25	29,000,000	2.25	29,000,000	2.25	29,000,000	2.25	29,000,000	9.00	116,000,000	100.00	100.00	9	116,000,000
			17	Penunjang Operasional Kelurahan Penrang	Jumlah jenis layanan operasional penunjang Kelurahan yang disediakan	jenis		10	116,000,000	2.50	29,000,000	2.50	29,000,000	2.50	29,000,000	2.50	29,000,000	10.00	116,000,000	100.00	100.00	10	116,000,000
			18	Penunjang Operasional Kelurahan Maccorawalie	Jumlah jenis layanan operasional penunjang kelurahan yang disediakan	jenis		10	128,000,000	2.50	32,000,000	2.50	32,000,000	2.50	32,000,000	2.50	32,000,000	10.00	128,000,000	100.00	100.00	10	128,000,000
			19	Penunjang Operasional Kelurahan Jaya	Jumlah jenis layanan operasional penunjang kelurahan yang disediakan	jenis		10	116,000,000	2.50	29,000,000	2.50	29,000,000	2.50	29,000,000	2.50	29,000,000	10.00	116,000,000	100.00	100.00	10	116,000,000
			20	Penunjang Operasional Kelurahan Bentengnge	Jumlah jenis layanan operasional penunjang kelurahan yang disediakan	jenis		9	116,000,000	2.25	29,000,000	2.25	29,000,000	2.25	29,000,000	2.25	29,000,000	9.00	116,000,000	100.00	100.00	9	116,000,000
			21	Penunjang Operasional Kelurahan Sipatoklong	Jumlah jenis layanan operasional penunjang kelurahan yang disediakan	jenis		11	116,000,000	2.75	29,000,000	2.75	29,000,000	2.75	29,000,000	2.75	29,000,000	11.00	116,000,000	100.00	100.00	11	116,000,000
			55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				0		138,608,765							0.00	Predikat kinerja 138,246,765	ST	ST			Kec. Watang Sawitto
			14	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sipatokong	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	orang		30	10,270,000	7.50	2,567,500	7.50	2,567,500	7.50	2,567,500	7.50	2,567,500	30.00	10,270,000	100.00	100.00	30	10,270,000
			15	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Siparappe	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	orang		25	8,862,000	6.25	2,215,500	6.25	2,215,500	6.25	2,215,500	6.25	2,215,500	25.00	8,862,000	100.00	100.00	25	8,862,000
			16	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawitto	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	orang		25	22,586,200	6.25	5,646,550	6.25	5,646,550	6.25	5,646,550	6.25	5,646,550	25.00	22,586,200	100.00	100.00	25	22,586,200
			17	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Salo	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	orang		30	17,862,000	7.35	4,375,000	7.35	4,375,000	7.35	4,375,000	7.35	4,375,000	29.39	17,500,000	97.97	97.97	29	17,500,000
			18	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penrang	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	orang		40	17,062,000	10.00	4,265,500	10.00	4,265,500	10.00	4,265,500	10.00	4,265,500	40.00	17,062,000	100.00	100.00	40	17,062,000
			19	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Maccorawalie	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	orang		70	20,186,200	17.50	5,046,550	17.50	5,046,550	17.50	5,046,550	17.50	5,046,550	70.00	20,186,200	100.00	100.00	70	20,186,200
			20	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jaya	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	orang		70	21,361,200	17.50	5,340,300	17.50	5,340,300	17.50	5,340,300	17.50	5,340,300	70.00	21,361,200	100.00	100.00	70	21,361,200
			21	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bentengnge	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	orang		70	20,419,165	17.50	5,104,791	18	5,104,791	17.50	5,104,791	17.50	5,104,791	70.00	20,419,165	100.00	100.00	70	20,419,165
			56	Program Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan					2,853,753,235									Predikat kinerja 2,751,383,235	ST	ST			Kec. Watang Sawitto

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

[illegible]

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Manajemen	100	%		100	15,400,000		100	15,400,000		100.00	15,400,000	100.00	100.00			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	100.00		
Predikat kinerja																		SR	SR		
		56	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan			100		702,000,000								702,000,000				Kec. Mattiro Bulu	
			Peningkatan sarana prasarana infrastruktur Kelurahan	Pada	4	pekerjaan	4	351,400,000	1.00	87,850,000	1.00	87,850,000	1.00	87,850,000	1.00	87,850,000	4.00	351,400,000	100.00	100.00	
			Peningkatan sarana prasarana infrastruktur Kelurahan	Manarang	4	pekerjaan	4	350,600,000	1.00	87,650,000	1.00	87,650,000	1.00	87,650,000	1.00	87,650,000	4.00	350,600,000	100.00	100.00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	100.00		
Predikat kinerja																		ST	ST		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENCANA SELURUH (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)																		95.01	98.55		
PREDIKAT KINERJA DAN RENCANA SELURUH (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)																		ST	ST		
			KECAMATAN SUPPA																		
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					192,104,000									85,693,453			Kec. Suppa	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan		rekening	24	21,934,000	4.67	4,265,000		8	6,888,453		12.20		11,153,453	50.85	50.85		
				Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan		orang/bulan	60	62,965,000	14.15	14,850,000		24	24,750,000		37.74		39,600,000	62.89	62.89		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan		orang/bulan	12	6,585,000	1.64	900,000		6	3,060,000		7.22		3,960,000	60.14	60.14		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		bahan bacaan /bulan	24	4,800,000	6.00	1,200,000	6.00		1,200,000		12.00		2,400,000	50.00	50.00		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah dilakukan		kali	7	10,400,000				1	1,450,000		0.98		1,450,000	13.94	13.94		
			Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran yang dilakukan		jenis	6	73,175,000	0.19	2,370,000		1	16,660,000		1.56		19,030,000	26.01	26.01		
			Penyediaan jasa pengelolaan barang dan aset yang dibayarkan	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang dibayarkan		orang/bulan	12	12,245,000	2.65	2,700,000		5	5,400,000		7.94		8,100,000	66.15	66.15		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		47.14	47.14		
Predikat kinerja																		SR	SR		
		02	Aparatur			100		114,590,000									46,011,468			Kec. Suppa	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		jenis	7	36,500,000	1.92	10,000,000					1.92		10,000,000	27.40	27.40		
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan		unit	2	13,000,000	2.00	13,000,000					2.00		13,000,000	100.00	100.00		
			Pengadaan meubeler	Jumlah meubeler yang diadakan sesuai analisa kebutuhan		unit	20	9,000,000							0.00	0		0.00	0.00		
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin		gedung	2	2,290,000							0.00	0		0.00	0.00		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan		unit	2	52,300,000	0.22	5,780,000	0.66	17,231,468			0.88	23,011,468		44.00	44.00		
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan		unit	5	1,500,000							0.00	0		0.00	0.00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		28.57	28.57		
Predikat kinerja																		T	R		
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem			100		11,361,000									2,500,000			Kec. Suppa	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP, LPPD dan SPM yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu		dok	4	1,597,000							0.00			0.00	0.00		
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang akurat dan tepat waktu		Lap	1	3,890,000	0.32	1,250,000		0	1,250,000		0.64		2,500,000	64.27	64.27		
			Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA, RKA, RENJA dan PK yang termutakhirkan		dok	6	5,874,000							0.00			0.00	0.00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		21.42	21.42		
Predikat kinerja																		SR	SR		
		08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100		129,260,000									123,013,800			Kec. Suppa	
			Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan		orang	7	129,260,000	2.14	39,548,000		5	83,465,800		6.66		123,013,800	95.17	95.17		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		95.17	95.17		
Predikat kinerja																		ST	ST		
		54	Program Pengelolaan Pemerintahan Kelurahan			100		260,000,000									56,424,357			Kec. Suppa	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

[illegible]

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	unit	1	29,280,500	0	6,194,000	0	5,770,625	0.20	5,770,625	0.20	5,770,625	0.80	29,276,500	80.28	99.99	1	29,276,500	
			42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	gedung	1	59,550,000			1	29,775,000	1	29,775,000			1.00	59,550,000	100.00	100.00	1	59,550,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		96.06	100.00				
Predikat kinerja																		ST	ST				
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan					30,090,000										30,090,000					Kec. Patampunua
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan pelaksanaan kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	laporan	3	16,335,000	1.00	5,445,000	1.00	5,445,000	1.00	5,445,000		3.00	16,335,000	100.00	100.00	3	16,335,000		
			04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	laporan	1	4,585,000	0.34	1,550,000	1	3,035,000			1.00	4,585,000	100.00	100.00	1	4,585,000			
			06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kerja yang dibuat	dokumen	2	9,170,000	1.05	4,835,000	1	4,335,000			2.00	9,170,000	100.00	100.00	2	9,170,000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	100.00				
Predikat kinerja																		ST	ST				
		08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0	100	99,000,000										97,596,400					Kec. Patampunua
			05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik dan olahraga yang diadakan	pasang	40	10,000,000	20.00	5,000,000	20.00	5,000,000			40.00	10,000,000	100.00	100.00	40	10,000,000			
			08	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek	orang	15	89,000,000	7.38	43,798,200	7	43,798,200			14.76	87,596,400	98.42	98.42	15	87,596,400			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		98.42	98.42				
Predikat kinerja																		ST	ST				
		54	Program Pengelolaan Pemerintahan Kelurahan	Persentase pelayanan kantor Lurah/Lanrisang terhadap masyarakat Kelurahan/Lanrisang	100 persen			524,000,000										524,000,000					Kec. Patampunua
			28	Penunjang Operasional Kelurahan Tonyamang	Jumlah jenis layanan operasional penunjang Kelurahan yang disediakan	layanan	11	140,000,000	2.75	35,000,000	2.75	35,000,000	2.75	35,000,000	2.75	35,000,000	11.00	140,000,000	100.00	100.00			
			29	Penunjang Operasional Kelurahan Teppo	Jumlah jenis layanan operasional penunjang Kelurahan yang disediakan	layanan	12	128,000,000	3.00	32,000,000	3.00	32,000,000	3.00	32,000,000	3.00	32,000,000	12.00	128,000,000	100.00	100.00			
			30	Penunjang Operasional Kelurahan Maccirinna	Jumlah jenis layanan operasional penunjang Kelurahan yang disediakan	layanan	12	128,000,000	3.00	32,000,000	3.00	32,000,000	3.00	32,000,000	3.00	32,000,000	12.00	128,000,000	100.00	100.00			
			31	Penunjang Operasional Kelurahan Benteng	Jumlah jenis layanan operasional penunjang Kelurahan yang disediakan	layanan	11	128,000,000	2.75	32,000,000	2.75	32,000,000	2.75	32,000,000	2.75	32,000,000	11.00	128,000,000	100.00	100.00			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	100.00				
Predikat kinerja																		ST	ST				
		55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					152,433,100										152,433,100					Kec. Patampunua
			28	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tonyamang	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	orang	20	30,087,000			20.00	30,087,000			20.00	30,087,000	100.00	100.00					
			29	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Teppo	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	orang	20	30,087,000			20.00	30,087,000			20.00	30,087,000	100.00	100.00					
			30	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Maccirinna	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	orang	20	42,072,100			20.00	42,072,100			20.00	42,072,100	100.00	100.00					
			31	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Benteng	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	orang	50	50,187,000			50.00	50,187,000			50.00	50,187,000	100.00	100.00					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	100.00				
Predikat kinerja																		ST	ST				
		56	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan					1,331,566,900										1,331,566,900					Kec. Patampunua
			29	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Tonyamang	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur yang dibangun	pekerjaan	4	331,913,000			2.00	165,956,500	2.00	165,956,500		4.00	331,913,000	100.00	100.00				
			30	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Teppo	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur yang dibangun	pekerjaan	4	343,913,000			2.00	171,956,500	2.00	171,956,500		4.00	343,913,000	100.00	100.00				
			31	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Maccirinna	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur yang dibangun	pekerjaan	2	331,927,900			1.00	165,963,950	1.00	165,963,950		2.00	331,927,900	100.00	100.00				
			32	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan Benteng	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur yang dibangun	pekerjaan	4	323,813,000			2.00	161,906,500	2.00	161,906,500		4.00	323,813,000	100.00	100.00				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	100.00				
Predikat kinerja																		ST	ST				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJADAN ANGARAN DISERULUH (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)																		94.55	99.01				
PREDIKAT KINERJADAN DISERULUH (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)																		ST	ST				
			KECAMATAN DUAMPUNUA																				
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					195,191,000										190,257,553					Kec. Duampunua
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya IT dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	rekening/bulan	24	29,980,000	1.62	2,023,000	5	5,969,000	8	9,998,527	8	9,998,527	22.41	27,989,053	93.36	93.36	22	27,989,053	
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	kendaraan	1	2,000,000			0	946,500				0.47	946,500	47.33	47.33	0	946,500		
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan	orang/bulan	84	84,750,000	20.70	20,887,500	20.70	20,887,500	20.70	20,887,500	20.70	20,887,500	82.81	83,550,000	98.58	98.58	83	83,550,000	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan		orang/bulan	24	10,750,000	6.00	2,687,500	6.00	2,687,500	6.00	2,687,500	6.00	2,687,500	24.00	10,750,000	100.00	100.00	24	10,750,000	
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		buah	12	1,440,000			12	1,440,000					12.00	1,440,000	100.00	100.00	12	1,440,000	
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah dilakukan		kali	15	10,000,000				14	9,380,000				14.07	9,380,000	93.80	93.80	14	9,380,000	
			19	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran yang dilakukan		jenis	5	48,821,000	1.25	12,188,000	1.25	12,188,000	1.25	12,188,000	1.25	12,188,000	4.99	48,752,000	99.86	99.86	5	48,752,000	
			20	Peningkatan pengelolaan barang dan aset yang dibayarkan	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang dibayarkan		orang/bulan	12	7,450,000				12	7,450,000				12.00	7,450,000	100.00	100.00	12	7,450,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				91.62	91.62			
Predikat kinerja																				ST	ST			
		02	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur						80,484,000										80,433,092					Kec. Duampanua
			09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		buah	1	44,000,000			1	22,000,000	1	22,000,000			1.00	44,000,000			1	44,000,000	
			20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		rumah	1	6,212,000			1	6,212,000					1.00	6,212,000	100.00	100.00	1	6,212,000	
			22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		gedung	1	6,212,000			1	6,212,000					1.00	6,212,000	100.00	100.00	1	6,212,000	
			24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		unit	2	24,009,000			1	12,004,546	1	12,004,546			2.00	24,009,092	99.79	99.79	2	24,009,092	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				99.93	99.93			
Predikat kinerja																				ST	ST			
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						2,325,000										2,277,000					Kec. Duampanua
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun		laporan	4	969,000			4	921,000					3.80	921,000	95.05	95.05	4	921,000	
			06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kerja yang dibuat		dokumen	3	1,356,000	1.00	452,000	1.00	452,000	1.00	452,000			3.00	1,356,000	100.00	100.00	3	1,356,000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				97.52	97.52			
Predikat kinerja																				ST	ST			
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						84,000,000										83,750,400					Kec. Duampanua
			05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan		pasang	25	0									0.00	0	0.00	0.00	-	-	
			03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek		orang	8	84,000,000	4.00	41,875,200	4.00	41,875,200					8.00	83,750,400	100.00	99.70	8	83,750,400	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50.00	49.85			
Predikat kinerja																				S	R			
		54	Program Pengelolaan Pemerintah Kelurahan				100	persen	116,000,000										115,860,000					Kec. Duampanua
			33	Penunjang Operasional Kelurahan Tatae	Jumlah jenis layanan operasional penunjang kelurahan yang disediakan		layanan	10	116,000,000	2.50	28,965,000	2.50	28,965,000	2.50	28,965,000	2.50	28,965,000	9.99	115,860,000	99.88	99.88			
			34	Penunjang Operasional Kelurahan Pekkabata	Jumlah jenis layanan operasional penunjang kelurahan yang disediakan		layanan	10	116,000,000	3.15	36,558,820	3.15	36,558,820	3.15	36,558,820			9.45	109,676,461	94.55	94.55			
			35	Penunjang Operasional Kelurahan Lampa	Jumlah jenis layanan operasional penunjang kelurahan yang disediakan		layanan	11	116,000,000	2.79	29,453,500	2.79	29,453,500	2.79	29,453,500	2.79	29,453,500	11.17	117,814,000	101.56	101.56			
			36	Penunjang Operasional Kelurahan Data	Jumlah jenis layanan operasional penunjang kelurahan yang disediakan		layanan	12	116,000,000	2.77	26,810,488	2.77	26,810,488	2.77	26,810,488	2.77	26,810,488	11.09	107,241,950	92.45	92.45			
			37	Penunjang Operasional Kelurahan Bittoeng	Jumlah jenis layanan operasional penunjang kelurahan yang disediakan		layanan	13	116,000,000	3.25	29,000,000	3.25	29,000,000	3.25	29,000,000	3.25	29,000,000	13.00	116,000,000	100.00	100.00			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				99.88	99.88			
Predikat kinerja																				ST	ST			
		55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						121,542,200										90,315,000					Kec. Duampanua
			33	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tatae	Jumlah masyarakat yang diberdayakan		orang	45	14,715,000			45.00	14,715,000					45.00	14,715,000	100.00	100.00			
			34	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pekkabata	Jumlah masyarakat yang diberdayakan		orang	20	29,227,200									0.00	0	0.00	0.00			
			35	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lampa	Jumlah masyarakat yang diberdayakan		orang	45	35,000,000			42.43	33,000,000					42.43	33,000,000	94.29	94.29			
			36	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Data	Jumlah masyarakat yang diberdayakan		orang	45	27,600,000			45.00	27,600,000					45.00	27,600,000	100.00	100.00			
			37	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bittoeng	Jumlah masyarakat yang diberdayakan		orang	25	15,000,000			25.00	15,000,000					25.00	15,000,000	100.00	100.00			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				78.86	78.86			

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

[illegible]

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

														Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	100.00			
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		363,892,900	99.97	99.97		
														Predikat kinerja		ST	R			
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGA RAN DI SELURUH (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 4)		88.03	89.10			
														PREDIKAT KINERJA DI SELURUH (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 4)		T	T			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		99.97	99.97			
														Predikat kinerja		ST	R			
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGA RAN DI SELURUH (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 4)		88.03	89.10			
														PREDIKAT KINERJA DI SELURUH (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 4)		T	T			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		143,354,598				
														Predikat kinerja		T	T			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		182,894,533				
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		94.51	94.51			
														Predikat kinerja		T	T			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		94.90	94.90			
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		6,445,000				
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		94.51	94.51			
														Predikat kinerja		T	T			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		76,306,400				
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		76,306,400	85.14	85.14		
														Predikat kinerja		T	T			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169				
														Predikat kinerja		T	T			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71	77.71		
														Predikat kinerja		ST	ST			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		96,357,169	77.71			

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

TOTALRATA-RATACAPAIANKINERJADANANGGARANDANISELURUH[PROGRAM1.S.DPROGRAM4]																	87.69	87.69										
PREDIKATKINERJADANISELURUH[PROGRAM1.S.DPROGRAM4]																	T	T										
			01	KECAMATANLEMBANG																								
				ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran				0	100		187,976,000												179,569,252					Kec.Lembang
			02	Penyediaanjasakomunikasi,sumber dayaair danlistrik	Jumlahrekeningyangdibayarkan	rekening/bulan		24		23,000,000	4.31		4,128,563	4.31		4,128,563	4.31		4,128,563	4.31		4,128,563	17.23	16,514,252	71.80	71.80	17	16,514,252
			03	Penyediaanjasapemeliharaanandanperizinan kendarandinas/operasional	Jumlahkendaraandinasyang dipelihara	unly		1		1,790,000												0						
			07	Penyediaanjasaadministrasi keuangan	Jumlahjasaadministrasi keuangan yangdibayarkan	orang/bulan		60		70,800,000	8.56		10,100,000	17.14		20,228,000	17.14		20,228,000	17.14		20,228,000	59.99	70,784,000	99.98	99.98	60	70,784,000
			08	PenyediaanJasaKebersihanKantor	Jumlah jasa administrasikebersihankantoryang dibayarkan	orang/bulan		24		14,786,000	6.00		3,696,500	6.00		3,696,500	6.00		3,696,500	6.00		3,696,500	24.00	14,786,000			24	14,786,000
			18	Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah	Jumlahperjalanandinaskeluar daerahdilakukan	kali		12		0												0.00	0	0.00	0.00	-	-	
			19	Peningkatanpelayananadministrasi perkantoran	Jumlahlayanadministrasi perkantoranyangdilakukan	layan		4		62,600,000	0.81		12,744,000	1.59		24,870,500	1.59		24,870,500			3.99	62,485,000	99.82	99.82	4	62,485,000	
			20	Peningkatanpengelolaanbarangdanaset	Jumlahjaspengelolaanbarangdan asetyangdibayarkan	orang/bulan		12		15,000,000	1.60		2,000,000	5.20		6,500,000	5.20		6,500,000			12.00	15,000,000	100.00	100.00	12	15,000,000	
Rata-ratacapaiankinerja(%)																		74.32	74.32									
Predikatkinerja																	T	T										
			02	ProgramPeningkatanSaranadanPrasanaAparatur						161,824,000													161,824,000					Kec.Lembang
			02	Pengadaankendaraandinas/operasional	Jumlahkendaraandinasyang diadakan	unit		1		42,000,000			1			42,000,000						1.00	42,000,000	100.00	100.00	1	42,000,000	
			07	Pengadaanperlengkapangedungkantoryangdiadakan	Jumlahperlengkapangedung kanatoryangdiadakan	unit		4		27,044,000	1.00		6,761,000	1.00		6,761,000	1.00		6,761,000	1.00		4.00	27,044,000	100.00	100.00	4	27,044,000	
			09	Pengadaanperalatangedungkantoryang diadakan	Jumlahperalatangedungkantoryang diadakan	unit		3		39,500,000	0.75		9,875,000	0.75		9,875,000	0.75		9,875,000	0.75		3.00	39,500,000	100.00	100.00	3	39,500,000	
			10	PengadaanMeubeleur	Jumlahmeubeleurkantoryang diadakan	set		1		12,000,000						1	12,000,000					1.00	12,000,000	100.00	100.00	1	12,000,000	
			24	PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional	Jumlahkendaraandinasyang dipelihara	Kendaraan		1		41,280,000	0.06		2,405,000	0.47		19,437,500	0.47		19,437,500			1.00	41,280,000	100.00	100.00	1	41,280,000	
Rata-ratacapaiankinerja(%)																		100.00	100.00									
Predikatkinerja																	ST	ST										
			06	ProgramPeningkatanPengembanganSistem				0	100		12,000,000												11,490,000					Kec.Lembang
			01	PenyusunanLaporanCapaianKinerjadan Ikhtisar RealisasiKinerjaSKPD	Jumlahlaporancapaiankinerja yangdisusun	laporan		1		7,500,000			1			7,500,000						1.00	7,500,000	100.00	100.00	1	7,500,000	
			04	PenyusunanLaporanKeuanganAkhir Tahun	Jumlahlaporankeuanganakhir tahunyangdisusun	laporan		1		4,500,000		0	1,278,000		1	2,712,000						0.89	3,990,000	88.67	88.67	1	3,990,000	
Rata-ratacapaiankinerja(%)																		94.33	94.33									
Predikatkinerja																	ST	ST										
			08	Program Peningkatan DisiplindanKapasitasSumberDayaAparatur						88,200,000																		Kec.Lembang
			03	PengadaanPakaianKhusus Hari-haritertentu	Jumlahpakalandahragayang diadakan	orang		37		12,950,000				37		12,950,000							37.00	12,950,000	100.00	100.00	37	12,950,000
			08	BimbinganTeknisImplementasiPeraturan Perundang-Undangan	JumlahAparaturyangmengikuti bimtek	orang		10		75,250,000				10		75,192,600							9.99	75,192,600	99.92	99.92	10	75,192,600
Rata-ratacapaiankinerja(%)																		99.96	99.96									
Predikatkinerja																	ST	ST										
			54	ProgramPengelolaanPemerintahanKelurahan						260,000,000													260,000,000					Kec.Lembang
			38	PenunjangOperasionalKelurahanTadokkong	Jumlahjenis layananasional penunjang Kelurahan yangdisediakan	layan		11		124,000,000	2.75		31,000,000	2.75		31,000,000	2.75		31,000,000	2.75		31,000,000	11.00	124,000,000	100.00	100.00	11	124,000,000
			39	PenunjangOperasional KelurahanBetteng	Jumlahjenis layananasional penunjang Kelurahan yangdisediakan	layan		11		136,000,000	2.75		34,000,000	2.75		34,000,000	2.75		34,000,000	2.75		34,000,000	11.00	136,000,000	100.00	100.00	11	136,000,000
Rata-ratacapaiankinerja(%)																		100.00	100.00									
Predikatkinerja																	ST	ST										
			55	ProgramPeningkatanSaranadanPrasanaInfrastrukturKelurahan						732,000,000													732,000,000					Kec.Lembang
			38	PeningkatanSaranaPrasanaInfrastruktur KelurahanTadokkong	Jumlahsaradanprasrananyang dibangun	pekerjaan		8		366,000,000			4			183,000,000			4			8.00	366,000,000	100.00	100.00	8	366,000,000	
			39	PeningkatanSaranaPrasanaInfrastruktur KelurahanBetteng	Jumlahsaradanprasrananyang dibangun	pekerjaan		4		366,000,000			2			183,000,000			2			4.00	366,000,000	100.00	100.00	4	366,000,000	
Rata-ratacapaiankinerja(%)																		100.00	100.00									
Predikatkinerja																	ST	ST										
TOTALRATA-RATACAPAIANKINERJADANANGGARANDANISELURUH[PROGRAM1.S.DPROGRAM4]																		88.59	88.59									
PREDIKATKINERJADANISELURUH[PROGRAM1.S.DPROGRAM4]																	R	SR										
				BADANKEPEGAWAIAN DAERAH																								
1	20	21	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasae dan sarana pelayanan administrasi perkantoran					734,704,500																		Badan Kepegawaian Daerah
1	20	21	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pendistribusian surat menyurat	bulan		12		20,000,000	3.23		2,044,250	3.23		2,044,250	3.23		2,044,250	3.23		2,044,250	4.91	626,937,292	40.89	40.89		
1	20	21	01	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bank,nlistrik, TV kabel dan telepon yang terbayarkan tepat waktu	rekening		3		234,200,000	0.45		18,772,468	0.45		18,772,468	0.45		18,772,468	0.45		18,772,468	1.81	6,377,000	60.46	60.46		
1	20	21	01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Surat Tanda Nomor (STNK) untuk kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	unit		18		9,000,000				6.33		3,166,250						6.33	95,089,873	35.38	35.38			
1	20	21	01	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	orang		15		39,212,000	3.52		45,386,750	3.52		45,386,750	3.52		45,386,750	3.52		45,386,750	14.09	93.96	93.96			

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

1	20	21	08	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olah raga, front office yang diadakan		pasang		112	17,500,000			98.18	15,340,000			98.18	15,340,000	87.66	87.66			
1	20	21	08	06	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti bimtek		orang		14	15,694,000			14.00	15,694,000			14.00	15,694,000	100.00	100.00			
1	20	21	08	07	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		orang		90	-							0.00	0	0.00	0.00			
																				Rata-rata Capaian Kinerja(%)	62.55	62.55		
																				Predikat Kinerja	S	S		
1	20	21	28		Program Pendidikan Kedisnasan	Aparatur yang akan diikuti pendidikan					83,856,000								77,161,744				Badan Kepegawaian Daerah	
1	20	21	28	02	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural		aparatur		40	0							0.00	0	0.00	0.00			
1	20	21	28	06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah aparatur yang meningkatkan kecakapan, keterampilan dan profesionalismenya		aparatur		35	83,856,000	8.05	19,290,436	8.05	19,290,436	8.05	19,290,436	8.05	19,290,436	32.21	77,161,744	92.02	92.02	
																				Rata-rata Capaian Kinerja(%)	46.01	46.01		
																				Predikat Kinerja	R	R		
1	20	21	29		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur (Kepegawaian)	Kapasitas sumber daya manusia aparatur				100	-							0.00	-				Badan Kepegawaian Daerah	
1	20	21	29	01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah CPNS daerah yang mengikuti pendidikan pelatihan dasar		orang		47	-							0.00	-	0.00	0.00			
																				Rata-rata Capaian Kinerja(%)	0.00	0.00		
																				Predikat Kinerja	SR	SR		
1	20	21	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Aparatur / PNS Pemda Kab. Pinrang					1,703,388,500							0.00	1,072,233,650				Badan Kepegawaian Daerah	
1	20	21	30	01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Jumlah Aparatur/ PNS yang akan mengikuti pembinaan karier PNS		aparatur		300	0							0.00	0	0.00	0.00			
1	20	21	30	02	Seleksi Penerimaan CPNSD	Jumlah hasil seleksi penerimaan CPNS daerah		hasil seleksi		210	733,218,500	44.14	154,122,075	44.14	154,122,075	88.28	308,244,150	42.04	42.04					
1	20	21	30	03	Penempatan PNS	Jumlah penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi dan analisis kebutuhan		penempatan		8	85,694,000			6	64,116,000	6	64,116,000	74.82	74.82					
1	20	21	30	04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah KGB dan SK Pangkat yang diproses dan diselesaikan administrasinya		KGB dan SK Pangkat		2323	183,948,000	1141.19	90,365,500	1141.19	90,365,500	2,282	180,731,000	98.25	98.25					
1	20	21	30	05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Pengelolaan sistem secara efektif		keg		1	100,642,000	1	76,093,000			1	76,093,000	75.61	75.61					
	20	21	30	06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah jabatan yang dilelang		jabatan		9	393,269,000	1.64	71,632,375	1.64	71,632,375	1.64	71,632,375	6.56	286,529,500	72.86	72.86			
1	20	21	30	08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Penghargaan bagi PNS yang berprestasi		penghargaan		45	51,540,500			34	39,193,500	34.22	39,193,500	76.04	76.04					
1	20	21	30	09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang diselesaikan		kasus		25	25,682,500			9	8,732,500	8.50	8,732,500	34.00	34.00					
1	20	21	30	11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikat Dinas yang Diberikan	Jumlah bantuan tugas belajar dan ikat dinas yang diberikan		orang		5	0					0.00	0	0.00	0.00					
1	20	21	30	13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan ikat dinas	Jumlah angkatan/pelaksanaan diklatas teknis, fungsional dan kepemimpinan		Angkatan		3	93,009,000	1.31	40,517,000	1.31	40,517,000	2.61	81,034,000	87.12	87.12					
1	20	21	30	15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan monev		kali		12	36,385,000			9	27,560,000	9	27,560,000	75.75	75.75					
																				Rata-rata Capaian Kinerja(%)	57.86	57.86		
																				Predikat Kinerja	R	R		
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJADAN ANGGARAN SELURUH (PROGRAM 1.S.DPROGRAM 10)	63.84	64.53		
																				PREDIKAT KINERJADAN SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1.S.DPROGRAM 10)	S	S		
					DINASKETAHANAN PANGAN																			
			01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					100	288,006,700								280,266,144				Dinas Ketahanan Pangan	
				02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening layanan telepon/Internet dan listrik yang terbayarkan		rekening/bulan		24	30,000,000	8.87	11,085,000	9.82	12,271,038	18.68	23,356,038	77.85	77.85					
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan pajaknya		unit		8	1,600,000	7.51	1,501,210			7.51	1,501,210	93.83	93.83					
				07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu		orang/bulan		180	101,200,000	45.00	25,300,000	45.00	25,300,000	45.00	25,300,000	180.00	101,200,000	100.00	100.00			

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	orang/bulan		36	16,200,000	9.00	9,950,000	9.00	6,250,000				18.00	16,200,000	50.00	100.00				
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan surat kabar/majalah yang tersedia sesuai analisis kebutuhan	bahan bacaan /bulan		264	15,640,000	193.78	11,480,000	70.22	4,160,000				264.00	15,640,000	100.00	100.00				
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terintegrasi dan terfaksan sesuai analisis kebutuhan	pegawai		30	74,576,700	15.44	38,370,896	14.55	36,161,000				29.98	74,531,896	99.94	99.94				
				19	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jasa dokumentasi dan publikasi yang tersedia sesuai analisis kebutuhan	jenis		22	36,490,000	7.84	13,004,000	13.59	22,533,000				21.43	35,537,000	97.39	97.39				
				20	Peningkatan pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu	Jumlah laporan pengelola barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu	orang/bulan		24	12,300,000	14.00	7,175,000	10.00	5,125,000				24.00	12,300,000	100.00	100.00				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			89.88	96.13					
Predikat kinerja																			T	ST					
			02		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur				100	82,000,000									81,599,750						Dinas Ketahanan Pangan
				07	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisis kebutuhan	unit		5	9,000,000			5	9,000,000				5.00	9,000,000	100.00	100.00				
				09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	unit		5	17,000,000			5.00	17,000,000				5.00	17,000,000	100.00	100.00				
				22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang tersedia	orang		1	7,000,000			1.00	7,000,000				1.00	7,000,000	100.00	100.00				
				24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jasa servis peralatan perlengkapan gedung kantor tersedia dan terbayarkan tepat waktu	kendaraan		8	41,000,000			4.00	20,499,875	4.00	20,499,875		8.00	40,999,750	100.00	100.00				
				26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jasa servis peralatan gedung kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	unit		7	4,000,000			1.75	1,000,000	5.3	3,000,000		7.00	4,000,000	100.00	100.00				
				28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit		10	3,600,000			3	1,000,000	7	2,600,000		10.00	3,600,000	100.00	100.00				
				42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	unit		10	400,000				0				0.00	0	0.00	0.00				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			85.71	85.71					
Predikat kinerja																			T	T					
			06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100	28,435,000									28,435,000						Dinas Ketahanan Pangan
				01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	lap		2	3,640,000			2	3,640,000				2.00	3,640,000	100.00	100.00				
				02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	lap		2	1,000,000			2	1,000,000				2.00	1,000,000	100.00	100.00				
				04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	lap		1	3,890,000			1	3,890,000				1.00	3,890,000	100.00	100.00				
				05	Penyusunan Laporan Bulanan Akrua	Jumlah laporan perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	lap		12	6,480,000	3.00	1,620,000	3.00	1,620,000	3.00	1,620,000	3.00	12.00	6,480,000	100.00	100.00				
				06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja yang dibuat	Dok		3	13,425,000	0.75	3,356,250	0.75	3,356,250	0.75	3,356,250	0.75	3.00	13,425,000	100.00	100.00				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00	100.00					
Predikat kinerja																			ST	ST					
			08		Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100	66,438,300									66,438,300						Dinas Ketahanan Pangan
				05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian yang diadakan	orang		50	15,000,000	50.00	15,000,000						50.00	15,000,000	100.00	100.00				
				03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang dibimbing	pegawai		10	51,438,300			10.00	51,438,300				10.00	51,438,300	100.00	100.00				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00	100.00					
Predikat kinerja																			ST	ST					

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

			15		Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan				100	34,625,000									33,845,000					Dinas Ketahanan Pangan
			01		Penanganan daerah rawan pangan	Jumlah laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	exap		10	2,750,000		9.98	2,745,000				9.98	2,745,000	99.82	99.82				
			04		Analisa Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Data ketersediaan pangan pada polapangan harapan dan neraca bahan makanan	laporan		2	7,250,000		0.34	1,250,000	2	6,000,000		2.00	7,250,000	100.00	100.00				
			05		Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Jumlah bantuan hibah barang kepada KWT	kali		13	15,750,000		2.48	3,000,000	5.26	6,375,000	5.26	6,375,000	13.00	15,750,000	100.00	100.00			
			13		pengembangan dan mandiri pangan	Pemantauan dan pembinaan Desa Mandiri Pangan dan Reflikasi	kec		8	2,250,000		8	2,250,000				8.00	2,250,000	100.00	100.00				
			14		Pengembangan lumbung pangan desa	Pemantauan lumbung pangan Masyarakat dan Pembangunan Lantai Emur	Kelompok		5	2,750,000		3.64	2,000,000				3.64	2,000,000	72.73	72.73				
			15		Penyusunan Potensi Sumber Pangan	Pendataan dan potensi sumber pangan masyarakat	Kec		12								0.00	-	0.00	0.00				
			20		Monitoring, evaluasi dan laporan	Monitoring, Evaluasi kegiatan ketahanan pangan	bidang		3	3,875,000		2.98	3,850,000				2.98	3,850,000	99.35	99.35				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			81.70	81.70				
Predikat kinerja																			T	T				
			17		Program Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan				100	126,645,000								125,965,000						Dinas Ketahanan Pangan
			01		Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Pemantauan melalui enumerator harga pangan pokok strategis	Komoditi		102	115,595,000		34.61	39,220,000	70.17	79,525,000		104.78	118,745,000	102.73	102.73				
			02		Pengembangan cadangan pangan daerah	Bantuan cadangan pangan daerah pada lokasi bencana	Kecamatan		12	2,875,000		2.59	620,000	7	1,575,000		9.16	2,195,000	76.35	76.35				
			03		Koordinasi kebijakan perberasan	Pemantauan pemasaran beras di Penggilingan dan Gapoktan	Gapoktan		7	8,175,000		2.70	3,150,000	1.61	1,875,000		4.30	5,025,000	61.47	61.47				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			80.18	80.18				
Predikat kinerja																			T	T				
			18		Program Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan					249,250,000								248,875,000						Dinas Ketahanan Pangan
			17		Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Fasilitasi Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Klp		12	27,500,000		12.00	27,500,000				12.00	27,500,000	100.00	100.00				
			18		Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Sosialisasi bantuan hibah barang ke kelompok wanita tani (KWT)	KWT		10	176,000,000		4.99	87,812,500	4.99	87,812,500		9.98	175,625,000	99.79	99.79				
			20		Pengembangan Sistem Informasi Pangan	Fasilitasi promosi kegiatan ketahanan pangan, gerakan cinta produk pangan lokal, pameran expo, dan hari pangan se dunia	kali		4	30,375,000		4.00	30,375,000				4.00	30,375,000	100.00	100.00				
			21		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Uji Residu, pestisida dan formalin sayuran dan buah	paket		2	15,375,000		2	15,375,000				2.00	15,375,000	100.00	100.00				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			85.88	85.88				
Predikat kinerja																			T	T				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJADAN ANGGA RAN DI SELURUH PROGRAM 1.5.D PROGRAM 6																			89.64	90.95				
PREDIKAT KINERJADAN DI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1.5.D PROGRAM 6)																			T	T				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			
			01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					537,607,500							0.00	478,610,442						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terdistribusi	surat		500	4,070,000		245	1,995,000	245	1,995,000		490.17	3,990,000	98.03	98.03	490	3,990,000		
			02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	rekening/bulan		48	55,600,000	7.00	8,110,000	6.36	7,370,000	10.54	12,206,759	10.54	12,206,759	34.44	39,893,517	71.75	71.75	34	39,893,517
			06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah STNK yang diperpanjang	STNK		5	2,950,000		2.6	1,508,000				2.56	1,508,000	51.12	51.12	3	1,508,000		
			07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbarkan tepat waktu	orang/bulan		132	156,902,500	24.48	29,095,000	23.76	28,245,000	35.65	42,381,250	35.65	42,381,250	119.55	142,102,500	90.57	90.57	120	142,102,500
			08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbarkan tepat waktu	orang/bulan		84	40,275,000	18.64	8,935,000	18.69	8,960,000	22.95	11,002,500	22.95	11,002,500	83.22	39,900,000	99.07	99.07	83	39,900,000
			15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undang yang disediakan	Bahan bacaan/bulan		420	21,600,000	80.50	4,140,000	84.00	4,320,000	121.92	6,270,000	121.92	6,270,000	408.33	21,000,000	97.22	97.22	408	21,000,000

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				03	PenyelenggaraanDiseminasiInformasiBagiMas yarakatDesa	Terlaksananya gelar TTG Tk. NasionaldanSosialisasiPosyantek												0.00	-	0.00	0.00	-	-
				04	Penataan Pemukiman dan LingkunganMasyarakatPrasejahteradanSejaht eraSatu	Jumlah rumah yang dibedah bagimasyarakatprasejahteradan sejahteral												39.51	336,661,000	98.79	98.79	40	336,661,000
				07	Pembinaan lembaga ketahanan desa (LDK)danLembagaKetahananKelurahan(LKK)	Jumlah pengurus lembagakemasyarakatanyan gdilatih												0.00	-	0.00	0.00	-	-
				10	PembinaanPokjadanPokjanal Posyandu	Jumlahpenguruskaderposyanduk ecamatan/kabupatenyangdilatih												0.00	-	0.00	0.00	-	-
Rata-ratacapaiankinerja(%)																			24.70	24.70			
Predikatkinerja																			SR	SR			
			16		ProgramPengembanganLembagaEkono miPedesaan													0.00	-				DinasPemberr ayaanMeyarak at dan Desa
				02	PelatihanketerampilanMenajemenBadan UsahaMilikDesa	JumlahpengurusBumdeyang dilatih												0.00	-	0.00	0.00	-	-
				07	Monitoring,evaluasiandanpelaporan	Jumlahlaporanyangdibuat dari hasil pelaksanaanmoniev												0.00	-	0.00	0.00	-	-
				09	PembentukandanPembinaanbadanusaha milikdesa(BUMDES)bersama	JumlahBumdesbersamayang terbina												0.00	-	0.00	0.00	-	-
Rata-ratacapaiankinerja(%)																			0.00	0.00			
Predikatkinerja																			SR	SR			
			17		ProgramPeningkatan PartisipasiMasyarakatdalamMembang unDesa													0.00					DinasPemberr ayaanMeyarak at dan Desa
				05	Peningkatansaranadanprasranaperdesaan	JumlahMCKyangdibangun												19.78	841,511,000	98.92	98.92	20	841,511,000
				07	Sosialisasi penerimaanmanfaat program PAMSIMAS	Jumlahpengurus BP-SPAMSyang dilatih													0			-	-
Rata-ratacapaiankinerja(%)																				98.92	98.92		
Predikatkinerja																				ST	ST		
			18		ProgramPeningkatanKapasitasAparaturP emerintahDesa													0.00	740,165,528				DinasPemberr ayaanMeyarak at dan Desa
				02	Pelatihana aparatur pemerintahdesadalam bidangpengelolaankeuangandes	Jumlahaparaturpengelola keuangandesayangdilatih												0.00	-	0.00	0.00	-	-
				03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalambidanganajemenpemerintahande sa	JumlahpengurusBP DYangdilatih														0.00	0.00	-	-
				04	Monitoring,EvaluasiandanPelaporan	Jumlahdesa yang dibina(dievaluasi pengelolaan keuangan dan profilidesanya												15.50	5,960,000	23.84	23.84	15	5,960,000
				06	Lombadesadankelurahan	Jumlahdesayangmengikuti lomba desaTk.Kabupaten												8.99	262,186,500	99.84	99.84	9	262,186,500
				12	Penyusunanperaturanperundang-undangan desa	Jumlahnaskahrancanganperbup yangdisusun												0.73	19,892,500	73.38	73.38	1	19,892,500
				13	Penatausahaan dokumen pengelolaankeuangandes	Jumlahlaporan pertanggungjawabankeuangandes yangdiverifikasi												48.74	452,126,528	70.64	70.64	49	452,126,528
Rata-ratacapaiankinerja(%)																				44.62	44.62		
Predikatkinerja																				S	S		
			19		ProgramPeningkatan Peran PerempuanPedesaan													0.00					DinasPemberr ayaanMeyarak at dan Desa
				01	Pelatihan perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah perempuan yangdilatih dalam bidang usaha ekonomiproduktif												0.00	0	0.00	0.00	-	-
				03	Pembinaan organisasi dan kelompok perempuan untuk kesejahteraan kelurga	Jumlah organisasi perempuan yang dibina untuk kesejahteraankeuarga												92	306,162,500	85.37	85.37	92	306,162,500
Rata-ratacapaiankinerja(%)																				42.69	42.69		
Predikatkinerja																				R	R		

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				Program Pemberdayaan Adat danPengembangan Sosial Budaya MasyarakatPerdesaan														0.00	-					DinasPembd ayaanMasyarak at dan Desa
			20															0.00	-					
			02	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan AdatdanBudayaMasyarakat	Jumlah pengurus lembaga adat danbudayamasyarakatyangdilatih			orang		60	0							0.00	-	0.00	0.00	-	-	
Rata-ratacapaiankinerja(%)																				0.00	0.00			
Predikatkinerja																				SR	SR			
TOTALRATA-RATACAPAIANKINERJADANANGGARANDARISELURUH(PROGRAM1.S.DPROGRAM12)																				62.43	62.42			
PREDIKATINERJADANISELURUH PROGRAM(PROGRAM1.S.DPROGRAM12)																				S	S			
				DINASKOMUNIKASIDANINFORMATIKA																				
			01	ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran						100	879,522,000							0.00	847,861,762					DinasKomunika sidanInformatik a
			01	PenyediaanJasaSurat Menyurat	Jumlahsurat yangterdistribusi		250	-	0.00	0								0.00	0	0.00	0.00	-	-	
			02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya airdanlistrik	Jumlahrekeninglayananlistrikdante leponyangterbayarkantepat waktu		24	202,000,000	5.94	49,985,599	5.94	49,985,599	5.94	49,985,599	5.94	49,985,599	23.76	199,942,397	98.98	98.98		24	199,942,397	
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & PerizinanKendaraanDinas/ Operasional	Jumlah KIR dan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia danterbayarkantepatwaktu		1	878,000	1.00	878,000							1.00		100.00	100.00		1	878,000	
			07	PenyediaanJasaAdministrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuanganyangterbayarkantepat waktu		204	135,384,000	51.00	33,846,000	51.00	33,846,000	51.00	33,846,000	51.00	33,846,000	204.00	135,384,000	100.00	100.00		204	135,384,000	
			08	Penyediaanjasakebersihankantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yangtersediadanterbayarkantepat waktu		72	42,920,000	18.00	10,730,000	18.00	10,730,000	18.00	10,730,000	18.00	10,730,000	72.00	42,920,000	100.00	100.00		72	42,920,000	
			12	Penyediaankomponeninstalasilistrik /peneranganbangunankantor	Jumlah paket alat listrik danelektronik untuk bangunan kantoryang tersedia sesuai analisiskebutuhan		1	10,580,000			1	10,580,000					1.00	10,580,000	100.00	100.00		1	10,580,000	
			13	Penyediaan Perlengkapan dan PeralatanKantor	Jumlahalatkelengkapankantory angtersediaesuai analisis kebutuhan		45	1,250,000			45	1,250,000					45.00	1,250,000	100.00	100.00		45	1,250,000	
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan	Jumlah peraturan perundang- undanganyangtersediaesuai analisiskebutuhan		396	21,900,000			375	20,745,000					375.12	20,745,000	94.73	94.73		375	20,745,000	
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluarDaerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terregistrasi danterlaksanasesuaianalisa kebutu han		40	119,600,000	9.43	28,183,495	9.43	28,183,495	9.43	28,183,495	9.43	28,183,495	37.70	112,733,980	94.26	94.26		38	112,733,980	
			19	Peningkatan Pelayanan AdministrasiPerkantoran	Jumlah jasa administrasi, ATK,perangko, cetak, penggandaan,premi asuransi dan makan minumrapatdantamuyangtersedi a		23	318,803,000	5.38	74,595,971	5.38	74,595,971	5.38	74,595,971	5.38	74,595,971	21.53	298,383,885	93.60	93.60		22	298,383,885	
			20	PeningkatanPengelolaanBarangdanAsset	Jumlah jasa pengelola barang danassetyangterbayarkantepatwa ktu		60	26,207,000	14.33	6,261,125	14.33	6,261,125	14.33	6,261,125	14.33	6,261,125	57.34	25,044,500	95.56	95.56		57	25,044,500	
Rata-ratacapaiankinerja(%)																				88.83	88.83			
Predikatkinerja																				T	T			
			02	ProgramPeningkatan Sarana &PrasaranaAparatur			100	198,092,250									0.00	183,623,069						DinasKomunika sidanInformatik a
			07	Pengadaanperlengkapangedungkantor	Jumlah perlengkapan gedung kantoryangdiadakansesuaianalisa kebutuhan		4	5,500,000			4.00	5,500,000					4.00	5,500,000	100.00	100.00		4	5,500,000	
			09	Pengadaanperalatangedungkantor	Jumlah peralatan gedung kantoryangdiadakansesuai analisa kebutuhan		7	-									0.00	0	0.00	0.00		-	-	
			10	Pengadaanmeubeler	Jumlah meubeler kantor yangdiadakansesuaianalisa kebutu han		5	19,000,000			5.00	19,000,000					5.00	19,000,000	100.00	100.00		5	19,000,000	
			22	Pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor	Jumlahbangunankantoryang terpelihara secaranutin		1	50,000,000			0.996	49,800,000					1.00	49,800,000	99.60	99.60		1	49,800,000	
			24	Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas/operasional	Jumlahjasaervice,sukucadang, biaya88Mdansopir		1	36,000,000	0.86	31,039,815							0.86	31,039,815	86.22	86.22		1	31,039,815	
			26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedungkantor	Jumlah perlengkapan gedung kantoryangdiampilihasesuai analisa kebutuhan		11	20,000,000			8.03	14,606,004					8.03	14,606,004	73.03	73.03		8	14,606,004	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Jumlah peralatan gedung kantoryangdipeliharasesuaiana lisa kebutuhan		unit		10	15,000,000								9.91	14,860,000							9.91	14,860,000	99.07	99.07	10	14,860,000		
				42	Rehabilitas sedang/berat gedung/kantor	Jumlah gedung kantor yangdirehabilitasi sedang/berat sesuai analisiskebutuhan		item		3	52,592,250								2.78	48,817,250							2.78	48,817,250	92.82	92.82	3	48,817,250		
Rata-rata capaian kinerja (%)																										81.34	81.34							
Predikat kinerja																										T	T							
				06	Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan						106,486,000									0.00	90,993,750											Dinas Komunikasi dan Informatika		
				01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan penyelenggaraan program kegiatan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu		dokumen		4	28,311,000			3.50	24,798,250					3.50	24,798,250							3.50	24,798,250	87.59	87.59	4	24,798,250	
				02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akurat dan tepat waktu		laporan		15	11,390,000			9.70	7,364,500					9.70	7,364,500								9.70	7,364,500	64.66	64.66		
				04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akurat dan tepat waktu		laporan		15	17,576,500		9.5	11,116,000	5.2	6,096,500					14.69	17,212,500							14.69	17,212,500	97.93	97.93		
				06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu		dokumen		5	49,208,500		3		4.2	41,618,500					7.23	41,618,500							7.23	41,618,500	144.58	84.58		
Rata-rata capaian kinerja (%)																										98.69	83.69	-	-					
Predikat kinerja																										ST	T							
				07	Program Peningkatan Informasi					100	36,401,000									0.00	36,401,000												Dinas Komunikasi dan Informatika	
				01	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis WEB	Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan secara online		informasi		350	18,000,000			175.00	9,000,000	175.00	9,000,000				350.00	18,000,000							350.00	18,000,000	100.00	100.00		
				02	Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan	Jumlah pameran yang diikuti		kali		1	18,401,000			0.50	9,200,500	0.50	9,200,500				1.00	18,401,000							1.00	18,401,000	100.00	100.00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																										100.00	100.00	-	-					
Predikat kinerja																										ST	ST	-	-					
				03	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						111,112,000																						Dinas Komunikasi dan Informatika	
				05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga ASN yang disediakan sesuai kebutuhan		buah		130	24,000,000		130.00	24,000,000							130.00	24,000,000							130.00	24,000,000	100.00	100.00		
				08	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan		orang		25	87,112,000		22.13	77,111,800							22.13	77,111,800							22.13	77,111,800	88.52	88.52		
Rata-rata capaian kinerja (%)																										88.52	88.52	-	-					
Predikat kinerja																										T	T	-	-					
				15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						216,925										-												Dinas Komunikasi dan Informatika	
				02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah bimtek pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi		kali		2	18,230									0.00	-	0.00	0.00											
				03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah koordinasi Bako humas yang dilaksanakan		kali		1	27,425									0.00	-	0.00	0.00											
				04	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah regulasi pemanfaatan informasi dan teknologi yang disusun sesuai dengan analisis kebutuhan		regulasi		1	151,100																							
				08	Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Informasi Publik dan Media Center	Jumlah kegiatan pengkaji dan pengembangan sistem yang dilaksanakan		informasi		350	13,050																				-	-		
				09	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah opini dan aspirasi publik yang dikelola dan dimanfaatkan		informasi		350	7,120									0.00	-	0.00	0.00									-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0.00	0.00	-	-					
Predikat kinerja																										ST	ST	-	-					

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

			17	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi						15,733								-						Dinas Komunikasi dan Informatika
				01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah Pelatihan dan Sosialisasi yang dilaksanakan dalam bidang Teknologi Informasi		kali	2	15,733								0.00	-	0.00	0.00			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0.00	0.00				
Predikat kinerja																			SR	SR				
			18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media						114,178,000								107,678,000						Dinas Komunikasi dan Informatika
				01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah berita/informasi positif yang didistribusikan melalui radio suarabumi lalinrang		Informasi	350	112,178,000			164.86	52,839,000	164.86	52,839,000		330	105,678,000	94.21	94.21			
				03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan masyarakat	Jumlah kegiatan penyuluhan informasi masyarakat		Media	5	2,000,000			5.00	2,000,000				5	2,000,000	100.00	100.00			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			97.10	97.10				
Predikat kinerja																			T	T	-	-		
			19	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Komunikasi dan Informatika						1,629,000,000							0.00	1,628,556,445						Dinas Komunikasi dan Informatika
				02	Pembangunan akses komunikasi dan informatika	Jumlah PD yang terintegrasi jaringan interkoneksi		OPD	43	1,629,000,000			21.49	814,278,223	21.49	814,278,223		43	1,628,556,445	99.97	99.97			
				04	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan	Jumlah Infrastruktur jaringan interkoneksi yang dipelihara secara rutin		OPD	43	-								0	-	0.00	0.00			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			99.97	99.97	-	-		
Predikat kinerja																			ST	ST	-	-		
			20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi						33,668							0.00	-						Dinas Komunikasi dan Informatika
				01	Pengelolaan Layanan Sistem Pemerintahan Terintegrasi	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi		sistem	5	33,668								-	-	0.00	0.00	-	-	
				02	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi	Jumlah Infrastruktur jaringan interkoneksi yang dipelihara secara rutin		OPD	43	15,280								-	-	0.00	0.00	-	-	
				03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Data dan Informasi	Jumlah Pelaksanaan pengembangan sistem keamanan data dan informasi		kali	1	32,118								-	-	0.00	0.00	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0.00	0.00	-	-		
Predikat kinerja																			SR	SR	-	-		
			16	Program Pengembangan dan Pengolahan Persandian						7,036,000							0.00	7,036,000						Dinas Komunikasi dan Informatika
				01	Pengembangan, Pengolahan dan Analisis Persandian	Jumlah informasi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah yang didistribusikan tepat waktu		informasi	1500	7,036,000			1500	7,036,000				1,500	7,036,000	100.00	100.00	1,500	7,036,000	
				02	Pengembangan sarana dan prasarana persandian	Jumlah sarana dan prasarana persandian yang dipelihara		unit	3									-	0	0.00	0.00	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			50.00	50.00	-	-		
Predikat kinerja																			S	S				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGA RAN DI SELURUH (PROGRAM 11.S.D PROGRAM 11.3)																			68.82	67.35				
PREDIKAT KINERJA DI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 11.S.D PROGRAM 11.3)																			S	S				
			15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan						76,291,750								73,308,000						
				01	Pembangunan Database Informasi Kearsipan	Jumlah dokumen RAdan Perda Kearsipan/Peraturan kearsipan disusun		dokumen	2	-								0.00	0	0.00	0.00	-	-	
				02	Pengumpulan Data	Jumlah data arsip sekolah, SKPD, arsip provinsi, ANRI yang berhasil dikumpulkan		Arsip	15	13,253,250			12.22	10,800,000				12.22	10,800,000	81.49	81.49	12	10,800,000	
				04	Penyusunan Sistem Katalog Data	Jumlah katalog data arsip yang berhasil disusun		katalog	2	3,300,000			2	3,225,000				1.95	3,225,000	97.73	97.73	2	3,225,000	
				07	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	Jumlah jaringan kearsipan yang dipelihara		jaringan	1	6,000,000			1	6,000,000				1.00	6,000,000	100.00	100.00	1	6,000,000	
				08	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah data arsip sekolah, SKPD, arsip provinsi, ANRI yang berhasil dikumpulkan		Arsip	15	8,800,000			15	8,800,000				15.00	8,800,000	100.00	100.00	15	8,800,000	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				09	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Jumlah sarana layanan informasi arsip yang diadakan				3	8,780,000							3.00	8,780,000	100.00	100.00	3	8,780,000	
				11	Pengawasan Kearsipan Internal	Jumlah SKPD/Lembaga Pemerintah yang diawasi pelaksanaan pengelolaan/pemetaan arsip sesuai prosedur dan sistematis				15	9,779,500							14.30	9,324,000	95.34	95.34	14	9,324,000	
				12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah SKPD/Lembaga Pemerintah yang diasistensi tentang tata kelolanya				15	26,379,000							15.00	26,379,000	100.00	100.00	15	26,379,000	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				69.80	69.80			
Predikat Kinerja																				S	S			
			16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah							62,523,325								62,340,000					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				03	Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika	Jumlah data arsip sekolah, SKPD, Arsip Provinsi dan ANRI yang diilhami di dalam bentuk elektronik				70000	15,359,000							70000.00	15,359,000	100.00	100.00	70,000	15,359,000	
				05	Pengklasifikasian Data	Jumlah data arsip sekolah, SKPD, Arsip Provinsi, ANRI yang diklasifikasi berdasarkan pola klasifikasi arsip				5000	17,223,000			35,000	7,679,500	35,000	7,679,500	4999.42	17,221,000	99.99	99.99	4,999	17,221,000	
				06	Penataan dan Penyimpanan Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang ditata dan disimpan sesuai dengan aturan/keputusan yang berlaku				1000	3,138,000			2,500	8,610,500	2,500	8,610,500	1000.00	3,138,000	100.00	100.00	1,000	3,138,000	
				07	Penataan dan penyimpanan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang disimpan				1000	2,493,500			1,000	3,138,000	1,000	2,493,000	999.80	2,493,000	99.98	99.98	1,000	2,493,000	
				08	Pemeliharaan rutin berkala arsip daerah	Jumlah data arsip sekolah, SKPD, arsip provinsi dan ANRI yang terpeliharakan				1	21,820,825			0	10,910,000	0	10,910,000	1.00	21,820,000	100.00	100.00	1	21,820,000	
				09	Autentikasi dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip daerah yang disahkan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku				2000000	2,489,000			1,855,364	2,309,000			1855363.60	2,309,000	92.77	92.77	1,855,364	2,309,000	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				98.79	98.79			
Predikat Kinerja																				ST	ST			
					PERPUSTAKAAN						437,227,425								437,842,000					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																				
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan				rekening/bulan	24	35,088,000		10.20	14,914,000	9.82	14,368,000	20.02	29,272,000	83.42	83.42	20	29,272,000	
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK yang diperpanjang				STNK	6	6,000,000		1.24	1,031,250	1.24	1,031,250	4.96	6,125,000	82.50	82.50	6	4,125,000	
				07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan tepat waktu				orang/bulan	120	30,827,000		17.88	19,560,000	17.50	40,885,000	116.11	126,587,000	96.76	96.76	116	126,587,000	
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan dibayarkan tepat waktu				orang/bulan	60	11,864,000		20.03	7,300,000	21.68	7,900,000	60.00	21,864,000	100.00	100.00	60	21,864,000	
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia				buah	101	2,844,000			101	2,844,000		101.00	2,844,000	100.00	100.00	101	2,844,000	
				13	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan				buah/m	130	1,000,000			130	1,000,000		130.00	1,000,000	100.00	100.00	130	1,000,000	
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				Bahan bacaan/bulan	96	14,280,000		44	6,525,000	44	6,525,000	87.73	13,050,000	91.39	91.39	88	13,050,000	
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang dilakukan				kali	40	85,332,425		19.99	42,855,500	19.99	42,855,500	39.99	85,311,000	99.97	99.97	40	85,311,000	
				19	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi kantor yang dilakukan				layanan	5	141,587,000			5	133,884,000		4.73	133,884,000	94.56	94.56	5	133,884,000	
				20	Peningkatan pengelolaan barang dan aset	Jumlah jasa pengelola barang dan aset yang dibayarkan tepat waktu				orang/bulan	24	19,905,000		6.23	5,170,000	3.89	1,225,000	6.94	19,905,000	100.00	100.00	24	19,905,000	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				94.86	94.86			
Predikat Kinerja																				ST	ST			
			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							150,852,000								145,410,000					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan				unit	2	16,072,000			2	16,072,000		2.00	16,072,000	100.00	100.00	2	16,072,000	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	unit	6	40,780,000	1.56	10,583,000	1.65	11,212,000	2.76	18,771,000		5.97	40,566,000	99.48	99.48	6	40,566,000		
				26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	unit	18	2,000,000			18	2,000,000				18.00	2,000,000	100.00	100.00	18	2,000,000		
				28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit	25	17,000,000	2.94	2,000,000	7.21	4,900,000	14.71	10,000,000		24.85	16,900,000	99.41	99.41	25	16,900,000		
				42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab	unit	1	75,000,000	0.27	20,000,000	0.53	40,000,000	0.13	9,872,000		0.93	69,872,000	93.16	93.16	1	69,872,000		
Rata-rata Capaian Kinerja(%)																		98.41	98.41					
Predikat Kinerja																		ST	ST					
				06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			-	127,354,000								0.00	124,819,000					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	laporan	2	41,483,000	0.08	1,630,000	0.86	17,755,000	0.52	10,835,500	0.52	10,835,500	1.98	41,056,000	98.97	98.97	2	41,056,000	
				02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	laporan	1	4,070,000			0.90	3,665,000				0.90	3,665,000	90.05	90.05	1	3,665,000		
				04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	laporan	1	12,372,000	0.65	8,060,000	0.35	4,312,000				1.00	12,372,000	100.00	100.00	1	12,372,000		
				06	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun	dokumen	5	69,429,000	0.38	5,234,000	0.66	9,139,000	1.92	26,676,500	1.92	26,676,500	4.88	67,726,000	97.55	97.55	5	67,726,000	
Rata-rata Capaian Kinerja(%)																		96.64	96.64					
Predikat Kinerja																		ST	ST					
				07	Program Peningkatan Informasi			-	11,165,000								0.00	10,991,000					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				02	Penyediaan dan Pemeliharaan Pameran	Jumlah pameran yang diikuti	kali	1	11,165,000	0.98	10,991,000						0.98	10,991,000	98.44	98.44	1	10,991,000		
Rata-rata Capaian Kinerja(%)																		98.44	98.44					
Predikat Kinerja																		ST	ST					
				08	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur			-	103,224,000								0.00	103,214,000					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah baju olahraga yang diadakan	pasang	69	19,800,000	69.00	19,800,000						69.00	19,800,000	100.00	100.00	69	19,800,000		
				03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan	orang	15	83,424,000			15	83,414,000				15.00	83,414,000	99.99	99.99	15	83,414,000		
Rata-rata Capaian Kinerja(%)																		99.99	99.99					
Predikat Kinerja																		ST	ST					
				16	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			-	37,229,000								0.00	36,529,000					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				02	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah peserta lomba berprestasi tingkat SD dan pelatihan pendamping guru	siswa/guru	95	25,274,000	47.41	12,612,000	47.41	12,612,000				94.81	25,224,000	99.80	99.80	95	25,224,000		
				03	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah perpustakaan desa/kecamatan dan sekolah yang diberikan pembinaan langsung	perpustakaan	5	8,355,000			5	7,840,000				4.69	7,840,000	93.84	93.84	5	7,840,000		
				04	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Sekolah	Jumlah perpustakaan desa sebagai pusat informasi dan kegiatan masyarakat	perpustakaan	1	3,600,000			1	3,465,000				0.96	3,465,000	96.25	96.25	1	3,465,000		
				05	Monitoring, evaluasi dan laporan	Jumlah perpustakaan yang tersedia	data perpustakaan	30	-								0	-	-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja(%)																		96.63	96.63					
Predikat Kinerja																		ST	ST					
				17	Program Layanan Perpustakaan, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka			-	75,040,000								0.00	74,760,000					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				01	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah kunjungan pemustaka, perpustakaan keliling	Kunjungan	36,202	75,040,000			18,033	37,380,000	18,033	37,380,000		36066.92	74,760,000	99.63	99.63	36,067	74,760,000		
				02	Penyediaan Bahan Pustaka pada Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah pengadaan bahan pustaka yang diadakan	Eksamplar	4,200	-								0.00	0	0.00	0.00	-	-		
				04	Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	Eksamplar	2000	12,507,500			1,000	6,253,500	1,000	6,253,500		1999.92	12,507,000	100.00	100.00	2,000	12,507,000		
				05	Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca	Jumlah judul bahan pustaka yang diolah menjadi digital	file	100	5,477,000			100	5,477,000				100.00	5,477,000	100.00	100.00	100	5,477,000		
				06	Penyediaan sarana layanan informasi perpustakaan	Jumlah sarana informasi layanan perpustakaan yang diadakan	sarana	4	8,000,000			4	8,000,000				4.00	8,000,000	100.00	100.00	4	8,000,000		

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

[illegible]

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ADANA NGARAN DAN RISE LUH (PROGRAM 1.5.D PROGRAM 1.1)	66.74	66.74			
PREDIKAT NINERJADARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1.5.D PROGRAM 1.1)	SR	SR			

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.1 Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Berdasarkan Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang, dijabarkan dalam permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Terbatas.
3. Kurangnya Peran Serta Lembaga Non Pemerintahan dalam Pembangunan Daerah .
4. Peran serta masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif berdaya saing masih rendah.
5. Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur antar wilayah terutama pada wilayah pegunungan.
6. Minimnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga kestabilan ekosistem lingkungan
7. Belum Tersedianya Fasilitas Pendidikan, pelatihan dan pengembangan pada sektor pertanian

Penjelasan lebih lanjut atas permasalahan pokok pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan inti dari pelaksanaan pembangunan daerah. Pengelolaan Pemerintahan yang baik menciptakan pelayanan publik yang prima sehingga menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Dari masalah pokok Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, terdapat beberapa masalah dan akar masalah, antara lain :

a. Belum terwujudnya pemerintahan yang melayani dan akuntabel

Salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel adalah perencanaan serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian kinerja guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Untuk mengukur tingkat akuntabilitas pemerintah maka dapat dilihat dari nilai AKIP. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia diukur dengan mengevaluasi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang diterapkan oleh Kabupaten. Nilai evaluasi AKIP Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2019 adalah 61,54 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B masih belum memenuhi target yaitu nilai A, sehingga masih perlu dilakukan peningkatan program atau kegiatan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Namun demikian bila dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir maka realisasi kinerja indikator di tahun 2019 telah menunjukkan peningkatan. Pada indikator di tahun 2019 capaian realisasi 61,54 dengan persentase 76,92% atau berpredikat “Tinggi”.

Disamping itu, belum maksimalnya penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dimana yang aktif bekerja dan yang kurang aktif bekerja menerima hasil yang sama, turut menjadi penyebab rendahnya etos kerja pegawai. Dari sisi akuntabilitas, ukuran kinerja pegawai kurang jelas, baik dalam dokumen perencanaan maupun anggaran. Paradigma bahwa berkinerja adalah kalau sudah menghabiskan uang, sudah melaksanakan kegiatan, sudah menghasilkan produk masih melekat. Hal ini terlihat dari penggunaan indikator “terlaksananya”, masih banyak digunakan sebagai keluaran (output) suatu kegiatan.

b. Keterbatasan SDM Aparat Pemerintah Kabupaten Terutama Pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan / Desa

Aparatur Pemerintah merupakan subyek utama dalam pembangunan daerah, beberapa kendala yang dihadapi saat ini adalah masih adanya aparat pemerintah, terutama pada tingkat kecamatan dan kelurahan / desa yang tidak memahami akan

tugas pokok dan fungsinya yang secara langsung berdampak pada pelayanan publik. Disamping itu masih terdapat aparatur yang tidak menguasai teknologi informasi, sedangkan kondisi pada era saat ini penguasaan teknologi informasi merupakan hal yang sangat vital bagi aparatur pemerintah.

Tabel 2.196
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel	Perencanaan –Penganggaran belum efektif dan efisien
	Masih berlikunya prosedur birokrasi pada pelayanan publik
	Masih Kurangnya Kesadaran dan Kedisiplinan Aparatur pemerintahan
Keterbatasan SDM Aparat Pemerintah Kabupaten Terutama Pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan / Desa	Masih rendahnya kinerja aparatur pemerintah

2. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Terbatas

Secara teoritis Pembangunan mensyaratkan tersedianya Sumber daya Manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia ini berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan yang mana sebagai subyek pembangunan harus memiliki keahlian tertentu guna mencapai target pembangunan.

Tabel 2.197
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Pinrang, Propinsi sulawesi Selatan dan Nasional

NO	Wilayah	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang	69,42	69,90	70,62	71,12	71,26
2	Sulawesi Selatan	69,76	70,34	70,90	71,66	71,93
3	Nasional	70,18	70,81	71,38	71,92	71,94

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2021

Berdasarkan Tabel di atas IPM Kabupaten Pinrang masih berada dibawah IPM Propinsi Sulawesi Selatan dan IPM Nasional sehingga perlu meningkatkan kualitas manuasia yang berdaya saing. Permasalahan kualitas sumber daya manusia yang terbatas memiliki dampak bahwa sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan menyebabkan rendahnya daya saing sumber daya manusia tersebut. Dari masalah

utama kualitas sumber daya manusia yang terbatas, terdapat beberapa permasalahan yang memicu persoalan utama, antara lain:

a. **Belum Optimalnya Pelayanan Bidang Pendidikan**

Kualitas sumber daya manusia suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan daerah tersebut. Belum optimalnya pelayanan bidang pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Permasalahan pelayanan pendidikan kabupaten pinrang menyangkut kualifikasi guru / tenaga pendidik, distribusi guru / tenaga pendidik yang tidak merata bahkan cenderung minim pada wilayah terpencil di kabupaten pinrang dan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan pada wilayah terpencil kabupaten pinrang.

Oleh karena itu nilai indeks pendidikan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan ditahun 2020 masih berada dibawah dari nilai Indeks Pendidikan Provinsi pada tahun 2017 yakni 63,34 sehingga perlu dilakukan pembenahan yang berkelanjutan. Akan tetapi dari nilai tersebut terjadi peningkatan nilai indeks pendidikan di Kabupaten Pinrang dari 62,89 di tahun 2019 meningkat menjadi 62,95 di tahun 2020.

Tabel 2.198
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Pinrang	7,48	7,54	7,84	7,85	7,86
Sulawesi Selatan	7,75	7,95	8,02	8,26	8,38
Nasional	7,95	8,10	8,17	8,34	

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Rata rata lama sekolah kabupaten pinrang mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga mencapai 7,86 pada tahun 2020, yang berarti penduduk kabupaten pinrang rata – rata mengenyam jenjang pendidikan selama 7,86 tahun. Meskipun demikian pencapaian tersebut masih berada dibawah rata rata lama sekolah propinsi sulawesi selatan yang mencapai 8,29 tahun dan rata rata lama sekolah nasional yang mencapai 8,34 tahun.

Tabel 2.199
Perbandingan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Pinrang	13,18	13,19	13,20	13,22	13,32
Sulawesi Selatan	13,16	13,28	13,34	13,36	13,45
Nasional	12,72	12,85	12,91	12,95	

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2021

Berdasarkan tabel pembandingan diatas, angka harapan lama sekolah cukup tinggi pada lama jenjang pendidikan yang akan ditempuhnya. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pinrang mencapai 13,22 tahun yang mengindikasikan bahwa seseorang yang berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 13 – 14 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari Angka Harapan Lama Sekolah Nasional namun masih berada di bawah Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Belum Optimalnya Pelayanan Bidang Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang vital dalam pembangunan daerah. Apalagi dimasa pandemi seperti saat ini, segala aspek sangatlah berpengaruh terutama di bidang kesehatan. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan meningkatkan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas serta posyandu, sebaran distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata khususnya pada wilayah terpencil dan meningkatkan kualifikasi tenaga kesehatan. Masalah di bidang pembangunan kesehatan di kabupaten Pinrang masih membutuhkan perhatian terutama mengenai sarana prasarana kelengkapan alat medis yang tersedia pada rumah sakit dan Puskesmas. Di samping itu masih terdapat masyarakat yang bermukim di wilayah pegunungan yang belum mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana yang diharapkan.

Di Kabupaten Pinrang nilai Indeks Kesehatan pada tahun 2019 berada pada angka 75,98 dan meningkat sebesar 76,32 di tahun 2020. Akan tetapi nilai ini masih berada dibawah dari target sehingga diperlukan perhatian lebih mengingat pelayanan di bidang kesehatan saat ini sangatlah penting.

Tabel 2.200
Perbandingan Angka Harapan Hidup
Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Pinrang	68,55	68,68	68,98	69,39	69,61
Sulawesi Selatan	69,76	70,34	70,08	70,43	70,57

Nasional	70,18	70,81	71,20	71,34	
----------	-------	-------	-------	-------	--

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2021

Angka Harapan Hidup Kabupaten Pinrang tiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2016 Mencapai 68,55 dan tahun 2019 mencapai 69,39. Jika dibandingkan pencapaian propinsi Sulawesi Selatan sebesar 70,43 dan Nasional sebesar 71,34 maka Kabupaten Pinrang masih cukup tertinggal.

Tabel 2.201
Rumusan Permasalahan
“Kualitas Sumber daya Manusia Yang Masih Terbatas”

Permasalahan	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pelayanan Bidang Pendidikan	Kualitas Tenaga Pendidik belum sepenuhnya terqualifikasi baik
	Distribusi guru / tenaga pendidik yang tidak merata bahkan cenderung minim pada wilayah terpencil
	Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan pada wilayah terpencil
Belum Optimalnya Pelayanan Bidang Kesehatan	Minimnya sarana prasarana kesehatan terutama pada wilayah terpencil
	Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata bahkan cenderung minim pada wilayah terpencil
	Belum meratanya pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat

3. Kurangnya Peran Serta Lembaga Non Pemerintahan dalam Pembangunan Daerah

Lembaga non pemerintah memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat yang kuat dan mampu memperjuangkan hak – hak masyarakat dalam kehidupan bernegara. Lembaga non pemerintah bertujuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya di Kabupaten Pinrang. Pembentukan lembaga non pemerintah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah. Masih kurangnya peran serta lembaga non pemerintah dalam pembangunan di daerah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan peran serta tersebut sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Tabel 2.202
Lembaga Sosial yang ada di Kabupaten Pinrang

Indikator	2019	2020
Cakupan Lembaga Sosial yang diakomodir dalam pelaksanaan pembangunan Daerah	168	181
Presentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang Aktif	81	73

Sumber : Kantor Badan Kesbang,Pol&Linmas, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 terdapat 168 lembaga sosial yang diakomodir oleh pemerintah dengan presentasi lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif sekitar 81%. Sedangkan di tahun 2020 jumlah lembaga sosial yang diakomodir oleh pemerintah mengalami peningkatan sebesar 181 tetapi tingkat partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif mengalami penurunan sebesar 73%. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang dimana jumlah lembaga sosialnya mengalami peningkatan akan tetapi partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif mengalami penurunan. Hal ini kemudian menjadi dasar dalam perumusan masalah yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.203
Rumusan Permasalahan
“Peran Serta Lembaga non Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah”

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya peranan Lembaga Non Pemerintah dalam pembangunan	Belum optimalnya partisipasi dan kontribusi lembaga non pemerintah terhadap pembanagunan di Kabupaten Pinrang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa akar masalah dari belum optimalnya peranan Lembaga Non Pemerintah dalam pembangunan adalah partisipasi dan kontribusi lembaga non pemerintah terhadap pembangunan masih dirasa kurang. Disamping itu rendahnya partisipasi masyarakat membuat lembaga non pemerintah semakin terbatas. Dengan adanya permasalahan ini maka perlu dilakukan pembenahan dan sosialisasi agar lembaga sosial kemasyarakatan bisa lebih aktif lagi.

4. Peran serta masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif berdaya saing masih rendah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang mengalami kontraksi yang sangat signifikan dari 6,53% di tahun 2019 menjadi 0,44% di tahun 2020. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini terjadi dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda

seluruh dunia sehingga berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi dan kabupaten lain yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang tergolong cukup baik ditengah krisis ekonomi akibat pandemi ini.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang di tahun 2020 masih lebih baik di bandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan ditahun 2020 yang mencapai angka negatif yaitu -0,7%. Hal ini tak lepas dari pembentukan PDRB Kabupaten Pinrang yang paling besar berada pada Sektor Pertanian sebesar 45,22% yang tidak terlalu terdampak pandemi covid-19. Pada urutan kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan komposisi distribusi sebesar 14.42%. Menduduki peringkat ketiga terbesar dalam memberikan komposisi distribusi bagi PDRB Kabupaten Pinrang adalah Konstruksi sebesar 10,78% sedangkan sektor lainnya memberikan andil yang relatif kecil yaitu pada kisaran dibawah 7%.

Dengan adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi di kabupaten pinrang membuat tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 2,91% ditahun 2019 menjadi 4,19% di tahun 2020 dengan presentase penduduk miskin juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dari 8,46% di tahun 2019 menjadi 8,86% di tahun 2020. Hal ini terjadi karena banyaknya pegawai ataupun pekerja yang di PHK oleh perusahaan dan retail yang bangkrut ataupun gulung tikar karena terkena dampak dari pandemi covid-19.

Pengembangan perekonomian lokal daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia merupakan salah satu cara yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun selama ini memiliki program – program yang memberdayakan masyarakat dalam perekonomian lokal tapi tidak maksimal implementasinya. Dalam mengembangkan usaha produktif berdaya saing maka sarana dan prasarana yang menunjang perputaran ekonomi khususnya UMKM dan industri kreatif di Kabupaten Pinrang perlu ditingkatkan. Adapun UMKM yang ada diKabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Usaha mikro dan usaha kecil yang ada di Kabupaten Pinrang dari tahun 2016 mengalami peningkatan dari 21.161 usaha menjadi 21.958 usaha di tahun 2020. Hal ini tak lepas dari adanya regulasi pemerintah dalam pendelegasian wewenang untuk izin usaha kepada camat agar memudahkan dalam penambahan maupun penguatan akses terhadap BUMN. Walaupun terjadi peningkatan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang tetapi hal ini belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja. Hal ini dapat terlihat dari jumlah pengangguran terbuka dan presentase

penduduk miskin yang cukup meningkat. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi stagnasi dan tidak terjadi penambahan usaha. Stagnasi ini merupakan salah satu dampak dari pandemi covid-19 yang menyerang hampir seluruh aspek kehidupan salah satunya sektor usaha mikro (UMKM). Adapun rumusan masalah yang dapat dilihat selain karena adanya pandemi covid-19 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.204
Rumusan Permasalahan
“Peran serta masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif berdaya saing masih rendah”

Permasalahan	Akar Masalah
Peningkatan produksi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan belum optimal	Belum efektifnya pemanfaatan potensi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan
Potensi Pariwisata belum dikelola dengan maksimal	Beberapa Lokasi Pariwisata Bukan Aset Pemerintah Daerah
	Pembinaan yang masih minim terhadap SDM Pariwisata
Peranan Koperasi dan UMKM dalam menunjang perekonomian daerah masih rendah	UMKM belum bisa menyerap banyak tenaga kerja
	Belum optimalnya Pembinaan Koperasi dan UMKM oleh Pemerintah Daerah

5. Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur antar wilayah terutama pada Wilayah Pinrang Bagian Utara

Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.961,77 km² yang secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan dengan wilayah pesisir seluas 1.457,19 km² dan garis pantai yang cukup panjang yakni 101 km serta memiliki wilayah pegunungan yang cukup luas membuat potensi sumber daya alam di Kabupaten Pinrang sangat baik untuk dikembangkan. Akan tetapi dengan kondisi wilayah yang sangat luas tersebut dan dengan kondisi topografi yang berbeda serta keberagaman sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beragam pula bisa menimbulkan ketidakseimbangan dan kesenjangan perkembangan wilayah antar kecamatan terutama wilayah Kabupaten Pinrang bagian utara yang memiliki topografi pegunungan dengan ketinggian wilayah berada diantara 2 – 1.908 mdpl.

Hal ini menjadikan Pinrang bagian utara memerlukan penanganan khusus dalam hal peningkatan aksesibilitas ke permukiman, sarana kesehatan, dan pendidikan karena postensi luas wilayah dan sumber daya alam di pinrang utara ini terbilang cukup besar sehingga perlu perhatian lebih agar aksesibilitas masyarakat dari tempat produksi ke tempat pengolahan atau pusat perdaganganpun ke fasilitas kesehatan dan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini masalah yang menyebabkan kesenjangan pembangunan pada Kabupaten Pinrang :

a. Kualitas prasarana dan sarana Infrastruktur transportasi pada wilayah pegunungan.

Kondisi wilayah dengan topografi pegunungan dan berbukit memiliki tingkat kesulitan tersendiri yang relatif berat, tentu membutuhkan perhatian dan kesungguhan guna mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, sarana/prasarana dalam rangka mendukung mobilitas dan minat masyarakat menggerakkan sektor – sektor produktif, pelaksanaan berbagai layanan publik secara cepat, tepat, dan lancar, serta distribusi barang dan jasa terutama dari dan ke pelosok pegunungan yang jauh dan terpencil.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 823,64 km di tahun 2019 menjadi 566,38 km di tahun 2018. Hal ini dikarenakan adanya kondisi jalan yang rusak, rusak sedang dan rusak berat serta perubahan standar klasifikasi jalan yang menyebabkan presentase jalan kabupaten kondisi baik menurun drastis. Terjadi peningkatan panjang jalan kondisi mantap di wilayah Pinrang Utara dari 163,82 km di tahun 2018 menjadi 204,54 km di tahun 2020. Akan tetapi peningkatan panjang jalan kondisi mantap ini masih kurang dibanding dengan total keseluruhan jalan yang ada di wilayah Pinrang Utara yaitu 392,70 km dengan persentase porsi panjang jaringan jalan kualifikasi mantap sebesar 52,08% dari total keseluruhan panjang jalan. Dengan kondisi jalan mantap di wilayah Pinrang Utara yang hanya mencapai setengah dari total panjang jalan diharapkan dapat menjadi perhatian lebih agar aksesibilitas masyarakat di daerah tersebut dapat berjalan dengan lancar dan perputaran ekonominya dapat berjalan dengan baik.

b. Belum Meratanya Ketersediaan Sarana Prasarana Publik

Kondisi wilayah Kabupaten Pinrang yang luas dan dengan topografi yang beraneka ragam menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana publik yang memadai. Kondisi ini membuat sarana prasarana publik di Kabupaten Pinrang belumlah merata, masih terlihat ketimpangan ketersediaan sarana publik antar wilayah kecamatan yang berada sekitaran pusat pemerintahan kabupaten dengan kecamatan yang letaknya berjauhan dengan pusat pemerintahan kabupaten.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk sangatlah bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari rasio dua tahun terakhir yakni pada tahun 2018 rasio rumah sakit per satuan penduduk berada pada angka 0,0010 % dan terus meningkat pada tahun 2019 sebesar 0,01% kemudian menurun sebesar 0,007% di tahun 2020. Hal ini kemudian menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan.

Rasio dan jumlah bangunan sekolah dari tahun ke tahun sangat bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah dari 5 tahun terakhir naik sebesar 309,30% di tahun 2016, kemudian naik 380,27% di tahun 2017, lalu di tahun 2018 sebesar 382,12%, di tahun 2019 sebesar 386,00% dan terakhir 396,55% di tahun 2020. Walaupun rasio ketersediaan sekolah angkanya cenderung meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi terdapat stagnasi jumlah bangunan sekolah pada tahun 2018 dan 2019 yaitu 2,728 bangunan dan tidak mengalami penambahan maupun penurunan jumlah bangunan sekolah. Hal ini dapat terjadi karena berkurangnya jumlah penduduk usia sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang ada di wilayah Kabupaten Pinrang. Selain itu, permasalahan pendidikan lainnya mencakup ketimpangan jumlah sekolah yang ada dipusat kota kabupaten dengan kecamatan yang berada jauh dari pusat kota kabupaten padahal jumlah penduduk usia sekolah juga banyak berada di kecamatan yang jaraknya jauh dari kota kabupaten. Penyebaran jumlah bangunan sekolah di setiap kecamatan yang masih belum merata mem butuhkan perhatian lebih khususnya wilayah yang sebaran fasilitas pendidikannya masih rendah.

Tabel 2.205
Rumusan Permasalahan
Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur antar wilayah terutama pada Wilayah pegunungan

Permasalahan	Akar Masalah
Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan pada wilayah pegunungan Masih Kurang	Kondisi jalan rusak masih tinggi terutama pada wilayah pegunungan
	Minimnya infrastruktur Sarana dan Prasarana Perhubungan
Belum Meratanya Ketersediaan Sarana Prasarana Publik	akses dan jaringan jalan yang masih minim di wilayah pegunungan
	Kepadatan penduduk yang tidak merata
	Faktor ekonomi dan kesenjangan pendapatan antar penduduk

6. Minimnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga kestabilan ekosistem lingkungan

Menjaga kestabilan ekosistem lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk saat ini karena kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung. Di Indonesia permasalahan lingkungan hidup paling sering terjadi karena kondisi iklim dan geografis yang berada di garis khatulistiwa dan lempengan bumi sehingga bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan pencemaran lingkungan sangat sering terjadi. Disamping karena faktor alam, kesadaran masyarakat mengenai lingkungan di Indonesia juga sangatlah rendah

sehingga banjir, tanah longsor, abrasi, pencemaran lingkungan dan kebakaran hutan sering terjadi bukan hanya karena faktor alam akan tetapi lebih banyak sumbernya datang dari faktor manusianya yang tidak memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya lingkungan untuk kehidupan kita saat ini dan yang akan datang.

Di Kabupaten Pinrang terdapat 5 jumlah ancaman bencana yang biasa terjadi diantaranya angin kencang, kebakaran, banjir, abrasi dan tanah longsor. Kabupaten Pinrang ditahun 2019 terjadi 65 kali bencana di Kabupaten Pinrang dan meningkat di tahun 2020 menjadi 82 kejadian. Adanya peningkatan kerentanan bencana yang terjadi di Kabupaten Pinrang dua tahun terakhir mengharuskan Pemerintah untuk mempersiapkan segala elemen di masyarakat maupun program dan kegiatan untuk menghadapi bencana yang dapat terjadi. Dalam hal ini kesiapsiagaan atau mitigasi bencana di Kabupaten Pinrang perlu ditingkatkan mengingat indeks resiko bencana di Kabupaten Pinrang relatif tinggi yakni 162,5 di tahun 2019 dan meningkat menjadi 205 di tahun 2020.

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana adalah dengan menjaga kestabilan ekosistem lingkungan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan untuk keberlangsungan hidup dsekarang dan dimasa yang akan datang. Dalam menjaga ekosistem lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang bertindak dengan membuat regulasi mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dan telah dilaksanakan dengan memenuhi presentase tersebut yakni 36,84%. Akan tetapi angka tersebut tidak berubah selama dua tahun terakhir ini yaitu tetap sama di posisi 36,84% di tahun 2019 dan di tahun 2020. Tentu untuk mendapatkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan peranan masyarakat agar serta menjaga ekosistem lingkungan demi kebaikan bersama.

Tabel 2.206
Isu Lingkungan Eksisting

No	Permasalahan Lingkungan	Lokasi	Fokus Isu Lingkungan	Keterangan
1	Pengelolaan sampah yang belum optimal	Kawasan Perkotaan (3 kecamatan : Sawitto, Tiroang, Paleteang)	Belum optimalnya pengelolaan sampah	Masih terbatasnya jumlah TPS didaerah perkotaan, Jumlah petugas kebersihan yang kurang, Kesadaran masyarakat yang masih lemah, lahan untuk TPS masih memakai lahan masyarakat
2	Penanganan sampah di Pasar	diluar kawasan perkotaan (pasar pekamata,bunging, mt.sompe, teppo)	Belum optimalnya pengelolaan sampah	pengelolaan sampah diluar kawasan perkotaan belum tertangani, belum ada

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

No	Permasalahan Lingkungan	Lokasi	Fokus Isu Lingkungan	Keterangan
				TPS di pasar, jumlah petugas
3	Pencemaran Udara	di desa walimpu	Pencemaran Udara	karena bau dari TPA
4	Banjir di lingkungan To'e	Kec. Tiroang desa Toe	Banjir	Rusaknya daerah hidrologi (DAS rusak) sungai akibat penebangan pohon, kesadaran masyarakat memelihara/menjaga tanggul masih kurang, kesadaran masyarakat membuang sampah disungai masih kurang, pergerakan tanah yang labil sehingga mengakibatkan sedimentasi pada daerah aliran sungai yang tinggi
5	Kawasan hutan lindung di Batu lappa	Desa kasilarau	Alih Fungsi Lahan	Permukiman berada di kawasan hutan sehingga ada konflik pembangunan infrastruktur, Penetrasi dari aktivitas Pembukaan lahan yang bersentuhan dengan kawasan hutan, Izin pinjam pakai di kawasan batu lappa dan izin pinjam pakai di kawasan lembang (pembangunan PLTA) sampai sekarang belum ada,
6	Penebangan pohon	Watang Sawitto Kec. Paleteang	Penebangan Pohon	Pembersihan/pemotong pohon oleh masyarakat
7	Pencemaran udara di sekitar tempat pabrik penggiling padi	Kec. Lanrisang, Kec Mt.bulu, Kec. Cempa	Pencemaran Udara	Hasil penggilingan sekam padi (gaba) yang mencemari udara di sekitar pada musim kering, dan menyebabkan gatal-gatal karena banyak lokasi penggiling berada pada pinggir sungai, tidak ada lokasi tertentu untuk tempat penggilingan padi, penggilingan gaba ada dimana-mana dan tidak teratur/terkendali. perlu ada solusi untuk mengatasi limbah sekam (teknologi dan tata kelola pemanfaatan sekam)

No	Permasalahan Lingkungan	Lokasi	Fokus Isu Lingkungan	Keterangan
8	Pembangunan gudang di kawasan perkotaan	Kel. Coro wali Kec. Watangsawito	Pembangunan Gudang	dibangun oleh masyarakat (pengusaha) yang digunakan untuk material bangunan
9	Aksesibilitas ke kawasan wisata wakka yang belum memadai	Kec. Cempa	Aksesibilitas	sarana penataan pariwisata yang masih minim, Jembatan yang sempit
10	alih fungsi lahan pangan (pertanian menjadi pemukiman)	Kec. Watang Sawitto	Alih Fungsi Lahan	lahan pangan pertanian hanya dibuatkan luasan/deliniasi tanpa perlu di perdakan dan hanya termuat dalam RTRW
11	alih fungsi lahan tambak jadi sawah, industri	Kec. Suppa, Kec. Matiro Somp	Alih Fungsi Lahan	Masyarakat mengalih fungsikan tergantung prospek keuntungan produksi (dikondisikan), debit air untuk mengalir lahan sawah yang kurang karena mengalir sawah yang semakin luas
12	Wilayah Gunung yang bersertifikat	Gunung Paleteang Kec. Paleteang	Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Fungsi	tanah gunung yang tengah kota disertifikatkan di keruk untuk kepentingan sepihak (masyarakat yang memiliki sertifikat)

Tabel 2.207
Rumusan Permasalahan
“Minimnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga kestabilan ekosistem lingkungan”

Permasalahan	Akar Masalah
Kesadaran Masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya masih rendah	Masih Terbatasnya sarana prasarana kebersihan pada area – area publik
	Kurangnya Sosialisasi ,himbauan dan gotong royong yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan
Pengelolaan usaha / kegiatan yang kurang memperhatikan kondisi kestabilan ekosistem lingkungan	Minimnya Pengawasan Oleh Pemerintah Daerah
	Kerusakan daerah Sempadan Sungai
	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsi
	Alih fungsi lahan
	Meningkatnya resiko banjir

	Kerusakan lingkungan akibat aktifitas penambangan tambang galian c
--	--

7. Belum Tersedianya Fasilitas Pendidikan, pelatihan dan pengembangan pada sektor pertanian

Sektor Pertanian masih merupakan sektor dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pinrang untuk tahun 2019 dengan komposisi distribusi sebesar 45.03%. PDRB sektor pertanian tahun 2019 menurut harga berlaku sebesar 8.839.08 (juta). Pada tahun 2020 sektor pertanian sangat memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang yang telah di hantam oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya kontraksi pada pertumbuhan ekonomi diseluruh Indonesia bahkan mencapai angka negatif untuk beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Akan tetapi karena PDRB sektor pertanian di Kabupaten Pinrang lebih besar dibanding sektor lain maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang di Tahun 2020 masih tetap berada di angka positif walaupun terjadi penurunan yang sangat signifikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019.

Atas dasar inilah maka diharapkan dengan adanya pendidikan, pelatihan dan pengembangan pada sektor pertanian diharapkan mampu menopang perekonomian masyarakat di Kabupaten Pinrang. Dengan adanya pendidikan, pelatihan dan pengembangan di sektor pertanian ini maka diharapkan dapat menciptakan inovasi untuk meningkatkan produksi sehingga kebutuhan akan pangan dapat terpenuhi dan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya sangat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan empat tahun terakhir ini. Dimulai dari tahun 2017 dengan produktivitas sebesar 6,24% kemudian menurun ditahun 2018 dan 2019 sebesar 6,24%, lalu menurun lagi sebesar 6,07% ditahun 2019 dan terakhir di tahun 2020 juga menurun sebesar 5,57%. Hal ini disebabkan beberapa lahan baru yang belum optimal berproduksi, begitupun dengan pengaruh iklim yang sulit diprediksi seperti banjir dan kemarau sehingga produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya dapat menurun. Atas dasar inilah maka diharapkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan pengembangan di sektor pertanian dapat terwujud agar pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pangan di Kabupaten Pinrang.

Tabel 2.208
Rumusan Permasalahan
“Belum Tersedianya Fasilitas Pendidikan, pelatihan dan pengembangan
pada sektor pertanian”

Permasalahan	Akar Masalah
Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan masih rendah	Penggunaan teknologi tepat guna masih belum optimal
Masih rendahnya SDM pertanian	Sarana Pendidikan jurusan pertanian dan perikanan masih sangat terbatas

2.3.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Permasalahan dan isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil kajian pencapaian indikator TPB. Asumsi ini didasarkan bahwa pencapaian indikator TPB menjadi fokus perhatian dalam konteks keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target dijadikan sebagai *baseline* yang mendapatkan perhatian dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 untuk dipenuhi target pencapaiannya. Sehingga dengan sendirinya permasalahan dan isu strategis diterjemahkan dari indikator yang belum mencapai target tersebut. Adapun pada periode RPJMD selanjutnya indikator TPB yang tidak mencapai target dapat berbeda sesuai dengan hasil kajian pencapaian TPB, dan menjadi fokus pada kesempatan lain. Sementara untuk indikator TPB yang telah mencapai target, belum dilaksanakan dan belum ada data bukan berarti diabaikan, namun tetap diperhatikan dalam pencapaiannya ke depan, dilaksanakan dan diupayakan pemenuhan datanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Pinrang 2019 – 2024, 17 tujuan dalam TPB /SDG’s ditetapkan 11 tujuan yang menjadi fokus perhatian pada RPJMD 2019–2024.

Selain menetapkan isu strategis, berdasarkan hasil kajian capaian TPB di Kabupaten Pinrang, maka ditetapkan juga skala prioritas. Skala prioritas dimaksudkan untuk mengarahkan prioritas pembangunan di Kabupaten Pinrang sehingga mendapatkan perhatian yang lebih dalam hal penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan penganggarnya. Kriteria pada penetapan skala prioritas daerah didasarkan pada pertimbangan besarnya GAP indikator TPB antara capaian dan target, standar pelayanan minimal (SPM) dan keterkaitan dengan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Tabel 2.209
Isu dan Sasaran Prioritas Hasil Kajian Pencapaian TPB

TUJUAN TPB	SASARAN	PERMASALAHAN	ISU PERIORITAS
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Belum meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada 12 Kecamatan	Belum berakhirnya kemiskinan dalam segala bentuk
		Belum menurunnya indeks risiko bencana pada kawasan perkotaan	
	Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Belum tercapainya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah menjadi 100%.	
		Belum tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak menjadi 100%.	
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Masih tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil	Masih terjadinya kasus kelaparan, belum tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta belum meningkatnya pelaksanaan pertanian berkelanjutan
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Belum tersedianya akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau untuk semua.	Belum terwujudnya Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

TUJUAN TPB	SASARAN	PERMASALAHAN	ISU PERIORITAS
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Belum menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk.	Belum terjaminnya kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
	Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Belum tercapainya imunisasi dasar lengkap pada bayi.	
	Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Belum menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.	
		Belum meningkatnya jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	
		Belum menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi.	
	Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Belum menurunnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas	
		Belum menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Belum tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak menjadi 100%.	Belum terjaminnya Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Belum tercapainya akses terhadap layanan air minum layak menjadi 100%	

TUJUAN TPB	SASARAN	PERMASALAHAN	ISU PERIORITAS
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat menjadi 114,09%.	Belum terjaminya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta belum meningkatnya Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
		Belum tercapainya APK SMP/MTs/ sederajat menjadi 106,94%.	

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target mendapatkan perhatian dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 untuk dipenuhi target pencapaiannya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa permasalahan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pinrang belum mencapai target nasional dikarenakan masih terdapatnya indikator TPB yang belum dicapai. Untuk itu indikator TPB yang belum mencapai target tersebut akan dibuatkan alternatif skenario pencapaian TPB-nya. Hasil perumusan alternatif skenario tersebut akan diikuti dengan rumusan-rumusan kebijakan, rencana dan program yang diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Adapun 44 indikator TPB yang belum mencapai target tersebut diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.210 : CAPAIAN INDIKATOR
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)
KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2015 - 2020

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	2015	Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%		8,46	8,44	8,79	8,45	8,31
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	90	91	92	93	95	95
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	DINAS TENAGA KERJA	%	71.99	85.01	86.29	86.86	79.75	79.75
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	%			100	100	100	100
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	RT				10.518	9.542	8.900
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	80,7	82,5	83,7	88,4	89,5	87
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100	100
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas PUPR							
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	99,57	99,62	99,66	99,67	99,80	99,00
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	94,23	94,31	94,55	94,74	95	98,32
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	DISPERINDA GEM	%	92,18	92,74	93,80	94,65	95,05	95,79
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	89	892	300	0	2	1
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana..	BPBD	Rupiah	1.030.750.000	2.907.000.000	5.418.860.000	2.304.000.000	4.504.000.000	1.595.000.000

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial	KK			20	28	118	79
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINAS KESEHATAN	%	1,71	0,58	0,8	2,7	6,2	4,8
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan	Persen	100	100	100	100	100	100
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINAS KESEHATAN	%	14,89	14,33	16,99	34,6	10,97	8,72
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	DINAS KESEHATAN	%	15,2	14,9	14,7	14,4	9,76	9,6
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINAS KESEHATAN	%	2,18	3,09	3,25	3,05	2,44	2,05
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DINAS KESEHATAN	%	10,5	10,9	11,02	9,6	11,86	7,66
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINAS KESEHATAN	%	67	58	66,1	66,4	68,03	72,27
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan	PPH	89,5	88,7	89,2	89,3	89,3	89,3
2.4	Pada tahun 2030, menjaminsistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.								

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Pertanian , Bappeda	Ha	44.861	44.861	44.861	44.861	44.861	44.861
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINAS KESEHATAN	Per/100.000	146,28	73,75	58,04	59,35	83,43	67,72
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	DINAS KESEHATAN	%	96,90	96,48	93,75	95,39	93,10	97,23
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	96,90	96,48	93,75	95,39	93,10	97,23
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Per/1000	2,34	1,47	0,43	0,74	0,27	0,14
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Per/1000	7,02	5,75	5,51	5,19	3,75	3,25
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Per/1000	1,17	1,33	0,43	0,74	0,28	0,27
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100	100
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINAS KESEHATAN	%	0,006	0,014	0,011	0,008	0,011	0,010
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Per /100.000	147,8	131,1	153,5	159,9	182,2	106,2
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINAS KESEHATAN	Per /1000	0,25	0,22	0,19	0,16	0,19	0,15

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	DINAS KESEHATAN	Kabupaten	1	1	1	1	1	1
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	DINAS KESEHATAN	Kabupaten	1	1	1	1	1	1
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	9,5	9,3	9,1	9,1	9	9
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINAS KESEHATAN	%	38	37,6	37,2	36,9	36,6	36,6
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	22,3	22,2	21,9	21,8	19,8	19,9
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	DINAS KESEHATAN	%	0	0	0	0	1.067	0
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINAS KESEHATAN	kabupaten	1	1	1	1	1	1
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas P2KBP3A	%		61,8	64,3	64,6	64,7	65,02
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas P2KBP3A	%		61,8	64,3	64,6	64,7	65,02
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas P2KBP3A	%		13,6	14,7	16,7	16,3	18,17
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas P2KBP3A	%						
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas P2KBP3A	%						

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Jiwa	172	205	262	292	314	302
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINAS KESEHATAN	Jiwa	171.867	205.197	262.062	292.422	313.810	301.982
3,9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.								
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	DINAS KESEHATAN	%	0	0	0	0	0	0
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	9,5	9,3	9,1	9,1	9	9
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100	100
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	1,68	1,93	1,99	2,25	2	4,67
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA									
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	98	98	98	98	98	98

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	18,58	23,53	13,62	16,1	71,95	88,95
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	3,51	3,51	47,37	5,57	73,68	70,18
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	106,3	109,37	100,14	100,07	110,56	100,04
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	95,02	100,68	101,93	103,33	105,98	100,06
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	8,6	8,7	8,75	8,8	9,01	9,07
4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	62,07	60,5	64,79	67,45	71,21	73,50
4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%						
	SD = Perempuan / Laki-laki X100		%	90	90,6	91,55	92,8	93,05	93,81
	SMP = Perempuan / Laki-laki X100		%	93	94	95	98,87	99	99,78
	SMA,SMK,SLB = Perempuan / Laki-laki X100		%	100	100	101	102,55	103,5	104,65
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	100	100	100	100	100	100
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS	%	100	100	100	100	100	100

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

		KEPENDUDUKAN							
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%						
	SD = 304/323X100		%	92	92	93	93	94	94
	SMP = 52/58X100		%	87	87	88	88	89	89
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%			92,56	92,65	50	38,47
	Persentase Guru PAUD Bersertifikat		%			86,5	86,5	33,4	32,18
	Persentase Guru SD Bersertifikat		%			95,5	95,5	54,7	41,52
	Persentase Guru SMP Bersertifikat		%			95,7	95,7	61,6	41,71
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN									
5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas P2KBP3A	Program					1	1
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas P2KBP3A	%					0,03%	0,01
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas P2KBP3A	%					0,03%	0,03
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas P2KBP3A	%					0,02%	0,01
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas P2KBP3A	%					83,33%	90
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas P2KBP3A	%						0,17
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dinas P2KBP3A	%						21,9
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas P2KBP3A	%						4,43
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas P2KBP3A	%						10
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas P2KBP3A	%						6,25
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.								

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas P2KBP3A	%		16,3	15,4	15,5	11,5	11,48
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas P2KBP3A	%		61,8	64,3	64,6	64,7	65,02
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Diskominfo	%	51	52	54	55	56	65
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA									
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas PUPR							
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas PUPR							
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas kesehatan						108	108
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas kesehatan	%	10	15	20	25	30	40
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DINAS Lingkungan Hidup	Nilai Parameter Kualitas Air Sungai	63,33	65	68,33	70	70	70
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	PSDA	web	1	1	1	1	1	1
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	PSDA	Sungai	1	1	1	1	1	1
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	PSDA	Lembaga	0	0	0	27	80	170
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA									
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	Persen	7,44	6,62	7,08	6,24	5,81	-
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	Ribu Rupiah	35.831	39.783	43.953	48.288	52.053	-
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	DINAS TENAGA KERJA	%	27.69	37.24	32.22	29.44	27.87	27.87
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DINAS TENAGA KERJA	%	34.66	37.44	35.11	29.84	33.17	33.17
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) ke layanan keuangan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	%	49,73	61,51	59,66	65,27	79,57	91,00
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DINAS TENAGA KERJA	Rp/Jam	12.500	14.063	15.625	16.549	17.877	19.399
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	DINAS TENAGA KERJA	%	17.22	19.37	64.80	55.10	34.00	41.33

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS, DINAS TENAGA KERJA	%	4,85		4,41	2,80	2,91	4,19
8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DINAS TENAGA KERJA	%	10.29	08.59	32.39	16.28	23.86	10.87
Target SDGs 08 : 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.									
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	%	0.83	0.76	-	-	-	-
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	%	-	-	1,68	1,6	1,68	9,73
8.9.1.(a)	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Org	-	-	-	30	35	-
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Org	-	-	43.423	54.000	61.528	7.379
8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.								
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	%	6,65%	4,23%	4,09%	9,33	26,23	66%

Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI									
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	dermaga	4	4	4	4	4	4
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	dermaga	1	1	1	1	1	1
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	DISPERINDAGEM	%	6,94	8,25	8,25	2,80	10,17	-1,05
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	DINAS TENAGA KERJA	%	32.14	24.14	32.73	34.24	37.54	37.54
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Diskominfo	%	51	52	54	55	56	65
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Diskominfo	%	51	52	54	55	56	65
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo	%	41	45	50	51	65	75
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA									
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS (Dinsos)		0,414	0,38	0,309	0,359	0,336	0,375

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS (Dinsos)	%		8,46	8,44	8,79	8,45	8,31
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas PMD						19	4
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas PMD					35	16	12
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Desa	Desa	0	0	0	0	0	0
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									
11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.								
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	DINAS Lingkungan Hidup							
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Dinas PUPR							
11,3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.								
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Dinas PUPR							
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	89	892	300	0	2	1
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	EWS	0	0	0	0	1	1

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	1.030.750.000	2.907.000.000	5.418.860.000	2.304.000.000	4.504.000.000	1.595.000.000
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.									
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN									
12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DINAS Lingkungan Hidup	-	-	-	81,026.5m3	135,676.33m3	863.907 kg	27,098.18 Ton
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA									
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	per 100.000/orang	89	892	300	0	2	1
Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLH	Dokumen	0	0	1	1	1	1
Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DINAS PERIKANAN	orang	-	-	1.458	2.432	1.131	896
Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI									
15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.								
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DINAS Lingkungan Hidup	dokumen	0	0	0	0	0	0
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN									
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polres	Kasus		DM	DM	DM	DM	DM
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Polres	%		DM	DM	DM	DM	DM
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	89,40	87,05	88,93	93,09	93,51	94,57
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ortala	%	18,45	31,65	12,01	5,4	2,46	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	SETDA (PEMBANGUNAN)	%	13,99	14,65	8,73	16,01	11,33	15,17
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ortala	%	CC (Nilai 58,52)	BB (nilai 71,54)	CC (nilai 55,4)	CC (nilai 50,58)	CC (nilai 52,44)	belum terbit
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas P2KBP3A	%					10%	10%
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas P2KBP3A	%		6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	%	82	98	97	97	100	99
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	%	57	85	88	93	96	97
16,10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Diskominfo	Orang	1	43	43	43	43	43
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.								
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase	0,74	0,77	0,73	0,77	0,68	0,75
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase	0,15	0,15	0,15	0,14	0,17	0,16
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase	7,63	7,09	0,01	6,86	9,55	8,94
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Diskominfo	%	41	45	50	51	65	75
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Diskominfo	%	41	45	50	51	65	75
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.*	BPS	Persen	-	-	-	100	100	98,92
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	Persen	-	-	-	90	100	86,67

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	BPS	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	jumlah kelahiran				61	347	766	1029	310
	Jumlah kematian				934	523	1280	1766	635
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengunj ung	8.715	8.404	11.857	12.952
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)*	BPS	%	-	-	-	100	100	95,24

2.3.1.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diposisikan untuk menjawab isu – isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mencakup Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut.

Salah satu Sasaran Nasional yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Pendidikan yang tertuang dalam rata – rata lama sekolah, Kesehatan yang tertuang dalam Angka Harapan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yaitu Pengurangan Kawasan Kumuh serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Ketersediaan Akses Air Minum.

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk Kabupaten terdiri atas:

1. Pendidikan Dasar
2. Pendidikan Kesetaraan
3. Pendidikan Anak Usia Dini
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
7. Pelayanan Kesehatan Balita
8. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
10. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
12. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
14. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
16. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari hari
17. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik
18. Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota
19. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
20. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
21. Pelayanan informasi rawan bencana
22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
24. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
25. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
26. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
29. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota

1. Bidang Urusan Pendidikan

- **Pendidikan Dasar**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) di Kabupaten Pinrang setiap tahunnya 100%, namun pada tahun 2019 turun menjadi 77,27% dan tahun 2020 92,53%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.211
Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)
Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	100	100	100	77,27	92,53

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

• Pendidikan Kesetaraan

Dalam kurun waktu 2016-2020 Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)di Kabupaten Pinrang setiap tahunnya 100% sedangkan pada tahun 2019 menjadi 81,61% dan tahun 2020 naik menjadi 97,27%. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.212
Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
(SD/Mi,SMP/MTs)Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	100	100	100	81,61	97,27

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

- Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam kurun waktu 2016-2020 Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD di Kabupaten Pinrang setiap tahunnya meningkat namun pada tahun 2019 menurun menjadi 73,50% dan tahun 2020 74,28%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.213
Jumlah Warga Negara Usia 5-6Tahun
yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	95,56	95,60	96,01	73,50	74,28

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

2. Bidang Urusan Kesehatan

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 90,31%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.214
Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan
Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	97	98,14	94	90,31

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

• **Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 90,73%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.215
Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	95	96,48	93,1	90,73

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

• **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 105 % melebihi target nasional, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 91,23%.Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.216
Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	100	106,40	105	91,23

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

• **Pelayanan kesehatan balita**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 95,63%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.217
Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan
Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	94	94,51	93,43	95,63

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**
Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang mencapai 100% namun pada tahun 2020 sebesar 73%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.218
Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatanTahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	100	100	100	73

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

- Pelayanan kesehatan pada usia produktif**
Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang mencapai 100%, kecuali pada tahun 2020 mencapai 97%. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.219
Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	100	100	100	97

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 90,36%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.220
Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	78%	95,38%	94%	90,36%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 94%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.221
Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2014 - 2019

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	74,4 0%	92,5 0%	91%	94%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 83,21%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.222

Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2016 – 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	90,80%	100%	87%	83,21%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

• Pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa berat

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 93,39%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.223

Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	-	100%	100%	92%	93,39%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

• Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 96,98%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.224

Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	94,90%	100%	100%	96,98%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

- **Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2017, 2018 dan 2019 mencapai 100%, namun menurun menjadi 91,88% pada tahun 2020. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.225
Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	100%	100%	100%	91,88%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

- **Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari –hari**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kabupaten Pinrang setiap tahun naik dimana pada tahun 2018 mencapai 89,69%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.226
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	87,30%	87,40%	89,69%		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang, Tahun 2019

- **Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Pinrang setiap tahun naik dimana pada tahun 2018 mencapai 84%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.227
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	82%	82,22%	84%	96,99	97,56

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang, Tahun 2019

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

- **Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni di Kabupaten Pinrang belum ada, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.228
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huniTahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang, Tahun 2019

- **Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi

penyediaan rumah yang layak huni di Kabupaten Pinrang belum ada, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.229

Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	-	-	-		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang, Tahun 2019

5. TRANTIBUMLINMAS

- Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada di Kabupaten Pinrang belum ada, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.230

Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	80%	80%	90%	90%	90%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Pinrang setiap tahun meningkat dan pada tahun 2019 mencapai 90%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.231
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	80%	85%	90%	90%	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

• **Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Pinrang setiap tahun meningkat dan pada tahun 2019 mencapai 85%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.232
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	80%	85%	85%	85%	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

• **Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Pinrang setiap tahun meningkat dan pada tahun 2019 mencapai 60%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.233
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	60%	60%	60%	60%	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

- **Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Pinrang setiap tahun meningkat dan pada tahun 2019 mencapai 65%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.234
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	55%	65%	60%	61,39%	84%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

6. SOSIAL

- **Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Pinrang tahun 2016-2018 belum ada dan pada tahun 2019-2020 mencapai 100%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.235
Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	-	-	-	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Tahun 2019

- **Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Pinrang tahun 2016- 2019 belum ada dan pada tahun 2020 mencapai 100%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.236
Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	-	-	-	-	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

- **Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti**
Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Pinrang tahun 2016-2018 belum ada dan pada tahun 2019-2020 mencapai 100%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.237
Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar pantiTahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	-	-	-	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

- **Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti**
Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti di Kabupaten Pinrang tahun 2016-2019 belum ada, namun pada tahun 2020 mencapai 100%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.238
Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar pantiTahun 2016-2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	-	-	-	-	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial di Kabupaten Pinrang setiap tahun belum ada, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.239
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

2.3.2 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Tabel 2.240
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN
	Urusan Wajib			
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar			
	Pendidikan			
1	Tingkat Partisipasi warna negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,83	Kurangnya partisipasi pendidikan PAUD	Program bantuan operasional sekolah yang memberikan sumbangsih dalam peningkatan APK
2	Tingkat Pertisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,28	Belum ratanya mutu pendidikan dasar	
3	Tingkat Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	92.06	Belum optimalnya pembinaan kesiswaan	

4	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97,27	Kurangnya ketersediaan pendidikan penyetaraan	
	Kesehatan			
1	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,08 %	Rasio RS terhadap penduduk sudah mencukupi, namun jumlah kamar kelas masih kurang	Perlu peningkatan kelas RS dan peningkatan jumlah tempat tidur
2	Persentase RS Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100	- Masih sering terjadi pembebanan biaya tambahan pada masyarakat miskin	- Peningkatan ketersediaan obat di RS/balai kesehatan masyarakat
				- Membuat jejaring antara RS dengan penyedia layanan daerah
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	Masih adanya angka kematian ibu hamil , ibu bersalin dan bayi baru lahir dan masih rendahnya angka harapan hidup secara nasional	Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir
4	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan	100		
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100		

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	Masih adanya balita penderita gizi kurang dan stunting	Pemantauan status gizi, memberikan informasi tentang status gizi secara berkesinambungan diharapkan dapat dipergunakan dalam penentuan arah kebijakan perbaikan gizi masyarakat
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Kurangnya pelayanan pemeliharaan kesehatan usia produktif	- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan khususnya anak usia pendidikan dasar
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100		- Pemeriksaan kesehatan dini untuk mengetahui suatu masalah kesehatan bagi orang usia 15-29 dan 60 tahun
9	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100		
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Kurangnya pelayanan kesehatan hipertensi dan DM sesuai standar yang meliputi pemeriksaan dan monitoring	Memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya modifikasi gaya hidup difasilitas kesehatan tingkat pertama dan memberikan sosialisasi serta monitoring tentang pengaturan diet seimbang
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	Tidak adanya RS yang menampung atau melayani kesehatan jiwa sesuai standar	Dibangunnya RS jiwa dan menambah tenaga medis dalam melayani kesehatan jiwa sesuai standar
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	100	Kurangnya penanganan dan rendahnya tingkat kesadaran orang terduga TBC	Mensosialisasikan pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada orang terduga TBC, cara pengobatan sesuai standar
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	Keterbatasan layanan deteksi dini HIV sesuai standar	Penguatan komitmen fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan tes HIV melalui sosialisasi dan pengarahannya upaya pencapaian target tes HIV
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	64,55	Keterbatasan anggaran untuk membenahi Kawasan rawan Banjir	Dukungan anggaran dan kegiatan APBD tingkat Provinsi dan APBN
2	Rasio Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota	58,29	Keterbatasan anggaran untuk membenahi Kawasan Pantai abrasi, erosi dan akresi	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,08	Keterbatasan anggaran untuk membenahi Kawasan Daerah Irigasi	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten/Kota	93,05	rendahnya pembangunan baru, peningkatan dan perluasan SPAM jaringan perpipaan yaitu unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan	Tingginya peran serta masyarakat dalam menyediakan SPAM bukan jaringan perpipaan yaitu sumur dangkal, sumur pompa, dan bak penampungan air hujan
				Tersedianya kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97,56	Belum adanya kebijakan perencanaan SPALD yaitu rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknik terinci	Tersusunnya kebijakan perencanaan SPALD yaitu rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknik terinci
6	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	100 %	rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengajukan permohonan IMB rehabilitasi/penambahan	tingginya pemenuhan komitmen pelaku usaha/pemilik bangunan dalam pengurusan IMB baru
7	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	65,73 %	Kurangnya koordinasi Pemda dengan penanggungjawab b pengelolaan jalan nasional	Jaringan jalan arteri primer atau jalan nasional dalam kondisi mantap

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

8	Rasio Tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	89,91 %	Kurangnya SDM tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Pelatihan untuk tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikasi kompetensi
9	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	lemahnya komunikasi dan informasi pekerjaan konstruksi di Daerah yang dilakukan oleh penyedia melalui APBD Provinsi dan APBD	optimalnya pengawasan pekerjaan konstruksi di Daerah
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100 %	Belum tersedianya anggaran bantuan stimulant rumah layak huni untuk korban bencana	Menganggarkan bantuan stimulant rumah layak huni untuk korban bencana
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	0 %	Belum optimalnya penanganan rumah layak huni untuk MBR	Penambahan anggaran perumahan yang sudah dilengkapi PSU
12	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100%		
13	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	49,67 %	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan ruang khususnya permukiman kumuh	SDM mampu mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang khususnya perumahan kumuh
14	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,62 %		
	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	kurangnya pemberdayaan anggota linmas	Meningkatkan efektifitas kemitraan dengan aparat penegak hukum..
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75,76	Kurangnya tenaga PPNS	Meningkatnya efektifitas kemitraan dengan dinas/instansi dalam lingkup pemkam dalam pelaksanaan penegakan perda
3	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	363.417 jiwa	Pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana masih kurang	Pemanfaatan tokoh masyarakat dalam peringatan dini
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	407.236 Jiwa		
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	407.236 Jiwa		
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	84,00		
7	Waktu tanggap (Response time) Penanganan kebakaran	84,00	Kurangnya pos pemadam kebakaran dalam pemenuhan wilayah WMK serta personil kebakaran masih memiliki SDM yang terbatas	Sebagian sarana dan prasarana aparaturnya sudah tersedia
	Sosial			

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)	100 %	Adanya keterbatasan kemampuan anggaran	terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 %		Terpenuhinya kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar			
	Tenaga Kerja			
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0 %	Perlunya kegiatan pengembangan rencana tenaga kerja	Mengembangkan pasar kerja melalui peningkatan kegiatan dan pendapatan masyarakat. Terutama masyarakat ekonomi lemah
2	Persentase Tenaga kerja bersertifikat Kompetensi	78,26 %	Masih banyaknya Tenaga kerja yang ingin mengembangkan keahliannya belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut	- Dukungan birokrasi Lewat kebijakan anggaran
3	Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	216626,45		- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	63,03	Masih kurangnya perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Mensosialisasikan kepada perusahaan -perusahaan agar menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	51,82 %	Minimnya layanan Informasi tentang tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri	Adanya informasi layanan melalui mekanisme
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	9,19 %	Belum optimalnya ARG dalam APBD DP2KBP3A	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,12 %	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	53,97 %	Indeks pemberdayaan gender meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100	
	Pangan			

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	45,00	Dengan adanya penurunan pada produksi padi maka akan berdampak pada ketersediaan cadangan pangan kabupaten akan berkurang	Dengan adanya teknik budidaya yang tepat guna akan menghasilkan hasil produksi yang maksimal
	Pertanahan			
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	21,25%	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru untuk tahun ini sehingga memang belum ada data yang masuk
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	22,50%	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru untuk tahun ini sehingga memang belum ada data yang masuk
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	21,18 %	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru untuk tahun ini sehingga memang belum ada data yang masuk
4	Tersedianya tanah obyek Landreform (TOL) yang siap direstribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	16,80 %	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru untuk tahun ini sehingga memang belum ada data yang masuk
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	21 %	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	20 %	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru
	Lingkungan Hidup			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%		
2	Terlaksananya pengelolaan sampah diwilayah Kab/Kota	57,19 %	- Keterbatasan sarana dan prasarana	- Terpenuhinya sarana dan prasarana
			- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan	- Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau/ kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	Kurangnya anggaran dan tidak adanya kendaraan operasional	- Penganggaran perjalanan dinas yang memadai
				- Adanya kendaraan operasional
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Perekaman KTP elektronik	96,91 %	Kurangnya alat cetak KTP. Hal tersebut dikarenakan mahalnya harga alat cetak sehingga 12 kecamatan yang ada di kabupaten belum ada alat cetak KTP dikecamatan tersebut	Belanja alat cetak KTP dapat dianggarkan di APBD

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

2	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	26,91 %	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kepemilikan dokumen kependudukan	Sosialisasi kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan dan pencacatan sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	26,91 %	Luasnya wilayah kabupaten Pinrang dan beberapa pelayanan masih belum dapat selesai di Kecamatan seperti Kartu Keluarga dan Akta, hal tersebut kendala bagi masyarakat untuk menyelesaikan dokumen kependudukannya	Pelayanan Unit, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil keliling (UP3SK)
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	72,09 %	Terdapatnya beberapa wilayah pedesaan yang belum dapat terakses oleh jaringan dengan teknologi informasi dan komunikasi (e-Governance)	Semua proses layanan publik dapat diakses oleh seluruh warga negara secara terintegrasi dengan cepat
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

1	Persentase pengentasan desa tertinggal	56,00	Minimnya peran pemerintah kabupaten secara langsung dalam mengintervensi kemajuan perkembangan desa	Pemerintah pusat menjadikan pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi termasuk dalam prioritas nasional kedua dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada kegiatan prioritas keempat yaitu pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan kawasan transmigrasi.
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	0,00	Belum adanya desa yang masuk dalam kategori desa mandiri di Kabupaten Pinrang	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,64	Menurunnya disparitas TFR antar wilayah dan sosial ekonomi (tingkat pendidikan dan ekonomi)	
2	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,48%	Fenomena unmet need KB bersifat multidimensional karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, dan akses, serta kualitas pelayanan	sosialisasi yang terus-menerus dari semua stakeholders agar program KB lebih mudah familier di keluarga pasangan usia subur

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)	65,02 %	Belum semua klinik KB swasta menyediakan alat kontrasepsi KB	Peningkatan ketersediaan alat kontrasepsi dan pelayanan KB di klinik swasta
	Perhubungan			-
1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1,3%	Fasilitas pendukung jaringan jalan masih minim dan belum ada terminal terpadu	Tersedianya terminal terpadu
2	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,44 %	Pelanggaran terhadap aturan berlalu lintas	Pengguna jalan sudah tertib dalam aturan berlalu lintas
	Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	100 %	Kecepatan akses internet downstream dan upstream	Meningkatkan kecepatan akses internet
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	15,38 %	Keterbukaan informasi belum menjadi skala prioritas pada badan publik/OPD	Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap penerapan e-government yang menyeluruh dan terintegrasi
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten / Kota	90,97 %	Kurangnya dukungan OPD terhadap urgensi keterbukaan informasi publik secara online	Dukungan dari pimpinan daerah akan keterbukaan informasi publik

	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	13,10	Kurangnya memahami prinsip-prinsip yang benar dalam berkoperasi	Kerja sama yang baik antara koperasi dengan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah untuk mengupayakan program penyelarasan kemitraan
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	8,93	Kelemahan UMKM dalam merespon persyaratan yang diperlukan untuk proses pemupukan modal dari pihak ketiga	Kapitalisasi modal kerja UMKM tidak bergantung pada pihak ketiga dalam kaitan polarisasi global
	Penanaman Modal			
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	1,95 %	Menjaga kepercayaan penanam modal adalah kebijakan fiskal dan moneter yang prudent (berhati-hati)	Terbentuknya pusat pelayanan publik di Kabupaten serta adanya paket kebijakan investasi (PAKSI) dalam rangka memberikan kemudahan berinvestasi di Daerah
	Kepemudaan dan Olahraga			
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam Kegiatan ekonomi mandiri	0,52	Masih rendahnya kreatifitas, dan produktifitas kemampuan kewirausahaan dan daya saing pemuda serta kurang aktifnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Idealisme daya kritis, kreatifitas dan semangat yang dimiliki pemuda dapat diarahkan ke hal-hal positif untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

2	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	88,10	Kurangnya fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan dan organisasi kepemudaan untuk berperan serta dalam membentuk karakter masyarakat yang tangguh dan berprestasi	Meningkatnya pemuda pelopor dan organisasi atau kelompok kepemudaan
3	Peningkatan Prestasi olahraga	-	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga dianggap masih belum optimal	Dilakukan pembinaan dan pelatihan secara terus-menerus serta apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan/tenaga keolahragaan yang berprestasi perlu ditingkatkan
	Statistik			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kurangnya tenaga terampil dalam pengelolaan data statistik sektor	Tersedianya SDM tenaga terampil dalam pengelolaan data statistik sektor
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %		
	Persandian			

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

1	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	0 %	Belum terhubung jaringan komunikasi sandi (JKS) pada semua organisasi perangkat daerah terhubung belum mendapatkan bantuan peralatan sandi dari badan cyber dan sandi negara	Tersedianya jaringan komunikasi sandi (JKS) pada semua organisasi perangkat daerah terhubung belum mendapatkan bantuan peralatan sandi dari badan cyber dan sandi negara
	Kebudayaan			
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100 %	Kurangnya nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek kemajuan budaya	Kegiatan-kegiatan prioritas kemendikbud dalam bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan
	Perpustakaan			
1	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	0 %	Belum adanya minat baca masyarakat	Ketersediaan perpustakaan keliling
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	71,26 %	Kurangnya promosi gemar membaca	
	Kearsipan			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan		Kurang tegasnya pengaturan tentang pendirian organisasi kearsipan	Pengaturan tentang pendirian organisasi kearsipan dapat berdiri sendiri dan tidak digabung dengan perpustakaan

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	33,33 %	Kesadaran pengelolaan arsip yang ada dikeseluruhan belum maksimal	Kearsipan utuh dengan adanya keadaran pengelolaan yang maksimal
	Urusan Pilihan			
	Kelautan dan Perikanan			
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data : one data KKP)	77.285.730 kg	Masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha yang disebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil	Tertatanya kawasan perikanan berdasarkan pasal 35 perda nomor 14 tahun 2012 tentang kawasan peruntukan untuk perikanan tangkap, kawasan untuk peruntukan budidaya perikanan, kawasan peruntukan pengolahan perikanan dan kawasan pelabuhan perikanan
	Pariwisata			
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	-100	Kurangnya promosi pariwisata yang dilaksanakan baik didalam negeri maupun luar negeri serta kualitas dan kuantitas SDM pariwisata yang kurang mendukung	- Semakin berkembangnya lembaga industri pariwisata dan biro perjalanan serta untuk mempromosikan dan mendatangkan wisatawan

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

			dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	73,79	Kualitas nilai produk wisata yang ditawarkan kurang kompetitif sehingga belum mampu mengangkat citra pariwisata daerah ke tingkat nasional	- terdapatnya keanekaragaman potensi wisata yang bisa dikembangkan baik wisata alam, buatan maupun budaya
3	Tingkat Hunian Akomodasi	12,24	Industri pariwisata yang belum berkembang khususnya dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas pendukung lainnya	Giatnya SKPD yang menangani pariwisata menyediakan akomodasi dan fasilitas wisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,55	Peran sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang masih kurang, hal ini ditandai kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang masih rendah	Banyaknya potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk menambah pendapatan asli daerah
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,72%	Regulasi yang ada kurang mendukung untuk menarik retribusi yang terkait usaha-usaha yang bergerak di sektor pariwisata	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

	Pertanian			
1	Produktivitas pertanian perhektar per tahun	5,90	Penyediaan sarana produksi seperti benih dan pupuk belum memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, jenis, jumlah, tempat dan harga)	Regulasi dalam mendukung pembangunan tanaman pangan, hortikultura
				Dukungan pemerintah pusat dan provinsi
				Komitmen pimpinan dinas dan jajarannya dalam meningkatkan produksi pertanian
				Ketersediaan sarana dan prasarana
				Ketersediaan anggaran pembangunan pertanian
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	9,66 %	Terbatasnya tenaga medik dan paramedik	Penyuluhan dan regulasi
	Kehutanan			
	Energi dan Sumber Daya Mineral			
1	Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0 %	- Belum ada kebijakan daerah tentang pemanfaatan panas bumi di daerah	Komitmen pemerintah daerah untuk rencana penambangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas 25Mwe

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

			- Belum adanya komitmen pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan panas bumi	Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha khususnya UMKM/IKM
	Perdagangan			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	92,31 %	Belum optimalnya pengawasan pemenuhan komitmen pelaku usaha setelah memegang izin usaha melalui OSS	Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha khususnya UMKM/IKM
2	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	40,34 %	Belum optimalnya koordinasi dinas dengan instansi terkait dalam penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Bertanda tera sah yang berlaku	63,16 %	Belum optimalnya kegiatan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan UTTP	Peningkatan standarnisasi dan pengendalian mutu barang/jasa beredar
	Perindustrian			
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	2,74 %	Data industri yang diserahkan pada saat pengajuan IUI belum sesuai dengan kondisi lapangan	Mengoptimalkan pengawasan pada pelaku usaha atau perusahaan industri dalam pemenuhan komitmen serta ketentuan dalam dalam IUI

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	39,20 %	Kurangnya sosialisasi implementasi RPIP kepada kabupaten/Kota	Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha khususnya UMKM/IKM
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	13,68 %	Belum optimalnya pengawasan pelaku usaha atau perusahaan industri dalam pemenuhan komitmen serta ketentuan dalam IUI	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0 %	Rendahnya kesadaran pelaku industri atau perusahaan industri dalam melaporkan perusahaannya apabila mengalami perluasan	Peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha atau perusahaan industri
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kab/Kota	0 %	Kurangnya pengawasan kepada pelaku usaha atau perusahaan industri khususnya yang melakukan perluasan industri	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	45 %	Belum ada database sumber daya industri	Adanya database yang tersedia pada industri secara lengkap dan terkini

	Transmigrasi			
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
	Perencanaan dan Keuangan			
1	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	18,63		
2	Rasio PAD	0,75	Kurangnya komitmen beberapa SKPD yang memiliki pendapatan dalam mencapai target	Komitmen pimpinan dan semua staff untuk melaksanakan tugas
3	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)		Proses Pengelolaan keuangan yang dihasilkan belum optimal	
4	Peningkatan Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)		Terbatasnya sumber daya baik secara kualitas maupun kuantitas	Tercukupinya SDM yang memiliki kapabilitas pengawasan intern pemerintah
5	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	81,94	Masih banyaknya alokasi belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sangat berpengaruh terhadap belanja urusan pemerintahan umum	Tercapainya SPM (Standar Pelayanan Minimal)
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	Masih pelanggaran atau kategori belum tertib administrasi	Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku

	Pengadaan			
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 %		
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	10,60 %		
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	38,13 %		
	Kepegawaian			
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	266,67 %	Dalam 12 (dua belas) tahun terakhir penerimaan pegawai dengan tingkat pendidikan Menengah/Dasar ke bawah hampir tidak ada sedangkan yang pensiun dari tingkat pendidikan Menengah/Dasar tiap tahun ada.	Penerimaan pegawai sudah diutamakan pendidikan minimal D.3 dan juga karena ASN sudah rata-arat mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yang didukung dengan adanya penyesuaian ijazah.

2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	61,32 %	Dalam pengangkatan jabatan dan kepangkatan adalah terkait dengan persyaratan kualifikasi pendidikan, ketidakjelasan penyelenggaraan diklat fungsional/uji kompetensi, ketiadaan tim penilai angka kredit di wilayah terdekat.	Setiap pejabat fungsional harus menjamin akuntabilitas Jabatan seperti Pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi Staf yang bertugas sebagai pejabat fungsional umum.
3	Rasio jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,74 %	Kurangnya minat untuk menduduki jabatan fungsional tertentu dikarenakan persyaratan untuk memenuhi atau menduduki jabatan tertentu sulit untuk dipenuhi	Diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada ASN untuk menduduki jabatan tertentu
	Manajemen Keuangan			
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-5,43	Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD lebih kecil dibanding target belanja pada APBD	
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	20,03		
3	Manajemen Aset	ya	Kurang tertibnya SKPD dalam melakukan inventarisasi terhadap barang/asset SKPD	Adanya pendampingan dari para ahli dalam pengelolaan asset/barang daerah
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,98		

	Transparansi dan Partisipasi Publik			
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100 %	Kurangnya dukungan OPD terhadap unregnsi keterbukaan informasi publik	Dukungan dari pimpinan daerah akan keterbukaan informasi publik
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	25 %	Belum optimalnya jaringan internet dalam pengelolaan aplikasi yang berbasis elektronik	Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah (Simda)

2.4 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

2.4.1 Isu Strategis Pembangunan daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah setelah dilakukan analisa terhadap berbagai isu – isu strategis, maka yang menjadi isu strategis 5 tahun ke depan (Periode 2019 – 2024) adalah :

1. Implementasi e-Government dalam rangka peningkatan layanan publik dan Pemenuhan Pelayanan dasar
2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
3. Peranan Lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat
4. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
5. kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/prasarana publik
6. Mitigasi Bencana dan peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
7. Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk

Dunia berkembang begitu pesat, saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri. Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah

berebut masuk pasar Indonesia. Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli.

Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif. Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani. Kabupaten Pinrang berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Pinrang. Melalui sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif.

Pandemi Covid-19 merupakan pandemi yang menyebar secara global di awal tahun 2020, dimana virus tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap suatu wilayah sehingga segala aktifitas sosial, ekonomi, pendidikan dan perdagangan sebagian besar dilakukan di rumah. Hal ini tentu memiliki dampak negatif bagi kesehatan dan perekonomian negara. Adanya pandemi Covid – 19 yang telah berlangsung cukup lama membuat pertumbuhan perekonomian di Indonesia terhambat. Semua aspek lini kehidupan pun ikut terpengaruh dan mengalami penurunan terutama di sektor pariwisata,

perdagangan, perindustrian, perhubungan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan investasi.

Di Kabupaten Pinrang, pada akhir tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 4,19 % dibanding tahun 2019 dimana tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,91%. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pinrang, bahwa pandemic Covid 19 menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan dan banyak tenaga kerja yang mengalami pengurangan jam kerja yang menyebabkan hilangnya pendapatan dan kurangnya pendapatan pencari kerja. Di sektor pariwisata, jumlah pengunjung ditempat pariwisata di Kabupaten Pinrang juga mengalami penurunan sepanjang tahun 2020 sejak pandemi Covid 19. Pada tahun 2019 jumlah pengunjung ditempat pariwisata yang ada di Kabupaten Pinrang sebanyak 61. 528 orang, namun sejak pandemi Covid 19 yang mengharuskan setiap orang untuk mengurangi aktivitas dan stay at home, jumlah pengunjung pariwisata yang pada tahun 2020 menurun drastis, jumlah pengunjung pariwisata hanya mencapai 7.379 orang pada akhir tahun 2020. Untuk angka kemiskinan Kabupaten Pinrang, pada tahun 2020 menunjukkan angka 8,86 dan mengalami kenaikan dari tahun 2019 yang hanya 8,46.

Begitupun halnya yang terjadi di sektor perindustrian dan perdagangan dengan adanya pandemi covid-19 ini permintaan pasar dan daya beli masyarakat cukup menurun sehingga produksi pun mengalami penurunan kondisi ini diperparah lagi dengan adanya pembatasan kapasitas dan jam kerja sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah tidak dapat lagi dihindarkan. Kegiatan ekspor impor juga ikut terpengaruh dengan adanya pandemi covid 19. Dimana Negara eksportir yang mengurangi permintaan dan menyebabkan ketidakstabilan nilai impor. Pada Februari 2020 penurunan terjadi karena mulai banyak negara yang mengonfirmasi bahwa warga negaranya terinfeksi Covid-19, sehingga kegiatan impor maupun ekspor dibatasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran virus Covid-19. Dan hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan.

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kekuasaan dalam menyusun kebijakan – kebijakan untuk melancarkan interaksi ekonomi antar pelaku ekonomi daerah. Pada Hakekatnya Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan tindakan Pemerintah dan Masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh satu sama lain. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya.

Arah Kebijakan Ekonomi tahun 2022 diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang tahun 2022, yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu – isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten.

Dalam kondisi perekonomian yang tertekan akibat pandemic Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan propinsi Sulawesi Selatan dan nasional, terlihat pada capaian tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang berada pada posisi 0,44% diatas dari capaian pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan yang mengalami kontraksi -0,70% dan capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi -2,70%.

Beberapa skenario disusun untuk memacu pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui infrastruktur. Pembangunan Infrastruktur menjadi program padat karya yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat menstimulus roda perputaran ekonomi.

Berdasarkan dari data capaian indikator ekonomi makro serta dalam rangka mempercepat potensi pemulihan ekonomi di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD tahun 2022 yaitu : Pertumbuhan ekonomi 5%; PDRB Per Kapita (adhb) Rp. 60,61 Juta; Tingkat Pengangguran Terbuka 3,45%; Gini Rasio 0,330; Tingkat Kemiskinan 8,36% dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,50

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Pinrang yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2022, diarahkan pada **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi Serta Penanganan Dampak Pandemi Covid-19”**, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut : Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang lebih merata dan Pengentasan Kemiskinan; Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemenuhan pelayanan dasar; Pemanfaatan potensi sumber ekonomi secara optimal dalam rangka pemulihan sosial ekonomi; Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana; Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata kelola Pemerintahan guna mewujudkan Good Governance; serta Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan.

3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Pinrang diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Upaya Pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian diperkirakan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga yang berimplikasi pada peningkatan arus perputaran uang sehingga mendorong pemulihan ekonomi.

Selaras dengan tema pembangunan tahun 2022, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi. Pembangunan Ekonomi akan dipacu melalui : 1) Peningkatan Infrastruktur sector Pertanian dan Perikanan sehingga dapat memaksimalkan hasil produksi; 2) Pembangunan Infrastruktur aksesibilitas untuk memperlancar arus distribusi produk unggulan daerah; dan 3) Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi untuk memacu perkembangan sector usaha ekonomi kreatif dan digital.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan

ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional. Indikator-indikator makro yang bersifat ekonomi terdiri dari: pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat/pendapatan per kapita.

Upaya Pemulihan Ekonomi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2021 dengan mencermati perkembangan ekonomi yang ada, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan kembali. Beberapa factor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten Pinrang pada tahun 2022 antara lain : Hasil Produksi sector pertanian dan perikanan pinrang tetap stabil pada saat pandemic covid-19, Sektor Usaha berbasis Teknologi dan Informasi mengalami peningkatan, Iklim Usaha UMKM mulai bergeliat kembali sehingga memacu peningkatan konsumsi rumah tangga serta berlangsungnya proyek infrastruktur pemerintah yang ikut mendorong lapangan kerja dan usaha bidang konstruksi.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah

Wabah Covid-19 yang terjadi secara masif membuat pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran COVID- 19 dengan penerapan social dan physical distancing berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Work From Home (WFH) yang membatasi mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut kemudian menciptakan efek penutupan tempat hiburan/rekreasi, pusat perbelanjaan dan toko ritel. Kebijakan tersebut secara langsung berdampak pada Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang yang menurun drastis hingga 6,09% dari 6,53% saat tahun 2019 menjadi 0,44% pada tahun 2020.

Merebaknya wabah covid-19 memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Kabupaten Pinrang terutama pada sektor – sektor berikut ini : 1) Sektor industri pengolahan; 2) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor; 3) sektor konstruksi; 4) sector transportasi dan pergudangan dan 5) penyediaan akomodasi dan makan minum.

3.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2020 didominasi oleh Sektor Informasi dan Komunikasi dengan komposisi distribusi pembentukan PDRB sebesar 13,41% dengan laju pertumbuhan sebesar 2,45%. Pada urutan kedua adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan komposisi distribusi sebesar 9,23,% dengan laju pertumbuhan -0,48%. Menduduki peringkat ketiga terbesar dalam memberikan komposisi distribusi bagi PDRB Kabupaten Pinrang adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,84% dengan laju pertumbuhan 3,39%, sedangkan sektor-sektor lainnya memberikan andil yang relatif kecil yaitu pada kisaran dibawah 5,70%.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

No	Sektor	2016	2017	2018*	2019**	2020**
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.38	7.65	4.69	3.37	0.28
2	Pertambangan dan penggalian	12.95	11.22	9.48	9.30	2.25
3	Industri pengolahan	8.25	8.26	2.80	10.17	-1.05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.19	5.95	8.96	11.38	4.46
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.12	6.27	8.25	2.45	5.84
6	Konstruksi	6.18	6.62	7.06	11.60	0.89
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.69	9.82	12.19	9.29	-1.05
8	Transportasi dan Pergudangan	6.29	7.54	9.41	10.11	-11.58
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.84	8.59	12.75	9.73	-10.45
10	Informasi dan Komunikasi	9.64	9.79	11.41	10.96	13.41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.97	2.23	5.53	2.19	0.34
12	Real Estate	7.92	6.58	5.51	5.70	4.58
13	Jasa Perusahaan	7.72	7.02	9.83	7.05	-7.97

No	Sektor	2016	2017	2018*	2019**	2020**
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	-5.91	4.88	9.77	7.30	1.55
15	Jasa Pendidikan	8.41	8.92	9.81	8.36	5.70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.81	8.21	9.82	9.71	9.23
17	Jasa Lainnya	9.75	9.56	13.09	6.17	-11.08
	PDRB	7.44	7.84	6.91	6.53	0.44

Sumber data : PDRB Kab. Pinrang menurut lapangan usaha tahun 2014 -2020, BPS Kab. Pinrang

*Angka Sementara

**Angka sangat sementara

Tabel 3.2
Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga berlaku dan Harga Konstan
Tahun 2016-2020

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	48,55	47.23	48.51	46,94	47.02	46,00	45.03	44,64	45.22	44,57
2	Pertambangan dan penggalian	2.60	2.10	2.63	2,21	2.71	2,27	2.75	2,32	2.80	2,37
3	Industri pengolahan	6.28	6.13	6.37	6,25	6.10	6,01	6.28	6,22	6.14	6,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.11	0.08	0,11	0.08	0,11	0.08	0,12	0.08	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0.01	0.00	0,01	0.00	0,01	0.00	0,00	0.00	0,005
6	Konstruksi	9.68	9.28	9.67	9,17	10.08	9,21	10.85	9,65	10.78	9,70
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.91	14.23	13.13	14,54	13.89	15,19	14.63	15,58	14.42	15,35
8	Transportasi dan Pergudangan	2.65	2.79	2.54	2,78	2.58	2,84	2.65	2,94	2.31	2,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.88	0.87	0.89	0,88	0.93	0,93	0.97	0,96	0.87	0,85
10	Informasi dan Komunikasi	2.17	2.84	2.20	2,89	2.29	3,02	2.36	3,14	2.59	3,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.20	2.17	2.12	2,06	2.11	2,04	2.05	1,95	2.01	1,95
12	Real Estate	3.35	3.24	3.28	3,2	3.21	3,16	3.17	3,14	3.32	3,27
13	Jasa Perusahaan	0.11	0.12	0.11	0,12	0.11	0,12	0.11	0,12	0.10	0,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3.82	3.81	3.71	3,71	3.99	3,81	4.05	3,84	4.08	3,88
15	Jasa Pendidikan	2.75	3.02	2.79	3,05	2.85	3,13	2.94	3,18	3.09	3,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.27	1.31	1.26	1,31	1.28	1,35	1.33	1,39	1.49	1,51
17	Jasa Lainnya	0.71	0.74	0.72	0,76	0.75	0,80	0.76	0,80	0.67	0,71
	PDRB	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100

Sumber data : BPS Kab. Pinrang 2021

Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 - 2020 (Juta Rp).

No	Sektor	2016		2017		2018*		2019**		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
1	2	3		4		5		6		7	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.138.381,33	4.892.687,39	7.935.912,09	5.267.114,96	8.507.077,50	5.514.127,22	8.839.082,07	5.700.352,00	9.081.427,01	5.716.122,55
2	Pertambangan dan penggalan	382.986,93	223.064,56	430.860,30	248.092,15	490.703,09	271.620,17	539.429,20	296.875,30	563. 220,59	303.562,22
3	Industri pengolahan	922.929,32	647.618,83	1.041.413,17	701.117,76	1.103.170,41	720.778,31	1.233.228,21	794.067,20	1. 233.483,28	785.743,32
	Pengadaan Listrik dan Gas	10.057,62	11.912,11	12.772,01	12.621,25	14.158,56	13.751,77	15.602,65	15.316,20	16.162,20	15.998,98
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	667,84	538,72	718,86	572,48	797,43	619,73	841,1	634,9	899,97	671,98
6	Konstruksi	1.423.616,67	967.721,80	1.581.449,55	1.031.813,81	1.823.210,55	1.104.632,21	2.130.422,44	1.232.741,50	2.165.469,94	1.243.766,10
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.898.149.92	1.477.637,60	2.148.673,58	1.622.759,01	2.512.472.39	1.820.609,58	2.871.418,43	1.989.820,40	2.895.761,18	1.968.919,95

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

No	Sektor	2016		2017		2018*		2019**		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
8	Transportasi dan Pergudangan	390.059,36	289.784,89	415.352,10	311.622,65	467,003.85	340,947.64	520.620,01	375.406,90	463.596,12	331.949,52
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128.762,08	90.957,01	145.045,05	98.772,98	167,890.53	111,366.84	190.276,74	122.204,90	175.703,11	109.435,44
10	Informasi dan Komunikasi	318.548,81	295.678,28	359.960,15	324.624,86	413,278.43	361,652.60	462.477,61	401.284,60	520.698,77	455.098,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	322.945,66	226.282,49	346.559,59	231.326,24	382,341.02	244,128.40	402.042,59	249.464,90	404.477,46	250.301,65
12	Real Estate	492.898,25	337.153,99	536.283,95	359.338,36	580,868.66	379,130.55	622.566,47	400.743,80	667.137,37	419.114,69
13	Jasa Perusahaan	15.692,89	12.421,50	17.206,89	13.293,47	19,613.08	14,599.72	21.341,59	15.628,70	20.007,94	14.383,87
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	562.337,41	396.724,44	607.005,04	416.090,67	721,621.92	456,738.56	794.166,16	490.077,90	819.870,58	497.655,84
15	Jasa Pendidikan	404.556,51	313.730,90	457.148,86	341.715,35	515,670.66	375,251.63	576.322,27	406.611,80	621.250,73	429.791,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	186.339,67	135.918,20	206.797,90	147.077,08	231,972.42	161,513.01	260.904,77	177.188,40	298.691,02	193.536,87
17	Jasa Lainnya	104.823,99	77.282,33	117.402,87	84.670,52	135,928.48	95,750.76	149.577,58	101.659,30	135.155,71	90.398,42
PDRB		14.703.754,25	10.397.105,90	16.360.561,94	11.212.623,60	18,087.778.99	11,987,218.7	19.630.319,95	12.770.078,60	20.083.012,97	12.826.451,93

Sumber data : BPS Kab. Pinrang 2021

3.1.1.4 PDRB Perkapita

Salah satu sasaran dalam melaksanakan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB perkapita, walaupun angka yang dihasilkan belum dapat menggambarkan pendapatan masyarakat secara nyata dan merata karena angka tersebut merupakan rata – rata dari keseluruhan penduduk. PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun,hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 52,05 juta. Pada Tahun 2020 mencapai 52,93 juta dan diperkirakan pada tahun 2021 dapat mencapai 56,23 juta kemudian untuk tahun 2022 diproyeksikan 60,61 juta. dengan ini dapat dikatakan bahwa Pendapatan per kapita Penduduk Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama 3 tahun, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
PDRB Perkapita Kab. Pinrang
Tahun 2019-2022

Tahun	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)
2019	52,05
2020	52,93
2021	56,23
2022	60,61

Sumber data : BPS dan diolah oleh Bappelitbangda

3.1.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada akhir tahun 2020. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Pinrang. Melihat dari kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang ditahun 2021 masih memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,85 persen lebih rendah jika dibandingkan dari capaian tahun 2020 yang sebesar 4,19 persen. Adapun target tahun 2022 berdasarkan Perubahan RPJMD adalah 3,45 persen.

Tabel 3.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Pinrang
2019 - 2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,91	4,19	3,85	3,45

Sumber data : BPS Kab. Pinrang 2021

3.1.1.6 Tingkat Kemiskinan

Penurunan Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka berdampak pada meningkatnya Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pinrang. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 8,86% meningkat 0,4% dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan tahun 2019 sebesar 8,46%. Berdasarkan Asumsi Pemulihan Ekonomi tahun 2021 dan 2022, maka Tingkat Kemiskinan 2021 diprediksi menurun 0,3% menjadi 8,56% dan Target tahun 2022 berdasarkan Perubahan RPJMD sebesar 8,46%

Tabel 3.8
Penduduk Miskin Kab. Pinrang
2019 - 2022

No	Indikator	Tahun (Jiwa)			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Penduduk Miskin	8,46	8,86	8,56	8,46

Sumber data : BPS Kab. Pinrang 2021

3.1.1.7 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu indikator untuk mengukur ketimpangan. Nilai Indeks Gini berkisar antar 0 – 1. Semakin tinggi nilai indeks gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 mencapai sebesar 0,375 atau berada di bawah capaian angka propinsi Sulawesi Selatan yaitu 0,389 dan capaian angka nasional yaitu 0,385. Untuk tahun 2021 Indeks Gini Kabupaten Pinrang diprediksi mencapai 0,345 dan di tahun yang sama Propinsi Sulawesi Selatan memprediksi 0,414 dan Nasional memprediksi indeks gini Indonesia sebesar 0,377-0,379. Sementara untuk tahun 2022, Indeks Gini Kabupaten Pinrang ditargetkan turun

mencapai 0,330 lebih rendah dari target Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,398 dan Nasional 0,376-0,378.

Tabel 3.9
Indeks Gini Kab. Pinrang
2020 – 2022

No	Indikator	Tahun (Jiwa)		
		2020	2021	2022
1	2	4	5	6
1	Indeks Gini	0,375	0,345	0,330

3.1.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan pembangunan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, akan tetapi seluruh aspek kehidupan salah satunya adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia sangat penting dilakukan untuk mencapai kesejahteraan penduduk. Indikator dalam proses pembangunan manusia dapat dilihat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara, dan untuk mengklasifikasi apakah sebuah wilayah atau negara tergolong dalam wilayah atau negara maju, berkembang atau terbelakang.

Tabel 3.10
Indeks Pembangunan Manusia Kab. Pinrang
2020 – 2022

No	Indikator	Tahun (Jiwa)		
		2020	2021	2022
1	2	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,26	71,35	71,50

Pada Tahun 2020 nilai IPM Kabupaten Pinrang sebesar 71,26, diprediksi pada tahun 2021 nilai IPM Kabupaten Pinrang dapat mencapai 71,35 dan ditargetkan pada tahun 2022 nilai IPM Kabupaten Pinrang sebesar 71,50.

3.1.2 Proyeksi Indikator Makro Tahun 2022

Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro RKP 2022 dan RKPD Propinsi Sulawesi Selatan 2022, maka Strategi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur serta kelembagaan pemerintahan secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis elektronik
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pada area publik serta meningkatkan peranan Kelurahan sebagai ujung tombak dalam pelayanan public
3. Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kesehatan serta Memenuhi kebutuhan SDM secara proporsional dengan kebutuhan sarana/prasarana dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan
4. meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan masyarakat dan perannya dalam pembangunan
5. Memperkuat dan memelihara karakter moral,akhlak, budaya, ketiakawanan sosial dan ketertiban umum melalui peran aktif lembaga sosial-kemasyarakatan
6. Meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan potensi perempuan agar lebih mampu mandiri dan berkarya serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dengan kedudukan publik yang berpengaruh agar dapat menampung kepentingan perempuan.
7. Meningkatkan keterpenuhan sarana produksi serta alat dan mesin untuk produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,koperasi, UMKM, industri rumah tangga, industri kecil secara bersinergi dengan penguatan aktivitas hilir bidang jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata serta meningkatkan peran penyuluh dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan
8. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan kemampuan kewirausahaan masyarakat guna menciptakan peluang lapangan pekerjaan
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi, perhubungan, irigasi, dan sarana publik lainnya secara terintegrasi dengan penataan ruang dan fasilitas ekonomi
10. meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.

- 11. Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana secara terpadu dengan pemenuhan sarana-prasarana serta SDM penanganan darurat kejadian bencana
- 12. Mengembangkan pusat pendidikan pertanian terpadu secara beriringan dengan penyelenggaraan penyuluhan dan sekolah lapang terpadu pertanian
- 13. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan serta meningkatkan sarana dan prasarana cadangan pangan daerah

Tabel 3.11
Target Indikator Makro Kabupaten Pinrang Tahun 2022

No	Indikator Makro Kabupaten Pinrang	Target Kinerja Tahun 2022		
		P- RPJMD Kabupaten Pinrang	RKPD Sulawesi Selatan	RKPD Kabupaten Pinrang
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00	4,57 – 6,09	5,00
2	PDRB Perkapita	60,61	-	60,61
3	Tingkat Pengangguran	3,45	3,06	3,45
4	Gini Ratio	0,330	0,321	0,330
5	Kemiskinan	8,46	8,37	8,46
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,50	71,84	71,50

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah

satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran / belanja public. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dalam membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor social pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya / basic needs (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya

kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakat-pun akan berkurang, karena kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan *kebijakan reformasi* dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas
- b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja
- c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD)
- d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2021 di Kabupaten Pinrang diarahkan untuk:

- a. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
- b. Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;

- c. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara:
(1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.
- d. Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2018, yaitu: (1) Meningkatnya pelayanan publik, penyelenggaraan *good governance*, kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi, serta pelestarian nilai-nilai budaya. (3) Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan sosial dasar masyarakat, kapasitas serta produktifitas kerja, perumahan, dan prasarana dasar pemukiman, dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin; (4) Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan dengan pendekatan komoditas dan kawasan yang didukung oleh pembangunan pertanian dalam arti luas, infrastruktur, energi, koperasi dan UMKM serta pariwisata; (5) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, pemanfaatan ruang, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern.

Untuk jenis pajak daerah yang bersifat *self assessment*, koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah akan terus diintensifkan dengan harapan adanya kerjasama-kerjasama lintas sektor yang menguntungkan bagi penerimaan pendapatan daerah. Disamping modernisasi pelayanan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan terus ditingkatkan melalui pendataan dan penagihan pajak secara aktif diiringi penegakan sanksi yang efektif. Selain berdampak langsung kepada penerimaan Pajak Daerah, upaya ini juga menunjang penerimaan dari sisi Lain-Lain PAD Yang Sah. Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah, peningkatan hasil retribusi daerah juga akan mendapat perhatian melalui perbaikan sistem pengelolaan retribusi menjadi

lebih efisien dan akuntabel. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.

3.2.1.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Kabupaten Pinrang bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berikut ini disajikan data realisasi dan proyeksi target pendapatan periode 2019 – 2022

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pinrang Tahun 2019 - 2022

PP 58/2005		Realisasi (Rp)		PP 12/2019		Target 2021	Proyeksi (Rp)	
No	Uraian			No	Uraian (Sesuai PP 12/2019)		2022	2023
1	Pendapatan Daerah	1.300.927.793.264,14	1.312.939.658.814,18	4	Pendapatan Daerah	1.293.122.546.796,00	1.397.546.488.922,00	1.419.835.291.436,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	133.363.942.030,14	131.176.927.320,35	4.1	Pendapatan Asli Daerah	136.394.122.796,00	146.346.122.796,00	151.163.428.935,00
1.1.1	Pajak Daerah	29.855.768.183,00	31.362.250.639,00	4.1.1	Pajak Daerah	29.165.564.000,00	36.165.564.000,00	39.073.842.200,00
1.1.2	Restribusi Daerah	4.379.680.158,00	3.952.291.808,00	4.1.2	Restribusi Daerah	3.474.736.000,00	3.426.736.000,00	3.598.072.800,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	9.579.675.801,00	8.343.822.796,00	4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	8.343.822.796,00	8.343.822.796,00	8.461.013.935,00
1.1.4	Lain - Lain Pendapata Asli Daerah	89.548.817.888,14	87.518.562.077,35	4.1.4	Lain - Lain Pendapata Asli Daerah	95.410.000.000,00	98.410.000.000,00	100.030.500.000,00
1.2	Dana Perimbangan	972.000.085.303,00	929.729.919.743,00	4.2	Pendapatan Transfer	1.103.467.980.000,00	1.194.939.922.126,00	1.207.774.862.501,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	13.557.097.614,00	17.336.756.680,00	4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.036.936.480.000,00	1.118.908.422.126,00	1.129.243.362.501,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	744.790.264.000,00	673.175.379.000,00	4.2.1.1	Dana Perimbangan	938.999.305.000,00	1.020.971.247.126,00	1.031.019.432.501,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	213.652.723.689,00	239.217.784.063,00	4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	698.051.004.000,00	739.377.504.000,00	745.188.365.225,00
				4.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	14.730.445.000,00	16.056.945.000,00	16.859.792.250,00
1.3	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	195.563.765.931,00	252.032.811.750,83	4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	683.320.559.000,00	723.320.559.000,00	728.328.572.975,00
1.3.1	Hibah	53.124.079.777,00	63.808.057.641,00	4.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	240.948.301.000,00	281.593.743.126,00	285.831.067.276,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	4.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus	98.746.483.000,00	124.746.483.000,00	126.983.807.150,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	69.717.764.754,00	62.993.359.709,83	4.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	142.201.818.000,00	156.847.260.126,00	158.847.260.126,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-		4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	27.713.245.000,00	27.713.245.000,00	28.000.000.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.758.000,00	42.602.646.400,00	4.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
1.3.6	Dana Transfer lainnya	72.716.163.400,00	82.628.748.000,00	4.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-
				4.2.1.5	Dana Desa	70.223.930.000,00	70.223.930.000,00	70.223.930.000,00
				4.2.2	Transfer Antar Daerah	66.531.500.000,00	76.031.500.000,00	78.531.500.000,00
				4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	55.925.500.000,00	65.425.500.000,00	67.925.500.000,00
				4.2.2.2	Bantuan Keuangan	10.606.000.000,00	10.606.000.000,00	10.606.000.000,00
				4.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	53.260.444.000,00	56.260.444.000,00	60.897.000.000,00
				4.3.1	Hibah	3.863.444.000,00	3.863.444.000,00	4.500.000.000,00
				4.3.2	Dana Darurat			
				4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	49.397.000.000,00	52.397.000.000,00	56.397.000.000,00

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam **Peraturan Gubernur nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam peraturan Bupati tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Nomenkelatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pinrang Tahun 2022 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.2.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor

akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset

sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2.4 Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten / Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah

yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2022, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2021 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2022 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2023

PP 58/2005		Realisasi (Rp)		PP 12/2019		Target 2021	Proyeksi (Rp)	
No	Uraian			No	Uraian		2022	2023
2	Belanja Daerah	1.293.600.671.573	1.325.082.586.616	5	Belanja Daerah	1.448.122.546.796	1.432.546.488.922	1.454.835.291.436
2.1	Belanja Tidak Langsung	718.667.048.736	726.963.224.985	5.1	Belanja Operasi	1.039.748.512.211	1.000.106.024.937	1.015.333.830.102
2.1.1	Belanja Pegawai	560.451.684.336	568.189.548.944	5.1.1	Belanja Pegawai	620.926.778.101	611.811.334.752,00	622.394.132.368,00
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	352.226.398.930	285.428.505.760,00	288.651.858.700,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0	5.1.3	Belanja Bunga	0	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	11.484.087.500	11.964.650.000	5.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.654.700.000	182.150.000	5.1.5	Belanja Hibah	63.927.533.200	100.198.181.501,00	101.553.136.037,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0	0	5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.667.801.980	2.668.002.924,00	2.734.702.997,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	143.736.094.700	136.474.759.900	5.2	Belanja Modal	257.846.825.985	280.399.168.585,00	286.554.643.174,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	340.482.200	10.152.116.141		Belanja Modal	257.846.825.985	280.399.168.585,00	286.554.643.174,00
2.2	Belanja Langsung	574.933.622.837	598.119.361.631	5.3	Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000	10.000.000.000	10.250.000.000
2.2.1	Belanja Pegawai	31.999.307.196	37.258.059.400	5.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000	10.000.000.000,00	10.250.000.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	387.229.711.666	323.971.458.659	5.4	Belanja Transfer	141.527.208.600	142.041.295.400	142.696.818.160
2.2.3	Belanja Modal	155.704.603.975	236.889.843.572	5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.465.528.200	1.979.615.000,00	2.133.595.750,00
				5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	140.061.680.400	140.061.680.400,00	140.563.222.410,00

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar **Rp. 1.432.546.488.922,00** yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 1.000.106.024.937,00**, Belanja Modal sebesar **Rp. 280.399.168.585,00**, Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp. 10.000.000.000,00**, serta Belanja Transfer sebesar **Rp. 142.041.295.400,00**. Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah tahun 2022.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 174.441.578.411,00** atau 12,18% dari total belanja sebesar **Rp. 1.432.546.488.922,00** dengan rincian alokasi sebagai berikut :

Tabel 3.14

Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja Terhadap Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2022

No	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	83.301.804.221,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	58.867.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	15.120.952.027,00	Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang
3	Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.244.397.987,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	5.700.179.176,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	35.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.491.345.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.253.900.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Sosial	Program Penanggulangan Bencana	203.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kerangka pendanaan yang merupakan perspektif rencana penganggaran untuk tahun depan, sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkan atas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Hal ini diawali dengan target asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah. Belanja Daerah sebesar Rp. 1.432.546.488.922,00 digunakan untuk membiayai program yang telah dikaitkan dengan prioritas daerah seperti yang tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.15
Program Terkait Prioritas Daerah Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2		3	4	5
1	Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
				persentase kebutuhan layanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terpenuhi	Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikembangkan dan dilestarikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keterpenuhan prinsip Dasar kepramukaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase terlestariannya cagar budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok masyarakat terhadap kegiatan kesenian tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan, Pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikembangkan dan dilestarikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase partisipasi lembaga/organisasi masyarakat pada setiap kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan taman makam pahlawan	Dinas Sosial
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya lapangan kerja/usaha	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP,PKB,LKS,Bipartit Struktur skala upah dan terdaftar BPJS)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase program layanan izin usaha simpan pinjam	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dalam Wilayah Kabupaten Pinrang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi dalam wilayah Kabupaten Pinrang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang terampil dan berdaya saing	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan kuantitas produk usaha koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro dalam wilayah kab.Pinrang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Investasi iklim penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pelaksanaan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten /kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan Wisatawan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja pariwisata yang dibina memiliki kompetensi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan perdagangan yang memiliki dokumentasi perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat ber-SNI	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan penting antar waktu	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Eskpor Barang dan Jasa (Ekspor Bersih Perdagangan)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pasar Rakyat Tertib Ukur	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Barang Produksi Dalam Negeri Lokal yang diperdagangkan di Toko Swalayan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	Dinas Sosial
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemulangan WNI Migran	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemenuhan pelayanan dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA regional yang dibangun sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pelaksanaan Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase partisipasi warga, pemerintah setempat dan instansi terkait yang mengikuti Musyawarah penetapan kawasan'	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi yang terpenuhi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi yang terpenuhi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
				Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah perlabuhan yang terpakai sesuai kebutuhan masyarakat	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyaluran ADD	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	Kecamatan Watang Sawitto
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	Kecamatan Paleteang
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	Kecamatan Tiroang
3				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	Kecamatan Mattiro Bulu
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	Kecamatan Suppa
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	Kecamatan Mattiro Sompe

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	Kecamatan Lanrisang
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	Kecamatan Patampanua
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	Kecamatan Duampanua
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	Kecamatan Batulappa
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	Kecamatan Cempa
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	Kecamatan Lembang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Watang Sawitto
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Paleteang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tiroang
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mattiro Bulu
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Suppa
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mattiro Sompe
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lanrisang
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Patampanua
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Duampanua
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Batulappa
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Cempa
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lembang
3	Pemanfaatan potensi sumber ekonomi secara optimal dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca COVID 19	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume produksi perikanan tangkap	Dinas Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Dinas Perikanan
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi	Dinas Perikanan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian tanaman Holtikultura utama (cabe) per tahun (ton)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Persentase Peningkatan Produksi dan Daya Saing Komoditas Peternakan dan Perkebunan per tahun	Dinas Peternakan dan Perkebunan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama (padi) per hektar per tahun (ton/ha)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Persentase Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Komoditas Peternakan dan Perkebunan per tahun	Dinas Peternakan dan Perkebunan
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (hpms) 4% pertahun	Dinas Peternakan dan Perkebunan
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah PDRB Pertanian Komoditi Tanaman Pangan dan Komoditi Tanaman Hortikultura (Rp. 000.000,-)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				presentase menurunnya serangan hama dan opt tanaman perkebunan	Dinas Peternakan dan Perkebunan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Perikanan
				Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (NTP)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok penerima bantuan (%)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

		Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Dinas Ketahanan Pangan
4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penyaluran cadangan pangan pada suatu wilayah yang tertangani	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan
4	Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketercapaian dokumen Perencanaan lingkungan hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan KEHATI	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab usaha da/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase keterlibatan MHA dalam pengelolaan lingkungan hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase keterlibatan MHA dalam pengelolaan lingkungan hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang lingkungan hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan di wilayah Kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

5	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata kelola Pemerintahan guna mewujudkan Good Governance	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Inspektorat
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan SOP	Inspektorat
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan diklat pengembangan kompetensi, manajerial dan fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	Bappelitbangda
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappelitbangda
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder	Bappelitbangda
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD yang dalam pelaporan Pengelolaan barang milik daerah selesai tepat waktu dan akurat	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan asli Daerah naik 5 % dengan memperhatikan keadilan untuk semua	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral pemerintahan kabupaten pinrang	komunikasi, Informatika dan Persandian
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	komunikasi, Informatika dan Persandian
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/kota	Sekretariat Daerah
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Capaian Tugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	Sek DPRD
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lanrisang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Sek DPRD
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Bappelitbangda

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Inspektorat
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang terdaftar dalam database	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik	komunikasi, Informatika dan Persandian
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang memanfaatkan E - Government	komunikasi, Informatika dan Persandian
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Paleteang
				Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tiroang
				Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Mattirotulu
				Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Suppa
				Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Lanrisang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

				Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Patampanua
				Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Duampanua
				Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Batulappa
				Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Lembang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	komunikasi, Informatika dan Persandian
6	Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase cakupan sosialisasi pendidika politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengembangan ketahanan,ekonomi,sosial dan budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase ketercapaian peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, telah ditetapkan proyeksi pagu belanja perangkat daerah tahun 2022 yang mana nomenklatur perangkat daerah ini telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tabel 3.16

Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2022

NO.	OPD	Pagu 2022
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	402.961.086.132,00
2	DINAS KESEHATAN	164.001.155.921,00
3	RUMAH SAKIT UMUM LASINRANG	107.736.575.224,00
4	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	40.419.756.807,00
5	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	111.852.163.961,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	12.595.934.986,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.213.826.066,00
8	DINAS SOSIAL	4.793.823.650,00
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.251.542.560,00
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.425.624.425,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.929.619.881,00
12	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	20.080.479.960,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.233.241.831,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	77.859.461.049,00
15	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	9.641.662.031,00
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	11.839.767.829,00
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	4.050.614.572,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.720.966.307,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.407.500.984,00
20	DINAS PERIKANAN	12.763.380.176,00
21	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.242.740.065,00
22	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	53.517.099.998,00
23	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	9.065.904.988,00
24	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8.220.223.664,00

25	SEKRETARIAT DAERAH	55.110.444.135,00
26	SEKRETARIAT DPRD	42.289.237.192,00
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.847.431.194,00
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	120.313.375.124,00
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.560.427.279,00
30	INSPEKTORAT	12.194.873.862,00
31	KECAMATAN WATANG SAWITTO	12.877.518.788,00
32	KECAMATAN PALETEANG	10.479.870.822,00
33	KECAMATAN TIROANG	8.228.410.322,00
34	KECAMATAN MATTIRO BULU	5.466.637.378,00
35	KECAMATAN SUPPA	4.505.171.612,00
36	KECAMATAN MATTIRO SOMPE	4.967.010.584,00
37	KECAMATAN LANRISANG	3.705.675.694,00
38	KECAMATAN PATAMPANUA	7.303.585.508,00
39	KECAMATAN DUAMPANUA	7.930.427.241,00
40	KECAMATAN BATULAPPA	3.206.290.129,00
41	KECAMATAN LEMBANG	4.871.260.269,00
42	KECAMATAN CEMPA	3.603.566.008,00
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.261.122.714,00
	TOTAL	1.432.546.488.922,00

Pada tanggal 25 – 27 September 2015 berlangsung Sidang Umum PBB yang dihadiri ratusan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Sidang itu akan menyepakati adopsi Sustainable Development Goals (SDG) untuk periode 2015 – 2030. Tujuan Pembangunan berkelanjutan ini akan menggantikan Millenium Development Goals (MDG).

Dalam upaya pencapaian target TPB / SDGs yang menjadi prioritas pembangunan memerlukan sinergi kebijakan perencanaan yakni Pencapaian Target, Kesesuaian dan Keselarasan TPB / SDGs dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam mendukung pencapaian tersebut, Kabupaten pinrang telah mengalokasikan sejumlah anggaran pada program – program yang mendukung pencapaian target – target TPB / SDGs. Alokasi Anggaran tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17
Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Program Pembangunan Daerah
Terhadap Tujuan TPB / SDGs Tahun 2022

NO	TUJUAN SDGS	PROGRAM		PAGU
1	MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN	1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	407.000.000
		2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	224.000.000
		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100.000.000
		4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	72.845.000
		5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	58.867.000.000
		6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	25.000.000.000
		7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.244.397.987
		8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.700.179.176
		9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	83.301.804.221
		10	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	900.000.000
		11	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	203.000.000
		12	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	270.000.000
		13	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.653.074.000
2	MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	380.000.000
		2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	260.000.000
		3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	1.225.000.000
		4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	200.000.000
		5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Program Telah digunakan di Tujuan 1
		6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Program Telah digunakan di Tujuan 1
		7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	30.941.960.017
		8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	31.628.099.998

3	MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Program Telah digunakan di Tujuan 2
		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Program Telah digunakan di Tujuan 2
		3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Program Telah digunakan di Tujuan 2
		4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	15.120.952.027
		5	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	155.000.000
		6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.540.000.000
		7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.129.896.000
4	MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program Telah digunakan di Tujuan 1
		2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Program Telah digunakan di Tujuan 1
		3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	930.297.732
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.056.000.000
5	MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN	1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	31.000.000
		2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	66.840.000
		3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Program Telah digunakan di Tujuan 3
		4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	78.160.000
		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	911.936.000
6	MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Program Telah digunakan di Tujuan 1
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Program Telah digunakan di Tujuan 1
		3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Program Telah digunakan di Tujuan 2
		4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	29.775.035.036
		5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.620.000.000
		6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program Telah digunakan di Tujuan 1

8	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA	1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.885.100.000
		2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	53.305.000
		3	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	20.000.000
		4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Program Telah digunakan di Tujuan 1
		5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	278.000.000
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	110.000.000
		7	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	206.000.000
		8	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	53.000.000
		9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	77.780.000
		10	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	41.676.000
9	MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI	1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	118.445.000
		2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.008.015.000
		3	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	38.702.140
		4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.242.059.000
		5	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	62.425.000
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	35.739.000
		7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	126.114.975
		8	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	5.500.000
		9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	372.797.165
		10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	11.900.000
		11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.064.224.300
		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	70.426.174.535
		13	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	300.000.000
		14	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program Telah digunakan di Tujuan 1
10	MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA	1	PROGRAM PENATAAN DESA	359.480.500
		2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	200.000.000
		3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	72.079.857.572

		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Program Telah digunakan di Tujuan 5
		5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Program Telah digunakan di Tujuan 1
		6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.305.050.000
11	MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Program Telah digunakan di Tujuan 1
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	35.000.000
		3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000
		4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN,	7.470.000.000
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.099.923.264
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	516.339.966
		7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	126.500.000
12	MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Program Telah digunakan di Tujuan 11
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Program Telah digunakan di Tujuan 11
		3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Telah digunakan di Tujuan 6
		4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100.000.000
13	MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Program Telah digunakan di Tujuan 1
		2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Program Telah digunakan di Tujuan 6
		3	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	70.000.000
		4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	15.000.000
15	MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	100.000.000
		2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Telah digunakan di Tujuan 13

		3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Program Telah digunakan di Tujuan 6
16	MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES Keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	1	ROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.491.345.000
		2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	84.140.679.840
		3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	758.000.000
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.004.783.700
		5	ROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	478.190.000
		6	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.464.151.900
		7	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	161.229.500
		8	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	195.560.000
		9	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	217.578.750
		10	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Program Telah digunakan di Tujuan 8
		11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.620.294.135
		12	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.502.737.192
		13	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Program Telah digunakan di Tujuan 5
		14	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Program Telah digunakan di Tujuan 5
17	MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI Kemitraan Global untuk pembangunan berkelanjutan	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.188.000.000
		2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Program Telah digunakan di Tujuan 16
		3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.423.780.000
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Program Telah digunakan di Tujuan 16
		5	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Program Telah digunakan di Tujuan 16

3.2.3 Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan

Secara umum komponen Pembiayaan daerah terdiri atas **Penerimaan Pembiayaan Daerah** yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah dan **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang.

Tabel 3.18
Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan
Kabupaten Pinrang

PP 58/2005		Realisasi (Rp)	PP 12/2019		Target 2021	Proyeksi (Rp)		
No	Uraian		No	Uraian		2022	2023	2024
3	Pembiayaan	84.668.705.705,05	6	Pembiayaan	155.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	84.668.705.705,05	6.1	Penerimaan Pembiayaan	155.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-

3.2.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menunjukkan kapasitas riil kemampuan kemampuan keuangan daerah untuk alokasi belanja langsung program pembangunan daerah, baik berupa program pembangunan daerah maupun berupa program perangkat daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini merupakan selisih dari penerimaan daerah dan kewajiban daerah untuk belanja tidak langsung dan pengeluaran wajib daerah. Peningkatan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih besar dari pertumbuhan belanja daerah.

Mendasarkan pada proyeksi pendapatan pada tabel sebelumnya, Kebijakan Kemampuan Keuangan Daerah di prioritaskan pada pemenuhan Belanja Operasi dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja Operasi antara lain terdiribelanja pegawai, belanja bunga, belanja tambahan penghasilan PNS, dan belanja hibah sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari rencana penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok utang.

Tabel 3.19
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2020 -2024 (Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan	1.312.939.658.814,18	1.293.122.546.796,00	1.397.546.488.922,00	1.419.835.291.436,00	1.436.137.115.292,00
2	Pencarian Dana Cadangan (Sesuai perda)	-	100.000.000.000	-	-	-
3	Sisal Lebih Riil Perhitungan Anggaran	84.668.705.705,05	55.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
4	Total Penerimaan	1.397.608.364.519,23	1.448.122.546.796,00	1.432.546.488.922,00	1.454.835.291.436,00	1.471.137.115.292,00
	Dikurangi:					
5	Belanja Operasi + BTT + Belanja Transfer	764.221.284.385,00	838.049.321.881,00	866.718.814.577,00	879.628.789.562,00	893.376.622.440,25
6	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		633.387.080.134,23	610.073.224.915,00	565.827.674.345,00	575.206.501.874,00	577.760.492.851,75

Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Diperkirakan dengan kebijakan pembiayaan defisit yang akan ditempuh akan mendorong upaya nyata pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan daerah, baik yang bersumber dari dalam daerah maupun yang bersumber dari luar daerah. Kebijakan tersebut diharapkan akan mendatangkan penerimaan daerah untuk alokasi pengeluaran pembiayaan daerah setiap tahunnya. Artinya, selain

berupa pendapatan daerah, pemerintah daerah juga akan memperoleh sumber penerimaan dari penerimaan pembiayaan, sehingga diharapkan total penerimaan daerah akan meningkat dari hanya Rp 1,397 trilyun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1,471 trilyun pada tahun 2024.

Tabel 3.20
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 (Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahuyn 2023	Tahun 2024
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	610.073.224.915	565.827.674.345	575.206.501.874	577.760.492.852
2	Prioritas I	563.130.277.330	501.825.351.154	506.005.690.613	512.348.232.300
3	Prioritas II	46.942.947.585	63.793.323.191	68.973.182.170	65.119.160.552

Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini, dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam kategori dua prioritas. Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan pemenuhan visi dan misi kepala daerah. Belanja untuk pemenuhan visi dan misi kepala daerah dimasukkan dalam Prioritas I disebabkan karena Indikator Capaian Standar Pelayanan Miimal (SPM) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rumusan visi dan misi kepala daerah. Sedangkan prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten namun tidak menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2019 - 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2020, prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Bab ini berisi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati yang tertuang dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, capaian target pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal- eksternal.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam rancangan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah.

Visi dari Bupati Terpilih periode 2019 – 2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah”**.

Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 mengandung Lima substansi pokok visi yakni “masyarakat sejahtera”, “Religius”, “Harmonis”, “Mandiri” dan Tangguh mengelola Potensi Daerah”. Adapun kandungan dari Lima pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan visi
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang Yang Sejahtera, religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi daerah	Masyarakat Sejahtera	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat Miskin Berkurang• Derajat Kesehatan Meningkat• Meningkatnya Jumlah masyarakat Terdidik• Kemudahan dalam mengakses Pelayanan Publik
	Masyarakat Religius	<ul style="list-style-type: none">• Atmosfir Kehidupan Kerohanian masyarakat bersama ,Pemda lebih bersinergi• meningkatnya kualitas iman, akhlak dan moralitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
	Masyarakat Harmonis	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Ketentraman Hidup masyarakat• Masyarakat memiliki sifat Kebersamaan, Kesetia Kawanannya Sosial, Rukun dan toleransi• Masyarakat Mencintai Kearifan Budaya dan lingkungan alam kehidupannya
	Masyarakat Mandiri	<ul style="list-style-type: none">• Keswadayaan Masyarakat• Pengelolaan Optimal dalam Mengelola Potensi Unggulan daerah pada Subsektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan
	Tangguh Mengelola Potensi	<ul style="list-style-type: none">• Kemampuan Beradaptasi terhadap perubahan• Peningkatan Pengelolaan subsektor potensial lainnya.• Pengelolaan Potensi SDA yang ramah lingkungan

“Masyarakat sejahtera” adalah Sebagai tujuan utama pembangunan yang hendak dicapai, maka Pemerintahan Kabupaten berkewajiban menghadirkan tindakan nyata membangun kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih baik sehingga 5 tahun kedepan jumlah masyarakat miskin berkurang, produktivitas dan pendapatan masyarakat meningkat, jumlah masyarakat terdidik meningkat, derajat kesehatan masyarakat meningkat, akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang dibutuhkan makin mudah, serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat makin membaik. Demikian pula halnya dengan kesejahteraan seluruh jajaran aparat pemerintahan pada semua tingkatan.

Wujud kesejahteraan ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus berkembang dalam trend positif secara berkelanjutan.Tingkat capaian ini terus tumbuh dan meningkat lebih berkualitas dari periode pembangunan sebelumnya (2014-2019)

dan pada periode 2019-2024 diharapkan terus berkembang secara partisipatif dan mandiri berkat tata kelola pemerintahan, kualitas sumberdaya masyarakat, sinergi kelembagaan masyarakat dan pemerintah, serta iklim usaha yang semakin baik. Inisiatif utama perwujudan kesejahteraan ini berasal dari masyarakat sebagai subyek utama pembangunan serta peran pemerintah yang secara konsisten dan konsekuen berperan sebagai pelayan, fasilitator, dan dinamisator pembangunan.

“Masyarakat religius” Bertujuan bahwa 5 tahun ke depan diharapkan akan tercipta atmosfir kehidupan kerohanian masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten Pinrang yang semakin bernilai Ketaqwaan, Amal dan Ibadah sebagai buah dari meningkatnya kualitas iman, akhlak dan moralitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Masyarakat Harmonis” bermakna terwujudnya ketenteraman hidup masyarakat karena terbangunnya tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki sikap kebersamaan, persaudaraan, kepedulian, kesetiakawanan sosial, rukun dan toleran serta mencintai kearifan budaya dan lingkungan alam kehidupannya.

“Masyarakat Mandiri” bermakna Bahwa pembangunan Kabupaten Pinrang 5 tahun ke depan akan menciptakan kondisi bagi munculnya prakarsa-prakarsa masyarakat, keswadayaan, semangat gotong-royong, kemampuan beradaptasi serta tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial-ekonomi-ekologi.

“Tangguh Mengelola Potensi Daerah” merupakan Faktor penting bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang 5 tahun ke depan adalah kesiapan serta kesungguhan Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat mengelola potensi unggulan daerah pada sub-sektor Pertanian (Beras, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Perkebunan (Kopi dan Kakao), Perikanan (Ikan, Udang dan Rumput Laut) dan Peternakan (Sapi dan Kambing) disamping sub-sektor potensial lainnya agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Guna mewujudkan dan mendukung Visi Kab. Pinrang, telah ditetapkan Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap Misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada masing-masing Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD
Kabupaten Pinrang

MISI	PENJELASAN MISI	POKOK VISI
1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.	Misi ini mencakup upaya pokok mewujudkan sistem birokrasi yang akuntabel dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Upaya perwujudan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau <i>electronic governance (e-governance)</i> .	Masyarakat Harmonis
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan	Misi ini mencakup upaya pokok dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Upaya ini merupakan bagian dari perbaikan kualitas manusia secara khusus dan kualitas kehidupan masyarakat secara umum.	Masyarakat Sejahtera
3. Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus	Misi ini mencakup upaya pokok peningkatan peranan lembaga kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Kabupaten Pinrang. Penguatan peran lembaga sosial-kemasyarakatan tersebut juga diarahkan untuk pembentukan karakter masyarakat beriman dan bertakwa serta harmonis.	Masyarakat Harmonis
4. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan	Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengembangan investasi yang atraktif, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.	Masyarakat Sejahtera
5. Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur	Misi ini mencakup upaya pokok dalam optimalisasi pengelolaan infrastruktur dan sarana/prasarana publik terutama untuk mengatasi	Tangguh Mengelola Potensi

dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.	ketertinggalan di wilayah pegunungan Pinrang Utara yang meliputi kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang. Pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana publik tersebut juga diarahkan untuk mendukung kinerja pelayanan dasar serta memperlancar konektivitas wilayah.	
Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemeliharaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Secara lebih rinci upaya tersebut mencakup upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, penanganan sampah dan limbah, penanggulangan bencana, serta adaptasi perubahan iklim.	Tangguh Mengelola Potensi
Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan	Misi ini mencakup upaya pokok dalam pengembangan pendidikan terapan untuk kompetensi SDM bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan guna peningkatan kinerja agribisnis berbasis agropolitan dan minapolitan. Selain itu, pengembangan pusat-pusat pendidikan terapan tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Pinrang sebagai poros utama pemenuhan pangan nasional dan pengembangan ekonomi komoditas unggulan.	Masyarakat Mandiri

Tabel 4.3
Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah			
Misi 1 : Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2022
Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur sejalan dengan peningkatan kualitas informasi dan kinerja pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi	Akselerasi pencapaian pilar-pilar reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Memperbaiki pelayanan terpadu satu pintu seiring dengan penguatan pelayanan publik pada level kecamatan dan desa / Kelurahan	Modernisasi pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan publik lainnya
Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2022
Mewujudkan kualitas manusia yang berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Memenuhi kebutuhan SDM secara proporsional dengan kebutuhan sarana/prasarana dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan serta Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan pola hidup sehat
Misi 3 : Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2022

Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat	Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Membuka ruang partisipasi bagi lembaga keagamaan, lembaga adat, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi PKK, dan Pers dalam mendukung pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi lembaga keagamaan, lembaga adat, dan organisasi sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah
	Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Memperkuat dan memelihara karakter moral,akhlak, budaya, ketiakawanan sosial dan ketertiban umum melalui peran aktif lembaga sosial-kemasyarakatan	penguatan lanjutan nilai-nilai lokal dalam upaya Pemajuan budaya daerah dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan
	Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan potensi perempuan agar lebih mampu mandiri dan berkarya serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dengan kedudukan publik yang berpengaruh agar dapat menampung kepentingan perempuan.	Pelibatan kelompok perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Misi 4: Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2022
Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Meningkatkan keterpenuhan sarana produksi serta alat dan mesin untuk produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,koperasi, UMKM, industri rumah tangga, industri kecil secara bersinergi dengan penguatan aktivitas hilir bidang	Pemulihan iklim usaha bagi sektor jasa, perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata serta Pengembangan kapasitas Pengolahan hasil untuk nilai tambah produk-produk unggulan daerah

		jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata	
	Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan kemampuan kewirausahaan masyarakat guna menciptakan peluang lapangan pekerjaan	Fasilitasi penyerapan tenaga kerja serta Pembinaan kewirausahaan terutama bagi rakyat miskin dan kemitraan dengan pihak DUDI (dunia usaha dan dunia industri)
Misi 5 : Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2022
Mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/prasarana publik	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan efektivitas infrastruktur transportasi, perhubungan, irigasi, dan sarana publik lainnya secara terintegrasi dengan penataan ruang dan fasilitas ekonomi	Pemenuhan sarana prasarana publik wilayah pegunungan dan perbatasan serta Penataan ruang perkotaan dan fasilitas perekonomian
Misi 6 : Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2022
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemangku kepentingan dalam penanganan limbah dan pencemaran, serta Mendorong, meningkatkan dan memelihara budaya hidup bersih oleh masyarakat secara terpadudengan pemenuhan sarana-prasarana penanganan kebersihan dan keindahan kota	Akselerasi penguatan sistem pengelolaan persampahan dan pemberdayaan masyarakat Penataan taman dan ruang terbuka hijau perkotaan
	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanganan bencana	Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana secara terpadu dengan pemenuhan sarana-	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana, lanjutan penguatan mitigasi bencana dan kebakaran

		prasarana serta SDM penanganan darurat kejadian bencana	
Misi 7 : Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2022
Meningkatkan Produktifitas tanaman pangan	Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Mengembangkan pusat pendidikan pertanian terpadu secara beriringan dengan penyelenggaraan penyuluhan dan sekolah lapang terpadu pertanian	Penguatan koordinasi pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi pertanian terapan
	Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan serta peningkatan sarana dan prasarana cadangan pangan daerah	Pemanfaatan teknologi pertanian serta Peningkatan Sarana Prasarana Cadangan Pangan Daerah

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran serta Target Pembangunan Kabupaten Pinrang
Tahun 2022 berdasarkan RPJMD Tahun 2019 - 2024

Tujuan dan Sasaran Misi					Kondisi	Target
No	Uraian Tujuan, Sasaran dan Misi	No	Indikator	Satuan Indikator	2020	2022
01.	Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan					
	1		Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Nilai	52,67	60
01..	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik					
		1	Nilai SAKIP Kab. Pinrang	Nilai	62,86	65
02..	Meningkatnya kualitas pelayanan public					
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	Nilai dan Predikat	85,99	87,35
02.	Mewujudkan kualitas manusia yang berdaya saing					
	2		Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	71,26	71,50
03..	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan dalam mendukung kualitas manusia					
		3	Indeks Pendidikan	Nilai	62,95	63,4
		4	Indeks Kesehatan	Nilai	76,32	77,35
03	Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat					
	3		Indeks Partisipasi Masyarakat dalam Pembanguna		-	42,50
04	Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan					
		5	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	%	73	80
05	Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis					
		6	Presentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	85,90	90
06..	Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan					
		7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68,11(IDG)	71,21 (IDG)
04.	Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata					
	4		Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	%	8,86	8,46
	5		Gini Ratio	Nilai	0,375	0,33
07..	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan					
		8	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,44	5
08..	Meningkatnya lapangan kerja/usaha					
		9	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,19	3,45
05.	Mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/prasarana public					
	7		Indeks Perkembangan Wilayah	Nilai	78	82
09..	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah					
		10	Indeks Layanan Infrastruktur	%	75,8	82,5
		11	Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara (Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang)	%	31,6	50
06.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan					
	8		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	68,74	69,75
10..	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim					

			12	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	36,84	36,84
	11..	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana					
			13	Indeks Resiko Bencana	Nilai	205	185
07.	Meningkatkan Produktifitas tanaman pangan						
		8	Produktivitas tanaman pangan utama (padi) per hektar		Ton / Ha	5,9	6,15
	12..	Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian					
			14	Persentase Kelompok tani kelas Madya	%	3,73	5
	13..	Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan					
			15	Penguatan cadangan pangan	%	173,062	190,062%

4.2. PrioritasPembangunan Kavupaten Pinrang Tahun 2022

Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Pinrang tahun 2022 dirumuskan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan propinsi Sulawesi Selatan.

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**” dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tema Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah “**Inovasi Pemanfaatan Potensi dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi**” dan Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah :

1. Pemantapan Reformasi Birokrasi
2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan

3. Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial
4. Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter dan Berbudaya
5. Pengelolaan Komoditas Unggulan Berbasis Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah setelah dilakukan analisa terhadap berbagai permasalahan pembangunan daerah, maka yang menjadi isu strategis RKPD 2022 adalah :

1. Implementasi e-Government pada seluruh PD
2. Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan untuk semua lapisan masyarakat Kabupaten Pinrang
3. keterlibatan lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan daerah
4. Pemulihan sosial ekonomi dampak covid
5. Minimnya sarana infrastruktur pada objek destinasi wisata, serta sarana dan prasarana infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar yang musti ditingkatkan
6. Potensi kerusakan lingkungan hidup dan resiko bencana
7. Meningkatkan kehidupan demokrasi bangsa yang makin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat, Pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban serta Penegakan perda dalam upaya meminimalisir potensi gangguan trantibum)
8. Inovasi dan adopsi teknologi pertanian

Tema pembangunan Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 telah diselaraskan dengan Isu Strategis Kabupaten Pinrang, sehingga tema pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2022 adalah

“Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi Serta Penanganan Dampak Pandemi Covid 19”.

Berdasarkan tema pembangunan diatas, dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan pembangunan daerah dan memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan maka prioritas pembangunan Tahun 2022 Kabupaten Pinrang adalah :

1. Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan
2. Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemenuhan pelayanan dasar
3. Pemanfaatan potensi sumber ekonomi secara optimal dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca COVID 19

- 4. Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana
 - 5. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata kelola Pemerintahan guna mewujudkan Good Governance
 - 6. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan
- Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kabupaten Pinrang dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hubungan Keterkaitan antara Isu Strategis Kabupaten Pinrang, Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Isu Strategis Kabupaten Pinrang	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang 2020	Permasalahan Pembangunan Daerah
1. Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan untuk semua lapisan masyarakat Kabupaten Pinrang	1. Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	2.Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Terbatas.
2. Pemulihan Sosial Ekonomi dampak Covid 19		4.Peran serta masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif berdaya saing masih rendah.
8.Keterlibatan Lembaga Sosial Masyarakat dalam Pembangunan Daerah		3.Kurangnya Peran Serta Lembaga Non Pemerintahan dalam Pembangunan Daerah .
3. Minimnya sarana infrastruktur pada objek destinasi wisata, serta sarana dan prasarana infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar yang musti ditingkatkan	2. Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemenuhan pelayanan dasar	5.Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur antar wilayah terutama pada wilayah pegunungan.
2.Pemulihan Sosial Ekonomi dampak Covid19	3. Pemanfaatan potensi sumber ekonomi secara optimal dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca COVID 19	7.Belum Tersedianya Fasilitas Pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pada sektor pertanian
4. Inovasi dan adopsi teknologi Pertanian		
5. Potensi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Resiko Bencana	4. Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana	6.Minimnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga kestabilan ekosistem lingkungan
6. Implementasi e-Government pada seluruh Perangkat Daerah	5. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata kelola Pemerintahan guna mewujudkan Good Governance	1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
7. Meningkatkan kehidupan demokrasi bangsa yang makin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat, Pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban serta Penegakan perda dalam upaya	6. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	3.Kurangnya Peran Serta Lembaga Non Pemerintahan dalam Pembangunan Daerah .

meminimalisir potensi gangguan trantibum		
---	--	--

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pinrang periode 2019 – 2024, maka Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang dalam RKPD 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan
5. Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis
6. Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan
7. Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan
8. Meningkatnya lapangan kerja/usaha
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur wilayah
10. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
11. Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana
12. Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian
13. Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan

Prioritas Pembangunan tahun 2022 sebagaimana merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2022 yang berkolerasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pinrang periode 2019 - 2024. Keterkaitan antara Prioritas dan sasaran Pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2022 dengan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang 2022	Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang	Indikator	Target RPJMD Tahun 2022	Target RKPD 2022
1. Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Sasaran-3: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan	63,4	63,4
		Indeks Kesehatan	77,35	77,35
	Sasaran-4: Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	80	80
	Sasaran-6: Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,21 (IDG)	71,21 (IDG)
	Sasaran-8:	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,45	3,45

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

	Meningkatnya lapangan kerja/usaha dan taraf hidup masyarakat lapisan bawah			
2. Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemenuhan pelayanan dasar	Sasaran-9 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	82,5	82,5
		Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara (Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang)	50	50
3. Pemanfaatan potensi sumber ekonomi secara optimal dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca COVID 19	Sasaran-7: Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pertumbuhan Ekonomi	5	5
	Sasaran-12: Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Persentase Kelompok tani kelas Madya	5	5
	Sasaran-13: Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Penguatan cadangan pangan	190,062%	190,062%
4. Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana	Sasaran 10: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	36,84	36,84
	Sasaran-11: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	185	185
5. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata kelola Pemerintahan guna mewujudkan Good Governance	Sasaran-1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	65	65
	Sasaran-2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	87,35	87,35
6. Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Sasaran-5: Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Presentase Angka Kriminalitas yang tertangani	90	90

Keselarasan antara Prioritas pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2022 dengan sasaran pembangunan Kabupaten Pinrang telah terjalin dengan mencakup dari seluruh prioritas dan sasaran tersebut sehingga target RPJMD tahun 2022 juga sinkron dengan target RKPD tahun 2022

4.2.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Tabel 4.7
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan 2022	Indikator Pembangunan	Target 2022
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3	Pemanfaatan potensi sumber ekonomi secara optimal dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca COVID 19	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pertumbuhan Ekonomi	5
				Meningkatnya aplikasi	Persentase Kelompok tani kelas Madya	5%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

				teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian		
				Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Penguatan cadangan pangan	190,062%
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2	Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemenuhan pelayanan dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	82,5
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar				Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara (Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang)	50
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan	63,4
					Indeks Kesehatan	77,35
				Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	80
				Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,21
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,45
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	4	Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	36,84
				Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	185
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata kelola Pemerintahan guna mewujudkan Good Governance	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	65
		6	Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Angka Kriminalitas	520

4.2.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Tabel 4.8
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan 2022	Indikator Pembangunan	Target 2022
---	------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

1	Pemantapan Reformasi Birokrasi	5	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata kelola Pemerintahan guna mewujudkan Good Governance	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	65
2	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan	2	Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemenuhan pelayanan dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	82,5
					Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara (Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang)	50
3	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan perlindungan Sosial	3	Pemanfaatan potensi sumber ekonomi secara optimal dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca COVID 19	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pertumbuhan Ekonomi	5
				Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Persentase Kelompok tani kelas Madya	3%
				Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Penguatan cadangan pangan	190,062%
4	Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter dan Berbudaya	1	Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan	63,4
					Indeks Kesehatan	77,35
				Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	80
				Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,21
				Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,45
		6	Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Angka Kriminalitas	520
5	Pengelolaan Komoditas Unggulan	4	Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka	Terpeliharanya kualitas	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	36,84

	berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup		meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana	lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim		
				Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	185

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah – langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah.

Tabel 4.9
Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang 2021	Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang	Strategi	Penjelasan Strategi
1. Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Sasaran-3: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Memenuhi kebutuhan SDM secara proporsional dengan kebutuhan sarana/prasarana dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan	Dengan adanya peningkatan SDM serta pemenuhan sarana / prasarana pembangunan pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan hasil pembangunan dengan distribusi pelayanan yang lebih merata, perluasan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan
	Sasaran-4: Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Membuka ruang partisipasi bagi lembaga keagamaan, lembaga adat, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi PKK, dan Pers dalam mendukung pembangunan daerah	Peran lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga adat, organisasi sosial, politik dan kepemudaan diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah sesuai dengan
	Sasaran-6: Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan potensi perempuan agar lebih mampu mandiri dan berkarya serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dengan kedudukan publik yang berpengaruh agar dapat menampung kepentingan perempuan.	Perempuan sebagai pilar keluarga mempunyai peran yang sangat penting sebagai penopang keutuhan rumah tangga yang semakin hari semakin berdaya sehingga mampu membantu tidak hanya dalam mndidik anak dan juga dalam membantu perekonomian keluarga akan tetapi lebih dari itu berkarya dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan publik yang juga berpengaruh dalam pembangunan.
	Sasaran-8: Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan kemampuan kewirausahaan masyarakat	Peningkatan SDM dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta kemampuan masyarakat dalam melihat

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

		guna menciptakan peluang lapangan pekerjaan	peluang serta menciptakan peluang guna meningkatkan lapangan kerja/usaha yang berdaya saing
2. Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemenuhan pelayanan dasar	Sasaran-9 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan efektivitas infrastruktur transportasi, perhubungan, irigasi, dan sarana publik lainnya secara terintegrasi dengan penataan ruang dan fasilitas ekonomi	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan fasilitas umum dalam suatu wilayah membuat aksesibilitas masyarakat berjalan dengan lancar sehingga perputaran roda ekonomi di wilayah tersebut semakin berkembang
3. Pemanfaatan potensi sumber ekonomi secara optimal dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca COVID 19	Sasaran-7: Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Meningkatkan keterpenuhan sarana produksi serta alat dan mesin untuk produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri rumah tangga, industri kecil secara bersinergi dengan penguatan aktivitas hilir bidang jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata	Peningkatan sarana dan prasarana produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir , mulai dari proses perencanaan, proses produksi, panen sampai pasca panen dapat mempengaruhi produktivitas dan daya jual serta daya beli masyarakat. Sehingga untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan maka pemenuhan sarana dan prasarana produksi sampai pasca panen dirasa sangat perlu
	Sasaran-12: Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Mengembangkan pusat pendidikan pertanian terpadu secara beriringan dengan penyelenggaraan penyuluhan dan sekolah lapang terpadu pertanian	Dengan adanya pusat pendidikan dan pelatihan terpadu maka diharapkan dapat menambah produktivitas petani dan masyarakat dalam mengelola potensi unggulan di daerahnya
	Sasaran-13: Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Mengembangkan kawasan produksi pertanian terpadu dengan pengembangan kawasan industri untuk kegiatan hilirisasi	Setelah proses produksi maka hal yang perlu untuk ditingkatkan adalah pengembangan kawasan industri secara terpadu
4. Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana	Sasaran 10: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemangku kepentingan dalam penanganan limbah dan pencemaran, serta Mendorong, meningkatkan dan memelihara budaya hidup bersih oleh masyarakat secara terpadu dengan pemenuhan sarana-prasarana penanganan kebersihan dan keindahan kota	Kualitas lingkungan hidup untuk saat ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam keberlanjutan ekosistem sehingga dirasa perlu untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim dan lingkungan dengan melibatkan masyarakat an pemangku kepentingan sehingga mampu mendorong, meningkatkan dan memelihara budaya hidup bersih an keindahan kota
	Sasaran-11: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana secara terpadu dengan pemenuhan sarana-prasarana serta SDM penanganan darurat kejadian bencana	Diharapkan mampu menghadapi bencana secara terpadu dengan mitigasi bencana dan peningkatan kewaspadaan serta kesiapsiagaan tanggap darurat bencana
5. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata kelola Pemerintahan guna mewujudkan Good Governance	Sasaran-1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur serta kelembagaan pemerintahan secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis elektronik	Akuntabilitas kinerja birokrasi dengan pemanfaatan teknologi berbasis elektronik sehingga mampu meningkatkan kapasitas SDM aparatur serta kelembagaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

	Sasaran-2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pada area publik	Peningkatan layanan publik dengan cara ketersediaan sarana dan prasarana / fasilitas umum yang memadai
6. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Sasaran-5: Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Memperkuat dan memelihara karakter moral,akhlak, ketiakawanan sosial dan ketertiban umum melalui peran aktif lembaga sosial-kemasyarakatan	Kehidupan masyarakat yang sejahtera, tertib dan harmonis merupakan visi pemerintah dengan cara memperkuat dan memelihara karakter moral, akhlak, kesetiakwanan sosial serta ketertiban umum.

Adapun Arah kebijakan merupakan suatu bentuk upaya konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Tabel 4.10
Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang 2021	Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang	Arah Kebijakan 2022	Penjelasan Arah Kebijakan
1. Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Sasaran-3: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan serta Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan pola hidup sehat	Untuk meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat maka dimulai dengan peningkatan kualitas pendidikan sejak dini yaitu PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan masyarakat dengan penerapan pola hidup sehat
	Sasaran-4: Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi lembaga keagamaan, lembaga adat, dan organisasi sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Peran lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga adat, organisasi sosial, politik dan kepemudaan dalam pembangunan daerah dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan
	Sasaran-6: Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	Pelibatan kelompok perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan..	Peran perempuan dalam pembangunan dengan melibatkan dalam pengambilan keputusan serta program-program pembangunan yaitu pemberdayaan perempuan
	Sasaran-8: Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Fasilitasi penyerapan tenaga kerja serta Pembinaan kewirausahaan terutama bagi rakyat miskin dan kemitraan dengan pihak DUDI (dunia usaha dan dunia industri)	Sosialisasi dan pelatihan kompetensi ketenagakerjaan dalam meningkatkan SDM dan kemampuan dalam mengolah potensi yang ada khususnya di dunia usaha dan dunia industri
2. Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemenuhan pelayanan dasar	Sasaran-9 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Pemenuhan sarana prasarana publik wilayah pegunungan dan perbatasan serta Penataan ruang perkotaan dan fasilitas perekonomian	peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur secara merata baik di daerah pegunungan, tepi pantai maupun di sektor perkotaan
3. Pemanfaatan potensi sumber ekonomi secara optimal dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca COVID 19	Sasaran-7: Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pemulihan iklim usaha bagi sektor jasa, perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata serta Pengembangan kapasitas Pengolahan hasil untuk nilai tambah produk-produk unggulan daerah	Peningkatan produktivitas unggulan yang berdaya saing bagi pemulihan iklim usaha bagi sektor jasa, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata dan beberapa sektor yang terdampak covid-19
	Sasaran-12: Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Penguatan koordinasi pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi pertanian terapan	pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat meningkatkan aplikasi teknologi terapan sehingga

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

			mampu meningkatkan produktivitas
	Sasaran-13: Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Mengembangkan kawasan produksi pertanian terpadu dengan pengembangan kawasan industri untuk kegiatan hilirisasi	penanganan produksi sampai pasca panen secara berkelanjutan untuk mengembangkan kawasan terpadu
4. Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana	Sasaran 10: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Akselerasi penguatan sistem pengelolaan persampahan dan pemberdayaan masyarakat Penataan taman dan ruang terbuka hijau perkotaan	Pentingnya mengelola lingkungan hidup agar meminimalisir potensi terjadinya bencana dengan penguatan sistem pengelolaan sampah, mitigasi bencana dan pemberdayaan masyarakat
	Sasaran-11: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana, lanjutan penguatan mitigasi bencana dan kebakaran	Keseiapsiagaan dan kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana dengan pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mitigasi bencana
5. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata kelola Pemerintahan guna mewujudkan Good Governance	Sasaran-1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Akselerasi pencapaian pilar-pilar reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah	Akuntabilitas dan reformasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dalam tata kelola pemerintahan
	Sasaran-2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Inovasi dan Modernisasi pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan publik lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan inivasi dan modernisasi sistem satu pintu dengan memanfaatkan teknologi dan informasi
6. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Sasaran-5: Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam tatanan kehidupan masyarakat	Kehidupan masyarakat yang sejahtera dan harmonis serta berkarakter dan berwawasan kebangsaan

4.4 Proyek Prioritas Pembangunan Daerah

Salah satu Upaya pemerintah Daerah dalam menanggulangi dampak covid 19 adalah dengan mendanai kembali program infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi dan saluran drainase yang sudah direncanakan dalam tahun 2020 dan 2021 ini namun mengalami penundaan akibat pandemi covid 19. Proyek Prioritas Pembangunan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Agropolitan.

Kecamatan Tiroang, Kecamatan Duampanua, Patampanua, Batulappa dan Mattiro Bulu merupakan kecamatan yang masuk dalam kawasan agropolitan di Kabupaten Pinrang. Salah satu faktor yang menjadi hambatan pengembangan kawasan agropolitan ini adalah akses jalan yang kurang memadai dan mengalami kerusakan dengan kondisi tidak mantap. Dengan penanganan peningkatan jalan, akses untuk moda transportasi akan menjadi mudah, sehingga akan meningkatkan penghasilan dari sektor pertanian dan hortikultura yang sempat terhenti karena dampak Covid-19. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor pertanian dan hortikultura, maka diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya bagi warga sekitar dan Pinrang pada umumnya. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 57.069.986.700,00 dengan output panjang jalan terbangun 27,32 km, outcome Peningkatan pendapatan masyarakat di sektor pertanian, hortikultura dan UMKM serta pedagang bisa beraktivitas kembali.

2. Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Minapolitan.

Kecamatan Lanrisang dan Kecamatan Duampanua merupakan kecamatan yang masuk dalam kawasan minapolitan di Kabupaten Pinrang. Salah satu faktor yang menjadi hambatan pengembangan kawasan minapolitan ini adalah akses jalan yang kurang memadai dan mengalami kerusakan dengan kondisi tidak mantap. Dengan penanganan peningkatan jalan, akses untuk moda transportasi akan menjadi mudah, sehingga akan meningkatkan penghasilan dari sektor perikanan yang sempat terhenti karena dampak Covid-19. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor perikanan baik itu dari perikanan budidaya maupun perikanan tangkap, maka diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya bagi warga sekitar dan Pinrang pada umumnya. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 14.297.765.300,00 dengan output panjang jalan terbangun 5,75 km, outcome Peningkatan pendapatan masyarakat di sektor perikanan dan UMKM serta pedagang bisa beraktivitas kembali.

3. Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Pariwisata Alam dan Daerah Terpencil Perdesaan.

Kecamatan Lembang didalam RTRW Kab. Pinrang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis sebagai Kawasan Pariwisata Alam, akses jalan saat ini masih kurang memadai dari sisi kenyamanan wisatawan menuju ke tempat wisata alam seperti tempat wisata batu pandang, Batu Papan Salule dan Air Terjun Kalijodo serta akses antar desa dan antar kecamatan untuk bisa dilalui dengan baik karena sebagian dari ruas jalan tersebut masih dalam kondisi tidak mantap. Dengan penanganan peningkatan jalan, akses untuk moda transportasi akan menjadi mudah, sehingga akan meningkatkan penghasilan masyarakat yang sempat terhenti karena dampak Covid-19, maka diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di daerah perencanaan wisata alam dan daerah terpencil tersebut akan lebih berkembang. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dengan output panjang jalan terbangun 2,30 km, outcome Peningkatan pendapatan masyarakat di setiap sektor yang ada di kawasan pariwisata alam dan permukiman perdesaan tersebut.

4. Pembangunan Jalan menuju Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) LUWITA

Ruas jalan ini berada di Kecamatan Suppa dan terintegrasi dengan jalan nasional serta pelabuhan marabombang dimana menjadi akses menuju Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) LUWITA Kecamatan. Suppa terintegrasi dengan jalan

nasional dan pelabuhan marabombang. Kondisi saat ini jalan banyak mengalami kerusakan sehingga mengalami penurunan kualitas layanan. Adanya pandemi Covid-19 menghambat Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk melakukan pembangunan, Pembangunan ruas jalan ini akan memberikan manfaat dalam percepatan pemulihan ekonomi akibat covid 19, antara lain karena memperlancar arus transportasi baik orang maupun barang dari atau menuju KPPN. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dengan panjang jalan terbangun 1,31 km dan outcome konektivitas antar daerah antar kelurahan, desa dan kecamatan lancar dan aman

5. Pembangunan Jalan Penghubung Antar Kabupaten

Jalan penghubung antar kabupaten merupakan jalur yang menghubungkan Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten Sidenreng Rappang. Kondisi saat ini jalan penghubung antar kabupaten di Pinrang banyak mengalami kerusakan. Adanya pandemi Covid-19 menghambat Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk melakukan pembangunan, karena sebagian alokasi anggaran dialihkan untuk penanganan dan penanggulangan dampak covid-19. Pembangunan jalan antar kabupaten akan semakin meningkatkan hubungan antar wilayah dengan kabupaten sekitar. Pembangunan jalan penghubung antar kabupaten ini akan memberikan manfaat dalam percepatan pemulihan ekonomi akibat covid 19, antara lain karena memperlancar arus transportasi baik orang maupun barang. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 3.035.000.000,00 dengan panjang jalan terbangun 1,14 km dan outcome konektivitas antar daerah antar kelurahan, desa dan kecamatan lancar dan aman

6. Pengembangan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani.

Kegiatan ini merupakan pekerjaan pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dimana bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas hasil, daya saing dan nilai tambah produk pertanian pangan dan hortikultura. Sehingga diperlukan pembangunan jaringan irigasi ini melalui kelompok kelompok petani. Pandemi Covid-19 ini sangat menghambat Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk melakukan pembangunan, karena sebagian alokasi anggaran dialihkan untuk penanganan dan penanggulangan dampak covid-19. Sebagai kawasan penyanggah ketahanan pangan nasional Kabupaten Pinrang khususnya dinas pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.599.220.000,00 dengan target output 4,99 km dan outcome meningkatnya produksi padi menjadi 666.158 Ton pada tahun 2021

7. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.

Pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dimana bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas hasil, daya saing dan nilai tambah produk pertanian pangan dan hortikultura. Sehingga diperlukan pembangunan jaringan irigasi ini melalui kelompok petani. Pandemi Covid-19 ini sangat menghambat Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk melakukan pembangunan, karena sebagian alokasi anggaran dialihkan untuk penanganan dan penanggulangan dampak covid-19. Sebagai kawasan penyangga ketahanan pangan nasional Kabupaten Pinrang khususnya dinas pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.799.280.000,00 dengan target output 5,04 km dan outcome meningkatnya produksi padi menjadi 666.158 Ton pada tahun 2021

8. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

Pembangunan Jembatan Tani bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas hasil, daya saing dan nilai tambah produk pertanian pangan dan hortikultura. Sehingga diperlukan pembangunan jaringan irigasi ini melalui kelompok petani. Pandemi Covid-19 ini sangat menghambat Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk melakukan pembangunan, karena sebagian alokasi anggaran dialihkan untuk penanganan dan penanggulangan dampak covid-19. Sebagai kekuatan menuju daerah lumbung pangan nasional maka Kabupaten Pinrang khususnya dinas pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 704.592.000,00 dengan target output 163,1 m2 dan outcome meningkatnya produksi padi menjadi 666.158 Ton pada tahun 2021

9. Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Irigasi

Meningkatnya intensitas pertanaman yang menyebabkan kebutuhan akan air irigasi juga meningkat. Kondisi Infrastruktur Irigasi belum lengkap dan sebagian mengalami kerusakan menyebabkan kehilangan volume air, sehingga air tidak menjangkau daerah irigasi hilir agar memperlancar pemasukan air, mencegah kehilangan volume air, meningkatkan produktivitas produksi pertanian. Untuk menjadi daerah lumbung pangan nasional maka Kabupaten Pinrang khususnya dinas PSDA mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 7.545.000.000,00 dengan target output 737 Ha dan outcome meningkatnya produksi pertanian pada tahun 2021

10. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

Saluran drainase perkotaan yang bersih dan berfungsi dengan baik merupakan bagian dari infrastruktur untuk bisa melawan pandemi covid 19 karena lingkungan yang bersih akan mampu melawan berbagai macam penyakit permasalahannya saluran

drainase di Kabupaten Pinrang khususnya di kawasan perkotaan belum mampu mengalirkan limpasan air hujan yang membuat kawasan permukiman mengalami genangan air bahkan banjir sehingga hal ini memerlukan penanganan dalam bentuk rehabilitasi saluran. Akibat pandemi covid 19 menyebabkan anggaran yang telah dialokasikan mengalami pemotongan untuk pengalihan ke sektor kesehatan. Untuk mencegah genangan air dan banjir di perkotaan maka Dinas PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dengan target output 2.830,19 Meter dan outcome meningkatnya produksi pertanian pada tahun 2021

Strategi Pemerintah Daerah dalam menanggulangi dampak sosial ekonomi Covid 19 adalah dengan program pembangunan Infrastruktur strategis di seluruh wilayah Kabupaten Pinrang khususnya pada jalan, jembatan, jaringan irigasi dan saluran drainase yang mempunyai fungsi strategis secara ekonomi sehingga mampu mendorong pemulihan ekonomi daerah. Wabah pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia termasuk Kabupaten Pinrang menimbulkan dampak negatif perekonomian daerah yang cukup terasa seperti menurunnya aktifitas perekonomian, arus barang jasa menurun drastis bahkan cenderung mandek sehingga berdampak menurunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah arus lalu lintas barang, jasa dan orang menjadi lancar. Pembangunan infrastruktur juga dapat menyerap tenaga kerja yang tentu saja akan mengurangi pengangguran dan juga akan menambah pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Infrastruktur yang layak dan memadai akan mampu menggerakkan roda perekonomian mulai dari desa hingga kota. Kemudahan berinteraksi antar desa, antar kecamatan dan antar daerah daerah terpencil dapat dilaksanakan hanya dengan membangun infrastruktur jalan yang memadai dan layak serta merata sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah. Infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya produksi, biaya produksi yang dikeluarkan khususnya petani menjadi ringan dan murah.

Dampak sosial dan ekonomi yang akan diperoleh dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional melalui pelaksanaan Program Pembangunan Jalan, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase di Kabupaten Pinrang yaitu:

1. Memberikan rasa nyaman, aman dan senang bagi masyarakat di perkotaan dan pedesaan bahwa kondisi sosial sudah mulai bergairah lagi yang ditandai adanya aktivitas pembangunan yang melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja lokal.

2. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi dan saluran drainase yang akan dilaksanakan tersebar di seluruh kawasan wilayah Pinrang secara merata mulai dari perkotaan sampai wilayah yang sulit dijangkau sehingga akan menurunkan disparitas wilayah sehingga dampaknya pembangunan lebih dapat dinikmati dan dirasakan masyarakat Pinrang sampai di pelosok wilayah Pinrang.
3. Pembangunan infrastruktur jalan akan meningkatkan keterhubungan (konektivitas) antar wilayah, desa, kelurahan, kecamatan sehingga akan memperlancar arus barang, orang, menurunkan biaya transportasi dan mendorong bergairahnya kembali perekonomian daerah yang berdampak apada pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Pembangunan infrastruktur yang di laksanakan di jalan jalan poros sebagai jalan utama ke daerah cepat tumbuh, ke daerah areal pertanian akan mengurangi ongkos angkut petani sehingga dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani sebagai indikator tingkat kesejahteraan petani yang mayoritas penduduk Pinrang bermata pencaharian di sektor pertanian.
5. Di sektor Pariwisata, Pembangunan infrastruktur juga akan dapat mendorong para UMKM, pedagang kecil, para pelaku pariwisata dapat beraktivitas kembali sehingga akan mampu mendorong pemulihan ekonomi daerah.
6. Akan menurunkan angka pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka TPT) Kabupaten Pinrang karna menyerap tenaga kerja langsung dari program pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi dan saluran drainase adalah sebesar 14.268 HOK belum termasuk penyerapan tenaga kerja yang bekerja di tambang pasir, batu dan angkutan

4.5 Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tanggal 25 – 27 September 2015 berlangsung Sidang Umum PBB yang dihadiri ratusan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Sidang itu akan menyepakati adopsi Sustainable Development Goals (SDG) untuk periode 2015 – 2030. Tujuan Pembangunan berkelanjutan ini akan menggantikan Millenium Development Goals (MDG). Dokumen itu berisi 17 tujuan antara lain :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;

- 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
- 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
- 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
- 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berikut ini disajikan tabel keterkaitan antara Prioritas Daerah dengan 17 tujuan dalam SDGs :

Tabel 4.11
Keterkaitan SDGs dengan prioritas daerah dan sasaran daerah

No	Tujuan SDGs	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan 2022
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya lapangan kerja/usaha
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Pemanfaatan potensi sumber ekonomi secara optimal dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca COVID 19	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

No	Tujuan SDGs	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan 2022
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemenuhan pelayanan dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya lapangan kerja/usaha
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemenuhan pelayanan dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemenuhan pelayanan dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemenuhan pelayanan dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Pemanfaatan potensi sumber ekonomi secara optimal dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca COVID 19	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

No	Tujuan SDGs	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan 2022
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata kelola Pemerintahan guna mewujudkan Good Governance	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik

4.6 Integrasi SPM

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, menyatakan Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkanyang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Dalam mandat penyelenggaraan SPM Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada Daerah kabupaten dan kota namun juga pada Daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di Daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM Daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain.

Tabel 4.12
Materi Muatan SPM

No	Jenis SPM	Muatan SPM		
		Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar.
1	Pendidikan	pendidikan anak usia dini;	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c) Tata cara pemenuhan standar	Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
		pendidikan dasar; dan	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c) Tata cara pemenuhan standar	Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun
		pendidikan kesetaraan.	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c) Tata cara pemenuhan standar	usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

No	Jenis SPM	Muatan SPM		
		Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar.
2	Kesehatan	<p>pelayanan kesehatan ibu hamil;</p>	<p>a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</p>	<p>Kepada semua ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerjanya tersebut dalam kurun waktu satu tahun</p>
		<p>pelayanan kesehatan ibu bersalin;</p>	<p>a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</p>	<p>Kepada semua ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerjanya tersebut dalam kurun waktu satu tahun</p>
		<p>pelayanan kesehatan bayi baru lahir;</p>	<p>a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</p>	<p>Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun</p>
		<p>pelayanan kesehatan balita;</p>	<p>a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</p>	<p>Semua balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun</p>
		<p>pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;</p>	<p>a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</p>	<p>Setiap anak pada usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.</p>
		<p>pelayanan kesehatan pada usia produktif;</p>	<p>a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</p>	<p>Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun</p>
		<p>pelayanan kesehatan pada usia lanjut;</p>	<p>a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</p>	<p>Setiap warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun</p>
		<p>pelayanan kesehatan penderita hipertensi;</p>	<p>a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</p>	<p>Setiap penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun</p>
		<p>pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;</p>	<p>a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</p>	<p>Setiap penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun</p>
		<p>pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;</p>	<p>a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</p>	<p>Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun</p>
		<p>pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;</p>	<p>a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</p>	<p>Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun</p>

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

No	Jenis SPM	Muatan SPM		
		Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar.
		pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus),	a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
3	Pekerjaan Umum	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan	1) Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa; 2) Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemenuhan Standar.	Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
		penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestic.	Setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada daerah rawan sanitasi dan dekat badan air.
4	Perumahan Rakyat	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan	a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan b) Kualitas Barang/Jasa	Setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam.
		fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan b) Kualitas Barang/Jasa	Setiap rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta; b) Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai; c) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;	a) Standar operasional prosedur Satpol PP; b) Standar sarana prasarana Satpol PP; c) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan d) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda kabupaten/kota serta Perkada dengan kriteria : a) yang mengalami kerugian materil dan/atau cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau b) berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada
		pelayanan informasi rawan bencana;	a) Prosedur operasional penanggulangan bencana; b) Sarana prasarana penanggulangan bencana; c) Peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan d) Pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana	Setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota
		pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	a) Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi; b) Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi; c) Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota

No	Jenis SPM	Muatan SPM		
		Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar.
			dan evakuasi; d) Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia; e) Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan f) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.	
		pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan		yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
		pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.		
6	Sosial	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas: a) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;	Ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.	Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan: a) Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
		b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;		b) Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
		c) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;		c. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
		d) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan		d) Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;
		e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.		e) Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.

Tabel 4.13

Target Dan Indikator Penerima Layanan
Standar Pelayanan Minimal

PENDIDIKAN

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Batas Waktu Capaian
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

KESEHATAN

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Batas Waktu Capaian
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan balita	Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
--	--	------	--------------

PEKERJAAN UMUM

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Batas Waktu Capaian
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari -hari	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

PERUMAHAN RAKYAT

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Batas Waktu Capaian
Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota kabupaten/kota	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

TRANTIBUMLINMAS

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Batas Waktu Capaian
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	Setiap Tahun
Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun
--	---	------	--------------

SOSIAL

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Batas Waktu Capaian
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

RKPD Kabupaten Pinrang mengusung Standar Pelayanan Minimal dalam salah satu prioritas pembangunannya, Berikut ini disajikan keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun 2022 dengan Standart Pelayanan Minimal sebagai berikut :

Tabel 4.14

Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan dengan Standart Pelayanan Minimal

Prioritas	Sasaran Pembangunan	Jenis Pelayanan dasar (SPM)	Indikator Pencapaian	Program Prioritas	Capaian	Target	Perangkat daerah
Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun (SD/MI/SDLB)	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun (SMP/MTs/SMPLB)	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		APK Paket A APK Paket B	Paket A = 100 % Paket B = 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Melek Huruf (AMH)	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		APK Pendidikan Anak Usia Dini	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Prioritas	Sasaran Pembangunan	Jenis Pelayanan dasar (SPM)	Indikator Pencapaian	Program Prioritas	Capaian	Target	Perangkat daerah
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan balita	Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan		% Warga Negara Usia SD yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan		% Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		% Warga Negara Usia Lanjut (USILA) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		% Warga Negara Penderita Penyakit Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Prioritas	Sasaran Pembangunan	Jenis Pelayanan dasar (SPM)	Indikator Pencapaian	Program Prioritas	Capaian	Target	Perangkat daerah
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan		% Warga Negara Penderita Penyakit Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		% Warga Negara Penderita Penyakit Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan		% Warga Negara Penderita Penyakit Tuberkulosis (TB) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan		% Warga Negara Penderita Penyakit HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk berakses air minum	100%	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Prioritas	Sasaran Pembangunan	Jenis Pelayanan dasar (SPM)	Indikator Pencapaian	Program Prioritas	Capaian	Target	Perangkat daerah
pemenuhan pelayanan dasar							
					Persentase pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase pelayanan pengelolaan air minum dan limbah	100%	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang
Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni				
		Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	% Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Prioritas	Sasaran Pembangunan	Jenis Pelayanan dasar (SPM)	Indikator Pencapaian	Program Prioritas	Capaian	Target	Perangkat daerah
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		% Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		% warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	% warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Tingkat Waktu Tanggap (Respond Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	55,46%	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan	Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	% anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Prioritas	Sasaran Pembangunan	Jenis Pelayanan dasar (SPM)	Indikator Pencapaian	Program Prioritas	Capaian	Target	Perangkat daerah
Pengentasan Kemiskinan							
		rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		% warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		% warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		% warga negara atau gelandangan dan pengemis penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Program Penanganan Bencana	% warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Dinas Sosial

4.7 Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pinrang

Pokok – pokok pikiran DPRD untuk rencana pembangunan tahun 2022 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pokok – pokok pikiran DPRD merupakan saran dan masukan dari DPRD pada rencana Pembangunan Daerah. Saran dan Masukan dari DPRD menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Penelaahan pokok – pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Mekanisme pengusulan pokok – pokok pikiran DPRD dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Pokok – pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan
2. Pokok – pokok pikiran DPRD dimasukkan ke dalam aplikasi SIPD
3. Pokok – pokok pikiran DPRD tersebut selanjutnya di verifikasi oleh Sekretariat DPRD, Lalu hasil verifikasi tersebut ditindak lanjuti oleh Bappelitbangda untuk diteruskan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing – masing

Adapun pokok – pokok pikiran DPRD Kabupaten Pinrang secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan
2. Peningkatan kualitas dan sarana prasarana kesehatan masyarakat
3. Peningkatan sarana prasarana infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian
4. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
5. Peningkatan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan

Tabel 4.15
Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pinrang

Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan	Status
Drs.H.ACHMAD SIDE,M.Si	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Terjadi Genangan Air Pada Saat Musim Penghujan	Dusun Kaloang, Desa Lerang, Kab. Pinrang	Lansirang	Lerang	2.6 Km	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Drs.H.ACHMAD SIDE,M.Si	Nasdem	Pendidikan	Pembangunan Pagar Sekolah	Sekolah Kurang Aman	SDN 280 Kaloang, Kab. Pinrang	Lansirang	Lerang	85 Meter	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui
Drs.H.ACHMAD SIDE,M.Si	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi/Restorasi Sungai	Aliran Air Tidak Lancar	Muara Abbanuang Desa Lerang, Kab. Pinrang	Lansirang	Lerang	3 Km	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Drs.H.ACHMAD SIDE,M.Si	Nasdem	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Transportasi Kurang Lancar	Desa Samaulue, Kab. Pinrang	Lansirang	Seluruh Kelurahan/ Desa	1 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Drs.H.ACHMAD SIDE,M.Si	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Air Kurang Lancar dan sering runtuh	Dusun Paladang, Kab. Pinrang	Lansirang	Mallongi-longi	1 Km	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Drs.H.ACHMAD SIDE,M.Si	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Aliran Air Tidak Lancar	Desa Mallongi-longi, Kab. Pinrang	Lansirang	Mallongi-longi	250 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Drs.H.ACHMAD SIDE,M.Si	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan Beton	Jalanan Sempit	Desa Lerang, Kab. Pinrang	Lansirang	Lerang	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Drs.H.ACHMAD SIDE,M.Si	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Sekunder	Saluran Air Tidak Lancar	Desa Samaulue, Kab. Pinrang	Lansirang	Samaulue	3 Km	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Drs.H.ACHMAD SIDE,M.Si	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Sedimentasi pada Saluran Pembuangan	Dusun Lerang, Kab. Pinrang	Lansirang	Lerang	1 Km	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Drs.H.ACHMAD SIDE,M.Si	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Salurannya dangkal dan banjir pada saat musim hujan	Kaloang, Kab. Pinrang	Lansirang	Seluruh Kelurahan/ Desa	200 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Drs.H.ACHMAD SIDE,M.Si	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	Kondisinya Becek saat musim hujan dan Susah dilewati kendaraan	Kaloang, Kab. Pinrang	Lansirang	Lerang	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Drs.H.ACHMAD SIDE,M.Si	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	Tranportasi kurang lancar	Dusun Ujung, Kab. Pinrang	Lansirang	Mallongi-longi	2000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ANDI AAN NUGRAHA	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Terjadi Genangan Air pada saat Musim Hujan	Dusun Tanah Cicca, Kab. Pinrang	Cempa	Salipolo	4000 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
ANDI AAN NUGRAHA	PDIP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan ke sawah rusak parah sehingga transportasi kurang lancar	Lingkungan Cacabala, Kab. Pinrang	Duampanua	Pekkabata	500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
ANDI AAN NUGRAHA	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Terjadi Genangan Air di Pemukiman warga pada musim hujan	Lingkungan Cacabala, Kab. Pinrang	Duampanua	Pekkabata	3000 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
ANDI AAN NUGRAHA	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder	Aliran Air kurang lancar ke Hilir	Lingkungan Cacabala, Kab. Pinrang	Duampanua	Pekkabata	500 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
ANDI AAN NUGRAHA	PDIP	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Perumahan	Kurangnya Lampu penerangan jalan sehingga jalanan terlalu gelap	Lingkungan Cacabala, Kab. Pinrang	Duampanua	Pekkabata	5 Buah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ANDI AAN NUGRAHA	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Transportasi tidak lancar karena jalan yang berlubang	Dusun Tanah Cicca Desa Salipolo, Kab. Pinrang	Cempa	Salipolo	2000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ANDI AAN NUGRAHA	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Transportasi Kurang Lancar	Dusun Mallang ke Puja Desa Katomporang, Kab. Pinrang	Duampanua	Katomporna ng	1000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ANDI AAN NUGRAHA	PDIP	Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Agar Aliran Air Kesawah lancar Untuk Memaksimalkan Hasil Pertanian	Dusun Tana Cicca, Kab. Pinrang	Cempa	Salipolo	500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
ANDI AAN NUGRAHA	PDIP	Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Agar Aliran air Kesawah Lancar Untuk Memaksimalkan Hasil Pertanian Kelompok Tani Saromase	Dusun Tanah Cicca, Kab. Pinrang	Cempa	Salipolo	500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
ANDI AAN NUGRAHA	PDIP	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru	Proses belajar mengajar tidak maksimal karena kurangnya ruang kelas	Dusun Mallang, Kab. Pinrang	Duampanua	Katomporna ng	00 Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

ABD. WARIS MUIN	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	kondisi jalan yang rusak sudah membutuhkan perbaikan	Majennang, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Suppa	400 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ABD. WARIS MUIN	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	Kondisi jalan masuk berstruktur tanah sehingga membutuhkan peningkatan jalan	Majennang, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Suppa	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ABD. WARIS MUIN	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tanggul Sungai	Jika air pasang, Masyarakat mengeluhkan karena masuk kepemukiman Warga	Majennang, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Suppa	700 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
ABD. WARIS MUIN	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Belum adanya drainase di jalan ini sehingga untuk ketahanan Beton	Majennang, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Suppa	500 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
ABD. WARIS MUIN	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Akses Jalan kecil sedangkan jalan ini dilalui oleh Masyarakat marabombang	Watang Suppa, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Suppa	2 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ABD. WARIS MUIN	GAP	Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Perahu/Mesin untuk Nelayan	Meningkatkan Produktifitas penangkapan dan pendapatan nelayan	Marabombang, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Suppa	160 Unit	Dinas Perikanan	Usulan disetujui
ABD. WARIS MUIN	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Meningkatkan akses jalan Masyarakat	Watang Suppa, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Suppa	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ABD. WARIS MUIN	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Sulit dilewati Kendaraan roda 4	watang Suppa, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Suppa	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ABD. WARIS MUIN	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terjadi genangan air pada musim hujan	Majennang, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Watang Pulu	400 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
ABD. WARIS MUIN	GAP	Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Perahu/Mesin untuk Nelayan	Meningkatkan Produktifitas Penangkapan dan pendapatan Nelayan	Dusun Marabombang, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Suppa	80 Unit Mesin, Unit Perahu, Set Jaring	Dinas Perikanan	Usulan disetujui
ABD. WARIS MUIN	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	Mempermudah akses Masyarakat kesawahnya	Lappa-Lappae, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Pulu	400 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
MUH. THOHA	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalanan masih tanah dan berlumpur pada saat musim hujan	Poros Salimbongan Dusun Bone, Kab. Pinrang	Lembang	Ulusaddang	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

MUH. THOHA	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Jalanan sulit dilewati kendaraan pada saat musim hujan	Jalan Rote Basseang ke Buttue Bolae, Kab. Pinrang	Lembang	Ulusaddang	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
MUH. THOHA	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalanan sudah mengalami kerusakan sehingga perlu rabat beton	Jl. Kampung Baru - Jampu Desa Basseang, Kab. Pinrang	Lembang	Basseang	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
MUH. THOHA	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalanan sudah mengalami kerusakan	Jln. Pekuburan Kampung padi Kel. Betteng, Kab. Pinrang	Lembang	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
MUH. THOHA	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Masyarakat perlu drainase karena seringnya tergenang air pada saat musim hujan	Jln. Kalidong Desa Rajang, Kab. Pinrang	Lembang	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
MUH. THOHA	GAP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan sulit dilewati kendaraan sehingga transportasi kurang lancar	Jln Tani Kalidong - Desa Rajang, Kab. Pinrang	Lembang	Rajang	00 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
MUH. THOHA	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalan sudah mengalami kerusakan sehingga perlu rabat beton	Lorong Kampung Lamba Lumama, Kab. Pinrang	Lembang	Taddokong	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
MUH. THOHA	GAP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan sudah mengalami kerusakan parah	Jln. Tani Rampasa ke Dusun Bone Ulu Saddang Kel. Betteng, Kab. Pinrang	Lembang	Betteng	00 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
MUH. THOHA	GAP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan sudah mengalami kerusakan parah	Jln Tani Desa Kaseratau, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Kaseratau	00 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
MUH. THOHA	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	Masyarakat butuh jembatan beton Lambiri	Desa Sabbang Paru, Kab. Pinrang	Lembang	Sabbang Paru	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
A.PAJJAI MEKKA	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	sulit di lewati kendaraan	Bentengnge, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

A.PAJJAI MEKKA	GAP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Sulit Dilewati kendaran Roda Empat Maupun Roda Empat	Siparappe, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Sawito	00 km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
A.PAJJAI MEKKA	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	Untuk Menghubungkan antara desa ke desa lain	Tonrong Saddang, Kab. Pinrang	Tiroang	Tiroang	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
A.PAJJAI MEKKA	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	kondisi Jalannya Penuh dengan air kalo hujan sehingga sulit di lewati oleh Kendaraan	Boki, Kab. Pinrang	Tiroang	Tiroang	00 km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
A.PAJJAI MEKKA	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisinya Jalannya sudah rusak dan berlubang sehingga sulit dilewati kendaraan	Boki, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Tiroang	00 km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
A.PAJJAI MEKKA	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Untuk menyambungkan pengecoran yang sudah ada sehingga kendaraan bisa sampai ditempat tersebut	Libukang, Kab. Pinrang	Tiroang	Tiroang	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
A.PAJJAI MEKKA	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisinya becek dan sulit dilewati Kendaraan	Tonrong Saddang I, Kab. Pinrang	Tiroang	Tiroang	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
A.PAJJAI MEKKA	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalannya penuh dengan air kalau Hujan sehingga sulit di lewati kendaraan	Tonrong Saddang I, Kab. Pinrang	Tiroang	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
A.PAJJAI MEKKA	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisinya jalannya sudah berlubang dan sulit di lewati kendaraan roda empat maupun roda dua	Tonrong Saddang I, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Harun Ali	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	Belum ada Jembatan Penghubung Kel. Kassa Dusun Garungga Kec. Batulappa	Kelurahan Kassa Dusun Garungga, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Kassa	4.5 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Harun Ali	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalanan belum di rabat beton dan sering banjir pada saat hujan	Kelurahan Kassa Dusun Garungga, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Kassa	1500 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Harun Ali	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Jalanan sering berlumpur dan becek pada saat hujan	Kel. Kassa Dusun Garungga, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Kassa	1000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Harun Ali	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Jalananan Berlumpur dan tergenang air pada saat musim hujan	Kawasan Pasar Batulappa, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Kassa	600 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Harun Ali	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kondisi Jalan sering tergenang air pada saat musim hujan	Jalan Masuk Bacokiki Kel. Kassa, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Kassa	500 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Harun Ali	PPP	Pertanian	Pengadaan Alat Panen pertanian (combien)	Kurangnya Alat perontok jagung bagi kelompok tani ujung banua	Kelurahan Kassa, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Kassa	1 Unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Harun Ali	PPP	Pertanian	Pengadaan Bibit Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Porang dll)	Masyarakat petani Ujung Banua membutuhkan bibit jagung	Dusun Bamba, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Kassa	1000 Kg	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Harun Ali	PPP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi jalan sulit dilewati kendaraan sehingga transportasi kurang lancar	Jalan Tani Ujung Banua Kel. Kassa, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Kassa	00 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Harun Ali	PPP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Jalan sering berlumpur dan transportasi kurang lancar	Kelurahan Kassa, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Kassa	1500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Harun Ali	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Duikker	Agar aliran air lancar menuju ke aliran sungai sehingga perlu adanya perbaikan deuker	Dusun Garungga, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Kassa	4 Unit	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Harun Ali	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Duikker	Agar aliran Air lancar untuk menghubungkan pembuangan air menuju ke aliran sungai	Dusun Garungga, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Kassa	2 Unit	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Harun Ali	PPP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Jalan tergenang air pada saat musim hujan	Bacokiki Jaya, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Kassa	1000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok tani Paballae karena Jalan Tani ini menghubungkan 2 kelompok tani, namun kondisinya sudah rusak berat	benteng sawitto, Kab. Pinrang	Paletang	Benteng Sawito	210 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Taro Ada karena kondisinya sudah rusak berat	Benteng Sawitto, Kab. Pinrang	Paleteang	Benteng Sawito	250 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Belawae karena kondisinya sudah rusak berat	Benteng sawitto, Kab. Pinrang	Paleteang	Benteng Sawito	250 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok tani Laijo karena kondisinya sudah rusak berat	Benteng Sawitto, Kab. Pinrang	Paleteang	Benteng Sawito	300 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Malaekana karena kondisinya sudah rusak berat	Benteng Sawitto, Kab. Pinrang	Paleteang	Benteng Sawito	250 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Pembangunan Jembatan Tani Kelompok Tani Salama, dimana akses bagi petani karena tidak ada jembatan tani	Mamminasae, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminasae	500 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Salama I karena kondisinya sudah rusak berat	Mamminasae, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminasae	350 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Maddupa III karena kondisinya sudah rusak berat	Mamminasae, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminasae	500 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Bulu Mattonrong karena kondisinya sudah rusak berat	Temmassarangnge, Kab. Pinrang	Paleteang	Temmassarangnge	500 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Mappatujuh karena kondisinya sudah rusak berat	Macinnae, Kab. Pinrang	Paleteang	Macinnae	300 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Taruna karena kondisinya sudah rusak berat	Temmassarangnge, Kab. Pinrang	Paleteang	Temmassarangnge	450 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Sipakaenre karena kondisinya sudah rusak berat dan mengalami penyempitan	Macinnae, Kab. Pinrang	Paleteang	Macinnae	400 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Sipatuo karena kondisinya sudah rusak berat	Macinnae, Kab. Pinrang	Paleteang	Macinnae	350 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Perintisan Jalan Tani Kelompok Tani Sipatuo Baru karena Tidak adanya akses bagi petani untuk mengangkat hasil produksi	Macinnae, Kab. Pinrang	Paleteang	Macinnae	2000 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Sipakalebbi karena Kondisinya sudah rusak dan menghubungkan 2 kelompok tani	Macinnae, Kab. Pinrang	Paleteang	Macinnae	500 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan Dam Parit	Kondisi sayap dam parit sudah rusak berat	Macinnae, Kab. Pinrang	Paleteang	Macinnae	1 buah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Kondisi jembatan sudah sulit dilalui Hand Traktor	Macinnae, Kab. Pinrang	Paleteang	Macinnae	1 buah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan Perangkap Tikus Beton	Karena wilayah kelompok tani Sipakaenre berada di lereng Gunung Paleteang	Macinnae, Kab. Pinrang	Paleteang	Macinnae	1 buah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Akses bagi petani terputus di 2 Kelompok Tani karena tidak ada Jembatan tani yang menghubungkan 2 kelompok tani	Benteng Sawitto, Kab. Pinrang	Paleteang	Benteng Sawito	1 buah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Peningkatan Jalan Irigasi Usaha Tani Kelompok Tani Makkasau dimana Kondisi Jaringan Irigasi sudah rusak berat, sehingga perlu di Lening	Mamminasae, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminasae	350 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	Proteksi Jalan Lingkungan Madimeng karena Jalan Tani mudah longsor sehingga terjadi penyempitan	Mamminasae, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminasae	350 meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Ir. Syamsuri	Golkar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rehabilitasi Drainase Dalam Kawasan Perumahan	kondisi drainase sudah rusak berat	Jalan sebelah utara pesantren lerang-lerang, Kab. Pinrang	Paleteang	Benteng Sawito	300 meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Akses ke kelompok tani rirennuang terputus karena tidak ada jembatan tani	Siparappe, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Siparappe	1 buah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan Irigasi Air Tanah(IAT)/Irigasi Air Permukaan (IAP)	sawah yang ada di kelompok Tani Bunga Ledeng adalah sawah tanah hujan sehingga perlu pompanisasi/air permukaan	Desa Padang Loang, Kab. Pinrang	Patampanua	Padangloan g	1 buah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	kondisinya sudah rusak berat	Desa Padang Loang, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	350 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pengadaan Sanggar Tani	sebagai tempat pertemuan bagi petani di tengah sawah	Desa padang Loang, Kab. Pinrang	Patampanua	Padangloan g	1 buah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	pembangunan jembatan tani laiyo ke paballae sebagai akses penghubung 2 kelompok tani	benteng sawitto, Kab. Pinrang	Paleteang	Benteng Sawito	5 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	perintisan jalan tani kelompok gapoktan tettengeng, dimana merupakan akses beberapa kelompok tani untuk mengangkut hasil produksi	Desa Padang Loang, Kab. Pinrang	Patampanua	Padangloan g	2000 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Perindustrian	Pengadaan Oven	ada beberapa kelompok wanita tani memiliki keahlian membuat kue namun tidak memiliki modal untuk membeli alat	carawali, Kab. Pinrang	Paleteang	Benteng Sawito	2 buah	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Perindustrian	Pengadaan Oven	ada beberapa kelompok wanita tani memiliki keahlian membuat kue namun tidak memiliki modal untuk membeli alat	Kampung Baru, Kab. Pinrang	Paleteang	Macinnae	2 buah	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Ir. Syamsuri	Golkar	Perindustrian	Pengadaan Oven	ada beberapa kelompok wanita tani memiliki keahlian membuat kue namun tidak memiliki modal untuk membeli alat	Temmasarangnge, Kab. Pinrang	Paleteang	Seluruh Kelurahan/ Desa	2 buah	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Makkasau karena kondisinya sudah rusak berat	Mamminasae, Kab. Pinrang	Paleteang	Seluruh Kelurahan/ Desa	500 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Pembangunan jembatan tani Mallekana karena akses bagi petani terputus karena tidak ada jembatan tani	benteng sawitto, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	1 buah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	kondisi saluran sudah rusak sehingga harus di lening (kelompok tani Bunga padi)	Desa Mattiro ade, Kab. Pinrang	Patampanua	Mattiroade	250 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jalan irigasi yang ada masih saluran tanah, sehingga perlu di lening (Kelompok Tani Makmur Desa)	Desa Mattiro ade, Kab. Pinrang	Patampanua	Mattiroade	300 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	sebagai akses penghubung bagi masyarakat dalam mengangkut hasil produksi pertanian	Jalan Poros Cempa, Kab. Pinrang	Patampanua	Mattiroade	1 buah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	jaringan irigasi yang ada masih saluran tanah, sehingga perlu di lening (Kelompok Tani Sangyang Seri 1)	Desa Mattiroade, Kab. Pinrang	Patampanua	Mattiroade	250 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Perindustrian	Pengadaan Mesin Jahit	ada beberapa kelompok wanita tani memiliki keahlian menjahit namun tidak memiliki modal untuk membeli alat	Paleteang, Kab. Pinrang	Paleteang	Seluruh Kelurahan/ Desa	5 buah	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Perindustrian	Pengadaan Mesin Jahit	ada beberapa kelompok wanita tani memiliki keahlian menjahit namun tidak memiliki modal untuk membeli alat	Patampanua, Kab. Pinrang	Patampanua	Seluruh Kelurahan/ Desa	5 buah	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Ir. Syamsuri	Golkar	Perindustrian	Pengadaan Alat - alat Pertukangan	ada beberapa kelompok wanita tani memiliki keahlian namun tidak memiliki modal untuk membeli alat	Paleteang, Kab. Pinrang	Paleteang	Seluruh Kelurahan/ Desa	1 ls	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder	Pembangunan jaringan irigasi sekunder BR-16 karena kondisinya sudah rusak/berat	Desa Malimpung, Kab. Pinrang	Patampanua	Malimpung	250 meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pertanian	Pengadaan Alat Panen pertanian (combien)	Pengadaan Hand Traktor dan Traktor Roda 4 karena masih ada kelompok tani yang belum memiliki	Paleteang, Kab. Pinrang	Paleteang	Seluruh Kelurahan/ Desa	3 buah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Duikker	duikker yang ada dimensinya sangat kecil, sehingga terjadi banjir	jalan sungai walanai, Kab. Pinrang	Paleteang	Benteng Sawito	1 buah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rehabilitasi bangunan pintu paleteang (B.PL.4) karena kondisi bangunan sudah rusak berat	Mamminasae, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminasae	1 buah	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	kondisi jalan pemukiman sudah rusak berat	Lingkungan Madimeng Barat, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminasae	250 meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi jalan tidak mampu dilalui roda 6 karena kondisi tanahnya sangat labil	Jalan Lorong 20/Hj.Ati, Kab. Pinrang	Paleteang	Macinnae	250 meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	kondisi jalan sudah rusak berat	Kawasan Kampung baru Ongkoe, Kab. Pinrang	Paleteang	Macinnae	300 meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	kondisi jalan sudah rusak, sehingga sulit dilalui roda 6	Jalan Lorong H.robby Temmasarangge, Kab. Pinrang	Paleteang	Temmassarangge	250 meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	kondisi jalan sudah rusak berat	Jalan sebelah utara pekuburan Lasinrang, Kab. Pinrang	Paleteang	Laleng Bata	250 meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	kondisinya jalan sudah rusak	Jalan Kawasan Amassangang timur, Kab. Pinrang	Paleteang	Laleng Bata	250 meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Ir. Syamsuri	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	kondisinya sudah rusak berat	Kawasan lerang-lerang utara, Kab. Pinrang	Paleteang	Benteng Sawito	250 meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	kondisi drainase sudah dangkal, sehingga perlu di lening	temmassarangnge,, Kab. Pinrang	Paleteang	Temmassarangnge	350 meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Ir. Syamsuri	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	kondisi drainase masih saluran tanah sehingga perlu di lening	Jalan pekuburan dusun sengae utara, Kab. Pinrang	Patampanua	Mattiroade	100 meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Akses Sulit dilewati kendaraan	Tammappa, Kab. Pinrang	Suppa	Maritengngae	400 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Sekolah	Sering masuk hewan ternak dan mengganggu jalannya proses belajar mengajar di sekolah	watang pulu, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Pulu	1 LS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Cat sudah kumuh dan berlumut	Ujung Lero, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Lero	1 LS	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pendidikan	Pembangunan Pagar Sekolah	Sering masuk hewan ternak dan mengganggu jalannya proses belajar mengajar di sekolah	Ujung Lero, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Watang Suppa	200 Meter	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Susah dilalui kendaraan Roda 4 untuk pengangkutan hasil Produksi Pertanian	Watang Pulu, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Pulu	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Kondisi saluran sangat dangkal dan ditumbuhi pohon sehingga air tidak lancar mengalir	Sambamparu, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Tasiwalie	5 km	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi becek dan tidak bisa dilewati pada saat musim hujan	Sabbamparu, Kab. Pinrang	Suppa	Tasiwalie	250 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Susah dilalui kendaraan Roda 2 dan Roda 4 untuk pengangkutan hasil produksi pertanian	Ladea, Kab. Pinrang	Suppa	Maritengngae	300 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

H. Muhtadin	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi becek dan tidak bisa dilewati pada saat musim hujan	Ladea, Kab. Pinrang	Suppa	Maritengngae	150 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalanan meerupakan pemukiman padat sehingga perlu dilakukan pengecoran untuk memperlancar aktifitas warga	watang pulu, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Pulu	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Air tidak mengalir ke pembuangan Sehingga mengakibatkan air tergenang di sekitar Rumah Warga	Pao, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Padaidi	400 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Air tidak mengalir ke Pembuangan	Bulu, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Manarang	400 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Tidak bisa di lewati kendaraan Roda dua dan roda empat untuk pengangkutan hasil produksi pertanian	Pananrang, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Padaidi	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Tidak bisa di lewati kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat	pananrang, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Padaidi	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Sudah rusak parah sehingga tidak bisa di lewati kendaraan roda dua dan roda Empat	Padakkalawa, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Padakkalawa	12 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder	Saluran Jebol sehingga air tidak sampai ke lahan persawahan	Barugae, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Padaidi	150 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalanan terlalu Rendah dan tidak ada saluran air di sebelah timur jalan	Makkawaru, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Makkawaru	70 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pendidikan	Pemasangan Paving Blok	Sering banjir pada saat musim hujan	Sabbamparu, Kab. Pinrang	Suppa	Tasiwalie	1 LS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui
H. Muhtadin	Demokrat	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	Sering banjir disaat musim hujan	Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Pulu	1 ls	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

H. Muhtadin	Demokrat	Pendidikan	Pembangunan Pagar Sekolah	Sering masuk hewan ternak dan mengganggu jalannya proses belajar mengajardi Sekolah	Makkawaru, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Makkawaru	150 Meter	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Jalanan Sulit dilewati pada saat musim hujan	Jln. Massewae, Kab. Pinrang	Duampanua	Kaballangan	00 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Kayu	Untuk Mempermudah Akses	Di Massewae, Kab. Pinrang	Duampanua	Massewae	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Akses Ke Kuburan sangat sulit akibat Jalanan yang rusak	Dusun Kaluppang, Kab. Pinrang	Duampanua	Massewae	00 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengaspalan Jalan	Jalanan Sudah Rusak	Di Massewae, Kab. Pinrang	Duampanua	Massewae	00 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Jalanan Berlubang dan Becok pada saat Musim Hujan	Di Katomporang, Kab. Pinrang	Duampanua	Katomporang	00 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan Beton	Kondisi Sudah Rusak dan Susah di lewati kendaraan	Di Sulengka, Kab. Pinrang	Duampanua	Bittoeng	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terjadi Genangan Air memenuhi Jalanan	Di Bungi, Kab. Pinrang	Duampanua	Bungi	00 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terjadi Genangan Air Memenuhi Jalan	Di Cacabala, Kab. Pinrang	Duampanua	Pekkabata	00 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pertanian	Pengadaan Alat Panen pertanian (combien)	Kurangnya Alat Pertanian Sehingga mempersulit pekerjaan	Bittoeng, Kab. Pinrang	Duampanua	Bittoeng	00 Buah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	Akses Jalan Yang Sulit dilewati Kendaraan	Linoe Desa Mangki, Kab. Pinrang	Cempa	Mangki	1.5 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terjadi Genangan Air yang sulit dilalui Kendaraan	Di Linoe Desa Mangki, Kab. Pinrang	Cempa	Mangki	00 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalannya Sangat Sempit dan Sulit dilewati Pada saat musim hujan	Di Linoe Desa Mangki, Kab. Pinrang	Cempa	Mangki	00 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan Yang susah di akses ke Sawah	Di Linoe, Kab. Pinrang	Cempa	Mangki	00 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengaspalan Jalan	Kondisi Jalan sudah rusak	Di Linoe Desa Cempa, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Cempa	00 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pendidikan	Pembangunan Pagar Sekolah	Kondisi Tidak Layak Karena Sering Masuk Hewan	Di Linoe, Kab. Pinrang	Cempa	Cempa	00 Meter	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi jalan Sudah Rusak Sehingga Sulit di akses	Di Cempa, Kab. Pinrang	Cempa	Cempa	00 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengaspalan Jalan	Kondisi Jalan Sudah Rusak	Di Bakoko, Kab. Pinrang	Cempa	Cempa	00 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pertanian	Pengadaan Alat Panen pertanian (combien)	Kurangnya Alat Sehingga Memperlambat Proses Pertanian	Di Cempa, Kab. Pinrang	Cempa	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 Buah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Perindustrian	Pengadaan Alat - alat Pertukangan	Kurangnya Alat Sehingga memperlambat pekerjaan	Di Cempa, Kab. Pinrang	Cempa	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 Buah	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terjadi Genangan Air pada saat musim hujan	Di Bakoko, Kab. Pinrang	Cempa	Cempa	00 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Perindustrian	Pengadaan Alat - alat Pertukangan	Kurangnya Alat Sehingga memperlambat Pekerjaan	Di Kaballangan, Kab. Pinrang	Duampanua	Kaballanga n	00 Buah	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Terjadi Sedimentasi Pada Saluran Pembuangan	Menre-Bakoko, Kab. Pinrang	Cempa	Mangki	7 Km	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Jalan tani sebagai akses ke sawah sudah rusak dan perlu perbaikan	-, Kab. Pinrang	Cempa	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
H. ALIMUDDIN BUDUNG,S.Hi.,MM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Masyarakat meminta untuk drainase jalan kaballangan	Kaballangang, Kab. Pinrang	Duampanua	Kaballanga n	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalanan Berlubang dan Rusak Berat	Jalan Buttu Mandu, Kab. Pinrang	Patampanua	Tonyamang	00 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan Sudah Rusak Sehingga perlu perbaikan	Dusun Bonne, Kab. Pinrang	Patampanua	Sipatuo	00 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengaspalan Jalan	Kondisi Jalan Sudah Rusak sehingga perlu Perbaikan	Dusun Bonne, Kab. Pinrang	Patampanua	Sipatuo	00 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan mengalami kerusakan berat	Desa Watang Kassa, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Watang Kassa	00 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Gantung	Tidak ada Jembatan Penghubung Kampung Butulappo ke Padang Loang	Batulappa - Padang Loang, Kab. Pinrang	Patampanua	Padangloan g	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terjadi Genangan Air saat musim Hujan	Jalan kampung Padang Loang, Kab. Pinrang	Patampanua	Padangloan g	00 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	Kondisi Jalan mengalami Rusak Berat	Jalan Dusun Urung, Kab. Pinrang	Patampanua	Sipatuo	00 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	Kondisi Jalan mengalami kerusakan parah	Di Kampung Darabatu, Kab. Pinrang	Patampanua	Malimpung	00 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Kasman	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	Akses Jalan ke Kawasan TPA Malimpung Sudah Rusak	Jalan Kawasan TPA Malimpung, Kab. Pinrang	Patampanua	Malimpung	00 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan Gantung	Kondisinya Sudah Retak dan Roboh	Dusun Urung Poleko, Kab. Pinrang	Patampanua	Sipatuo	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan Beton	Kondisi Sudah Rusak Berat	Urung Belakang SMPN 2, Kab. Pinrang	Patampanua	Sipatuo	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Untuk Membuat Akses Jalan Alternatif	Kampung Bulu-Bulu, Kab. Pinrang	Patampanua	Benteng	00 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Terjadi Genangan Air Pada saat musim hujan	Komplek SMPN 2, Kab. Pinrang	Patampanua	Sipatuo	00 Km	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalannya sudah mengalami kerusakan	Kampung Jampu Desa Sipatuo, Kab. Pinrang	Patampanua	Sipatuo	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Untuk lanjutan pengecoran jalan yang sebelumnya belum selesai	Jln Ruas Poros Urung - Barombong. Malimpung, Sipatuo, Kab. Pinrang	Patampanua	Malimpung	00 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kurangnya bak dan jaringan perpipaan	Kampung Bonne, Kab. Pinrang	Patampanua	Sipatuo	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembangunan Pamroud jalan kampung Bulu-bulu untuk membuat akses jalan alternatif	Kampung Bulu-Bulu, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Teppo	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Kasman	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Perlu Pengecoran karena kondisi jalannya sudah rusak	Jalan Kampung Lapangan, Kab. Pinrang	Patampanua	Teppo	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Sekolah	Perlu Adanya Perbaikan Pagar TK, sehingga tidak banyak hewan yang bisa masuk di pekarangan sekolah	Di Beru, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Mattombo ng	00 -	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Terjadi Sedimentasi pada Saluran Pembuangan	Di Beru, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Mattombo ng	00 -	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalan penghubung Dusun Beru ke Makoring sudah rusak sehingga Susah dilewati Kendaraan	Dusun Beru, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Mattombo ng	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Tidak ada pengadaan tempat sampah	Langnga, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Langnga	00 Buah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalan sudah rusak dan banjir ketika musim hujan	Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang	Lansirang	Lansirang	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pertanian	Pengadaan Alat Panen pertanian (combien)	Bantuan alat Handtraktor	Lanrisang, Kab. Pinrang	Lansirang	Lansirang	00 Buah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Kelautan dan Perikanan	Pengadaan bibit ikan dan Udang	Bantuan Bibit Udang	Lanrisang, Kab. Pinrang	Lansirang	Lansirang	00 -	Dinas Perikanan	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Perlunya Bak Sampah	Lanrisang, Kab. Pinrang	Lansirang	Lansirang	00 Buah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengaspalan Jalan	Kondisi jalan sudah rusak, sehingga perlu ditingkatkan	Kelurahan Pallameang, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Pallameang	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Kondisi Salurannya tertutup	Ujung Tape, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Pallameang	00 -	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengaspalan Jalan	Kondisi Jalan sudah rusak	Lingkungan Lapangan Langnga, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Langnga	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalan tidak rata dan sering becek pada saat musim hujan	Kelurahan Lanrisang, Kab. Pinrang	Lansirang	Lansirang	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Meningkatkan akses jalan Transportasi	Jl. Hati Mulia Lingkungan Ujung Tape dan Pallameang, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Pallameang	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Perahu/Mesin untuk Nelayan	Untuk Meningkatkan dan Menambah Prasarana Laut	Lingkungan Ujung Tape, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Pallameang	00 Buah	Dinas Perikanan	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Perumahan	Kurangnya Lampu Jalan dan untuk meningkatkan keamanan sekitar jalan yang terlalu gelap	Lingkungan Ujung Tape, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Pallameang	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Perindustrian	Pengadaan Mesin Jahit	Peningkatan Keterampilan bagi masyarakat	Lingkungan Ujung Tape, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Pallameang	00 Buah	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengaspalan Jalan	Meningkatkan Kondisi jalan dalam kelurahan dan memperlancar transportasi	Lingkungan Ujung Tape, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Pallameang	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Memperlancar Transportasi Karena sering tergenang air	Jalan A. Abdullah (Samping Kantor Lurah Pallameang), Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Pallameang	00 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Memperlancar Saluran Air dan Transportasi	Jl. Lure Lingkungan Ujung Tape, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Pallameang	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Perindustrian	Pengadaan Alat - alat Pertukangan	Kurangnya Alat Sehingga memperlambat pekerjaan	Lingkungan Ujung Tape, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Pallameang	00 Buah	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Perindustrian	Pengadaan Mesin Perbengkelan	Peningkatan Keterampilan bagi masyarakat	Lingkungan Ujung Tape, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Pallameang	00 Buah	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan untuk Nelayan	Peralatan tangkap ikan bagi nelayan masih sangat kurang sehingga memperlambat pekerjaan	Lingkungan Ujung, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Pallameang	00 -	Dinas Perikanan	Usulan disetujui
H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Untuk memperlancar saluran air agar tidak terjadi genangan air ketika hujan	Di Beru Desa Mattombong, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Mattombong	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

H. Andi Muh. Ramdhani	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Kondisi jalan berlubang sehingga perlu adanya penimbunan jalan	Dusun Beru, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Mattombo ng	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Sahabuddin	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Mempermudah akses Masyarakat ke sawah	Menro, Kab. Pinrang	Suppa	Seluruh Kelurahan/ Desa	6000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Sahabuddin	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	akses jalan dikeluhkan jika musim hujan karena sulit di lalui	Menro, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Pulu	2 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Sahabuddin	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Untuk mencega pendangkalan	Menro, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Pulu	3000 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
H. Sahabuddin	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Meningkatkan akses jalan Masyarakat	Parengki, Kab. Pinrang	Suppa	Lotang Salo	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Sahabuddin	PPP	Pertanian	Pengadaan Pompa Air	Untuk kesediaan air bagi Masyarakat maupun petani di musim kemarau	Lotang Salo, Kab. Pinrang	Suppa	Lotang Salo	5 Unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
H. Sahabuddin	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Meningkatkan Akses Jalan Untuk Masyarakat	Menro, Kab. Pinrang	Suppa	Watang Suppa	1000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
SYAMSUDDIN DUDDIN	PDIP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisiya Becek pada saat Hujan	Lanrisang, Kab. Pinrang	Lansirang	Lansirang	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
SYAMSUDDIN DUDDIN	PDIP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	jalannya Becek	Samaulue, Kab. Pinrang	Lansirang	Samaulue	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
SYAMSUDDIN DUDDIN	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rusak Total	Barang Palie, Kab. Pinrang	Lansirang	Barang Palie	00 -	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
SYAMSUDDIN DUDDIN	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi/Restorasi Sungai	Sering banjir kalau musim hujan	Abbanuang, Kab. Pinrang	Lansirang	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 -	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
SYAMSUDDIN DUDDIN	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan Beton	Terlalu Sempit jalan porosnya	Abbanuang, Kab. Pinrang	Lansirang	Lerang	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

SYAMSUDDIN DUDDIN	PDIP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Jalannya Becek	Massulowalie, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Massulowal ie	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
M.FAIZAL,M	Nasdem	Lingkungan Hidup	Penanganan Sampah	Sampah di sepanjang pesisir pantai tidak ada tempat	Wiring Tasi, Kab. Pinrang	Suppa	Wiringtasi	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
M.FAIZAL,M	Nasdem	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Perumahan	Terlalu gelap sepanjang lowita	Wiring Tasi, Kab. Pinrang	Suppa	Wiringtasi	3 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
M.FAIZAL,M	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi/Restorasi Sungai	Sudah tidak sampai air laut ketambak	Wiringtasi, Kab. Pinrang	Suppa	Wiringtasi	3 Km	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
M.FAIZAL,M	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	sudah rusak parah	Minralo, Kab. Pinrang	Suppa	Wiringtasi	3 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
M.FAIZAL,M	Nasdem	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Sulit dilewati Kendaraan	Wiringtasi, Kab. Pinrang	Suppa	Wiringtasi	3 Buah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
M.FAIZAL,M	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Sering banjir saat musim hujan	Polewali, Kab. Pinrang	Suppa	Polewali	400 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
M.FAIZAL,M	Nasdem	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Tidak layak lagi untuk dilewati	Polewali, Kab. Pinrang	Suppa	Polewali	30000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
M.FAIZAL,M	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	sudah sangat parah untuk dilewati	Polewali, Kab. Pinrang	Suppa	Polewali	1000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
M.FAIZAL,M	Nasdem	Pertanian	Pengadaan Bibit Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Porang dll)	tidak merata pembagian bibit jagung	polewali, Kab. Pinrang	Suppa	Polewali	3 Kantong	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
M.FAIZAL,M	Nasdem	Pertanian	Pengadaan Pompa Air	Belum ada bantuan kelompok Tani	Polewali, Kab. Pinrang	Suppa	Polewali	3 Unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

M.FAIZAL,M	Nasdem	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Perumahan	Gelap di sepanjang jalan poros Bela-belawa	Bela-belawa, Kab. Pinrang	Suppa	Polewali	15 Titik	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
JEFRIADI, SE	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	Jalan rusak berat jalan ini adalah akses satu-satunya warga Desa Maroneng	Maroneng, Kab. Pinrang	Duampanua	Maroneng	3 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
JEFRIADI, SE	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	saluran ini untuk menghindari genangan yang ada di jalan utama	Maroneng, Kab. Pinrang	Duampanua	Maroneng	200 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
JEFRIADI, SE	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Menghindari penumpukan limbah rumah tangga	Bungi, Kab. Pinrang	Duampanua	Bungi	200 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
JEFRIADI, SE	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalan tidak bisa dilalui karena becek pada saat musim hujan	Barugae, Kab. Pinrang	Duampanua	Maroneng	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
JEFRIADI, SE	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	memperbaiki jalan masyarakat antar dusun yang rusak dikarenakan banjir tahunan di Wilayah tersebut	Buttu Sawe, Kab. Pinrang	Duampanua	Battusawe	500 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
JEFRIADI, SE	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	Untuk memperlancar jalannya Masyarakat kewilayah pertanian dan akses lainnya untuk saat ini harus berputar sekitar 2 km	Data, Kab. Pinrang	Duampanua	Data	20 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
JEFRIADI, SE	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Memperbaiki jalanan masyarakat yang becek dan tergenang air apabila hujan	Data, Kab. Pinrang	Duampanua	Data	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
JEFRIADI, SE	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan Kayu	Jembatan sudah mulai rapuh dan sudah banyak kayu yang hilang	Ujung Baru, Kab. Pinrang	Duampanua	Data	15 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
JEFRIADI, SE	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Menghindari penumpukan limbah rumah tangga	RK I, Kab. Pinrang	Duampanua	Lampa	100 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
JEFRIADI, SE	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	Menghindari longsoran materi Jatuh ke perswahan	Bulu Poncing, Kab. Pinrang	Duampanua	Data	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
JEFRIADI, SE	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	Mempermudah dan mempercepat akses Masyarakat yang semulanya akses ini harus di tempuh sekitar kurang lebih 3 km	Bittoeng, Kab. Pinrang	Duampanua	Bittoeng	1 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

JEFRIADI, SE	Berkarya	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Membenahi akses petani yang hanya memakai kayu seadanya	Kamali, Kab. Pinrang	Duampanua	Battusawe	4 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
JEFRIADI, SE	Berkarya	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Jembatan yang ada adalah jembatan swadaya Masyarakat berupa kayu kualitas rendah	Sidomulyo, Kab. Pinrang	Duampanua	Tatae	3 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
JEFRIADI, SE	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	Menghindari meterial bebatuan yang ada di jalanan jatuh kewilayah perswahan Masyarakat	Kamali, Kab. Pinrang	Duampanua	Battusawe	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hamsyar, SE	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Air Kurang bersih dan aliran air tidak lancar	Dusun Waru, Kab. Pinrang	Duampanua	Battusawe	00 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Hamsyar, SE	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Kondisi Jalan Sudah rusak sehingga perlu adanya pengecoran	Dusun Waru, Kab. Pinrang	Duampanua	Battusawe	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hamsyar, SE	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Masyarakat butuh Penampungan Air Untuk Petani jagung	Desa Barugae, Kab. Pinrang	Duampanua	Barugae	00 Liter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Hamsyar, SE	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalan Belum pernah di rabat dan jalannya sudah rusak	Jl. Lapangan Cacabala Pekkabata, Kab. Pinrang	Duampanua	Pekkabata	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hamsyar, SE	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalannya sudah Rusak parah	Jln Padang Dongo, Kab. Pinrang	Duampanua	Lampa	250 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hamsyar, SE	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Akses Sulit Dilalui Kendaraan	Desa Buttusawe, Kab. Pinrang	Duampanua	Battusawe	1 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hamsyar, SE	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan becek dan sulit dilewati pada saat musim hujan	Jalan Tani Panggaragajian, Kab. Pinrang	Duampanua	Battusawe	1 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hamsyar, SE	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Aliran Air Tidak Lancar	Di Barugae, Kab. Pinrang	Duampanua	Barugae	00 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Hamsyar, SE	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalan Berlubang dan Sulit dilalui Kendaraan	Desa Barugae, Kab. Pinrang	Duampanua	Barugae	00 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Hamsyar, SE	Demokrat	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Agar mempermudah akses jalan ke perkampungan dan sawah	Desa Buttu Sawe, Kab. Pinrang	Duampanua	Battusawe	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hamsyar, SE	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Agar Akses jalan lebih ditingkatkan sehingga mudah dilalui Petani ke sawahnya	Barugae, Kab. Pinrang	Duampanua	Barugae	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hamsyar, SE	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Agar mempermudah akses jalan ke sawah ketika musim panen	Sipatuo 1 Kel. Pekkabata, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Pekkabata	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hamsyar, SE	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Duikker	Adanya Permintaan dari masyarakat untuk pembuatanb Dekker 4 Buah	Dusun Waru, Kab. Pinrang	Duampanua	Battusawe	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hamsyar, SE	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi jalan perlu ditingkatkan karena sudah rusak	Lagontong Desa Katompurang, Kab. Pinrang	Duampanua	Katompurang	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
IR. HJ. SAHARIYAH LOLO	PDIP	Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Agar Aliran Air Kesawah Lancar Untuk Memaksimalkan Hasil Pertanian	Masolo, Kab. Pinrang	Patampanua	Masolo	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
IR. HJ. SAHARIYAH LOLO	PDIP	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Jalan Penghubung Desa Leppangan Dengan Kelurahan Tonyamang	Leppangan, Kab. Pinrang	Patampanua	Leppangan g	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
IR. HJ. SAHARIYAH LOLO	PDIP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Akses jalan yang sudah rusak sehingga perlu perbaikan Talud jalan tani, kelompok Tani Sipatuo	Jl Tani Desa Mattiro Ade, Kab. Pinrang	Patampanua	Mattiroade	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
IR. HJ. SAHARIYAH LOLO	PDIP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Akses jalan sudah rusak sehingga perlu perbaikan	Kelompok Tani Cendrana 2 Desa Leppangan, Kab. Pinrang	Patampanua	Leppangan g	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
IR. HJ. SAHARIYAH LOLO	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalan Mengalami Kerusakan	Jl. Langsung, Kab. Pinrang	Paleteang	Pacongong	00 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
IR. HJ. SAHARIYAH LOLO	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Perlunya Rabat Beton di Jalan Kel.Benteng Sawitto karena ada kerusakan	Kel. Benteng Sawitto, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

IR. HJ. SAHARIYAH LOLO	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Permintaan Masyarakat untuk Rabat Beton Kel. Pacongng Kec. Paleteang	Kel. Pacongng, Kab. Pinrang	Paleteang	Pacongng	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
IR. HJ. SAHARIYAH LOLO	PDIP	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rehabilitasi Drainase Dalam Kawasan Perumahan	Untuk peningkatan dan drainase Jln Belakang Al-Ikhlas Jl. Mandiri	Jl. Belakang Al-Ikhlas Jl. Mandiri, Kab. Pinrang	Paleteang	Pacongng	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
IR. HJ. SAHARIYAH LOLO	PDIP	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Drainase Dalam Kawasan Perumahan	-	Jl. Veteran Barat, Kab. Pinrang	Paleteang	Pacongng	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
IR. HJ. SAHARIYAH LOLO	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Perlunya perbaikan saluran pembuangan karena sudah rusak	Desa Mattiro Ade, Kab. Pinrang	Patampanua	Mattiroade	00 -	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
IR. HJ. SAHARIYAH LOLO	PDIP	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Drainase Dalam Kawasan Perumahan	Masyarakat membutuhkan adanya saluran drainase	Macinnae, Kab. Pinrang	Paleteang	Macinnae	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
IR. HJ. SAHARIYAH LOLO	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Untuk pembuatan drainase belakang stadion	Belakang Stadion Temmassarangnge, Kab. Pinrang	Paleteang	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
IR. HJ. SAHARIYAH LOLO	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	-	Talabangi Kel. Tonyamang, Kab. Pinrang	Patampanua	Tonyamang	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
A.MULYADI MUSTAFA,SH,,MH	Nasdem	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Jalannya sudah rusak dan bolong-bolong	Solang, Kab. Pinrang	Lembang	Letta	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
A.MULYADI MUSTAFA,SH,,MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Untuk Mempermuda Masyarakat Ke Mesjid Karena Masih Sering Becek	Solang, Kab. Pinrang	Lembang	Letta	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
A.MULYADI MUSTAFA,SH,,MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Karena Masih Berupa Tanah dan Sering Tergenang Air	Solang, Kab. Pinrang	Lembang	Letta	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
A.MULYADI MUSTAFA,SH,,MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Karena Situasi Lapangan Volly Sudah Tidak Layak untuk Di Tempati Berolahraga	Solang, Kab. Pinrang	Lembang	Letta	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

ILWAN SUGIANTO	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	Rusak Berat Tidak Bisa dilalui Kendaraan Sebagai Sarana Transportasi umum Masyarakat Petani	Cempa, Kab. Pinrang	Cempa	Cempa	5000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ILWAN SUGIANTO	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Lambat arus Air Mengakibatkan Persawahan /Padi Tergangan/Hanyut	Wesselue,Mangki, Kab. Pinrang	Cempa	Mangki	1500 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
ILWAN SUGIANTO	GAP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Sangat Sulit Hasil Produksi Gabah Diangkut Kerumah Penduduk	Menre, Kab. Pinrang	Cempa	Cempa	1000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
ILWAN SUGIANTO	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Menghambat Arus Air di Akibatkan Tumpukan sampah	Sikkuala/Tanacicca, Kab. Pinrang	Cempa	Cempa	1500 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
ILWAN SUGIANTO	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Semua Sampah Menempel/Menumpuk di Sawah Petani Lahan Membusuk	Mangki, Kab. Pinrang	Cempa	Mangki	300 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
ILWAN SUGIANTO	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tanggul Sungai	Terkikis Tanggul dan Mengancam Tanggul Bobol	Mangki, Kab. Pinrang	Cempa	Mangki	300 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
ILWAN SUGIANTO	GAP	Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kurangnya air sampai ke areal Persawahan	Pallabila, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Cempa	500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
ILWAN SUGIANTO	GAP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Menghambat transportasi pengangkutan gabah petani	mangki, Kab. Pinrang	Cempa	Mangki	500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
ILWAN SUGIANTO	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Rusak berat jalan poros Pinrang Sikkuledeng	Mangki, Kab. Pinrang	Cempa	Mangki	5000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ILWAN SUGIANTO	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Perkampungan terendam air di akibatkan sampah bertumpukan d mana - mana	Linoe, Kab. Pinrang	Cempa	Cempa	500	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
ILWAN SUGIANTO	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalan ke kampung baru rusak berat	Menre, Kab. Pinrang	Cempa	Cempa	1000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Akses jalanan masih tanah dan berlubang pada saat musim hujan	Lorong 3 Jalan Industri Poros Fakkie Tiroang - Sulili Paleteang, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	4000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kesulitan petani dalam membawa pupuk dan alat pertanian tanpa akses jalan kendaraan bermotor	Klp Tani Lasode Alecalimpo Timur, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	2000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Akses Jalan Berlumpur dan tergenang air pada saat hujan	Klp Tani Padaidi III Alecalimpo Barat, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	2000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalan masih Tanah dan berlumpur pada saat musim hujan	Lorong 1 ke jalan Labattoa dan jalan Pesantren Alecalimpo Timur, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	1500 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisinya sudah berlubang dan susah dilewati pada saat musim hujan	To''''''e, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Akses sulit dilalui kendaraan	Alecalimpo Timur Lorong 11, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Sulit dilewati kendaraan pada saat musim hujan	Alecalimpo Barat, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalanan masih tanah dan berlumpur ketika musim hujan	Jalan Masjid Al Jihad Alecalimpo Barat, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisinya becek saat hujan	Boki Selatan, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisinya becek saat hujan	Jalan masuk Masjid Paskas Ulu Tedong, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Maccoralai e	500 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	konsinya sudah berlubang dan sulit dilewati kendaraan saat musim hujan	Jalan Usman Tantu Sebelah Selatan Mesjid Mustaqim Alecalimpo barat, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisinya susah dilewati kendaraan	Lorong 4 Alecalimpo Barat, Kab. Pinrang	Tiroang	Seluruh Kelurahan/ Desa	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	kondisinya berlubang dan sulit dilewati kendaraan	Jl kendea Lorong 2, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	300 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisinya sudah berlubang dan sulit di lalui kendaraan sehingga menimbulkan kemacetan	Lorong 3 Jln Matahari, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	80 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisinya berlubang sulit di lewati saat Musim hujan	Alecalimpo Barat, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	1000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisinya berlubang dan sulit dilewati kendaraan saat musim hujan sehingga Pengecoran Sangat dibutuhkan untuk menghubungkan dua kelurahan sehingga aktifitas warga lancar	Jln Labattoa Fakkie - Tonrong Saddang, Kab. Pinrang	Tiroang	Seluruh Kelurahan/ Desa	3000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	Sangat dibutuhkan Jembatan untuk menjamin kelancaran aktifitas masyarakat	Fakkie - Laleng Bata, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	10 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	Berlumpur dan tergenang air pada saat hujan	Alecalimpo Barat, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	1000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	Kondisinya Becek pada saat musim hujan	Jalan Lacinda Alecalimpo Barat, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	1500 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Sangat sulit di lewati kendaraan Roda 2 pada saat musim hujan	Klp Tani Labattoa I Alecalimpo Timur, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	2000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisinya susah dilewati Kendaraan	Klp Tani Mappasitujue I Alecalimpo Timur, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	2000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	kondisinya Becek saat hujan dan sulit dilewati Kendaraan	Klp Tani Padang Dea I Alecalimpo Barat, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	2000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kesulitan petani dalam membawa pupuk dan alat pertanian lainnya tanpa akses jalan roda dua	Klp Tani Padang Dea II Alecalimpo Barat, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	2000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisinya sulit dilalui kendaraan pada musim hujan	Mattiro Deceng, Kab. Pinrang	Tiroang	Tiroang	2000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	kondisinya sulit dilewati Kendaraan	Alecalimpo Barat, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	2000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalanan masih tanah dan berlumpur pada saat hujan	Ulu Tedong, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Maccoralai e	500 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
KAMARUDDIN, SH,.MH	Nasdem	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalanan masih tanah dan berlumpur pada saat hujan	Jalan masuk Pesantren Darul Hijroh BTN Palm Hijau, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Bentengng e	250 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terjadi Genangan Air Pada saat musim Hujan	Boki, Kab. Pinrang	Tiroang	Pammase	500 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Belum adanya Drainase Sehingga Banjir saat musim hujan	Boki, Kab. Pinrang	Tiroang	Pammase	100 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Perindustrian	Pengadaan Mesin Jahit	Kurangnya Alat Mesin Jahit	Arassie, Kab. Pinrang	Tiroang	Marawi	00 Buah	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Hj. Rusnah	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Sekunder	Pematangnya atau pinggir sawahnya selalu roboh	Kabo'e, Kab. Pinrang	Tiroang	Mattiro Deceng	200 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Akses ke lokasi perkampungan sulit dilalui kendaraan	Kelurahan Samaturue, Kab. Pinrang	Tiroang	Samaturue	1 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Mempermudah Akses Petani Menyebrang ke Sawah	Kelurahan Samaturue, Kab. Pinrang	Tiroang	Samaturue	8 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Akses jalan susah dilewati kendaraan	Lingkungan Ujung, Kab. Pinrang	Tiroang	Tiroang	1500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Akses jalan sudah rusak parah	Kelurahan Sipatokkong, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Sipatokkong	1500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan becek sehingga perlu timbunan	Kelurahan Siparappe, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Siparappe	500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Akses Jalan Sulit dilalui Kendaraan	Maccorawalie, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Maccoralai e	85 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalan perlu di tingkatkan bagi masyarakat	Jalan Banteng, Pasar Kampung Jaya Timur, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Jaya	400 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan Susah dilalui Kendaraan	Dusun To'e, Kab. Pinrang	Tiroang	Samaturue	500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	Karena Jembatan itu dibutuhkan Masyarakat untuk menghubungkan To'e kel.Samaturue sama Kel.Pammase demi peningkatan perekonomian Masyarakat	To'e, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	24 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Hj. Rusnah	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Karena belum samapai di ujung sungai yang sudah di kerja supaya rampung seluruhnya	samaturue, Kab. Pinrang	Tiroang	Tiroang	250 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	Rusak Berat sehingga Butuh Timbungan	Salo, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Salo	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Kepemudaan dan Olahraga	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Fasilitas umum sehingga perlu ditimbun karena selalu banjir pada saat musim hujan	Mattiro Deceng, Kab. Pinrang	Tiroang	Tiroang	60 -	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Rusak seningga butuh Pengecoran	Mattiro Deceng, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	700 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten	Tidak tersedianya bak sampa umum untuk wilayah kelurahan Mattiro Deceng	Mattiro Deceng, Kab. Pinrang	Tiroang	Tiroang	1 buah	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Perumahan	Butuh Penerangan di malam hari apabila masyarakat mau salat	Mattiro Deceng, Kab. Pinrang	Tiroang	Tiroang	3 Tiang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Mempermudah akses untuk membawa hasil panen masyarakat	Salo, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Salo	700 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Sangat dibutuhkan pengecoran untuk memperlancar aktifitas warga	Salo, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Salo	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Mempermuda akses Masyarakat untuk kesawah	Sipatokkong, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	2000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	Sebagai penghubung menyeberang ke jalan tani agar akses mudah dilalui	siparappe, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	5 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Hj. Rusnah	Golkar	Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Masyarakat membutuhkjan air jika musim kemarau	To''e Kelurahan Samaturue, Kab. Pinrang	Tiroang	Tiroang	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Susah akses kedalam karena jalan belum bagus	Jalan tani Aka Kelurahan Salo, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Salo	250 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. Rusnah	Golkar	Pertanian	Pengadaan Pompa Air	Masyarakat Petani Membutuhkan Air pada saat musim kemarau	Dusun To''''e, Kab. Pinrang	Tiroang	Samaturue	00 Unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Andi Riksan	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	-	polejiwa, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Alitta	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Andi Riksan	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	-	Alitta, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Alitta	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Andi Riksan	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	-	Alitta, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Andi Riksan	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	-	Alitta, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Alitta	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Andi Riksan	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	-	Alitta, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Alitta	00 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Andi Riksan	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	-	Alitta, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Alitta	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Andi Riksan	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan Gantung	-	Alitta, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Alitta	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Andi Riksan	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	-	Lapakita, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Alitta	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Andi Riksan	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder	-	BARUGAE, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Alitta	00 -	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Hartono	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Untuk memperlancar jalan pemukiman	Pacongan, Kab. Pinrang	Paleteang	Pacongong	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hartono	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Karena Akses Jalanan tidak tembus kepermukiman Warga	Pacongong, Kab. Pinrang	Paleteang	Pacongong	70 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hartono	PPP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Jalan tani Di Sipatuo Baru kelurahan macinnae blm di talud	Macinnae, Kab. Pinrang	Paleteang	Macinnae	200 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hartono	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Akses saluran air jalan masuk pekuburan belumdi talud	Macinnae, Kab. Pinrang	Paleteang	Macinnae	200 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Hartono	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Karena akses Rabat beton terputus ingin di lanjutkan	Corawali, Kab. Pinrang	Paleteang	Benteng Sawito	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hartono	PPP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Karena akses jalan sipatuo dua belum ditalud	Macinnae, Kab. Pinrang	Paleteang	Seluruh Kelurahan/ Desa	200 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hartono	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Rumah Masyarakat tergenang air pada saat hujan	Tammassarangnge, Kab. Pinrang	Paleteang	Temmassar angnge	1000 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalanan sudah rusak dan belum pernah di rabat beton	Jln. Poros Salimbongan, Kab. Pinrang	Lembang	Ulusaddang	3 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalan sudah rusak dan belum pernah dirabat beton	Kaloran Desa Ulusaddang, Kab. Pinrang	Lembang	Ulusaddang	2 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Sebagai akses jalan untuk ke sawah	Use Waru Desa Buttu Sawe, Kab. Pinrang	Duampanua	Battusawe	500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terjadi genangan air pada saat musim hujan	Bulisu Kelurahan Kassa, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Kassa	200 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalannya sudah mengalami kerusakan	Bacukiki Kel. Kassa, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Kassa	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pendidikan	Pembangunan Pagar Sekolah	Tidak adanya pagar sehingga banyak hewan yang masuk	SD Inpres Baruppu Desa Kaseralau, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Kaseralau	1 Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	Masyarakat membutuhkan jembatan beton demi kenyamanan berkendara	Buttu Desa Rajang, Kab. Pinrang	Lembang	Rajang	1 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalanannya sudah rusak dan perlu diperbaiki	Tunjung Desa Rajang, Kab. Pinrang	Lembang	Rajang	400 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Untuk Memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian dan mengangkut hasil pertanian	Buttu Desa Rajang, Kab. Pinrang	Lembang	Rajang	2000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Akses Ke Kuburan susah dilewati kendaraan karena sudah rusak dan perlu diperbaiki	Jl. Pekuburan Mallang Desa Pakeng, Kab. Pinrang	Lembang	Pakeng	300 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi jalanannya sudah mengalami kerusakan	Jl. Poros Solang - Padang Desa Letta, Kab. Pinrang	Lembang	Letta	1 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Jalanannya sulit dilewati kendaraan	Jalan Poros Padang Buttu Batu, Kab. Pinrang	Lembang	Letta	4 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	Masyarakat butuh Jembatan penghubung antar Bakaru - Kariango demi kelancaran 2 desa	Bakaru - Kariango, Kab. Pinrang	Lembang	Bakaru	1 Unit	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalan sudah rusak dan perlu perbaikan	Desa Barugae, Kab. Pinrang	Duampanua	Barugae	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	Akses jalan ke pemukiman warga	Jl. Cullu Desa Barugae, Kab. Pinrang	Duampanua	Barugae	150 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Lanjutan Jalan beton yang sudah ada	Salubone Kel. Data, Kab. Pinrang	Duampanua	Data	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengaspalan Jalan	Kondisi Jalan sulit dilewati kendaraan karena sudah rusak	Jln. Poros Tatae Kampung Baru, Kab. Pinrang	Duampanua	Tatae	3 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Sebagai fasilitas untuk anak-anak menempuh pendidikan	Talambung Riawa, Kab. Pinrang	Lembang	Rajang	2 Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalanannya sudah rusak	Desa Rajang, Kab. Pinrang	Lembang	Rajang	500 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Ir. H. Usman Bengawan, SH	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Masyarakat sulit melewati jalan untuk mengangkut hasil sawahnya	Jl. Poros Paladan Bolopadang, Kab. Pinrang	Lembang	Letta	3 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. SALMA	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Lanjutan Rabat Beton Kampung Manisawa ke Dusun Papareang	mattiro Tasi, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Mattiro tasi	600 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. SALMA	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Gantung	menghubungkan antar kampung Baru-Baru Wakka Kecamatan Cempa dengn dusun Papareang	Mattiro Tasi, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Mattiro tasi	20 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. SALMA	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalannya Sering Longsor	Ammani, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Mattiro tasi	1 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. SALMA	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Untuk Memperlancar Saluran air dan Transportasi di Lingkungan ujung Tape	Ujung Tape, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Langnga	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. SALMA	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	Jalan Poros Jembatan Gantung Kanarie -Dolangan	Malongi-Longi, Kab. Pinrang	Lansirang	Mallongi-longi	300 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. SALMA	Berkarya	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisinya Sangat Becek Pada Saat Musim Hujan dan Sulit Dijangkau Oleh Kendaraan Roda Empat Maupun Roda Dua	Ammani, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Mattiro tasi	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. SALMA	Berkarya	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisinya Slit Dilewati Kendaraan Roda Dua Pada Saat Musim Hujan	Pappareang, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Mattiro tasi	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Hj. SALMA	Berkarya	Pertanian	Pengadaan Pompa Air	kondisinya Airnya Sangat Sulit pada saat Musim kemarau	Ammani, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Seluruh Kelurahan/ Desa	7 Buah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
ANDI PALLAWAGAU	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Setiap Mau Turun Sawah Selalu Tersumbat ,Sehingga Pada Saat Musim Tanam Tidak Bisa Bersamaan	Laleng Bata, Kab. Pinrang	Paleteang	Laleng Bata	300 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
ANDI PALLAWAGAU	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan	Pada Saat Panen Kendaraan Roda Empat Sulit Berpapasan	Benteng Sawitto, Kab. Pinrang	Paleteang	Benteng Sawito	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ANDI PALLAWAGAU	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Agar Lebih Mempermudah Akses Trasportasi Darat	Laleng Bata, Kab. Pinrang	Paleteang	Laleng Bata	270 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ANDI PALLAWAGAU	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Agar Lebih Mempermudah Akses Trasportasi Darat	Laleng Bata, Kab. Pinrang	Paleteang	Laleng Bata	250 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ANDI PALLAWAGAU	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Karena Sering Becek Apabila Musim Hujan	Laleng Bata, Kab. Pinrang	Paleteang	Laleng Bata	500 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ANDI PALLAWAGAU	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Karena Jalannya Berbatu Batu Dan Sering Becek	BTN Carawali, Kab. Pinrang	Paleteang	Benteng Sawito	500 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ANDI PALLAWAGAU	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Karena Jalan Tersebut Salah Satu Jalan Penghubung Dari Salah Satu Jalan Penghubung Dari Daerah Kabupaten Untuk Menjual Hasil Bumi Bangunan Karena Sudah Sering sekali Di usul Keanggota DEwan Yang Lalu Belum Direalisasi	Jalan Poros Batulappa-Lome, Kab. Pinrang	Batu Lappa	Batu Lappa	5000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ANDI PALLAWAGAU	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Karena Jalannya Berbatu Sehingga Butuh Pengerasan Jalan	Jalan Balae, Kab. Pinrang	Paleteang	Benteng Sawito	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
SUPRIADI	GAP	Perindustrian	Pengadaan Mesin Jahit	Kelompok Mesin Jahit Membutuhkan Mesin Jahit	Sikkuledeng, Kab. Pinrang	Cempa	Cempa	00 -	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

SUPRIADI	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Mengalami Pendangkalan dan Mengakibatkan Banjir Sehingga Menggenangi Sekitar 50 Hektar sawah Petani	Bakkoko, Kab. Pinrang	Cempa	Cempa	50 Hektar	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
SUPRIADI	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Mengalami pendangkalan dan mengakibatkan banjir sehingga menggenangi sekitar 50 Hektar sawah petani	Sikkuale, Kab. Pinrang	Cempa	Sikkuale	3000 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
SUPRIADI	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Sekunder	Susahnya air yang di butuhkan oleh petani di daerah tersebut	Sikkuledeng, Kab. Pinrang	Cempa	Sikkuale	1000 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
SUPRIADI	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Mengalami Pendangkalan dan Mengakibatkan Banjir Sehingga Menggenangi Sekitar 50 Hektar sawah Petani	Sikkuale Barat, Kab. Pinrang	Cempa	Sikkuale	1000 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
SUPRIADI	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	Terhambatnya Transportasi Masyarakat dalam Mengangkut hasil Bumi petani	Bakokok, Kab. Pinrang	Cempa	Sikkuale	500 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
SUPRIADI	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Kayu	Menghambat Transportasi utamanya Handraktor dan Combine	Bakoko, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Sikkuale	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
SUPRIADI	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Pendangkalan saluran dan sering mengakibatkan banjir pada saat musim hujan	Sikkuale, Kab. Pinrang	Cempa	Sikkuale	00 -	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
SUPRIADI	GAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Sekunder	Susahnya air yang dibutuhkan oleh petani di Daerah tersebut	Sikkuale, Kab. Pinrang	Cempa	Sikkuale	00 -	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Risda, S.ST	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Akses Jalan sulit dilewati untuk membawa hasil panen ke perkampungan	Jln Tani Kampung Duri, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminas ae	1 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Risda, S.ST	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	Sebagai jembatan penghubung penyebrangan ke jalan Tani agar akses mudah dilalui	Jalan Lemo-lemo (Belakang Rmh Pak Latif) Kampung Duri, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminas ae	5 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Risda, S.ST	Demokrat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Perumahan	Butuh Penerangan di malam hari karena jalan terlalu gelap	Kampung Duri, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminas ae	5 Tiang + Bohlam	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Risda, S.ST	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Meningkatkan akses jalan untuk masyarakat	Kampung Duri, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminas ae	400 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Risda, S.ST	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Melanjutkan Pembuatan Drainase sehingga rampung	Kampung Duri (Depan Rumah Hanaria), Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminas ae	100 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Risda, S.ST	Demokrat	Pertanian	Pengadaan Bibit Tanaman Hortikultura (Bawang merah, cabe, tomat, durian, mangga dll)	Membantu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Kampung Duri, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminas ae	00 Kg	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Risda, S.ST	Demokrat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Drainase Dalam Kawasan Perumahan	Belum adanya drainase hingga air selalu tergenang kalau hujan	Kampung Duri, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminas ae	100 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Risda, S.ST	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Meningkatkan akses jalan untuk masyarakat	Kampung Duri, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminas ae	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Risda, S.ST	Demokrat	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Sebagai penghubung penyebrangan agar akses jalan mudah dilalui	Ambo Alle, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminas ae	15 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Risda, S.ST	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Akses jalan perlu di tingkatkan untuk masyarakat	Kampung Duri, samping rumah Bapak Yuli, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Risda, S.ST	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Untuk memperlancar Transportasi	Jalan Lakadidu, Sulili Barat, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminas ae	1000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Risda, S.ST	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	untuk melanjutkan pengecoran yang sudah ada	sulili Barat, Kab. Pinrang	Paleteang	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Risda, S.ST	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Terbukanya akses jalan untuk mempermudah transportasi	Jalan Tani Lakacici, Sulili Barat, Kab. Pinrang	Paleteang	Mamminasae	800 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Drs. HAMZAH	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Saluran Air tidak lancar dan sering tergenang air pada saat musim hujan	Sengae Desa Mattiro Ade, Kab. Pinrang	Patampanua	Mattiroade	300 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Drs. HAMZAH	Berkarya	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Akses Jalan sulit dilewati kendaraan	Sengae, Kab. Pinrang	Patampanua	Mattiroade	1000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Drs. HAMZAH	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	Agar timbungan yang dikasih tidak jatuh di sawah	Jalan Tani Sassang Leppangan, Kab. Pinrang	Patampanua	Leppangan g	300 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Drs. HAMZAH	Berkarya	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Agar akses jalan mudah dilalui petani untuk membawa hasil panennya	Leppangang. Kelompok Tani CENRANA II, Kab. Pinrang	Patampanua	Leppangan g	1500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Drs. HAMZAH	Berkarya	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Agar akses jalan mudah dilewati transportasi petani	Leppangang, Kab. Pinrang	Patampanua	Leppangan g	1500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Drs. HAMZAH	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Saluran air tidak lancar dan selalu tergenang air pada saat musim hujan	Sengae Selatan, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Mattiroade	150 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Drs. HAMZAH	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	Jalan berlubang sehingga perlu perbaikan	Sengae Selatan, Kab. Pinrang	Patampanua	Mattiroade	150 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Drs. HAMZAH	Berkarya	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Agar akses jalan mudah dilalui sehingga perlu penimbunan jalan usaha tani	Macolli Loloe Desa Mattiro ade, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Mattiroade	1000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Drs. HAMZAH	Berkarya	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Agar memperlancar transportasi petani membawah hasil panennya	Kelompok Tani Macolli Loloe Desa Mattiro Ade, Kab. Pinrang	Patampanua	Mattiroade	1000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Drs. HAMZAH	Berkarya	Pertanian	Pengadaan Pompa Air	Agar tidak terjadi kekeringan sawah ketika musim kemarau	Desa Mattiro Ade, Kab. Pinrang	Patampanua	Mattiroade	5 Unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Drs. HAMZAH	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	Akses Jalan Penghubung ke Lapangan Sepak Bola	Sempangnge, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Mattiroade	12 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Perlu di Rabat beton karena jalannya sering tergenan air dan belum pernah di rabat	Sarempo, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Siparappe	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	jalan tani sebagai akses transportasi perlu di perbaiki	mattiro deceng, Kab. Pinrang	Tiroang	Mattiro Deceng	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	jalan tani sebagai akses transportasi perlu di perbaiki	lingkungan Arassie, Kab. Pinrang	Tiroang	Samaturue	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	salurannya dangkal sehingga airtidak sampai kelahan persawahan masyarakat	Tanjung Jaya Lingkungan Arassie, Kab. Pinrang	Tiroang	Samaturue	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	jalanannya berlubang sehingga tergenang air pada saat musim hujan dan sulit dilewati kendaraan	Jalan Tani Tanjung Jaya Lingkungan Arassie, Kab. Pinrang	Tiroang	Samaturue	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	kondisinya sudah berlubang dan tergenang air sehingga sulit dilewati kendaraan pada saat hujan	Salo, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Salo	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pertanian	Pengadaan Sanggar Tani	Karena tempatnya sudah rusak dan perlu perbaikan	Samaturue, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Tiroang	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	Timbunannya sering longsor Pada saat musim Hujan	Jalan Banroleng Lingkungan Aressie, Kab. Pinrang	Tiroang	Samaturue	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisinya Becek pada saat musim hujan dan tidak bisa dilewati	Jln Mangngaru Lingkungan Aressie, Kab. Pinrang	Tiroang	Samaturue	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalan tompi-tompi merupakan pemukiman yang padat penduduknya sehingga dibutuhkan pengecoran untuk memperlancar aktifitas warga	Lorong 2 Lingkungan aressie, Kab. Pinrang	Tiroang	Samaturue	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Permintaan Masyarakat karena belum pernah dirabat beton	Jalan Mude Lingkungan Arassie, Kab. Pinrang	Tiroang	Samaturue	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	Sambungan Proteksi di lorong 1 Lingkungan Boki Kel. Pammase Kec.Tiroang	Lorong 1 Lingkungan Boki, Kab. Pinrang	Tiroang	Pammase	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Perlu perbaikan dan cor beton karena jalannya sering tergenang air kalau musim hujan	Lorong 13/14 Lingkungan Boki, Kab. Pinrang	Tiroang	Pammase	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	Perlu perbaikan Proteksi jalan di lorong 8 lingkungan boki kecamatan Tiroang	Lorong 8 Lingkungan Boki, Kab. Pinrang	Tiroang	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	Jalannya sering tergenang Air	Lorong Masjid Takwa Lingkungan Arassie, Kab. Pinrang	Tiroang	Samaturue	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	Jalan Boki lacamara Lorong 1 Kelurahan Pammase kecamatan tiroang perlu di proteksi dan di berikan timbunan agar akses jalannya lebih mudah	Lorong 1 Pammase, Kab. Pinrang	Tiroang	Pammase	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Perlu Perbaikan dan cor beton karena sering tergenang air	Jln Sawah Kampung Baru 2, Kab. Pinrang	Tiroang	Mattiro Deceng	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Sering tergenang Air pada saat musim hujan	Jln A. Pawelloi Lorong 22 Lingkungan Boki, Kab. Pinrang	Tiroang	Pammase	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	kondisinya sudah rusak dan sulit di lewati kendaraan	Tiroang, Kab. Pinrang	Tiroang	Pammase	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisinya becek pada saat musim hujan	Kampung Baru, Kab. Pinrang	Tiroang	Tiroang	453 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalannya sudah rusak dan sering tergenang air pada saat musim hujan	Mattiro Deceng, Kab. Pinrang	Tiroang	Mattiro Deceng	500 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalannya Becek Saat Musim Hujan	Mattiro Deceng, Kab. Pinrang	Tiroang	Mattiro Deceng	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalannya Tergenang Air	Kajao, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	45 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Sangat dibutuhkan Pengecoran Untuk Memperlancar Aktifitas Warga	Jl.Kemuning, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	Tidak Ada Akses Ke Jalan Poros Langnga	BTN Pinrang Permai, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	42 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalannya Rusak dan Sering Tergenang Air Pada saat Musim Hujan	BTN Pinrang Permai, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Seluruh Kelurahan/ Desa	77 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tidak Adanya Saluran Air dipemukiman Warga	BTN Pinrang Permai, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	315 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tidak Adanya Saluran Dipemukiman Warga	BTN Pinrang Permai, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalannya Tergenang Air	Jl. Gabus, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalannya Tergenang Air	Jl. Kande, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalannya Tergenang Air	Jl.Pattimura, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tidak Adanya Saluran Dipemukiman Mengakibatkan Keseringan Banjir	Jl. Kesehatan, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Penrang	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	Tidak Adanya Akses Jalan	Jl. Kemuning, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tidak Ada Saluran Air	Jl. Kande, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Tidak Adanya Akses Jalan	Jl. Langga, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pipanya Bocor	Jl. Kesehatan, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Tergenang Air	Jl. Langga, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Tergenang Air	Jl. Kande, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan MCK	Fasilitas MCK	Penrang, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten	Kurangnya Fasilitas (TPS3R Penrang Lestari)	Penrang, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pertanian	Pengadaan Bibit Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Porang dll)	Kurangnya Stok Bibit	Penrang, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Penrang	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Karena Banyaknya Fasilitas Yang Rusak	Penrang, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	00 -	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Air Meluap Kejalan	BTN Pinrang Permain, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Penrang	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Masyarakat meminta pembuatan Drainase Saluran Air	Lorong 2 Jln Boki Lacemara Lingkungan Boki, Kab. Pinrang	Tiroang	Pammase	00 -	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Tergenangnya Air	Jl. Baronang, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Tergenangnya Air	Jl. Baronang, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hj. RATNA ARIFIN	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Tergenangnya Air	Jl. Baronang, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Penrang	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondis jalannya sangat sulit dilewati kendaraan pada saat musim panen	Jalan Tani Rajang Balla Desa Benteng Paremba, Kab. Pinrang	Lembang	Benteng Paremba	1.5 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan Gantung	Jembatan sudah rusak parah dan sulit dilewati kendaraan	Salu Karedu Desa Lembang mesakada, Kab. Pinrang	Lembang	Lembang Mesakada	11 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Sulitnya akses jalan untuk mengangkut hasil panen	Silawa Desa Suppirang, Kab. Pinrang	Lembang	Suppirang	8 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Akses jalan sulit dilewati kendaraan pada saat musim panen	Jalan Tani Sitodo Desa Suppirang, Kab. Pinrang	Lembang	Suppirang	700 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Sulitnya Petani untuk mengangkut hasil panen tanpa akses jalan transportasi	Jalan Tani Silu Desa Sali-Sali, Kab. Pinrang	Lembang	Sali Sali	500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalanan masih tanah dan selalu becek pada saat musim hujan	Tekkoang Desa Lembang Mesakada, Kab. Pinrang	Lembang	Lembang Mesakada	500 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi jalan sulit dilewati untuk membawah hasil panen pada saat musim hujan	Jalan Tani Sarangdungo, Kab. Pinrang	Lembang	Lembang Mesakada	400 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Agar Akses jalan lebih mudah dilalui petani untuk membawah hasil panen	Salukanan, Kab. Pinrang	Lembang	Lembang Mesakada	7 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Agar mempermudah akses jalan untuk membawah hasil panen	Kalosi Kelurahan Tadokkong, Kab. Pinrang	Lembang	Taddokong	4 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Agar akses mudah dilewati kendaraan roda dua untuk membawah hasil panen	Lemosusu, Kab. Pinrang	Lembang	Betteng	5 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Agar mempermudah akses jalan untuk membawah hasil panen	Pamulungan, Kab. Pinrang	Lembang	Betteng	6 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Memper mudah akses jalan transportasi masyarakat	Jalan Tani Pangala Desa Lembang mesakada, Kab. Pinrang	Lembang	Lembang Mesakada	500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Agar memperlancar akses jalan petani untuk membawah hasil panen	Jalan Tani Patambia, Kab. Pinrang	Lembang	Betteng	500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Perindustrian	Pengadaan Alat - alat Pertukangan	Kurangnya alat atau fasilitas pertukangan	Desa Sali - Sali Suppirang, Kab. Pinrang	Lembang	Suppirang	6 Unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Perindustrian	Pengadaan Mesin Perbengkelan	Kurangnya mesin atau alat perbengkelan	Desa Lembang Mesakada. Sali-Sali suppirang, Kab. Pinrang	Lembang	Lembang Mesakada	6 Unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pengadaan Bibit Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Porang dll)	Kurangnya persediaan bibit porang karena belum terdistribusi secara maksimal	Desa Lembang Mesakada Sali - Sali Suppirang, Kab. Pinrang	Lembang	Suppirang	100 Kg	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi jalan sulit dilewati kendaraan untuk membawa hasil panen	Pasang Lambe Desa Lembang Mesakada, Kab. Pinrang	Lembang	Suppirang	2 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Sulitnya akses jalan menuju lahan pertanian	Desa Sali - Sali, Kab. Pinrang	Lembang	Lembang Mesakada	1.5 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Sulitnya akses jalan menuju lahan pertanian	Suppirang, Kab. Pinrang	Lembang	Suppirang	1 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi jalan yang belum memadai menuju perkampungan	Perkampungan muallaf desa lembang mesakada, Kab. Pinrang	Lembang	Lembang Mesakada	500 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi/Restorasi Sungai	Agar tidak terjadi longsor di tepi sungai	Kelurahan Tadokkong, Kab. Pinrang	Lembang	Taddokong	25 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan Dam Parit	Agar Produksi padi meningkat dan dapat asupan air irigasi yang cukup melimpah	Sali - Sali Desa Lembang Mesakada, Kab. Pinrang	Lembang	Sali Sali	6 Unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Duikker	Untuk mengaliri air hujan kealiran sungai	Dusun Bau, Kab. Pinrang	Lembang	Suppirang	3 Unit	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Duikker	Sebagai Penghubung pembuangan air menuju ke aliran sungai	Dusun Sabura, Kab. Pinrang	Lembang	Sali Sali	3 Unit	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Agar memperlancar Penyaluran air untuk menunjang hasil pertanian	Pasang Lambe, Kab. Pinrang	Lembang	Lembang Mesakada	2 Unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Duikker	sebagai penghubung pembuangan air menuju ke aliran sungai	Desa Lembang Mesakada, Kab. Pinrang	Lembang	Lembang Mesakada	3 Unit	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Agar aliran air lancar untuk menunjang hasil pertanian	Desa Suppirang, Kab. Pinrang	Lembang	Suppirang	500 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan MCK	Sebagai Fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat	Tadokkong, Kab. Pinrang	Lembang	Taddokong	2 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Markus Manna	Demokrat	Pertanian	Pengadaan Bibit Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Porang dll)	-	Sali - Sali Desa Lembang Mesakada, Kab. Pinrang	Lembang	Suppirang	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hitler	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalannya Rusak dan Becek Jika Musim Hujan Dan Jalan Berdebu Jika Musim Kemarau	Madallo, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Siparappe	64 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hitler	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalannya Rusak dan Becek Jika Musim Hujan Berdebu Jika Musim Kemarau	Madallo, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	129 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hitler	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Menghambat TransportasiPengangkutan Gabah Petani	Madallo, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Siparappe	1300 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hitler	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jalan dan Kampungsekitar sering Tergenang Air	Madallo, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Siparappe	300 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Hitler	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jalan dan Kampung Sekitar Sering Tergenang Air	Bua - Bua, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Siparappe	300 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Hitler	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Perkampungan Sering Terendam Air dan Mengikis Pinggiran Batas Jalan	Madallo, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Siparappe	600 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Hitler	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Menghambat Transp[ortasi Pengangkutan Gabah Petani	Madallo, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Siparappe	1000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Hitler	Demokrat	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Menghambat Transportasi Pengangkutan Gabah Petani	Madallo, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	1000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hitler	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalan Rusak dan Becek Jika Musim Hujan dan Berdebu Jika Musim Kemarau	Madallo, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Siparappe	129 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hitler	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Perkampungan Sering Terendan Air Dan Mengikis Pinggir Batas Beton	Madallo, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Siparappe	601 -	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Hitler	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalannya Rusak Jika Musim Hujan Jalan Tersebut Becek dan Jika Musim Kemarau Jalan Tersebut Sangat Berdebu	Jl. Bintang Depan Polres Samping Alfamidi, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Maccoralai e	150 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hitler	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Sering Banjir Saat Musim Hujan	Jl. Bintang Depan Polres Samping Alfamidi, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Maccoralai e	150 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hitler	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalannya Rusak dan Becek Jika Musim Hujan dan Berdebu Jika Musim Kemarau	Madallo, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Siparappe	128 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Syukur	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	-	Dolangan, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Makkawaru	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Syukur	PPP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	-	Dolangan, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Makkawaru	150 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Syukur	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	-	Dolangan, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Makkawaru	150 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Syukur	PPP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	-	Dolangan, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Makkawaru	1000 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Syukur	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	-	Dolangan, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Makkawaru	150 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Syukur	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Susanya Masyarakat untuk mendapatkan air bersih	Dolongan, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	3 titik	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Syukur	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	-	Bompatue, Kab. Pinrang	Suppa	Tellumpanu a	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Syukur	PPP	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	-	Dolongan, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Makkawaru	100 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Syukur	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan Gantung	Kondisinya sudah rusak	Mallongi- Longi, Kab. Pinrang	Lansirang	Seluruh Kelurahan/ Desa	300 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Syukur	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	-	Dolongan, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Makkawaru	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Syukur	PPP	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	-	Lalle, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Padakkalaw a	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Syukur	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalan Penghubung Kariango ke dolongan, jalanannya masih tanah dan berlumpur ketika hujan	Kariango - Dolongan, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Makkawaru	7 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Syukur	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan Gantung	Jembatan penghubung sudah roboh sehingga perlu adanya perbaikan	Mallongi-longi, Kab. Pinrang	Lansirang	Mallongi-longi	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Syukur	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Gantung	-	Makkawaru, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Makkawaru	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Syukur	PPP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	-	Dolongan, Kab. Pinrang	Mattiro Bulu	Makkawaru	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Drs.H. MASJHUR ALI, MM	PDIP	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Perumahan	Kurangnya penerangan Jalan	Lingkungan 1, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Sawito	100 buah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Drs.H. MASJHUR ALI, MM	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Karena Jalannya Sudah rusak	Kampung Baru, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Seluruh Kelurahan/ Desa	700 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Drs.H. MASJHUR ALI, MM	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	-	Kampung Baru, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Seluruh Kelurahan/ Desa	6 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Drs.H. MASJHUR ALI, MM	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	-	Mattiro Deceng, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Seluruh Kelurahan/ Desa	2000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Drs.H. MASJHUR ALI, MM	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	-	Kaboe, Kab. Pinrang	Tiroang	Seluruh Kelurahan/ Desa	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Drs.H. MASJHUR ALI, MM	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Karena setiap musim hujan selalu tergenang air mengakibatkan jalan becek	Alecalimpo, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	150 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Drs.H. MASJHUR ALI, MM	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Karena Setiap Musim Hujan Selalu Tergenang Air Mengakibatkan Jalanan Becek	Jl. Lamare, Allacalimpo Barat, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
AHMAD JAYA BARAMULI	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Karena kondisi jalan rusak dan becek pada saat hujan.	Dusun Lome, Kab. Pinrang	Duampanua	Massewae	1300 meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
AHMAD JAYA BARAMULI	Berkarya	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi becek ketika hujan dan tidak bisa dilalui. Serta tungginya biaya lansir untuk para petani, baik pengantaran pupuk ataupun di masa panen.	Desa Massewae, Kab. Pinrang	Duampanua	Massewae	800 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
AHMAD JAYA BARAMULI	Berkarya	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Sekolah	Kondisi sekolah yang tidak memiliki pagar akan ,mengganggu keamanan dan kenyamanan murid dan guru pada saat proses belajar mengajar berlangsung dan di belakang sekolah ada sungai.	Dusun Bakkoko, Kab. Pinrang	Cempa	Sikkuale	80 meter	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

AHMAD JAYA BARAMULI	Berkarya	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Agar meningkatkan kondisi jalan lebih baik dan tidak mudah longsor sehingga saat musim panen dan penanaman, kendaraan pengangkut pupuk dan hasil panen bisa masuk sekitar area pertanian agar petani dapat menghemat biaya angkut Dusun bakkoko.	Dusun Bakkoko, Kab. Pinrang	Cempa	Sikkuale	500 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
AHMAD JAYA BARAMULI	Berkarya	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Agar meningkatkan kondisi jalan lebih baik dan tidak mudah longsor sehingga saat musim panen dan penanaman, kendaraan pengangkut pupuk dan hasil panen bisa masuk sekitar area pertanian agar petani dapat menghemat biaya angkut Dusun Sikkuale.	Dusun Sikkuale, Kab. Pinrang	Cempa	Sikkuale	500 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
AHMAD JAYA BARAMULI	Berkarya	Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kurangnya debit air yang mengaliri persawahan di dusun Kaluppang	dusun KALUPPANG, Kab. Pinrang	Duampanua	Massewae	500 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
AHMAD JAYA BARAMULI	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Menghubungkan antara dua desa, yaitu desa Salipolo dengan desa Tadampalie.	Desa Salipolo, Kab. Pinrang	Cempa	Salipolo	2 km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
AHMAD JAYA BARAMULI	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	menghubungkan antara dua dusun, yaitu dusun Tanah cicca dengan dusun Salipolo	desa Salipolo, Kab. Pinrang	Cempa	Salipolo	2 km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

AHMAD JAYA BARAMULI	Berkarya	Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	saluran tersebut sudah dangkal dan sempit , sehingga air tidak mengalir sampai ke ujung, dan para petani tidak mendapatkan air untuk sawah.	dusun Bakkoko, Kab. Pinrang	Cempa	Sikkuale	300 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
AHMAD JAYA BARAMULI	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	jalanannya sudah rusak, dan jalan ini akses untuk membawa hasil perkebunan masyarakat dusun Bakkoko	dusun Bakkoko, Kab. Pinrang	Cempa	Sikkuale	3 km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
AHMAD JAYA BARAMULI	Berkarya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Pembuang	Kondisi saluran pembuang yang dangkal menyebabkan banjir dikala musim hujan.	Dusun Bakkoko, Kab. Pinrang	Cempa	Sikkuale	2000 meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
Hastan Mattanete,ST,MP	Golkar	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan Tani Sudah Rusak Parah dan Becek Saat Musim Hujan	Patobong, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Patobong	1 km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hastan Mattanete,ST,MP	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan Gantung	Sudah Rusak	Patobong, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Patobong	20 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hastan Mattanete,ST,MP	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kondisi Jalan Rusak Berlubang Lubang	Patobong, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Patobong	1 km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hastan Mattanete,ST,MP	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kondisi Sudah Dangkal dan Banjir Saat Musim Hujan	Bonne -Bonne, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Mattongan g Tongang	500 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Hastan Mattanete,ST,MP	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Gantung	Menghubungkan antara Kampung Baru-Baru Ke Wakka Kec. Cempa	Mattirotsi, Kab. Pinrang	Matirro Sompe	Mattirotsi	25 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Hastan Mattanete,ST,MP	Golkar	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Ada Lahan Sekitar Kurang Lebih 60 Hektar Akan Terjadi Kerusakan Jika Tidak di Bangunkan Jembatan	Samaulue, Kab. Pinrang	Lansirang	Samaulue	6 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Hastan Mattanete,ST,MP	Golkar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Kelanjutan Jalan Beton Karena Sudah Rusak Parah, Berlubang Lubang dan Sering Terjadi Kecelakaan	Jalan Poros Pinrang jampue, Kab. Pinrang	Lansirang	Seluruh Kelurahan/ Desa	10 km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

Hastan Mattanete,ST,MP	Golkar	Pertanian	Pengadaan Pompa Air	Kurang Lebih 60 Hektar Sawah Tidak Terairi Kelompok Tani Desa Mallongi Longi Membutuhkan Mesin Pompa Untuk Kelancaran Pertanian	Samaulue, Kab. Pinrang	Lansirang	Samaulue	2 unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
H. Nasrun Paturusi	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan Beton	Jembatan Sudah rusak	Takkalalla, Kab. Pinrang	Patampanua	Tonyamang	20 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Nasrun Paturusi	Demokrat	Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Susahnya Sawah Diairi Dari Hulu Sampai Hilir	Macinnae, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Tonyamang	85 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
H. Nasrun Paturusi	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	Untuk Menghubungkan Antara Dua Desa	Tonyamang, Kab. Pinrang	Patampanua	Tonyamang	20 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Nasrun Paturusi	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan	Jalannya Rusak	Padang Loang, Kab. Pinrang	Patampanua	Padangloan g	20 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Nasrun Paturusi	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Karena Sering Tergenang Air Pada Musim hujan	Dusun Parita, Kab. Pinrang	Patampanua	Leppangan g	180 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Nasrun Paturusi	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder	Karena Sering Tersumbat Saat Musim Hujan Di Tiga Titik	Palirang, Kab. Pinrang	Patampanua	Tonyamang	2 Km	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
H. Nasrun Paturusi	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Lanjutan Pembuatan Rabat Beton	Jl. Pendidikan Palirang, Kab. Pinrang	Patampanua	Tonyamang	225 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Nasrun Paturusi	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Beton	Diatas Saluran sekunder Paleteang Klp. Tani Pammase Dewata, Kelp. Tani Samaenre	Takkalalla Barat, Kab. Pinrang	Patampanua	Tonyamang	4 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Nasrun Paturusi	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Karena Jalannya Sudah Rusak	Maccubbu, Kab. Pinrang	Patampanua	Tonyamang	250 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
H. Nasrun Paturusi	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Sering Banjir Pada Saat Musim Hujan	Paliran, Kab. Pinrang	Patampanua	Tonyamang	110 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalan Mudah Rusak	Jl.Pendidikan, Kab. Pinrang	Tiroang	Marawi	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani	Sering Digenangi Air Ketika Banjir	Jl.Pacco, Kab. Pinrang	Tiroang	Marawi	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalan Mudah Rusak	Jl. Mude, Kab. Pinrang	Tiroang	Marawi	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Kesehatan	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kurangnya Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Kelurahan Marawi	Jl. Pustu Kelurahan, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Marawi	00 -	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Penyumbatan Saluran Air	Jl. H. Baddu, Kab. Pinrang	Tiroang	Seluruh Kelurahan/ Desa	100 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Tanah Mudah runtuh	Jl. H. Baddu, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Tiroang	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalan Mudah Rusak	Jl. Laummarang, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Marawi	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalan Mudah rusak	Jl. Laoso, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan	Tanah Mudah runtuh	Jl. Kuburan, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Marawi	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalan Mudah rusak	Jl. Mappagiling, Kab. Pinrang	Tiroang	Marawi	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Penyumbatan Saluran Air	Jl. Libukang, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Pakkie	100 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	Jalan Mudah Rusak	Jl. Libukang, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Perindustrian	Pengadaan Oven	Kurang Mampu Memiliki Alat Bikin Kue Seperti Ini	Jl. Pendidikan, Kab. Pinrang	Tiroang	Marawi	1 Unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Perindustrian	Pengadaan Oven	Kurang Mampu Memiliki Alat Bikin Kue Seperti ini	Jl. Mude, Kab. Pinrang	Tiroang	Marawi	1 Unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pertanian	Pengadaan Bibit Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Porang dll)	Banyak Lahan Kosong Yang Dapat Dimamfaatkan	Jl. Mude, Kab. Pinrang	Tiroang	Marawi	00 -	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Penyumbatan Saluran air	Jl. Lajale, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Jaya	50 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Penyumbatan Saluran air	Jl. Lajale, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Jaya	100 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Tanah mudah runtuh	Lorong 3, Kab. Pinrang	Tiroang	Tiroang	100 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Penyumbatan Saluran Air	Jl. Libukang, Kab. Pinrang	Tiroang	Pakkie	100 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Penyumbatan Saluran Air	Jl. Lajale, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Jaya	50 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Saluran Air tidak lancar	Jl. Lajale, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Jaya	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Duikker	Perbaikan Duiker Jalan guna penyebrangan masyarakat	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Jaya	1 Unit	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalan masih tanah dan mudah rusak	Jl. Laoso, Kab. Pinrang	Tiroang	Marawi	100 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Jalan mudah runtuh	Jalan Kuburan, Kab. Pinrang	Tiroang	Marawi	100 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Tanah mudah runtuh dan sering banjir pada saat musim hujan	Jl. H. Baddu, Kab. Pinrang	Tiroang	Marawi	100 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Jalan masih tanah dan mudah rusak	Jl. Taggiling, Kab. Pinrang	Tiroang	Marawi	100 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Jalan mudah runtuh dan banjir saat musim hujan	Jl. H. A. Mappetanna, Kab. Pinrang	Tiroang	Marawi	300 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
SARIANSA BIN MAPETANI	PKB	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Akses jalan sulit di lewati transportasi petani untuk membawa hasil panennya	JL. Lakebbong, Kab. Pinrang	Tiroang	Marawi	100 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Sulit Membawa hasil bumi turun dari kebun	Benteng, Kab. Pinrang	Lembang	Seluruh Kelurahan/ Desa	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Banyak hasil bumi terisolir karena tidak ada JUT	Tadokkong, Kab. Pinrang	Lembang	Taddokong	3 km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Melihat jalannya yang begitu terjal dan sangat licin pada saat musim hujan dan jalan ini adalah jalan utama Desa Sali-sali, Suppirang dan Mesa Kada	Sali-Sali, Kab. Pinrang	Lembang	Sali Sali	5 km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalannya Sangat Licin sehingga Masyarakat Membutuhkan Rabat beton	Pangaparang, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Pangaparang	2 km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Warga merasa sulit membawa hasil kebun	benteng paremba, Kab. Pinrang	Lembang	Betteng	2 km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

ABD. HALIM	PKB	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Tidak ada akses untuk membawa hasil bumi	Karoja, Kab. Pinrang	Lembang	Sabbang Paru	2 km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan MCK	Kurangnya jembatan keluarga sehingga perlu adanya MCK	Tondo, Kab. Pinrang	Lembang	Sali Sali	2 buah	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipa di Kawasan Perdesaan	Susahnya untuk mendapatkan Air Bersih	Dusun Kandoka Desa Benteng Paremba, Kab. Pinrang	Lembang	Benteng Paremba	2.5 km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder	Air yang mengalir tidak tepat sasaran karena saluran banyak yang rusak	Dusun Indo Apping, Kab. Pinrang	Lembang	Benteng Paremba	500 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Tidak ada akses untuk membawa hasil bumi	Kampung Karajo, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Sabbang Paru	2 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Sekunder	Air Tidak mengalir dengan sempurna pada saat musim hujan	Dusun Pajalele, Kab. Pinrang	Lembang	Binanga Karaeng	4000 Meter	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Masyarakat membutuhkan Rabat Beton karena setiap hujan selalu banjir dan licin	Dusun Pajalele - Dusun Salopi, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Binanga Karaeng	3000 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Padatnya Rumah yang ada di Dusun Lombo sehingga perlu adanya perluasan perkampungan	Dusun Lombo, Kab. Pinrang	Lembang	Benteng Paremba	00 -	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jalan	Masih banyaknya Jalan Desa Benteng paremba yang belum di proteksi yang menghubungkanb Desa Sali-sali	Desa Benteng Paremba, Kab. Pinrang	Lembang	Benteng Paremba	3 Km	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Akses jalan sangat sulit untuk mengangkut Hasil Panen	Dusun Indo Apping, Kab. Pinrang	Lembang	Benteng Paremba	1.5 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder	Sebagian Saluran sudah rusak sehingga Air mengalir tidak tepat sasaran	Dusun Indo Apping, Kab. Pinrang	Lembang	Benteng Paremba	1 Km	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Usulan disetujui

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

ABD. HALIM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Pada saat musim hujan jalanan licin dan berbatu sehingga perlu dirabat	Rasse Dusun Indo Apping, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Benteng Paremba	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Perumahan	Pada saat malam hari sebagian jalan di desa Benteng Paremba	Desa Benteng Paremba, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	20 Titik	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pertanian	Pembangunan (Perintisan/Peningkatan) Jalan Usaha Tani	Perlu adanya JUT untuk mempermudah pengangkutan hasil Kebun / Sawah	Dusun Lombo, Kab. Pinrang	Lembang	Benteng Paremba	1.5 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Gantung	Masyarakat susah untuk menyebrang ketika banjir	Dusun Rajang Balla, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Benteng Paremba	1 Unit	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
ABD. HALIM	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Akses Jalan Dusun Lombo yang berlubang dan licin ketika musim hujan	Dusun Lombo, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Benteng Paremba	500 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Muh Syahrul Sarman	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Disisi Kanan Jalan relevansi pembuangan air tidak sesuai dengan volume pembuangan air, dan sisi kiri jalan terjadi sedimentasi sehingga harus di buatkan saluran pembuang utama.	Lingkungan Salo, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Salo	200 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Muh Syahrul Sarman	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalanan masih tanah sehingga akses perlu ditingkatkan	Lingkungan Rubae, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Bentengng e	200 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui
Muh Syahrul Sarman	Demokrat	Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Agar Aliran Air Lancar ke sawah untuk memaksimalkan hasil pertanian	Klp Tani Pammase Puang, Lingkungan Ulutedong, Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Maccoralai e	200 Meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan disetujui
Muh Syahrul Sarman	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Agar tidak terjadi genangan air di jalan ketika musim hujan	Lingkungan Ulutedong, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Maccoralai e	800 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Usulan disetujui
Muh Syahrul Sarman	Demokrat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rabat Beton	Jalan masih tanah dan berlumpur, sering banjir ketika hujan sehingga perlu dirabat beton	Lingkungan Ulutedong, Kab. Pinrang	Watang Sawito	Maccoralai e	800 Meter	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan disetujui

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menunjukkan kapasitas riil kemampuan kemampuan keuangan daerah untuk alokasi belanja langsung program pembangunan daerah, baik berupa program pembangunan daerah maupun berupa program perangkat daerah.

Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah pada Bab III disajikan bahwa pendapatan daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1.397.546.488.922,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 146.346.122.796,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1. 194.939.922.126,00 dan Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 56.260.444.000,00. Pendapatan Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2022.

Tabel 5.1
Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2022

No	Uraian	Proyeksi (Rp)
		2022
5	Belanja Daerah	1.432.546.488.922
5.1	Belanja Operasi	1.000.106.024.937
5.1.1	Belanja Pegawai	611.811.334.752,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	285.428.505.760,00
5.1.3	Belanja Bunga	0
5.1.4	Belanja Subsidi	0
5.1.5	Belanja Hibah	100.198.181.501,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.668.002.924,00
5.2	Belanja Modal	280.399.168.585,00
	Belanja Modal	280.399.168.585,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	142.041.295.400
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.979.615.000,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	140.061.680.400,00

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Pinrang tahun 2022 dirumuskan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan propinsi Sulawesi Selatan.

Tema pembangunan Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 telah diselaraskan dengan Isu Strategis Kabupaten Pinrang, sehingga tema pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2022 adalah **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi Serta Penanganan Dampak Pandemi Covid 19”**.



Berdasarkan tema pembangunan tersebut maka disusun prioritas daerah yang terdiri atas 6 prioritas.

Prioritas pertama Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan terdiri atas 4 sasaran dan 14 Program Prioritas; Prioritas kedua Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemenuhan pelayanan dasar terdiri atas 1 sasaran dan 6 Program Prioritas; Prioritas ketiga Pemanfaatan potensi sumber ekonomi secara optimal dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca COVID 19 terdiri atas 3 sasaran dan 8 Program Prioritas; Prioritas keempat Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana terdiri atas 2 sasaran dan 7 Program Prioritas; Prioritas kelima Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata kelola Pemerintahan guna mewujudkan Good Governance terdiri atas 2 sasaran dan 9 Program Prioritas serta Prioritas keenam Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan terdiri atas 1 sasaran dan 2 Program Prioritas.

Tabel V.2
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Propinsi	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6	
1	Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.243.645.176	
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.415.159.045	
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.373.000.000	
				Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.270.000.000	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	900.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	58.867.000.000	
				persentase kebutuhan layanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terpenuhi	Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang	15.120.952.027	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	2.540.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	100.000.000	

		Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase terlestariannya cagar budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.400.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	911.936.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	31.000.000	
		Meningkatnya lapangan kerja/usaha	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	278.000.000	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	53.305.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	77.780.000	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	Dinas Sosial	224.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat ber-SNI	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	1.242.059.000	

2	Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemenuhan pelayanan dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	29.775.035.036	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	7.244.397.987	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	5.700.179.176	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	9.960.122.993	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	70.426.174.535	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	3.395.000.000	
3	Pemanfaatan potensi sumber ekonomi secara optimal dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca COVID 19	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume produksi perikanan tangkap	Dinas Perikanan	2.210.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Dinas Perikanan	3.685.000.000	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi	Dinas Perikanan	850.000.000	

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian tanaman Holtikultura utama (cabe) per tahun (ton)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.700.000.000	
				Persentase Peningkatan Produksi dan Daya Saing Komoditas Peternakan dan Perkebunan per tahun	Dinas Peternakan dan Perkebunan	1.280.520.900	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama (padi) per hektar per tahun (ton/ha)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	31.628.099.998	
				Persentase Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Komoditas Peternakan dan Perkebunan per tahun	Dinas Peternakan dan Perkebunan	50.000.000	
		Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok penerima bantuan (%)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.600.000.000	
		Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan	380.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Dinas Ketahanan Pangan	1.225.000.000	
4	Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	1.620.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan KEHATI	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	100.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan di wilayah Kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	7.470.000.000	

		Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.253.900.000	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	203.000.000	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	270.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	35.000.000	
5	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata kelola Pemerintahan guna mewujudkan Good Governance	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Inspektorat	5.004.783.700	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan SOP	Inspektorat	478.190.000	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.218.364.500	
				Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis Kompetensi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	Bappelitbangda	875.352.000	
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang memanfaatkan E - Government	komunikasi, Informatika dan Persandian	3.423.780.000	

		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang terdaftar dalam database	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.464.151.900	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	161.229.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	195.560.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	225.000.000	
6	Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.491.345.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase ketercapaian peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	380.000.000	

5.3 Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Perumusan Rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis, tersusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam beberapa Urusan dan Unsur pemerintahan antara lain 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, dan urusan Bidang sosial. Untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ada 18 (delapan Belas) urusan antara lain Urusan Pemerintahan Bidang tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan, pertanian, lingkungan hidup, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari 8 (Delapan) urusan antara lain Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi, disamping urusan tersebut berdasarkan permendagri 90 Tahun 2019 ditambah dengan 5 (lima) unsur antara lain Unsur Pendukung urusan pemerintahan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 6 (Enam) unsur yaitu Perencanaan, keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengelolaan Perbatasan dan Pengelolaan Penghubung. Untuk unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan adalah Inspektorat Daerah, serta Unsur pemerintahan umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan dalam rangka memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal. Secara rinci rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 5.3

INDIKASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 -2023

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana		Target Kinerja		Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)
					GRANDTOTAL			1.432.546.488.922						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			849.047.322.747						
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			401.189.086.132						
1	01	1			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			401.189.086.132					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN spm prioritas	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	50.415.159.045					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5.243.645.176					
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	22.373.000.000					
						Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5.270.000.000					
01	02	2,01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Jumlah SD Yang terakreditasi minimal B	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.39 Persen	50.415.159.045					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2,01	02		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Ruang	1.400.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2,01	03		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/Kepala Sekolah/ TU yang dibangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Ruang	215.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2,01	05		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Ruang	600.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2,01	06		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana utilitas sekolah yang dibangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 sekolah	1.350.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2,01	08		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas SD yang direhabilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Sekolah	9.800.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2,01	11		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhabilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Sekolah	450.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2,01	12		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana, utilitas sekolah yang direhabilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Sekolah	400.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2,01	13		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru yang diperbaiki	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 sekolah	400.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

01	02	2.01	14		Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah mebel sekolah yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 sekolah	300.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.01	16		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan sekolah yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 Paket	450.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.01	21		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19000 Orang	300.000.000			2.000.000.000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kali	102.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.01	24		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya Bimtek SPMI Sekolah Dasar	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kali	275.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.01	25		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta lomba O2SN, FLS2N Tingkat SD sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 Orang	325.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.01	26		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya laporan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidik Dasar	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	101.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.01	27		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru yang mengikuti Lomba berprestasi dan OGN	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Orang	200.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.01	28		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya sosialisasi akreditasi SD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kali	1.500.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah penyaluran BOS (Bantuan Operasional sekolah) sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	320 Sekolah	31.899.159.045					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.01	30		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	terlaksananya sosialisasi penerima dana BOS	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kali	348.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Jumlah SMP Yang terakreditasi minimal B	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73.68 Persen	22.373.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	05		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Ruang	200.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	06		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dibangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 sekolah	1.300.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	12		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 sekolah	526.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	14		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 sekolah	1.500.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	15		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru yang direhabilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 sekolah	270.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	17		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhabilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Sekolah	400.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

01	02	2.02	18		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium sekolah yang direhabilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Sekolah	400.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	24		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah rehabilitasi sedang/berat utilitas sekolah sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Sekolah	400.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	25		Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah mebel yang tersedia	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 sekolah	400.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	27		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pengadaan Media Pendidikan dan perlengkapan sekolah lainnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 sekolah	800.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	32		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (PIP)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6500 Orang	200.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	36		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kali	150.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	37		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Bimtek SPMI	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kali	250.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	38		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta lomba O2SN, FLS2N, Gala Siswa Tingkat SMP sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 Siswa	300.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	39		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya laporan Rasio guru/murid sekolah Menengah Pertama	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	40		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang mengikuti OGN dan Lomba berprestasi lainnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 orang	172.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	41		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya sosialisasi akreditasi SMP	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kali	205.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.02	42		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penyaluran BOS (Bantuan Operasional sekolah) sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59 Sekolah	14.800.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.03			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya PAUD Yang terakreditasi		90 Persen	5.243.645.176					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.03	01		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Bangunan ruang kelas yang tersedia	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 sekolah	400.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.03	02		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah area bermain yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 sekolah	156.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.03	03		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas/ruang guru yang diperbaiki	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 sekolah	100.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.03	12		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah pengadaan alat peraga edukatif dalam ruangan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 sekolah	300.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.03	16		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Terlaksana kegiatan pengembangan karir guru PAUD dan Jambore PAUD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kali	87.645.176					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

01	02	2.03	17		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksana kegiatan pelatihan manajemen PAUD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kali	100.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.03	18		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah penyaluran BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 sekolah	4.100.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.04			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) 15-24		100 Persen	5.270.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.04	11		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik yang disalurkan ke kelompok	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	200.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.04	13		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantuan Biaya Pendidikan (Beasiswa) untuk mahasiswa yang tersalurkan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 orang	800.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.04	16		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya pendampingan, pelatihan dan pembinaan kelompok pendidikan non formal	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kali	110.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	02	2.04	17		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penyaluran BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) Kesetaraan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Lembaga	4.160.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	04				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik		50 %	900.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	04	2.01			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Tenaga Kependidikan yang lulus pelatihan untuk bidang tugasnya		85 Persen	900.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	04	2.01	01		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik yang melaksanakan sertifikasi diklat calon kepala sekolah dan pengawas sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Orang	800.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	04	2.01	02		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	100.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	316.987.281.911					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu		100 %	472.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja & Renstra yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	64.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-OPD yang tersedia		1 Dokumen	26.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	12.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	12.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	13.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJP, LPPD, SPIP, Perjanjian Kinerja dan SPM yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	113.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra, DAPODIK yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	232.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan		97 Persen	313.433.281.911					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	312.289.281.911					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	234.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terbayarkan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	850.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	30.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan SKPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	30.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya barang milik daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang tersusun tepat waktu		100 Persen	69.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	69.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik		100 Persen	525.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian olahraga aparatur	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Pasang	58.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya administrasi kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	40.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya penilaian DUPAK pegawai	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	227.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Orang	200.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		100 Persen	672.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik kantor	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

01	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		160.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		360.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi		100 Persen	850.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas motor	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	60.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	200.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	300.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.07	08		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	100 Persen	190.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Persentase kebutuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100 Persen	375.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening layanan telepon, air, listrik dan internet terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Rekening	250.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pembersih yang terbayarkan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	125.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100 Persen	591.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan terbayarkan Pajak Kendaraan Dinas 1 Unit	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	131.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Unit	20.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2.09	08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pemeliharaan aset tak berwujud sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Buah	20.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

01	01	2,09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehab kantor dinas	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Gedung	400.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01	01	2,09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 set	20.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				271.737.731.145					
1	02	1			DINAS KESEHATAN			Rp	164.001.155.921					DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kebutuhan layanan kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat yang terpenuhi		100%	58.867.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya tata kelola pelayanan kesehatan yang baik		100%	22.010.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	02	Pembangunan Puskesmas	terlaksanananya pembangunan Puskesmas	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	2.500.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya fasilitas kesehatan lainnya		2 unit	100.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	350.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	06	Pengembangan Puskesmas	Fasilitas Puskesmas Terpenuhi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 unit	5.000.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Fasilitas kesehatan lainnya terpenuhi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	230.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terpeliharanya fasilitas Puskesmas	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	1.500.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpeliharanya fasilitas kesehatan lainnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	500.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terpeliharanya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	250.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	150.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatann	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	50.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan dan Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	5.000.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Alat kesehatan berfungsi dengan baik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	100.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya obat dan vaksin	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	4.000.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya bahan habis pakai	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	2.000.000.000					DINAS KESEHATAN

1	02	02	2,01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Sarana Fasilitas pelayanan Kesehatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	100.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana dan Pendukung Fasilitas pelayanan Kesehatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	100.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan dan Alat Penunjang medik fasilitas p	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	80.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan			36.577.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	670.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	1.100.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	150.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	750.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	650.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	90.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	170.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	75.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	35.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	100.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	110.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Terinfeksi HIV	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	50.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	200.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	900.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	300.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	500.000.000					DINAS KESEHATAN

1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terselenggaranya Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	1.300.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	65.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	1.320.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	25.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	25.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Khusus	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	72.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	90.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	27.000.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Terselenggaranya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	20.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	150.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Terselenggaranya Penelitian Kesehatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	65.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	500.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terselenggaranya Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	95.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dokumen standarisasi data informasi pelayanan Kes. Yang disusun tepat waktu			80.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terselenggaranya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	80.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	TersediaanyaDokumen Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten			200.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terselenggaranya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	200.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan		100%	2.540.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	03	2,01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pemberian izin praktik tenaga kesehatan		100%	20.000.000					DINAS KESEHATAN

1	02	03	2,01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terselenggaranya Pengendalian Peizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	20.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	03	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan		100%	2.520.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	03	2,02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	2.500.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	03	2,02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	20.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tersedianya obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan		100%	155.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	04	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan		100%	70.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	04	2,01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	50.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	04	2,01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terpenuhinya Komitmen Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	20.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	04	2,02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Tersedianya sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan		100%	35.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	04	2,02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	35.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	04	2,03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				20.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	04	2,03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produksi Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	20.000.000					DINAS KESEHATAN

1	02	04	2,06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga		100%	30.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	04	2,06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terselenggaranya Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	30.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		100%	100.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan advokasi pemberdayaan, kemitraan, dan peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor		100%	100.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terselenggaranya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	100.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kebutuhan layanan kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat yang terpenuhi		100%	30.941.960.017					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya tata kelola pelayanan kesehatan yang baik		100%	23.862.550.017					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan prasarana RS	Kab. Pinrang, Duampanua, Bungi	5 Kegiatan	4.704.050.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Kegiatan Untuk Pengembangan RS		3 Paket	18.830.500.017					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Bulan Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		12 Bulan	328.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan			2.350.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Bulan Kegiatan BLUD Rumah Sakit		12 Bulan	2.350.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	TersediaanyaDokumen Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten			4.729.410.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan kegiatan peningkatan tata kelola RS		12 Bulan	1.388.690.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Bulan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan RS		12 Bulan	3.340.720.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kebutuhan layanan kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat yang terpenuhi		100%	25.000.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya tata kelola pelayanan kesehatan yang baik		100%	25.000.000.000					DINAS KESEHATAN

[illegible]

1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Efesiensi dan kemampuan Puskesmas dalam memberikan pelayanan yang memadai		1 Pkm	650.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Efesiensi dan kemampuan Puskesmas dalam memberikan pelayanan yang memadai		1 Pkm	1.250.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%	46.397.195.904					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik			145.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	20.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	10.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	10.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	12.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	terlaksananya koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	10.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	33.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	50.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu			44.077.195.904					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	43.272.195.904					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	35.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	700.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	40.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	30.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi Penyusunan Laporanasi dang Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	10.000.000					DINAS KESEHATAN

1	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				525.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakain dinas dan perlengkapannya sesuai dengan pegawai Dinas Kesehatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230 set	100.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	35.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	40.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	350.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				395.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	80.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	27.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianaya bahan/Material	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	38.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	250.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				500.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	400.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	70.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	30.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				485.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	50.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	400.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	35.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				260.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	150.000.000						DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	10.000.000						DINAS KESEHATAN

1	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	100.000.000					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD				0					DINAS KESEHATAN
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	0					DINAS KESEHATAN
1	02	1			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG				Rp 107.736.575.224					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				15.120.952.027					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				15.120.952.027					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	02	2,01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pengembangan gedung rumah sakit	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Gedung	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	02	2,01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan Rumah Sakit yang direhabilitasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Gedung	640.939.027					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	12.871.013.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	02	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah bulan pengadaan obat-obatan rumah sakit	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	1.109.000.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	02	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bulan pengadaan bahan habis pakai rumah sakit	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	500.000.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			92.615.623.197					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP			54.290.400					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	3.750.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	3.737.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	4.242.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan DPA	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	3.737.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	4.242.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen LKjIP, SPM, Perjanjian Kinerja, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), dan Laporan Tahunan Rumah Sakit	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Dokumen	27.906.300					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Dokumen	6.676.100					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27.288.082.492					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	25.427.477.292					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG

1	02	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Transaksi Keuangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	1.842.708.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	8.696.100					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	9.201.100					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.060.300					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan KIR/KIB SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Laporan	3.060.300					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				131.199.200					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Penyusunan Laporan Anjab/Evjab SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	2 Laporan	5.777.200					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Bimtek	125.422.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				240.218.625					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Pembayaran Surat Kabar / Majalah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	33.831.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pameran / Expo	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Pameran	24.736.425					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Perjalanan Dinas	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	181.651.200					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.858.889.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Dinas Dokter Spesialis	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Unit	500.000.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	246.540.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket	270.900.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	841.449.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.010.609.180					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Listrik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	1.101.609.180					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa pihak ke-3 cleaning service	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	909.000.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29.274.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran STNK Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	16 STNK	29.274.000					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG

1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD				61.000.000.000						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Kegiatan BLUD Rumah Sakit	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	61.000.000.000						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				152.271.920.768						DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				111.852.163.961						DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Kab. Pinrang	100%	7.244.397.987						DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	03	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Kab. Pinrang	100%	7.244.397.987						DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	03	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen perencanaan teknis SPAM Penetapan dokumen RISPAM Kabupaten Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	500.000.000						DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	03	2,01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan pembentukan SPAM pedesaan Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 BUMD 17 desa 0 izin 1 perjanjian	344.905.000						DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	03	2,01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit air baku yang dibangun Jumlah unit distribusi yang dibangun Jumlah unit produksi yang dibangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 unit 17 unit 0 unit	604.964.800						DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	03	2,01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Hydrant Umum/Terminal air yang dibangun Jumlah sambungan rumah yang dibangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Terminal 1743 rumah	5.794.528.187						DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	03	2,01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				0						DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	03	2,01	18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				0						DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA regional yang dibangun sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional		74,38%	1.099.923.264					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	04	2,01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan TPA Regional sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional (Ha)		8,07 Ha	1.099.923.264					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	04	2,01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Luas TPA Regional yang dibangun/direhabilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Ha	1.099.923.264					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	04	2,01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				0					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		98,81%	5.700.179.176					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	05	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tinggal bersanitasi, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, Persentase rumah tangga yang tersambung dengan SPALD-T , Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja		98,81%, 87,94%, 0,34%, 5,41%	5.700.179.176					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	05	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan teknis terinci SPALD-T dan IPLT	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	300.000.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	05	2,01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan layanan dasar menggunakan SPALD S Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 rumah 500 rumah 5520 rumah 100 % 100 % 100 %	216.370.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	05	2,01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah laporan pembangunan SPALD terpusat skala permukiman yang terlaksana	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

1	03	05	2,01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	745 rumah 100 % 86 %	5.161.809.176					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	05	2,01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5520 rumah 5520 rumah 100 % 75 % 100 %	22.000.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		3,20%	9.960.122.993					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	06	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Daerah yang Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun		62,65%	9.960.122.993					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	06	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen teknis sitem drainase perkotaan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	300.000.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	06	2,01	02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah DED kawasan genangan yang tersusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 DED	0					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	06	2,01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang terbangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5520 meter	7.581.157.364					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	06	2,01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang terpelihara	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151810 meter	2.078.965.629					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	06	2,01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				0					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	06	2,01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan				0					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah		0,055	516.339.966					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	07	2,01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permukiman di kawasan strategis daerah yang telah tertata		60%	516.339.966					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	07	2,01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen teknis infrastruktur permukiman di kaasan strategis daerah Jumlah permukiman di kawasan strategis daerah yang dibangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen 1 kawasan	516.339.966					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota		100%	126.500.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	08	2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan		0,073	126.500.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

1	03	08	2,01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah IMB yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun eksisting Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 IMB 0.00056 -	126.500.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah		0,0196	4.411.763.242					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	09	2,01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata di Daerah		61,76%	4.411.763.242					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	09	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	108.124.892					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	09	2,01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung yang dibangun Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 gedung 612 unit	3.074.544.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	09	2,01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang dipelihara Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	612 gedung 2047 unit	1.229.094.350					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		82,77%	70.426.174.535					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		76,14%	70.426.174.535					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	10	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota (Km), Jumlah dokumen teknis sistem pengembangan jalan dan jembatan (Dokumen)		861,7, 2 Dokumen	300.000.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	10	2,01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen leger jalan yang tersusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	63.800.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	10	2,01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (Km), Panjang jembatan dalam kondisi baik (Km)		713,23 km, 6,414 km	100.000.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	10	2,01	05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 km	50.638.729.702					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	10	2,01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 km	362.992.661					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	10	2,01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 km	854.106.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1.669.133.400					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	10	2,01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	15.442.102.521					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	10	2,01	16	Penggantian Jembatan				0					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

1	03	10	2,01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	995.310.251					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	10	2,01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	0					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya		100%	1.064.224.300					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	12	2,01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan penataan ruang yang diterbitkan sesuai aturan		60%	597.028.300					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	12	2,01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen teknis RRTR atau sejenisnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	496.966.800					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	12	2,01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi TKPRD yang dikeluarkan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Rekomendas i	54.587.500					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	12	2,01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan penataan ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	45.474.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	12	2,02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tata guna lahan sesuai RTRW yang disusun		54%	330.000.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	12	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tata Guna Lahan sesuai RTRW Tersusun dan ditetapkannya RTR Kabupaten serta perubahannya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 Dokumen	330.000.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	12	2,03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		0,243	40.000.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	12	2,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan identifikasi pemanfaatan ruang tahun 2022	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	15.000.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	12	2,03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah laporan sistem informasi penataan ruang yang akuntabel	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	25.000.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	12	2,04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ruang publik yang berubah peruntukannya		0%	97.196.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	12	2,04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah penertiban dan penegakan hukum pelanggaran bidang penataan ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 kasus	77.000.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	12	2,04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Ha	20.196.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		99,75%	11.302.538.498					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu		100%	165.160.400					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	20.000.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.975.200					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

1	03	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	6.673.700					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.575.900					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.850.900					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	11.660.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	109.424.700					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan		98%	7.082.142.989					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang memperoleh gaji dan tunjangan secara tepat waktu dan sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 PNS	6.160.294.039					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 layanan	137.767.300					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang memperoleh honorarium secara tepat waktu dan sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	737.315.370					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang berkualitas sesuai dengan standar nakuntansi pemerintahan tersusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	14.982.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semesteran keuangan yang tersusun tepat waktu dan akuntabel	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan dan Semesteran keuangan yang tersusun tepat waktu dan akuntabel	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Laporan	31.784.280					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang		100%	7.009.200					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD beserta perubahannya secara tepat waktu dan sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	2.110.900					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD secara tepat waktu dan sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	4.898.300					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik		100%	244.820.162					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah PNS/ASN yang menggunakan pakaian khusus	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 PNS	58.997.162					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah PNS/ASN yang memperoleh layanan administrasi kepegawaian	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 orang	19.921.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS/ASN yang mengikuti bimtek	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 PNS	165.902.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

1	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		100%	347.251.944					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 komponen	16.362.500					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 unit	6.415.750					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 jenis	12.430.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 judul	17.688.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material kebutuhan pameran atau lainnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 jenis	16.508.894					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 koordinasi	277.846.800					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi		100%	886.464.036					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	80.000.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 unit	50.000.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 unit	248.050.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	508.414.036					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		1005	370.838.222					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terdistribusi secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1056 surat	13.200.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bangunan pemerintah yang prasarana komunikasi, sumber daya air dan listriknya tersedia secara optimal	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 bangunan	137.654.722					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorer yang memperoleh honorarium secara tepat waktu dan sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 orang	219.983.500					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	2.198.851.545					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 unit	1.847.007.250					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

1	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara dalam kondisi baik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122 unit	259.523.495					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 unit	32.524.800					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi dalam kondisi baik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 unit	59.796.000					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1	03				DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI				40.419.756.807					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.		93,60%	29.775.035.036					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan & pembangunan sungai		95%	7.402.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah DED Jaringan Irigasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Lokasi	200.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Pembangunan Air yang dibangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Lokasi	330.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,01	08	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah unit air baku yang terbangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	440.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah Tanggul Sungai yang terbangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	220.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Perkuatan Tebing yang terbangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	175.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya yang terbangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	177.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah Rehabilitasi Tanggul Sungai yang terbangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	130.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,01	31	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Rehabilitasi Check Dam	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	150.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,01	43	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah peninkatan swall dan pantai lainnya yang terbangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	220.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Sungai dan Saluran yang di normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Paket	5.050.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	JUmlah Stasiun Curah hujan yang terbangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 unit	125.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan SDA	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	75.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan SDA	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI

1	03	02	2,01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.		100%	22.373.035.036					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan Irigasi Permukaan yang terbangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Paket	5.000.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Paket	5.188.264.204					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,02	11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Persentase jaringan irigasi tambak yang di perbaiki	Kab. Pinrang, Suppa, Semua Kelurahan	4 unit	400.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan Irigasi Permukaan yang di rehabilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Paket	6.379.770.832					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah jaringan Bendung irigasi yang di rehabilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	395.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang di rehabilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Paket	3.900.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	800.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Persentase Operasional Unit Pengelola Irigasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Persentase Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Irigasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	60.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	02	2,02	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Persentase Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	50.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/tehnisi/analisis yg memiliki sertifikat kompetensi		100%	325.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	11	2,01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelatihan tenaga trampil konstruksi		100%	75.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	11	2,01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga trampil yg terlatih	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	65.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	11	2,01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pemantauan dan Evaluasi kegiatan tenaga terampil jasa konstruksi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	11	2,02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kab/kota		100%	130.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	11	2,02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Persentase Penyusunan data dan informasi profil pekerjaan konstruksi		100%	130.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	11	2,03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non kecil & kecil)		100%	70.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	11	2,03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Persentase Pembinaan & Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi		100%	20.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI

1	03	11	2,03	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	Persentase Pembinaan & Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional		100%	50.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	11	2,04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		100%	50.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	11	2,04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Bimtek Tertib hukum		50 orang	50.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		90%	10.319.721.771					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan yg diselesaikan.		9 Dokumen	68.452.250					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang diselesaikan Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 laporan 58 orang	20.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan RKA yang diselesaikan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 laporan	8.866.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan RKA- Perubahan yang disusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	6.380.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah laporan DPA yang disusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	5.896.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah laporan DPA Perubahan yang disusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	6.490.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 laporan	13.373.800					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 laporan	7.446.450					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yg diselesaikan		2 dokumen, 38 item honor, 38 item ATK	9.006.036.332					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yg menerima gaji & tunjangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	107 orang	8.152.194.132					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah item ATK kantor Jumlah iuran Jaminan kesehatan bagi Non ASN Jumlah tenaga operator adm/komputer	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	38 item 3 OB 3 OB	302.313.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah honor-honor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	18 item	516.529.200					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 laporan	16.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan semesteran yang disusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	19.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan kepegawaian yg diselesaikan		6 Dokumen	320.513.350					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI

1	03	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah baju olahraga Jumlah celana olahraga Jumlah pakaian batik yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 pcs 160 pcs 115 lembar	74.937.500					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	Jumlah laporan yang disusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 laporan	37.998.500					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang disusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 rangkap	7.577.350					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jenis Bimtek	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 item	200.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yg tersedia.		100%	356.041.450					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15 item	6.385.500					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat kelengkapan komputer	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 item	6.038.450					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetak	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 item	7.617.500					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran dan majalah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	32 buah	36.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	60 orang	300.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			95%	245.105.375					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah motor dinas	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 unit	90.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 unit	40.000.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 item	97.075.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 item	18.030.375					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	104.326.404					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perjalanan dinas dlm daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	58 kali	13.500.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon dan listrik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 item	68.791.404					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan & bahan pembersih Jumlah tenaga pembersih Retribusi kebersihan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 item 3 OB 12 Bulan	22.035.000					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah		100%	219.246.610					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI
1	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM kendaraan dinas & UPTD Jumlah perpanjangan STNK	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15238 liter 3 item	219.246.610					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI

1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					4.245.000.000					
1	04					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					4.245.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota		100%		35.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2,01			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota sesuai analisis kebutuhan		100%		0					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2,01	01		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Laporan		0					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2,01	02		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah laporan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		1 Laporan		0					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2,01	03		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		1 Laporan		0					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2,01	04		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		1 Dokumen		0					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2,01	05		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Laporan		0					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2,01	06		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		1 Laporan		0					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2,02			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					15.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2,02	03		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		1 Kegiatan		15.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2,03			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		100%		0					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2,03	04		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Pembangunan Rumah Bagi Kormab Bencana		10 Rumah		0					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2,06			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan dokumen terkait Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang tersusun sesuai analisa kebutuhan		100%		20.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1	04	02	2,06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik		1 Laporan	10.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2,06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan atas Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1 Laporan	10.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10ha di Kabupaten/Kota yang ditangani		42,50%	215.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	2,01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pemenuhan dokumen terkait Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan kawasan Permukiman yang tersusun sesuai analisa kebutuhan		100%	25.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan atas koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		1 Laporan	25.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	2,02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase pemenuhan dokumen rencana strategis peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan luas di bawah 10Ha sesuai analisa kebutuhan		100%	50.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	2,02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh		1 Dokumen	25.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	2,02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan atas koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		1 laporan	25.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	2,03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10Ha sesuai analisa kebutuhan		100%	140.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	2,03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		1 Paket	100.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	2,03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		1 Paket	20.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	2,03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan pada permukiman Kumuh		1 Kali	0					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	2,03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan data atas verifikasi penyelenggaraan kawasan Permukiman Kumuh		1 Laporan	20.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		2,62%	200.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1	04	04	2,01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan peningkatan kualitas rumah sesuai analisa kebutuhan		100%	200.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	04	2,01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni		10 Rumah	100.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	04	2,01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Unit Peningkatan Kualitas Rumah tidak layak huni		1 Dokumen	100.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		100%	3.395.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	05	2,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan		100%	3.395.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	05	2,01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana dan sarana utilitas umum	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Lokasi	3.385.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan atas Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		1 Laporan	10.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				400.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas yang diadakan		1 Unit	400.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14.809.761.052					
1	05				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				12.595.934.986					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara		95%	1.491.345.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2,01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan trantibum dalam wilayah Kab. Pinrang		95%	1.411.345.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2,01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan kegiatan patroli dan pengamanan Jumlah pelayanan pencegahan gangguan tantibum	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 kali 12 Bulan	1.345.575.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2,01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah pelaksanaan pencegahan dan penanganan terhadap gangguan kententruman dan ketertiban umum	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Kali	50.000.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1	05	02	2,01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Satlinmas secara berjenjang mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten,	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kali	15.770.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2,01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108 desa	0					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2,01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan pelatihan anggota satuan polisi pamong praja		1 Kali	0					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2,02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penegakan peraturan daerah dalam wilayah Kab. Pinrang		100%	80.000.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2,02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelaksanaan Pengawasan Cukai Rokok Ilegal	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Kali	40.000.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2,02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Giat Penanganan pelanggaran Perda dan perbup	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Kali	40.000.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		95%	2.253.900.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2,01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		95%	2.253.900.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2,01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kali	100.000.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2,01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Jaga Anggota Pemadam Kebakaran Yang Terbayarkan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1.974.000.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2,01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	99.900.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2,01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah pelaksanaan pelatihan anggota pemadam kebakaran		1 kali	80.000.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		95%	8.850.689.986					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	15.725.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renja dan Renja Perubahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Dokumen	3.795.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan RKA	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	2.290.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	2.215.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1	05	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan DPA	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.400.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan DPA Perubahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	1.550.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan LKJIP, LPPD, SPIP dan Perjanjian Kinerja	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Dokumen	2.745.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan evaluasi renja dan evaluasi renstra	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Dokumen	1.730.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang akuntabel		100%	7.922.587.986					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	7.595.934.986					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelayanan penyediaan makan minum rapat/tamu SKPD, penyediaan ATK, BPJS ketenagakerjaan non PNS	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	112.078.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelayanan administrasi keuangan SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	206.400.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	3.770.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	4.405.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersedia		100%	14.940.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.000.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pelayanan laporan pengelolaan aset SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	13.940.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumberdaya aparatur yang mencapai nilai SKP baik		100%	164.810.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Alat Absensi yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	3.500.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Olahraga yang diadakan sesuai analisis kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	87 Pasang	73.950.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen ANJAB, EVJAB, SKJ dan PROBIS	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Dokumen	7.360.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah penilaian kinerja ASN		87 Orang	0					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sumber daya manusia aparatur yang mengikuti bimbingan tehknis implementasi sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14 Orang	80.000.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		95%	209.674.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia		1 paket	0					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan Kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Jenis	2.000.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak spanduk hari besar nasional, cetak resi PAD dan penggandaan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Jenis	2.174.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 eks	5.500.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas keluar daerah yang Teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	80 Kali	200.000.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		95%	73.500.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Jenis	40.000.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Jenis	0					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Jenis	25.000.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Unit	8.500.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		100%	73.932.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar		1500 Surat	2.000.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	58.356.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Jasa Pembersih Kantor, Alat Kebersihan, Retibusi Sampah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	13.576.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		95%	375.521.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	369.521.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	6.000.000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang terpelihara		4 Jenis	0					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				2.213.826.066					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Ketersediaan data Bencana		80%	203.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan informasi daerah rawan bencana		100%	12.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2,01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kajian risiko bencana kabupaten / Kota		12 kecamatan	12.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan pencegahan, Kesiapsiagaan dan pasca bencana yang terlaksana		100%	117.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2,02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 org	25.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2,02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pascabencana yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	31.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2,02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Posko TIM TRC yang dibayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	55.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2,02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur yg ikut gladi kesiapsiagaan Terhadap bencana	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	6.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi yang terlaksana		100%	74.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2,03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase dalam penanganan respon cepat darurat bencana yang terlaksana sesuai prosedur	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	37.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pencarian , Pertolongan dan Evakuasi Korban Yang Terlaksana sesuai prosedur	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2,03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik yang terpenuhi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 kecamatan	25.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	2.010.826.066					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan		100 %	24.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP . LPPD dan Perjanjian Kinerja yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	6.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja dan Renstra yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD		100 %	1.357.046.666					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gajinya tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 ASN	1.091.046.666					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 jenis	85.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Jasa	170.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yangtersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	6.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yangtersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	5.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD		131.700.000	131.700.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.000.000	28.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data kepegawaian yang tersusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.000.000	33.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai (SKP) yang tersusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700.000	700.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.000.000	70.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum SKPD		100 %	208.979.400					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penerangan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 jenis	1.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 buah	1.379.400					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis spanduk yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 jenis	4.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 ekslamper	12.600.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas luar dan dalam daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	190.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	05	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian barang milik daerah				28.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg dibutuhkan	1 unit			28.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah SKPD		100 %		95.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa tenaga administrasi persuratan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang		29.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 rekening		31.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pembersih yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 orang		35.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah SKPD		100 %		166.100.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara sesuai analisis kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 unit		150.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 unit		12.100.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 unit		4.000.000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				Rp	4.793.823.650					
1	06				DINAS SOSIAL				Rp	4.793.823.650					DINAS SOSIAL
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina		100%		185.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	02	2,01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)					100.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	02	2,01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Persentase fasilitasi pemberdayaan sosial KAT yang terlaksana	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		100.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan		100%		85.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	02	2,03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesejahteraan Yang potensinya dikembangkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		85.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial		100%		224.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilaksanakan		100%		132.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase penyediaan permakanan bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis yang dilaksanakan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		50.000.000					DINAS SOSIAL

1	06	04	2,01	02	Penyediaan Sandang	Persentase penyediaan sandang bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis yang dilaksanakan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase penyediaan Alat bantu bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis yang dilaksanakan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	04	2,01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pelayanan Penelusuran Keluarga yang terlaksana	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan		100%	92.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	04	2,02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase Layanan Data dan Pengaduan yang terlaksana	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	04	2,02	03	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyediaan permakanan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	04	2,02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase pemberian layanan rujukan yang terlaksana	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial		100%	407.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	05	2,01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase pelaksanaan kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar yang terlaksana		100%	57.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	05	2,01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase Penjangkauan Anak Terlantar yang terlaksana	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	05	2,01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase Rujukan Anak Anak Terlantar yang terlaksana	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	05	2,01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan Anak Terlantar yang terlaksana	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota		100%	350.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Sampel	60.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jasa Tenaga Pendamping Keluarga Harapan yang terbayarkan tepat waktu	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 Orang	290.000.000					DINAS SOSIAL

1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		100%	270.000.000						DINAS SOSIAL
1	06	06	2,01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota		100%	150.000.000						DINAS SOSIAL
1	06	06	2,01	01		Penyediaan Makanan	Jumlah pemberian Bahan Makanan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlaksana	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 paket	80.000.000						DINAS SOSIAL
1	06	06	2,01	02		Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlaksana	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 paket	70.000.000						DINAS SOSIAL
1	06	06	2,02			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten / kota yang terlaksana		100%	120.000.000						DINAS SOSIAL
1	06	06	2,02	02		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Taruna Siaga Bencana Yang Aktif	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	120.000.000						DINAS SOSIAL
1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan taman makam pahlawan		100%	150.000.000						DINAS SOSIAL
1	06	07	2,01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terlaksana		100%	150.000.000						DINAS SOSIAL
1	06	07	2,01	01		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah jasa Petugas pembersih TMP/TMB yang terbayarkan tepat waktu	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Orang	150.000.000						DINAS SOSIAL
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	3.557.823.650						DINAS SOSIAL
1	06	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu dansesuai aturan		100%	21.200.000						DINAS SOSIAL
1	06	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		2 Dokumen	3.500.000						DINAS SOSIAL
1	06	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.800.000						DINAS SOSIAL
1	06	01	2,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.800.000						DINAS SOSIAL
1	06	01	2,01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000						DINAS SOSIAL
1	06	01	2,01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.600.000						DINAS SOSIAL

1	06	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	3.700.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra yg tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	1.800.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD		100%	2.905.123.650					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2.656.123.650					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terlaksana	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	180.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2.500.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	1.500.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengelolaan barang milik daerah SKPD		100%	11.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan asset yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	11.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD		100%	184.300.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olah raga aparatur yang diadakan sesuai analisis kebutuhan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Pasang	32.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang dibuat	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2.300.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	150.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum SKPD		100%	248.200.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan kantor yang komponen instalasi listrik/penerangannya tersedia secara optimal	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	3.200.000					DINAS SOSIAL

1	06	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	75.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diadakan sesuai kebutuhan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 jenis	15.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 surat kabar	10.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan yang terkoordinasikan		100 %	145.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah SKPD		100%	118.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Layanan Internet, Telepon dan Listrik yang terbayarkan tepat waktu	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	78.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Orang	40.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah SKPD		100%	70.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara sesuai analisis kebutuhan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 unit	60.000.000					DINAS SOSIAL
1	06	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 unit	10.000.000					DINAS SOSIAL
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				167.737.221.494					
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5.147.542.560					
2	07				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				5.147.542.560					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.		1,03	20.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	02	2,01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase penyusunan RTK yang terpenuhi		50%	20.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	02	2,01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		1 Dokumen	20.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		1,75%	278.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi		100%	240.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah pencari kerja/masyarakat yang mengikuti pelatihan keterampilan berbasis kompetensi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 orang	190.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	2,01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 unit	50.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2	07	03	2,02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		100%	24.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	2,02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 LPTKS	24.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	2,03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lembaga Pelatihan kerja swasta yang mendapatkan Izin		100%	0					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	2,03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang tersedia			0					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	2,04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase produktivitas perusahaan kecil yang terdata			0					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	2,04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang mendapatkan pengukuran produktivitas			0					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	2,05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi		50%	14.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	2,05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	jumlah tenaga kerja yang terukur kompetensinya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 orang	14.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.		57%	53.305.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	2,01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari kerja yang Terlayani		100%	22.190.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	2,01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 orang	6.135.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	2,01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti penyuluhan bimbingan jabatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 orang	16.055.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	2,01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				0					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	2,01	05	Perluasan Kesempatan Kerja				0					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	2,02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang mendapatkan Izin		100%	8.170.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	2,02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Terbina dan mendapatkan izin sesuai aturan yang berlaku	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 LPTKS	8.170.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Penyebarluasan informasi pasar kerja yang disebarakan secara online		100%	22.945.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	2,03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah lowongan yang di sebarluaskan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 lowongan	22.945.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	2,04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan yang terlindungi		80%	0					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	2,04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang diberdayakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	0					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP,PKB,LKS,Bipartit Struktur skala upah dan terdaftar BPJS		40,25%	72.845.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2	07	05	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan PP dan PKB		28%	37.875.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2,01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang membuat peraturan perusahaan		5 Perusahaan	10.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2,01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang terdaftar dalam PKB	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Perusahaan	9.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2,01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah pekerja yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	260 Pekerja	18.875.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan		100%	34.970.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2,02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi perselisihan hubungan industrial	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Perusahaan	24.520.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2,02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kasus	10.450.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2,02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah perusahaan yang mempunyai organisasi serikat buruh			0					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2,02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan		100 orang	0					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	4.723.392.560					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	31.950.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	10.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun Tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	5.960.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun Tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	4.230.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	3.300.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA Yang Tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	4.230.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LKJIP, LPPD, SPIP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun sesuai aturan yang berlaku	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Laporan	4.230.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan		100%	4.069.025.460					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2	07	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	3.723.956.960						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah kegiatan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Kegiatan	68.068.500						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran Honorarium Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	269.100.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang angkuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	6.265.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	jumlah Laporan keuangan semesteran yang angkuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	1.635.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang dan aset yang akuntabel		100%	1.600.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah Laporan barang milik daerah yang angkuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Laporan	1.600.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur yazng mencapai Nilai SKP baik dan kelengkapan lainnya		100%	102.635.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian olahraga dan seragam pelayanan ketenagakerjaan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	72 Pasang	23.975.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Dokumen	8.660.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis dan implementasi peraturan perundang undangan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8 orang	70.000.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase tercapainya pelayanan administrasi umum		100%	122.884.300						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 komponen	2.000.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penggandaan yang tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	30000 Lembar	9.124.300						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran bahan bacaan yang tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	11.760.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan penyelenggaraan rapat rapat koordinasi dan kunsultasi SKPD yang diikuti	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	100.000.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik Daerah terpenuhi		100%	45.000.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas jabatan yang di adakan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 unit	0						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di adakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 unit	45.000.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang milik Daerah terpenuhi		100%	76.297.800						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2	07	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu pelayanan surat menyurat yang terpenuhi			0					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan Inetrnet/Wifi yang terbayarkann tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	24 Rekening	60.247.800					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang tersedia sesuai analias kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 jasa	16.050.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terpelihara		100%	274.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan Dinas yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kendaraan	60.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20 unit	14.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 unit	200.000.000					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				176.000.000					
2	08				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				176.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender		97,24	31.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	08	02	2,01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		44	31.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	08	02	2,01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Sosialisasi Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 kecamatan	31.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	08	02	2,02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		60,41	0					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	08	02	2,02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 kecamatan	0					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		50,08	66.840.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

2	08	03	2,01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan Hak Perempuan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO)		50,08	66.840.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	08	03	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	pelaksanaan kebijakan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 kecamatan	66.840.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Ketersediaan lembaga pelayanan bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak berbasis masyarakat		100%	78.160.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	08	06	2,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kota Layak Anak		12 kecamatan	78.160.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	08	06	2,02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Anak	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 kecamatan	78.160.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				5.929.619.881					
2	09				DINAS KETAHANAN PANGAN				5.929.619.881					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota		70%	380.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	2,01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				380.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	2,01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Gappoktan yang menerima bantuan pembangunan lumbung pangan masyarakat beserta perlengkapannya lainnya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Klp	350.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam pengawasan pembangunan lumbung pangan masyarakat	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8 Pegawai	30.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan)		37,25%	1.225.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				520.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan pengambilan data NBM	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Pegawai	170.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2,01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pangan lokal yang tersedia pada setiap kelompok		2 Klp	50.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN

2	09	03	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan perberasan dan pemantauan data di setiap kecamatan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Pegawai	50.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2,01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan harga pangan pokok strategis pada setiap pasar kecamatan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Pasar	200.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2,01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah toko tani Indonesia yang tersedia bagi masyarakat		2 Toko	50.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2,02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				180.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2,02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan beras Daerah yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Ton	150.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2,02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah karung kemasan CBD yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	500 Lbr	30.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2,03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi				40.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah untuk menentukan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan pemerintah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8 Pegawai	40.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Perkapita/Tahun di Setiap Rumah Tangga		90 persen	485.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2,04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah kusioner yang digandakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	150 Exemplar	35.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok wanita tani yang menerima bantuan bibit tanaman sayur, pupuk, polybag dan daring	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Klp	400.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2,04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan pengambilan data survey rumah tangga	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Kec	50.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penyaluran cadangan pangan pada suatu wilayah yang tertangani		100%	200.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	04	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				50.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana demi kelancaran pembuatan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 Pegawai	50.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	04	2,02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				150.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	04	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka penyaluran cadangan pangan daerah kepada masyarakat yang terkena bencana	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Pegawai	150.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		90 %	260.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN

2	09	05	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			90 %	260.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	05	2,01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jasa Tim Jejaring Keamanan pangan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	60.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	05	2,01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Uji Residu Sayur dan Buah yang dilaksanakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket	200.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	3.864.619.881					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja yang tersusun tepat waktu		95 %	35.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang digandakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 Exemplar	7.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Digandakan Sesuai Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 Exemplar	7.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA PerubahanYang Digandakan Sesuai Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	7 Exemplar	7.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Yang Digandakan Sesuai Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 Exemplar	7.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Yang Digandakan Sesuai Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 Exemplar	7.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan		95 %	2.710.619.881					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlag Gaji dan Tunjangan ASN Yang Terbayarkan Tepat Waktu dan Sesuai aturan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	30 Pegawai	2.500.019.881					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat Tulis Kantor Yang Diadakan Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	98 Persen	40.600.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Admistrasi Keuangan dan Perencanaan Yang Terbayarkan Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 Persen	150.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan CALK Yang Digandakan Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 EXP	10.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Semesteran Yang Digandakan Sesuai analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 EXP	10.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang dan Asset Daera yang terinventarisasi sesuai aturan yang berlaku		100 %	32.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Cetak dan Pengandaan Yang Tersedia Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 ls	7.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jasa Pengelolaan Barang dan asset Yang terbayarkan Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Orang	25.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN

2	09	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai aturan		98 %	225.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Batik yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Paket	50.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan ANJAB, EVJAB, SKB, dan SKP yang digandakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 Exp	10.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP yang digandakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 Exp	15.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Pegawai	150.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah secara efektif dan efisien		95 %	267.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Wireless Mouse yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Buah	15.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan/cetakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Ls	7.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan (Surat Kabar dan Majalah) sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Ls	20.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	30 Pegawai	225.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 unit	200.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah yang dilaksanakan sesuai aturan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Pegawai	10.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan telepon yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket	50.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Petugas Kebersihan, dan sopir Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Org	35.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				300.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara sesuai anlisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Ls	50.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000					DINAS KETAHANAN PANGAN
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.846.418.090					

2	10				DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN				1.846.418.090					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan TanahTerbayarkan Tepat Waktu		5 Paket	1.846.418.090					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	10	05	2,01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.846.418.090					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	10	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan		1 Paket	1.846.418.090					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				15.835.479.960					
2	11				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				15.835.479.960					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketercapaian dokumen Perencanaan lingkungan hidup		100%	70.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2,01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Penyusunan Dokumen RPPLH		100%	70.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2,01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	70.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		69,75	1.620.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2,01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan (tanah,air,udara)		100%	1.620.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Laporan Pencemaran Lingkungan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.370.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tersusunnya GRK, Keanekaragaman Hayati, dan Kampung Iklim	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	150.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2,01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengujian yang dilakukan di laboratorium	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan	100.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan KEHATI		100%	100.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2,01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Ruang terbuka Hijau dengan kondisi baik		100%	100.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2,01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan RTH yang memadai		1 Kegiatan	100.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab usaha da/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2	11	06	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sesuai analisa kebutuhan		100%	100.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2,01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha yang dikeluarkan Jumlah Pengusaha yang dinilai AMDALnya	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Dokumen 2 Kegiatan	100.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase keterlibatan MHA dalam pengelolaan lingkungan hidup		100%	15.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	07	2,01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan MHA terkait dengan PPLH		100%	15.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	07	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang didata	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang lingkungan hidup		100%	15.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	2,01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		100%	15.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	2,01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah sosialisasi yang diadakan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kali	15.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pencapaian penghargaan terhadap lingkungan yang didapat		100%	15.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	2,01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian penghargaan terhadap lingkungan yang didapat		100%	15.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	2,01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penyelesaian pengaduan persampahan yang diterima	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	15.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan di wilayah Kabupaten		100%	7.470.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2,01		Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang ditangani dan tertangani		100%	7.470.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2,01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	2.200.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2,01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Lapangan yang menangani Kebersihan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	270 Orang	4.860.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2,01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah sosialisasi yang diadakan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kali	30.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2	11	11	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasara persampahan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	0					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2,01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasaran yang diadakan sesua dengan alanisis kebutuhan		1 Paket	380.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	6.430.479.960					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	50.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Revisi Renstra yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	20.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKPA yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	5.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	5.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP, LPPD, Perjanjian Kinerja dan SPIP	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Dokumen	5.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Renja dan Evaluasi Renstra yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Dokumen	5.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan yang terpenuhi		100%	4.908.979.960					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14 bulan	4.408.979.960					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah makan minum lembur penyusunan akrual Jumlah premi asuransi BPJS ketenagakerjaan yang terbavarkan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20 Jenis 200 Dos 12 Bulan	90.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20 Jasa	400.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 laporan	5.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 laporan	5.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2	11	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi		100%	5.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang dan aset yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 laporan	5.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian yang disusun sesuai analisa kebutuhan		100%	195.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olahraga yang diadakan sesuai analisis Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	200 Stel	90.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen ANJAB, SKM dan SKJ yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Dokumen	5.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Aparatur	100.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang diadakan sesuai analisa kebutuhan		100%	310.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis	5.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Jenis	5.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis	15.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 bahan bacaan	15.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Pameran Pembangunan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	20.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Kali	250.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase asset yang diadakan sesuai analisa kebutuhan		100%	430.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang diadakan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	30.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Jenis	80.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun sesuai analisa kebutuhan (Pagar)	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	300.000.000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2	11	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Yang Tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 unit	20.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	211.500.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terdistribusi	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Surat	1.500.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayarkan dan TV Kabel	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	120.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Yang Terbayarkan Jumlah Jasa Pengamanan/Satpam Kantor Yang Terbayarkan Jumlah Jasa Petugas Pemungut Retribusi Kebersihan Yang Terbayarkan Jumlah Tagihan Iuran Kebersihan Kantor Yang Terbayarkan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	90.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	320.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bahan bakar minyak/gas yang tersedia Jumlah jasa sopir yang terbayarkan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara sesuai analisis kebutuhan Jumlah STNK untuk kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis 2 orang 1 Paket 90 unit	150.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis	20.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor yang terlaksana	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 paket	150.000.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.233.241.831						
2	12				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				6.233.241.831						DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang terdaftar dalam database		100%	1.464.151.900						DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	02	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase tertibnya administrasi kependudukan kepemilikan KK, KTP dan SKPWNI		100%	1.464.151.900						DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	02	2,01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	jumlah data pemutakhiran KK dan pemutakhiran penduduk rentan non permanen	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10000 KK	9.983.000						DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2	12	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah APD yang terpenuhi sesuai anlis kebutuhan jumlah ATK yang tersedia sesuai analisa kebutuhan jumlah belanja cetak yang tersedia sesuai analisis kebutuhan jumlah jasa tim lintas sektor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 Jenis 8 Jenis 23 Jenis 17 Jasa	983.656.900					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	02	2,01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	jumlah jasa pengaduan masyarakat yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Jasa	16.762.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah jasa kantor yang terbayarkan tepat waktu jumlah makan minum lembur penyusunan data KTPel dan KK yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Jenis 216 dos	369.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	02	2,01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	jumlah belanja cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan jumlah jasa pengelola web yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Jenis 1 Jasa	84.750.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		100%	161.229.500					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	03	2,01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Pencatatan Sipil		100%	161.229.500					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	jumlah alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	13 Jenis	27.229.500					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	03	2,01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah jasa operator akta capil yang terbayarkan tepat waktu jumlah makan minum lembur penyelesaian akta capil	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 orang 200 dos	134.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat		91%	195.560.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	04	2,01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat		89%	160.910.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	04	2,01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	jumlah atk yang tersedia sesuai analisis kebutuhan jumlah pemutakhiran KTP el yang dilaksanakan sesuai analisis kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 Jenis 2000 data	40.910.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	04	2,01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah Box arsip yang dianggarkan sesuai analisa kebutuhan jumlah jasa tenaga tekhnis/operator arsip yang terbayarkan tepat waktu jumlah makan minum lembur yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	225 box 5 Jasa 200 dos	120.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	04	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat		100%	34.650.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2	12	04	2,03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Atk yang tersedia sesuai analisa kebutuhan jumlah jasa operator pengelola dan penyajian data kependudukan yang terbayarkan tepat waktu jumlah makan minum lembur yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Jenis 2 Jasa 168 dos	34.650.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	4.412.300.431					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu		100%	56.895.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Renja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	10.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	15.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	7.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	2.560.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	3.500.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Dokumen LPPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen 1 Dokumen	15.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja hasil evaluasi yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	3.835.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji Pegawai dan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terlaksana tetap waktu dan sesuai aturan		95%	3.125.950.911					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pegawai yang terbayarkan gajinya tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	32 Pegawai	2.918.531.411					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2	12	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang tersedia sesuai analisis kebutuhan Jumlah Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non PNS yang terbayarkan tepat waktu Jumlah makan Minum rapt yang tersedia sesuai analisis kebutuhan Jumlah Makan Minum tamu yang tersedia sesuai analisis kebutuhan Jumlah penggandaan/Fotocopy yang tersedia sesuai analisis kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20 Jenis 78 Orang 480 Dos 300 Dos 15000 Lembar	46.692.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Atk yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Jenis 12 Jasa	138.727.500					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	7.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan Akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah laporan Semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan 1 Laporan	15.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang dan asset daerah yang terinventaris sesuai aturan yang berlaku		95%	26.820.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jasa Pengelola barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu Jumlah laporan Pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Jasa 2 Laporan	26.820.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin sesuai aturan yang berlaku		95%	162.904.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Batik Pelayanan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah pakaian Olahraga PNS yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	90 orang 40 Pegawai	50.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Anjab dan evjab yang tersusun sesuai peraturan Jumlah Laporan SKM yang tersusun sesuai Peraturan yang berlaku	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Laporan 1 Laporan	9.744.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah SKP yang tersusun secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	33 Pegawai	3.160.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2	12	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan jumlah sumber daya manusia aparaturn yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang undangan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 bimtek 5 Orang	100.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Gedung Kantor dalam kondisi baik		90 %	237.765.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket alat listrik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 paket	5.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analis kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 jenis	6.015.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah baha cetak yang tersedia sesuai analis kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 jenis	2.550.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbavarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	21 bacaan	18.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah pameran yang diikuti/dilaksanakan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 kali pameran	6.200.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas ke kecamatan yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan jumlah perjalan dinas keluar daerah /provinsi yang terigistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	25 kali 19 kali	200.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah		90 %	205.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	jumlah meubeler kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 jenis	55.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 jenis	150.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terbavarkan tepat waktu		90 %	364.365.520					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah atk yang tersedia sesuai analis kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Jenis	3.500.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bangunan pemerintah yang fasilitas komunikasi, sumber daya air, listrik dan internetnya terpenuhi sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 bangunan	194.990.520					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2	12	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa front office yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu jumlah tagihan iuran kebersihan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	16 Orang 3 Jasa 1 tagihan	165.875.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan		90 %	232.600.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah bahan bakar minyak yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu jumlah jasa service yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu jumlah jasa sopir yang terbayarkan tepat waktu jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9200 liter 5 Jenis 2 Jasa 6 unit	80.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 paket	17.600.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 gedung	125.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah service AC yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 unit	10.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				77.859.461.049					
2	13				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				77.859.461.049					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pelaksanaan Penataan Desa		100%	359.480.500					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	02	2,01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya		69 Orang	359.480.500					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	02	2,01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang akan di mekarkan			145.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	02	2,01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah aparaturnya desa yang mengikuti sosialisasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	69 Orang	22.499.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	02	2,01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah aparaturnya desa yang mengikuti sosialisasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	69 Orang	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	02	2,01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa				191.981.500					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama Desa		12 Desa	200.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	03	2,01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa		12 Desa	200.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	03	2,01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yg terfasilitasi		3 kawasan	200.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal		65%, 100%	72.079.857.572					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2	13	04	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100%	72.079.857.572					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	2,01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	612 Orang	1.047.190.572					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	2,01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Naskah Rancangan Perbup yang tersusun dan Teresosialisasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9 Perbup	146.856.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	2,01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Aparatur Desa dan Masyarakat yang dilatih	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	345 Orang	134.189.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	2,01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa yang diverifikasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	69 Desa	70.022.299.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	2,01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang dibina/Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa, Profil Desa dan Administrasi Lainnya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	69 Desa	74.697.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	2,01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah aparatur desa/Masyarakat yang mengikuti Pelatihan/Penguatan Administrasi dan Pelaporan BUNDESMA	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20 Orang	406.305.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	2,01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	21 Desa	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	2,01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Profil Desa	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	138 Orang	77.599.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	2,01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Pelatihan Penyusunan dan Pengelolaan Asset	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	138 Orang	79.738.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa Tingkat Kabupaten	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9 Desa	90.984.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan		90%	911.936.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	05	2,01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa		90%	911.936.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	05	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kader PKK yang Mengikuti Pelatihan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	240 Orang	263.805.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	05	2,01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Perempuan di Perdesaan yang mengikuti Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 Orang	77.060.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	05	2,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kegiatan Gelar TTG	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	117.154.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2	13	05	2,01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Linmas untuk Pilkades	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	138 Orang	62.460.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	05	2,01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Kecamatan	391.457.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	4.308.186.977					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100%	113.450.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen,Renja,Renja Perubahan,Renstra dan Renstra Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat Waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Dokumen	71.605.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen,Renja,Renja Perubahan,Renstra dan Renstra Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat Waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Dokumen	3.210.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Dokumen	3.835.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Dokumen	3.210.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Dokumen	4.485.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Dokumen	24.355.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Dokumen	2.750.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu		100%	2.822.040.477					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayarkan gajinya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	2.453.948.805					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa administrasi penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	13 orang	51.531.672					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan pelaksanaan verifikasi yang tersedia tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Dokumen	300.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penyusunan Laporan Akhir Tahun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 laporan	10.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan yang tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 laporan	6.560.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.980.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2	13	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 laporan	1.980.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100%	387.375.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Olah Raga	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	40 Pasang	20.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen SKP yang tersusun sesuai aturan dan Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	14.875.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen SKP yang tersusun sesuai aturan dan Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	2.500.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang ditingkatkan Sumber Dayanya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	16 Orang	350.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan admistrasi perkantoran yang terpenuhi		100%	301.621.500					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang diadakan sesuai analisis kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 pake	7.652.500					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Komputer	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	30 Buah	3.415.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah tangga	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Paket	5.090.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan Pengadaan yang diadakan sesuai analisis kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Paket	9.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah dan Tablod	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	35 Bahan Bacaan	19.920.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Materaial untuk Pameran Pembangunan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Paket	6.544.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Dinas Luar Daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	250.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	191.800.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Unit	50.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja dan Kursi Kerja	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 Buah	30.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Cetak,Komputer PC dan Lattop	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 Unit	100.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor (AC dan Sound System)	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Unit	11.800.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	152.440.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2	13	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pendistribusian Surat Menyurat terkirim	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1085 Surat	15.300.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening layanan Jasa Telepon,Internet,Air dan Listrik yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	70.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor,Jasa Tenaga Pembersih dan Retribusi Sampah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	67.140.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	337.480.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara sesuai analisis kebutuhannya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Unit	100.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin yang dipelihara sesuai analisis kebutuhannya	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Unit	11.480.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket	226.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				11.249.624.425					
2	14	1			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA				11.249.624.425					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)		12 kecamatan	194.380.800					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	02	2,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		0,69	117.380.800					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	02	2,01	13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Sosialisasi Laju pertumbuhan penduduk	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Kecamatan	117.380.800					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	02	2,02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk		12 Kecamatan	77.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	02	2,02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	pengumpulan dan pengolahan data pelayanan KB/KS/dan PP	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Kecamatan	50.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	02	2,02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem Informasi keluarga	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 %	27.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	TFR (Angka Kelahiran Total)		12 bulan	5.129.896.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB

2	14	03	2,01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KBPK (advokasi dan KIE)		96%	31.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	03	2,01	04	Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi KB dan KIE melalui Media	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	31.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	03	2,03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		96%	5.098.896.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	03	2,03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Kecamatan	25.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	03	2,03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Kecamatan	3.622.164.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	03	2,03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Saran Penunjang Pelayanan KB	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 %	1.360.232.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	03	2,03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	pembinaan pasca pelayanan peserta KB	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 %	17.300.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	03	2,03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaring dan jejaringnya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 %	19.200.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	03	2,03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 %	15.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	03	2,03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	promosi dan konseling KB pasca persalinan dan keguguran	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 %	15.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	03	2,03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 %	25.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keluarga		65%	0					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	04	2,01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		12 bulan	0					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	04	2,01	12	Sosialisasi IPK	Sosialisasi Pembangunan Keluarga	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	0					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB

2	14	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		12 Bulan	5.925.347.625						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan		12 Dokumen	71.829.000						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Renja, Renja Perubahan dan Renstra Perubahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Dokumen	17.625.500						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	6.555.000						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Perubahan RKA SKPD	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	8.222.500						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	6.555.000						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	8.222.500						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	penyusunan laporan LPPD, LKIP dan Perjanjian Kinerja	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Dokumen	17.300.000						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penyusunan evaluasi renja dan evaluasi renstra	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Dokumen	7.348.500						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD		12 bulan	5.345.628.545						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	4.668.904.545						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPJS Ketenagakerjaan, Makan Minum Rapat, Makan Minum Tamu, ATK Sekretariat dan Honorarium Penyuluh Non PNS	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	488.524.000						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium, PA, KPA, PPTK, dan Honor Administrasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	167.700.000						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	9.500.000						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	11.000.000						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB

2	14	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan Aset yang lebih transparan dan akuntabilitas		2 Dokumen	7.426.700					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan RKBU	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	3.631.700					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Aset	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	3.795.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mewujudkan managemen kepegawaian yang berkualitas		12 Bulan	133.700.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Olahraga	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	152 Stel	53.200.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyusunan ANJAB dan EVJAB	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Dokumen	10.500.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 %	70.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	eningkatkan jasa Administrasi dalam Penyelenggaraan Managemen dan operasional kantor		12 Bulan	125.044.080					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Jenis	2.500.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Alat Kebersihan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Jenis	4.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Minat Baca Aparatur	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	13 Eksamplar	13.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi yang terintegritas dan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	99.544.080					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengelola Website/SIRUP	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 orang	6.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana bagi aparatur		2 Unit	26.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meja Kerja dan Kursi Kerja	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Unit	6.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB

2	14	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pegadaan Komputer dan Printer	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Unit	20.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan manajemen dan operasional kantor		12 bulan	109.700.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	80.000.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Tenaga Pembersih, Satpam, Jasa Kebersihan Kantor, dan Retribusi Sampah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	29.700.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan Dinas, Ac dan Komputer		12 bulan	106.019.300					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	STNK, BBM, Service Kendaraan Dinas, Honorarium Supir	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	95.539.300					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Perlatan Gedung Kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	4.380.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	14	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	6.100.000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KB
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				7.795.243.941					
2	15				DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN				7.795.243.941					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota, Kinerja Lalu Lintas Kabupaten		1 Pake!	1.198.106.500					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02	2,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Penindakan pelanggaran Lalu Lintas		1 Pake!	285.200.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	JUmlah Perlengkapan Lalu Lintas Yang Terpelihara		1 Paket	163.500.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02	2,02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pertengkapan Jalan Yang Terbayar<antepat waktu		60 Buah	0					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	JUmlah Perlengkapan Lalu Lintas Yang Terpelihara		1 Paket	121.700.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02	2,03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Termina Penumpang Tipe-C yang terpaka sesuai Kebutuhan		1 Jns	16.254.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02	2,03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana Dan Prasarana yang terpakai sesuai kebutuhan		1 Jns	16.254.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02	2,05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentise Kendaraan yang lulus uji tiap tahun		74 %	143.800.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02	2,05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian yang terpakai sesuai kebutuhan		1 Paket	30.000.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

2	15	02	2,05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Yang Telah Dilaksanakan Tepat Waktu		1 Jns	53.300.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02	2,05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengujian yang Terpakai Sesuai Kebutuhan		1 Paket	60.500.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02	2,06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Terlaksana sesuai kebutuhan		100 %	90.079.500					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02	2,06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Terlaksana Sesuai Kebutuhan		1 Paket	73.809.500					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02	2,06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Forum Lalu lintas Yang terlaksana Tepat Waktu		1 Paket	16.270.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02	2,09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Honorer Yang Digaji Sesuai Kebutuhan		130 Org	622.500.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02	2,09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Honorer Yang Digaji Sesuai Kebutuhan		130 Org	622.500.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02	2,14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Yang Terlaksana Sesuai Kebutuhan		1 Keg	40.273.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	02	2,14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Yang Terlaksana Sesuai Kebutuhan		1 Keg	40.273.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Pengelolaan Pelabuhan / Dermaga		1 Pel	118.445.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	03	2,04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Yang Melayani Trayek Dalam Kali/Kot		1 Paket	12.760.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	03	2,04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Usaha Perawalan Dan Perbaikan Kapal yang dilertitikan sesuai kebutuhan		1 Keg	6.380.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	03	2,04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Yang Dterbrrkan Sesuai Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito,	1 unit	6.380.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	03	2,07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyeberangan dan pengoperasian untuk kapal yang terlayani sesuai kebutuhan		1 Rute	19.780.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	03	2,07	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Yang Beroperasi Sesuai Kebutuhan		1 Kapal	6.855.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	03	2,07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyeberangan Dan Perselujuan Pengoperasian Kapal Sesuai Kebutuhan		1 Rule	12.925.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	03	2,08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Izin Usaha Perawalan Dan Perbaikan Kapal yang dilertitikan sesuai kebutuhan		1 Keg	85.905.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

2	15	03	2,08	01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Usaha Perawalan Dan Perbaikan Kapal yang dilertitlkan sesuai kebutuhan		1 Keg		85.905.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan		74,00		6.478.692.441					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentise Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Daerah		100%		34.007.500					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Yang Tersusun Sesuai Aturan Dan Tepat Waktu		1 Dokumen		21.292.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Yang Tersusun Sesuai Aturan Dan Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	1 Dokumen		1.935.500					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Yang Tersusun Sesuai Aturan Dan Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	1 Dokumen		1.960.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA		1 Dokumen		1.900.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Yang Tersusun Sesuai Aturan Dan Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	1 Dokumen		1.960.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Dokumen		2.310.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen		2.650.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		76		5.529.937.941					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Terbayarkan Tepat Waktu		1 Paket		5.015.908.541					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Terbayarkan Tepat Waktu		1 Paket		274.329.400					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Verifikasi keuangan Tepat waktu		5 Jns		223.780.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun tepat waktu		4 Jns		2.760.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Yang Tersusun Tepat Waktu		4 Jns		13.160.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		76		45.282.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					45.282.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		76		225.164.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan tiap Tahun		59 Ps		110.250.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian Yang dik<>ohah tepat waktu		1 Paket		10.980.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Terbayarkan Tepat Waktu		1 Paket		103.934.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Hasil E10luasiAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKP)		76		229.727.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

2	15	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Rekening Yang Terbayarkan Tepat Waktu		4 rek	7.065.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpakai Sesuai Kebutuhan		5 Jns	7.698.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Yang Dibayarkan Sesuai kebutuhannya		13 Be	34.930.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan Material Yang Terpakai Sesuai Kebutuhan		5 Jns	4.830.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Tertaksana Sesuai Kebutuhan		150 p d	175.204.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Hasil E10luasiAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKP)		76	47.700.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Terpakai Sesuai		7 Un	47.700.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil E10luasiAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKP)		76	154.368.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Didistribusikan sesuai kebutuhan		1000 Surat	12.140.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik yang terbayarkan tepat waktu		12 Bin	95.868.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantoryang terbayarkan tepat waktu		3 Jn	4.720.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umumyang terbayarkan tepat waktu		13 Or	41.640.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil E10luasiAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKP)		76	194.766.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak kendaraan yang terbayarkan tepat waktu		1 Paket	174.066.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin terbayarkan tepat waktu		1 Paket	20.700.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,13		Penataan Organisasi	Nilai Hasil E10luasiAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKP)		76	17.740.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	15	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Fasilitas pelayanan publik yang terpakai sesuai kebutuhan		4 Jns 1 0/8	17.740.000					DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11.140.689.079					
2	16				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				11.140.689.079					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik		85	2.008.015.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2,01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Yang di publis		400	2.008.015.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Regulasi teknis bidang informasi dan komunikasi publik yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 regulasi	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

2	16	02	2,01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	jumlah opini dan aspirasi publik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Opini	25.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2,01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah agenda setting pemerintah daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 agenda	7.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2,01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah konten komunikasi publik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 konten	7.855.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2,01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah diseminasi informasi publik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 media	230.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi yang tersedia dan dipublis melalui media center dan PLID	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 berita	70.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2,01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media yang menjalin kerjasama	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 media	1.583.160.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2,01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi yang meningkat kecakapannya		100 orang	20.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2,01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	pembentukan Komisi Informasi Kabupaten Pinrang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kali	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2,01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan sesuai analisis kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kali	65.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang memanfaatkan e-government		100	3.423.780.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2,01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo sandi		84	2.621.500.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2,01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Domain pada Domain Pemerintah Daerah Kab. Pinrang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 SKPD	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang memanfaatkan infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 SKPD	2.621.500.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2,02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Aplikasi publik dan pemerintah yang dimanfaatkan		28	802.280.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2,02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Pedoman Yang diadakan jumlah sosialisasi regulasi dan anggaran SPBE yang dilaksanakan sesuai analisa kebutuhan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 2 Kali	278.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2,02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah SKPD yang terlayani data Center	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 SKPD	151.500.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2,02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Pengguna Secure Socket Layer Pada Website dan Aplikasi Resmi OPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 SKPD	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2,02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah data elektronik perangkat daerah Yang tersedia	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 SKPD	27.780.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi perangkat daerah Yang tersedia Sesuai Analisa Kebutuhan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Aplikasi	150.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2,02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Sistem Yang Terintegrasi		5 Sistem	100.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah ASN dan Masyarakat yang meningkat kecakapannya dalam Bidang TIK	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	74.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2,02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Pelatihan terkait Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kali	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2,02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Cakupan Layanan Telekomunikasi Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Proporsi rumah tangga dengan akses internet Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 % 60 % 60 % 20 %	21.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100	5.708.894.079					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja disusun tepat waktu		13	71.410.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	27.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	4.028.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	5.179.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA yang disusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	4.070.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	4.795.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja skpd yang disusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen	19.417.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja skpd yang disusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	6.921.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen laporan Keuangan Perangkat Daerah		1	3.607.902.579					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase serapan anggaran gaji dan tunjangan ASN	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	3.235.775.579					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	81.445.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

2	16	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 orang	272.904.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	11.046.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran yang disusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	6.732.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset tersusun tepat waktu		2	7.689.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah laporan kebutuhan barang skpd milik daerah yang disusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	3.246.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan barang skpd milik daerah yang disusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	4.443.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12	266.867.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	128 lembar	36.250.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	25.117.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	tersedianya sistem dan pengelolaan informasi pegawai	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah dokumen evaluasi kinerja pegawai yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	5.500.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang meningkat kecakapannya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 ASN	200.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan pelayanan administrasi umum SKPD		12	246.482.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 buah	7.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 buah	2.807.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 buah	5.790.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlahbahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	396 eksamplar	23.460.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 item	7.425.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 kali	200.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah		46	242.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

2	16	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 unit	40.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 unit	185.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 gedung	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	7.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran pendukung atau bangunan lainnyagedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	10.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	905.700.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 surat	5.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 rekening	204.640.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 orang	696.060.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak pakai		34	360.843.500					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang layak jalan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	106.843.500					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang layak pakai	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	25.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya dalam kondisi baik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	29.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 gedung	200.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4.050.614.572					
2	17				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				4.050.614.572					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase program layanan izin usaha simpan pinjam	100%	100%	0					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	02	2,01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota			0					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

2	17	02	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam yang di fasilitasi dalam pemenuhan izin usaha dan izin pembukaan kantor cabang	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 usp	0					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	02	2,02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten		100%	0					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	02	2,02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi usaha simpan pinjam yang di fasilitasi dalam pemenuhan izin usaha dan izin pembukaan kantor cabang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 ksp	0					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dalam Wilayah Kabupaten Pinrang		100%	57.006.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	03	2,01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase KSP/USP Koperasi yang diperiksadan diawasi dalam lingkup kabupaten Pinrang		100%	57.006.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dalam wilayah kabupaten Pinrang	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50 ksp/usp koperasi	35.005.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	03	2,01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dalam wilayah kabupaten Pinrang	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50 ksp/usp koperasi	22.001.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi dalam wilayah Kabupaten Pinrang		100%	58.360.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	04	2,01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya		100%	58.360.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	04	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	60 ksp/usp koperasi	23.755.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	04	2,01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan koperasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 ksp/usp	34.605.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang terampil dan berdaya saing		100%	29.529.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	05	2,01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Koperasi yang dilaksanakan		100%	29.529.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	05	2,01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pendidikan manajemen koperasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50 orang	29.529.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan kuantitas produk usaha koperasi		100%	70.533.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	06	2,01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi dalam wilayah kabupaten Pinrang		100%	70.533.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

2	17	06	2,01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberdayakan untuk menjalin kemitraan dalam rangka peningkatan nilai usaha koperasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	110 koperasi	70.533.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro		100%	77.780.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	07	2,01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase usaha mikro yang diberdayakan		100%	77.780.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	07	2,01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang didata yang dalam pengembangan usahanya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50 usaha mikro	12.000.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	07	2,01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang ikut temu usaha	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50 usaha mikro	27.190.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	07	2,01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi izin usahanya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50 usaha mikro	0					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	07	2,01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan dalam pengembangan potensi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50 usaha mikro	0					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	07	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pameran yang diikuti UMKM dalam penyelenggaraan promosi prodak UMKM	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 kali	38.590.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro dalam wilayah kab.Pinrang		100%	41.676.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	08	2,01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro naik klasifikasi		100%	41.676.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	08	2,01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah usaha mikro yang difasilitasi naik kelas menjadi usaha kecil	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50 usaha mikro	41.676.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	3.715.730.572					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah		100%	53.178.300					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 dokumen	18.470.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan RKA yang terselesaikan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen	5.828.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan RKA perubahan yang terselesaikan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen	2.110.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen penyusunan DPA yang tersusun dan terselesaikan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen	4.270.300					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen penyusunan DPA perubahan yang tersusun dan terselesaikan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen	2.500.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

2	17	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan LKIP, LPPD, SPIP dan PK yang tersusun dan terselesaikan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 dokumen	10.000.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8 dokumen	10.000.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	3.090.741.972					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	2.848.264.472					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terlaksana	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 kegiatan	68.227.500					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honor ASN dan Non ASN yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	171.600.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 laporan	2.650.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah yang terlaksana			92.375.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	45 pasang	15.750.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen penyusunan Anjab, Evjab, ABK dan SKJ yang terselesaikan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 dokumen	5.545.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan penyusunan SKP yang terselesaikan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 laporan	1.080.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sumber daya manusia aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 ASN	70.000.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	150.582.800					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket alat listrik dan elektronik untuk bangunan kantor yg tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 paket	5.163.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	0 unit	0					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yg tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 paket	12.155.800					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan kantor yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	18.780.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

2	17	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang terbayarkan dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	114.484.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan		100%	50.000.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 unit	50.000.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana		100%	96.451.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan listrik dan internet yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	24 rekening	75.723.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 jenis	2.203.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan yang tersedia dan jasa kebersihan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	24 OB	18.525.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu		100%	182.401.500					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah surat tanda nomor kendaraan (STNK) untuk kendaraan dinas / operasinal yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 unit	112.801.500					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20 unit	13.600.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 gedung	56.000.000					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.720.966.307					
2	18				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				5.720.966.307					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Investasi iklim penanaman modal		Proyek PMDN 2.239, Proyek PMA 6	75.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	02	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi Investasi daerah			75.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Lokasi Pengembangan Investasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket pekerjaan	75.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN dan PMA		4,76%	515.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	03	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten		5 Kegiatan	515.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	03	2,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Buku dan Brosur Investasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Kegiatan	15.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi penanaman modal daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Kali	500.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten		Perizinan Usaha 2700, Perizinan Non Usaha 1740	225.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2,01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan perizinan penanaman modal yang akuntabel		100%	225.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2,01	01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah kegiatan dan waktu proses penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Kegiatan	30.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2,01	02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Kegiatan	30.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2,01	03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan layanan perizinan usaha dan non usaha PM secara berkala	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Laporan	15.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2,01	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan One Day Service, Film Pendek dan Jemput Bola dan Ceta Brosur layanan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Kegiatan	150.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pelaksanaan penanaman modal		PMDN: 1.944.822.870.453, PMA: \$ 144.661.327	80.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2,01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		10 Kegiatan	80.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2,01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Kegiatan	20.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2,01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan kegiatan LKPM,SKM dan Kebijakan PM dan Pelayanan Perizinan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Kegiatan	30.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2,01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan sosialisasi UMKM, Perizinan usaha secara OSS ,Bimtek Rajin dan Satgas percepatan Investasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Kegiatan	30.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase penyediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten /kota		Indeks SKM (85)	100.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	2,01			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	2,01	01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan penyajian dan pemanfaatan data serta peningkatan operasional dan pemeliharaan aplikasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Kegiatan	100.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	4.725.966.307					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 dokumen	32.715.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan Renja 2023	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	8.800.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2	18	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2023	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	5.380.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA 2022	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	6.200.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA 2023	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	2.200.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA 2022	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	2.835.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP, LPPD, SPIP, dan Perjanjian Kinerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Dokumen	7.300.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan		100%	3.330.851.307					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14 Bulan	2.855.237.807					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK, kegiatan makan minum, penggandaan / fotocopy, cetak, yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 Jenis kegiatan	337.568.500					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	18 Jasa	130.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	6.545.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Laporan	1.500.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan SKPD		100%	11.700.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Orang	11.700.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Ketrampilannya		100%	139.700.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian batik pegawai dan pakaian olahraga	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	136 Pasang	35.700.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 Kegiatan	4.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2	18	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Kegiatan	100.000.000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi umum yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan		3 Paket	136.000.000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik (Lampu pijar bateray kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket	8.000.000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Jenis barang	8.000.000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50 Kali	120.000.000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai analisa kebutuhan		9 Jenis Paket Pekerjaan	600.000.000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubel sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Jenis barang	10.000.000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Jenis barang	90.000.000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket pekerjaan	500.000.000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor		100%	315.000.000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening telepon,internet,SMS dan Listrik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Jenis	35.000.000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Jenis	280.000.000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai analisa kebutuhan		3 Kendaraan dinas	160.000.000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa penyediaan perizinan,jas sopir,jasa service,suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Kendaraan dinas	85.000.000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Jenis barang	15.000.000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan bangunan kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket pekerjaan	60.000.000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				6.873.740.065						

2	19				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA				6.873.740.065					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		74%, 5,80%	2.056.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2,01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				451.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	jumlah laporan data potensi kepemudaan yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	0					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	jumlah Wirausaha Muda yang mendapatkan pelatihan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 wirausaha muda	0					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2,01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pemuda/pelajar yang mengikuti pelatihan paskibraka	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	70 Pemuda/pel ajar	451.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2,02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan		72%	1.605.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2,02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga dan organisasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Lembaga/Or ganisasi	1.605.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi, Jumlah prestasi olahraga		45%	420.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah jasa tenaga pembersih sarana olahraga Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara dengan baik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang/Bulan 4 sarana olahraga	100.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				180.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah atlet hasil seleksi pada 5 (Lima) cabang olahraga untuk mengikuti kejuaraan pelajar antar daerah Jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota yang di ikuti	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 atlet 2 Kejuaraan	90.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan olahraga yang dilaksanakan terlaksananya turnamen olahraga gala desa	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kegiatan 1 Turnamen	90.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	persentase jumlah atlet yang berprestasi pada kejuaraan olahraga prestasi tingkat provinsi	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

2	19	03	2,03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				60.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah cabang olahraga yang di seleksi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 cabang olahraga	40.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah peserta mengikuti pelatihan wasit	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	0					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang berprestasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 atlet	10.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pendataan potensi keolahragaan yang disusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	10.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				80.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	persentase pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	terlaksananya pelatihan senam massal	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 pelatihan senam	0					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	lomba olahraga tradisional	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 lomba	0					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keterpenuhan prinsip Dasar kepramukaan		45%	0					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	04	2,01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				0					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	04	2,01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Pelatihan pengembangan SDM kepramukaan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50 Peserta	0					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			4.397.740.065					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Daerah		100%	58.192.500					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 %	30.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	4.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	6.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	4.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	4.680.500					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

2	19	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Dokumen	6.012.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	3.500.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		80	3.676.016.015					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 %	3.324.242.015					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jenis bahan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Jenis	50.401.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Jenis	280.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Laporan	10.686.500					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Jenis	10.686.500					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan realisasi keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	0					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		80	4.136.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Laporan	4.136.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		80	174.802.500					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga/batik PNS yang diadakan sesuai analisis kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	65 Pasang Pakaian	19.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis bahan pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Jenis	5.802.500					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Aparatur	150.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		80	224.066.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 komponen	1.000.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Jenis	2.266.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bahan bacaan	12.800.000					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

2	19	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Jenis	18.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Perjalanan dinas	190.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		80	59.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	1 Mobil	43.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan komputer pc	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	2 unit	16.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				147.719.500						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening layanan listrik yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	97.020.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pelayanan umum kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Jenis	50.699.500						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		80	53.807.550						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	4 Jenis	50.590.050						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Jenis	3.217.500						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				217.578.750						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	20				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				217.578.750						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral pemerintah kabupaten pinrang		100	217.578.750						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	20	02	2,01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral terintegrasi		45	217.578.750						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	20	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah data informasi pembangunan daerah yang tersedia dalam bentuk buku dan data elektronik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Item	150.888.750						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	20	02	2,01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah ASN yang meningkatkan kecakapannya dalam pengelolaan data statistik sektoral	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	176 ASN	30.690.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	20	02	2,01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	termanaatkannya sistem Meta data sektoral di SKPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 SKPD	20.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	20	02	2,01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 SKPD	16.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				481.500.000					
2	21				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				481.500.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	persentase SKPD pengguna layanan tingkat kematangan keamanan informasi		100	481.500.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	21	02	2,01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang memiliki Sistem Keamanan data dan informasi		45	481.500.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	21	02	2,01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Komunikasi persandian daerah tingkat SKPD yang dilaksanakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kali	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	21	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah nilai per area keamanan informasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Area	264.500.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	21	02	2,01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah skpd Yang memiliki sistem keamanan informasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 SKPD	217.000.000					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.772.000.000					
22	2				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				1.772.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase terlestarikannya cagar budaya		100 %	1.400.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	02	2,01			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah benda dan situs budaya yang dipelihara/ dilestarikan		46 Persen	600.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	02	2,01	01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terpeliharanya bangunan adat dan objek kebudayaan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	400.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	02	2,01	02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah pertunjukan budaya yang terlaksana	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kali	200.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	02	2,02			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kesenian daerah dan nilai budaya kearifan lokal kebudayaan yang dimanfaatkan		70 Persen	600.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	02	2,02	01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah pertunjukan kesenian yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kali	600.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	02	2,03			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM kebudayaan		100 Persen	200.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	02	2,03	02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah tenaga kebudayaan dan masyarakat dan penjaga situs yang mengikuti pelatihan dan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang	200.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Partisipasi Kelompok masyarakat terhadap kegiatan Kesenian Tradisional		60 %	300.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	03	2,01			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan		60 Persen	300.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	03	2,01	01		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	jumlah kegiatan kesenian tradisional daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	300.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

22	06					PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan, Pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		90 %	72.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	06	2,01				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah koleksi museum		90 Persen	72.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	06	2,01	01			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Sarana pendukung Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	72.000.000					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.251.683.234					
2	23					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				5.251.683.234					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks pembangunan literasi masyarakat		33..00%	930.297.732					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan binaan yang memiliki pengunjung		35%	734.582.832					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,01	01		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah bahan pustaka yang direstorasi Jumlah judul bahan pustaka yang dialihmediakan dalam bentuk digital Jumlah surat kabar yang dijilid	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	200 exemplar 80 buah 36 exemplar	9.105.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,01	02		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan dititik layanan Terlaksananya kegiatan penyiangan bahan pustaka	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4000 pemustaka 500 Eksamplar	20.000.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,01	03		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan bahan pustaka koleksi budaya nusantara dan koleksi konten lokal yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 Eksamplar	50.000.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,01	04		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan sekolah yang dibina sesuai standar perpustakaan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	30 Perpustakaa n sekolah	15.000.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,01	06		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pustakawan dan tenaga perpustakaan yang diberikan bimbingan/pelatihan tentang pengelolaan perpustakaan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	30 orang	0					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,01	08		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah pengadaan bahan pustaka yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2200 exemplar	615.399.032					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,01	09		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dikelola(terkatalog)	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2300 Eksamplar	10.078.800					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,01	10		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 database	15.000.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca		72.00	195.714.900					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,02	01		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah jasa petugas layanan perpustakaan yang terbayarkan tepat waktu Jumlah kunjungan layanan perpustakaan keliling dititik layanan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan 90 kunjungan	135.000.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	23	02	2,02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perpustakaan yang terpelihara	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 sarana	0						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta lomba bercerita TK SD Sekabupaten Pinrang Jumlah peserta pelatihan mendongeng Terlaksananya survey minat dan kegemaran membaca masyarakat	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	60 Siswa SD 35 orang 1 Kegiatan	47.714.900						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah peprustakaan desa yang dibina sebagai pusat informasi dan berkegiatan masyarakat	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Perpustakaa n Desa	13.000.000						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya ekspo perpustakaan melalui pdan promosi perpustakaan Terlaksananya pemilihan duta baca tingkat Daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan 1 Kegiatan	0						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikembangkan dan dilestarikan		5%	30.000.000						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	2,01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase naskah kuno yang dilestarikan		5%	30.000.000						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	2,01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang ditemukan ,diolah dan dialihmedikan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Eksamplar	30.000.000						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	2,02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	2,02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah bahan pustaka koleksi budaya nusantara yang terkelola	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 Eksamplar	0						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		50%	4.291.385.502						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi perangkat kerja daerah yang tersedia		100%	90.660.000						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	38.000.000						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	6.250.000						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	8.560.000						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	3.800.000						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	7.050.000						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun sesuai aturan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Laporan	16.500.000						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	23	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Dokumen	10.500.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	3.553.615.502					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan secara tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	38 ASN	3.268.265.502					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah iuran jaminan kesehatan Non ASN yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah makan minum rapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan 30 Non ASN 12 bulan	40.000.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan secara tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	19 Jasa	220.000.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun tersusun secara akurat dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	9.850.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran tersusun secara akurat dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	15.500.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100%	19.510.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan RKBU -SKPD yang tersusun secara akurat dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	2.960.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jasa pengelola barang dan asset yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah laporan barang dan aaset yang tersusun secara akurat dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Jasa 1 Laporan	16.550.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat Daerah		100%	211.150.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan baju olah raga /batik layanan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	68 Pasang baju	47.600.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersusun (ANJAB, EVJAB, SKJ)	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Dokumen	13.550.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 ASN	150.000.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100%	202.825.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	5.725.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	23	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	7.000.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak /penggandaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	7.000.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/ surat kabar bulletin yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	8.100.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material pameran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket	15.000.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	10.000.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan yang terkoordinasikan sesuai analisa kebutuhan secara efektif dan efesien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	25 Kegiatan	150.000.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah		50%	26.400.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Unit	0					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Unit	0					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Unit	26.400.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Unit	0					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan sarana gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	0					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		100%	106.735.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terdistribusikan secara tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	175 Surat	4.000.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah iuran retribusi sampah yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah rekening listrik yang terbayarkan secara tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan 12 Blan	61.000.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan pembersih dan iuran retribusi yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah jasa front office yang terbayarkan tepat waktu Jumlah pembersih yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan 2 Jasa 4 Jasa	41.735.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	23	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara		100%	80.490.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM,oli,Suku Cadang dan service kendaraan mobil Dinas/Operasional yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah jasa sopir kendaraan dinas /operasional yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah unit kendaraan Dinas/operasional yang laik jalan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan 1 Jasa 7 Unit	70.000.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan kantor yang terbayarkan secara tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	10.490.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Unit	0					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 sarana	0					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				155.817.750					
2	24				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				155.817.750					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja		75%	101.126.750					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2,01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dikelola		75%	33.112.750					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2,01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip yang diklasifikasi sesuai dengan klasifikasi arsip	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2000 Arsip	17.491.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2,01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip daerah yang terpelihara keamanannya dari hama dan serangga	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Depot Arsip	15.621.750					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2,01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD /Lembaga Pemerintahan yang dimonev diawasi tata kelola arsipnya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 SKPD	0					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2,02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis daerah yang dikelola		50%	25.900.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2,02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah data arsip Sekolah dan SKPD yang dikumpulkan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Arsip	10.375.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2,02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah dokumen arsip statis yang diakuisi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Arsip	15.525.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2,03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase data arsip yang dimasukkan dalam JIKN dan SIKN		22%	42.114.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2,03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah daftar arsip yang dimasukkan dalam JIKN	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Daftar arsip	21.330.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	24	02	2,03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah opd/lembaga yang diberikan pembinaan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 SKPD	20.784.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan		35%	54.691.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2,01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK		5%	24.231.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2,01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah OPD/Desa/Kel/Lembaga Pemerintah yang dimonev untuk penilaian arsip yang akan dimusnahkan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 SKPD	10.391.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2,01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah dokumen Peraturan Bupati (PERBUP) tentang penyusutan arsip yang tersusun sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	13.840.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2,04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip dan arsip hasil alih media yang sesuai NSPK		100%	30.460.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2,04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip sekolah ,SKPD,arsip Provinsi,dialihmediakan dalam bentuk elektronikyang Tersedianya dokumentasi arsip dalam bentuk audio visual	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100.879 Arsip 1 kegiatan	20.815.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2,04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip yang disahkan(Autentifikasi arsip)sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	500 Arsip	9.645.000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				84.039.608.826					
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				12.763.380.176					
3	25				DINAS PERIKANAN				12.763.380.176					DINAS PERIKANAN
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume produksi perikanan tangkap		15516,95 ton	2.210.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	03	2,01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi ikan konstribusi hasil Kelompok nelayan		6773,15 ton	2.030.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	03	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan perikanan tangkap yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	30.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	03	2,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana perikanan tangkap yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Jenis	800.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	03	2,01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana perikanan tangkap yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Jenis	1.200.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	03	2,02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha		121 RTP	80.000.000					DINAS PERIKANAN

3	25	03	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	jumlah kelompok nelayan meningkat klas	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 KELOMPOK	50.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	03	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB terbentuk dan Naik Kelas	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 KUB	30.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	03	2,03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang dikelola sesuai standar operasional		1 TPI	100.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	03	2,03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah KUB terbentuk dan Naik Kelas	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 KUB	100.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume produksi perikanan budidaya		68.408,15 ton	3.685.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	04	2,01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha perikanan budidaya yang diterbitkan		6 izin	50.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	04	2,01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah cakupan layanan penerbitan izin usaha perikanan budidaya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 buah	50.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	04	2,02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Kelompok Binaan		29860,16	645.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	04	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya ikan meningkat kapasitasnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 orang	85.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	04	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pokdakan terbentuk dan naik kelas	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 KELOMPOK	50.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	04	2,02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pembudidaya yang menerapkan informasi dan teknologi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 KELOMPOK	510.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	04	2,04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produktivitas hasil pengelolaan pembudidaya ikan (Ton/Ha/Thn).		3,14 ton/Ha/Thn	2.990.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	04	2,04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidaya ikan yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	50.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	04	2,04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidaya ikan yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis	1.800.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	04	2,04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidaya ikan yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	700.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	04	2,04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang dimonitoring dan dievaluasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Lokasi	75.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	04	2,04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah kelompok pembudidaya ikan air tawar dibina	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 KELOMPOK	80.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	04	2,04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	jumlah cakupan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan di darat	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lokasi	35.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	04	2,04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah perencanaan / pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidaya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lokasi	250.000.000					DINAS PERIKANAN

3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi		1.176,76 ton	850.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	06	2,01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah tanda daftar pengolahan hasil perikanan bagi usaha mikro dan kecil yang diterbitkan		9 izin	50.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	06	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data pengolahan dan pemasar yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	50.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	06	2,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Pengolah dan pemasar yang dibina		8 kelompok	100.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	06	2,02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Poklashar yang dibina	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Poklashar	100.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	06	2,03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jenis bahan baku industri pengolahan ikan yang disediakan		8 jenis	700.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	06	2,03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Poklashar yang difasilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Poklashar	700.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100	6.018.380.176					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tepat waktu		4 dokumen	159.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Dokumen	27.500.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Dinas Perikanan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	11.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKPA Dinas Perikanan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	27.500.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Dinas Perikanan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	30.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA Dinas Perikanan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	18.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan realisasi capaian kinerja	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Dokumen	35.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Dokumen	10.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran sesuai target yang ditentukan		93 %	4.701.780.176					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN Dinas Perikanan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	47 ASN	4.273.289.226					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedia fasilitas Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 jenis	78.490.950					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	18 orang	285.000.000					DINAS PERIKANAN

3	25	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 laporan	30.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan periodik tersusun secara akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	17 laporan	35.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Admnsitrasi BMD SKPD		1 laporan	18.700.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan RKBU SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 laporan	7.700.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset SKPD akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 laporan	11.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tkt pelayanan Administrasi Kepegawaian		100%	161.400.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olah raga	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	60 buah	26.400.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 laporan	13.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan penilaian sasaran kinerja pegawai Perikanan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 laporan	22.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek yang dilaksnakan secara efektif sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20 ASN	100.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah		80%	305.500.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 jenis	11.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 jenis	11.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	21 explar/bln	16.500.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah bahan /material tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 paket	22.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas keluar daerah teregisterasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	25 kali	245.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang urusan pemerintah		100%	188.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 jenis	88.000.000					DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 jenis	100.000.000					DINAS PERIKANAN

3	25	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	275.000.000						DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening layanan listrik, telepon dan air yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	36 rekening	220.000.000						DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 orang	55.000.000						DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi baik barang milik daerah		100%	209.000.000						DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas/oprasional yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Unit	121.000.000						DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	persentase mebel dalam kondisi baik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	90 persen	5.500.000						DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara seuia analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Unit	27.500.000						DINAS PERIKANAN
3	25	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 %	55.000.000						DINAS PERIKANAN
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				369.000.000						
3	26				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA				369.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan Wisatawan		70.000 orang	206.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2,01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				145.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2,01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah jasa petugas lapangan Jumlah peserta duta wisata Jumlah peserta duta wisata tk.provinsi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang/Bulan 50 peserta 2 Orang	145.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2,02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				35.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2,02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pelatihan pengelolaan kawasan pariwisata	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Pelatihan	35.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2,03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				16.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2,03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembuatan saluran pembuangan air kolam sulili	Kab. Pinrang, Paleteang, Mamminasae	1 Kolam	16.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2,04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2,04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengajuan permohonan izin TDUP yang ditindaklanjuti	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Permohonan	10.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2,04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	pelatihan pembinaan dan pengawasan pariwisata	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Pelatihan	0						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten		1,69%	53.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	03	2,01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				53.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	03	2,01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi pariwisata yang diikuti	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Pameran	53.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

3	26	03	2,01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata yang diikuti jumlah tim marketing digital foto dan videografer yang terbayarkan honoranya	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Pameran 4 orang	0						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tenaga kerja pariwisata yang dibina memiliki kompetensi SDM pariwisata		100%	110.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	05	2,01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				60.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	05	2,01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan pengembangan kompetensi sdm pariwisata Sosialisasi pengembangan kompetensi SDM pariwisata	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Pelatihan 10 Kali	35.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	05	2,01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Pelatihan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50 Peserta	25.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	05	2,02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				50.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	05	2,02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta pelatihan pendampingan ekonomi kreatif	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50 Peserta	50.000.000						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				62.583.004.986						
3	27				DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				53.517.099.998						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian tanaman hortikultura utama (cabe merah) per tahun (Ton)		2077 Ton	2.700.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	02	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Produksi pertanian tanaman hortikultura utama (cabe merah) per tahun (Ton)		2077 Ton	2.700.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

3	27	02	2,01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Alat Tanam Jagung yang diserahkan kepadamasyarakat Jumlah bantuan Alat dan Mesin Pertanian Traktor R2yang diserahkan kepada masyarakat Jumlah Bantuan Cultivator yang diserahkan kepadamasyarakat Jumlah Handsprayer Elektrik yang diadakan Jumlah Pompa Air 2 Inchi Lengkap yang diadakan Terlaksananya Pengawasan Pupuk NPK Terlaksananya Pengawasan Pupuk Organik Terlaksananya Pengawasan Pupuk SP-36 Terlaksananya Pengawasan Pupuk urea Terlaksananya Pengawasan Pupuk ZA Tersedianya Alat pemeliharaan Prasarana Pertanian(Escavator) Tersusunnya Regulasi Perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan (LP2B)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit 50 unit 5 unit 10 buah 20 unit 35164 ton 55833 ton 11681 ton 36310 ton 10249 ton 13 unit 48000 Ha	1.700.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya sekolah lapang GAP untuk petani Tersedianya benih bawang merah Tersedianya benih/bibit tanaman hortikultura Tersedianya bibit buah- buahan untukpengembangan kawasan buah Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan bidanghortikultura	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Angkatan 3700 Kg 650 sachet 2200 pohon 5 Laporan	1.000.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian tanaman pangan utama (Padi) per hektar per tahun (Ton/Ha)		6,25 Ton/Ha	31.628.099.998					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	03	2,01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas pertanian tanaman pangan utama (Padi) per hektar per tahun (Ton/Ha)		6,25 Ton/Ha	4.050.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	03	2,01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Terlaksananya penangkaran benih pokok padi(Mandiri Benih) Terlaksananya pengembangan padi in hibrida VUB Terlaksananya pengembangan padi organik Terlaksananya pertanaman Porang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Ha 600 Ha 150 Ha 5 Ha	1.300.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	03	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Pemberdayaan GP3A pada Daerah Irigasi (DI)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 paket	2.750.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Produktivitas pertanian tanaman pangan utama (Padi) per hektar per tahun (Ton/Ha)		6,25 Ton/Ha	27.578.099.998					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

3	27	03	2,02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Yang Terbangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 paket	7.000.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	03	2,02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Yang Terbangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 paket	600.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	03	2,02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani (JUT) Yang Terbangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105 paket	15.507.099.998					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	03	2,02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit Yang Terbangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 paket	500.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	03	2,02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu air Yang Terbangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 paket	500.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	03	2,02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yang di Rehabilitasi	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yang di Rehabilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 paket	471.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	03	2,02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Irigasi Air Tanah Yang Terbangun Jumlah Jembatan tani Yang Terbangun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 paket 15 paket	3.000.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah PDRB Pertanian Komoditi Tanaman Pangan dan Komoditi Tanaman Hortikultura (Rp. 000.000,-)		107%	650.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	05	2,01		Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan bina kelompok petani per tahun (%)		20%	650.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	05	2,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT, Pestisida, dan Alat Pengendalian	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 jenis	500.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	05	2,01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tersedianya Data Curah Hujan sebagai dasar prediksi curah hujan dan Bencana Alam	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Titik	150.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (NTP)		107%	220.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	06	2,01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tukar Petani (NTP)		107%	220.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	06	2,01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Tersedianya Dokumen dan sarana informasi terkait pemberian Izin Usaha Pertanian	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	20.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	06	2,01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	terwujudnya Penilaian Kelayakan Peningkatan Promosi Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 paket	100.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	06	2,01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengusaha tentang legalitas usaha	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kecamatan	100.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok petani penerima bantuan (%)		20 %	1.600.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	07	2,01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok petani penerima bantuan (%)		25 %	1.600.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	07	2,01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	NTP diatas 100	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112 point	500.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

3	27	07	2,01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	NTP diatas 100	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112 point	200.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	07	2,01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang meningkatkapasitasnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Orang	900.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	16.719.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	170.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja, Renja Perubahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Dokumen	50.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA 2023	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	10.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan RKA Perubahan 2022	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	10.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA 2023	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	10.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan DPA Perubahan 2022	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	10.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LKJIP ,LPPD dan SPIP/Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perjanjian Kinerja (Laporan Tahunan)	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 Dokumen	70.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Evaluasi Renja dan Evaluasi Renstra	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Dokumen	10.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan		100 %	14.880.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	132 Orang	14.000.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makan minum rapat/tamu SKPD Tersedianya ATK Administrasi Umum Tersedianya BPJS Ketenagakerjaan Non PNS	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan 12 Bulan 95 Orang	350.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKU pelaporan, honor PA/KPA, Bend Peng/Pen, PPK,PPTK, PPK dan staf, pengrusdan penyimpan barang	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	500.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan tahunan SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	20.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	10.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	60.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

3	27	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah(RKBMD) SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	10.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pengelolaan aset SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	50.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah		100 %	400.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas, pakaian Olahraga PNS dan Pakaian Lapangan yang diadakan Pakaian Olahragasesuai analisis Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	200 Orang	170.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen ANJAB, EVJAB, SKJ DAN PROBIS	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Dokumen	25.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	penilaian kinerja ASN	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	132 Orang	35.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan an sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	25 Orang	170.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	339.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8 jenis	7.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak spanduk hari besar nasional, Map, dan Buku Database SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 paket	7.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundangundangan/ Bahan Bacaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	43 unit	25.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	21 kali	300.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	85.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeleur dinas dan Kantor yang diadakansesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 unit	15.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakansesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 unit	60.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 unit	10.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	315.000.000						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

3	27	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang keluar	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3500 Surat	15.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik, air dan Telp / Internet	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	200.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan dan pengamanan kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 jasa	100.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	470.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Roda Dua Roda empat	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	19 unit 2 unit	250.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi sesuai analisis kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 unit	200.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana Gedung Kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 jenis	20.000.000					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN				9.065.904.988					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase meningkatnya produksi produktivitas dan daya saing komoditas peternakan dan perkebunan pertahun		8,50%	1.280.520.900					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	02	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya mutu dan nilai tambah		25%	150.880.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	02	2,01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Jumlah kegiatan pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana teknologi yang dilaksanakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	150.880.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	02	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produktivitas Tanaman perkebunan unggulan		3%	571.507.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	02	2,02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dikembangkan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20000 pohon	260.500.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	02	2,02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah paket sarana upaya meningkatkan produksi yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	160.446.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	02	2,02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pendampingan ke kelompok tani perkebunan yang dilakukan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	150.561.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	02	2,03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase meningkatnya mutu peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak		90%	299.950.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	02	2,03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah kelahiran ternak hasil IB dan kawin alam	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	605 Ekor	110.000.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	02	2,03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit ternak yang diserahkan kepada masyarakat Jumlah sarana pembibitan ternak yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket 1 Paket	189.950.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

3	27	02	2,05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah ternak layak bibit yang dibudidayakan		50%	258.183.900					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	02	2,05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah penyediaan sarana operasional instalasi pembibitan ternak	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	200.725.000				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	02	2,05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah bulan pelaksanaan pengawasan dan pendampingan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	57.458.900				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase meningkatnya produksi produktivitas dan daya saing komoditas peternakan dan perkebunan pertahun		8,50%	50.000.000				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	03	2,01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya kualitas prasarana kawasan dan komoditas perkebunan		10%	50.000.000				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	03	2,01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah rancangan masterplan pengembangan perkebunan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (hpms) 4% pertahun		4%	751.366.000				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	04	2,01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase menurunnya jumlah kasus hewan menular strategis		4%	366.043.000				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	04	2,01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ketersediaan vaksin AI, Brucella ST19, dan SE yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	200.150.000				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	04	2,01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan vaksin anthrax	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	165.893.000				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	04	2,02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase menurunnya jumlah kasus hewan menular strategis		4%	39.570.000				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	04	2,02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan ternak yang diperiksa pada hari besar keagamaan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2800 Ekor	39.570.000				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	04	2,03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase menurunnya jumlah kasus hewan menular strategis		4%	254.903.000				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	04	2,03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Ketersediaan Obat, Bahan Kimia, dan Bahan Material Pusat Kesehatan Hewan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	84.153.000				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	04	2,03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan medik veteriner	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	170.750.000				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	04	2,04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Presentase menurunnya jumlah kasus hewan menular strategis		4%	90.850.000				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	04	2,04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pemeriksaan ante mortem dan post mortem	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1900 Ekor	50.000.000				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	04	2,04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang di dampingi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit Usaha	40.850.000				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

3	27	05				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	presentase menurunnya serangan hama dan opt tanaman perkebunan		4%	83.750.000						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	05	2,01			Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Presentase menurunnya serangan hama dan OPT tanaman perkebunan		4%	83.750.000						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	05	2,01	01		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang ikut pendampingan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	83.750.000						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	6.900.268.088						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	94.418.000						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	30.000.000						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.918.000						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	7.500.000						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	6.500.000						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	7.500.000						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	28.500.000						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	8.500.000						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		12 Bulan	5.434.289.088						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	5.105.989.088						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam satu tahun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	67.450.000						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa adm yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	250.750.000						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.200.000						DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

3	27	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4.900.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	16.237.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah lingkup SKPD yang tersedia tepat waktu dan sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	650.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan asset lingkup SKPD yang tersedia tepat waktu dan sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	15.587.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	132.058.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	20.000.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Stel	24.500.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang tersusun menurut aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	9.340.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja pegawai yang tersusun menurut aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	14.718.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Bimtek implementasi perundang-undangan yang di ikuti pelaksanaannya selama satu tahun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Kegiatan	63.500.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	200.500.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	3.000.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	4.500.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	5.000.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Jenis	17.000.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan material pameran pembangunan yang tersedia	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	10.000.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi yang terlaksana sesuai kebutuhan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Kali	161.000.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

3	27	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketercapaian Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	650.000.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	450.000.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	100.000.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeler kantor yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Macam	50.000.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang diadakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Macam	50.000.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	131.500.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk yang di disposisi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2500 Surat	3.500.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan layanan listrik dan telepon yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	98.000.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	30.000.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			241.266.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan jasa perizinannya dan pemeliharaannya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	170.266.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	21.000.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab dan terpelihara	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	50.000.000					DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				55.820.000					
3	29				DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				55.820.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		92,22%	50.000.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi		92,22%	50.000.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	2,07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor		10 Unit	50.000.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kabupaten/Kota		100%	5.820.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	05	2,01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan pemanfaatan langsung panas bumi yang memiliki izin di Kabupaten/Kota		100%	5.820.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	05	2,01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	JumlahPenerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5.820.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.510.540.115					
3	30				DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				1.510.540.115					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan perdagangan yang memiliki dokumentasi perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku		75%	38.702.140					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	02	2,01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat pembelian dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)		100%	30.224.140					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	02	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko Swalayan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 %	30.224.140					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	02	2,02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Gudang yang telah memiliki izin sesuai aturan		20%	8.478.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	02	2,02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG Persentase penerbitan TDG	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 % 20 %	8.478.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat ber-SNI		33%	1.242.059.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	03	2,01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan sarana perdagangan sesuai analisa kebutuhan		76,47%	520.000.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	03	2,01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	520.000.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	03	2,02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pasar rakyat yang dikelola dengan standar mutu pasar sehat		93,06%	722.059.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	03	2,02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola Pasar Rakyat yang terlatih dan terampil	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 orang	30.849.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3	30	03	2,02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola Pasar Rakyat yang memperoleh jasa tenaga lapangan sesuai aturan dan tepat waktu	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 orang	691.210.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan penting antar waktu		<9%	62.425.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	04	2,01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase laporan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting yang disampaikan tepat waktu		100%	18.830.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	04	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 laporan	18.830.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	04	2,02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan penting antar wilayah		<9%	22.770.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	04	2,02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pemantauan harga dan stok barang pokok dan barang penting pada pasar rakyat	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 %	22.770.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	04	2,03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk		55%	20.825.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	04	2,03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	20.825.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Ekspor Barang dan Jasa (Ekspor Bersih Perdagangan)		-437,27 Milyar Rp	35.739.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	05	2,01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk lokal yang dipromosikan sebagai produk komoditi bernilai ekspor		86,53%	35.739.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	05	2,01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran dagang lokal yang diikuti	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kali	29.189.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	05	2,01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah produk komoditi bernilai ekspor	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 produk/kom oditi	6.550.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pasar Rakyat Tertib Ukur		50,00%	126.114.975					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	06	2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		82,76%	126.114.975					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan Persentase pemenuhan sumber daya kemetrologian yang terampil dan terlatih	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.72 % 40 %	66.659.975					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3	30	06	2,01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku Persentase pengawasan alat UTPP sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 % 82.72 %	59.455.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Barang Produksi Dalam Negeri Lokal yang diperdagangkan di Toko Swalayan		1,4%	5.500.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	07	2,01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pemenuhan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai analisa kebutuhan		52%	5.500.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	07	2,01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Peningkatan Penggunaan produk dalam negeri dalam tahun berjalan		1 Kali	5.500.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				6.653.863.549					
3	31				DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				6.653.863.549					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		55%	372.797.165					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	02	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan bina kelompok pengrajin		11%	372.797.165					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	02	2,01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 %	10.750.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	02	2,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM Pangan yang memiliki sertifikat halal	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50 IKM	45.000.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	02	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang memperoleh bantuan peralatan untuk mendukung proses produksi Jumlah IKM yang telah mengikuti promosi bidang industri yang dapat diakses masyarakat Jumlah IKM yang terampil dan terlatih	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	716 IKM 142 IKM 416 IKM	304.364.165					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	02	2,01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah IKM penerima bantuan dengan bantuan kondisi baik tahun berjalan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12.683.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		5%	29.050.000					

3	31	03	2,01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait, Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait, Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota		75%, 100%, 100%	29.050.000						DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	03	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0 %	22.230.000						DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	03	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan pemantauan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 perusahaan	6.820.000						DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini		55%	11.900.000						DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	04	2,01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan pemegang IUI,IPUI, IUKI dan IPKI dalam penyampaian data ke SIINas		15%	11.900.000						DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	04	2,01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Cakupan data dan informasi industri Kabupaten melalui SIINas	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	5.000.000						DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	04	2,01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	6.900.000						DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		92,22%	6.240.116.384						DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3	31	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu		100%	40.980.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 dokumen	25.950.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana anggaran yang berkualitas dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen	2.665.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rencana Perubahan anggaran yang berkwalitas dan tepat waktu	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	3.290.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang berkualitas dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen	2.665.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan anggaran yang berkwalitas dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen	3.290.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	18 Laporan	3.120.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan		95%	4.867.805.344					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang memperoleh gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu dan sesuai aturan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	53 orang	4.632.832.344					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Item	88.363.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan yang memperoleh Honorarium secara tepat waktu dan sesuai aturan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	13 orang	134.200.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 laporan	7.350.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	18 laporan	5.060.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang		100%	38.643.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan asset yang berkualitas dan tepat waktu	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	38.643.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah sesuai aturan		100%	8.270.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 laporan	8.270.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik		100%	147.300.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3	31	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah PNS/ASN yang menggunakan pakaian khusus	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	55 pasang	27.300.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN/PNS yang mengikuti Bimtek	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20 orang	120.000.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		85%	352.779.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	11 Item	5.245.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 item	5.315.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 item	49.350.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	17 surat kabar	11.760.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	75 kali	206.109.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem informasi berbasis web dalam pemenuhan kepuasan masyarakat	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 aplikasi	75.000.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi		75%	238.580.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas /operasional	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 unit	80.000.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Unit	50.000.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 unit	103.300.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	5.280.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	201.400.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terdistribusi secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1200 surat	7.200.900					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bangunan pemerintah yang prasarana komunikasi, sumber daya air dan listriknya tersedia secara optimal	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Unit	18.824.100					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorer yang memperoleh honorarium secara tepat waktu dan sesuai aturan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	25 orang	175.375.000					DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3	31	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		75%	344.359.040						DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang laik jalan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	26 unit	163.640.200						DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainJumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara dalam kondisi baik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	32 unit	20.720.000						DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/tereha bilitasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Unit	150.000.000						DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi dalam kondisi baik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Unit	9.998.840						DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				Rp 104.000.000						
3	32				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				Rp 104.000.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase partisipasi warga, pemerintah setempat dan instansi terkait yang mengikuti Musyawarah penetapan kawasan'		100%	90.000.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	02	2,01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Besaran pemerataan pembangunan berbasis kawasan		100%	90.000.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	02	2,01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah lahan pemukiman warga di kawasan Transmigrasi yang terdata	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 KK	25.000.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	02	2,01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah stakeholder dan SKPD terkait yang mengikuti Fokus Grup Diskusi Pembangunan kawasan transmigrasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 orang	15.000.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	02	2,01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah lokasi yang tersedia untuk pembangunan kawasan transmigrasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lokasi	50.000.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi yang terpenuhi		100%	14.000.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	03	2,01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 Daerah Kab/Kota yang terserap		100%	14.000.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	03	2,01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Tersedianya sarana dan prasarana hunian fisik sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Paket	14.000.000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	03	2,01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah warga Transmigrasi yang mengikuti Pelatihan		0	0						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi yang terpenuhi		0	0						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3	32	04	2,01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah satuan pemukiman yang mandiri		0	0					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	04	2,01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah SDM pengelola satuan permukiman transmigrasi yang mengikuti pelatihan ketransmigrasian		0	0					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	04	2,01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi di satuan permukiman Transmigrasi		0	0					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				97.099.681.327					
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				54.810.444.135					
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				54.810.444.135					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		90%	8.305.050.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen/laporan terkait administrasi tata pemerintahan yang tersusun			449.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah bahan/data terkait penataan administrasi pemerintahan yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi terkait penataan adm.pemerintahan yang terlaksana secara efektif dan efisien Jumlah laporan LKPJ, SPM, Rakerda yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 bahan/data 14 koordinasi 3 laporan	205.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah bahan/data terkait pengelolaan administrasi kewilayahan yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi terkait pengelolaan adm.kewilayahan yang terlaksana secara efektif dan efisien Jumlah laporan Topo Nimi (Rupa Bumi) yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 bahan/data 12 koordinasi 1 laporan	119.300.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah bahan/data terkait fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi terkait fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien Jumlah laporan LPPD yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 bahan/data 14 koordinasi 1 laporan	124.700.000					SEKRETARIAT DAERAH

4	01	02	2,02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen/laporan terkait pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang tersusun			6.691.150.000						SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah bahan/data terkait fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi terkait fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual yang terlaksana secara efektif dan efisien Jumlah laporan terkait fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 bahan/data 8 koordinasi 1 laporan	6.570.000.000						SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah bahan/data evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan sosial yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi terkait evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja Kesejahteraan sosial yang terlaksana secara efektif dan efisien Jumlah laporan terkait evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja Kesejahteraan sosial yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 bahan/data 4 koordinasi 1 laporan	71.450.000						SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah bahan/data pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang terlaksana secara efektif dan efisien Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 bahan/data 3 koordinasi 1 laporan	49.700.000						SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi hukum yang tersedia			723.500.000						SEKRETARIAT DAERAH

4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah koordinasi, konsultasi dan evaluasi produk hukum dan permasalahan hukum lainnya yang terlaksana secara efektif dan efisien Jumlah naskah akademik yang tersusun sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah Jumlah produk hukum daerah yang tersusun dan terfasilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 koordinasi 1 naskah akademik 500 produk hukum	354.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum yang terfasilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 bantuan hukum	323.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah jenis produk hukum yang terdokumentasi sesuai aturan yang berlaku Jumlah sistem informasi publikasi hukum yang termutakhirkan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 jenis 1 sistem	46.500.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah fasilitasi kerjasama daerah yang tersedia			441.400.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerja sama dalam negeri yang terfasilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 kerjasama	420.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah kerja sama dalam negeri yang terfasilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 kerjasama	21.400.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan		90%	1.885.100.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2,01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen/laporan terkait pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tersusun			520.700.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen 4 koordinasi	75.700.000					SEKRETARIAT DAERAH

4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah bahan/data terkait pengendalian dan distribusi perekonomian yang tersedia Jumlah dokumen terkait pengendalian dan distribusi perekonomian yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi terkait pengendalian dan distribusi perekonomian yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 bahan/data 1 dokumen 3 koordinasi	313.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah bahan/data terkait perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang tersedia Jumlah dokumen terkait perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi terkait perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 bahan/data 1 dokumen 3 koordinasi	37.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah bahan/data terkait koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD yang tersedia Jumlah dokumen terkait koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 bahan/data 1 dokumen 3 koordinasi	95.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2,02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen/laporan terkait pelaksanaan administrasi pembangunan yang tersusun			270.600.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah bahan/data terkait fasilitasi penyusunan program pembangunan yang tersedia, Jumlah dokumen terkait fasilitasi penyusunan program pembangunan yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi terkait fasilitasi penyusunan program pembangunan yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 bahan/data 1 dokumen 3 koordinasi	97.000.000					SEKRETARIAT DAERAH

4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah bahan/data terkait pengendalian dan evaluasi program pembangunan yang tersedia Jumlah dokumen terkait pengendalian dan evaluasi program pembangunan yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi terkait pengendalian dan evaluasi program pembangunan yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 bahan/data 1 dokumen 3 koordinasi	106.300.000						SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah bahan/data terkait pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang tersedia Jumlah dokumen terkait pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi terkait pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 bahan/data 1 dokumen 3 koordinasi	67.300.000						SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang tersedia			1.003.700.000						SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan barang dan jasa yang dikelola sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130 pengadaan	713.000.000						SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah layanan pengadaan secara yang dikelola sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130 layanan	175.000.000						SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 kegiatan	115.700.000						SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2,04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen terkait pemantauan kebijakan sumber daya alam yang tersusun			90.100.000						SEKRETARIAT DAERAH

4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah bahan/data terkait koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian,kehutanan,kelautan,dan perikanan yang tersedia Jumlah dokumen terkait koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian,kehutanan,kelautan,dan perikanan yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian,kehutanan,kelautan,dan perikanan yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 bahan/data 1 dokumen 3 koordinasi	32.000.000						SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2,04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah bahan/data terkait koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup yang tersedia Jumlah dokumen terkait koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 bahan/data 1 dokumen 3 koordinasi	28.700.000						SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2,04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah bahan/data terkait koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air yang tersedia Jumlah dokumen terkait koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 bahan/data 1 dokumen 3 koordinasi	29.400.000						SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100%	44.620.294.135						SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan			265.785.000						

4	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah bahan/data terkait dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan Jumlah dokumen Renja (Renja Pokok / Perubahan) dan Renstra yang tersusun sesuai aturan, Jumlah koordinasi terkait penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 bahan/data 3 dokumen 3 koordinasi	86.700.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen	19.300.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen	21.180.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen	15.370.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen	22.435.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen/laporan LKjIP Setda, PK Setda, Cashcading Kinerja Setda, Rencana Aksi Setda,, LPPD Setda, SPIP Setda yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 dokumen	69.400.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan Evaluasi Renja dan Evaluasi Renstra yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 dokumen	31.400.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen terkait administrasi Keuangan Yang Tersusun sesuai aturan			17.173.410.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya secara tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	156 orang	14.800.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Penyediaa Administrasi sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156 orang	1.721.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan/data terkait penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun sesuai aturan Jumlah kegiatan terkait penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 bahan/data 4 kegiatan	623.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen 4 kegiatan	16.830.000					SEKRETARIAT DAERAH

4	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen laporan semesteran yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	12.580.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan terkait administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Yang Tersusun sesuai aturan			40.900.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	3.500.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bahan/data terkait rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun sesuai aturan Jumlah laporan asset yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 bahan/data 1 laporan	37.400.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan			569.230.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 sarana/prasa rana	7.700.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156 pakaian dinas	170.500.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengelolaan administrasi pegawai lingkup sekretariat daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	156 orang	3.500.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 sistem	2.530.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah data penilaian kinerja (SKP) yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156 data	22.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 sosialisasi	113.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diadakan sesuai aturan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Bimtek	250.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas terkait administrasi umum yang tersedia		9 fasilitas	4.547.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	50.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	50.000.000					SEKRETARIAT DAERAH

4	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		3 Paket	450.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 jenis	140.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11820 bahan bacaan	755.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan baku bangunan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 paket	300.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang terlaksana sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Fasilitas	300.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan sesuai analisa kebutuhan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4000 rapat koordinas	2.500.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bahan data terkait dukungan pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 bahan/data	2.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan terkait barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		2 jenis	2.065.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas Operasional	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 kendaraan	1.500.000.000					
4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 mebel	150.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 peralatan	415.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		4 Jenis	11.992.069.135					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa tenaga administrasi persuratan yang terbayarkan secara tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 jasa	115.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening kawat faksimili/internet yang terbayarkan tepat waktu Jumlah rekening lampu jalan umum yang terbayarkan tepat waktu Jumlah rekening layanan air yang terbayarkan tepat waktu Jumlah rekening layanan listrik yang terbayarkan tepat waktu Jumlah rekening layanan telpon yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 rekening 63 rekening 8 rekening 24 rekening 16 rekening	10.123.069.135					SEKRETARIAT DAERAH

4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan terbayarkan secara tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 paket	520.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia dan terbayarkan secara tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 jasa	1.234.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia			3.836.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa sopir yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kendaraan dinas operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9 Orang 83 Kendaraan 83 STNK	1.750.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Mebel	11.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 peralatan/m esin	75.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhab/terpelihara secara rutin	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Gedung	2.000.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah data terkait peningkatan pelayanan BLUD			15.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bahan/data terkait pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi terkait pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 bahan/data 2 koordinasi	15.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi terkait administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang tersedia			894.000.000					
4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan Kepala daerah dan wakil Kepala daerah yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Tahun	172.000.000					SEKRETARIAT DAERAH

4	01	01	2,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pasang Pakaian Dinas (PDH) Bupati dan wakil Bupati beserta ajudan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah pasang Pakaian Dinas Upacara (PDU) Bupati dan Wakil Bupati beserta ajudan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah pasang Pakaian Sipil Harian (PSH) Bupati, Wakil Bupati, Ajudan, aparatur yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah pasang Pakaian Sipil Resmi (PSR) Bupati dan Wakil Bupati beserta ajudan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8 pasang 4 pasang 8 pasang 8 pasang	148.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket medical chek up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai aturan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket	50.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket	524.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang tersedia			1.573.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	1.073.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	420.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Paket	80.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,13		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen/laporan terkait penataan organisasi yang tersusun			749.500.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah bahan/data terkait kelembagaan dan analisa jabatan yang tersusun sesuai aturan Jumlah dokumen terkait kelembagaan dan analisa jabatan yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi terkait kelembagaan dan analisa jabatan yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 bahan/data 8 dokumen 8 koordinasi	220.500.000					SEKRETARIAT DAERAH

4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah bahan/data terkait fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun sesuai aturan Jumlah dokumen terkait terkait fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi terkait terkait fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 bahan/data 7 dokumen 7 koordinasi	195.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah bahan/data terkait peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang tersusun sesuai aturan Jumlah dokumen terkait terkait peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang tersusun sesuai aturan Jumlah koordinasi terkait terkait peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 bahan/data 5 dokumen 5 koordinasi	110.500.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah bahan/data terkait monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana yang tersusun sesuai aturan Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 bahan/data 2 kegiatan	85.000.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi terkait penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien Jumlah laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang tersusun sesuai aturan 2 koordinasi 1 laporan Hasil	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 koordinasi 1 laporan	138.500.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi terkait pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan			899.400.000					
4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah bahan/data terkait fasilitasi keprotokoleran yang tersusun sesuai aturan Jumlah kegiatan terkait fasilitasi keprotokoleran yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 bahan/data 3 kegiatan	243.000.000					SEKRETARIAT DAERAH

4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah bahan/data terkait fasilitasi komunikasi pimpinan yang tersusun sesuai aturan Jumlah kegiatan terkait fasilitasi komunikasi pimpinan yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 bahan/data 3 kegiatan	73.200.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2,14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan terkait tugas pimpinan yang terdokumentasi sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 kegiatan	583.200.000					SEKRETARIAT DAERAH
4	01				SEKRETARIAT DPRD				42.289.237.192					
4	01				SEKRETARIAT DPRD				42.289.237.192					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Capaian Tugas Fungsi DPRD yang Terlaksana		100%	16.502.737.192					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100%	1.250.737.192					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	terlaksananya pembentukan dan Pembahasan perda	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15 Ranperda	15.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	terlaksananya Pembahasan perda	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15 Ranperda	885.737.192					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	terlaksananya kajian perundang -undangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	100.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersusunnya naskah akademik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	150.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tatib DPRD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	100.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran		6 Kegiatan	117.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	18.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	18.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,02	03	Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	18.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	18.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,02	05	Pembahasan Laporan Semester				15.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dokumen pembahasan pertanggungjawaban APBD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	30.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Pemerintahan		12 Bulan	710.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	80.000.000					SEKRETARIAT DPRD

4	02	02	2,03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang <u>Infrastruktur</u>	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	100.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang <u>Kesejahteraan Rakyat</u>	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	100.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang <u>Perekonomian</u>	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	100.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang <u>sumber daya alam</u>	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	100.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	100.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	terlaksananya pengawasan penggunaan anggaran	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	100.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	dokumen pembahasan pertanggungjawaban APBD terlaksananya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen 1 Kegiatan	30.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Meningkatnya Kapasitas DPRD		100%	1.225.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,04	01	Orientasi DPRD	terlaksananya orientasi DPRD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	30.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,04	02	Bimbingan Teknis DPRD	terlaksananya bimbingan teknis DPRD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	500.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Pulikasi dan dokumentasi dewan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	12 bulan	250.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	tersedianya kelompok pakar dan tim ahli	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Orang	150.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	tersedianya tenaga ahli fraksi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8 Orang	250.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	terlaksananya hubungan masyarakat	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	30.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen program kerja DPRD Terlaksananya Pulikasi dan dokumentasi dewan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	1 dokumen 13 Kegiatan	15.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Terlaksana		100%	1.960.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Dokumen program kerja DPRD Terlaksananya Pulikasi dan dokumentasi dewan terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen 13 Kegiatan 1 Kegiatan	30.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	30.000.000					SEKRETARIAT DPRD

4	02	02	2,05	03	Pelaksanaan Reses	dokumen hasil reses	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Dokumen	1.900.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik		2 Kegiatan	50.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	tersusunnya kode etik DPRD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	30.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	terlaksananya pengawasan kode etik DPRD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	20.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitas Pembahasan Kerja Sama		2 Kegiatan	150.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	terlaksananya fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	100.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	terlaksananya penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	50.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,08		Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya tugas DPRD dengan baik		12 Bulan	11.040.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	10.000.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya laporan kinerja DPRD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	10.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	30.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2,08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	tersedianya fasilitasi tugas pimpinan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	1.000.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	25.786.500.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun		6 Lap.	96.500.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (RKA, DPA, RKPA , DPPA dan Renja)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Laporan	56.500.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya laporan LKJP dan LPPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Laporan	10.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	30.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan		12 Bulan	3.330.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	3.000.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya ATK kegiatan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	60.000.000					SEKRETARIAT DPRD

4	02	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terbayarnya honorarium penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	250.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersedianya laporan akhir tahun SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	10.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	tersedianya laporan semesteran SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	10.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan barang milik daerah		2 Sub Kegiatan	220.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	terbayarnya jasa pengamanan barang milik daerah pada kantor DPRD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 jenis	200.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terbayarnya honorarium penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	20.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	260.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan pakaian olahraga sekretariat DPRD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	132 pasang	50.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya ANJAB dan kamus kompetensi jabatan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Dokumen	10.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8 orang	200.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Adminitrasi Umum		12 Bulan	950.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	19 jenis	10.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8 jenis	30.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga sekretariat DPRD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 jenis	10.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	32 jenis	300.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	250.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	350.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah		12 Bulan	150.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	tersedianya kursi kerja	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14 buah	20.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya		12 bulan	130.000.000					SEKRETARIAT DPRD

4	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	690.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1000 surat	80.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya rekening jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 rekening	200.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 jenis	10.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya alat pembersih kantor dan terbayarnya honor non PNS	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Kegiatan	400.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		100%	720.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	300.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	terpeliharanya meubeler kantor (meja dan kursi)	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 jenis	20.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	50.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor dan terbayarnya honor jasa pengaman kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Kegiatan	300.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Kegiatan	50.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				20.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie		20.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Ketercapaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100%	18.800.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	terbayarnya gaji dan tunjangan Pimpinan dan Angoota DPRD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	18.000.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas dan pakaian adat tradisional DPRD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	200 pasang	400.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tersedianya data hasil Medical Checkup Anggota DPRD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	40 Orang/Bulan	400.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,16		Layanan Administrasi DPRD	Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD		12 Bulan	550.000.000						SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	tersedianya layanan administrasi DPRD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	30.000.000						SEKRETARIAT DPRD

4	02	01	2,16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	tersedianya fasilitas untuk fraksi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	20.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 Kegiatan	100.000.000					SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2,16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	terpenuhinya dan terpeliharanya kebutuhan rumah tangga DPRD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	400.000.000					SEKRETARIAT DPRD
5					URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				140.021.233.597					
5	01				PERENCANAAN				8.862.431.194					
5	01				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				8.862.431.194					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik		100	875.352.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase jumlah dokumen perencanaan yang dibuat		100	553.352.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2,01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30.220.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2,01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	35.260.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah kegiatan forum SKPD/lintas SKPD yang dilaksanakan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	127.075.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan musrenbang kabupaten/kota yang dilaksanakan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	100.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2,01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen bahan koordinasi musrenbang kecamatan yang tersedia	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	180.797.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dan pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan daerah		100	124.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2,02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang tersedia	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2,02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah aplikasi data dan informasi perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan oleh SKPD	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Aplikasi	43.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

5	01	02	2,02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah profil pembangunan daerah yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	51.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Jumlah indicator program yang memenuhi target		84	198.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2,03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	53.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2,03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	115.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100	2.653.074.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang digunakan		100	594.528.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan kemiskinan yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	99.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kali	11.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring bidang pemerintahan yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	20.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan perencanaan bidang pemerintahan yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	203.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan perencanaan bidang pembangunan yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	36.528.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan monitoring bidang pembangunan manusia yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	90.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan bidang pembangunan manusia yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	135.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

5	01	03	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA yang digunakan		100	857.536.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen informasi pembangunan Kabupaten Pinrang Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pajak rokok Jumlah koordinasi antar SKPD, Provinsi dan pusat	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	200 Buku 12 Bulan 12 Bulan	115.646.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	15.587.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen data pengelompokan pelaku usaha/industri Kabupaten Pinrang Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bantuan Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan data pengelompokan pelaku industri Kabupaten Pinrang	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	30.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	78.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi dan monev pembangunan ekonomi kreatif	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	106.162.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	15.662.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen data pengelompokan pelaku usaha/industri Kabupaten Pinrang Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bantuan Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan data pengelompokan pelaku usaha/industri Kabupaten Pinrang	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	30.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen dan peta pengembangan kawasan agropolitan yang tersusun Jumlah dokumen kawasan budidaya perikanan berbasis kakap putih Jumlah dokumen pengembangan ekonomi kreatif	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	466.479.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

5	01	03	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang digunakan		100	1.201.010.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan untuk daerah irigasi yang dihasilkan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	238.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur yang dihasilkan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	340.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait bidang infrastruktur	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kali	12.240.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan DAK yang dihasilkan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	93.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan terkait kewilayahan yang dihasilkan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	339.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait bidang kewilayahan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kali	13.770.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2,03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan data terkait perumahan dan permukiman yang dihasilkan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	165.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	5.334.005.194					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen yang dibuat tepat waktu		100%	57.766.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Dokumen	10.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	6.800.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKPA yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	7.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	3.900.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	4.248.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP, LPPD, SPIP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Dokumen	17.500.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renja yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	8.318.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

5	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan yang dibuat tepat waktu		100%	4.188.179.194					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji yang terbayarkan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	3.787.431.194					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat kelengkapan komputer yang tersedia Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah makan minum rapat yang tersedia Jumlah penggandaan/fotocopy yang tersedia Jumlah premi asuransi BPJS ketenagakerjaan yang terbayarkan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Jenis 37 Jenis 500 Dos 15000 Lembar 16 Orang	61.604.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	32 Jasa	293.907.500					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	10.218.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan bulanan yang tersusun Jumlah laporan semesteran tahun yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Laporan 1 Laporan	35.018.500					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang disusun		100	6.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang dan aset yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Laporan	6.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang memiliki nilai SKP Baik		100	200.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Unit	10.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga dan batik yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Jenis	30.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen ANJAB, BANGKOM, EVJAB, SKJ, SKM dan SOP yang tersusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 Dokumen	50.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Aparatur	110.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kantor yang dilaksanakan		100	407.340.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Jenis	2.122.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Jenis	5.400.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah spanduk, brosur dan map SKPD yang tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Jenis	5.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	24 Bahan Bacaan	25.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan baku untuk pameran yang tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	24 Jenis	15.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi yang terigestrasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50 Kali	354.818.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan sesuai analisa kebutuhan		100	150.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	35.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel kantor yang tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Jenis	35.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Jenis	80.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa layanan kantor yang terpenuhi		100	181.650.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terdistribusi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	300 Surat	13.800.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah iuran TV kabel yang terbayarkan Jumlah rekening kawat faksimili/internet yang terbayarkan Jumlah rekening layanan telepon yang terbayarkan Jumlah rekening listrik yang terbayarkan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Iuran 2 Rekening 1 Rekening 1 Rekening	110.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia Jumlah jasa front office yang terbayarkan Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayarkan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14 Jenis 6 Orang 6 Orang	57.850.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100	143.070.000						
5	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bahan bakar minyak/gas yang tersedia Jumlah jasa sopir yang terbayarkan Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan Jumlah STNK untuk kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2000 Liter 1 Jasa 6 Unit 11 Unit	78.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

5	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang terpelihara	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralai	3 Jenis	5.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralai	4 Jenis	20.070.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralai	1 Unit	40.000.000					
5	02				KEUANGAN				120.313.375.124					
5	02				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				120.313.375.124					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan daerah		WTP Opini	84.140.679.840					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran tersusun sesuai aturan dan tepat waktu		100%	1.058.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	60.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA PPAS tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	40.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang dapat diverifikasi secara akurat dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 Dokumen	27.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang dapat diverifikasi secara akurat dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 Dokumen	6.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang dapat diverifikasi secara akurat dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 Dokumen	26.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang dapat diverifikasi secara akurat dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 Dokumen	23.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait APBD tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	301.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait APBD Perubahan tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	261.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen terkait penyusunan regulasi serta kebijakan anggaran tersusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	314.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah SKPD yang proses pengajuan berkas terkait Laporan Keuangannya dapat diselesaikan secara benar dan akurat		44 SKPD	960.679.840					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SKPD yang dapat diverifikasi dan diproses pencairan SP2Dnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 SKPD	88.179.840					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SKPD yang dapat diverifikasi pengajuan SPDnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 SKPD	178.500.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

5	02	02	2,02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah SKPD yang dapat proses penatausahaan Pembiayaannya dalam kurun 1 tahun Anggaran	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 SKPD	590.000.000						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	umlah SKPD yang berhasil diverifikasi penatausahaan keuangannya secara benar dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 SKPD	104.000.000						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat diselesaikan secara akurat dan tepat waktu		100%	2.122.000.000						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah SKPD yang dalam koordinasi dan penataan pelaksanaan akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 SKPD	210.000.000						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 SKPD	328.000.000						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan terselesaikan tepat waktu Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesteran terselesaikan tepat waktu Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Triwulana terselesaikan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan 1 Laporan 4 Laporan	328.000.000						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dapat dikonsolidasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150.000.000						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD terselesaikan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31 Maret	738.500.000						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah SKPD yang dapat dianalisa secara benar dan akurat Laporan Pertanggungjawabanny a	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 SKPD	200.000.000						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pencatatan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan SKPD yang memenuhi standar akuntansi Pemerintah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	100 %	82.500.000						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD di Kabupaten yang dpat dibina dalam pengelolaan Keuangan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Unit Kerja	85.000.000						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

5	02	02	2,04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terlaksana dengan baik		100 %	80.000.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2,04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase penyaluran bantuan keuangan dapat tersalurkan tepat sasaran dan tepat waktu	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80.000.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD yang dalam pelaporan Pengelolaan barang milik daerah selesai tepat waktu dan akurat		100 %	758.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Aset Tepat Waktu		100 %	758.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2,01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen tentang standar harga yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	58.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2,01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang dapat menyusun RKBUnya selesai tepat waktu dan terverifikasi dengan baik	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 SKPD	21.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2,01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan Inventaris baran Kabupaten tersusun dengan baik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	118.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase barang/aset milik daerah terlindungi secara administrasi dan fisik	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	236.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2,01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik dalam pengawan dan pengendalian yang benar dan sesuai ketentuan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	23.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase tingkat akurasi dokumen Laporan terkait pemanfaatan, pemindahtanganan, pemindahan dan penghapusan barang milik daerah tersajikan dengan akurat	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	44.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2,01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang berhasil menyusun laporan barang milik daerah tepat waktu	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 SKPD	258.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan asli Daerah naik 5 % dengan memperhatikan keadilan untuk semua		5%	1.188.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2,01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan asli Daerah dari Tahun sebelumnya		5%	1.188.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2,01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah daerah/kota yang menjadi study pembandingan dalam pengelolaan keuangan daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kota	12.500.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

5	02	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Peraturan Bupati terkait dengan pengelolaan pajak yang berhasil disusun dengan baik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah lokasi yang menjadi titik penyebarluasan informasi terkait pajak daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Lokasi	21.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2,01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase jumlah sarana/prasarana terkait perpajakan dalam rencana pengadaan terlaksana dengan baik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	222.500.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase atas permohonan pendataan dan pendaftaran objek pajak terselesaikan dengan tuntas	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	87.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2,01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak terpelihara dengan aman (Database dan scanner)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2,01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase jumlah permohonan wajib pajak daerah berhasil ditetapkan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	39.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2,01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase permohonan pelayanan dan konsultasi terkait pajak daerah berhasil diselesaikan/difasilitasi	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	196.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2,01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase verifikasi atas dokumen pelaporan pajak daerah daerah terselesaikan dengan baik dan akurat	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22.500.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase penagihan/pemungutan pajak daerah terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	544.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase jumlah pajak berada dalam pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12.500.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	34.226.695.284					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia dan memenuhi ketentuan		9 dokumen	97.400.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang tersedia, telah terurai dan terjadwal dengan baik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	35.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rencana kerja yang berhasil disusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	12.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rencana kerja perubahan yang berhasil disusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	8.700.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

5	02	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan anggaran yang berhasil disusun tepat waktu 1 dokumen	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	9.500.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran yang berhasil disusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	8.700.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang berhasil disusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	11.500.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja Perangkat daerah yang berhasil disusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	12.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen terkait dengan administrasi Keuangan terselesaikan tepat waktu dan dalam penatausahaan /pengarsipan yang baik		100 %	32.466.295.284					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jumlah ASN pada SKPD BKuD yang dibayarkan gajinya dalam kurun waktu 1 Tahun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	31.566.295.284					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi terkait pelaksanaan tugas ASN terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 %	130.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase proses pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 %	600.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen Laporan akhir tahun SKPD tersusun dengan baik dan tepat waktu 1 dok	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	12.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Bulanan tersusun dengan baik dan tepat waktu Jumlah dokumen Laporan Semesteran tersusun dengan baik dan tepat waktu Jumlah dokumen Laporan Triwulanan tersusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen 1 Dokumen 4 dokumen	158.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi barang Milik Daerah pada SKPD berhasil disusun tepat waktu		3 Dokumen	38.500.000					
5	02	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan barang milik Daerah SKPD terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	12.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang milik Daerah SKPD yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	26.500.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administasi terkait dengan kepegawaian terselesaikan dengan baik dan tepat waktu		100 %	240.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

5	02	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	persentase pengadaan pakaian batik dan pakaian olahraga terealisasi dengan baik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 %	35.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	umlah dokumen terkait dengan administrasi kepegawaian berhasil disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Dokumen	20.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pegawai yang dapat dimonitoring, dievaluasi dan nilai kinerjanya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	100 %	10.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang berhasil disosialisasikan		1 Paket	25.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase bimbingan teknis peraturan perundang- undangan yang dalam skala prioritas dapat dilaksanakan/diikuti dengan baik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	150.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan administasi umum ditindaklanjuti dengan baik		100 %	283.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ersentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhi dengan baik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase keterpenuhan atas kebutuhan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase keterpenuhan atas kebutuhan rapat-rapat dan konsultasi SKPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	250.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan pengadaan atas kebutuhan barang milik daerah		100 %	300.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase keterpenuhan atas kebutuhan rapat-rapat dan konsultasi SKPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase keterpenuhan atas kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang urusan penunjang urusan Pemerintah Daerah terpenuhi dengan baik		100 %	543.500.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat surat masuk dan keluar terregistrasi secara baik dan sesuai penatausahaan kearsipan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Surat	25.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase terbayarkannya tagihan atas pemakaian kebutuhan listrik, komunikasi dan sumber daya air	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	490.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa/tenaga pembersih yang selalu siap dalam menjamin kebersihan taman dan taman	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 orang	28.500.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang dalam kondisi baik dan laik pakai		100 %	258.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda dua Jumlah kendaraan roda empat	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Kendaraan 5 Kendaraan	150.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kecakupan atas pemeliharaan peralatan/perengkapan dan mesin lainnya	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	28.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Asset tak berwujud dalam kondisi yang baik dan beroperasi secara normal		100 %	80.000.000					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	03				KEPEGAWAIAN				7.240.427.279					
5	03				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				7.240.427.279					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN		77%	1.218.364.500					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi		70%						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik		70%						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				289.310.500					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah formasi penerimaan ASN yang diusulkan sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	250 ASN	250.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data PNS/ASN yang dikelola secara efektif dan efisien serta tersedia tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5568 Aparatur	39.310.500					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2,02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pencapaian nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP)		100%	609.656.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2,02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi dan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Penempatan	107.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2,02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala yang diproses administrasinya tepat waktu Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diproses administrasinya tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1400 SK KGB 1000 SK KP	206.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2,02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah jabatan yang sesuai standar kompetensi jabatan Jumlah peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 Jabatan 35 Peserta	296.656.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2,03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pencapaian nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP)		77,01	175.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2,03	03	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah paket administrasi pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Paket	25.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5	03	02	2,03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah peserta diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	200 Peserta	150.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pencapaian nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP)			144.398.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2,04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah penghargaan satya lencana karya satya dan penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	225 Aparatur	130.398.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2,04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase kehadiran PNS dan pemberian TPP Persentase penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	93 % 76 %	14.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	6.022.062.779					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersedia		11 Dokumen	25.672.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Dokumen	4.185.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	3.790.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun tepat waktu		1 Dokumen	4.540.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	2.940.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA- SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	3.439.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah paket/laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Paket/Lapor an	6.778.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan dan laporan keungan yang tersedia			4.377.660.279					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	4.118.887.779					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi perkantoran/pelaksanaan tugas ASN sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8 Paket	78.228.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah layanan jasa administrasi/penatausahaan keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	167.926.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	8.248.500					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Laporan	4.370.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5	03	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jasa layanan dan laporan pengelolaan barang milik daerah yang tersedia		12 Bulan	39.375.000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa layanan dan penyusunan laporan barang milik daerah yang terselesaikan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	39.375.000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		100%	743.662.500						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian bagi aparaturnya yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	58 Pasang	26.325.000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pendataan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pola karier PNS sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket	61.897.500						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Kegiatan	24.775.000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah aparaturnya yang dipulangkan dengan hak pensiun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	280 Aparatur	240.000.000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pemulangan/proses pemakaman bagi PNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket	32.593.000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah aparaturnya yang memperoleh SK Pensiun serta surat keputusan pindah keluar-masuk tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	32.428.000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM aparaturnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tugas dan fungsi sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8 Aparatur	140.000.000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	98 Peserta	35.644.000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM aparaturnya yang mengikuti bimbingan teknis/kursus-kursus singkat pelatihan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15 SDM Aparatur	150.000.000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		95%	267.874.000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket alat listrik dan elektronik untuk bangunan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket	6.591.000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan layanan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket	11.123.000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	20.160.000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	160 Kali/Hari	230.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah / asset yang bertambah / tersedia		15 Buah	165.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Buah	15.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Unit	150.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah		12 Bulan	199.819.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa administrasi persuratan yang terbayarkan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	14.245.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket rekening layanan telepon, listrik, internet dan TV kabel yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	126.984.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan, peralatan dan bahan pembersih kantor terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	58.590.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah, tersedia dan layak pakai untuk menunjang urusan/kegiatan dan pekerjaan			203.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Unit	150.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jasa pemeliharaan mebeleur	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket	3.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 Paket	35.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket gedung kantor yang terpelihara/direhabilitasi dengan baik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket	15.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.320.000.000					
5	04				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				2.320.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan diklat pengembangan kompetensi, manajerial dan fungsional		95%	2.320.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat/ bimtek		99%	2.320.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5	04	02	2,02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan <u>Prajabatan Serta jabatan Fungsional</u>	Jumlah CPNS yang lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar dengan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	90 CPNS	1.140.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2,02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	40 Aparatur	1.180.000.000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				985.000.000					
5	05				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				985.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder		85	985.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2,01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder		85	225.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2,01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data IDSD dan IKKD yang tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Kegiatan	25.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2,01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Dokumen Naskah Akademik yang berkualitas yang mendukung perencanaan pembangunan daerah		3 Kegiatan	200.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2,02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder		85	150.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2,02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Indeks Partisipasi Masyarakat		1 Dokumen	150.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2,03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder		85	300.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2,03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Kajian Koperasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	0					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2,03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kajian BUMD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	150.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2,03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Kajian Kelautan dan Perikanan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	150.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2,04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan		40	310.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2,04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Kajian Teknologi dan Inovasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	175.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2,04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah FGD SIDA Jumlah Whorkshop Inovasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan 1 Kegiatan	100.000.000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

5	05	02	2,04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Kelitbangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	35.000.000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN				300.000.000						
5	06				SEKRETARIAT DAERAH				300.000.000						SEKRETARIAT DAERAH
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/kota		90 %	300.000.000						SEKRETARIAT DAERAH
5	06	02	2,02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah data terkait pelaksanaan kewilayahan perbatasan yang tersedia		3 data	300.000.000						SEKRETARIAT DAERAH
5	06	02	2,02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah bahan/data terkait koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan yang tersedia Jumlah Pembuatan tapal Batas antar Daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 bahan/data 1 tapal batas	300.000.000						SEKRETARIAT DAERAH
6					UNSUE PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				12.194.873.862						
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				12.194.873.862						
6	01				INSPEKTORAT				12.194.873.862						INSPEKTORAT
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti		85 %	5.004.783.700						INSPEKTORAT
6	01	02	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti		85 %	4.408.708.700						INSPEKTORAT
6	01	02	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	71 LHP	1.649.865.000						INSPEKTORAT
6	01	02	2,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	46 LHP	1.195.050.000						INSPEKTORAT
6	01	02	2,01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20 Laporan	284.277.700						INSPEKTORAT
6	01	02	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan keuangan Pemerintah Daerah dan OPD	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8 LHP	296.825.000						INSPEKTORAT
6	01	02	2,01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa dan Kelurahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	18 LHP	570.700.000						INSPEKTORAT
6	01	02	2,01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang dilaksanakan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Kegiatan	245.606.000						INSPEKTORAT
6	01	02	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	9 Laporan	166.385.000						INSPEKTORAT
6	01	02	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Hasil temuan Kasus Pengaduan yang ditindak lanjuti		85%	596.075.000						INSPEKTORAT
6	01	02	2,02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penangan Kasus dan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu yang ditindaklanjuti	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 LHP	596.075.000						INSPEKTORAT

6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan SOP		50%	478.190.000					INSPEKTORAT
6	01	03	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase jenis pengawasan yang memiliki standar dan SOP		100%	14.690.000					INSPEKTORAT
6	01	03	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan yang dilaksanakan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	8.250.000					INSPEKTORAT
6	01	03	2,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan teknis yang disusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Dokumen	6.440.000					INSPEKTORAT
6	01	03	2,02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Peningkatan Nilai Korpsupgah, Survey Integrasi dan Reformasi Birokrasi		95%	463.500.000					INSPEKTORAT
6	01	03	2,02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPPA- SKPD Yang Disusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000					INSPEKTORAT
6	01	03	2,02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan Pendampingan Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Kegiatan	74.800.000					INSPEKTORAT
6	01	03	2,02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Kegiatan	213.200.000					INSPEKTORAT
6	01	03	2,02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pendampingan Asisten dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Kegiatan	75.500.000					INSPEKTORAT
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	6.711.900.162					INSPEKTORAT
6	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%	25.481.250					INSPEKTORAT
6	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Yang Disusun Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) yang disusun Jumlah Dokumen Rencana Strategis yang disusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	6.990.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	2.400.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang Disusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	1.601.250					INSPEKTORAT
6	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	2.400.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA- SKPD yang disusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	2.600.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJiP, LPPD, SPIP, Perjanjian Kinerja yang disusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Dokumen	2.500.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Evaluasi Renja dan Evaluasi Renstra	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Laporan	6.990.000					INSPEKTORAT

6	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan		100%	5.096.510.862					INSPEKTORAT
6	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14 Bulan	4.889.873.862					INSPEKTORAT
6	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah paket Makan Minum rapat/tamu SKPD., ATK Materai dan Asuransi Kesehatan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	53.367.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/Tenaga Teknis Lainnya yang dibayarkan , upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	18 orang	149.735.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	1.760.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Semester yang disusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Lapoaran	1.775.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi barang milik daerah pada SKPD		100%	12.469.050					INSPEKTORAT
6	01	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah LaporanBarang Milik Daerah yang disusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	6.276.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Laporan	6.193.050					INSPEKTORAT
6	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100%	422.940.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olahraga ASN yang diadakan sesuai analisis kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	68 Dokumen	22.400.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen ANJAB, EVJAB,SKJ dan PROBIS	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 Dokumen	25.540.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan Diklat Pembentukan dan Penjengangan Auditor dan P2UPD/Diklat Teknis Subtantib dan Pengembangan Profesi Aparat Pengawasan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	22 Kegiatan	150.000.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Kegiatan	50.000.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	23 Aparatur	175.000.000					INSPEKTORAT

6	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan pelaksanaan administrasi umum SKPD		100%	339.929.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	1 Paket	5.000.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	3 Paket	8.929.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan penunjang Administrasi Umum sesuai rencana kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	5 Kegiatan	15.000.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan (Surat Kabar/Majalah yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	50.000.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jasa Perluasan Informasi/Pameran Pembangunan yang tersedia sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Kegiatan	11.000.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	55 Kegiatan	250.000.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	450.000.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Unit	250.000.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Gedung	200.000.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	199.870.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Pengiriman Berkas terdistribusi dengan Tepat waktu dan Jumlah surat yang terdistribusi dengan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1430 Dokumen	3.650.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket pembayaran jasa komunikasi bulanan (telepon/faxmile, Internet) sesuai rencana kebutuhan , jumlah Paket Pembayaran jasa listrik sesuai rencana kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	24 Rekening	154.128.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor, Penjaga Malam, Tenaga Pembersih, retribusi Sampah, untuk pelaksanaan administrasi umum perkantoran	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	42.092.000					INSPEKTORAT

6	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	164.700.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin dan berkala sesuai rencana kebutuhan Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Paket 25 Unit	52.380.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel sesuai rencana kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	65 Unit	50.000.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya sesuai rencana kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Unit	25.000.000					INSPEKTORAT
6	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen DPPA- SKPD Yang Disusun	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	37.320.000					INSPEKTORAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN				77.145.424.355					
7	01				KECAMATAN				77.145.424.355					
7	01				KECAMATAN WATANG SAWITTO				12.877.518.788					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			6.677.692.788					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.070.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang termutakhirkan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Kegiatan	12.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Termutakhirkan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Kegiatan	4.070.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.794.745.788					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran yang Terlaksana secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Tahun	5.595.156.788					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran yang Terlaksana secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Tahun	101.732.500					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran yang Terlaksana secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Tahun	85.786.500					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran yang Terlaksana secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Tahun	4.070.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran yang Terlaksana secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Tahun	8.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7.800.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO

7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Persentase Barang dan Aset Daerah yang terinventarisasi sesuai aturan yang berlaku	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	7.800.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				183.860.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Persentase Aparatur yang disiplin Mengenakan Pakaian Olah raga sesuai aturan yang Berlaku	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	80 %	17.500.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Persentase Aparatur yang disiplin Mengenakan Pakaian Olah raga sesuai aturan yang Berlaku	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	80 %	166.360.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				211.800.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasikan sesuai analisa Kebutuhan secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Tahun	10.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasikan sesuai analisa Kebutuhan secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Tahun	1.800.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasikan sesuai analisa Kebutuhan secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Tahun	200.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	95 %	100.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	95 %	100.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.417.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bangunan Pemerintah yang Fasilitas Komunikasi Sumber Daya Air dan Listriknya Tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	15.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bangunan Pemerintah yang Fasilitas Komunikasi Sumber Daya Air dan Listriknya Tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 Bulan	9.417.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				239.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50 %	50.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	50 %	189.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
					KELURAHAN BENTENGNGE				774.978.250					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			125.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				92.310.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO

7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran yang Terlaksana secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Bentengnge	1 Tahun	19.110.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran yang Terlaksana secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Bentengnge	1 Tahun	73.200.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.460.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai kebutuhan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 LS	12.460.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				17.800.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Bentengnge	1 LS	17.800.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.430.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bangunan Pemerintah yang Fasilitas Komunikasi Sumber Daya air dan Listriknya tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Bentengnge	12 Bulan	2.430.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			649.978.250						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				649.978.250						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Bentengnge	1 LS	599.978.250						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Bentengnge	1 LS	50.000.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
					KELURAHAN PENRANG				774.978.250						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			125.000.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				79.354.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	1 Tahun	6.154.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana secara Efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	1 Tahun	73.200.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.010.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Presentase Aparatur yang Disiplin Mengenakan Pakaian Olah raga Sesuai Aturan yang Berlaku	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	1 Tahun	4.550.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO

7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Presentase Aparatur yang Disiplin Mengenakan Pakaian Olah raga Sesuai Aturan yang Berlaku	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	1 Tahun	12.460.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.320.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasikan Sesuai Analisa Kebutuhan Secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	1 Tahun	1.320.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.500.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bangunan Pemerintah yang Fasilitas Komunikasi Sumber Daya Air dan Listriknya Tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	1 Tahun	3.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bangunan Pemerintah yang Fasilitas Komunikasi Sumber Daya Air dan Listriknya Tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	1 Tahun	4.500.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19.816.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Infrastruktur kelurahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	1 Tahun	19.816.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			649.978.250					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				649.978.250					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	1 LS	599.978.250					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	1 LS	50.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
					KELURAHAN SALO				774.978.250					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			125.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				67.460.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran yang Terlaksana secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Salo	1 Tahun	6.260.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran yang Terlaksana secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Salo	1 Tahun	61.200.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.260.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Persentase Aparatur yang disiplin Mengenakan Pakaian Olah Raga sesuai atran yang Berlaku	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Salo	1 LS	2.800.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasi sesuai analisa Kebutuhan secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Salo	1 Tahun	12.460.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				720.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO

7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasi sesuai analisa Kebutuhan secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Salo	1 Tahun	720.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35.260.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Salo	1 LS	3.760.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Salo	1 LS	31.500.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.300.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bangunan Pemerintah yang Fasilitas Komunikasi Sumber Daya air dan Listriknya tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Salo	1 Tahun	1.800.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Salo	1 Tahun	4.500.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			649.978.250						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				649.978.250						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Salo	1 LS	599.978.250						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Salo	1 LS	50.000.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
					KELURAHAN MACCORAWALIE				774.978.250						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			125.000.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				88.205.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran yang Terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralalie	1 Tahun	15.005.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran yang Terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralalie	1 Tahun	73.200.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.150.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Persentase Aparatur yang disiplin Mengenakan Pakaian Olah Raga Sesuai aturan yang Berlaku	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralalie	1 Tahun	3.150.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				13.540.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralalie	1 Tahun	1.080.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO

7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasikan sesuai analisa Kebutuhan secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Tahun	12.460.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.450.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Tahun	2.450.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Tahun	7.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.655.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bangunan Pemerintah yang Fasilitas Komunikasi Sumber Daya air dan Listriknya tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Tahun	5.800.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bangunan Pemerintah yang Fasilitas Komunikasi Sumber Daya air dan Listriknya tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Tahun	4.855.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			649.978.250					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				649.978.250					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 LS	599.978.250					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 LS	50.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
					KELURAHAN JAYA				774.978.250					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			125.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				87.200.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Jaya	1 Ls	14.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Jaya	1 tahun	73.200.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.750.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah persentase aparaturnya yang disiplin mengenakan pakaian olahraga sesuai aturan yang berlaku	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Jaya	80 %	3.750.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.500.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan yang terkoordinasi sesuai analisa kebutuhan secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Jaya	1 tahun	4.500.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO

7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19.000.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	jumlah persentase pemenuhan peralatan gedung kantor sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Jaya	95 %	7.000.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah persentase pemenuhan peralatan gedung kantor sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Jaya	95 %	12.000.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.300.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bangunan pemerintah yang fasilitas komunikasi sumber daya air dan listriknya tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Jaya	12 bulan	4.800.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bangunan pemerintah yang fasilitas komunikasi sumber daya air dan listriknya tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Jaya	12 bulan	4.500.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.250.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	sarana dan prasarana infrastruktur kelurahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Jaya	50 %	1.250.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			649.978.250						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				649.978.250						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Jaya	1 LS	599.978.250						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Jaya	1 LS	50.000.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
					KELURAHAN SIPATOKKONG				774.978.250						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			125.000.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				81.940.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sipatokkong	1 Tahun	20.740.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sipatokkong	1 Tahun	61.200.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.960.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Presentase Aparatur yang disiplin Mengenakan Pakaian Olahraga sesuai Aturan yang berlakun	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sipatokkong	1 Ls	3.500.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12.460.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.750.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO

7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Presentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sipatokkong	1 Ls	5.250.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.500.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bangunan Pemerintah yang Fasilitas Komunikasi Sumber Daya Air dan Listriknya	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sipatokkong	1 Tahun	1.500.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sipatokkong	1 Tahun	4.500.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				350.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				350.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			649.978.250					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				649.978.250					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sipatokkong	1 LS	599.978.250					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sipatokkong	1 LS	50.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
					KELURAHAN SAWITTO				774.978.250					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			125.000.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				77.265.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Persentase Barang dan aset Daerah yang terinventarisasi sesuai aturan yang berlaku	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	12 Bulan	22.065.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	1 Tahun	55.200.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.710.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Persentase Aparatur yang Disiplin mengenakan pakaian olahraga sesuai aturan yang berlaku	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	1 LS	5.250.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasikan sesuai analisa Kebutuhan secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	1 Tahun	12.460.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.200.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasikan sesuai analisa kebutuhan secara efektif dan efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	1 Tahun	1.200.000					KECAMATAN WATANG SAWITTO

7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.825.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	1 LS	5.825.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21.550.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bangunan Pemerintah yang Fasilitas Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	12 Bulan	16.250.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	1 Tahun	5.300.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.450.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	1 LS	1.450.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			649.978.250						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				649.978.250						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	1 LS	599.978.250						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	1 LS	50.000.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
					KELURAHAN SIPARAPPE				774.978.250						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			125.000.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				77.340.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4.140.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran yang terlaksana secara Efektif dan Efisien	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Siparappe	1 Tahun	73.200.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21.520.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah persentase Aparatur yang disiplin Mengenakan Pakaian Olahraga sesuai aturan yang berlaku	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Siparappe	1 Tahun	15.040.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Siparappe	1 Tahun	6.480.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.300.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Siparappe	1 LS	6.300.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO

7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.000.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bangunan Pemerintah yang Fasilitas Komunikasi Sumber Daya air dan Listriknya tersedia	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Siparappe	12 Bulan	3.500.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Teredianya Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Siparappe	12 Bulan	4.500.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.840.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Siparappe	1 Tahun	350.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Siparappe	1 LS	11.490.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			649.978.250						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				649.978.250						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Siparappe	1 LS	599.978.250						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Siparappe	1 LS	50.000.000						KECAMATAN WATANG SAWITTO
7	01				KECAMATAN PALETEANG				10.479.870.822						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			5.804.370.822						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.600.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 Kegiatan	2.800.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rencana kerja anggaran yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 Kegiatan	2.200.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rencana kerja anggaran yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 Kegiatan	2.200.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 Kegiatan	2.200.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 Kegiatan	2.200.000						KECAMATAN PALETEANG

7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 Kegiatan	2.800.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 Kegiatan	2.200.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.496.460.822						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan aparatur yang terbayarkan sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 LS	5.361.870.822						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Rapat yang sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	12 Bulan	35.498.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	12 Bulan	94.092.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 Kegiatan	2.800.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan bulanan yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 Kegiatan	2.200.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.200.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 Kegiatan	2.200.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				155.350.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 LS	8.050.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan undangan	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 LS	147.300.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				41.985.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan sesuai anialisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	12 Bulan	7.050.000						KECAMATAN PALETEANG

7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	12 Bulan	4.320.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas keluar Daerah yang terintegrasi dan terlaksana sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 LS	30.615.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31.699.000						
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 LS	17.199.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang diadakan sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 LS	14.500.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				31.584.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Rekening Listrik yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	12 Bulan	10.584.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 LS	21.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				28.492.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	5 Unit	27.882.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpelihara	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 Kegiatan	610.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.500.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7.500.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya Hasil usulan Rapat Musrenbang di Tingkat Kecamatan	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 Kegiatan	7.500.000						KECAMATAN PALETEANG
					KELURAHAN PACONGANG				774.000.000						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			124.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				48.511.000						KECAMATAN PALETEANG

7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Rapat yang sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	12 Bulan	16.711.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Terbayarkan Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	12 Bulan	31.800.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				19.941.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	1 LS	9.500.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	1 LS	10.441.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.020.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	12 Bulan	2.340.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang terintegrasi dan terlaksana sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	1 LS	4.680.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang diadakan sesuai Analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	1 LS	8.500.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	1 LS	500.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				39.528.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Rekening Listrik yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	12 Bulan	3.528.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	12 Bulan	36.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			650.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				650.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Sarana Dan Prasarana Kelurahan yang diadakan	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	1 LS	600.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang		50.000.000						KECAMATAN PALETEANG
					KELURAHAN BENTENG SAWITTO				774.000.000						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			124.000.000						KECAMATAN PALETEANG

7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				46.987.500						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Rapat yang sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	12 Bulan	15.187.500						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	12 Bulan	31.800.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.541.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	1 LS	7.100.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	1 LS	10.441.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.579.500						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	12 Bulan	1.039.500						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Perundang undangan sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	12 Bulan	1.440.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas keluar Daerah yang terintegrasi dan terlaksana sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	1 LS	4.100.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.040.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SJumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang diadakan sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	1 LS	10.040.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.852.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Rekening Listrik yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	12 Bulan	2.352.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	12 Bulan	40.500.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			650.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				650.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diadakan	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	1 LS	600.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang diadakan	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	1 Kegiatan	50.000.000						KECAMATAN PALETEANG
					KELURAHAN MAMMINASAE				786.000.000						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			136.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				43.492.000						KECAMATAN PALETEANG

7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Rapat yang Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Mamminasae	12 Bulan	11.692.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Pinrang, Paleteang, Mamminasae		31.800.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				18.141.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kab. Pinrang, Paleteang, Mamminasae		7.700.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Kab. Pinrang, Paleteang, Mamminasae	1 LS	10.441.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.180.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Mamminasae	12 Bulan	1.080.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas keluar Daerah yang terintegrasi dan terlaksana sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Mamminasae	1 LS	4.100.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.600.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	JUMLAH MEBEL KANTOR YANG DIADAKAN SESUAI DENGAN ANALISA KEBUTUHAN	Kab. Pinrang, Paleteang, Mamminasae	1 LS	1.100.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN KANTOR YANG DIADAKAN SESUAI ANALISA KEBUTUHAN	Kab. Pinrang, Paleteang, Mamminasae	1 LS	12.500.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.587.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Rekening Listrik yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Mamminasae	12 Bulan	3.087.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umumKantor yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Mamminasae	12 Bulan	52.500.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			650.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				650.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diadakan	Kab. Pinrang, Paleteang, Mamminasae	1 LS	600.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000						KECAMATAN PALETEANG
					KELURAHAN TEMMASSARANGNE				774.000.000						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			124.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				46.791.500						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Rapat yang sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	12 Bulan	14.991.500						KECAMATAN PALETEANG

7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	12 Bulan	31.800.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.891.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 LS	7.450.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sumber Daya Apaaratur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Undangan	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 LS	10.441.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				8.050.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 LS	2.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	12 Bulan	870.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	12 Bulan	1.080.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas keluar Daerah yang terintegrasi dan terlaksana sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 LS	4.100.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.441.500						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 LS	2.941.500						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 LS	4.500.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				41.970.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Rekening Listrik yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	12 Bulan	1.470.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	12 Bulan	40.500.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.856.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara 5 unit	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran gnge	1 LS	1.856.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			650.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				650.000.000						KECAMATAN PALETEANG

7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diadakan	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran nge	1 LS	600.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang diadakan	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassaran nge	1 Kegiatan	50.000.000						KECAMATAN PALETEANG
					KELURAHAN LALENG BATA				774.000.000						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			124.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				45.760.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Rapat yang sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	12 Bulan	13.960.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	12 Bulan	31.800.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				24.441.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	1 LS	14.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	1 LS	10.441.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.460.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	12 Bulan	1.360.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas keluar Daerah yang terintegrasi dan terlaksana sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	1 LS	4.100.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				47.028.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Rekening Listrik yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	12 Bulan	6.528.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	12 Bulan	40.500.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.311.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara 5 Unit	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	1 LS	1.311.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			650.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				650.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diadakan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	1 LS	600.000.000						KECAMATAN PALETEANG

7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang diadakan	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	1 Kegiatan	50.000.000						KECAMATAN PALETEANG
					KELURAHAN MACINNAE				786.000.000						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			136.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				47.814.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Rapat yang sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	12 Bulan	16.014.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	12 Bulan	31.800.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.091.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	1 LS	6.650.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang undangan	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	1 LS	10.441.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.380.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	12 Bulan	600.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	12 Bulan	1.680.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas keluar Daerah yang terintegrasi dan terlaksana sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	1 LS	4.100.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.988.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	1 LS	9.988.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52.941.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Rekening Listrik yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	12 Bulan	441.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	12 Bulan	52.500.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.786.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara 5 Unit	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	1 LS	1.786.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			650.000.000						KECAMATAN PALETEANG

7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				650.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diadakan	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	1 LS	600.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang diadakan	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	1 Kegiatan	50.000.000						KECAMATAN PALETEANG
7	01				KECAMATAN TIROANG				8.228.410.322						KECAMATAN TIROANG
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			3.850.410.322						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen	5.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun		1 Dokumen	5.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun		1 Dokumen	5.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun		1 Dokumen	5.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun		1 Dokumen	5.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Dokumen	5.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.445.410.322						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara yang Terbayarkan	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	12 Bulan	3.310.410.322						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Perkantoran sesuai Analisa Kebutuhan		12 Bulan	35.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang Terbayarkan		12 Bulan	90.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Akuntabel dan Tepat Waktu		1 Dokumen	5.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Semesteran SKPD yang Akuntabel dan Tepat Waktu		2 Dokumen	5.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	2 Laporan	7.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				180.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Atribut ASN sesuai Analisa Kebutuhan		100 %	20.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tersusun dan Tepat Waktu		2 Dokumen	10.000.000						KECAMATAN TIROANG

7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan secara Efektif dan Efisien sesuai Analisa Kebutuhan		10 Kali	150.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				33.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan sesuai Analisa Kebutuhan		3 unit	3.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor sesuai Analisa Kebutuhan		12 Bulan	5.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur SKPD yang meningkat Wawasan, Pengetahuan dan Minat Bacanya		12 Bulan	5.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang Teregistrasi dan Terlaksana sesuai Analisa Kebutuhan		12 Bulan	20.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				70.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan sesuai Analisa Kebutuhan		6 Unit	20.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan sesuai Analisa Kebutuhan		10 Unit	50.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				44.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Rekening Listrik yang Terbayarkan Tepat Waktu		12 Bulan	20.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terbayarkan Tepat Waktu		12 Bulan	24.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara		2 Unit	20.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor yang Terpelihara	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	2 Unit	0						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dengan Baik		1 Bangunan	20.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya Hasil Usulan Rapat Musrembang di Tingkat Kecamatan		1 Kegiatan	10.000.000						KECAMATAN TIROANG

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			0					KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				0					KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diadakan	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	20 Kegiatan	0					KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang diadakan	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	10 Kegiatan	0					KECAMATAN TIROANG
					KELURAHAN				724.000.000					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			124.000.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				37.500.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Perkantoran sesuai Analisa Kebutuhan		12 Bulan	11.500.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				26.000.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.000.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6.000.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.500.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				4.500.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.600.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.000.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.400.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				22.000.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel				8.000.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.000.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.000.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.000.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				42.000.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.400.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.400.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			600.000.000					KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				600.000.000					KECAMATAN TIROANG

7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diadakan		4 Kegiatan	500.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang diadakan		2 Kegiatan	100.000.000						KECAMATAN TIROANG
					KELURAHAN				724.000.000						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			124.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				37.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				26.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				4.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.600.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.400.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				22.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel				8.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				42.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.400.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.400.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			600.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				600.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diadakan		4 Kegiatan	500.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang diadakan		2 Kegiatan	100.000.000						KECAMATAN TIROANG
					KELURAHAN				724.000.000						

7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah				124.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					37.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					11.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					26.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					6.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					4.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.600.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.200.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.400.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel					8.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					14.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					4.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					42.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.400.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.400.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi				600.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					600.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diadakan		4 Kegiatan		500.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang diadakan		2 Kegiatan		100.000.000						KECAMATAN TIROANG
					KELURAHAN					724.000.000						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah				124.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					37.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					11.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					26.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000						KECAMATAN TIROANG

7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					6.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					4.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.600.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.200.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.400.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel					8.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					14.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					4.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					42.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.400.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.400.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi				600.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					600.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diadakan		4 Kegiatan		500.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang diadakan		2 Kegiatan		100.000.000						KECAMATAN TIROANG
					KELURAHAN					724.000.000						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah				124.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					37.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					11.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					26.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					6.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					4.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.600.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.200.000						KECAMATAN TIROANG

7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.400.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel					8.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					14.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					4.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					42.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.400.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.400.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi				600.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					600.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diadakan		4 Kegiatan		500.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang diadakan		2 Kegiatan		100.000.000						KECAMATAN TIROANG
					KELURAHAN					748.000.000						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah				148.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					37.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					11.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					26.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					6.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					4.500.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.600.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.200.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.400.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel					8.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					14.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					4.000.000						KECAMATAN TIROANG

7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					66.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.400.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.400.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi				600.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					600.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diadakan		4 Kegiatan		500.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang diadakan		2 Kegiatan		100.000.000						KECAMATAN TIROANG
7	01				KECAMATAN MATTIRO BULU					5.466.637.378						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah				3.885.537.378						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					19.585.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang			2.410.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Tersusun	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang	1 Dokumen		2.515.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Tersusun	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang	1 Dokumen		2.900.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		2.760.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang	3 Dokumen		9.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.141.237.378						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Terbayarkan Gaji Dan Tunjangan	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang	12 Bulan		2.912.637.378						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran yang terlaksana secara Efektif Dan Efisien	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	12 Bulan		200.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Tersusun	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang	1 Dokumen		5.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tersusun Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang	12 Bulan		20.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					3.600.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					11.400.000						KECAMATAN MATTIRO BULU

7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang	12 Bulan	11.400.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				151.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Aparatur Sipil Negara Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	23 ASN	21.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang Undangan Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	1 Ls	120.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				75.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	1 Ls	2.500.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran yang terlaksana secara Efektif Dan Efisien Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	12 Bulan 12 Bulan	5.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Tersedia Yang terbayarkan Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang	12 Bulan	2.500.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan Bahan Material Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ls	5.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Teregistrasi Dan Terlaksana Sesuai Analisa Kebutuhan Persentase Perjalanan Dinas	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	12 Bulan 12 Bulan	60.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin Sesuai Analisa Kebutuhan Persentase Pemenuhan Sarana Dan PrasaranaPeralatan Kantor	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	1 Ls 1 Unit	12.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	1 Ls	0						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				30.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang Terbayarkan Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang	12 Bulan	15.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan Kantor Terbayarkan Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	12 Bulan	15.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				435.315.000						KECAMATAN MATTIRO BULU

7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang	1 Unit 12 Bulan	40.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatkan Kualitas Gedung Kantor	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	2 Unit	395.315.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,13		Penataan Organisasi				10.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				5.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyusunan Dokumen	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang Ditingkat Kecamatan Tersedianya Usulan Hasi Rapat Musrenbang di Tingkat Kecamatan	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	1 Kegiatan 2 Kegiatan	10.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			33.600.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				33.600.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa Yang Terkoordinir Dalam Penggunaan Dana Desa	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang	7 Desa	33.600.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
					KELURAHAN MANARANG				766.000.000						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			134.500.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				40.500.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang		40.500.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang	12 Bulan	6.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.500.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				5.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang		12.500.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				28.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan		5.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU

7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan		3.000.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.000.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15.000.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel		Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang		5.000.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang		10.000.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.000.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang		25.000.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.500.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang	1 Unit	2.500.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.500.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang		1.500.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			630.000.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				630.000.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan		600.000.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Manarang		30.000.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
					KELURAHAN PADAIDI				771.500.000					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			141.500.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				40.500.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Perkantoran Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Padaidi	12 Bulan	40.500.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.000.000					KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Padaidi	12 Bulan	6.000.000					KECAMATAN MATTIRO BULU

7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.500.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Aparatur Sipil Negara Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Padaidi	1 Ls	5.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Bimbingan Tehknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	1 Orang	12.500.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				28.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	1 Ls	5.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Administrasi Perkantoran Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	12 Bulan	3.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Teregistrasi Dan Terlaksana Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	12 Bulan	20.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Aparatur Sipil Negara Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	1 Ls	5.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Padaidi	1 Ls	10.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.500.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa kantor Yang Terbayarkan Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Padaidi	12 Bulan	30.500.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.500.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemelihaaran Kendaraan Dinas	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	1 Unit	2.500.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				630.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				630.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Umum	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Padaidi	1 Ls	600.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padaidi	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Padaidi	2 Kgt	30.000.000						KECAMATAN MATTIRO BULU
7	01				KECAMATAN SUPPA				4.505.171.612						KECAMATAN SUPPA
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			3.831.285.812						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37.500.000						KECAMATAN SUPPA

7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dimutakhirkan	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	2 Dokumen	20.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Termutakhirkan	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 Kegiatan	3.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang Termutakhirkan	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 Kegiatan	3.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Termutakhirkan	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 Kegiatan	3.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Termutakhirkan	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 Kegiatan	3.500.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah rencana kerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	3 Dokumen	5.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.451.517.812						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang termutakhirkan	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	24 Bulan	3.167.517.812						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	3 Kegiatan	272.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Laporan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 LS	12.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.500.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	12 Bulan	5.500.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				167.618.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Pakaian Olah Raga ASN	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 LS	25.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa		5.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase ASN yang meningkat kecakapan dan keterampilannya	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	10 Kegiatan	137.618.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				53.150.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Persentase Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	12 Bulan	4.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	12 Bulan	2.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia sesuai analisa	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	12 Bulan	14.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	12 Bulan	33.150.000						KECAMATAN SUPPA

7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.200.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 LS	20.200.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening layanan listrik yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	12 Bulan	30.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	12 Bulan	45.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.800.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	12 Bulan	9.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	12 Bulan	3.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara secara rutin	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	2 Gedung	8.800.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 Kegiatan	11.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			18.250.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				18.250.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pengawasan Penggunaan Dana Desa	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	12 Bulan	18.250.000						KECAMATAN SUPPA
					KELURAHAN WATANG SUPPA				320.554.000						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			120.554.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26.908.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 Tahun	26.908.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 Tahun	6.000.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.691.000						KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Saran Pakaian Olahraga ASN	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 Ls	5.250.000						KECAMATAN SUPPA

7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Aparatur Sipil Negara Yang Meningkatkan Kecakapan dan Keterampilannya	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 Tahun	10.441.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.326.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 Tahun	1.440.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 Tahun	5.886.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.500.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Didadakan Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 Kegiatan	9.500.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.129.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.764.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 Tahun	53.365.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			200.000.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				200.000.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 LS	183.680.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	1 Kegiatan	16.320.000					KECAMATAN SUPPA
					KELURAHAN TELLUMPANUA				324.081.800					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			124.082.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				35.202.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	12 Bulan	35.202.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.000.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusun administrasi barang milik daerah	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	12 bulan	6.000.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				16.741.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase pemenuhan sarana pakaian olahraga asn	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	1 Ls	6.300.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase aparatur sipil negara yang meningkat kecakapan dan keterampilan	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	12 Bulan	10.441.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				9.936.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	12 Bulan	1.080.000					KECAMATAN SUPPA

7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	12 Bulan	8.856.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11.200.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	1 Kegiatan	11.200.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45.003.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening layanan listrik yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	12 Bulan	3.528.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	12 Bulan	41.475.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			199.999.800					KECAMATAN SUPPA
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				199.999.800					KECAMATAN SUPPA
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	1 LS	183.641.000					KECAMATAN SUPPA
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	1 LS	16.358.800					KECAMATAN SUPPA
7	01				KECAMATAN MATTIRO SOMPE				4.967.010.584					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			4.067.010.584					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan dokumen evaluasi perangkat daerah			27.960.000					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang tersusun	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	2 Dokumen	4.150.000					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	1 Dokumen	3.410.000					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKPA yang tersusun	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	1 Dokumen	3.500.000					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	1 Dokumen	3.650.000					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang tersusun	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	1 Dokumen	3.700.000					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP SKPD yang tersusun	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	1 Dokumen	6.000.000					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang dihasilkan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	2 Dokumen	3.550.000					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			3.053.411.484					KECAMATAN MATTIRO SOMPE

7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ketersediaan gaji dan tunjangan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, <u>Langnga</u>	12 Bulan	2.716.010.584						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, <u>Langnga</u>	12 Bulan	77.500.900						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan terlaksananya penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, <u>Semua Kelurahan</u>	12 Bulan	250.700.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, <u>Langnga</u>	1 laporan	4.650.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan bulanan SKPD	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, <u>Semua Kelurahan</u>	12 laporan	4.550.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksanan secara efektif dan efesien			221.050.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ketersediaan pakaian dinas pegawai	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, <u>Semua Kelurahan</u>	27 pegawai	65.000.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, <u>Semua Kelurahan</u>	4 dokumen	6.050.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti ASN	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, <u>Semua Kelurahan</u>	10 Kegiatan	150.000.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan pelayanan administrasi publik sesuai analisis kebutuhan			170.600.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, <u>Semua Kelurahan</u>	12 Bulan	5.100.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, <u>Semua Kelurahan</u>	12 Bulan	15.500.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, <u>Semua Kelurahan</u>	12 Bulan	150.000.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			145.400.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan operasional / lapangan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, <u>Semua Kelurahan</u>	2 Unit	50.000.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, <u>Semua Kelurahan</u>	2 Jenis	25.400.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, <u>Semua Kelurahan</u>	4 Jenis	70.000.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketercapain pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			36.000.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya jasa komunikasi dan listrik	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, <u>Semua Kelurahan</u>	12 Bulan	15.500.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, <u>Semua Kelurahan</u>	12 Bulan	20.500.000						KECAMATAN MATTIRO SOMPE

7	01	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan			412.589.100					KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kab. Pinrang, Matiro Sompe, Semua Kelurahan	2 unit	55.589.100				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan mesin	Kab. Pinrang, Matiro Sompe, Semua Kelurahan	12 Bulan	7.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung yang terpelihara	Kab. Pinrang, Matiro Sompe, Semua Kelurahan	1 gedung	350.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
					KELURAHAN PALLAMEANG			450.000.000					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			110.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				71.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi ASN	Kab. Pinrang, Matiro Sompe, Pallameang	12 Bulan	44.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan keuangan		12 Bulan	27.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak	Kab. Pinrang, Matiro Sompe, Pallameang	10000 Lembar	3.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan yang diikuti	Kab. Pinrang, Matiro Sompe, Pallameang	10 Kegiatan	3.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				33.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya pelayanan umum kantor	Kab. Pinrang, Matiro Sompe, Pallameang	12 Bulan	33.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			340.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				340.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah fasilitas yang dibangun	Kab. Pinrang, Matiro Sompe, Pallameang	2 Fasilitas	300.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kab. Pinrang, Matiro Sompe, Pallameang	2 Kegiatan	40.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
					KELURAHAN LANGGA				450.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			110.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				71.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi ASN	Kab. Pinrang, Matiro Sompe, Langga	12 Bulan	44.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan keuangan	Kab. Pinrang, Matiro Sompe, Langga	12 Bulan	27.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.000.000				KECAMATAN MATIRO SOMPE

7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	10000 Lembar	3.000.000					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat yang dihadiri	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	10 Kegiatan	3.000.000					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				33.000.000					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	12 Bulan	33.000.000					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			340.000.000					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				340.000.000					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah fasilitas yang dibangun	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	2 Fasilitas	300.000.000					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	2 Kegiatan	40.000.000					KECAMATAN MATTIRO SOMPE
7	01				KECAMATAN LANRISANG				3.705.675.694					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			2.939.675.694					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				46.707.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan atau dokumen yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	6 Dokumen	21.000.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang termutakhirkan	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	1 Dokumen	5.302.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	1 Dokumen	6.380.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	1 Dokumen	5.302.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan yang di susun	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	1 Dokumen	5.533.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyampaian Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	6 Dokumen	3.190.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.057.583.694					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	12 bulan	1.900.620.694					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	12 bulan	23.445.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pelaksanaan Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	12 bulan	105.600.000					KECAMATAN LANRISANG

7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	1 Dokumen	5.742.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	4 Dokumen	22.176.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				51.744.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	3 laporan	51.744.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				165.139.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah terpenuhinya pakaian aparatur	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	20 orang	8.000.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan kepegawaian yang tersusun	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	12 bulan	7.139.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Iplementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	12 orang	150.000.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				138.053.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang memiliki instalasi listrik yang memadai	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	2 Bangunan	848.320					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	3 Buah	2.000.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket cetakan dan penggandaan penunjang administrasi umum sesuai rencana kebutuhan	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	5 Paket	5.000.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Keikutsertaan Aparat Kecamatan dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	25 kegiatan	130.204.680					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				82.500.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah tercapainya laporan Barang Milik Daerah yang di susun	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	1 set	32.500.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tercapainya laporan Barang Milik Daerah yang di susun	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	1 Ls	50.000.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.969.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah terbayar listrik	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	12 bulan	12.642.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	12 Bulan	13.327.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				371.980.000					KECAMATAN LANRISANG

7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah tercapainya pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	12 Bulan	41.980.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	2 Bangunan	330.000.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				18.000.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.000.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terpenuhinya kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	1 Kegiatan	18.000.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				80.000.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				80.000.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan desa	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	6 Desa	80.000.000						KECAMATAN LANRISANG
					KELURAHAN LANRISANG				668.000.000						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			228.000.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				93.000.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 Bulan	15.000.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang terbayarkan	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	12 Bulan	78.000.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				32.000.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah terpenuhinya pakaian aparatur	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	12 Stel	7.000.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	2 orang	25.000.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				52.500.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket cetakan dan penggandaan penunjang administrasi umum sesuai rencana kebutuhan	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	1 Ls	7.500.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparat Kelurahan dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	1 ls	45.000.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35.000.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	1 ls	35.000.000						KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.500.000						KECAMATAN LANRISANG

7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	12 Bulan	6.500.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pembayaran jasa pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	12 Bulan	9.000.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				440.000.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				440.000.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang		411.730.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	1 Kegiatan	28.270.000					KECAMATAN LANRISANG
7	01				KECAMATAN PATAMPANUA				7.303.585.508					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			4.197.435.508					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.700.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	1 laporan	4.400.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	1 laporan	2.500.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	1 laporan	2.200.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	1 laporan	2.200.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	1 laporan	2.200.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	5 Dokumen	13.200.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.906.635.508					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	12 Bulan	3.756.435.508					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	12 Bulan	40.000.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	12 Bulan	98.000.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	12 Bulan	3.400.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	4 laporan	8.800.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				18.600.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	12 Bulan	18.600.000					KECAMATAN PATAMPANUA

7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				71.050.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik yang di adakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah pakaian olahraga yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	25 Lembar 25 Stel	12.250.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	4 Dokumen	8.800.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai analisa kebutuhan Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	20 Kali 20 Orang	50.000.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				58.435.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	1 paket	2.285.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kelengkapan komputer sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	1 paket	5.000.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhinya bahan cetak dan penggandaan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	18500 Lembar	5.550.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Eksemplar	600.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Kali	45.000.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				53.695.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	jumlah meubeler yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 buah	20.000.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	33.695.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22.820.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening layanan internet yang terbayarkan tepat jumlah rekening layanan listrik yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan 12 Bulan	14.820.000					KECAMATAN PATAMPANUA

7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan sesuai analisa kebutuhan jumlah jasa petugas administrasi, operator komputer, jasa tenaga pembersih dan honor Kepala lingkungan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket 12 Bulan	8.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				39.500.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	2 unit	29.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lain	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	2 unit	500.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedia dan terpeliharanya gedung kantor yang baik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	10.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.500.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7.500.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	150 Orang	7.500.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			1.500.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.500.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	jumlah	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	4 Kelurahan	1.500.000						KECAMATAN PATAMPANUA
					KELURAHAN TONYAMANG				783.287.500						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			148.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				44.268.800						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terpenuhinya barang dan jasa administrasi tugas ASN	Kab. Pinrang, Patampanua, Tonyamang	12 Bulan	12.068.800						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Tonyamang	12 Bulan	30.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Tonyamang	1 Kegiatan	2.200.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.250.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian yang diadakan sesuai analisis kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Tonyamang	20 Pasang	5.250.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA

[illegible]

7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Kelurahan	Kab. Pinrang, Patampanua, Tonyamang	1 Kelurahan	35.287.500						KECAMATAN PATAMPANUA
					KELURAHAN TEPPPO				771.287.500						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			136.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				44.268.800						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terpenuhi administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Pinrang, Patampanua, Teppo	12 Bulan	12.068.800						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Teppo	12 Bulan	30.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Teppo	1 Kegiatan	2.200.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.250.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian yang diadakan sesuai analisis kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Teppo	20 Pasang	5.250.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bintek	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kali	10.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.500.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Teppo	5 paket	500.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kelengkapan komputer sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Teppo	2 paket	1.500.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pinrang, Patampanua, Teppo	2 paket	900.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kab. Pinrang, Patampanua, Teppo	12 Bulan	600.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Teppo	40 kali	4.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	jumlah meubeler yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Teppo	4 buah	4.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Teppo	2 buah	5.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.940.200						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening listrik dan internet yang terbayarkan	Kab. Pinrang, Patampanua, Teppo	12 Bulan	2.440.200						KECAMATAN PATAMPANUA

7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan sesuai analisa jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Teppo	1 paket 12 Bulan	54.500.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.041.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	Kab. Pinrang, Patampanua, Teppo	1 unit	2.041.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedia dan terpeliharanya gedung kantor yang baik	Kab. Pinrang, Patampanua, Teppo	1 unit	1.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			635.287.500						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				635.287.500						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Teppo	1 Kelurahan	600.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan		35.287.500						KECAMATAN PATAMPANUA
					KELURAHAN BENTENG				771.287.500						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			136.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				44.268.800						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terpenuhinya barang dan jasa administrasi tugas ASN	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	12 Bulan	12.068.800						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	12 Bulan	30.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	1 Kegiatan	2.200.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.250.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian yang diadakan sesuai analisis kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	20 Pasang	5.250.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	1 Kegiatan	10.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.500.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	5 paket	500.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kelengkapan komputer sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	2 paket	1.500.000						KECAMATAN PATAMPANUA

7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	2 paket	900.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	12 Eksemplar	600.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	20 kali	4.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	jumlah meubeler yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	2 buah	4.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	5 buah	5.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.940.200						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening listrik dan internet yang terbayarkan	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	12 Bulan	2.440.200						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan sesuai analisa kebutuhan jumlah jasa petugas adminstras, operator komputer, jasa tenaga pembersih dan honor kepala lingkungan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	1 paket 12 Bulan	54.500.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.041.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	1 unit	2.041.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedia dan terpeliharanya gedung kantor yang baik	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	1 unit	1.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			635.287.500						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				635.287.500						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	1 Kelurahan	600.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Kelurahan	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	1 Kelurahan	35.287.500						KECAMATAN PATAMPANUA
					KELURAHAN MACCIRINNA				771.287.500						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			136.000.000						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				44.268.800						KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terpenuhinya barang dan jasa administrasi tugas ASN	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	12 Bulan	12.068.800						KECAMATAN PATAMPANUA

7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	12 Bulan	30.000.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	1 Kegiatan	2.200.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				16.825.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik yang di adakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Pakaian Olahraga yang di adakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	13 Lembar 13 Pasang	6.825.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	1 kali	10.000.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.925.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	5 paket	500.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat kelengkapan komputer sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	2 buah	925.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	12 Bulan	900.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	12 Bulan	600.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	21 kali	4.000.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.000.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	jumlah meubeler yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	2 buah	4.000.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	2 buah	4.000.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.940.200					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening listrik dan internet yang terbayarkan	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	12 Bulan	2.440.200					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan sesuai analisa kebutuhan jumlah jasa petugas administrasi, operator komputer, jasa tenaga pembersih dan honor kepala lingkungan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	12 Bulan 12 Bulan	54.500.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.041.000					KECAMATAN PATAMPANUA

7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	1 unit	2.041.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedia dan terpeliharanya gedung kantor yang baik	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	1 unit	1.000.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			635.287.500					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				635.287.500					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	1 Kelurahan	600.000.000					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pemberdayaan	Kab. Pinrang, Patampanua, Maccirinna	1 Kelurahan	35.287.500					KECAMATAN PATAMPANUA
7	01				KECAMATAN DUAMPANUA				7.930.427.241					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			4.887.527.241					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.950.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 Ls	2.200.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 LS	2.900.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKPA SKPD	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 LS	2.900.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA SKPD	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 LS	350.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan		600.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan LPPD dan LKJIP	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 LS	2.000.000					KECAMATAN DUAMPANUA

7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 LS	2.000.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.962.932.041						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkup SKPD	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 LS	3.730.427.241						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya ATK dan Makan Minum Rapat	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 Ls	133.444.800						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terbayarnya honor panitia pelaksana kegiatan	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	1 LS	90.600.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 LS	8.460.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7.275.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa Kab. Pinrang, Duampanua, Data	1 LS	7.275.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				322.220.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas harian dan Hari tertentu sesuai kebutuhan tersedianya Pakain Hari Hari tertentu	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 ls 1 LS	84.100.000						KECAMATAN DUAMPANUA

7	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Laporan ANJAB dan ENJAB	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	1 LS	6.300.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Memiliki kecakapan dan Keterampilan Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Kecakapan dan Keterampilan	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 LS 1 ls	231.820.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				102.817.500						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Penerangan Kantor	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 LS	2.500.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor dan Rujab	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 LS	54.567.500						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 LS 1 LS	45.750.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				101.650.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel yang Memadai	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 LS	7.350.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan mesin yang memadai	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 LS	94.300.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				317.534.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Internet dan Listerik Tersedianya jasa komunikasi (internet) dan listrik	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 LS 2 Rekening	84.393.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan terpelihara Terciptanya Lingkungan Kantor yang bersih dan terpelihara	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 ls 1 LS	233.141.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.148.700						KECAMATAN DUAMPANUA

7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Biaya Pajak Perizinan Kendaraan	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 LS	60.148.700						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.500.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7.500.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya Dana koordinasi Sinergi Perencanaan	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 LS	7.500.000						KECAMATAN DUAMPANUA
					KELURAHAN				595.389.400						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			114.720.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				31.313.700						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya ATK dan makan minum Kelurahan sesuai kebutuhan		1 ls	9.713.700						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				21.600.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.320.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.320.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				22.720.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				9.500.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Aparatursipil negara dan yang memiliki kecakapan dan keterampilan		1 ls	13.220.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.200.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel				3.200.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.895.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.940.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				41.955.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.271.300						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2.271.300						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			480.669.400						KECAMATAN DUAMPANUA

7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					480.669.400						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					462.669.400						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keberhasilan dan Kesejahteraan masyarakat	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	1 ls		18.000.000						KECAMATAN DUAMPANUA
					KELURAHAN					601.571.900						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah				114.302.500						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					36.152.500						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					14.552.500						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honor Panitia Pelaksana Kegiatan		1 ls		21.600.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					4.320.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					4.320.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					23.100.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					7.800.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					15.300.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.700.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.700.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					6.950.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel					4.950.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2.000.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.000.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					5.400.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					33.600.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.080.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					3.080.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi				487.269.400						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					487.269.400						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	tersedianya sarana dan prasarana yang memadai		1 Tahun		469.269.400						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kursus pelatihan yang dilaksanakan		1 Tahun		18.000.000						KECAMATAN DUAMPANUA
					KELURAHAN TATAE					615.989.400						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah				128.320.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					32.172.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya ATK dan Makan Minum Rapat Sesuai Kebutuhan	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	1 Ls		10.572.000						KECAMATAN DUAMPANUA

7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	1 Ls	21.600.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.320.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	1 Ls	4.320.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				23.720.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Hari- Hari Tertentu Sesuai Kebutuhan	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	1 Ls	10.500.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kecakapan dan Keterampilan	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	1 Ls	13.220.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.500.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur yang Memadai	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	1 Ls	8.000.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin yang Memadai	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	1 Ls	5.500.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				54.608.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi (Internet) dan Listrik	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	1 Ls	7.236.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya Lingkungan Kantor yang Bersih dan Terpelihara	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	1 Ls	47.372.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			487.669.400						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				487.669.400						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	1 Ls	471.709.400						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan/Pelatihan Pada Kelurahan Tatae	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	1 Ls	15.960.000						KECAMATAN DUAMPANUA
					KELURAHAN BITTOENG				611.931.900						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			124.262.500						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				33.442.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya ATK, dan Makan Minum Rapat sesuai Kebutuhan	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	1 Ls	11.842.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				21.600.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.320.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan barang Milik daerah	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	1 Ls	4.320.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				23.720.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				10.500.000						KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				13.220.000						KECAMATAN DUAMPANUA

7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.432.500					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Kelurahan yang Memadai	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	1 tahun	2.432.500					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11.200.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel		Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng		4.500.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.700.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49.148.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi (internet) dan listrik	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	2 rekening	7.236.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya Lingkungan Kantor yang Bersih dan Terpelihara	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	1 ls	41.912.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			487.669.400					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				487.669.400					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	1 tahun	471.769.400					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kursus Pelatihan yang dilaksanakan	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	1 tahun	15.900.000					KECAMATAN DUAMPANUA
					KELURAHAN DATA				610.517.400					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			122.920.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				33.475.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya ATK, dan Makan minum Rapat sesuai Kebutuhan	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	1 ls	11.875.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honor Panitia pelaksanaan Kegiatan	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	1 ls	21.600.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.320.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.320.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				14.970.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1.750.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya aparatur sipil negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	1 ls	13.220.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.840.000					KECAMATAN DUAMPANUA

7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	1 ls	1.440.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan rujab yang memadai	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	1 tahun	3.000.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Pinrang, Duampanua, Data		3.400.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.500.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Tesedianya mebeleur yang memadai	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	1 Tahun	2.000.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin yang memadai	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	1 Tahun	11.500.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.815.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Pinrang, Duampanua, Data		6.795.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Pinrang, Duampanua, Data		42.020.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			487.597.400					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				487.597.400					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	1 tahun	468.949.400					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kursus pelatihan yang dilaksanakan	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	1 tahun	18.648.000					KECAMATAN DUAMPANUA
7	01				KECAMATAN BATULAPPA				3.206.290.129					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		50%	2.453.790.129					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tereleasaikannya Perencanaan, Penganggaran ,dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah		100%	27.640.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terselesaikan dengan baik dan Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.070.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Tersusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.970.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun dengan baik dan Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.070.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.120.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.120.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	4 Dokumen	12.290.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah		100%	2.087.260.129					KECAMATAN BATULAPPA

7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarkan Tepat Waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	12 bulan	1.956.290.129						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terpenuhi sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	12 bulan	30.326.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksana Penatausahaan Keuangan terbayarkan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	12 bulan	81.000.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	1 laporan	3.170.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan Keuangan tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	12 bulan	16.474.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah		100%	21.203.300						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah yang tersusun sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	1 laporan	532.300						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah terpenuhi sesuai kebutuhan terbayarkan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	12 bulan	20.671.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesentase Pelaksanaan Administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	159.070.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang terpenuhi sesuai ke2butuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	1 kegiatan	5.950.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	12 bulan	3.120.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	16 orang	150.000.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi umum perangkat Daerah		100%	66.405.300						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	1 LS	2.576.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan/Fotocopy yang disediakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	12 bulan	2.979.300						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	12 bulan	60.850.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	41.000.000						KECAMATAN BATULAPPA

7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeleur Rumah Jabatan/dinas dan Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	8 unit	8.000.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	2 unit	15.000.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	3 unit	18.000.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	24.810.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Layanan Listrik yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	3 rekening	4.500.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	12 bulan	20.310.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	26.401.400					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan yang tersedia dan Terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	12 bulan	20.000.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor terpelihara dengan baik secara rutin	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	3 gedung	6.401.400					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		50%	4.500.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	4.500.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan terlaksana dengan baik dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	1 kegiatan	4.500.000					KECAMATAN BATULAPPA
					KELURAHAN KASSA				748.000.000					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			148.000.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				25.758.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Kassa	12 Bulan	13.158.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Pelaksana Transaksi Keuangan terbayarkan Sesuai Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Kassa	12 Bulan	12.600.000					KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.000.000					KECAMATAN BATULAPPA

7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan dan laporan pengelolaan dan barang dan asset yang tersusun dan terbayarkan sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Kassa	12 Bulan	6.000.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.000.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Kassa	100 persen	3.000.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.247.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Kassa	1 LS	3.150.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				660.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah dan ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Kassa	1 LS	16.437.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.600.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeleur Rumah Jabatan/ dinas dan Kantor yang diadakan Sesuai dengan analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Kassa	1 LS	9.100.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Kassa	1 unit	10.000.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor diadakan sesuai dengan Analisa Kebutuhan	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Kassa	2 kegiatan	6.500.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				63.613.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Listrik terbayarkan setiap bulan sesuai analisa kebutuhan		1 rekening	2.683.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Kassa	12 Bulan	60.930.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.782.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor terpelihara secara rutin dan jasa pemeliharaan gedung kantor terbayarkan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Kassa	12 Bulan	3.782.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			600.000.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				600.000.000						KECAMATAN BATULAPPA

7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kassa sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Kassa	100 persen	580.000.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Kassa	1 LS	20.000.000						KECAMATAN BATULAPPA
7	01				KECAMATAN LEMBANG				4.871.260.269						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			3.851.750.269						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.550.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan		5.000.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan		3.050.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.500.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LKJIP	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	5 Dokumen	5.000.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.889.310.269						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji ASN	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	2.721.260.269						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Tugas ASN dengan baik	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	12 Bulan	100.000.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan yg terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	12 bulan	65.000.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan		3.050.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan aset dengan baik			17.700.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	terpenuhinya Jasa Pejabat Pengadaan, Pengurus dan Penyimpan Barang	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	12 bulan	17.700.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yg terlaksana secara efektif dan efisien.			218.900.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian khusus yg seragam	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	1 kegiatan	18.900.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	12 bulan	200.000.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan.			115.860.000						KECAMATAN LEMBANG

7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan		2.500.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Penggandaan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	12 Bulan	13.360.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat rapat kordinasi dan konsultasi	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	12 Bulan	100.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			215.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel		Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan		45.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan		70.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan		50.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tercapainya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor lainnya	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	12 bulan	50.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			53.100.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan		28.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan		25.100.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			325.330.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dengan baik	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	12 Bulan	100.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia dan terpeliharanya peralatan dan mesin dengan baik	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	12 bulan	6.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				180.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan		39.330.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.500.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tercapainya Pelaksanaan Musrembang Kecamatan			7.500.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan		7.500.000					KECAMATAN LEMBANG

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			0						KECAMATAN LEMBANG
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat			0						KECAMATAN LEMBANG
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Infrastruktur Kelurahan		3 Kegiatan	0						KECAMATAN LEMBANG
					KELURAHAN TADOKKONG				530.960.000						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			210.960.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				77.020.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10.020.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan yg terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	12 bulan	67.000.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.500.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya Jasa pengurus barang pembantu	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	12 bulan	4.500.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				24.200.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian khusus seragam	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	1 kegiatan	4.200.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	1 kegiatan	20.000.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.240.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan cetak dan penggandaan	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	12 Bulan	1.740.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	12 bulan	3.500.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89.500.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	1 Unit	36.000.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair yang diadakan	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	1 Unit	4.500.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong		20.000.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	1 kegiatan	20.000.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yg diadakan	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	3 Unit	9.000.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.500.000						KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Listrik dan Internet yg dibayarkan	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	24 bulan	4.000.000						KECAMATAN LEMBANG

7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah alat kebersihan dan jasa pembersih	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	12 bulan	6.500.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedia dan terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	1 kegiatan	0					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong		0					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnyadengan baik	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	1 kegiatan	0					KECAMATAN LEMBANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				320.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				320.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	5 Kegiatan	300.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan SDM Kelurahan	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	1 Kegiatan	20.000.000					KECAMATAN LEMBANG
					KELURAHAN BETTENG				481.050.000					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			161.050.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				79.350.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Pinrang, Lembang, Betteng Kab. Pinrang, Lembang, Betteng		8.550.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan yg terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	12 bulan	70.800.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.500.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya Jasa pengurus barang pembantu	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	12 bulan	4.500.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				24.200.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian khusus seragam	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	1 Kegiatan	4.200.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	1 Kegiatan	20.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.500.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan cetak dan penggandaan	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	12 bulan	1.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	12 bulan	3.500.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				42.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair yang diadakan	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	2 Buah	8.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	3 Unit	26.000.000					KECAMATAN LEMBANG

7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Pinrang, Lembang, Betteng Kab. Pinrang, Lembang, Betteng		0					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.500.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan yg diadakan dan Jasa Tenaga Pembersih yg dibayarkan	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	12 bulan	6.500.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			320.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				320.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan		3 kegiatan	300.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	2 kegiatan	20.000.000					KECAMATAN LEMBANG
7	01				KECAMATAN CEMPA				3.603.566.008					KECAMATAN CEMPA
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			3.128.566.008					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			8.000.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya RKA Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	4.000.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya RKA Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	4.000.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			2.408.290.008					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	12 Bulan	2.253.566.008					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	12 Bulan	50.424.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	12 Bulan	100.300.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	4.000.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			275.410.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas ASN Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	40.600.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya ASN Yang Terampil Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	12 Bulan	234.810.000					KECAMATAN CEMPA

7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			109.366.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan ASN Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	12 Bulan	1.080.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya ASN Yang Terampil Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	12 Bulan	108.286.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			102.100.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	30.000.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	60.000.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan		12.100.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			96.170.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	12 Bulan	20.870.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	12 Bulan	75.300.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			129.230.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Eporasional Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	12 Bulan	40.830.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor Di Kecamatan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	88.400.000					KECAMATAN CEMPA
					KELURAHAN CEMPA				475.000.000					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			125.000.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				34.420.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Kelurahan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	12 Bulan	13.320.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Di Kelurahan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	12 Bulan	21.100.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.150.000					KECAMATAN CEMPA

7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas ASN Di Kelurahan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	1 Kegiatan	9.000.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya ASN Yang terampil Di Kelurahan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	1 Kegiatan	11.150.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.060.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan ASN Di Kelurahan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	1 Kegiatan	1.080.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya ASN Yang terampil Di Kelurahan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	1 Kegiatan	4.980.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				23.000.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Di Kelurahan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	1 Kegiatan	23.000.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				41.370.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Di Kelurahan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	3 Kegiatan	1.470.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Di Kelurahan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	12 Bulan	39.900.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi			350.000.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				350.000.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Infrastruktur Di Kelurahan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	1 Kegiatan	334.000.000					KECAMATAN CEMPA
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya SDM Yang Berkualitas Di Kelurahan Cempa	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	1 Kegiatan	16.000.000					KECAMATAN CEMPA
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				5.261.122.714					
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				5.261.122.714					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				5.261.122.714					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	2.254.122.714					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan		100 %	35.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 dokumen	10.500.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen	5.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen	3.500.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen	3.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen	3.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP dan LPPD dan Perjanjian Kinerja yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 dokumen	6.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Renja yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 dokumen	4.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD		100 %	1.627.162.714					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gajinya terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	25 orang	1.424.462.714					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	45 jenis	37.800.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	14 orang	153.400.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 laporan	6.500.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 laporan	5.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengelolaan barang milik daerah SKPD		100 %	13.560.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 orang	13.560.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD		100 %	177.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	35 pasang	15.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 dokumen	12.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sdm yang mengikuti bimtek sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	15 orang	150.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum SKPD		100 %	150.500.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	8 jenis	2.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 jenis	4.500.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis spanduk yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 jenis	4.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	17 jenis	20.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah program kegiatan yang terkoordinasikan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 program	120.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	93.400.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 buah	8.400.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 unit	25.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 unit	60.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah SKPD		100 %	68.500.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terdistribusi	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	80 surat	2.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 bulan	30.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				36.500.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah SKPD		100 %	89.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				81.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 unit	4.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 unit	4.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase partisipasi lembaga/organisasi masyarakat pada setiap kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan		80%	80.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase partisipasi lembaga/organisasi masyarakat pada setiap kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan		100 %	80.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah peserta pendidikan bela negara	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 orang	60.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah fasilitasi kebangsaan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	20.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase cakupan sosialisasi pendidikan politik		100 %	1.327.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	03	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase ketercapaian pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik		100 %	1.327.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah pendidikan politik	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 kali	107.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah laporan pemantauan politik daerah Jumlah parpol yang mendapat bantuan keuangan	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 laporan 11 parpol	1.220.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan			1.080.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				1.080.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas mendapat bantuan hibah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Ormas	1.080.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				140.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				140.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah fasilitas kerukunan umat beragama	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 kali	70.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 kali	70.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase ketercapaian peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			380.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				380.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kejadian konflik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 kali	350.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kejadian konflik	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	12 kali	30.000.000					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

6.1.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang menetapkan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 6.1
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Pinrang
Tahun 2020-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian	Target	
			2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,44	4,50	5,00
2	PDRB Per Kapita	(Juta Rp)	52,93	56,23	60,61
3	Tingkat Pengangguran	%	4,19	3,85	3,45
4	Indeks Gini		0,375	0,345	0,330
5	Tingkat Kemiskinan	%	8,86	8,56	8,46
6	Indeks Pembangunan Manusia	%	71,26	71,35	71,50

6.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Adapun target IKU disajikan sebagai berikut.

Tabel 6.2
Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Target	
		2019	2020	2021	2022
1	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	52,44	52,67	55	60
2	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	61,54	62,86	63,35	65
3	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	84,75%	85,99%	86,25%	87,35%
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,12%	71,26%	71,35%	71,5%
5	Indeks Pendidikan	62,89%	62,95%	63,15%	63,4%
6	Indeks Kesehatan	75,98%	76,32%	76,88%	77,35%
7	Indeks Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	-	40%	42,50%
8	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	81%	73%	77%	80%
9	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani	71,45%	85,90%	88%	90%
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,92%	68,11%	69,81%	71,21%
11	Persentase Penduduk Miskin	8,46%	8,86%	8,56%	8,46%
12	Indeks Gini	0,336	0,375	0,345	0,33
13	Pertumbuhan Ekonomi	6,53%	0,44%	4,5%	5%
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,91%	4,19%	3,85%	3,45%
15	Indeks Perkembangan Wilayah	59	78	80	82
16	Indeks layanan infrastuktur Kabupaten	73,34%	76,20%	78,6%	82,5%
17	Indeks layanan infrastuktur Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang	25,52%	37,38%	40%	50%
18	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	68,29%	68,74%	69,25%	69,75%
19	Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	36,84%	36,84%	36,84%	36,84%

20	Indeks Resiko Bencana	179,20	205	190	185
21	Produktivitas tanaman pangan utama (padi) per hektar	6 ton/ha	5,9 ton/ha	6,1 ton/ha	6,15 ton/ha
22	Persentase Kelompok tani kelas Madya	2,43%	3,73%	4,43%	5%
23	Penguatan Cadangan Pangan	156,064%	173,062%	183,062%	190,062%

6.1.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*outcome based*) pada masa jabatan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah kabupaten.

Tabel 6.3
Capaian dan Target Capaian Indikator Kinerja Kunci
Kabupaten Pinrang 2020-2022

No.	FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian 2020	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI				
	Pertumbuhan PDRB (%)	0,44	4,5	5
	PDRB per kapita (Juta Rp.)	52,93	56,23	60,61
	Laju Inflasi	2,37	2,5-3,5	2,5-3,5
	Indeks Gini	0,375	0,345	0,33
	Persentase Penduduk diatas garis Kemiskinan	91,14	91,44	91,54
	Tingkat Kemiskinan	8,86	8,56	8,46
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,26	71,35	71,5
	Indeks Perkembangan Wilayah	78	80	82
	Indek layanan infrastruktur Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang	37,38	40	50
KESEJAHTERAAN SOSIAL				
	Indeks Pendidikan	62,95	63,15	63,4
	Angka melek huruf	99,99%	100%	100%
	Angka rata-rata lama sekolah	7,86	7,89	8,01
	Indeks Kesehatan	76,32	76,88	77,35
	Angka usia harapan hidup	69,61	69,95	70,16
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59,11%	60,50%	62,50%
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,19	3,85	3,45
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,99	86,25	87,35
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PHH) Konsumsi	89,5	89,7	89,9
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	82,01	82,3	82,4

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

	Penguatan Cadangan Pangan	173,06%	183,06%	190,06%
	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	20,95%	20,97%	21%
	Kontribusi sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB	11,70%	11,95%	12,67%
	Produksi Sektor Pertanian	638.983 (ton/tahun)	666.158 (ton/tahun)	668.708 (ton/tahun)
	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	100%	100%	100%
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,55	1,69	1,72
	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	20,81%	19,75%	19,80%
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	14,42%	14,50%	14,70%
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	6,14%	6,45%	6,50%
	Indeks Reformasi Birokrasi	52,67	55	60
	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	62,86	63,35	65
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Persentase Pengeluaran konsumsi Pangan per kapita	51,41	51	50,75
2	Nilai tukar petani	105,13	106	107
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	48,59	49	49,25
4	Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten	75,8	78,6	82,5
5	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	68,74	69,25	69,75
6	Indeks Resiko Bencana	205	190	185
7	Persentase Angka kriminalitas yang tertangani	85,90%	88%	90%
8	Indeks Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	40%	42,50%
PELAYANAN UMUM				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN			
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,83%	94,62%	100%
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,28%	96,46%	100%
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	92,06%	94,05%	100%
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97,27%	97,95%	100%
2	KESEHATAN			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

2.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah penduduk	0,07%	0,07%	0,08%
2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	100%
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,47%	100%	100%
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,13%	100%	100%
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	69,88%	100%	100%
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	64,55%	62,50%	60%
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	58,29%	58%	56,70%
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,08%	93,40%	93,60%
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	93,49%	100%	100%
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	97,56%	98,19%	98,81%
3.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	100%	100%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

3.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	65,73%	71,73%	82,77%
3.8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	89,90%	100%	100%
3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	-	-
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	49,67%	45,50%	42,50%
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,62	3,48%	2,62%
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75,76%	76,26%	77,15%
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	363.417 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	83,51%	83,81%	84,00%
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit
6	SOSIAL			
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR				
7	TENAGA KERJA			
7.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0,92%	1,02%	1,03%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

7.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,68%	1,25%	1,75%
7.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah)	7.982,56	8.975,95	10.098,20
7.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	36,69%	37,50%	40.25%
7.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	51,55%	55%	57%
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	9,19%	10,16%	10,63%
8.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,12%	0,09%	0,07%
8.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,05%	0,05%	0,04%
9	PANGAN			
9.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	35,43%	36,40%	37,25%
10	PERTANAHAN			
10.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	21,25%	21,25%	45,50%
10.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	22,50%	22,50%	42,20%
10.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	21,18%	21,18%	41,10%
10.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	16,60%	38,80%	59,90%
10.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	21%	21%	44%
10.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	20%	20%	41%
11	LINGKUNGAN HIDUP			
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	68,74%	69,25%	69,75%
11.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	57,19%	60%	70%
11.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
12.1	Perekaman KTP Elektronik	96,91%	98%	98,75%
12.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	26,91%	30%	40%
12.3	Kepemilikan akta kelahiran	96,74%	98%	98,75%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

12.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	72,09%	73%	74%
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
13.1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	56%	60%	65%
13.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	5	5%	8%
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
14.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,64	2,11	2,1
14.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	65,02	93%	95%
14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,48%	11,12%	10,87%
15	PERHUBUNGAN			
15.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1,3	1,3	1,3
15.2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,44	0,44	0,44
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
16.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%
16.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	15,38%	20%	25%
16.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi SasaranPenyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90,97%	92%	93%
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
17.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	13,10%	15%	16%
17.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	8,94%	10%	11%
18	PENANAMAN MODAL			
18.1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	1,95%	4,76%	4,76%
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,52%	5,90%	6%
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,39%	80%	85%
19.3	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Tidak Ada	5	5
20	STATISTIK			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

20.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
20.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%
21	PERSANDIAN			
21.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	25%	50%
22	KEBUDAYAAN			
22.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	100%	100%
23	PERPUSTAKAAN			
23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	Tidak ada	71,2	72
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	30,26	32	33
24	KEARSIPAN			
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	75%	77%	78%
24.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	33,33%	33,60%	34,00%
URUSAN PILIHAN				
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
25.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	77.259,41 Ton	80.513,93 Ton	83.925,1 Ton
26	PARIWISATA			
26.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-100%	15,30%	15,40%
26.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-88,01%	3,22	5,41
26.3	Tingkat Hunian Akomodasi (verifikasi ulang)	12,24%	11,25%	11,45%
26.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,55%	1,69%	1,72%
26.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,72%	1,70%	1,80%
27	PERTANIAN			
27.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,9 ton/ha	6,22 ton/ha	6,24 ton/ha
27.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	9,66%	7,25%	5,44%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

28	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
28.1	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di di Kabupaten / Kota	-	100%	100%
29	PERDAGANGAN			
29.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	92,31%	100%	100%
29.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	40,34%	50%	55%
29.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	63,17%	73,10%	82,76%
30	PERINDUSTRIAN			
30.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	4,11%	4,50%	5%
30.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	39,20%	45%	55%
30.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	13,67%	50%	75%
30.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	100%	100%
30.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	100%	100%
30.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	50%	55%
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
31	PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
31.1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	18,63%	18,65%	19%
31.2	Rasio PAD	9,99%	10,20%	10,20%
31.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP	Level 3	Level 3	Level 3
31.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3
31.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	81,94%	82%	82%
31.6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
32	PENGADAAN		C	
32.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	0%	0%

32.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	10,60%		9,95%
32.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	34,82%	31,72%	32%
33	KEPEGAWAIAN			
33.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	266,67%	289,81%	315,90%
33.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	61,32%	61,32%	61,32%
33.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,74%	7,88%	8,26%
34	MANAJEMEN KEUANGAN			
34.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-6,29%	-6,16%	-5,75%
34.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	4,23%	5%	4,75%
34.3	Manajemen Aset	100%	100%	100%
	1. Apakah ada daftar aset tetap	Ya	Ya	Ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap	Ya	Ya	Ya
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan	Ya	Ya	Ya
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ya	Ya	Ya
34.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	5,93%	6,50%	6,30%
35	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK			
35.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	102,42%	100%	100%
35.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	25%	50%	70%

6.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktupencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana

pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.4
Capaian dan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Pinrang 2019-2022

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan	Indikator	Target Nasional	Realisasi		Target	
				2019	2020	2021	2022
I	Pendidikan						
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	77,27%	92,53%	100%	100%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	81,61%	97,27%	100%	100%
II	Kesehatan						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94%	90,31%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan	100%	93,31%	90,73%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	105%	91,23%	100%	100%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93,43%	95,65%	100%	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	73%	100%	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	97%	100%	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94%	90,36%	100%	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	91%	94%	100%	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	87%	83,21%	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa berat	Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	92%	93,39%	100%	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	96,98%	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	91,88%	100%	100%
III	Pekerjaan Umum						
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	-	-	100%	100%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	96,99%	97,56%	100%	100%
IV	Perumahan Rakyat						
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	-	-	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	-	-	100%	100%
V	Trantibumlinmas						
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	90%	90%	100%	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	90%	-	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	85%	-	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	60%	-	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	61,39%	84%	100%	100%
VI	Sosial						
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%

2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	-	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	-	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	-	-	100%	100%

6.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Daerah. Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.4
Capaian dan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
Kabupaten Pinrang 2019-2022

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi		Target Tahun	
				2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN							
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS / Dinas Sosial	%	8,45	8,31	8,2	7,8
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	95	95	95	95
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	DINAS TENAGA KERJA	%	79.75	79.75	90,44	91,36
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	%	100	100	100	100
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	RT	9.542	8.900	PM	PM
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	89,5	87	89	91
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas PUPR	%			53,68	69,12
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N DAN DINAS KEPENDUDU KAN	%	99,8	99	93,2	95,42
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N DAN DINAS KEPENDUDU KAN	%	95	98,32	84,99	90,2

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	DISPERINDA GEM	%	95,05	95,79	96,5	97
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	PM	2	1	PM	PM
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Kecamat an	12	12	12	12
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	4.504.000.000	1.595.000.000	1.325.000.000	1.000.000.000
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial	KK	118	79	90	90
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN							
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINAS KESEHATAN	%	6,2	4,8	5,75	5,5
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan	%	100	100	100	100
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINAS KESEHATAN	%	10,97	8,72	21,1	18,4
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	DINAS KESEHATAN	%	9,76	9,6	9,16	9,15
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINAS KESEHATAN	%	2,44	2,05	7,8	7,5
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DINAS KESEHATAN	%	11,86	7,66	42	39
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINAS KESEHATAN	%	68,03	72,27	45	50
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan	PPH	89,3	89,3	90	90
2.4	Pada tahun 2030, menjaminsistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.						
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Pertanian , Bappeda	Ha	44.861	44.861	44.861	44.861
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA							
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINAS KESEHATAN	Per 100.000 KH	83,43	67,72	217	205
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	DINAS KESEHATAN	%	93,1	97,23	89	91
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	93,1	97,23	89	91
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.						
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	per /1000KH	0,27	0,14	33	32
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	per /1000KH	3,75	3,25	12,2	11,6
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	per /1000KH	0,28	0,27	19,5	18,6
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINAS KESEHATAN	%	0,011	0,01	0,009	0,008
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Per 100.000	182,2	106,2	120,8	186,5
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINAS KESEHATAN	Per/1000	0,19	0,15	0,14	0,13
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	DINAS KESEHATAN	KAB	1	1	1	1
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	DINAS KESEHATAN	KAB	1	1	1	1
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	9	9	8,9	8,9
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINAS KESEHATAN	%	36,6	36,6	36,2	35,9
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	19,8	19,9	20,1	20,5
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	DINAS KESEHATAN	%	1.067	0	0	0
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINAS KESEHATAN	KAB	1	1	1	1
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas P2KBP3A	%	64,7	65,02	65,82	66,62

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas P2KBP3A	%	64,7	65,02	65,82	66,62
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas P2KBP3A	%	16,3	18,17	19,31	20,46
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas P2KBP3A	%			3,81	3,45
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas P2KBP3A	%			2,11	2,1
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Jiwa	314	302	330	339
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Jiwa	313.810	301.982	329.592	339.480
3,9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.						
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	DINAS KESEHATAN	%	0	0	0	0
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.						
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	9	9	8,9	8,9
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.						
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.						
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINAS KESEHATAN	per 1000	2	4,67	4,94	5,03
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA							
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N	%	98	98	98	100
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N	%	71,95	88,95	88,39	88,39

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N	%	73,68	70,18	70,18	73,68
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N DAN DINAS KEPENDUDU KAN	%	110,56	100,04	97,5	99
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N DAN DINAS KEPENDUDU KAN	%	105,98	100,06	95	97,5
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N DAN DINAS KEPENDUDU KAN	%	9,01	9,07	9,22	9,35
4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.						
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N DAN DINAS KEPENDUDU KAN	%	71,21	73,5	77,85	83,5
4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.						
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N DAN DINAS KEPENDUDU KAN					
	SD = Perempuan/Laki-laki X100		%	93,05	93,81	93,2	95,42
	SMP = Perempuan/Laki-laki X100		%	99	99,78	99,65	99,75
	SMA,SMK,SLB = Perempuan/Laki-laki X100		%	103,5	104,65	100	100
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N DAN DINAS KEPENDUDU KAN	%	100	100	100	100
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N DAN DINAS KEPENDUDU KAN	%	100	100	100	100
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.						
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N	%				
	SD = 304/323X100		%	94	94	96	98
	SMP = 52/58X100		%	89	89	92	95
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.						
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N		50	38,47		
	TK		%	33,4	32,18	25	27
	SD		%	54,7	41,52	69	70
	SMP		%	61,6	41,71	68	70
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN							
5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.						
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas P2KBP3A	Program	1	1	1	1
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas P2KBP3A	%	0,03%	0,01	0,01	0,01
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas P2KBP3A	%	0,03%	0,03	0,03	0,02

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas P2KBP3A	%	0,02%	0,01	0,01	0,01
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas P2KBP3A	%	83,33%	90	90	90
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.						
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas P2KBP3A	%		0,17	0,15	0,13
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dinas P2KBP3A	%		21,9	22	22
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas P2KBP3A	%		4,43	3,81	3,45
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas P2KBP3A	%		10	30	30
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas P2KBP3A	%		6,25	30	30
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.						
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas P2KBP3A	%	11,5	11,48	10,49	9,34
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas P2KBP3A	%	64,7	65,02	65,82	66,62
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.						
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Diskominfo	%	56	65	91	92
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA							
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas PUPR	%			95,01	96,57
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas PUPR	%				
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	desa	108	108	108	108

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas kesehatan	desa	30	40	109	109
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.						
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Parameter Kualitas Air Sungai	70	70	65	65
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.						
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	PSDA	Web	1	1	0	0
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	PSDA	Sungai	1	1	1	1
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	PSDA	Lembaga	80	170	300	200
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA							
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	Persen	5,81	-	7,9	7,95
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	Ribu Rupiah	52.053	-	60.610	64.229
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	DINAS TENAGA KERJA	%	27.87	27.87	34,12	34,97
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DINAS TENAGA KERJA	%	33.17	33.17	32,63	33,33
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) ke layanan keuangan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	%	79,57	91	85	90
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DINAS TENAGA KERJA	Rp/Jam	17.877	19.399	27.576	33,186
8.5.2.(a)	tingkat setengah pengangguran.	DINAS TENAGA KERJA	%	34.00	41.33	42,21	41,04
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	DINAS TENAGA KERJA	%	2,91	4,19	3,4	3,23
8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.						

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DINAS TENAGA KERJA	%	23.86	10.87	17,51	14,82
Target SDGs 08 : 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.							
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		-	-	-	-
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	%	1,68	9,73	1,3	1,32
8.9.1.(a)	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Org	35	-	45	50
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Org	61.528	7.379	62.000	62.700
8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.						
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	%	26,23	66%	69	72
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI							
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	dermaga	4	4	4	4
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	pelabuhan	1	1	1	1
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	DISPERINDAGEM	%	10,17	-1,05	10,67	11,17
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	DINAS TENAGA KERJA	%	37.54	37.54	36,95	37,89
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.						
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Diskominfo	%	40,1	51,47	53	55

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Diskominfo	%	84,4	90,17	91	92
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo	%	40,1	51,47	53	55
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA							
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS		0,336	0,375	0,335	0,33
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	%	8,45	8,31	6,85	6
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas PMD	Desa Tertinggal	19	4	2	2
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas PMD	Desa Tertinggal	16	12	10	8
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Dinas PMD	Desa	0	0	0	1
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN							
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.						
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	per 100.000/orang	2	1	PM	PM
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	EWS	1	1	1 EWS	1 EWS
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	4.504.000.000	1.595.000.000	1.325.000.000	1.000.000.000
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.						
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	Ton %	100	100	18,549.14 (100%)	19,687.94 (100%)
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN							
12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.						
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	863.907 kg	27,098.18 Ton	17,047.59	18,903.35
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA							
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.						
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1	1
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	per 100.000/orang	2	1	PM	PM

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.						
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLH	Dokumen	1	1	1	1
Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar						
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DINAS PERIKANAN	orang	1.131	896	409	558
Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI							
15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.						
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DLH	Dokumen	0	0	0	1
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIKAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN							
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.						
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polres	Kasus	4	4	3	2
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Polres	%	0,028	0,029	0,025	0,02
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.						
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	93,51	94,57	94,57%	94,57%
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	100	100	100	100
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ortala	%	2,46		4	4,5
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	SETDA (PEMBANGUNAN)	%	11,33	15,17	14,87	16,64
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ortala	%	CC (nilai 2,44)	belum terbit	B (Nilai 70)	B (Nilai 71)
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.						
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas P2KBP3A	%	10%	10%	30	30

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022**

16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas P2KBP3A	%	6,25%	6,25%	30	30
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	%	100	99	100	100
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	%	96	97	98	99
16,1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.						
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Diskominfo	Orang	43	43	44	83
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	0,68	0,75	0,75	0,75
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	0,17	0,16	0,16	0,16
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	9,55	8,94	9	9
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Diskominfo	%	4,7	7,04	8	9
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Diskominfo	%	40,1	51,47	53	55
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.*	BPS	%	100	98,92	98	100
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	100	86,67	90	93
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Disdukcapil	-	ada	ada	Ada	Ada
	jumlah kelahiran		org	1029	310		
	Jumlah kematian		org	1766	635		
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengunju ng	11.857	12.952	14.047	15.547
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)*	BPS	%	100	95,24	98	100

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2022 sesuai dengan fungsinya yaitu dokumen perencanaan teknis tahunan, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, maka 3 pilar pelaku pembangunan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) di Kabupaten Pinrang diharapkan dapat mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini. Bagi Dinas/Badan/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pinrang, RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD). Namun demikian, apabila terdapat perubahan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan struktur pembiayaan daerah, maka akan diakomodir dalam RKPD Perubahan Tahun 2022.

7.2 Kesimpulan

Dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2022, diharapkan sebagai pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta secara koordinatif sesuai dengan tujuan dan sasaran serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dan dapat terakomodir berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi di masyarakat.

Indikator keberhasilan pelaksanaan RKPD akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaku pembangunan sehingga sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

